BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah pada tanggal 20 September Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cata Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Perintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp917.647.866.316,00 (Sembilan Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) mengalami Pengurangan sejumlah Rp13.490.592.615,00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah) dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 yang semula berjumlah Rp931.138.458.931,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)

(2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Pendapatan Daerah;
   b. Belanja Daerah; dan
   c. Pembiayaan Daerah

(3) Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
   a. Pendapatan Daerah
      1. Semula Rp900.945.548.727,00
      2. Berkurang Rp31.888.688.197,00
      jumlah Pendapatan Daerah
      setelah Perubahan Rp869.056.860.530,00
   b. Belanja Daerah
      1. Semula Rp930.138.458.931,00
      2. Berkurang Rp13.490.592.615,00
      jumlah Belanja Daerah
      setelah Perubahan Rp916.647.866.316,00
      (Surplus/Defisit)
      setelah Perubahan (Rp47.591.005.786,00)
   c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan
   a. Semula Rp30.192.910.204,00
   b. Bertambah Rp18.398.095.582,00
   jumlah Penerimaan Pembiayaan
   setelah Perubahan Rp48.591.005.786,00
2. Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp1.000.000.000,00

jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp47.591.005.786,00
sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah
setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah
   1. Semula Rp40.661.242.655,00
   2. Bertambah Rp789.407.385,00
   jumlah Pendapatan Asli Daerah
   setelah Perubahan Rp41.450.650.040,00
b. Pendapatan Transfer
   1. Semula Rp848.486.966.072,00
   2. Berkurang Rp32.678.095.582,00
   jumlah Pendapatan Transfer
   setelah Perubahan Rp815.808.870.490,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
   semula Rp11.797.340.000,00
   jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
   Setelah Perubahan Rp11.797.340.000,00

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah
   Pajak Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp20.111.728.377,00
b. Retribusi Daerah
   Retribusi Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp4.190.959.515,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp1.318.019.763,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula Rp15.040.535.000,00
2. Bertambah Rp789.407.385,00

jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp15.829.942.385,00

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula Rp782.396.713.718,00
2. Berkurang Rp29.066.969.461,00

jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp753.329.744.257,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula Rp66.090.252.354,00
2. Berkurang Rp3.611.126.121,00

jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp62.479.126.233,00

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp11.797.340.000,00

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1. Semula Rp687.543.101.168,00
2. Berkurang Rp3.971.022.250,00

jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan Rp683.572.078.918,00

b. Belanja Modal

| | | |
|---|---|---|
| 1. Semula | Rp135.467.217.973,00 | |
| 2. Berkurang | Rp11.258.389.794,00 | |
| jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | | Rp124.208.828.179,00 |

c. Belanja Tidak Terduga

| | | |
|---|---|---|
| Semua | Rp1.000.000.000,00 | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | | Rp1.000.000.000,00 |

d. Belanja Transfer

| | | |
|---|---|---|
| 1. Semula | Rp106.128.139.790,00 | |
| 2. Bertambah | Rp1.738.819.429,00 | |
| jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan | | Rp107.866.959.219,00 |

Pasal 8

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

| | | |
|---|---|---|
| 1. Semula | Rp352.208.184.548,00 | |
| 2. Berkurang | Rp34.175.973.983,00 | |
| jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | Rp318.032.210.565,00 |

b. Belanja Barang dan Jasa

| | | |
|---|---|---|
| 1. Semula | Rp324.648.626.062,00 | |
| 2. Bertambah | Rp25.811.860.395,00 | |
| jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | | Rp350.460.486.457,00 |

c. Belanja Hibah

| | | |
|---|---|---|
| 1. Semula | Rp10.651.316.558,00 | |
| 2. Bertambah | Rp1.536.375.838,00 | |
| jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | | Rp12.187.692.396,00 |

d. Belanja Bantuan Sosial

| | | |
|---|---|---|
| 1. Semula | Rp34.974.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp2.856.715.500.00 | |
| jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | | Rp2.891.689.500,00 |

Pasal 9

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah
   1. Semula Rp1.000.000.000,00
   2. Berkurang Rp919.657.000,00
   jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp80.343.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
   1. Semula Rp22.471.068.406,00
   2. Bertambah Rp9.185.311.501,00
   jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan Rp31.656.379.907,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan
   1. Semula Rp30.487.994.520,00
   2. Bertambah Rp5.411.077.737,00
   jumlah Belanja Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan Rp35.899.072.257,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
   1. Semula Rp80.418.356.748,00
   2. Berkurang Rp24.947.532.532,00
   jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan Rp55.470.824.216,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
   1. Semula Rp1.089.798.299,00
   2. Bertambah Rp12.410.500,00
   jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan Rp1.102.208.799,00

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga

   Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp1.000.000.000,00

Pasal 11

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

   Belanja Bagi Hasil tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp2.430.268.790,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

   1. Semula Rp103.697.871.000,00

   2. Bertambah Rp1.738.819.429,00

   jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp105.436.690.429,00

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

   1. Semula Rp30.192.910.204,00

   2. Bertambah Rp18.398.095.582,00

   jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp48.591.005.786,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

   Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp1.000.000.000,00

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Bersumber dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

   1. Semula Rp29.692.910.204,00

   2. Bertambah Rp18.398.095.582,00

   jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan Rp48.091.005.786,00

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

   Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp500.000.000,00

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

Pemberian Pinjaman Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp1.000.000.000,00

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp47.591.005.786,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp47.591.005.786,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang diatur dalam Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau;
   d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini antara lain:

a. Lampiran I : ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II : ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
c. Lampiran III : rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
d. Lampiran IV : rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran Tahun Anggaran 2022;
e. Lampiran V : rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara Tahun Anggaran 2022;
f. Lampiran VI : rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan surat perintah membayar Tahun Anggaran 2022;
g. Lampiran VII : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
h. Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
i. Lampiran IX : daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan Tahun Anggaran 2022;
j. Lampiran X : laporan keuangan pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah;
k. Lampiran XI : daftar rekapitulasi piutang Daerah;
l. Lampiran XII : daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;

n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
o. Lampiran XV : daftar dana cadangan; dan
p. Lampiran XVI : daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPUALAUN ANAMBAS,

SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 92

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI RIAU : 3,34/2022;

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara. Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh Persetujuan Bersama. Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD Perubahan, KUPA, dan PPAS untuk mendapatkan Persetujuan Bersama.

Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, selanjutnya Kepala Daerah bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 93

# GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**
**NOMOR** 1231 **TAHUN 2022**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 harus mendapat evaluasi Gubernur Kepulauan Riau sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Anambas;

b. bahwa setelah dilakukan tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

18. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**KEDUA** : Bupati Kepulauan Anambas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memperhatikan dan menindaklanjuti Hasil Evaluasi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

**KETIGA** : Bupati Kepulauan Anambas segera menyampaikan hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

kepada Gubernur Kepulauan Riau dan segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 setelah mendapatkan nomor register dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**KEEMPAT** : Bupati Kepulauan Anambas segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur Kepulauan Riau paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 Oktober 2022

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**ANSAR AHMAD**

**Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Batam;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1231 Tahun 2022
Tanggal : 24 Oktober 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

| RANCANGAN PERATURAN DAERAH | HASIL EVALUASI GUBERNUR | KETERANGAN |
|---|---|---|
| BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS<br>PROVINSI KEPULAUAN RIAU<br><br>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS<br>NOMOR TAHUN 2022<br><br>TENTANG<br><br>PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN<br>BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022<br><br>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br><br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, | BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS<br>PROVINSI KEPULAUAN RIAU<br><br>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS<br>NOMOR TAHUN 2022<br><br>TENTANG<br><br>PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN<br>BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022<br><br>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br><br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, | |

| | | |
|---|---|---|
| Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Daerah;<br>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022;<br>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);<br>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara | Menimbang : a. ~~bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Daerah;~~<br>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama<br>b. ~~bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan~~ | Penyempurnaan rumusan<br>Pasal 3 ini utk APBD, ganti ke pasal lain yang terkait dengan APBDP : |

| | | |
|---|---|---|
| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);<br>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);<br>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);<br>6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);<br>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | ~~Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022;~~<br>b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum PAPBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal ..... Tahun 2022<br>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;<br>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);<br>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara | |

| | | |
|---|---|---|
| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);<br>8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);<br>9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); | (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);<br>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);<br>5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);<br>6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);<br>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | |

| | | |
|---|---|---|
| 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);<br>11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);<br>12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran | (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);<br>8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);<br>9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor | |

| | | |
|---|---|---|
| Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);<br>13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);<br>14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); | 4028);<br>10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);<br>11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);<br>12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 | |

| | | |
|---|---|---|
| 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);<br>16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);<br>17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);<br>18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); | Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);<br>13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);<br>~~14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara~~ | Penyempurnaan rumusan<br>Dihapus karena sudah diabut dengan PP Nomor 33 Tahun 2010 |

| | | |
|---|---|---|
| 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);<br>20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);<br>21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);<br>22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); | ~~Republik Indonesia Nomor 5107);~~<br>15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);<br>16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);<br>17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);<br>18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia | |

| | | |
|---|---|---|
| 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);<br>24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);<br>25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);<br>26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);<br>27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan | Nomor 6041);<br>19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);<br>~~20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);~~<br>21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);<br>22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor | Penyempurnaan rumusan<br>Dihapus karena tidak ada peraturan daerah ini |

| | | |
|---|---|---|
| Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);<br>28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);<br>29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana | 6322);<br>23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);<br>24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);<br>25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);<br>26. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794)~~;<br>~~27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata~~ | Penyempurnaan rumusan<br>Dihapus karena tdk ada korelasinya dengan peraturan daerah ini<br>Penyempurnaan rumusan<br>Dihapus karena tdk ada korelasinya dengan peraturan daerah ini |

| | | |
|---|---|---|
| Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);<br>30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cata Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);<br>31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);<br>32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);<br>33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan | ~~Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);~~<br>28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);<br>29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan | |

| | | |
|---|---|---|
| Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);<br>34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);<br>35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);<br>36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);<br>37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 | dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);<br>30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cata Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);<br>31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);<br>32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);<br>33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus | |

| | | |
|---|---|---|
| tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);<br>38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54); | Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);<br>34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);<br>35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);<br>~~36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);~~<br>37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor | Penyempurnaan rumusan<br>Dihapus karena sdh dicabut Dengan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 ..... |

| | | |
|---|---|---|
| Dengan Persetujuan Bersama<br>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH<br>KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS<br>dan<br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS<br><br>MEMUTUSKAN:<br><br>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022<br><br>BAB I<br>KETENTUAN UMUM<br>Pasal 1<br><br>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:<br>1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.<br>3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.<br>4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; | | 17/PMK.07/2021 ~~Tahun 2021~~ tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 ~~94~~/PMK.07/~~2021~~ 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);<br>38. ~~Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor~~ | Penyempurnaan rumusan |

| | | |
|---|---|---|
| 6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<br>7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<br>8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Perintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<br>9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.<br>10. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.<br>11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.<br>12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. | ~~3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);~~<br>Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor ..... Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor ..... );<br><br>Dengan Persetujuan Bersama<br>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH<br>KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS<br>dan<br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS<br><br>MEMUTUSKAN:<br><br>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022<br><br>BAB I<br>KETENTUAN UMUM<br>Pasal 1 | Penambahan dasar hukum |

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 2<br><br>(1) APBD Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp931.138.458.931,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) berkurang sejumlah Rp13.490.592.615,00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp917.647.866.316,00 (Sembilan Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).<br>(2) APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<br>a.Pendapatan Daerah;<br>b. Belanja Daerah; dan<br>c. Pembiayaan Daerah<br>(3) Rincian APBD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:<br>a. Pendapatan Daerah<br>1. Semula Rp900.945.548.727,00<br>2. Berkurang Rp31.888.688.197,00<br>jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp869.056.860.530,00<br>b. Belanja Daerah<br>1. Semula Rp930.138.458.931,00 | Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:<br>1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>2. Pemerintah Daerah adalah Kepala ~~d~~Daerah sebagai unsur penyelenggara ~~p~~Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.<br>3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.<br>4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;<br>6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<br>7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<br>8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Perintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<br>9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.<br>10. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan | Di Pasal 1 cukup mencantumkan hal-hal yang ada didalam Batang Tubuh untuk dijelaskan bila tidak ada didalam Batang Butuh maka tidak perlu dicantumkan diPasal 1<br>Angka 2 Penyempurnaan Penulisan |

| | | |
|---|---|---|
| 2. Berkurang Rp13.490.592.615,00<br>jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan<br>Rp916.647.866.316,00<br>(Surplus/Defisit) setelah Perubahan<br>(Rp47.591.005.786,00)<br>c. Pembiayaan Daerah<br>1. Penerimaan Pembiayaan<br>a. Semula Rp30.192.910.204,00<br>b. Bertambah Rp18.398.095.582,00<br>jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah<br>Rp48.591.005.786,00<br>Perubahan<br>2. Pengeluaran Pembiayaan<br>semula Rp1.000.000.000,00<br>jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah<br>Rp1.000.000.000,00<br>Perubahan<br>jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan<br>Rp47.591.005.786,00<br>sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah<br>Rp0,00<br>setelah Perubahan<br><br>Pasal 3<br><br>Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, bersumber dari:<br>1. Pendapatan Asli Daerah<br>1. semula Rp40.661.242.655,00<br>2. Bertambah Rp789.407.385,00 | dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.<br>11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.<br>12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.<br><br>Pasal 2<br><br>(1) APBD Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp931.138.458.931,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) berkurang sejumlah Rp13.490.592.615,00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp917.647.866.316,00 (Sembilan Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).<br>(2) APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: | |

| | | |
|---|---|---|
| jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Rp41.450.650.040,00<br>Perubahan<br><br>2. Pendapatan Transfer<br>1. Semula Rp848.486.966.072,00<br>2. Berkurang Rp32.678.095.582,00<br>jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan Rp815.808.870.490,00<br>3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah<br>semula Rp11.797.340.000,00<br>jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp11.797.340.000,00<br>Setelah Perubahan<br><br>Pasal 4<br><br>Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:<br>a. Pajak Daerah<br>semula Rp20.111.728.377,00<br>jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp20.111.728.377,00<br>b. Retribusi Daerah<br>semula Rp4.190.959.515,00<br>jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp4.190.959.515,00<br>c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan<br>semula Rp1.318.019.763,00 | a.Pendapatan Daerah;<br>b. Belanja Daerah; dan<br>c. Pembiayaan Daerah<br>(3) Rincian APBD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:<br>a. Pendapatan Daerah<br>1. Semula Rp900.945.548.727,00<br>2. Berkurang Rp31.888.688.197,00<br>jumlah Pendapatan Daerah<br>setelah Perubahan Rp869.056.860.530,00<br>b. Belanja Daerah<br>1. Semula Rp930.138.458.931,00<br>2. Berkurang Rp13.490.592.615,00<br>jumlah Belanja Daerah<br>setelah Perubahan Rp916.647.866.316,00<br>(Surplus/Defisit)<br>setelah Perubahan (Rp47.591.005.786,00)<br>c. Pembiayaan Daerah<br>1. Penerimaan Pembiayaan<br>a. Semula Rp30.192.910.204,00<br>b. Bertambah Rp18.398.095.582,00<br>jumlah Penerimaan Pembiayaan<br>setelah Perubahan Rp48.591.005.786,00<br>2. Pengeluaran Pembiayaan<br>semula Rp1.000.000.000,00<br>jumlah Pengeluaran<br>Pembiayaan setelah Perubahan<br>Rp1.000.000.000,00<br>jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | |

| | | |
|---|---|---|
| jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp1.318.019.763,00<br>d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah<br>1. semula Rp15.040.535.000,00<br>2. Bertambah Rp789.407.385,00<br>jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp15.829.942.385,00<br><br>Pasal 5<br><br>Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:<br>a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat<br>1. Semula Rp782.396.713.718,00<br>2. Berkurang Rp29.066.969.461,00<br>jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp753.329.744.257,00<br>b. Pendapatan Transfer Antar Daerah<br>1. Semula Rp66.090.252.354,00<br>2. Berkurang Rp3.611.126.121,00<br>jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp62.479.126.233,00<br><br>Pasal 6<br><br>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana | Rp47.591.005.786,00<br>sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah setelah Perubahan Rp0,00<br><br>Pasal 3<br><br>Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, bersumber dari:<br>1. Pendapatan Asli Daerah<br>1. semula Rp40.661.242.655,00<br>2. Bertambah Rp789.407.385,00<br>jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp41.450.650.040,00<br><br>2. Pendapatan Transfer<br>1. Semula Rp848.486.966.072,00<br>2. Berkurang Rp32.678.095.582,00<br>jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan Rp815.808.870.490,00<br>3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah<br>semula Rp11.797.340.000,00<br>jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp11.797.340.000,00<br><br>Pasal 4<br><br>Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:<br>a. Pajak Daerah | Penyempurnaan rumusan<br><br>Penyempurnaan rumusan |

| | | |
|---|---|---|
| dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:<br>a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan<br>semula Rp11.797.340.000,00<br>jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah Perubahan Rp11.797.340.000,00<br><br>Pasal 7<br><br>Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri atas:<br>a. Belanja Operasi<br>1. Semula Rp687.543.101.168,00<br>2. Berkurang Rp7.706.876.733,00<br>jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan Rp679.836.224.435,00<br>b. Belanja Modal<br>1. Semula Rp135.467.217.973,00<br>2. Berkurang Rp12.911.766.680,00<br>jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp122.555.451.293,00<br>c. Belanja Tidak Terduga<br>1. Semula Rp1.000.000.000,00<br>2. Bertambah Rp5.189.407.385,00<br>jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp6.189.407.385,00<br>d. Belanja Transfer | ~~semula Rp20.111.728.377,00~~<br>~~jumlah Pajak Daerah Rp20.111.728.377,00~~<br>~~setelah Perubahan~~<br>Pajak Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp 20.111.728.377,00<br>b. Retribusi Daerah<br>~~semula Rp4.190.959.515,00~~<br>~~jumlah Retribusi Daerah Rp4.190.959.515,00~~<br>~~setelah Perubahan~~<br>Retribusi Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp4.190.959.515,00<br>c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan<br>~~semula Rp1.318.019.763,00~~<br>~~jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp1.318.019.763,00~~<br>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp1.318.019.763,00<br>d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah<br>1. semula Rp15.040.535.000,00<br>2. Bertambah Rp789.407.385,00<br>jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp15.829.942.385,00<br><br>Pasal 5<br><br>Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: | Penyempurnaan rumusan<br><br>Penyempurnaan rumusan |

| | | |
|---|---|---|
| 1. Semula Rp106.128.139.790,00<br>2. Bertambah Rp1.738.819.429,00<br>jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp107.866.959.219,00<br><br>Pasal 8<br><br>Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:<br>a. Belanja Pegawai<br>1. Semula Rp352.208.184.548,00<br>2. Berkurang Rp31.536.136.653,00<br>jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp320.672.047.895,00<br>b. Belanja Barang dan Jasa<br>1. Semula Rp324.648.626.062,00<br>2. Bertambah Rp19.680.480.182,00<br>jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp344.329.106.244,00<br>c. Belanja Hibah<br>1. Semula Rp10.651.316.558,00<br>2. Bertambah Rp1.292.064.238,00<br>jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp11.943.380.796,00<br>d. Belanja Bantuan Sosial<br>1. Semula Rp34.974.000,00<br>2. Bertambah Rp2.856.715.500.00<br>jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp2.891.689.500,00 | a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat<br>1. Semula Rp782.396.713.718,00<br>2. Berkurang Rp29.066.969.461,00<br>jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp753.329.744.257,00<br><br>b. Pendapatan Transfer Antar Daerah<br>1. Semula Rp66.090.252.354,00<br>2. Berkurang Rp3.611.126.121,00<br>jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp62.479.126.233,00<br><br>Pasal 6<br><br>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:<br>~~a.~~ Lain-lain Pendapatan yang ~~s~~Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan tidak mengalami perubahan anggaran dari anggaran semula yaitu Rp11.797.340.000,00<br>~~semula Rp11.797.340.000,00~~<br>~~jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah Perubahan Rp11.797.340.000,00~~<br><br>Pasal 7<br><br>Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri atas: | Pasal 6<br>Penyempurnaan jika hanya 1 (satu) tidak perlu buat a<br><br>Penyempurnaan rumusan |

Pasal 9

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah
   1. Semula Rp1.000.000.000,00
   2. Berkurang Rp951.794.200,00
   jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp48.205.800,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
   1. Semula Rp22.471.068.406,00
   2. Bertambah Rp8.525.415.082,00
   jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp30.996.483.488,00
   setelah Perubahan
c. Belanja Gedung dan Bangunan
   1. Semula Rp30.487.994.520,00
   2. Bertambah Rp4.908.884.937,00
   jumlah Belanja Gedung dan Bangunan setelah Perubahan Rp35.396.879.457,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
   1. Semula Rp80.418.356.748,00
   2. Berkurang Rp25.406.682.999,00
   jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Rp55.011.673.749,00
   Irigasi setelah Perubahan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
   1. Semula Rp1.089.798.299,00
   2. Bertambah Rp12.410.500,00

a. Belanja Operasi
   1. Semula Rp687.543.101.168,00
   2. Berkurang Rp7.706.876.733,00
   jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan Rp679.836.224.435,00
b. Belanja Modal
   1. Semula Rp135.467.217.973,00
   2. Berkurang Rp12.911.766.680,00
   jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp122.555.451.293,00
c. Belanja Tidak Terduga
   1. Semula Rp1.000.000.000,00
   2. Bertambah Rp5.189.407.385,00
   jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp6.189.407.385,00
d. Belanja Transfer
   1. Semula Rp106.128.139.790,00
   2. Bertambah Rp1.738.819.429,00
   jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp107.866.959.219,00

Pasal 8

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai
   1. Semula Rp352.208.184.548,00
   2. Berkurang Rp31.536.136.653,00
   jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp320.672.047.895,00

| | | |
|---|---|---|
| jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan Rp1.102.208.799,00<br><br>Pasal 10<br><br>Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:<br>a. Belanja Tidak Terduga<br>1. Semula Rp1.000.000.000,00<br>2. Bertambah Rp5.189.407.385,00<br>jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp6.189.407.385,00<br><br>Pasal 11<br><br>Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:<br>a. Belanja Bagi Hasil<br>Semula Rp2.430.268.790,00<br>jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp2.430.268.790,00<br>b. Belanja Bantuan Keuangan<br>1. Semula Rp103.697.871.000,00<br>2. Bertambah Rp1.738.819.429,00<br>jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp105.436.690.429,00 | b. Belanja Barang dan Jasa<br>1. Semula Rp324.648.626.062,00<br>2. Bertambah Rp19.680.480.182,00<br>jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp344.329.106.244,00<br>c. Belanja Hibah<br>1. Semula Rp10.651.316.558,00<br>2. Bertambah Rp1.292.064.238,00<br>jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp11.943.380.796,00<br>d. Belanja Bantuan Sosial<br>1. Semula Rp34.974.000,00<br>2. Bertambah Rp2.856.715.500.00<br>jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp2.891.689.500,00<br><br>Pasal 9<br><br>Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:<br>a. Belanja Modal Tanah<br>1. Semula Rp1.000.000.000,00<br>2. Berkurang Rp951.794.200,00<br>jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp48.205.800,00<br>b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin<br>1. Semula Rp22.471.068.406,00<br>2. Bertambah Rp8.525.415.082,00<br>jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan Rp30.996.483.488,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 12<br><br>Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, terdiri atas:<br>a. Penerimaan Pembiayaan<br>1. Semula Rp30.192.910.204,00<br>2. Bertambah Rp18.398.095.582,00<br>jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp48.591.005.786,00<br>b. Pengeluaran Pembiayaan<br>semula Rp1.000.000.000,00<br>jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp1.000.000.000,00<br><br>Pasal 13<br><br>Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Bersumber dari:<br>a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>1. Semula Rp29.692.910.204,00<br>2. Bertambah Rp18.398.095.582,00<br>jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan Rp48.091.005.786,00<br>b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah<br>semula Rp500.000.000,00<br>jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | c. Belanja Gedung dan Bangunan<br>1. Semula Rp30.487.994.520,00<br>2. Bertambah Rp4.908.884.937,00<br>jumlah Belanja Gedung dan Bangunan setelah Perubahan Rp35.396.879.457,00<br>d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi<br>1. Semula Rp80.418.356.748,00<br>2. Berkurang Rp25.406.682.999,00<br>jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan Rp55.011.673.749,00<br>e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya<br>1. Semula Rp1.089.798.299,00<br>2. Bertambah Rp12.410.500,00<br>jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan Rp1.102.208.799,00<br><br>Pasal 10<br><br>Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:<br>a. Belanja Tidak Terduga<br>1. Semula Rp1.000.000.000,00<br>2. Bertambah Rp5.189.407.385,00<br>jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp6.189.407.385,00<br><br>Pasal 11<br><br>Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas: | Pasal 11<br>Penyempurnaan Rumusan |

| | | |
|---|---|---|
| Rp500.000.000,00<br>Daerah setelah Perubahan<br><br>Pasal 14<br><br>Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:<br>a. Pemberian Pinjaman Daerah<br>semula Rp1.000.000.000,00<br>jumlah Pemberian Pinjaman Daerah<br>Rp1.000.000.000,00<br>setelah Perubahan<br><br>Pasal 15<br><br>(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp47.591.005.786,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);<br>(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp47.591.005.786,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). | a. Belanja Bagi Hasil<br>~~Semula Rp2.430.268.790,00~~<br>~~jumlah Belanja Bagi Hasil Rp2.430.268.790,00~~<br>~~Hasil setelah Perubahan~~<br>Belanja Bagi Hasil tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp2.430.268.790,00<br>b. Belanja Bantuan Keuangan<br>1. Semula Rp103.697.871.000,00<br>2. Bertambah Rp1.738.819.429,00<br>jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan<br>Rp105.436.690.429,00<br><br>Pasal 12<br><br>Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, terdiri atas:<br>a. Penerimaan Pembiayaan<br>1. Semula Rp30.192.910.204,00<br>2. Bertambah Rp18.398.095.582,00<br>jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan<br>Rp48.591.005.786,00<br>~~b. Pengeluaran Pembiayaan~~<br>~~semula Rp1.000.000.000,00~~<br>~~jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan~~<br>~~Rp1.000.000.000,00~~<br>Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp1.000.000.000,00 | Penyempurnaan rumusan |

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 16<br><br>(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran.<br>(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;<br>b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;<br>c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;<br>(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;<br>b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;<br>c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau;<br>d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi | Pasal 13<br><br>Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Bersumber dari:<br>a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya<br>1. Semula Rp29.692.910.204,00<br>2. Bertambah Rp18.398.095.582,00<br>jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan<br>Rp48.091.005.786,00<br>b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah<br>~~semula Rp500.000.000,00~~<br>~~jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan~~<br>~~Rp500.000.000,00~~<br>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp500.000.000,00<br><br>Pasal 14<br><br>Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, ~~terdiri atas~~ berupa:<br>~~a. Pemberian Pinjaman Daerah~~<br>~~semula Rp1.000.000.000,00~~<br>~~jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan~~<br>~~Rp1.000.000.000,00~~<br>Pemberian Pinjaman Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu Rp1.000.000.000,00 | Penyempurnaan Rumusan<br><br>Penyempurnaan Rumusan |

| | | |
|---|---|---|
| Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.<br><br>Pasal 17<br><br>Ketentuan mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini antara lain:<br><br>a. Lampiran I : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2022;<br>b. Lampiran II : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi tahun anggaran 2022 ;<br>c. Lampiran III : rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2022;<br>d. Lampiran IV : rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran tahun | Pasal 15<br><br>(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp47.591.005.786,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);<br>(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp47.591.005.786,00 (Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).<br><br>Pasal 16<br><br>(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, ~~dengan peraturan Bupati~~, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ~~ditetapkan~~ diatur dalam Peraturan Bupati, yang selanjutnya dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran.<br>(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;<br>b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;<br>c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; | Penyempurnaan rumusan |

| | | |
|---|---|---|
| anggaran 2022;<br>e. Lampiran V : rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2022;<br>f. Lampiran VI : rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan surat perintah membayar tahun anggaran 2022;<br>g. Lampiran VII : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan perubahan apbd tahun anggaran 2022;<br>h. Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan ppas dengan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022;<br>i. Lampiran IX : daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2022;<br>j. Lampiran X : laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;<br>k. Lampiran XI : daftar rekapitulasi piutang daerah; | (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;<br>b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;<br>c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau;<br>d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.<br><br>Pasal 17<br><br>Ketentuan mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini antara lain:<br>a. Lampiran I : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2022;<br>b. Lampiran II : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan | |

| | | |
|---|---|---|
| l. Lampiran XII : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;<br>m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;<br>n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset lain-lain;<br>o. Lampiran XV : daftar dana cadangan; dan<br>p. Lampiran XVI : daftar pinjaman daerah.<br><br>Pasal 18<br><br>Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD. | organisasi tahun anggaran 2022 ;<br>c. Lampiran III : rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2022;<br>d. Lampiran IV : rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran tahun anggaran 2022;<br>e. Lampiran V : rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2022;<br>f. Lampiran VI : rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan surat perintah membayar tahun anggaran 2022;<br>g. Lampiran VII : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan perubahan apbd tahun anggaran 2022;<br>h. Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan | |

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 19<br><br>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | ppas dengan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022;<br>i. Lampiran IX : daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2022;<br>j. Lampiran X : laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;<br>k. Lampiran XI : daftar rekapitulasi piutang daerah;<br>l. Lampiran XII : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;<br>m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;<br>n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset lain-lain;<br>o. Lampiran XV : daftar dana cadangan; dan<br>p. Lampiran XVI : daftar pinjaman daerah.<br><br>Pasal 18<br><br>~~Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang~~ Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.<br><br>Pasal 19<br><br>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Pasal 18<br>Penyempurnaan Rumusan |

| | | |
|---|---|---|
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br><br>Ditetapkan di Tarempa<br>pada tanggal Oktober 2022<br><br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>ABDUL HARIS<br><br>Diundangkan di Tarempa<br>pada tanggal Oktober 2022<br><br>SEKRETARIS DAERAH<br>KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>SAHTIAR<br><br>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022 NOMOR ....., TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR .....<br><br>NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU : ...,...../..... | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br><br>Ditetapkan di Tarempa<br>pada tanggal Oktober 2022<br><br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>ABDUL HARIS<br><br>Diundangkan di Tarempa<br>pada tanggal Oktober 2022<br><br>SEKRETARIS DAERAH,<br>~~KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,~~<br><br>SAHTIAR<br><br>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022 NOMOR .....~~,~~ ~~TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR .....~~<br><br>NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU : ...,...../..... | Penyempurnaan rumusan |

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**ANSAR AHMAD**

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1231 Tahun 2022
Tanggal : 24 Oktober 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

| RANCANGAN PERATURAN BUPATI | HASIL EVALUASI GUBERNUR | KETERANGAN |
|---|---|---|
| BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS<br>PROVINSI KEPULAUAN RIAU<br><br>PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS<br>NOMOR TAHUN 2022<br><br>TENTANG<br><br>PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022<br><br>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br><br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan | BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS<br>PROVINSI KEPULAUAN RIAU<br><br>PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS<br>NOMOR TAHUN 2022<br><br>TENTANG<br><br>PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022<br><br>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br><br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | pasal 18 Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; | | Ppasal 18 Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);<br>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);<br>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia | Mengingat | : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);<br>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);<br>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |

| | | |
|---|---|---|
| Nomor 4421);<br>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);<br>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);<br>7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan | Nomor 4421);<br>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);<br>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);<br>~~7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan~~ | Penyempurnaan rumusan<br>Angka 7 dihapus karena dicabut dengan UU No.1 Tahun 2022 ttg Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan |

| | | |
|---|---|---|
| Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);<br>8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);<br>9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);<br>10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan | ~~Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);~~<br>8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);<br>9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);<br>10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan | Pemerintah Daerah |

| | | |
|---|---|---|
| Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);<br>11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);<br>12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara | Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);<br>11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);<br>~~12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara~~ | Penyempurnaan rumusan<br>Dihapus karena tidak ada korelasi dalam batang tubuh peraturan bupati ini |

| | | |
|---|---|---|
| Republik Indonesia Nomor 6177);<br>13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);<br>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);<br>15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);<br>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); | ~~Republik Indonesia Nomor 6177);~~<br>13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);<br>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);<br>15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);<br>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); | |

| | | |
|---|---|---|
| 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);<br>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan | 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);<br>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan | |

| | | |
|---|---|---|
| Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);<br>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);<br>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);<br>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);<br>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);<br>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);<br>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);<br>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);<br>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | |

| | | |
|---|---|---|
| Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);<br>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);<br>24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);<br>25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 | Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);<br>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);<br>24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);<br>25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 | |

| | | |
|---|---|---|
| Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89, Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 90);<br>26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);<br>27. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 610);<br>28. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 90);<br>26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);<br>27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor .....Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor .....)<br>28. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan | Penambahan Dasar Hukum |

| | | |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 610);<br><br>MEMUTUSKAN<br><br>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022<br><br>BAB I<br>KETENTUAN UMUM<br>Pasal 1<br>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:<br>1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.<br>3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.<br>4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;<br>6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah rencana keuangan tahunan | Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 610);<br>29. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 610);<br><br>MEMUTUSKAN:<br><br>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022<br><br>BAB I<br>KETENTUAN UMUM<br>Pasal 1<br>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:<br>1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang | Penyempurnaan rumusan |

| | | |
|---|---|---|
| Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<br>7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<br>8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Perintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<br>9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.<br>10. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.<br>11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.<br>12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.<br>13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan | menjadi kewenangan Daerah otonom.<br>3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.<br>4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;<br>6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah rencana keuangan tahunan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<br>7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<br>8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Perintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<br>9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.<br>10. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.<br>11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas | |

| | | |
|---|---|---|
| belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.<br><br>Pasal 2<br><br>(1) APBD Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp931.138.458.931,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) berkurang sejumlah Rp13.490.592.615,00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp917.647.866.316,00 (Sembilan Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).<br>(2) APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<br>a. Pendapatan Daerah;<br>b. Belanja Daerah; dan<br>c. Pembiayaan Daerah<br>(3) Rincian APBD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:<br>a. Pendapatan Daerah<br>1. Semula Rp900.945.548.727,00<br>2. Berkurang Rp31.888.688.197,00 | dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.<br>12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.<br>13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.<br><br>Pasal 2<br><br>(1) APBD Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp931.138.458.931,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) berkurang sejumlah Rp13.490.592.615,00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp917.647.866.316,00 (Sembilan Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah). | |

| | | |
|---|---|---|
| jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp869.056.860.530,00<br>b. Belanja Daerah<br>1. Semula Rp930.138.458.931,00<br>2. Berkurang Rp13.490.592.615,00<br>jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp916.647.866.316,00<br>(Surplus/Defisit) setelah Perubahan (Rp47.591.005.786,00)<br>c. Pembiayaan Daerah<br>1. Penerimaan Pembiayaan<br>a. Semula Rp30.192.910.204,00<br>b. Bertambah Rp18.398.095.582,00<br>jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp48.591.005.786,00<br>2. Pengeluaran Pembiayaan<br>semula Rp1.000.000.000,00<br>jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp1.000.000.000,00<br>jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp47.591.005.786,00<br>sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah setelah Perubahan Rp0,00<br><br>Pasal 3 | (2) APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<br>a. Pendapatan Daerah;<br>b. Belanja Daerah; dan<br>c. Pembiayaan Daerah<br>(3) Rincian APBD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:<br>a. Pendapatan Daerah<br>1. Semula Rp900.945.548.727,00<br>2. Berkurang Rp31.888.688.197,00<br>jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp869.056.860.530,00<br>b. Belanja Daerah<br>1. Semula Rp930.138.458.931,00<br>2. Berkurang Rp13.490.592.615,00<br>jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp916.647.866.316,00<br>(Surplus/Defisit) setelah Perubahan (Rp47.591.005.786,00)<br>c. Pembiayaan Daerah<br>1. Penerimaan Pembiayaan<br>a. Semula Rp30.192.910.204,00<br>b. Bertambah Rp18.398.095.582,00<br>jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp48.591.005.786,00<br>2. Pengeluaran Pembiayaan<br>semula Rp1.000.000.000,00<br>jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp1.000.000.000,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Ketentuan mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:<br>a. Lampiran I : ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2022;<br>b. Lampiran II : penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2022;<br>c. Lampiran III : daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;<br>d. Lampiran IV : daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;<br>e. Lampiran V : daftar nama calon penerima, | jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp47.591.005.786,00<br>sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah setelah Perubahan Rp0,00<br><br>Pasal 3<br><br>Ketentuan mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:<br>a. Lampiran I : ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2022;<br>b. Lampiran II : penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2022;<br>c. Lampiran III : daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;<br>d. Lampiran IV : daftar nama calon penerima, | |

| | | |
|---|---|---|
| alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;<br>f. Lampiran VI : daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa<br>g. Lampiran VII : rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2022;<br>h. Lampiran VIII : rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi/tambahan dbh-minyak dan gas alam menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2022;<br>i. Lampiran IX : rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, | alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;<br>e. Lampiran V : daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;<br>f. Lampiran VI : daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa<br>g. Lampiran VII : rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2022;<br>h. Lampiran VIII : rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi/tambahan dbh-minyak dan gas alam menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan | |

| | | |
|---|---|---|
| kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2022;<br>j. Lampiran X : sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten kepulauan anambas dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara tahun 2022.<br><br>Pasal 4<br><br>(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran.<br>(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;<br>b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;<br>c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; | pembiayaan tahun 2022;<br>i. Lampiran IX : rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2022;<br>j. Lampiran X : sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten kepulauan anambas dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara tahun 2022.<br><br>Pasal 4<br><br>(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran.<br>(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; | |

| | | |
|---|---|---|
| (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;<br>b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;<br>c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau;<br>d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.<br><br>Pasal 5<br><br>Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br><br>Pasal 6<br><br>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;<br>c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;<br>(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;<br>b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;<br>c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau;<br>d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.<br><br>Pasal 5<br><br>Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br><br>Pasal 6<br><br>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | |

| | | |
|---|---|---|
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br><br>Ditetapkan di Tarempa<br>pada tanggal Oktober 2022<br><br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>ABDUL HARIS<br><br>Diundangkan di Tarempa<br>pada tanggal Oktober 2022<br><br>SEKRETARIS DAERAH<br>KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>SAHTIAR<br><br>BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022 NOMOR | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br><br>Ditetapkan di Tarempa<br>pada tanggal Oktober 2022<br><br>BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,<br><br>ABDUL HARIS<br><br>Diundangkan di Tarempa<br>pada tanggal Oktober 2022<br><br>SEKRETARIS DAERAH<br>~~KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,~~<br><br>SAHTIAR<br><br>BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022 NOMOR | |

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**ANSAR AHMAD**

Lampiran III : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1231 Tahun 2022
Tanggal : 24 Oktober 2022

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

## I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Kepentingan umum;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS);

## II. KEBIJAKAN UMUM

Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

1. Kesesuaian tahapan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dengan RKPD, Rancangan P-KUA dan P-PPAS.

   Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada tanggal 29 September 2022 dan telah disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 03 Oktober 2022, sesuai dengan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tersebut disertai dengan RKPD, Rancangan P-KUA dan P-PPAS.

2. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan RKPD serta Rancangan P-KUA dan P-PPAS.

   a. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD

      Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 harus konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, P-KUA, P-PPAS, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

   b. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan RKPD.

      Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 telah memedomani RKPD, Rancangan P-KUA/P-PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

      Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, Rancangan P-KUA/P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda Perubahan dan Ranperkada Perubahan dengan RKPD dan Rancangan P-KUA/P-PPAS

| No | Uraian | RPJMD | RKPD | | RANC. P-KUA/P-PPAS | | R.P-APBD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jml Prog. dan Keg | Jml Prog. dan Keg | Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) | Jml Prog. dan Keg | Jumlah Alokasi Anggaran | Jml Prog. dan Keg | Jumlah Alokasi Anggaran |
| 1 | Jumlah Program | 141 | 119 | 930.138.458.931,00 | 119 | 930.858.458.931,00 | 119 | 916.647.866.316,00 |
| 2 | Jumlah Kegiatan | - | 224 | | 224 | | 224 | |
| 3 | Jumlah Sub Kegiatan | - | 701 | | 703 | | 703 | |

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD, Rancangan P-KUA/P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

### A. Kebijakan Pendapatan

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp869.056.860.530,00 mengalami penurunan sebesar Rp31.888.688.197,00 atau 3,54% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp900.945.548.727,00.

Penganggaran target pendapatan daerah tersebut harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Tabel 2
Pendapatan Daerah

| URAIAN | APBD | | | |
|---|---|---|---|---|
| | APBD TA.2022 | RANPERDA PERUBAHAN APBD TA 2022 | SELISIH LEBIH/KURANG | |
| | Rp. | Rp. | Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **PENDAPATAN** | **900.945.548.727,00** | **869.056.860.530,00** | **(31.888.688.197,00)** | **3,54** |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **40.661.242.655,00** | **41.450.650.040,00** | **789.407.385,00** | **1,94** |
| Pajak Daerah | 20.111.728.377,00 | 20.111.728.377,00 | - | - |
| Retribusi Daerah | 4.190.959.515,00 | 4.190.959.515,00 | - | - |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.318.019.763,00 | 1.318.019.763,00 | - | - |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 15.040.535.000,00 | 15.829.942.385,00 | 789.407.385,00 | 5,25 |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | **848.486.966.072,00** | **815.808.870.490,00** | **(32.678.095.582,00)** | **3,85** |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 782.396.713.718,00 | 753.329.744.257,00 | (29.066.969.461,00) | 3,72 |
| Pendapatan Transfer antar Daerah | 66.090.252.354 | 62.479.126.233 | (3.611.126.121,00) | 5,46 |
| **LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **11.797.340.000,00** | **11.797.340.000,00** | - | - |
| Lain – Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan | 11.797.340.000,00 | 11.797.340.000,00 | - | - |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.450.650.040,00 mengalami peningkatan sebesar Rp789.407.385,00 atau 1,94% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.661.242.655,00.

Penganggaran target pendapatan daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.111.728.377,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan pajak daerah:

1) Pajak Hotel Rp3.182.096.316,00;
2) Pajak Restoran Rp10.917.922.750,00;
3) Pajak Hiburan Rp163.688.025,00;
4) Pajak Reklame Rp75.000.000,00;
5) Pajak Penerangan Jalan Rp4.095.000.000,00;
6) Pajak Air Tanah Rp64.890.000,00;
7) Pajak Sarang Burung Walet Rp64.381.286,00;
8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp603.750.000,00;
9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp420.000.000,00;
10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp525.000.000,00.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp4.190.959.515,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Target Retribusi daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

1) Retribusi Jasa Umum Rp3.889.250.000,00;
2) Retribusi Jasa Usaha Rp290.434.515,00;
3) Retribusi Perizinan Tertentu Rp11.275.000,00.

Target Retribusi dimaksud dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 apabila peraturan daerah yang menjadi

dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, sebagaimana diatur pada ketentuan butir C.1.c.1.a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi sebagaimana dimaksud pada butir C.1.c.1.a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.318.019.763,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

   Target pendapatan tersebut dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan Tahun Anggaran 2021, dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

Dengan tetap memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir C.1.c.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja bagi Badan/Lembaga/Pihak Ketiga yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan disposal (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga approisal yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/ atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/ sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD TA 2022 sebesar Rp15.829.942.385,00 mengalami peningkatan sebesar Rp789.407.385,00 atau 5,25% dari anggaran semula dalam

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.040.535.000,00. Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah harus berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.c.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan sebagai berikut:

1) Jasa Giro Rp1.020.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.c.1).d).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
2) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp36.720.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.c.1).d).(1).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
3) Pendapatan Bunga Rp5.610.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.c.1).d).(1).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp3.964.407.385,00 mengalami peningkatan sebesar Rp464.407.385,00 atau 13,27% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.500.000.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan Anambas tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.c.1).d).(1).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

5) Pendapatan dari Pengembalian Rp1.278.700,00 mengalami peningkatan sebesar Rp325.000.000,00 atau 34,08% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp953.700.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.c.1).d).(1).(n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penganggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) agar menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp815.808.870.490,00 mengalami penurunan sebesar Rp32.678.095.582,00 atau 3,85% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp848.486.966.072,00.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 antara lain diuraikan pada jenis pendapatan Transfer:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp753.329.744.257,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.066.969.461,00 atau 3,72% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp782.396.713.718,00 yang diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:

1) Dana Perimbangan sebesar Rp710.058.894.257,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.066.969.461,00 atau 3,93% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp739.125.863.718,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

   a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp267.268.713.599,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.109.251.119,00 atau 9,21% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp294.377.964.718,00, terdapat selisih dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

   b) Dana Alokasi Umum sebesar Rp368.970.082.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah sesuai dengan anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

   c) Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp46.014.953.658,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.711.238.342,00 atau 3,59% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.726.192.000,00, terdapat selisih dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

   d) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp27.805.145.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp246.480.000,00 atau 0,88% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp28.051.625.000,00, terdapat selisih dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

2) Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp6.072.979.000,00, tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Alokasi tersebut telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

3) Dana Desa sebesar Rp37.197.871.000,00, tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Alokasi tersebut telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyesuaikan alokasi Dana Perimbangan dimaksud dengan alokasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.1.c.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai *illegal*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir E.11.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp62.479.126.233,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.611.126.121,00 atau 5,46% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp66.090.252.354,00. yang diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:

1) Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp56.559.126.233,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.168.873.879,00 atau 24,61% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp45.390.252.354,00, yang diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp11.961.472.686,00;

b) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp6.225.809.813,00;

c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp28.926.808.658,00;

d) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp46.194.452,00;

e) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp9.398.840.624,00;

f) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Rp5.920.000.000,00.

Selanjutnya, untuk penggunaan obyek pendapatan pajak daerah harus memedomani ketentuan:

a) Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam butir C.1.c.1).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

b) Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari hak Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten/kota menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam butir C.1.c.1).a).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

2) Bantuan Keuangan sebesar Rp5.920.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.780.000.000,00 atau 71,40% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.700.000.000,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.797.340.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan ke dalam jenis objek pendapatan sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp11.797.340.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.c.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**B. Kebijakan Belanja Daerah**

Penyediaan alokasi belanja daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp916.647.866.316,00 mengalami penurunan Rp13.490.592.615,00 atau 1,45% dari total anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2022 sebesar Rp930.138.458.931,00. Penyediaan alokasi Belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Penyediaan alokasi belanja daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp916.647.866.316,00 yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Belanja Daerah

| URAIAN | APBD | | | |
|---|---|---|---|---|
| | APBD TA.2022 | RANPERDA PERUBAHAN APBD TA 2022 | SELISIH LEBIH/KURANG | |
| | Rp. | Rp. | Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **BELANJA** | **930.138.458.931,00** | **916.647.866.316,00** | **(13.490.592.615,00)** | **1,45** |
| **BELANJA OPERASI** | **687.543.101.168,00** | **680.036.048.419,00** | **(7.507.052.749,00)** | **1,09** |
| Belanja Pegawai | 352.208.184.548,00 | 320.871.871.879,00 | (31.336.312.669,00) | 8,90 |
| Belanja Barang dan Jasa | 324.648.626.062,00 | 344.329.106.244,00 | 19.680.480.182,00 | 6,06 |
| Belanja Hibah | 10.651.316.558,00 | 11.943.380.796,00 | 1.292.064.238,00 | 12,13 |
| Belanja Bantuan Sosial | 34.974.000,00 | 2.891.689.500,00 | 2.856.715.500,00 | 8.168,11 |
| **BELANJA MODAL** | **135.467.217.973,00** | **122.555.451.293,00** | **(12.911.766.680,00)** | **9,53** |
| Belanja Modal Tanah | 1.000.000.000,00 | 48.205.800,00 | (951.794.200,00) | 95,18 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 22.471.068.406,00 | 30.996.483.488,00 | 8.525.415.082,00 | 37,94 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 30.487.994.520,00 | 35.396.879.457,00 | 4.908.884.937,00 | 16,10 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 80.418.356.748,00 | 55.011.673.749,00 | (25.406.682.999,00) | 31,59 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.089.798.299,00 | 1.102.208.799,00 | 12.410.500,00 | 1,14 |
| **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **1.000.000.000,00** | **6.189.407.385,00** | **5.189.407.385,00** | **518,94** |
| **BELANJA TRANSFER** | **106.128.139.790,00** | **107.866.959.219,00** | **1.738.819.429,00** | **1,64** |
| Belanja Bagi Hasil | 2.430.268.790,00 | 2.430.268.790,00 | - | - |
| Belanja Bantuan Keuangan | 103.697.871.000,00 | 105.436.690.429,00 | 1.738.819.429,00 | 1,68 |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

   a. SPM bidang Pendidikan

      Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan Rp28.076.394.786,00 atau 14,37% dari total belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp195.444.582.959,00. Total belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar

Rp195.444.582.959,00 mengalami peningkatan Rp1.625.184.094,00 atau 0,84% dari anggaran semula sebesar Rp193.819.398.865,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp4.623.751.270,00.
2) Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar Rp23.186.243.516,00;
3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp266.400.000,00;

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

1) 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.
2) 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTS.
3) 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp2.295.674.947,00 atau 1,38% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp165.807.293.145,00 mengalami peningkatan Rp10.289.993.227,00 atau 6,62% dari anggaran semula Rp155.517.299.918,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Rp639.933.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan kesehatan;
2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp138.540.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun untuk jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan;
3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp87.445.001,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun untuk bayi yang baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan;
4) Pelayanan Kesehatan Balita Rp644.073.945,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan;
5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp164.280.000,00 harus diprioritaskan 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan;

6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Rp190.510.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan;

7) Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut Rp284.535.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan;

8) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Rp35.018.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan;

9) Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberklosis Rp94.240.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan; dan

10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Rp17.100.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp11.793.360.380,00 atau 11,52% dari total belanja pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp102.356.024.206,00. Total belanja pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp102.356.024.206,00 mengalami penurunan Rp17.775.034.439,00 atau 14,80% dari anggaran semula Rp120.131.058.645,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp6.946.826.380,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp4.846.534.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp0,00, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp1.129.202.585,00 atau 4,21% dari total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp26.852.589.833,00 Total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp26.825.589.833,00 mengalami peningkatan Rp1.415.797.817,00 atau 5,57% dari anggaran semula Rp25.436.792.016,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Rp162.045.500,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada;

2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Rp419.789.020,00, harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara memperoleh layanan rawan Bencana;

3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Rp447.705.755,00, harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp27.355.000,00, harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Rp72.307.310,00, harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial Rp348.000.000,00 atau 2,37% dari total belanja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp14.663.715.455,00. Total belanja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp14.663.715.455,00 mengalami peningkatan Rp1.384.717.531,00 atau 10,43% dari anggaran semula sebesar Rp13.278.997.924,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti sebesar Rp348.000.000,00, harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti;

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional (PN) Tahun Anggaran 2022 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, prioritas nasional Tahun Anggaran 2022 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp24.941.347.681,00 atau 2,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Investasi dan Pariwisata dengan sasaran yang akan diwujudkan sebagai berikut:
   a) Terwujudnya optimalisasi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kota tujuan pariwisata, investasi di sektor industri, jasa, perdagangan, maritim, perikanan dan pertanian yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
   b) Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
2) Pemerataan Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran yang akan diwujudkan sebagai berikut:
   a) Terpenuhinya konsumsi pangan dan keamanan pangan;
   b) Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif, industri kecil menengah dan UMKM serta terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan pangan;
   c) Terwujudnya optimalisasi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kota tujuan pariwisata, investasi di sektor industri, jasa, perdagangan, maritim, perikanan dan pertanian yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
   d) Peningkatan kualitas hidup sosial kemasyarakatan.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui sembilan Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp21.226.243.451,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp650.806.000,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
3) Program Pengawasan Keamanan Pangan Rp20.362.890,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
4) Program Pengembangan UMKM Rp386.012.550,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
5) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp231.395.200,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp232.986.600,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Rp222.963.330,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

8) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Rp99.240.720,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

9) Program Perekonomian dan Pembangunan Rp1.871.336.940,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp136.193.337.307,00 atau 14,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan adalah Peningkatan Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Anambas dengan sasaran yang akan diwujudkan sebagai berikut:

1) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur.

2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN2, akan dilakukan melalui lima PP yaitu sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp22.137.772.018,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Rp493.208.390,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

3) Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp113.175.705.919,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp11.286.600,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp375.364.380,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp310.028.357.449,00 atau 33,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing adalah Peningkatan kapasitas SDM yang berkualitas dan bermartabat dengan sasaran yang akan diwujudkan sebagai berikut:

1) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik.
2) Meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata.
3) Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam mendorong penguatan perekonomian daerah.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui enam belas PP, yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp131.474.429.047,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp60.157.812.842,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi Rp9.744.000,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
4) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Rp72.307.310,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
5) Program Rehabilitasi Sosial Rp348.000.000,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
6) Program Hubungan Industrial Rp881.231.733,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Rp98.425.000,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

8) Program Promosi Penanaman Modal Rp234.415.380,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

9) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp114.987.600,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

10) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Rp1.221.530.122,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

11) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp231.395.200,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

12) Program Penyuluhan Pertanian Rp92.345.966,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

13) Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp113.175.705.919,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

14) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp952.857.950,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

15) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp641.023.580,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

16) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Rp322.145.800,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.871.360.700,00 atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu Peningkatan Investasi dan Pariwisata dengan sasaran terwujudnya optimalisasi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kota tujuan pariwisata, investasi di sektor industri, jasa, perdagangan, maritim, perikanan dan pertanian yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui lima PP, yaitu:

1) Program Pengembangan Kebudayaan Rp578.345.760,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
2) Program Pembinaan Perpustakaan Rp156.045.100,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
3) Program Perekonomian dan Pembangunan Rp1.871.336.940,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp25.907.500,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Rp239.725.400,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp72.059.034.791,00 atau 7,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2022 dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman.

Prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yaitu Peningkatan Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Sasaran (PN5) yaitu sebagai berikut:

1) Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap dan dalam kondisi baik;
2) Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam rangka pengendalian banjir;
3) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik yang berkualitas bagi masyarakat;
4) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik yang berkualitas bagi masyarakat;
5) Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan nyaman;
6) Meningkatnya jumlah pengguna transportasi umum.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui sembilan PP, yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp46.870.292.177,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
2) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Rp16.929.304.476,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp51.648.000,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
4) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rp3.079.381.860,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
5) Program Pengelolaan Arsip Rp38.768.000,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
6) Program Aplikasi Informatika Rp4.872.914.110,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Rp131.477.768,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
8) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp56.715.000,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

9) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp28.533.400,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.248.298.775,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6) yaitu Peningkatan Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu dengan sasaran tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari lima PP, yaitu:

1) Program Penanggulangan Bencana Rp894.849.775,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup Rp218.878.100,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Rp52.867.300,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

4) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Rp74.209.400,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp7.494.200,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp112.951.820.142,00 atau 12,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) yaitu Reformasi Birokrasi dengan sasaran sebagai berikut:

1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk.
2) Meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata.
3) Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan berkualitas.
4) Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.
6) Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan nyaman.
7) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui sebelas PP, yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp89.745.259.186,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
2) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp402.471.490,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Rp72.307.310,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
4) Program Pencatatan Sipil Rp116.678.342,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
5) Program Informasi dan Komunikasi Publik Rp4.492.521.456,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
6) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Rp79.246.000,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
7) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp17.043.604.460,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

8) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp318.649.380,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

9) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp78.011.200,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

10) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Rp545.798.718,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

11) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Rp57.272.600,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

3. Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 tersebut, yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

| No | Prioritas Nasional | Total Anggaran dalam APBD 2022 (Rp) | Rasio Terhadap Belanja Daerah (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 24.941.347.681,00 | 2,72 |
| 2. | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | 136.193.337.307,00 | 14,86 |
| 3. | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 310.028.357.449,00 | 33,82 |
| 4. | Revolusi Mental | 2.871.360.700,00 | 0,31 |
| 5. | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | 72.059.034.791,00 | 7,86 |
| 6. | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | 1.248.298.775,00 | 0,14 |
| 7. | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | 112.951.820.142,00 | 12,32 |
| Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD | | 660.293.556.845,00 | 72,03 |
| Total Belanja Daerah | | 916.647.866.316,00 | |

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel diatas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan 2022 meliputi:

a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah.
b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan.
c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

4. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022.

   Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2022 yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2022

| No | Prioritas Daerah | Total Anggaran dalam P-APBD (Rp) | Rasio Terhadap Belanja Daerah (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan yang Berkualitas dan Sistem Kesehatan Yang Tangguh | 271.252.660.798,00 | 29,59 |
| 2 | Kesejahteraan Sosial dan SDM Unggul yang Berakhlakul Karimah | 38.149.791.349,00 | 4,16 |
| 3 | Perikanan dan Pariwisata Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Lingkungan Hidup yang Lestari | 16.422.325.578,00 | 1,79 |
| 4 | Konektivitas dan Sarana Prasarana Wilayah yang Menunjang Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi | 133.684.589.424,00 | 14,58 |
| 5 | Birokrasi yang Melayani dan Inovatif, Serta Otonomi Desa yang Berdaya Saing | 401.794.340.744,00 | 43,83 |
| Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD | | 861.303.707.893,00 | 93,96 |
| Total Belanja Daerah | | 916.647.866.316,00 | |

5. Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

   Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 agar tetap mengalokasikan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan.
b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup.
c. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net.*

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi COVID-19 yaitu Rp44.652.765.639,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan sebesar Rp43.578.430.639,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:
    1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp20.844.577.620,00;
    2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Kesehatan sebesar Rp485.512.334,00;
    3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan sebesar Rp22.248.340.685,00;

b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar Rp1.000.000.000,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:

   - Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp1.000.000.000,00;

c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* sebesar Rp74.335.000,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:

   - Program Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp74.335.000,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

6. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

   a. Jumlah alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar Rp195.444.582.959,00 atau 21,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp916.647.866.316,00, yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Fungsi Pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2022

| NO | KOMPONEN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH DANA APBD TA 2022 | JUMLAH DANA R.P-APBD TA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | a. | Belanja pada Dinas Pendidikan | | | 193.819.398.865,00 | 195.444.582.959,00 |
| | | 1) | Belanja Operasi | | 167.651.466.240,00 | 166.569.024.312,00 |
| | | | a. | Belanja Pegawai | 101.200.191.704,00 | 99.209.370.053,00 |
| | | | b. | Belanja Barang dan Jasa | 63.878.608.032,00 | 64.516.576.455,00 |
| | | | c. | Belanja Hibah | 2.572.666.504,00 | 2.843.077.804,00 |
| | | | d. | Belanja Bansos | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) | Belanja Modal | | 26.167.932.625,00 | 28.875.558.647,00 |
| | b. | Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b) | | | | 193.819.398.865,00 | 195.444.582.959,00 |
| 3. | Total Belanja Daerah | | | | 930.138.458.931,00 | 916.647.866.316,00 |
| Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100% | | | | | 20,84% | 21,32% |

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana dimaksud butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

b. Jumlah alokasi anggaran untuk urusan kesehatan Rp165.807.293.145,00 atau 19,93% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp832.090.964.393,00, yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7

Urusan Kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kepulauan Anambas

| NO | KOMPONEN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH DANA APBD TA 2022 | JUMLAH DANA R.P-APBD TA 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | a. | Belanja pada Dinas Kesehatan | | | 155.517.299.918,00 | 165.807.293.145,00 |
| | | 1) | Belanja Operasi | | 141.197.359.539,00 | 145.667.220.249,00 |
| | | | a) | Belanja Pegawai | 59.303.978.167,00 | 61.635.813.416,00 |
| | | | b) | Belanja Barang dan Jasa | 81.893.381.372,00 | 84.031.406.833,00 |
| | | | c) | Belanja Hibah | 0,00 | 0,00 |
| | | | d) | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) | Belanja Modal | | 14.319.940.379,00 | 20.140.072.896,00 |
| | b | Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Anggaran Kesehatan (a+b) | | | | 155.517.299.918,00 | 165.807.293.145,00 |
| 3 | Total Belanja Daerah | | | | 930.138.458.931,00 | 916.647.866.316,00 |
| 4 | Gaji ASN | | | | 99.750.393.084,00 | 84.556.901.923,00 |
| 5 | Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4) | | | | 830.388.065.847,00 | 832.090.964.393,00 |
| Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100% | | | | | 18,73% | 19,93% |

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan persentase sebesar 19,93% tersebut agar tidak menurunkan jumlah alokasi anggarannya. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

c. Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum

Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, harus diarahkan penggunaannya paling sedikit 40% (empat puluh persen) untuk percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam

rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah, sesuai amanat butir E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan dalam Tabel 8 dan Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 8
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

| No | Komponen Perhitungan | Jumlah dalam APBD 2022 | Jumlah dalam R.P-APBD 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | Penerimaan Dana Transfer Umum | | |
| | a) DAU | 368.970.082.000,00 | 368.970.082.000,00 |
| | b) DBH | 294.377.964.718,00 | 267.268.713.599,00 |
| | Jumlah Penerimaan | 663.348.046.718,00 | 636.238.795.599,00 |
| 2 | Pengurang | | |
| | a) DAU Tambahan | 0,00 | 0,00 |
| | b) DBH yang bersifat *earmarked* | 0,00 | 0,00 |
| | c) ADD | 66.500.000.000,00 | 63.707.000.000,00 |
| | Jumlah Pengurang | 66.500.000.000,00 | 63.707.000.000,00 |
| Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan | | 596.848.046.718,00 | 572.531.795.599,00 |

Tabel 9
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

| NO | KOMPONEN PERHITUNGAN | | APBD TA 2022 | R.P-APBD TA 2022 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) | Belanja Modal: | 135.467.217.973 | 122.555.451.293 | (12.911.766.680) |
| | | 1) Tanah | 1.000.000.000 | 48.205.800 | (951.794.200) |
| | | 2) Peralatan dan Mesin | 22.471.068.406 | 30.996.483.488 | 8.525.415.082 |
| | | 3) Bangunan dan Gedung | 30.487.994.520 | 35.396.879.457 | 4.908.884.937 |
| | | 4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 80.418.356.748 | 55.011.673.749 | (25.406.682.999) |
| | | 5) Aset Tetap Lainnya | 1.089.798.299 | 1.102.208.799 | 12.410.500 |
| | | 6) Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | Belanja Pemeliharaan | 10.030.471.869 | 7.852.999.921 | (2.177.471.948,00) |
| 2 | a) | Belanja Hibah | 10.651.316.558 | 11.943.380.796 | 1.292.064.238 |
| | b) | Belanja Bantuan Sosial | 34.974.000 | 2.891.689.500 | 2.856.715.500 |
| | c) | Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2) | | 156.183.980.400 | 145.243.521.510 | (10.940.458.890,00) |
| 4 | Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum | | 26,17% | 25,37% | 0,80% |

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi anggaran minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk Infrastruktur pelayanan publik minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp7.617.499.002,00 atau 0,83% dari total belanja daerah sebesar Rp916.647.866.316,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir E.35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas Rp11.615.350.300,00 atau 1,27% dari total belanja daerah sebesar Rp916.647.866.316,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam butir E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1) Kegiatan pengawasan, yaitu:

   a) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBP, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, *monitoring* dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;

   b) Pengawasan prioritas nasional meliputi *monitoring* dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan, tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;

   c) Pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati/Wali Kota untuk Inspektorat Provinsi dan evaluasi pelayanan publik;

   d) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, *survey* penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;

2) Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.

3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

sebagaimana ditegaskan dalam butir E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

f. Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan yang antara lain:

   1) Penyediaan anggaran Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru Rp500.868.680,00 dari semula tidak dianggarkan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja

Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp65.680,00 dari semula tidak dianggarkan pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

2) Penyediaan anggaran Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Rp1.022.954.280,00 dari semula tidak dianggarkan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp6.000,00 dari semula tidak dianggarkan pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

3) Penyediaan anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp1,00 terdapat penurunan Rp19.199.999,00 dari anggaran semula Rp19.200.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp1,00 dari semula tidak dianggarkan pada SKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

4) Penyediaan anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp688.313.376,00 terdapat peningkatan Rp73.328.872,00 dari anggaran semula Rp614.984.504,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp1.616,00 dari semula tidak dianggarkan pada SKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

5) Penyediaan anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp69.744.500,00 terdapat penambahan Rp68.984.500,00 dari anggaran semula Rp760.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Jasa Kantor Rp200,00 dari semula tidak dianggarkan pada SKPD Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

g. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp170.000.000 ,00 tidak ada penambahan dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 atau 0,02% dari total belanja daerah. Telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama

dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepaia Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/639/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

h. Penyediaan Anggaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebesar Rp129.293.200,00 atau 0,01% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, turun Rp4.245.000,00 dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 Rp133.538.200,00. Dianggarkan guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir E.69.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

i. Penyediaan Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebesar Rp279.863.250,00 atau 0,03% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, turun Rp132.551.750,00 dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 Rp412.415.000,00. Dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi/Kabupaten/Kota melalui:

   1) Penanganan *stunting* melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk;

   2) Dukungan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, *oxymeter,* tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;

3) Pemberdayaan dasa wisma;

4) Mendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif;

5) Mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperluas pangsa pasar hasil kerajinan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam butir E.65 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

j. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BOS, antara lain tercantum pada:

1) Belanja Barang dan Jasa BOS Rp7.847.964.391,00 tidak terdapat penambahan dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022;

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp4.512.464.345,00 tidak terdapat penambahan dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA;

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp626.618.299,00 tidak terdapat penambahan dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan sebagaimana dimaksud pada butir C.15.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp680.036.048.419,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.507.052.749,00 atau 1,09% dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp687.543.101.168,00. Belanja Operasi sebesar Rp680.036.048.419,00 atau 74,19% dari total belanja daerah Rp916.647.866.316,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada obyek belanja dengan kode rekening:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Belanja Pegawai sebesar Rp320.871.871.879,00 terdapat penurunan sebesar Rp31.336.312.669,00 atau 8,90% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp352.208.184.548,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja dengan kode rekening:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.01 Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp122.213.313.325,00 terdapat penurunan sebesar Rp22.749.755.937,00 atau 15,69% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp144.963.069.262,00.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran agar memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir C.2.s.1).a).(7).(a), butir C.2.s.1).a).(7).(b), dan butir C.2.s.1).a).(7).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

2) Penganggaran Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja dengan kode rekening:

a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp10.001.284.698,00 mengalami penurunan Rp2.302.659.908,00 atau 18,71% dari anggaran semula Rp12.303.944.606,00;

b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp35.875.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula;

yang diperuntukkan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan harus memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(7).(d) dan C.2.s.1).a).(7).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(7).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp10.651.138.520,00 tidak mengalami perubahan dari total anggaran semula.

   Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD memedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

   Selanjutnya, alokasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD harus diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tidak ada perubahan dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp305.805.560,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menentukan besarannya disesuaikan dengan memedomani Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp300 juta dan paling tinggi 0,80% dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp41.450.650.040,00 yaitu Rp331.605.200,32.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu, dari aspek teknis penganggaran, alokasi belanja dana operasional KDH/WKDH harus diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sekretariat daerah serta diuraikan pada sub kegiatan "Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5) Penyediaan anggaran dengan kode rekening:

a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp156.068.975.137,00 terdapat penurunan sebesar Rp11.641.562.079,00 atau 6,94% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp167.710.537.216,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp90.901.757.071,00 terdapat kenaikan Rp1.006.431.747,00,20 atau 1,12% dari anggaran semula Rp89.895.325.324,00;

(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp8.212.831.027,00 terdapat kenaikan sebesar Rp800.589.631,00 atau 10,80% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp7.412.241.396,00;

(3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp6.263.789.733,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.007.789.733,00 atau 19,17% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp5.256.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.s.1).a).(7).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai ASN daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Kepala Daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan terlebih dahulu memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan.

b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp30.578.450.682,00 terdapat kenaikan sebesar Rp3.055.005.347,00 atau 11,10% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp27.523.445.335,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp2.292.823.906,00 terdapat kenaikan Rp568.920.218,00 atau 33% dari anggaran semula Rp1.723.903.688,00;

(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp11.157.606.165,00 terdapat penurunan Rp1.069.961.683,00 atau 8,75% dari anggaran semula Rp12.227.567.848,00;

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dimaksud agar lebih rasional dan memperhitungkan kebutuhan aggaran dimaksud secara cukup untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran. penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan

memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.s.1).a).(7).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berkaitan dengan itu, Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.2.s.1).a).(7).(l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran:

a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp11.779.512.960,00 terdapat kenaikan Rp2.110.748.960,00 atau 21,83% dari anggaran semula Rp9.668.764.000,00;

b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TPG) PNSD Rp2.707.428.800,00 terdapat kenaikan Rp808.921.800,00 atau 42,61% dari anggaran semula Rp1.898.507.000,00;

c) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp1.163.500.000,00 terdapat kenaikan Rp732.250.000,00 atau 169,80% dari anggaran semula Rp431.250.000,00,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik memedomani sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(7).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pemberian Insentif Pajak Daerah bagi pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan berpedoman pada pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.s.1).a).(7).(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam pelaksanaannya agar diformulasikan kedalam sub rincian obyek yang berkenaan tidak hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(7).(m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru Rp305.221.430.119,00 atau 33,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan penganggaran belanja pegawai diluar tunjangan guru dibawah 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

b. Belanja Barang Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp344.329.106.244,00 terdapat kenaikan sebesar Rp19.680.480.182,00 atau 6,06% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp324.648.626.062,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.s.1).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja dengan kode rekening:

1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01 Belanja Barang Rp61.609.548.203,00 terdapat kenaikan sebesar Rp11.546.787.829,00 atau 23,06% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp50.062.760.374,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

   - x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp61.556.988.203,00 terdapat kenaikan sebesar Rp11.500.995.829,00 atau 22,98% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp50.055.992.374,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

     (1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas Rp873.992.600,00 terdapat kenaikan sebesar Rp369.720.914,00 atau 73,32% dari total anggaran semula Rp504.271.686,00;

     (2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp3.217.699.284,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.545.098.984,00 atau 378,40% dari total anggaran semula Rp672.600.300,00;

     (3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat Rp11.993.963.629,00 terdapat kenaikan sebesar Rp3.248.156.897,00 atau 37,14% dari total anggaran semula Rp8.745.806.732,00;

     (4) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp7.326.575.830,00 terdapat kenaikan sebesar Rp6.378.974.030,00 atau 673,17% dari total anggaran semula Rp947.601.800,00;

     (5) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp2.088.087.111,00 terdapat kenaikan sebesar Rp236.389.241,00 atau 12,77% dari total anggaran semula Rp1.851.697.870,00;

     (6) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp4.722.904.950,00 terdapat kenaikan sebesar Rp533.615.950,00 atau 12,74% dari total anggaran semula Rp4.189.289.000,00;

   dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya belanja barang pakai habis agar diefisiensi dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan memedomani Pasal 9

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir C.2.s.1).b).(3).(a).i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Penyediaan anggaran tersebut juga aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya penyediaan anggaran x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp4.854.533.661,00 terdapat kenaikan sebesar Rp284.274.711,00 atau 6,22% dari total anggaran semula Rp4.570.258.950,00 dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan kembali harga bahan bakar sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesi Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02 Belanja Jasa Rp210.353.045.974,00 terdapat kenaikan sebesar Rp13.873.319.784,00 atau 7,06% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp196.479.726.190,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

   a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp147.316.469.229,00 terdapat penurunan sebesar Rp5.580.126.959,00 atau 3,65% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp152.896.596.188,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

      (1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp2.493.565.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp783.617.500,00 atau 23,91% dari total anggaran semula Rp3.277.182.500,00;

      (2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp5.426.558.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp346.820.000,00 atau 6,01% dari total anggaran semula Rp5.773.378.000,00;

(3) xx.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga kesehatan Rp14.414.768.322,00 terdapat penurunan sebesar Rp4.753.029.723,00 atau 24,80% dari total anggaran semula Rp19.167.798.045,00;

(4) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp5.011.432.500,00 terdapat kenaikan sebesar Rp304.632.500,00 atau 6,47% dari total anggaran semula Rp4.706.800.000,00;

(5) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0074 Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Rp936.000.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp336.000.000,00 atau 56% dari total anggaran semula Rp600.000.000,00;

(6) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0075 Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 Rp416.678.600,00 semula tidak dianggarkan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

Selanjutnya, kenaikan penyediaan anggaran jasa/ honorarium/kompensasi yang antara lain :

(1) xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp858.664.400,00 terdapat kenaikan sebesar Rp496.494.000,00 atau 137,09% dari total anggaran semula Rp362.170.400,00;

(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp3.930.390.304,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.462.501.048,00 atau 59,26% dari total anggaran semula Rp2.467.889.256,00;

(3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp2.751.631.054,00 terdapat kenaikan sebesar Rp462.315.651,00 atau 20,19% dari total anggaran semula Rp2.289.315.403,00;

penyediaan anggaran tersebut agar dirasionalisasi atau ditinjau kembali terkait besarannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.s.1).b).(3).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp23.229.807.275,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.597.339.091,00 atau 7,38% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp21.632.468.184,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp12.075.964.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.155.964.000,00 atau 10,59% dari total anggaran semula sebesar Rp10.920.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir C.2.1).b).(3).(b).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp7.955.160.928,00 terdapat kenaikan sebesar Rp57.570.424,00 atau 0,73% dari total anggaran semula sebesar Rp7.897.590.504,00;

(3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp1.375.055.880,00 terdapat kenaikan sebesar Rp326.973.000,00 atau 31,20% dari total anggaran semula sebesar Rp1.048.082.880,00;

(4) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp1.069.681.667,00 terdapat kenaikan sebesar Rp226.886.867,00 atau 26,92% dari total anggaran semula sebesar Rp842.794.800,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN, belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang

dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kesehatan, risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat dan risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sebagaimana dimaksud butir C.2.1).b).(3).(b).ii.i), C.2.1).b).(3).(b).v dan butir C.2.1).b).(3).(b).vi, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp8.543.146.819,00 terdapat kenaikan sebesar Rp369.665.319,00 atau 4,52% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp8.173.481.500,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator Rp224.750.000,00 semula tidak dianggarkan;

(b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp312.250.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp214.850.000,00 atau 220,59% dari total anggaran semula Rp97.400.000,00;

(c) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp5.929.852.750,00 terdapat kenaikan sebesar Rp447.681.250,00 atau 8,17% dari total anggaran semula Rp5.482.171.500,00;

(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp7.865.719.807,00 terdapat penurunan sebesar Rp267.641.111,00 atau 3,29% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp8.133.360.918,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor tidak dianggarkan dari total anggaran semula Rp4.353.411.268,00 terdapat penurunan sebesar Rp369.614.150,00 atau 7,83% dari total anggaran semula Rp4.723.025.418,00;

(b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.05.0006 Belanja Sewa Bangunan Kesehatan Rp101.147.046,00 semula tidak dianggarkan;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing

kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan untuk memenuhi belanja wajib dan mendanai kegiatan prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah dan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana amanat Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).vii Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp20.598.156.843,00 terdapat kenaikan sebesar Rp17.778.534.443,00 atau 630,53% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp2.819.622.400,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural Rp117.275.400,00 semula tidak diangagarkan;

(b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp2.313.930.349,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.117.524.875,00 atau 1.078,14% dari total anggaran semula Rp196.405.474,00;

(c) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Rp6.286.742.881,00 terdapat kenaikan sebesar Rp6.158.564.294,00 atau 4.804,67% dari total anggaran semula Rp128.178.587,00;

(d) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Rp606.640.210,00 terdapat kenaikan sebesar Rp560.044.210,00 atau 1.201,91% dari total anggaran semula Rp46.596.000,00;

(e) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Rp387.267.000,00 semula tidak dianggarkan;

(f) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Rp3.132.723.700,00 terdapat kenaikan sebesar Rp3.024.518.700,00 atau 2.795,17% dari total anggaran semula Rp108.205.000,00;

(g) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp2.353.016.019,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.671.501.300,00 atau 245,26% dari total anggaran semula Rp681.514.719,00;

(h) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Rp3.833.906.160,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.526.380.600,00 atau 193,22% dari total anggaran semula Rp1.307.525.560,00;

(i) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan Rp1.106.156.176,00 semula tidak dianggarkan;

(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp980.191.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp250.139.000,00 atau 34,26% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp730.052.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Rp310.259.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp70.257.000,00 atau 29,27% dari total anggaran semula Rp240.002.000,00;

(b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp199.342.000,00 semula tidak dianggarkan;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, Penganggaran jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sebagaimana maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).viii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

e) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp1.146.479.001,00 terdapat penurunan sebesar Rp104.065.999,00 atau 8,32% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp1.250.545.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp1.054.842.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp50.047.000,00 atau 4,98% dari total anggaran semula Rp1.004.795.000,00;

(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp61.370.001,00 terdapat penurunan sebesar Rp139.379.999,00 atau 69,43% dari total anggaran semula Rp200.750.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan

penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar diprioritaskan pelaksanaannya diwilayah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).xi.ii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut harus dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah dan pelaksanaannya mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir C.2.1).b).(3).(b).xi.ii).(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp7.852.999.921,00 terdapat penurunan sebesar Rp875.895.186,00 atau 10,03% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp8.728.895.107,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp3.704.629.564,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.902.678.787,00 atau 33,93% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp5.607.308.351,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa Rp49.500.000,00 semula tidak dianggarkan;

(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.02.0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar Rp57.198.000,00 semula tidak dianggarkan;

(3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.02.0494 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp51.431.600,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.517.721.011,00 atau 96,72% dari total anggaran semula Rp1.569.152.611,00;

b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp2.612.426.728,00 terdapat kenaikan sebesar Rp672.946.648,00 atau 34,70% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp1.939.480.080,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp2.233.969.981,00 terdapat kenaikan sebesar Rp361.343.901,00 atau 19,30% dari total anggaran semula Rp1.872.626.080,00;

(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan Rp316.607.747,00 semula tidak dianggarkan;

c) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp1.535.943.629,00 terdapat kenaikan sebesar Rp353.836.953,00 atau 29,93% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp1.182.106.676,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Rp518.006.867,00 terdapat kenaikan sebesar Rp320.046.867,00 atau 161,67% dari total anggaran semula Rp197.960.000,00;

(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.04.0009 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jalan-Jalan Khusus Rp309.984.313,00 terdapat kenaikan sebesar Rp209.984.000,00 atau 209,98% dari total anggaran semula Rp100.000.313,00;

(3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.04.0120 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi Rp99.171.000,00 semula tidak dianggarkan;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir C.2.s.1).b).(3).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

4) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp53.428.257.755,00 terdapat penurunan sebesar Rp3.997.432.245,00 atau 6,96% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp57.425.690.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp53.428.257.755,00 terdapat penurunan sebesar Rp3.997.432.245,00 atau 6,96% dari total anggaran semula sebesar Rp57.425.690.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

  (1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp37.308.511.942,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.582.923.058,00 atau 4,07% dari total anggaran semula Rp38.891.435.000,00;

  (2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota Rp16.119.745.813,00 terdapat penurunan sebesar Rp2.414.509.187,00 atau 13,03% dari total anggaran semula Rp18.534.255.000,00;

harus ditinjau kembali belanja perjalanan dinas yang mengalami peningkatan pada SKPD pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan jumlah hari efektif yang dapat melakukan perjalanan dinas pada masing-masing kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan untuk mendanai kegiatan prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).b).(3).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

5) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp3.237.290.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp866.300.000,00 atau 21,11% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp4.103.590.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

   a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp3.100.290.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp650.400.000,00 atau 17,34% dari total anggaran semula sebesar Rp3.750.690.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

      (1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat perlombaan Rp139.450.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp343.000.000,00 atau 71,10% dari total anggaran semula Rp482.450.000,00;

      (2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa Rp2.577.140.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp307.400.000,00 atau 10,66% dari total anggaran semula Rp2.884.540.000,00;

   dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.s.1).b).(3).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp137.000.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp215.900.000,00 atau 61,18% dari total anggaran semula sebesar Rp352.900.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp137.000.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp166.900.000,00 atau 54,92% dari total anggaran semula Rp303.900.000,00;

Selanjutnya, penyediaan anggaran untuk Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan pada kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dapat dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.s.1).b).(3).(e).ii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1) Belanja Hibah

Penganggaran Belanja Hibah x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.05 Rp11.943.380.796,00 atau 12,13% dari total belanja daerah, mengalami kenaikan sebesar Rp1.292.064.238,00 dibanding Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.651.316.558,00 yang antara lain tercantum pada obyek belanja dengan kode rekening:

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp11.198.586.574,00 terdapat kenaikan

sebesar Rp1.292.064.238,00 atau 13,04% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp9.906.522.336,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Rp5.501.901.900,00 terdapat kenaikan sebesar Rp178.684.200,00 atau 3,36% dari total anggaran semula sebesar Rp5.323.217.700,00;

(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp5.526.684.674,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.113.380.038,00 atau 25,23% dari total anggaran semula sebesar Rp4.413.304.636,00;

2) Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.06 Rp2.891.689.500,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.856.715.500,00 atau 8.168,11% dari anggaran sebelumnya dalam Perda APBD TA 2022 Rp34.974.000,00 yang tercantum pada obyek belanja dengan kode rekening:

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp2.811.689.500,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.776.715.500,00 atau 7.939,37% dari anggaran sebelumnya Rp34.974.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir C.2.s.1).e).(1) dan butir C.2.s.1).e).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Dalam alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus sesuai dengan pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam P-KUA dan P-PPAS. Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, apabila penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Rp2.891.689.500,00 terdapat peningkatan sebesar Rp2.856.715.500,00 atau 8.168,11% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp34.974.000,00 diperuntukkan dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi Tahun Anggaran 2022 yang diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari Dana Transfer Umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2022. Untuk itu, penempatan rekeningnya agar dialihkan ke Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah dan Surat Edaran Nomor 840/5412/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp122.555.451.293,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.911.766.680,00 atau 9,53% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar

Rp135.467.217.973,00. Belanja Modal Rp122.555.451.293,00 atau 13,37% dari total belanja daerah Rp916.647.866.316,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.2).f).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan melewati batas minimal kapitalisasi asset tetap dengan memedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Kepulauan Anambas sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.s.2).k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada kode rekening:

a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.01 Belanja Modal Tanah Rp48.205.800,00 terdapat penurunan sebesar Rp951.794.200,00 atau 95,18% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

   - x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.01.01 Belanja Modal Tanah Rp48.205.800,00 terdapat penurunan sebesar Rp951.794.200,00 atau 95,18% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00;
     - x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan Rp48.205.800,00 terdapat penurunan sebesar Rp951.794.200,00 atau 95,18% dari total anggaran semula Rp1.000.000.000,00;
       - x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.01.01.03.0008 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air Rp48.205.800,00 dari semula tidak dianggarkan;

   dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana dimaksud pada butir C.2.s.2).h) dan butir C.2.s.2).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp30.996.483.488,00 terdapat penambahan sebesar Rp8.525.415.082,00 atau 37,94% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp22.471.068.406,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

   1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar Rp738.599.500,00 terdapat penambahan Rp586.739.000,00 atau 386,37% dari total anggaran semula sebesar Rp151.860.500,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja dengan kode rekening:

      a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.01.02 Belanja Modal Alat Besar Apung Rp120.000.000,00 dari semula tidak dianggarkan;

      b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu Rp516.970.500,00 mengalami kenaikan Rp464.110.000,00 atau 877,99% dari total anggaran semula Rp52.860.500,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set Rp200.000.000,00 dari semula tidak dianggarkan;

(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.01.03.0013 Belanja Modal Peralatan Selam Rp192.060.000,00 dari semula tidak dianggarkan;

2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp3.523.325.600,00 terdapat penambahan Rp3.173.199.600,00 atau 906,30% dari total anggaran semula sebesar Rp350.126.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja dengan kode rekening:

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.02.03 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp3.044.718.600,00 dari semula tidak dianggarkan;

3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp2.717.371.073,00 terdapat penambahan Rp1.293.498.780,00 atau 90,84% dari total anggaran semula sebesar Rp1.423.872.293,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp1.509.996.603,00 mengalami penambahan Rp741.150.202,00 atau 96,40% dari total anggaran semula Rp768.846.401,00;

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp776.421.603,00 mengalami penambahan Rp526.182.502,00 atau 210,27% dari total anggaran semula Rp250.239.101,00;

b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp1.016.329.910,00 mengalami penambahan Rp848.961.078,00 atau 507,24% dari total anggaran semula Rp167.368.832,00;

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp717.347.410,00 mengalami penambahan Rp591.378.578,00 atau 469,46% dari total anggaran semula Rp125.968.832,00;

4) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp675.312.011,00 terdapat penurunan Rp943.825.014,00 atau 58,29% dari total anggaran semula sebesar Rp1.619.137.025,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp108.660.000,00 mengalami penurunan Rp968.740.000,00 atau 89,91% dari total anggaran semula Rp1.077.400.000,00;

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga Rp59.160.000,00 mengalami penurunan Rp963.240.000,00 atau 94,21% dari total anggaran semula Rp1.022.400.000,00;

5) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp14.128.494.171,00 terdapat penambahan Rp1.401.893.828,00 atau 11,02% dari total anggaran semula sebesar Rp12.726.600.343,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
   a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran Rp5.888.599.255,00 terdapat penurunan Rp1.174.809.088,00 atau 16,63% dari total anggaran semula sebesar Rp7.063.408.343,00;
      (1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp1.620.195.690,00 terdapat penurunan Rp1.554.450.310,00 atau 48,96% dari total anggaran semula sebesar Rp3.174.646.000,00;
      (2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya Rp612.641.767,00 terdapat penambahan Rp536.554.767,00 atau 705,19% dari total anggaran semula sebesar Rp76.087.000,00;
   b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp8.239.894.916,00 mengalami penambahan Rp2.576.702.916,00 atau 45,50% dari total anggaran semula Rp5.663.192.000,00;
6) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium Rp548.234.800,00 terdapat penambahan Rp448.409.800,00 atau 449,20% dari total anggaran semula sebesar Rp99.825.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
   a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp410.344.800,00 dari semula tidak dianggarkan;
      (1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.08.01.0020 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Rp212.232.000,00 dari semula tidak dianggarkan;
      (2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.08.01.0048 Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Rp198.112.800,00 dari semula tidak dianggarkan;
   b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp137.890.000,00 dari semula tidak dianggarkan;
      (1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.08.03.0011 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga Rp37.950.000,00 dari semula tidak dianggarkan;
      (2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK Rp99.940.000,00 dari semula tidak dianggarkan;
7) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.10 Belanja Modal Komputer sebesar Rp2.938.282.188,00 terdapat penambahan Rp1.386.337.288,00 atau 89,33% dari total anggaran semula sebesar Rp1.551.944.900,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp2.078.809.353,00 mengalami penambahan Rp993.346.553,00 atau 91,51% dari total anggaran semula Rp1.085.462.800,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp1.402.402.960,00 penambahan Rp1.362.538.960,00 atau 3.417,97% dari anggaran semula Rp39.864.000,00;

b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp859.472.835,00 mengalami penambahan Rp392.990.735,00 atau 84,25% dari total anggaran semula Rp466.482.100,00;

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp230.686.950,00 mengalami penambahan Rp224.686.950,00 atau 3.744,78% dari total anggaran semula Rp6.000.000,00;

8) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp377.599.200,00 terdapat penambahan Rp374.099.200,00 atau 10.688,55% dari total anggaran semula sebesar Rp3.500.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.15.0006 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya Rp377.599.200,00 dari semula tidak dianggarkan;

9) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp542.231.600,00 dari semula tidak dianggarkan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp542.231.600,00 dari semula tidak dianggarkan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja dengan kode rekening:

(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar Rp119.820.000,00 dari semula tidak dianggarkan;

(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Rp422.411.600,00 dari semula tidak dianggarkan;

10) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp292.072.000,00 dari semula tidak dianggarkan;

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.19.01.006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Rp292.072.000,00 dari semula tidak dianggarkan.

c. x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.396.879.457,00 terdapat penambahan Rp4.908.884.937,00 atau 16,10% dari total anggaran semula

sebesar Rp30.487.994.520,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang antara lain tercantum pada obyek belanja dengan kode rekening:

1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp34.502.221.457,00 terdapat penambahan Rp4.209.226.937,00 atau 13,90% dari total anggaran semula sebesar Rp30.292.994.520,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja dengan kode rekening:

   - x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp34.502.221.457,00 terdapat penambahan Rp4.209.226.937,00 atau 13,90% dari total anggaran semula sebesar Rp30.292.994.520,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

     (1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp293.536.800,00 dari semula tidak dianggarkan;

     (2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang Rp1.233.041.014,00 dari semula tidak dianggarkan;

     (3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp1.163.830.000,00 terdapat penurunan Rp648.830.000,00 atau 125,99% dari total anggaran semula sebesar Rp515.000.000,00;

     (4) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp20.162.689.603,00 terdapat penurunan Rp866.160.378,00 atau 4,12% dari total anggaran semula sebesar Rp21.028.849.981,00;

     (5) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Rp2.109.233.478,00 dari semula tidak dianggarkan;

     (6) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka Rp94.775.340,00 dari semula tidak dianggarkan;

     (7) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01.0027 Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rp89.760.000,00 dari semula tidak dianggarkan;

     (8) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp9.021.100.683,00 terdapat penambahan Rp782.331.683,00 atau 9,50% dari total anggaran semula sebesar Rp8.238.769.000,00;

2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.03 Belanja Modal Bangunan Menara Rp544.809.000,00 dari semula tidak dianggarkan;

d. x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp55.011.673.749,00 terdapat penurunan Rp25.406.682.999,00 atau 31,59% dari total anggaran semula sebesar Rp80.418.356.748,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang antara lain tercantum pada obyek belanja dengan kode rekening:

1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp45.962.225.174,00 terdapat penambahan Rp19.283.034.564,00 atau 72,28% dari total anggaran semula sebesar Rp26.679.190.610,00;

a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan Rp41.269.944.853,00 terdapat penambahan Rp14.880.428.243,00 atau 56,39% dari total anggaran semula sebesar Rp26.389.516.610,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp40.772.300.717,00 terdapat penambahan Rp14.580.986.903,00 atau 55,67% dari total anggaran semula sebesar Rp26.191.313.814,00.

(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa Rp142.603.340,00 dari semula tidak dianggarkan;

b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan Rp4.692.280.321,00 terdapat penambahan Rp4.402.606.321,00 atau 1.519,85% dari total anggaran semula sebesar Rp289.674.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:

(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten Rp1.554.214.800,00 dari semula tidak dianggarkan;

(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.01.02.0005 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa Rp1.451.339.060,00 dari semula tidak dianggarkan;

(3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.01.02.0011 Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal Rp1.686.726.461,00 terdapat penambahan Rp1.397.052.461,00 atau 482,28% dari total anggaran semula sebesar Rp289.674.000,00;

2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air Rp3.380.400.388,00 terdapat penurunan Rp26.519.599.612,00 atau 88,69% dari total anggaran semula sebesar Rp29.900.000.000,00; yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja dengan kode rekening:

a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.02.02 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Rp317.488.342,00 dari semula tidak dianggarkan;

b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp2.839.362.046,00 dari semula tidak dianggarkan;

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp2.689.502.246.00 dari semula tidak dianggarkan;

3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi Rp127.999.300,00 dari semula tidak dianggarkan yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja dengan kode rekening;

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.03.09 Belanja Modal Instalasi Pengaman Rp127.999.300,00 dari semula tidak dianggarkan;

4) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan Rp5.541.048.887,00 terdapat penurunan Rp18.298.117.251,00 atau 76,76% dari total anggaran semula sebesar Rp23.839.166.138,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja dengan kode rekening:

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp5.541.048.887,00 terdapat penurunan Rp18.298.117.251,00 atau 76,76% dari total anggaran semula sebesar Rp23.839.166.138,00;

dapat dianggarkan dalam Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2022 dengan memperhatikan Laporan Realisasi Anggaran pada periode 30 September 2022, dimana penyerapan belanja modal terealisasi sebesar 33,47% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022. Dan dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran, serta menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran serta sisa waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, dalam pengadaannya juga harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-alat tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat. Pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai

kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengadaan barang milik daerah dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

9. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belanja Tidak Terduga Rp6.189.407.385,00 terdapat penambahan sebesar Rp5.189.407.385,00 atau 518,94% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran Belanja Tak Terduga Rp6.189.407.385,00 atau 0,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 agar memperhatikan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir C.2.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran belanja tidak terduga sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah.

10. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp107.866.959.219,00 terdapat penambahan Rp1.738.819.429,00 atau 1,64% dari anggaran semula sebesar Rp106.128.139.790,00. Belanja Transfer Rp107.866.959.219,00 atau 11,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.430.268.790,00 tidak ada penambahan dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pelaksanaanya agar memedomani butir C.2.s.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berkaitan dengan itu, Alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan Rp105.436.690.429,00 terdapat penambahan Rp1.738.819.429,00 atau 1,68% dari anggaran semula sebesar Rp103.697.871.000,00 dalam Perda APBD TA 2022. Belanja Bantuan Keuangan Rp105.436.690.429,00 atau 11,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp105.436.690.429,00;

   dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.s.4).b).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dirinci sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 10
Pembiayaan Daerah

| URAIAN | APBD | | | |
|---|---|---|---|---|
| | APBD TA.2022 | RANPERDA PERUBAHAN APBD TA 2022 | SELISIH LEBIH/KURANG | |
| | Rp. | Rp. | Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **PEMBIAYAAN DAERAH** | **29.192.910.204,00** | **47.591.005.786,00** | **18.398.095.582,00** | **63,02** |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **30.192.910.204,00** | **48.591.005.786,00** | **18.398.095.582,00** | **60.94** |
| SiLPA Tahun Sebelumnya | 29.692.910.204,00 | 48.091.005.786,00 | 18.398.095.582,00 | 61,96 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | - | - |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | - | - |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | - |

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Penetapan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp47.591.005.786,00 atau 63,02% dari total anggaran semula sebesar Rp29.192.910.204,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2022 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada akhir Tahun Anggaran 2022.

## IV. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memedomani antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan Rancangan P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 wajib menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada butir D.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

2. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

   Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 agar melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu perubahan alokasi, dan penggunaan dalam anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi yang diprioritaskan untuk:

   a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait Kesehatan.

   b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup.

   c. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net.*

   sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kepulauan Riau pada tahun 2022 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 5,30% s.d 5,60%, meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,69% s.d 7,19% dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali *(rebound)* kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah

melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2022 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

5. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani:
   a. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS.
   b. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP.
   c. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.

   Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di UKPBJ mengacu kepada hasil evaluasi jabatan mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

6. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*Value for Money*), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan melakukan percepatan proses lelang barang jasa dan belanja modal dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7. Dalam rangka mendorong penguatan ekonomi daerah melalui percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan

dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket Usaha Mikro dan Kecil (UMK)-Koperasi, dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

8. Dalam Rangka Program Penganggaran Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari Dana Transfer Umum.
9. Dalam rangka pengendalian dan antisipasi dampak inflasi di daerah perlu dilakukan percepatan penyaluran belanja Bantuan Sosial (Bansos) guna menjaga daya beli, melindungi kelompok rentan, meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memperhatikan Surat Edaran Nomor 840/5412/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
10. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1071 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memasukkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus yang digunakan untuk Bantuan Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp720.000.000,00 kepada 1.670 masyarakat dan 730 nelayan masing-masing sebesar Rp300.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
11. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas pada Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan untuk meningkatkan kinerja upaya kesehatan masyarakat di puskesmas agar memedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
12. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penggunaan Bantuan Operasional untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan agar memedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

13. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyelesaikan kewajiban TA. 2021 sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan kewajiban sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 996 Tahun 2022 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapata Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
14. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**ANSAR AHMAD**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 BERDASARKAN HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang :

a. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan oleh Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;

b. bahwa Keputusan Gubenur Kepulauan Riau Nomor 1231 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah dibahas bersama oleh Kepala Daerah yang mewakili oleh TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 522);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Hasil Penyempurnaan Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Persetujuan Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Kepulauana Riau.

KETIGA : Penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
Pada Tanggal 27 Oktober 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**WAKIL KETUA I,**

**SYAMSIL UMRI**

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

ABDUL RASYDASE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19681125 199403 1 009

**Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**
**Kabupaten Kepulauan Anambas**
**Nomor : 5 Tahun 2022**
**Tanggal : 27 Oktober 2022**

**PEMBAHASAN HASIL EVALUASI GUBERNUR TENTANG RANPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

| NO | HASIL EVALUASI | HASIL PEMBAHASAN / PENYEMPURNAAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **BATANG TUBUH RANPERDA P-APBD TA. 2022** | Draft Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang P-APBD Tahun Anggaran 2022 akan disesuaikan dengan hasil evaluasi/koreksi dari Provinsi Kepulauan Riau |
| **I.** | **KEBIJAKAN UMUM**<br>Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.<br>1. Kesesuaian tahapan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dengan RKPD, Rancangan P-KUA dan P-PPAS.<br>Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada tanggal 29 September 2022 dan telah disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 03 Oktober 2022, sesuai dengan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak | **I. KEBIJAKAN UMUM**<br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Menyusun Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2022 merujuk pada PP 12 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020 dan Permendagri 27 Tahun 2021 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya. |

| | | |
|---|---|---|
| | tanggal persetujuan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.<br><br>Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tersebut disertai dengan RKPD, Rancangan P-KUA dan P-PPAS.<br><br>2. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan RKPD serta Rancangan P-KUA dan P-PPAS.<br><br>a. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 harus konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, P-KUA, P-PPAS, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 16 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. | 2. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Dengan RKPD Serta KUPA dan PPAS-P.<br>a. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani RKPD Perubahan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022. |

| | | |
|---|---|---|
| | b. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan RKPD.<br><br>Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 telah memedomani RKPD, Rancangan P-KUA/P-PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br><br>Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD, Rancangan P-KUA/P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. | b. Ada terdapat penambahan Sub Kegiatan pada KUPA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah, Hal ini menyesuaikan terhadap sub kegaiatan yang dibutuhkan untuk pembayaran Hutang Jangka Pendek Tahun 2021. |
| **II.** | **KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM**<br><br>**A. Kebijakan Pendapatan**<br><br>Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp869.056.860.530,00 mengalami penurunan sebesar Rp31.888.688.197,00 atau 3,54% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp900.945.548.727,00.<br>Penganggaran target pendapatan daerah tersebut harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. | **II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM** |

| | | |
|---|---|---|
| | Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.<br><br>Kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang P-APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:<br><br>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)<br><br>Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.450.650.040,00 mengalami peningkatan sebesar Rp789.407.385,00 atau 1,94% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.661.242.655,00.<br><br>Penganggaran target pendapatan daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br><br>Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang P-APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:<br><br>a. Pajak Daerah<br><br>Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.111.728.377,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran | 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mengoptimalkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah dialokasikan di dalam Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2022 dan akan mengupayakan pencapaian target yang sudah dialokasikan di dalam Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2022. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.<br><br>Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan pajak daerah:<br><br>1) Pajak Hotel Rp3.182.096.316,00;<br>2) Pajak Restoran Rp10.917.922.750,00;<br>3) Pajak Hiburan Rp163.688.025,00;<br>4) Pajak Reklame Rp75.000.000,00;<br>5) Pajak Penerangan Jalan Rp4.095.000.000,00;<br>6) Pajak Air Tanah Rp64.890.000,00;<br>7) Pajak Sarang Burung Walet Rp64.381.286,00;<br>8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp603.750.000,00;<br>9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp420.000.000,00;<br>10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp525.000.000,00.<br><br>b. Retribusi Daerah<br><br>Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp4.190.959.515,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.<br><br>Target Retribusi daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan:<br><br>1) Retribusi Jasa Umum Rp3.889.250.000,00;<br>2) Retribusi Jasa Usaha Rp290.434.515,00;<br>3) Retribusi Perizinan Tertentu Rp11.275.000,00. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Target Retribusi dimaksud dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 apabila peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, sebagaimana diatur pada ketentuan butir C.1.c.1.a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Selanjutnya, besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.<br><br>Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi sebagaimana dimaksud pada butir C.1.c.1.a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan<br><br>Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.318.019.763,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.<br>Target pendapatan tersebut dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan Tahun Anggaran 2021, dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:<br><br>1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;<br><br>2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;<br><br>3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;<br><br>4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;<br><br>Dengan tetap memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir C.1.c.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja bagi Badan/Lembaga/Pihak Ketiga yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan disposal (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses due diligence melalui lembaga approisal yang certified terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/ atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/ sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.<br><br>Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD. | |

| | | |
|---|---|---|
| | d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah<br><br>Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD TA 2022 sebesar Rp15.829.942.385,00 mengalami peningkatan sebesar Rp789.407.385,00 atau 5,25% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.040.535.000,00. Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah harus berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.c.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan sebagai berikut:<br><br>1) Jasa Giro Rp1.020.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.c.1).d).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;<br><br>2) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp36.720.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani Pasal 24 ayat | d. Penganggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah telah mempertimbangkan kebijakan pendapatan tahun depan dan memperhitungkan realisasi tahun berjalan. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.c.1).d).(1).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;<br>3) Pendapatan Bunga Rp5.610.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulaun Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.c.1).d).(1).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;<br>4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp3.964.407.385,00 mengalami peningkatan sebesar Rp464.407.385,00 atau 13,27% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.500.000.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulaun Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.c.1).d).(1).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;<br>5) Pendapatan dari Pengembalian Rp1.278.700,00 mengalami peningkatan sebesar Rp325.000.000,00 atau 34,08% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah | |

| | | |
|---|---|---|
| | tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp953.700.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulaun Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.c.1).d).(1).(n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penganggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) agar menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.<br><br>2. Pendapatan Transfer<br><br>Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp815.808.870.490,00 mengalami penurunan sebesar Rp32.678.095.582,00 atau 3,85% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp848.486.966.072,00.<br><br>Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Kepulauan Anambas tentang | 2. Pendapatan Transfer |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 antara lain diuraikan pada jenis pendapatan Transfer: | |
| | | a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp753.329.744.257,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.066.969.461,00 atau 3,72% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp782.396.713.718,00 yang diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut: | a. Target pendapatan transfer dari pemerintah pusat sudah sesuai dengan informasi resmi mengenai rician alokasi dana bagi hasil Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022. |
| | | 1) Dana Perimbangan sebesar Rp710.058.894.257,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.066.969.461,00 atau 3,93% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp739.125.863.718,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan: | |
| | | a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp267.268.713.599,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.109.251.119,00 atau 9,21% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp294.377.964.718,00, terdapat selisih dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;<br>b) Dana Alokasi Umum sebesar Rp368.970.082.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah sesuai dengan anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; | a) Terkait dengan penganggaran Dana Transfer Umum (DBH) sebesar Rp. 267.268.713.599,00 tersebut terdiri dari:<br>• Penerimaan DBH dari Pajak sebersar Rp58.650.568.619,00;<br>• Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau Rp10.957.736,00;<br>• Penerimaan DBH dari Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp208.618.144.980,00.<br>Dapat kami sampaikan bahwa penganggaran Dana Transfer Umum (DBH) menyesuaikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 dan PMK 127/PMK.07/2022, terkait alokasi penganggaran Kurang Bayar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menganggarkan dibawah alokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dikarenakan adanya informasi bahwa penyaluran tidak akan disalurkan seluruhnya. |

| | | |
|---|---|---|
| | c) Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp46.014.953.658,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.711.238.342,00 atau 3,59% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.726.192.000,00, terdapat selisih dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;<br>d) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp27.805.145.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp246.480.000,00 atau 0,88% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp28.051.625.000,00, terdapat selisih dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<br>2) Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp6.072.979.000,00, tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Alokasi tersebut telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;<br>3) Dana Desa sebesar Rp37.197.871.000,00, tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Alokasi tersebut telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.<br>Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyesuaikan alokasi Dana Perimbangan dimaksud | c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan sesuai alokasi kontrak kegiatan.<br>d) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik. |

| | | |
|---|---|---|
| | dengan alokasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.1.c.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br>Selanjutnya, penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir E.11.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. | |
| | b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp62.479.126.233,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.611.126.121,00 atau 5,46% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp66.090.252.354,00. yang diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:<br>1) Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp56.559.126.233,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.168.873.879,00 atau 24,61% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp45.390.252.354,00, yang diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:<br>a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp11.961.472.686,00;<br>b) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp6.225.809.813,00; | b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sudah menyesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp28.926.808.658,00;<br>d) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp46.194.452,00;<br>e) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp9.398.840.624,00;<br>f) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Rp5.920.000.000,00.<br><br>Selanjutnya, untuk penggunaan obyek pendapatan pajak daerah harus mempedomani ketentuan:<br><br>a) Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam butir C.1.c.1).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br>b) Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari hak Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.<br><br>Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten/kota menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai | |

dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam butir C.1.c.1).a).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

2) Bantuan Keuangan sebesar Rp5.920.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.780.000.000,00 atau 71,40% dari anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.700.000.000,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.797.340.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan ke dalam jenis objek pendapatan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| | - Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp11.797.340.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.<br><br>Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.c.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. | |
| | **B. Kebijakan Belanja Daerah**<br><br>Penyediaan alokasi belanja daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp916.647.866.316,00 mengalami penurunan Rp13.490.592.615,00 atau 1,45% dari total anggaran semula dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2022 sebesar Rp930.138.458.931,00. Penyediaan alokasi Belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.<br><br>Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan | **B. Kebijakan Belanja Daerah** |

| | | |
|---|---|---|
| | masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.<br><br>Penyediaan alokasi belanja daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp916.647.866.316,00. | |
| | Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:<br><br>1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br><br>Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:<br><br>a. SPM bidang Pendidikan<br><br>Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan Rp28.076.394.786,00 atau 14,37% dari total belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp195.444.582.959,00. Total belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp195.444.582.959,00 mengalami peningkatan Rp1.625.184.094,00 atau 0,84% dari anggaran semula sebesar Rp193.819.398.865,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut: | 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan verifikasi kembali pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, diantaranya:<br>a. SPM Bidang Pendidikan<br>b. SPM Bidang Kesehatan<br>c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>d. SPM Bidang Trantibumlinmas<br>e. SPM Bidang Sosial |

| | | |
|---|---|---|
| | 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp4.623.751.270,00.<br>2) Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar Rp23.186.243.516,00;<br>3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp266.400.000,00;<br><br>Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:<br>1) 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.<br>2) 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTS.<br>3) 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan.<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.<br>b. SPM Kesehatan<br><br>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp2.295.674.947,00 atau 1,38% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp165.807.293.145,00 mengalami peningkatan Rp10.289.993.227,00 atau 6,62% dari anggaran semula Rp155.517.299.918,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:<br>1) Pelayanan Kesehatan Ibu hamil Rp639.933.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan kesehatan; | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp138.540.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun untuk jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan;<br>3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp87.445.001,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun untuk bayi yang baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan;<br>4) Pelayanan Kesehatan Balita Rp644.073.945,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan;<br>5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp164.280.000,00 harus diprioritaskan 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan;<br>6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Rp190.510.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan;<br>7) Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut Rp284.535.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan;<br>8) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Rp35.018.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan;<br>9) Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberklosis Rp94.240.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan; dan<br>10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Rp17.100.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human | |

| | | |
|---|---|---|
| | Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan.<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.<br><br>c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br><br>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp11.793.360.380,00 atau 11,52% dari total belanja pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp102.356.024.206,00. Total belanja pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp102.356.024.206,00 mengalami penurunan Rp17.775.034.439,00 atau 14,80% dari anggaran semula Rp120.131.058.645,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:<br><br>1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp6.946.826.380,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari;<br><br>2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp4.846.534.000,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 | |

| | | |
|---|---|---|
| | Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan.<br><br>d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman<br><br>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp0,00, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.<br><br>e. SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum<br><br>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp1.129.202.585,00 atau 4,21% dari total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp26.852.589.833,00 Total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp26.825.589.833,00 mengalami peningkatan Rp1.415.797.817,00 atau 5,57% dari anggaran semula Rp25.436.792.016,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:<br><br>1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Rp162.045.500,00 harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada;<br>2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Rp419.789.020,00, harus diprioritaskan sebesar 100% | d. Dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maka pada tahapan penyempurnaan hasil evaluasi perlu ditambahkan sub kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. |

| | | |
|---|---|---|
| | setiap tahun jumlah warga negara memperoleh layanan rawan Bencana;<br>3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Rp447.705.755,00, harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;<br>4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp27.355.000,00, harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;<br>5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Rp72.307.310,00, harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.<br><br>f. SPM Sosial<br><br>Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial Rp348.000.000,00 atau 2,37% dari total belanja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp14.663.715.455,00. Total belanja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp14.663.715.455,00 mengalami peningkatan Rp1.384.717.531,00 atau 10,43% dari anggaran semula sebesar Rp13.278.997.924,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut.<br><br>- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan | |

| | | |
|---|---|---|
| | Pengemis diluar Panti sebesar Rp348.000.000,00, harus diprioritaskan sebesar 100% setiap tahun jumlah warga negara Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti;<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota | |
| | 2. Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional (PN) Tahun Anggaran 2022 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, prioritas nasional Tahun Anggaran 2022 meliputi:<br>a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp24.941.347.681,00 atau 2,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut: | 2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 di dalam Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2022. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1) Peningkatan Investasi dan Pariwisata dengan sasaran yang akan diwujudkan sebagai berikut:<br>a) Terwujudnya optimalisasi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kota tujuan pariwisata, investasi di sektor industri, jasa, perdagangan, maritime, perikanan dan pertanian yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<br>b) Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.<br>2) Pemerataan Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran yang akan diwujudkan sebagai berikut:<br>a) Terpenuhinya konsumsi pangan dan keamanan pangan.<br>b) Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif, indutri kecil menengah dan UMKM serta terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan pangan.<br>c) Terwujudnya optimalisasi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kota tujuan pariwisata, investasi di sektor industri, jasa, perdagangan, maritime, perikanan dan pertanian yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<br>d) Peningkatan kualitas hidup sosial kemasyarakatan.<br>Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:<br>1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp21.226.243.451,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp650.806.000,00 dianggarkan dalam | |

| | | |
|---|---|---|
| | rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>3) Program Pengawasan Keamanan Pangan Rp20.362.890,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>4) Program Pengembangan UMKM Rp386.012.550,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>5) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp231.395.200,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp232.986.600,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Rp222.963.330,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>8) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Rp99.240.720,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>9) Program Perekonomian dan Pembangunan Rp1.871.336.940,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.<br><br>b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp136.193.337.307,00 atau 14,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.<br><br>Prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan adalah Peningkatan Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Anambas dengan sasaran yang akan diwujudkan sebagai berikut:<br><br>1) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur.<br><br>2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman .<br><br>Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN2, akan dilakukan melalui lima PP yaitu sebagai berikut:<br><br>1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp22.137.772.018,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Rp493.208.390,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>3) Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp113.175.705.919,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp11.286.600,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>5) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp375.364.380,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; | |

| | | |
|---|---|---|
| | c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp310.028.357.449,00 atau 33,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.<br><br>Prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing adalah Peningkatan kapasitas SDM yang berkualitas dan bermartabat dengan sasaran yang akan diwujudkan sebagai berikut:<br><br>1) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik.<br><br>2) Meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata.<br><br>3) Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam mendorong penguatan perekonomian daerah.<br><br>Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui PP, yaitu:<br><br>1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp131.474.429.047,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp60.157.812.842,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi Rp9.744.000,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>4) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Rp72.307.310,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>5) Program Rehabilitasi Sosial Rp348.000.000,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>6) Program Hubungan Industrial Rp881.231.733,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Rp98.425.000,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>8) Program Promosi Penanaman Modal Rp234.415.380,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>9) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp114.987.600,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>10) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Rp1.221.530.122,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>11) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp231.395.200,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; | |

| | | |
|---|---|---|
| | 12) Program Penyuluhan Pertanian Rp92.345.966,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>13) Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp113.175.705.919,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>14) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp952.857.950,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>15) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp641.023.580,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>16) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Rp322.145.800,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br><br>d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.871.360.700,00 atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.<br><br>Prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu Peningkatan Investasi dan Pariwisata dengan sasaran terwujudnya optimalisasi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kota tujuan pariwisata, investasi di sektor industri, jasa, perdagangan, maritim, perikanan dan pertanian yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. | |

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui lima PP, yaitu:

1) Program Pengembangan Kebudayaan Rp578.345.760,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
2) Program Pembinaan Perpustakaan Rp156.045.100,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
3) Program Perekonomian dan Pembangunan Rp1.871.336.940,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp25.907.500,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Rp239.725.400,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp72.059.034.791,00 atau 7,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2022 dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman.<br><br>Prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yaitu Peningkatan Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Sasaran (PN5) yaitu sebagai berikut:<br><br>1) Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap dan dalam kondisi baik;<br>2) Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam rangka pengendalian banjir;<br>3) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik yang berkualitas bagi masyarakat;<br>4) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik yang berkualitas bagi masyarakat;<br>5) Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan nyaman;<br>6) Meningkatnya jumlah pengguna transportasi umum.<br><br>Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui delapan PP, yaitu:<br><br>1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp46.870.292.177,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>2) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Rp16.929.304.476,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp51.648.000,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan | |

| | | |
|---|---|---|
| | Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>4) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rp3.079.381.860,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>5) Program Pengelolaan Arsip Rp38.768.000,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>6) Program Aplikasi Informatika Rp4.872.914.110,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Rp131.477.768,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>8) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp56.715.000,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>9) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp28.533.400,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br><br>f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.248.298.775,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.<br><br>Prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6) yaitu Peningkatan Infrastruktur Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu dengan sasaran tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan.<br><br>Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari enam PP, yaitu:<br><br>1) Program Penanggulangan Bencana Rp894.849.775,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup Rp218.878.100,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Rp52.867.300,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>4) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Rp74.209.400,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp7.494.200,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br><br>g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp112.951.820.142,00 atau 12,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.<br><br>Prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) yaitu Reformasi Birokrasi dengan sasaran sebagai berikut:<br><br>1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk.<br><br>2) Meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata.<br><br>3) Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan berkualitas.<br><br>4) Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.<br><br>5) Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.<br><br>6) Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan nyaman.<br><br>7) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik.<br><br>Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui tiga belas PP, yaitu:<br><br>1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp89.745.259.186,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>2) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp402.471.490,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | |

| | | |
|---|---|---|
| | Rp72.307.310,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>4) Program Pencatatan Sipil Rp116.678.342,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>5) Program Informasi dan Komunikasi Publik Rp4.492.521.456,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>6) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Rp79.246.000,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>7) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp17.043.604.460,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>8) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp318.649.380,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>9) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp78.011.200,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>10) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Rp545.798.718,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;<br>11) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Rp57.272.600,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; | |

| | | |
|---|---|---|
| | 3. Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022.<br><br>Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel diatas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan 2022 meliputi:<br>a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah.<br>b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan.<br>c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.<br><br>4. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022.<br><br>Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2022.<br><br>5. Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 | 5. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan belanja daerah untuk mendanai penanganan pandemi Covid-19 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 agar tetap mengalokasikan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan.
b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup.
c. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*.

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi COVID-19 yaitu Rp44.652.765.639,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan sebesar Rp43.578.430.639,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:

   1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Rp20.844.577.620,00;

   2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Rp485.512.334,00;

   3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daera Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Rp22.248.340.685,00;

b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar Rp1.000.000.000,00 diuraikan sebagai berikut:

   - Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir pasa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Rp1.000.000.000,00;

c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* sebesar Rp74.335.000,00 yang diuraikan sebagai berikut:

   - Program Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Rp74.335.000,00;

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona*

| | | |
|---|---|---|
| | *Virus Desease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud. | |
| | 6. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br><br>Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:<br><br>a. Jumlah alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar Rp195.444.582.959,00 atau 21,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp916.647.866.316,00.<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh | 6. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah<br><br>a. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah. |

| | | |
|---|---|---|
| | persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas. | |
| | b. Jumlah alokasi anggaran untuk urusan kesehatan Rp165.807.293.145,00 atau 19,93% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp832.090.964.393,00.<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<br><br>Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan persentase sebesar 13,58% tersebut agar tidak menurunkan jumlah alokasi anggarannya. Alokasi anggaran kesehatan | b. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi Kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja daerah diluar belanja gaji. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | dimaksud dan disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. | |
| | | c. Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum<br><br>Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, harus diarahkan penggunaannya paling sedikit 40% (empat puluh persen) untuk percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah, sebagaimana dimaksud pada butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi anggaran minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan | c. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum. |

| | | |
|---|---|---|
| | penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk Infrastruktur pelayanan publik minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.<br><br>d. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah<br><br>Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp7.617.499.002,00 atau 0,83% dari total belanja daerah sebesar Rp916.647.866.316,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir E.35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan<br><br>Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas Rp11.615.350.300,00 atau 1,27% dari total belanja daerah sebesar Rp916.647.866.316,00 dalam Rancangan | d. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah.<br><br>e. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Pengawasan sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah di atas 1 trilyun rupiah. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam butir E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br>Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi<br><br>1) Kegiatan pengawasan, yaitu:<br>a) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBP, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;<br>b) Pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan, tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;<br>c) Pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan | |

| | | |
|---|---|---|
| | masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati/Wali Kota untuk Inspektorat Provinsi dan evaluasi pelayanan publik;<br>d) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System;<br>2) Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.<br>3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain..<br><br>sebagaimana ditegaskan dalam butir E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | |
| | f. Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan yang antara lain:<br><br>1) Penyediaan anggaran Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru Rp500.868.680,00 dari semula tidak dianggarkan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp65.680,00 dari semula tidak dianggarkan pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.<br>2) Penyediaan anggaran Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Rp1.022.954.280,00 dari semula tidak dianggarkan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan | f. Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung untuk mengakomodir pembayaran Utang Jangka Pendek Tahun 2021 dan kegiatan yang lain akan diverifikasi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Hukum Indonesia Rp6.000,00 dari semula tidak dianggarkan pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.<br>3) Penyediaan anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp1,00 terdapat penurunan Rp19.199.999,00 dari anggaran semula Rp19.200.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp1,00 dari semula tidak dianggarkan pada SKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.<br>4) Penyediaan anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp688.313.376,00 terdapat peningkatan Rp73.328.872,00 dari anggaran semula Rp614.984.504,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp1.616,00 dari semula tidak dianggarkan pada SKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.<br>5) Penyediaan anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp69.744.500,00 terdapat penambahan Rp68.984.500,00 dari anggaran semula Rp760.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Jasa Kantor Rp200,00 dari semula tidak dianggarkan pada SKPD Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.<br><br>Tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | g. sebesar Rp170.000.000 ,00 tidak ada penambahan dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 atau 0,02% dari total belanja daerah. Telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Anambas.<br><br>Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepaia Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/639/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.<br><br>h. Penyediaan Anggaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebesar Rp129.293.200,00 atau 0,01% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, turun Rp4.245.000,00 dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 Rp133.538.200,00. Dianggarkan guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir E.69.d.9) Lampiran Peraturan Menteri | |

| | | |
|---|---|---|
| | Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. | |
| | i. Penyediaan Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebesar Rp279.863.250,00 atau 0,03% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, turun Rp132.551.750,00 dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 Rp412.415.000,00. Dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi/Kabupaten/Kota melalui:<br>1) Penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk;<br>2) Dukungan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, oxymeter, tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;<br>3) Pemberdayaan dasa wisma;<br>4) Mendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif;<br>5) Mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperluas pangsa pasar hasil kerajinan; | i. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). |

| | | |
|---|---|---|
| | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam butir E.65 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>j. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BOS, antara lain tercantum pada:<br>1) Belanja Barang dan Jasa BOS Rp7.847.964.391,00 tidak terdapat penambahan dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022;<br>2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp4.512.464.345,00 tidak terdapat penambahan dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA;<br>3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp626.618.299,00 tidak terdapat penambahan dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022<br><br>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan sebagaimana dimaksud pada butir C.15.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>7. Belanja Operasi<br><br>Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp680.036.048.419,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.507.052.749,00 atau 1,09% dari | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp687.543.101.168,00. Belanja Operasi sebesar Rp680.036.048.419,00 atau 74,19% dari total belanja daerah Rp916.647.866.316,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br><br>Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada obyek belanja dengan kode rekening:<br><br>a. Belanja Pegawai<br><br>Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br><br>Penganggaran Belanja Pegawai sebesar Rp320.871.871.879,00 terdapat penurunan sebesar Rp31.336.312.669,00 atau 8,90% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp352.208.184.548,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja dengan kode rekening:<br><br>1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)<br><br>x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.01 Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp122.213.313.325,00 terdapat penurunan sebesar Rp22.749.755.937,00 atau 15,69% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp144.963.069.262,00.<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran agar | a. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan Belanja Pegawai sesuai kebutuhan nyata selama satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan rencana kenaikan gaji pokok, pemberian gaji 13, THR, kenaikan pangkat PNS, kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan pengangkatan CPNS.<br><br>Penganggaran jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian juga sudah dihitung kebutuhannya selama satu tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mengalokasikan belanja jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kdh/WKdh dan Anggota DPRD.<br><br>Penganggaran TPP PNS telah mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan direalisasikan setelah mendapat persetujuan Kemendagri dan pertimbangan dari Kementerian Keuangan.<br><br>Penganggaran Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah dihitung sesuai dengan kebutuhannya nyata selama satu tahun anggaran dan sudah |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir C.2.s.1).a).(7).(a), butir C.2.s.1).a).(7).(b), dan butir C.2.s.1).a).(7).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br>2) Penganggaran Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang tercantum pada kode rekening:<br>a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp10.001.284.698,00 mengalami penurunan Rp2.302.659.908,00 atau 18,71% dari anggaran semula Rp12.303.944.606,00;<br>b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp35.875.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran semula;<br>yang diperuntukkan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan harus memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 | sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(7).(d) dan C.2.s.1).a).(7).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(7).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp10.651.138.520,00 tidak mengalami perubahan dari total anggaran semula:<br><br>Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD memedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.<br><br>Selanjutnya, alokasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD harus diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<br><br>4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.<br><br>Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tidak ada perubahan dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp305.805.560,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menentukan besarannya disesuaikan dengan memedomani Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp300 juta dan paling tinggi 0,80% dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Rp41.450.650.040,00 yaitu Rp331.605.200,32.<br><br>Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | itu, dari aspek teknis penganggaran, alokasi belanja dana operasional KDH/WKDH harus diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sekretariat daerah serta diuraikan pada sub kegiatan "Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.<br>5) Penyediaan anggaran dengan kode rekening:<br>a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp156.068.975.137,00 terdapat penurunan sebesar Rp11.641.562.079,00 atau 6,94% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp167.710.537.216,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:<br>1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp90.901.757.071,00 terdapat kenaikan Rp1.006.431.747,00,20 atau 1,12% dari anggaran semula Rp89.895.325.324,00;<br>2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp8.212.831.027,00 terdapat kenaikan sebesar Rp800.589.631,00 atau 10,80% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp7.412.241.396,00;<br>3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp6.263.789.733,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.007.789.733,00 atau 19,17% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp5.256.000.000,00;<br>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.s.1).a).(7).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai ASN daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Kepala Daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan terlebih dahulu memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan<br><br>b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp30.578.450.682,00 terdapat kenaikan sebesar Rp3.055.005.347,00 atau 11,10% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp27.523.445.335,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:<br><br>(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp2.292.823.906,00 terdapat kenaikan Rp568.920.218,00 atau 33% dari anggaran semula Rp1.723.903.688,00;<br><br>(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp11.157.606.165,00 terdapat penurunan Rp1.069.961.683,00 atau 8,75% dari anggaran semula Rp12.227.567.848,00. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dimaksud agar lebih rasional dan memperhitungkan kebutuhan aggaran dimaksud secara cukup untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran. penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.s.1).a).(7).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Berkaitan dengan itu, Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.2.s.1).a).(7).(l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Selanjutnya, penyediaan anggaran:<br><br>a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp11.779.512.960,00 terdapat | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | kenaikan Rp2.110.748.960,00 atau 21,83% dari anggaran semula Rp9.668.764.000,00;<br>b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TPG) PNSD Rp2.707.428.800,00 terdapat kenaikan Rp808.921.800,00 atau 42,61% dari anggaran semula Rp1.898.507.000,00;<br>c) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp1.163.500.000,00 terdapat kenaikan Rp732.250.000,00 atau 169,80% dari anggaran semula Rp431.250.000,00,00;<br>dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik memedomani sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(7).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pemberian Insentif Pajak Daerah bagi pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan berpedoman pada pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.s.1).a).(7).(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Dalam pelaksanaannya agar diformulasikan kedalam sub rincian obyek yang berkenaan tidak hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(7).(m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru Rp305.221.430.119,00 atau 33,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan penganggaran belanja pegawai diluar tunjangan guru dibawah 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>b. Belanja Barang Jasa<br><br>Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp344.329.106.244,00 terdapat kenaikan sebesar Rp19.680.480.182,00 atau 6,06% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp324.648.626.062,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada | b. Belanja Barang dan Jasa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.s.1).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja dengan kode rekening:<br><br>5) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01 Belanja Barang Rp61.609.548.203,00 terdapat kenaikan sebesar Rp11.546.787.829,00 atau 23,06% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp50.062.760.374,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:<br><br>(a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp61.556.988.203,00 terdapat kenaikan sebesar Rp11.500.995.829,00 atau 22,98% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp50.055.992.374,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:<br><br>a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas Rp873.992.600,00 terdapat kenaikan sebesar Rp369.720.914,00 atau 73,32% dari total anggaran semula Rp504.271.686,00;<br><br>b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp3.217.699.284,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.545.098.984,00 atau 378,40% dari total anggaran semula Rp672.600.300,00; | 5) Belanja Barang<br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan belanja barang pakai habis telah memperhitungkan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang pakai habis Tahun Anggaran 2021. Terhadap adanya kenaikan yang dianggarkan pada Belanja Barang sebagiannya adalah adanya penyesuaian belanja yang diakibatkan oleh pergeseran anggaran untuk mengakomodir pembayaran utang jangka pendek Tahun 2021. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | c) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan- Obat Rp11.993.963.629,00 terdapat kenaikan sebesar Rp3.248.156.897,00 atau 37,14% dari total anggaran semula Rp8.745.806.732,00;<br>d) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp7.326.575.830,00 terdapat kenaikan sebesar Rp6.378.974.030,00 atau 673,17% dari total anggaran semula Rp947.601.800,00;<br>e) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp2.088.087.111,00 terdapat kenaikan sebesar Rp236.389.241,00 atau 12,77% dari total anggaran semula Rp1.851.697.870,00;<br>f) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp4.722.904.950,00 terdapat kenaikan sebesar Rp533.615.950,00 atau 12,74% dari total anggaran semula Rp4.189.289.000,00;<br>dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya belanja barang pakai habis agar diefisiensi dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan memedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | sebagaimana dimaksud pada butir C.2.s.1).b).(3).(a).i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Penyediaan anggaran tersebut juga aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br><br>Selanjutnya penyediaan anggaran x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp4.854.533.661,00 terdapat kenaikan sebesar Rp284.274.711,00 atau 6,22% dari total anggaran semula Rp4.570.258.950,00 dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyesuaikan kembali harga bahan bakar sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesi Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. | |
| | | 6) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02 Belanja Jasa Rp210.353.045.974,00 terdapat kenaikan sebesar Rp13.873.319.784,00 atau 7,06% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp196.479.726.190,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:<br><br>a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp147.316.469.229,00 terdapat penurunan sebesar Rp5.580.126.959,00 atau 3,65% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp152.896.596.188,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:<br><br>(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa | 6) Belanja Jasa<br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengalokasikan belanja jasa telah memperhitungkan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. Terhadap adanya kenaikan yang dianggarkan pada Belanja Jasa sebagiannya adalah adanya penyesuian belanja yang diakibatkan oleh pergeseran anggaran untuk mengakomodir adanya penyesuaian belanja yang diakibatkan oleh pergeseran anggaran untuk mengakomodir pembayaran utang jangka pendek Tahun 2021. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Acara, dan Panitia Rp2.493.565.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp783.617.500,00 atau 23,91% dari total anggaran semula Rp3.277.182.500,00;<br>(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp5.426.558.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp346.820.000,00 atau 6,01% dari total anggaran semula Rp5.773.378.000,00;<br>(3) xx.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga kesehatan Rp14.414.768.322,00 terdapat penurunan sebesar Rp4.753.029.723,00 atau 24,80% dari total anggaran semula Rp19.167.798.045,00;<br>(4) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp5.011.432.500,00 terdapat kenaikan sebesar Rp304.632.500,00 atau 6,47% dari total anggaran semula Rp4.706.800.000,00;<br>(5) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0074 Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator Rp936.000.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp336.000.000,00 atau 56% dari total anggaran semula Rp600.000.000,00;<br>(6) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0075 Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 Rp416.678.600,00 semula tidak dianggarkan;<br>dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.<br><br>Selanjutnya, kenaikan penyediaan anggaran jasa/ honorarium/kompensasi yang antara lain:<br><br>(1) xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp858.664.400,00 terdapat kenaikan sebesar Rp496.494.000,00 atau 137,09% dari total anggaran semula Rp362.170.400,00;<br><br>(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp3.930.390.304,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.462.501.048,00 atau 59,26% dari total anggaran semula Rp2.467.889.256,00;<br><br>(3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp2.751.631.054,00 terdapat kenaikan sebesar Rp462.315.651,00 atau 20,19% dari total anggaran semula Rp2.289.315.403,00<br><br>penyediaan anggaran tersebut agar dirasionalisasi dan ditinjau kembali terkait besarannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.s.1).b).(3).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp23.229.807.275,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.597.339.091,00 atau 7,38% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp21.632.468.184,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:<br>(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp12.075.964.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.155.964.000,00 atau 10,59% dari total anggaran semula sebesar Rp10.920.000.000,00;<br>dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir C.2.1).b).(3).(b).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br>(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp7.955.160.928,00 terdapat kenaikan sebesar Rp57.570.424,00 atau 0,73% dari total anggaran semula sebesar Rp7.897.590.504,00; | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp1.375.055.880,00 terdapat kenaikan sebesar Rp326.973.000,00 atau 31,20% dari total anggaran semula sebesar Rp1.048.082.880,00;<br>(4) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp1.069.681.667,00 terdapat kenaikan sebesar Rp226.886.867,00 atau 26,92% dari total anggaran semula sebesar Rp842.794.800,00<br>dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kesehatan bagi tenaga non ASN, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN, belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kesehatan, risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat dan risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sebagaimana dimaksud butir C.2.1).b).(3).(b).ii.i), C.2.1).b).(3).(b).v dan butir C.2.1).b).(3).(b).vi, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br>c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:<br>(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp8.543.146.819,00 terdapat kenaikan sebesar Rp369.665.319,00 atau 4,52% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp8.173.481.500,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator Rp224.750.000,00 semula tidak dianggarkan;<br>(b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp312.250.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp214.850.000,00 atau 220,59% dari total anggaran semula Rp97.400.000,00;<br>(c) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp5.929.852.750,00 terdapat kenaikan sebesar Rp447.681.250,00 atau 8,17% dari total anggaran semula Rp5.482.171.500,00;<br>(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp7.865.719.807,00 terdapat penurunan sebesar Rp267.641.111,00 atau 3,29% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp8.133.360.918,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:<br>(a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor tidak dianggarkan dari total anggaran semula Rp4.353.411.268,00 terdapat penurunan sebesar Rp369.614.150,00 atau 7,83% dari total anggaran semula Rp4.723.025.418,00;<br>(b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.05.0006 Belanja Sewa Bangunan Kesehatan Rp101.147.046,00 semula tidak dianggarkan;<br>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br><br>Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan untuk memenuhi belanja wajib dan mendanai kegiatan prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah dan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana amanat Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).vii Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br>d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:<br>(1) (1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp20.598.156.843,00 terdapat kenaikan sebesar Rp17.778.534.443,00 atau 630,53% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp2.819.622.400,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:<br>(a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural Rp117.275.400,00 semula tidak diangagarkan ;<br>(b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp2.313.930.349,00 terdapat kenaiakan sebesar Rp2.117.524.875,00 atau 1.078,14% dari total anggaran semula Rp196.405.474,00;<br>(c) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Rp6.286.742.881,00 terdapat kenaiakan sebesar Rp6.158.564.294,00 atau 4.804,67% dari total anggaran semula Rp128.178.587,00;<br>(d) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Rp606.640.210,00 terdapat kenaiakan sebesar Rp560.044.210,00 atau 1.201,91% dari total anggaran semula Rp46.596.000,00; | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (e) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Rp387.267.000,00 semula tidak dianggarkan;<br>(f) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Rp3.132.723.700,00 terdapat kenaikan sebesar Rp3.024.518.700,00 atau 2.795,17% dari total anggaran semula Rp108.205.000,00;<br>(g) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp2.353.016.019,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.671.501.300,00 atau 245,26% dari total anggaran semula Rp681.514.719,00;<br>(h) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Rp3.833.906.160,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.526.380.600,00 atau 193,22% dari total anggaran semula Rp1.307.525.560,00;<br>(i) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan Rp1.106.156.176,00 semula tidak dianggarkan;<br>(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp980.191.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp250.139.000,00 atau 34,26% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp730.052.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja: | |

| | | |
|---|---|---|
| | (a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Rp310.259.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp70.257.000,00 atau 29,27% dari total anggaran semula Rp240.002.000,00;<br>(b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp199.342.000,00 semula tidak dianggarkan;<br>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br>Selanjutnya, Penganggaran jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sebagaimana maksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).viii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br>Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.<br><br>e) e)x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp1.146.479.001,00 terdapat penurunan sebesar Rp104.065.999,00 atau 8,32% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp1.250.545.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja;<br><br>(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp1.054.842.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp50.047.000,00 atau 4,98% dari total anggaran semula Rp1.004.795.000,00;<br>(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp61.370.001,00 terdapat penurunan sebesar Rp139.379.999,00 atau 69,43% dari total anggaran semula Rp200.750.000,00<br><br>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar diprioritaskan pelaksanaannya diwilayah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).b).(3).(b).xi.ii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut harus dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah dan pelaksanaannya mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya.<br><br>Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.<br><br>Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir C.2.1).b).(3).(b).xi.ii).(iv) Lampiran Peraturan | |

| | | |
|---|---|---|
| | Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | |
| | 7) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp7.852.999.921,00 terdapat penurunan sebesar Rp875.895.186,00 atau 10,03% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp8.728.895.107,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:<br>a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp3.704.629.564,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.902.678.787,00 atau 33,93% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp5.607.308.351,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:<br>(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa Rp49.500.000,00 semula tidak dianggarkan;<br>(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.02.0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat- Rambu Tidak Bersuar Rp57.198.000,00 semula tidak dianggarkan;<br>(3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.02.0494 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp51.431.600,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.517.721.011,00 atau 96,72% dari total anggaran semula Rp1.569.152.611,00;<br>b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp2.612.426.728,00 terdapat kenaikan sebesar Rp672.946.648,00 atau 34,70% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 | 7) Penganggaran belanja pemeliharaan telah memperhitungkan kebutuhan nyata selama satu tahun anggaran dan telah mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | sebesar Rp1.939.480.080,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:<br>(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp2.233.969.981,00 terdapat kenaikan sebesar Rp361.343.901,00 atau 19,30% dari total anggaran semula Rp1.872.626.080,00;<br>(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan Rp316.607.747,00 semula tidak dianggarkan;<br>c) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp1.535.943.629,00 terdapat kenaikan sebesar Rp353.836.953,00 atau 29,93% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp1.182.106.676,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:<br>(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Rp518.006.867,00 terdapat kenaikan sebesar Rp320.046.867,00 atau 161,67% dari total anggaran semula Rp197.960.000,00;<br>(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.04.0009 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jalan-Jalan Khusus Rp309.984.313,00 terdapat kenaikan sebesar Rp209.984.000,00 atau 209,98% dari total anggaran semula Rp100.000.313,00;<br>(3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.03.04.0120 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi Rp99.171.000,00 semula tidak dianggarkan<br>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya tetap | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br><br>Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir C.2.s.1).b).(3).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>8) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp53.428.257.755,00 terdapat penurunan sebesar Rp3.997.432.245,00 atau 6,96% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp57.425.690.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:<br><br>- x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp53.428.257.755,00 terdapat penurunan sebesar Rp3.997.432.245,00 atau 6,96% dari total anggaran semula sebesar Rp57.425.690.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja;<br><br>(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp37.308.511.942,00 terdapat | 8) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan verifikasi ulang alokasi anggaran perjalanan dinas dan akan disesuaikan dengan kebutuhan nyata perangkat daerah. |

| | | |
|---|---|---|
| | penurunan sebesar Rp1.582.923.058,00 atau 4,07% dari total anggaran semula Rp38.891.435.000,00;<br>(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota Rp16.119.745.813,00 terdapat penurunan sebesar Rp2.414.509.187,00 atau 13,03% dari total anggaran semula Rp18.534.255.000,00;<br>harus ditinjau kembali belanja perjalanan dinas yang mengalami peningkatan pada SKPD pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan jumlah hari efektif yang dapat melakukan perjalanan dinas pada masing-masing kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br>Dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan untuk mendanai kegiatan prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud butir C.2.s.1).b).(3).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. | |
| 9) | 5) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp3.237.290.000,00 terdapat penurunan | 9) Alokasi anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga menyesuaikan kebutuhan hasil verifikasi perangkat daerah terkait. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | sebesar Rp866.300.000,00 atau 21,11% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp4.103.590.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:<br><br>b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp3.100.290.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp650.400.000,00 atau 17,34% dari total anggaran semula sebesar Rp3.750.690.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:<br><br>(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat perlombaan Rp139.450.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp343.000.000,00 atau 71,10% dari total anggaran semula Rp482.450.000,00;<br><br>(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa Rp2.577.140.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp307.400.000,00 atau 10,66% dari total anggaran semula Rp2.884.540.000,00;<br><br>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br><br>Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan | |

dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.s.1).b).(3).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

c) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp137.000.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp215.900.000,00 atau 61,18% dari total anggaran semula sebesar Rp352.900.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja;

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp137.000.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp166.900.000,00 atau 54,92% dari total anggaran semula Rp303.900.000,00

Selanjutnya, penyediaan anggaran untuk Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan pada kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dapat dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.s.1).b).(3).(e).ii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

| | | |
|---|---|---|
| | 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.<br><br>c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial<br><br>a. Belanja Hibah<br><br>Penganggaran Belanja Hibah x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.05 Rp11.943.380.796,00 atau 12,13% dari total belanja daerah, mengalami kenaikan sebesar Rp1.292.064.238,00 dibanding Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.651.316.558,00 yang antara lain tercantum pada obyek belanja dengan kode rekening:<br><br>- x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp11.198.586.574,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.292.064.238,00 atau 13,04% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp9.906.522.336,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:<br><br>(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Rp5.501.901.900,00 terdapat kenaikan sebesar Rp178.684.200,00 atau 3,36% dari total anggaran semula sebesar Rp5.323.217.700,00;<br><br>(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp5.526.684.674,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.113.380.038,00 atau 25,23% dari total anggaran semula sebesar Rp4.413.304.636,00; | a. Belanja Hibah<br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan verifikasi ulang atas penganggaran Belanja Hibah pada Rancangan P-APBD Tahun 2022. Untuk Hibah kepada partai politik telah mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | b. Belanja Bantuan Sosial<br><br>Penganggaran Belanja Bantuan Sosial x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.06 Rp2.891.689.500,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.856.715.500,00 atau 8.168,11% dari anggaran sebelumnya dalam Perda APBD TA 2022 Rp34.974.000,00 yang tercantum pada obyek belanja dengan kode rekening;<br><br>- x.xx.xx.x.xx.xx.5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp2.811.689.500,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.776.715.500,00 atau 7.939,37% dari anggaran sebelumnya Rp34.974.000,00<br><br>dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br><br>Dalam hal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, | b. Belanja Bantuan Sosial<br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan verifikasi ulang atas penganggaran Belanja Bantuan Sosial pada Rancangan P-APBD Tahun 2022. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir C.2.s.1).e).(1) dan butir C.2.s.1).e).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Dalam alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.<br><br>Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus sesuai dengan pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam P-KUA dan P-PPAS. Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br><br>Selanjutnya, apabila penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Rp2.891.689.500,00 terdapat peningkatan sebesar Rp2.856.715.500,00 atau 8.168,11% dari total anggaran semula | |

| | | |
|---|---|---|
| | dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp34.974.000,00 diperuntukkan dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi Tahun Anggaran 2022 yang diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari Dana Transfer Umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2022. Untuk itu, penempatan rekeningnya agar dialihkan ke Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah dan Surat Edaran Nomor 840/5412/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.<br><br>8. Belanja Modal<br><br>Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp122.555.451.293,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.911.766.680,00 atau 9,53% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp135.467.217.973,00. Belanja Modal Rp122.555.451.293,00 atau 13,37% dari total belanja daerah Rp916.647.866.316,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.2).f).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan melewati batas minimal kapitalisasi asset tetap dengan memedomani | 8. Belanja Modal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Kepulauan Anambas sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.s.2).k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang | |

| | | |
|---|---|---|
| | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br><br>Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada kode rekening:<br><br>a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.01 Belanja Modal Tanah Rp48.205.800,00 terdapat penurunan sebesar Rp951.794.200,00 atau 95,18% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:<br><br>- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.01.01 Belanja Modal Tanah Rp48.205.800,00 terdapat penurunan sebesar Rp951.794.200,00 atau 95,18% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00;<br>- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan Rp48.205.800,00 terdapat penurunan sebesar Rp951.794.200,00 atau 95,18% dari total anggaran semula Rp1.000.000.000,00;<br>- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.01.01.03.0008 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air Rp48.205.800,00 dari semula tidak dianggarkan;<br><br>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana dimaksud pada butir C.2.s.2).h) dan butir C.2.s.2).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 | a. Alokasi penganggaran belanja modal tanah mengalami penurunan karena batalnya pelaksanaan pembangunan jembatan Air Asuk- Kampung Baru. |

| | | |
|---|---|---|
| | tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp30.996.483.488,00 terdapat penambahan sebesar Rp8.525.415.082,00 atau 37,94% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp22.471.068.406,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:<br><br>1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar Rp738.599.500,00 terdapat penambahan Rp586.739.000,00 atau 386,37% dari total anggaran semula sebesar Rp151.860.500,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja dengan kode rekening:<br><br>b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.01.02 Belanja Modal Alat Besar Apung Rp120.000.000,00 dari semula tidak dia anggarkan;:<br><br>c) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu Rp516.970.500,00 mengalami kenaikan Rp464.110.000,00 atau 877,99% dari total anggaran semula Rp52.860.500,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:<br><br>(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set Rp200.000.000,00 dari semula tidak dianggarkan ;<br><br>(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.01.03.0013 Belanja Modal Peralatan Selam Rp192.060.000,00 dari semula tidak dianggarkan ;<br><br>2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp3.523.325.600,00 terdapat penambahan Rp3.173.199.600,00 atau 906,30% dari total anggaran | b. Alokasi belanja modal peralatan dan mesin sudah memperhitungkan kebutuhan nyata perangkat daerah dan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan. Adanya penambahan pada belanja modal peralatan dan mesin sebagiannya untuk pelunasan hutang jangka pendek Tahun 2021. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | semula sebesar Rp350.126.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja dengan kode rekening:<br>- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.02.03 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp3.044.718.600,00 dari semula tidak dianggarkan :<br>3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp2.717.371.073,00 terdapat penambahan Rp1.293.498.780,00 atau 90,84% dari total anggaran semula sebesar Rp1.423.872.293,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:<br>b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp1.509.996.603,00 mengalami penambahan Rp741.150.202,00 atau 96,40% dari total anggaran semula Rp768.846.401,00:<br>- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp776.421.603,00 mengalami penambahan Rp526.182.502,00 atau 210,27% dari total anggaran semula Rp250.239.101,00;<br>c) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp1.016.329.910,00 mengalami penambahan Rp848.961.078,00 atau 507,24% dari total anggaran semula Rp167.368.832,00:<br>- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp717.347.410,00 mengalami penambahan Rp591.378.578,00 atau 469,46% dari total anggaran semula Rp125.968.832,00;<br>4) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp675.312.011,00 terdapat penurunan Rp943.825.014,00 atau 58,29% dari total anggaran semula sebesar Rp1.619.137.025,00, yang antara | |

lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp108.660.000,00 mengalami penurunan Rp968.740.000,00 atau 89,91% dari total anggaran semula Rp1.077.400.000,00:
  - x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga Rp59.160.000,00 mengalami penurunan Rp963.240.000,00 atau 94,21% dari total anggaran semula Rp1.022.400.000,00;

5) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp14.128.494.171,00 terdapat penambahan Rp1.401.893.828,00 atau 11,02% dari total anggaran semula sebesar Rp12.726.600.343,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
   a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran Rp5.888.599.255,00 terdapat penurunan Rp1.174.809.088,00 atau 16,63% dari total anggaran semula sebesar Rp7.063.408.343,00;
      (1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp1.620.195.690,00 terdapat penurunan Rp1.554.450.310,00 atau 48,96% dari total anggaran semula sebesar Rp3.174.646.000,00
      (2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya Rp612.641.767,00 terdapat penambahan Rp536.554.767,00 atau 705,19% dari total anggaran semula sebesar Rp76.087.000,00;
   b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp8.239.894.916,00 mengalami penambahan Rp2.576.702.916,00 atau 45,50% dari total anggaran semula Rp5.663.192.000,00;

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium Rp548.234.800,00 terdapat penambahan Rp448.409.800,00 atau 449,20% dari total anggaran semula sebesar Rp99.825.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:<br>a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp410.344.800,00 dari semula tidak dianggarkan;<br>(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.08.01.0020 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Rp212.232.000,00 dari semula tidak dianggarkan;<br>(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.08.01.0048 Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Rp198.112.800,00 dari semula tidak dianggarkan;<br>b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp137.890.000,00 dari semula tidak dianggarkan;<br>(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.08.03.0011 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga Rp37.950.000,00 dari semula tidak dianggarkan;<br>(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK Rp99.940.000,00 dari semula tidak dianggarkan;<br>7) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.10 Belanja Modal Komputer sebesar Rp2.938.282.188,00 terdapat penambahan Rp1.386.337.288,00 atau 89,33% dari total anggaran semula sebesar Rp1.551.944.900,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening;<br>a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp2.078.809.353,00 mengalami penambahan Rp993.346.553,00 atau 91,51% dari total anggaran semula Rp1.085.462.800,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:<br>- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp1.402.402.960,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| | penambahan Rp1.362.538.960,00 atau 3.417,97% dari anggaran semula Rp39.864.000,00<br>b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp859.472.835,00 mengalami penambahan Rp392.990.735,00 atau 84,25% dari total anggaran semula Rp466.482.100,00;<br>- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp230.686.950,00 mengalami penambahan Rp224.686.950,00 atau 3.744,78% dari total anggaran semula Rp6.000.000,00;<br>8) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp377.599.200,00 terdapat penambahan Rp374.099.200,00 atau 10.688,55% dari total anggaran semula sebesar Rp3.500.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening;<br>- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.15.0006 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya Rp377.599.200,00 dari semula tidak dianggarkan;<br>9) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp542.231.600,00 dari semula tidak dianggarkan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening;<br>- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp542.231.600,00 dari semula tidak dianggarkan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja dengan kode rekening;<br>1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar Rp119.820.000,00 dari semula tidak dianggarkan;<br>2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Rp422.411.600,00 dari semula tidak dianggarkan;<br>10) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp292.072.000,00 dari semula tidak dianggarkan; | |

| | | |
|---|---|---|
| | - x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.02.19.01.006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Rp292.072.000,00 dari semula tidak dianggarkan;<br><br>c. x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.396.879.457,00 terdapat penambahan Rp4.908.884.937,00 atau 16,10% dari total anggaran semula sebesar Rp30.487.994.520,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang antara lain tercantum pada obyek belanja dengan kode rekening;<br>1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp34.502.221.457,00 terdapat penambahan Rp4.209.226.937,00 atau 13,90% dari total anggaran semula sebesar Rp30.292.994.520,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja dengan kode rekening:<br>- x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp34.502.221.457,00 terdapat penambahan Rp4.209.226.937,00 atau 13,90% dari total anggaran semula sebesar Rp30.292.994.520,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:<br>(1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp293.536.800,00 dari semula tidak dianggarkan;<br>(2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang Rp1.233.041.014,00 dari semula tidak dianggarkan;<br>(3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp1.163.830.000,00 terdapat penurunan Rp648.830.000,00 atau 125,99% dari total anggaran semula sebesar Rp515.000.000,00; | c. Alokasi belanja modal gedung dan bangunan dalam rangka pemenuhan target RPJMD dan telah mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait adanya penambahan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagiannya untuk pelunasan hutang jangka pendek Tahun 2021. |

| | | |
|---|---|---|
| | (4) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp20.162.689.603,00 terdapat penurunan Rp866.160.378,00 atau 4,12% dari total anggaran semula sebesar Rp21.028.849.981,00<br>(5) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Rp2.109.233.478,00 dari semula tidak dianggarkan;<br>(6) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka Rp94.775.340,00 dari semula tidak dianggarkan;<br>(7) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01.0027 Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rp89.760.000,00 dari semula tidak dianggarkan;<br>(8) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp9.021.100.683,00 terdapat penambahan Rp782.331.683,00 atau 9,50% dari total anggaran semula sebesar Rp8.238.769.000,00;<br>2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.03.03 Belanja Modal Bangunan Menara Rp544.809.000,00 dari semula tidak dianggarkan; | |
| | d. x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp55.011.673.749,00 terdapat penurunan Rp25.406.682.999,00 atau 31,59% dari total anggaran semula sebesar Rp80.418.356.748,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang antara lain tercantum pada obyek belanja dengan kode rekening:<br>1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp45.962.225.174,00 terdapat penambahan Rp19.283.034.564,00 atau 72,28% dari total anggaran semula sebesar Rp26.679.190.610,00; | d. Alokasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dalam rangka pemenuhan target RPJMD dan telah mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait adanya penurunan pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagiannya dikarenakan adanya perubahan prioritas belanja untuk pelunasan hutang jangka pendek Tahun 2021. |

a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan Rp41.269.944.853,00 terdapat penambahan Rp14.880.428.243,00 atau 56,39% dari total anggaran semula sebesar Rp26.389.516.610,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:
   (1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp40.772.300.717,00 terdapat penambahan Rp14.580.986.903,00 atau 55,67% dari total anggaran semula sebesar Rp26.191.313.814,00;
   (2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa Rp142.603.340,00 dari semula tidak dianggarkan;
b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan Rp4.692.280.321,00 terdapat penambahan Rp4.402.606.321,00 atau 1.519,85% dari total anggaran semula sebesar Rp289.674.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian obyek belanja:
   (1) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten Rp1.554.214.800,00 dari semula tidak dianggarkan;
   (2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.01.02.0005 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa Rp1.451.339.060,00 dari semula tidak dianggarkan;
   (3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.01.02.0011 Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal Rp1.686.726.461,00 terdapat penambahan Rp1.397.052.461,00 atau 482,28% dari total anggaran semula sebesar Rp289.674.000,00;

2) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air Rp3.380.400.388,00 terdapat penurunan Rp26.519.599.612,00 atau 88,69% dari total anggaran semula sebesar Rp29.900.000.000,00; yang antara lain

diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja dengan kode rekening:

a) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.02.02 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Rp317.488.342,00 dari semula tidak dia anggarkan;
b) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp2.839.362.046,00 dari semula tidak dia anggarkan;
   - x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp2.689.502.246.00 dari semula tidak dia anggarkan;

3) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi Rp127.999.300,00 dari semula tidak dianggarkan yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja dengan kode rekening;
   - x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.03.09 Belanja Modal Instalasi Pengaman Rp127.999.300,00 dari semula tidak dianggarkan;
4) x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan Rp5.541.048.887,00 terdapat penurunan Rp18.298.117.251,00 atau 76,76% dari total anggaran semula sebesar Rp23.839.166.138,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja dengan kode rekening;
   - x.xx.xx.x.xx.xx.5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp5.541.048.887,00 terdapat penurunan Rp18.298.117.251,00 atau 76,76% dari total anggaran semula sebesar Rp23.839.166.138,00;

dapat dianggarkan dalam Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2022 dengan memperhatikan Laporan Realisasi Anggaran pada periode 30 September 2022, dimana penyerapan belanja modal terealisasi sebesar 33,47% dari total anggaran semula dalam Perda

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | APBD TA 2022. Dan dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran, serta menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran serta sisa waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br><br>Selain itu, dalam pengadaannya juga harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-alat tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat. Pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br><br>Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang | |

| | | |
|---|---|---|
| | baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.<br><br>Pengadaan barang milik daerah dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud butir C.2.s.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. | |
| | 9. Belanja Tidak Terduga<br><br>Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana | 9. Belanja Tidak Terduga<br>Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mengalihkan sebagian Belanja Tidak Terduga pada penyempurnaan Hasil Evaluasi Ranperda APBD untuk memaksimalkan pembayaran utang jangka pendek Tahun 2021. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<br><br>Belanja Tidak Terduga Rp6.189.407.385,00 terdapat penambahan sebesar Rp5.189.407.385,00 atau 518,94% dari total anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.<br><br>Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran Belanja Tak Terduga Rp6.189.407.385,00 atau 0,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 agar memperhatikan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir C.2.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran belanja tidak terduga sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah. | |

| | | |
|---|---|---|
| | 10. Belanja Transfer<br><br>Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp107.866.959.219,00 terdapat penambahan Rp1.738.819.429,00 atau 1,64% dari anggaran semula sebesar Rp106.128.139.790,00. Belanja Transfer Rp107.866.959.219,00 atau 11,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan sebagai berikut:<br><br>a. Belanja Bagi Hasil yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.430.268.790,00 tidak ada penambahan dari anggaran semula dalam Perda APBD TA 2022 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pelaksanaanya agar memedomani butir C.2.s.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br><br>Berkaitan dengan itu, Alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br><br>b. Belanja Bantuan Keuangan Rp105.436.690.429,00 terdapat penambahan Rp1.738.819.429,00 atau 1,68% dari anggaran semula sebesar Rp103.697.871.000,00 dalam Perda APBD TA 2022. Belanja Bantuan Keuangan Rp105.436.690.429,00 atau 11,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang hanya diuraikan ke dalam | 10. Belanja Transfer<br>Alokasi belanja Transfer terdiri dari:<br>a. Dana Desa yang bersumber dari APBN<br>b. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD yang dialokasikan paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2022.<br>c. Alokasi belanja pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dialokasikan sebesar 10% dari asumsi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2022. |

| | | |
|---|---|---|
| | rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp105.436.690.429,00;<br><br>dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br><br>Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.s.4).b).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| | **C. Kebijakan Pembiayaan Daerah**<br><br>Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.<br><br>Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. | **C. Kebijakan Pembiayaan Daerah**<br><br>Alokasi Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari:<br>1. SiLPA yang diperhitungkan pada sudah sesuai dengan hasil audit yang tertuang didalam LPP APBD Tahun Anggaran 2021.<br>2. Penerimaan kembali pinjaman daerah kepada masyarakat melalui dana bergulir. |

| | | |
|---|---|---|
| | Penetapan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp47.591.005.786,00 atau 63,02% dari total anggaran semula sebesar Rp29.192.910.204,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2022 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada akhir Tahun Anggaran 2022. | |
| **IV.** | **REKOMENDASI**<br><br>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memedomani antara lain sebagai berikut:<br><br>1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyusunan Rancangan P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 wajib menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada butir D.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. | **IV. REKOMENDASI**<br><br>1. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kepulauan Anambas dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 Dengan RKPD Serta KUA dan PPAS. |

| | | |
|---|---|---|
| | 2. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.<br>3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 agar melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu perubahan alokasi, dan penggunaan dalam anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi yang diprioritaskan untuk:<br>a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait Kesehatan.<br>b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup.<br>c. Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net. | 2. Pencantuman dasar hukum pada penganggaran perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 belum dapat dicantumkan dikarenakan pada penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mana fitur pencatuman dasar hukum belum disediakan pada system tersebut.<br>3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalokasikan belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi yang diprioritaskan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020. |

| | | |
|---|---|---|
| | sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. | |
| | 4. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kepulauan Riau pada tahun 2022 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 5,30% s.d 5,60%, meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,69% s.d 7,19% dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2022 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. | 4. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menganggarkan program-program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan sasaran utama pengembangan wilayah Kepulauan Riau. |
| | 5. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memedomani: | 5. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kementrian Dalam Negeri. |

| | | |
|---|---|---|
| | a. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS.<br>b. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP.<br>c. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.<br><br>Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di UKPBJ mengacu kepada hasil evaluasi jabatan mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. | |
| | 6. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (Value for Money), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan melakukan percepatan proses lelang barang jasa dan belanja modal dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br>7. Dalam rangka mendorong penguatan ekonomi daerah melalui percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket Usaha Mikro dan Kecil (UMK)-Koperasi, | 6. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menganggarkan dan melakukan percepatan proses lelang barang jasa dan belanja modal sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.<br><br>7. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan terus mengoptimalkan dan konsisten dalam Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam rangka mendorong penguatan ekonomi daerah. |

| | | |
|---|---|---|
| | dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br>8. Dalam Rangka Program Penganggaran Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari Dana Transfer Umum.<br>9. Dalam rangka pengendalian dan antisipasi dampak inflasi di daerah perlu dilakukan percepatan penyaluran belanja Bantuan Sosial (Bansos) guna menjaga daya beli, melindungi kelompok rentan, meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memperhatikan Surat Edaran Nomor 840/5412/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.<br>10. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1071 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memasukkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus yang digunakan untuk Bantuan Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp720.000.000,00 kepada 1.670 masyarakat dan 730 nelayan masing-masing sebesar Rp300.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.<br>11. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas pada Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan untuk meningkatkan kinerja | 8. Program Penganggaran Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 sudah dilaporkan sejak bulan September dan akan terus dilaporkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.<br>9. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan terus mengoptimalkan penyaluran belanja Bantuan Sosial (Bansos) dan berpedoman pada Surat Edaran Nomor 840/5412/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.<br>10. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus Dalam Rangka Pengendalian Inflasi sesuai dengan ketentuan.<br>11. Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas pada Dana Alokasi Khusus Nonfisik sedang dilakukan |

| | | |
|---|---|---|
| | upaya kesehatan masyarakat di puskesmas agar memedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022. | percepatan peningkatan kinerja dengan mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022. |
| | 12. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penggunaan Bantuan Operasional untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan agar memedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. | 12. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah melaksanakan sesuai dengen juknis dan peraturan yang telah ditetapkan. |
| | 13. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar menyelesaikan kewajiban TA. 2021 sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan kewajiban sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 996 Tahun 2022 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapata Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. | 13. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah berupaya secara optimal untuk menyelesaikan hutang jangka pendek Tahun 2021 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. |
| | 14. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 14. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan tetap mempedomani peratauran perundang-undangan yang berlaku dalam penganggaran baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan. |

| | | |
|---|---|---|
| | Tahun Anggaran 2022 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. | |

Ditetapkan di Tarempa
Pada Tanggal 27 Oktober 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**WAKIL KETUA I,**

**SYAMSIL UMRI**

Salinan seusai dengan aslinya
Plh. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

ABDUL RASYID, SE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19730122 200312 1 007

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **40.661.242.655** | **41.450.650.040** | **789.407.385** | **2 %** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 20.111.728.377 | 20.111.728.377 | 0 | 0 % |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 4.190.959.515 | 4.190.959.515 | 0 | 0 % |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.318.019.763 | 1.318.019.763 | 0 | 0 % |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 15.040.535.000 | 15.829.942.385 | 789.407.385 | 5 % |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **848.486.966.072** | **815.808.870.490** | **(32.678.095.582)** | **4 %** |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 782.396.713.718 | 753.329.744.257 | (29.066.969.461) | 4 % |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 66.090.252.354 | 62.479.126.233 | (3.611.126.121) | 5 % |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **11.797.340.000** | **11.797.340.000** | **0** | **0 %** |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 11.797.340.000 | 11.797.340.000 | 0 | 0 % |
| | **Jumlah Pendapatan** | **900.945.548.727** | **869.056.860.530** | **(31.888.688.197)** | **4 %** |
| | | | | | |
| **5** | **BELANJA** | | | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **687.543.101.168** | **683.572.078.918** | **(3.971.022.250)** | **1 %** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 352.208.184.548 | 318.032.210.565 | (34.175.973.983) | 10 % |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 324.648.626.062 | 350.460.486.457 | 25.811.860.395 | 8 % |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 10.651.316.558 | 12.187.692.396 | 1.536.375.838 | 14 % |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 34.974.000 | 2.891.689.500 | 2.856.715.500 | 8.168 % |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **135.467.217.973** | **124.208.828.179** | **(11.258.389.794)** | **8 %** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 1.000.000.000 | 80.343.000 | (919.657.000) | 92 % |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 22.471.068.406 | 31.656.379.907 | 9.185.311.501 | 41 % |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 30.487.994.520 | 35.899.072.257 | 5.411.077.737 | 18 % |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 80.418.356.748 | 55.470.824.216 | (24.947.532.532) | 31 % |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.089.798.299 | 1.102.208.799 | 12.410.500 | 1 % |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **1.000.000.000** | **1.000.000.000** | **0** | **0 %** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0 % |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **106.128.139.790** | **107.866.959.219** | **1.738.819.429** | **2 %** |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 2.430.268.790 | 2.430.268.790 | 0 | 0 % |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 103.697.871.000 | 105.436.690.429 | 1.738.819.429 | 2 % |
| | **Jumlah Belanja** | **930.138.458.931** | **916.647.866.316** | **(13.490.592.615)** | **1 %** |
| | **Total Surplus/(Defisit)** | **(29.192.910.204)** | **(47.591.005.786)** | **(18.398.095.582)** | **-63 %** |
| | | | | | |
| **6** | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **30.192.910.204** | **48.591.005.786** | **18.398.095.582** | **61 %** |

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 29.692.910.204 | 48.091.005.786 | 18.398.095.582 | 62 % |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0 % |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **30.192.910.204** | **48.591.005.786** | **18.398.095.582** | **61 %** |
| 6.2 | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **1.000.000.000** | **1.000.000.000** | **0** | **0 %** |
| 6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0 % |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **1.000.000.000** | **1.000.000.000** | **0** | **0 %** |
| | **Pembiayaan Netto** | **29.192.910.204** | **47.591.005.786** | **18.398.095.582** | **63 %** |
| 6.3 | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan** | **0** | **0** | **0** | **100 %** |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | Urusan Pemerintahan Daerah | Sebelum Perubahan | | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pendapatan | Belanja | | | | | Pendapatan | Belanja | | | | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja |
| **1** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **0** | **370.415.029.441** | **130.818.099.581** | **0** | **0** | **501.233.129.022** | **0** | **389.672.209.154** | **112.393.663.047** | **0** | **0** | **502.065.872.201** |
| **1** | **01** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | **0** | **166.131.525.306** | **26.167.932.625** | **0** | **0** | **192.299.457.931** | **0** | **165.621.426.903** | **29.062.233.887** | **0** | **0** | **194.683.660.790** |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 0 | 166.131.525.306 | 26.167.932.625 | 0 | 0 | 192.299.457.931 | 0 | 165.621.426.903 | 29.062.233.887 | 0 | 0 | 194.683.660.790 |
| 1 | 01 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **02** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **0** | **139.160.240.211** | **14.158.869.379** | **0** | **0** | **153.319.109.590** | **0** | **144.076.616.499** | **20.271.853.546** | **0** | **0** | **164.348.470.045** |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 122.984.953.475 | 13.512.667.626 | 0 | 0 | 136.497.621.101 | 0 | 127.492.994.260 | 19.419.208.179 | 0 | 0 | 146.912.202.439 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.1 | RSUD Tarempa | 0 | 1.025.768.885 | 0 | 0 | 0 | 1.025.768.885 | 0 | 1.239.712.485 | 0 | 0 | 0 | 1.239.712.485 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | Puskesmas Siantan Timur | 0 | 1.375.008.863 | 0 | 0 | 0 | 1.375.008.863 | 0 | 1.378.108.175 | 4.662.000 | 0 | 0 | 1.382.770.175 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK) | 0 | 189.739.766 | 0 | 0 | 0 | 189.739.766 | 0 | 186.206.869 | 0 | 0 | 0 | 186.206.869 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | Puskesmas Jemaja Barat | 0 | 745.796.740 | 92.454.076 | 0 | 0 | 838.250.816 | 0 | 750.372.782 | 91.734.828 | 0 | 0 | 842.107.610 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | Puskesmas Siantan Utara | 0 | 639.262.100 | 106.128.000 | 0 | 0 | 745.390.100 | 0 | 485.693.492 | 105.907.212 | 0 | 0 | 591.600.704 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | Puskesmas Kute Siantan | 0 | 712.252.808 | 113.765.960 | 0 | 0 | 826.018.768 | 0 | 712.111.457 | 89.401.511 | 0 | 0 | 801.512.968 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.2 | RSUD Jemaja | 0 | 941.724.605 | 2.200.000 | 0 | 0 | 943.924.605 | 0 | 881.944.717 | 0 | 0 | 0 | 881.944.717 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.3 | RSUD Palmatak | 0 | 1.123.019.140 | 0 | 0 | 0 | 1.123.019.140 | 0 | 1.306.109.450 | 0 | 0 | 0 | 1.306.109.450 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.4 | Puskesmas Siantan Tengah | 0 | 1.459.973.003 | 0 | 0 | 0 | 1.459.973.003 | 0 | 1.429.357.203 | 28.943.250 | 0 | 0 | 1.458.300.453 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.5 | Puskesmas Letung | 0 | 1.578.655.185 | 38.500.000 | 0 | 0 | 1.617.155.185 | 0 | 1.648.895.910 | 47.590.000 | 0 | 0 | 1.696.485.910 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.6 | Puskesmas Jemaja Timur | 0 | 1.196.492.621 | 3.520.000 | 0 | 0 | 1.200.012.621 | 0 | 1.274.788.493 | 20.170.000 | 0 | 0 | 1.294.958.493 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.7 | Puskesmas Palmatak | 0 | 2.267.026.015 | 104.544.000 | 0 | 0 | 2.371.570.015 | 0 | 2.264.540.867 | 248.919.000 | 0 | 0 | 2.513.459.867 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.8 | Puskesmas Tarempa | 0 | 1.806.311.506 | 129.902.717 | 0 | 0 | 1.936.214.223 | 0 | 1.868.541.812 | 157.408.866 | 0 | 0 | 2.025.950.678 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.9 | Puskesmas Siantan Selatan | 0 | 1.114.255.499 | 55.187.000 | 0 | 0 | 1.169.442.499 | 0 | 1.157.238.527 | 57.908.700 | 0 | 0 | 1.215.147.227 |
| **1** | **03** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **0** | **29.432.573.068** | **90.278.594.781** | **0** | **0** | **119.711.167.849** | **0** | **41.068.444.710** | **59.670.645.439** | **0** | **0** | **100.739.090.149** |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 28.667.166.017 | 89.933.134.281 | 0 | 0 | 118.600.300.298 | 0 | 40.074.247.681 | 59.489.414.939 | 0 | 0 | 99.563.662.620 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0001 | UPTD SPAM SIANTAN | 0 | 765.407.051 | 345.460.500 | 0 | 0 | 1.110.867.551 | 0 | 994.197.029 | 181.230.500 | 0 | 0 | 1.175.427.529 |
| 1 | 03 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **04** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **0** | **221.688.000** | **198.202.796** | **0** | **0** | **419.890.796** | **0** | **568.376.900** | **3.053.908.675** | **0** | **0** | **3.622.285.575** |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 221.688.000 | 198.202.796 | 0 | 0 | 419.890.796 | 0 | 568.376.900 | 3.053.908.675 | 0 | 0 | 3.622.285.575 |
| **1** | **05** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **0** | **25.409.748.016** | **0** | **0** | **0** | **25.409.748.016** | **0** | **26.445.193.333** | **335.021.500** | **0** | **0** | **26.780.214.833** |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.044.000 | 0 | 0 | 0 | 27.044.000 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 9.380.910.928 | 0 | 0 | 0 | 9.380.910.928 | 0 | 11.028.653.973 | 24.992.000 | 0 | 0 | 11.053.645.973 |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 16.028.837.088 | 0 | 0 | 0 | 16.028.837.088 | 0 | 15.389.495.360 | 310.029.500 | 0 | 0 | 15.699.524.860 |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **06** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **0** | **10.059.254.840** | **14.500.000** | **0** | **0** | **10.073.754.840** | **0** | **11.892.150.809** | **0** | **0** | **0** | **11.892.150.809** |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 10.059.254.840 | 14.500.000 | 0 | 0 | 10.073.754.840 | 0 | 11.892.150.809 | 0 | 0 | 0 | 11.892.150.809 |
| **2** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **0** | **68.246.843.064** | **1.590.055.025** | **0** | **0** | **69.836.898.089** | **0** | **69.297.931.970** | **7.326.974.450** | **0** | **0** | **76.624.906.420** |
| **2** | **07** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **0** | **1.899.662.466** | **0** | **0** | **0** | **1.899.662.466** | **0** | **2.695.022.698** | **0** | **0** | **0** | **2.695.022.698** |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.879.733 | 0 | 0 | 0 | 932.879.733 |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 | 1.899.662.466 | 0 | 0 | 0 | 1.899.662.466 | 0 | 1.762.142.965 | 0 | 0 | 0 | 1.762.142.965 |
| **2** | **08** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **0** | **1.280.636.900** | **3.500.000** | **0** | **0** | **1.284.136.900** | **0** | **1.313.025.660** | **3.500.000** | **0** | **0** | **1.316.525.660** |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 1.280.636.900 | 3.500.000 | 0 | 0 | 1.284.136.900 | 0 | 1.313.025.660 | 3.500.000 | 0 | 0 | 1.316.525.660 |
| **2** | **09** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **0** | **699.911.140** | **21.538.000** | **0** | **0** | **721.449.140** | **0** | **671.168.890** | **0** | **0** | **0** | **671.168.890** |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN | 0 | 699.911.140 | 21.538.000 | 0 | 0 | 721.449.140 | 0 | 671.168.890 | 0 | 0 | 0 | 671.168.890 |
| **2** | **10** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 10 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **11** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **0** | **1.156.230.930** | **0** | **0** | **0** | **1.156.230.930** | **0** | **1.445.851.600** | **172.876.000** | **0** | **0** | **1.618.727.600** |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 673.790.130 | 0 | 0 | 0 | 673.790.130 | 0 | 942.345.800 | 7.876.000 | 0 | 0 | 950.221.800 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.2 | UPT PENGELOLAAN SAMPAH | 0 | 482.440.800 | 0 | 0 | 0 | 482.440.800 | 0 | 503.505.800 | 165.000.000 | 0 | 0 | 668.505.800 |
| **2** | **12** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **0** | **6.926.947.553** | **294.947.025** | **0** | **0** | **7.221.894.578** | **0** | **6.751.063.281** | **241.789.000** | **0** | **0** | **6.992.852.281** |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 6.926.947.553 | 294.947.025 | 0 | 0 | 7.221.894.578 | 0 | 6.751.063.281 | 241.789.000 | 0 | 0 | 6.992.852.281 |

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | Urusan Pemerintahan Daerah | Sebelum Perubahan | | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pendapatan | Belanja | | | | | Pendapatan | Belanja | | | | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja |
| **2** | **13** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **0** | **1.921.106.184** | **0** | **0** | **0** | **1.921.106.184** | **0** | **1.769.113.202** | **0** | **0** | **0** | **1.769.113.202** |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 1.921.106.184 | 0 | 0 | 0 | 1.921.106.184 | 0 | 1.455.037.038 | 0 | 0 | 0 | 1.455.037.038 |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.076.164 | 0 | 0 | 0 | 314.076.164 |
| **2** | **14** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **0** | **2.020.119.328** | **178.071.000** | **0** | **0** | **2.198.190.328** | **0** | **1.845.611.564** | **34.071.000** | **0** | **0** | **1.879.682.564** |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 1.936.126.394 | 178.071.000 | 0 | 0 | 2.114.197.394 | 0 | 1.828.811.564 | 34.071.000 | 0 | 0 | 1.862.882.564 |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.9 | Puskesmas Siantan Selatan | 0 | 83.992.934 | 0 | 0 | 0 | 83.992.934 | 0 | 16.800.000 | 0 | 0 | 0 | 16.800.000 |
| **2** | **15** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **0** | **15.957.329.819** | **289.674.000** | **0** | **0** | **16.247.003.819** | **0** | **19.145.091.822** | **5.352.656.539** | **0** | **0** | **24.497.748.361** |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 0 | 15.828.071.003 | 289.674.000 | 0 | 0 | 16.117.745.003 | 0 | 19.017.408.006 | 5.352.656.539 | 0 | 0 | 24.370.064.545 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.1 | UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI | 0 | 129.258.816 | 0 | 0 | 0 | 129.258.816 | 0 | 127.683.816 | 0 | 0 | 0 | 127.683.816 |
| **2** | **16** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **0** | **16.092.614.514** | **689.205.000** | **0** | **0** | **16.781.819.514** | **0** | **13.590.775.653** | **1.303.425.911** | **0** | **0** | **14.894.201.564** |
| 2 | 16 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 0 | 16.092.614.514 | 689.205.000 | 0 | 0 | 16.781.819.514 | 0 | 13.590.775.653 | 1.303.425.911 | 0 | 0 | 14.894.201.564 |
| **2** | **17** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **0** | **8.441.071.021** | **11.160.000** | **0** | **0** | **8.452.231.021** | **0** | **7.857.195.962** | **0** | **0** | **0** | **7.857.195.962** |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 0 | 8.441.071.021 | 11.160.000 | 0 | 0 | 8.452.231.021 | 0 | 7.857.195.962 | 0 | 0 | 0 | 7.857.195.962 |
| **2** | **18** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **0** | **8.743.999.775** | **0** | **0** | **0** | **8.743.999.775** | **0** | **7.869.305.549** | **16.126.000** | **0** | **0** | **7.885.431.549** |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 0 | 8.743.999.775 | 0 | 0 | 0 | 8.743.999.775 | 0 | 7.869.305.549 | 16.126.000 | 0 | 0 | 7.885.431.549 |
| **2** | **19** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **0** | **1.519.940.934** | **0** | **0** | **0** | **1.519.940.934** | **0** | **2.243.146.929** | **122.530.000** | **0** | **0** | **2.365.676.929** |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 0 | 1.519.940.934 | 0 | 0 | 0 | 1.519.940.934 | 0 | 2.243.146.929 | 122.530.000 | 0 | 0 | 2.365.676.929 |
| **2** | **20** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | **0** | **193.218.000** | **0** | **0** | **0** | **193.218.000** | **0** | **114.987.600** | **0** | **0** | **0** | **114.987.600** |
| 2 | 20 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 0 | 193.218.000 | 0 | 0 | 0 | 193.218.000 | 0 | 114.987.600 | 0 | 0 | 0 | 114.987.600 |
| **2** | **21** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | **0** | **170.763.800** | **0** | **0** | **0** | **170.763.800** | **0** | **79.246.000** | **0** | **0** | **0** | **79.246.000** |
| 2 | 21 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 0 | 170.763.800 | 0 | 0 | 0 | 170.763.800 | 0 | 79.246.000 | 0 | 0 | 0 | 79.246.000 |
| **2** | **22** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | **0** | **280.611.600** | **0** | **0** | **0** | **280.611.600** | **0** | **840.695.760** | **0** | **0** | **0** | **840.695.760** |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 0 | 280.611.600 | 0 | 0 | 0 | 280.611.600 | 0 | 840.695.760 | 0 | 0 | 0 | 840.695.760 |
| **2** | **23** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **0** | **881.371.100** | **101.960.000** | **0** | **0** | **983.331.100** | **0** | **995.362.800** | **80.000.000** | **0** | **0** | **1.075.362.800** |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.045.100 | 0 | 0 | 0 | 156.045.100 |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 881.371.100 | 101.960.000 | 0 | 0 | 983.331.100 | 0 | 839.317.700 | 80.000.000 | 0 | 0 | 919.317.700 |
| **2** | **24** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | **0** | **61.308.000** | **0** | **0** | **0** | **61.308.000** | **0** | **71.267.000** | **0** | **0** | **0** | **71.267.000** |
| 2 | 24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.499.000 | 0 | 0 | 0 | 32.499.000 |
| 2 | 24 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 61.308.000 | 0 | 0 | 0 | 61.308.000 | 0 | 38.768.000 | 0 | 0 | 0 | 38.768.000 |
| **3** | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **0** | **24.872.701.670** | **349.465.632** | **0** | **0** | **25.222.167.302** | **0** | **24.640.891.182** | **2.249.305.697** | **0** | **0** | **26.890.196.879** |
| **3** | **25** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **0** | **15.032.517.010** | **72.515.632** | **0** | **0** | **15.105.032.642** | **0** | **14.411.611.564** | **143.960.000** | **0** | **0** | **14.555.571.564** |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN | 0 | 15.032.517.010 | 72.515.632 | 0 | 0 | 15.105.032.642 | 0 | 14.411.611.564 | 143.960.000 | 0 | 0 | 14.555.571.564 |
| **3** | **26** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | **0** | **8.181.574.216** | **76.750.000** | **0** | **0** | **8.258.324.216** | **0** | **8.682.005.661** | **50.000.000** | **0** | **0** | **8.732.005.661** |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 0 | 8.181.574.216 | 76.750.000 | 0 | 0 | 8.258.324.216 | 0 | 8.682.005.661 | 50.000.000 | 0 | 0 | 8.732.005.661 |
| **3** | **27** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **0** | **754.955.669** | **195.000.000** | **0** | **0** | **949.955.669** | **0** | **639.800.664** | **39.973.000** | **0** | **0** | **679.773.664** |
| 3 | 27 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN | 0 | 754.955.669 | 195.000.000 | 0 | 0 | 949.955.669 | 0 | 639.800.664 | 39.973.000 | 0 | 0 | 679.773.664 |
| **3** | **30** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | **0** | **638.865.575** | **0** | **0** | **0** | **638.865.575** | **0** | **785.945.265** | **0** | **0** | **0** | **785.945.265** |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 0 | 638.865.575 | 0 | 0 | 0 | 638.865.575 | 0 | 785.945.265 | 0 | 0 | 0 | 785.945.265 |
| **3** | **31** | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | **0** | **264.789.200** | **5.200.000** | **0** | **0** | **269.989.200** | **0** | **121.528.028** | **2.015.372.697** | **0** | **0** | **2.136.900.725** |
| 3 | 31 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 0 | 264.789.200 | 5.200.000 | 0 | 0 | 269.989.200 | 0 | 121.528.028 | 2.015.372.697 | 0 | 0 | 2.136.900.725 |
| **4** | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | **0** | **88.552.783.621** | **1.806.567.510** | **0** | **0** | **90.359.351.131** | **0** | **90.100.112.955** | **1.263.757.660** | **0** | **0** | **91.363.870.615** |
| **4** | **01** | | **SEKRETARIAT DAERAH** | **0** | **53.878.459.901** | **1.545.856.510** | **0** | **0** | **55.424.316.411** | **0** | **53.488.371.203** | **684.648.710** | **0** | **0** | **54.173.019.913** |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 53.878.459.901 | 1.545.856.510 | 0 | 0 | 55.424.316.411 | 0 | 53.488.371.203 | 684.648.710 | 0 | 0 | 54.173.019.913 |
| **4** | **02** | | **SEKRETARIAT DPRD** | **0** | **34.674.323.720** | **260.711.000** | **0** | **0** | **34.935.034.720** | **0** | **36.611.741.752** | **579.108.950** | **0** | **0** | **37.190.850.702** |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DPRD | 0 | 34.674.323.720 | 260.711.000 | 0 | 0 | 34.935.034.720 | 0 | 36.611.741.752 | 579.108.950 | 0 | 0 | 37.190.850.702 |

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | Urusan Pemerintahan Daerah | Sebelum Perubahan | | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pendapatan | Belanja | | | | | Pendapatan | Belanja | | | | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 900.945.548.727 | 79.983.741.960 | 848.030.225 | 1.000.000.000 | 106.128.139.790 | 187.959.911.975 | 869.056.860.530 | 57.010.064.027 | 402.495.725 | 1.000.000.000 | 107.866.959.219 | 166.279.518.971 |
| 5 | 01 | | PERENCANAAN | 0 | 12.638.846.195 | 45.000.000 | 0 | 0 | 12.683.846.195 | 0 | 9.700.689.280 | 0 | 0 | 0 | 9.700.689.280 |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 12.638.846.195 | 45.000.000 | 0 | 0 | 12.683.846.195 | 0 | 9.700.689.280 | 0 | 0 | 0 | 9.700.689.280 |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | 900.945.548.727 | 56.632.886.328 | 206.500.000 | 1.000.000.000 | 106.128.139.790 | 163.967.526.118 | 869.056.860.530 | 39.000.618.074 | 145.380.000 | 1.000.000.000 | 107.866.959.219 | 148.012.957.293 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 900.945.548.727 | 56.632.886.328 | 206.500.000 | 1.000.000.000 | 106.128.139.790 | 163.967.526.118 | 869.056.860.530 | 39.000.618.074 | 145.380.000 | 1.000.000.000 | 107.866.959.219 | 148.012.957.293 |
| 5 | 03 | | KEPEGAWAIAN | 0 | 7.800.650.377 | 21.200.000 | 0 | 0 | 7.821.850.377 | 0 | 6.422.806.002 | 0 | 0 | 0 | 6.422.806.002 |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | 7.800.650.377 | 21.200.000 | 0 | 0 | 7.821.850.377 | 0 | 6.422.806.002 | 0 | 0 | 0 | 6.422.806.002 |
| 5 | 04 | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 0 | 1.274.652.000 | 0 | 0 | 0 | 1.274.652.000 | 0 | 1.274.647.000 | 0 | 0 | 0 | 1.274.647.000 |
| 5 | 04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | 1.274.652.000 | 0 | 0 | 0 | 1.274.652.000 | 0 | 1.274.647.000 | 0 | 0 | 0 | 1.274.647.000 |
| 5 | 05 | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 0 | 707.037.400 | 100.000.000 | 0 | 0 | 807.037.400 | 0 | 11.286.600 | 0 | 0 | 0 | 11.286.600 |
| 5 | 05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0 | 707.037.400 | 100.000.000 | 0 | 0 | 807.037.400 | 0 | 11.286.600 | 0 | 0 | 0 | 11.286.600 |
| 5 | 06 | | PENGELOLAAN PERBATASAN | 0 | 929.669.660 | 475.330.225 | 0 | 0 | 1.404.999.885 | 0 | 600.017.071 | 257.115.725 | 0 | 0 | 857.132.796 |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH | 0 | 929.669.660 | 475.330.225 | 0 | 0 | 1.404.999.885 | 0 | 600.017.071 | 257.115.725 | 0 | 0 | 857.132.796 |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 0 | 12.563.659.281 | 0 | 0 | 0 | 12.563.659.281 | 0 | 11.615.350.300 | 0 | 0 | 0 | 11.615.350.300 |
| 6 | 01 | | INSPEKTORAT DAERAH | 0 | 12.563.659.281 | 0 | 0 | 0 | 12.563.659.281 | 0 | 11.615.350.300 | 0 | 0 | 0 | 11.615.350.300 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | INSPEKTORAT DAERAH | 0 | 12.563.659.281 | 0 | 0 | 0 | 12.563.659.281 | 0 | 11.615.350.300 | 0 | 0 | 0 | 11.615.350.300 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 0 | 36.872.000.538 | 55.000.000 | 0 | 0 | 36.927.000.538 | 0 | 36.106.658.498 | 572.631.600 | 0 | 0 | 36.679.290.098 |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | 0 | 36.872.000.538 | 55.000.000 | 0 | 0 | 36.927.000.538 | 0 | 36.106.658.498 | 572.631.600 | 0 | 0 | 36.679.290.098 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | KECAMATAN SIANTAN | 0 | 4.294.654.995 | 0 | 0 | 0 | 4.294.654.995 | 0 | 4.303.346.512 | 0 | 0 | 0 | 4.303.346.512 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | KELURAHAN TAREMPA | 0 | 933.703.300 | 0 | 0 | 0 | 933.703.300 | 0 | 1.108.701.821 | 0 | 0 | 0 | 1.108.701.821 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | KECAMATAN JEMAJA | 0 | 5.296.011.988 | 0 | 0 | 0 | 5.296.011.988 | 0 | 5.060.296.758 | 0 | 0 | 0 | 5.060.296.758 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | KELURAHAN LETUNG | 0 | 663.813.371 | 0 | 0 | 0 | 663.813.371 | 0 | 668.536.152 | 0 | 0 | 0 | 668.536.152 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | KECAMATAN PALMATAK | 0 | 4.710.567.529 | 0 | 0 | 0 | 4.710.567.529 | 0 | 4.818.081.369 | 0 | 0 | 0 | 4.818.081.369 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | KECAMATAN SIANTAN TIMUR | 0 | 2.919.405.586 | 0 | 0 | 0 | 2.919.405.586 | 0 | 2.977.690.597 | 0 | 0 | 0 | 2.977.690.597 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | KECAMATAN SIANTAN SELATAN | 0 | 2.810.313.329 | 0 | 0 | 0 | 2.810.313.329 | 0 | 2.584.732.476 | 0 | 0 | 0 | 2.584.732.476 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | KECAMATAN JEMAJA TIMUR | 0 | 3.275.099.258 | 0 | 0 | 0 | 3.275.099.258 | 0 | 3.032.377.248 | 289.125.100 | 0 | 0 | 3.321.502.348 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | KECAMATAN SIANTAN TENGAH | 0 | 3.106.747.543 | 0 | 0 | 0 | 3.106.747.543 | 0 | 3.026.298.971 | 35.101.500 | 0 | 0 | 3.061.400.471 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | KECAMATAN SIANTAN UTARA | 0 | 2.738.233.132 | 55.000.000 | 0 | 0 | 2.793.233.132 | 0 | 2.376.967.590 | 0 | 0 | 0 | 2.376.967.590 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | KECAMATAN JEMAJA BARAT | 0 | 2.852.722.295 | 0 | 0 | 0 | 2.852.722.295 | 0 | 2.593.882.264 | 0 | 0 | 0 | 2.593.882.264 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | KECAMATAN KUTE SIANTAN | 0 | 3.270.728.212 | 0 | 0 | 0 | 3.270.728.212 | 0 | 3.555.746.740 | 248.405.000 | 0 | 0 | 3.804.151.740 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 0 | 6.036.341.593 | 0 | 0 | 0 | 6.036.341.593 | 0 | 5.128.860.832 | 0 | 0 | 0 | 5.128.860.832 |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 6.036.341.593 | 0 | 0 | 0 | 6.036.341.593 | 0 | 5.128.860.832 | 0 | 0 | 0 | 5.128.860.832 |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 6.036.341.593 | 0 | 0 | 0 | 6.036.341.593 | 0 | 5.128.860.832 | 0 | 0 | 0 | 5.128.860.832 |
| TOTAL | | | | 900.945.548.727 | 687.543.101.168 | 135.467.217.973 | 1.000.000.000 | 106.128.139.790 | 930.138.458.931 | 869.056.860.530 | 683.572.078.918 | 124.208.828.179 | 1.000.000.000 | 107.866.959.219 | 916.647.866.316 |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | **BELANJA** | | | | |
| **1** | **01** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | **192.299.457.931** | **194.683.660.790** | **2.384.202.859** | |
| **1** | **01** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **43.124.199.421** | **50.675.351.462** | **7.551.152.041** | |
| **1** | **01** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | **20.149.617.928** | **23.658.919.476** | **3.509.301.548** | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | | | | Penambahan Ruang Kelas Baru | 4.228.928.675 | 1.321.362.400 | (2.907.566.275) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 47.535.400 | 47.535.400 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 0 | 748.000 | 748.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 46.787.400 | 46.787.400 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 4.228.928.675 | 1.273.827.000 | (2.955.101.675) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 4.228.928.675 | 1.273.827.000 | (2.955.101.675) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 1.027.239.133 | 1.586.015.100 | 558.775.967 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 297.962.000 | 297.962.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 297.962.000 | 297.962.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 1.027.239.133 | 1.288.053.100 | 260.813.967 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.027.239.133 | 1.288.053.100 | 260.813.967 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 379.220.418 | 665.409.000 | 286.188.582 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 117.759.000 | 117.759.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 117.759.000 | 117.759.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 379.220.418 | 547.650.000 | 168.429.582 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 379.220.418 | 547.650.000 | 168.429.582 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | | | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 652.556.732 | 730.998.000 | 78.441.268 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 75.024.000 | 75.024.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 75.024.000 | 75.024.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 652.556.732 | 655.974.000 | 3.417.268 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 652.556.732 | 655.974.000 | 3.417.268 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 629.983.901 | 3.231.761.491 | 2.601.777.590 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 199.600.000 | 826.485.030 | 626.885.030 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 0 | 2.040.000 | 2.040.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 199.600.000 | 824.445.030 | 624.845.030 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 430.383.901 | 2.405.276.461 | 1.974.892.560 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 430.383.901 | 2.405.276.461 | 1.974.892.560 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | | | | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 1.133.970.724 | 1.514.361.832 | 380.391.108 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 225.089.000 | 225.089.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 225.089.000 | 225.089.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 1.133.970.724 | 1.289.272.832 | 155.302.108 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.133.970.724 | 1.289.272.832 | 155.302.108 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 08 | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | 0 | 269.120.000 | 269.120.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 269.120.000 | 269.120.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 269.120.000 | 269.120.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 0 | 22.264.000 | 22.264.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 22.264.000 | 22.264.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 22.264.000 | 22.264.000 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 13 | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 0 | 275.357.500 | 275.357.500 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 275.357.500 | 275.357.500 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 275.357.500 | 275.357.500 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 16 | | | | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 1.134.183.392 | 2.881.437.900 | 1.747.254.508 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 16 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.134.183.392 | 643.570.600 | (490.612.792) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 16 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.134.183.392 | 451.730.600 | (682.452.792) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 16 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 0 | 191.840.000 | 191.840.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 16 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 2.237.867.300 | 2.237.867.300 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 16 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 2.178.392.300 | 2.178.392.300 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 16 | 5 | 2 | 05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0 | 59.475.000 | 59.475.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 17 | | | | Pengadaan Perlengkapan Siswa | 0 | 587.281.200 | 587.281.200 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 17 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 587.281.200 | 587.281.200 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 17 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 587.281.200 | 587.281.200 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 21 | | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 1.812.325.575 | 1.666.769.175 | (145.556.400) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 21 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.812.325.575 | 1.666.769.175 | (145.556.400) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 21 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.812.325.575 | 1.666.769.175 | (145.556.400) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 27 | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 404.795.500 | 160.368.000 | (244.427.500) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 27 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 404.795.500 | 160.368.000 | (244.427.500) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 27 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 404.795.500 | 160.368.000 | (244.427.500) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 29 | | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 8.746.413.878 | 8.746.413.878 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 29 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 5.262.869.375 | 5.262.869.375 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 29 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.158.256.871 | 5.158.256.871 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 29 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 104.612.504 | 104.612.504 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 29 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 3.483.544.503 | 3.483.544.503 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 29 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.020.375.704 | 3.020.375.704 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 29 | 5 | 2 | 05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 463.168.799 | 463.168.799 | 0 | |
| **1** | **01** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **19.636.243.431** | **21.676.623.196** | **2.040.379.765** | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | | | | Penambahan Ruang Kelas Baru | 0 | 500.868.680 | 500.868.680 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 37.243.680 | 37.243.680 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 0 | 680.000 | 680.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 36.498.000 | 36.498.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 0 | 65.680 | 65.680 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 463.625.000 | 463.625.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 463.625.000 | 463.625.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 3.982.333.137 | 4.024.857.576 | 42.524.439 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 176.226.076 | 176.226.076 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 176.167.000 | 176.167.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 0 | 59.076 | 59.076 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 3.982.333.137 | 3.848.631.500 | (133.701.637) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 3.982.333.137 | 3.848.631.500 | (133.701.637) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 1.126.367.344 | 1.410.491.805 | 284.124.461 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 187.116.717 | 187.116.717 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 0 | 680.000 | 680.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 186.373.000 | 186.373.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 0 | 63.717 | 63.717 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 1.126.367.344 | 1.223.375.088 | 97.007.744 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.126.367.344 | 1.223.375.088 | 97.007.744 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 06 | | | | Pembangunan Laboratorium | 6.765.730.513 | 5.336.521.088 | (1.429.209.425) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 680.596.000 | 490.885.590 | (189.710.410) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 06 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 0 | 7.548.000 | 7.548.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 680.596.000 | 483.238.310 | (197.357.690) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 06 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 0 | 99.280 | 99.280 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 06 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 6.085.134.513 | 4.845.635.498 | (1.239.499.015) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 06 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 6.085.134.513 | 4.845.635.498 | (1.239.499.015) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 09 | | | | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 699.392.366 | 781.996.511 | 82.604.145 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 87.829.847 | 87.829.847 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 87.772.000 | 87.772.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 09 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 0 | 57.847 | 57.847 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 09 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 699.392.366 | 694.166.664 | (5.225.702) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 09 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 699.392.366 | 694.166.664 | (5.225.702) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 12 | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 99.850.000 | 1.117.329.700 | 1.017.479.700 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 12 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 99.850.000 | 406.871.000 | 307.021.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 12 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 0 | 2.040.000 | 2.040.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 12 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.850.000 | 404.831.000 | 304.981.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 12 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 710.458.700 | 710.458.700 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 12 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 710.458.700 | 710.458.700 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 15 | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | 0 | 97.724.000 | 97.724.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 15 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 97.724.000 | 97.724.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 15 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 97.724.000 | 97.724.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 21 | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 0 | 3.234.000 | 3.234.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 21 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 3.234.000 | 3.234.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 21 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 3.234.000 | 3.234.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 24 | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 0 | 20.812.000 | 20.812.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 24 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 20.812.000 | 20.812.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 24 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 20.812.000 | 20.812.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 27 | | | | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 581.739.285 | 1.095.384.220 | 513.644.935 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 27 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 581.739.285 | 432.055.120 | (149.684.165) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 27 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 581.739.285 | 432.055.120 | (149.684.165) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 27 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 663.329.100 | 663.329.100 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 27 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 535.329.800 | 535.329.800 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 27 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0 | 127.999.300 | 127.999.300 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 28 | | | | Pengadaan Perlengkapan Siswa | 0 | 580.713.380 | 580.713.380 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 28 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 385.078.380 | 385.078.380 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 28 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 385.078.380 | 385.078.380 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 28 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 195.635.000 | 195.635.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 28 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 195.635.000 | 195.635.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 32 | | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.782.034.925 | 2.068.390.575 | 286.355.650 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 32 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.782.034.925 | 2.068.390.575 | 286.355.650 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 32 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 0 | 371.280.000 | 371.280.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 32 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.782.034.925 | 1.697.110.575 | (84.924.350) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 40 | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 10.496.200 | 50.000.000 | 39.503.800 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 40 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 10.496.200 | 50.000.000 | 39.503.800 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 40 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.496.200 | 50.000.000 | 39.503.800 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 42 | | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 4.588.299.661 | 4.588.299.661 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 42 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.932.761.520 | 2.932.761.520 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 42 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.689.707.520 | 2.689.707.520 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 42 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 243.054.000 | 243.054.000 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 42 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 1.655.538.141 | 1.655.538.141 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 42 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.492.088.641 | 1.492.088.641 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 42 | 5 | 2 | 05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 163.449.500 | 163.449.500 | 0 | |
| **1** | **01** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **02** | **2.03** | **00** | | | | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | **3.071.938.062** | **5.073.408.790** | **2.001.470.728** | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 01 | | | | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 1.283.323.038 | 888.743.000 | (394.580.038) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 147.788.000 | 147.788.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 0 | 748.000 | 748.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 147.040.000 | 147.040.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 01 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 1.283.323.038 | 740.955.000 | (542.368.038) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 01 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.283.323.038 | 740.955.000 | (542.368.038) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 0 | 1.082.806.000 | 1.082.806.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 660.886.000 | 660.886.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 660.880.000 | 660.880.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 0 | 6.000 | 6.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 421.920.000 | 421.920.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 421.920.000 | 421.920.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 0 | 11.187.000 | 11.187.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 11.187.000 | 11.187.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 11.187.000 | 11.187.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 07 | | | | Pengadaan Mebel PAUD | 0 | 317.559.000 | 317.559.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 07 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 317.559.000 | 317.559.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 07 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 317.559.000 | 317.559.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 09 | | | | Pengadaan Perlengkapan PAUD | 100.015.334 | 109.999.600 | 9.984.266 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 100.015.334 | 10.059.600 | (89.955.734) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.015.334 | 10.046.100 | (89.969.234) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 09 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 0 | 13.500 | 13.500 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 09 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 99.940.000 | 99.940.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 09 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 99.940.000 | 99.940.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 10 | | | | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | 0 | 782.592.000 | 782.592.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 10 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 782.592.000 | 782.592.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 10 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 782.592.000 | 782.592.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 12 | | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 0 | 191.922.500 | 191.922.500 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 12 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 191.922.500 | 191.922.500 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 12 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 191.922.500 | 191.922.500 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 13 | | | | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 1.658.599.650 | 1.658.599.650 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 13 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.658.599.650 | 1.658.599.650 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 13 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.999.650 | 49.999.650 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 13 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 1.608.600.000 | 1.608.600.000 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 16 | | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 30.000.040 | 30.000.040 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 16 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 30.000.040 | 30.000.040 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 16 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.040 | 30.000.040 | 0 | |
| **1** | **01** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **02** | **2.04** | **00** | | | | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **266.400.000** | **266.400.000** | **0** | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 12 | | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 266.400.000 | 266.400.000 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 12 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 266.400.000 | 266.400.000 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 12 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 266.400.000 | 266.400.000 | 0 | |
| **1** | **01** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **149.175.258.510** | **144.008.309.328** | **(5.166.949.182)** | |
| **1** | **01** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **215.584.600** | **120.072.100** | **(95.512.500)** | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 215.584.600 | 120.072.100 | (95.512.500) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 215.584.600 | 120.072.100 | (95.512.500) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 215.584.600 | 120.072.100 | (95.512.500) | |
| **1** | **01** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **99.091.611.704** | **97.735.043.653** | **(1.356.568.051)** | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 99.091.611.704 | 97.735.043.653 | (1.356.568.051) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 99.091.611.704 | 97.735.043.653 | (1.356.568.051) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 99.091.611.704 | 97.735.043.653 | (1.356.568.051) | |
| **1** | **01** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **01** | **2.05** | **00** | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **156.254.700** | **703.783.700** | **547.529.000** | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 547.529.000 | 547.529.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 547.529.000 | 547.529.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 547.529.000 | 547.529.000 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 156.254.700 | 156.254.700 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 156.254.700 | 156.254.700 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 156.254.700 | 156.254.700 | 0 | |
| **1** | **01** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.693.481.770** | **1.405.335.815** | **(288.145.955)** | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 36.449.600 | 28.642.038 | (7.807.562) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 36.449.600 | 28.642.038 | (7.807.562) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.449.600 | 28.642.038 | (7.807.562) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 226.761.290 | 215.758.222 | (11.003.068) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 226.761.290 | 215.758.222 | (11.003.068) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 2.280.000 | 2.280.000 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 224.481.290 | 213.478.222 | (11.003.068) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 31.125.270 | 26.923.024 | (4.202.246) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 31.125.270 | 26.923.024 | (4.202.246) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.125.270 | 26.923.024 | (4.202.246) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 356.807.110 | 221.794.831 | (135.012.279) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 356.807.110 | 221.794.831 | (135.012.279) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 356.807.110 | 221.794.831 | (135.012.279) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 78.512.500 | 58.510.700 | (20.001.800) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 78.512.500 | 58.510.700 | (20.001.800) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 78.512.500 | 58.510.700 | (20.001.800) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 963.826.000 | 853.707.000 | (110.119.000) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 963.826.000 | 853.707.000 | (110.119.000) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 963.826.000 | 853.707.000 | (110.119.000) | |
| **1** | **01** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **47.671.484.736** | **43.864.207.720** | **(3.807.277.016)** | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 161.263.400 | 171.028.100 | 9.764.700 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 161.263.400 | 171.028.100 | 9.764.700 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 161.263.400 | 171.028.100 | 9.764.700 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 65.450.000 | 27.225.100 | (38.224.900) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 65.450.000 | 27.225.100 | (38.224.900) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 65.450.000 | 27.225.100 | (38.224.900) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 47.404.771.336 | 43.625.954.520 | (3.778.816.816) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 47.404.771.336 | 43.625.954.520 | (3.778.816.816) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 2.106.300.000 | 1.265.220.000 | (841.080.000) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.298.471.336 | 42.360.734.520 | (2.937.736.816) | |
| **1** | **01** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **346.841.000** | **179.866.340** | **(166.974.660)** | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.750.000 | 11.160.000 | (24.590.000) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 35.750.000 | 11.160.000 | (24.590.000) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.750.000 | 11.160.000 | (24.590.000) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 257.873.000 | 102.487.000 | (155.386.000) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 257.873.000 | 102.487.000 | (155.386.000) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 257.873.000 | 102.487.000 | (155.386.000) | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 10 | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 53.218.000 | 66.219.340 | 13.001.340 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 10 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 53.218.000 | 66.219.340 | 13.001.340 | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 10 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.218.000 | 66.219.340 | 13.001.340 | |
| **2** | **19** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **1.519.940.934** | **2.365.676.929** | **845.735.995** | |
| **2** | **19** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **819.845.973** | **691.980.048** | **(127.865.925)** | |
| **2** | **19** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | **819.845.973** | **691.980.048** | **(127.865.925)** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | 18.746.811 | 18.746.811 | 0 | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 18.746.811 | 18.746.811 | 0 | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.746.811 | 18.746.811 | 0 | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | | | | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | 801.099.162 | 673.233.237 | (127.865.925) | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 801.099.162 | 673.233.237 | (127.865.925) | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 801.099.162 | 673.233.237 | (127.865.925) | |
| **2** | **19** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **499.999.900** | **1.473.652.720** | **973.652.820** | |
| **2** | **19** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **03** | **2.02** | **00** | | | | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **200.000.000** | **295.400.000** | **95.400.000** | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | | | | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | 150.000.000 | 45.400.000 | (104.600.000) | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 150.000.000 | 45.400.000 | (104.600.000) | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | 45.400.000 | (104.600.000) | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | | | | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 50.000.000 | 250.000.000 | 200.000.000 | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 50.000.000 | 250.000.000 | 200.000.000 | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 250.000.000 | 200.000.000 | |
| **2** | **19** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **03** | **2.03** | **00** | | | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | **99.999.900** | **299.999.900** | **200.000.000** | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | | | | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | 99.999.900 | 299.999.900 | 200.000.000 | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 99.999.900 | 299.999.900 | 200.000.000 | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.999.900 | 299.999.900 | 200.000.000 | |
| **2** | **19** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **03** | **2.04** | **00** | | | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | **200.000.000** | **200.000.000** | **0** | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.04 | 02 | | | | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.04 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.04 | 02 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | |
| **2** | **19** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **03** | **2.05** | **00** | | | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | **0** | **678.252.820** | **678.252.820** | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.05 | 03 | | | | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | 0 | 678.252.820 | 678.252.820 | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.05 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 555.722.820 | 555.722.820 | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.05 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 313.159.020 | 313.159.020 | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.05 | 03 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 0 | 242.563.800 | 242.563.800 | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.05 | 03 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 122.530.000 | 122.530.000 | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.05 | 03 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 122.530.000 | 122.530.000 | |
| **2** | **19** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **04** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **200.095.061** | **200.044.161** | **(50.900)** | |
| **2** | **19** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **04** | **2.01** | **00** | | | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | **200.095.061** | **200.044.161** | **(50.900)** | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 02 | | | | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 200.095.061 | 200.044.161 | (50.900) | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 200.095.061 | 200.044.161 | (50.900) | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.095.061 | 50.044.161 | (50.900) | |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **193.819.398.865** | **197.049.337.719** | **3.229.938.854** | |
| | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(193.819.398.865)** | **(197.049.337.719)** | **(3.229.938.854)** | |
| **0** | **00** | **1.01.2.19.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | 0 | 0 | 0 | |
| | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | 0 | 0 | 0 | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **153.319.109.590** | **164.348.470.045** | **11.029.360.455** | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **56.315.869.371** | **70.433.190.286** | **14.117.320.915** | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **27.046.530.894** | **35.495.835.667** | **8.449.304.773** | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 12 | | | | | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 0 | 3.242.263.178 | 3.242.263.178 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 12 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 197.544.578 | 197.544.578 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 12 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 197.544.578 | 197.544.578 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 12 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 0 | 3.044.718.600 | 3.044.718.600 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 12 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 3.044.718.600 | 3.044.718.600 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 13 | | | | | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 6.461.096.400 | 8.199.224.224 | 1.738.127.824 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 516.984.400 | 1.606.282.224 | 1.089.297.824 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 3.400.000 | 0 | (3.400.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 513.584.400 | 1.606.282.224 | 1.092.697.824 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 13 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 5.944.112.000 | 6.592.942.000 | 648.830.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 13 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.429.112.000 | 5.429.112.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 13 | 5 | 2 | 03 | | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 515.000.000 | 1.163.830.000 | 648.830.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 14 | | | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 7.386.374.548 | 8.990.909.487 | 1.604.534.939 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 14 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 125.068.922 | 30.248.098 | (94.820.824) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 14 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 125.068.922 | 30.248.098 | (94.820.824) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 14 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 7.261.305.626 | 8.960.661.389 | 1.699.355.763 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 14 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.261.305.626 | 8.960.661.389 | 1.699.355.763 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 16 | | | | | Pengadaan Obat, Vaksin | 11.012.025.961 | 12.981.328.838 | 1.969.302.877 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 16 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 11.012.025.961 | 12.543.616.838 | 1.531.590.877 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 16 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 11.012.025.961 | 12.543.616.838 | 1.531.590.877 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 16 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 0 | 437.712.000 | 437.712.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 16 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 437.712.000 | 437.712.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 17 | | | | | Pengadaan Bahan Habis Pakai | 1.923.033.985 | 1.801.250.440 | (121.783.545) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 17 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.923.033.985 | 1.801.250.440 | (121.783.545) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 17 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.923.033.985 | 1.801.250.440 | (121.783.545) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 20 | | | | | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 264.000.000 | 280.859.500 | 16.859.500 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 20 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 264.000.000 | 280.859.500 | 16.859.500 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 20 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 264.000.000 | 280.859.500 | 16.859.500 | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **29.269.338.477** | **34.937.354.619** | **5.668.016.142** | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 628.797.200 | 639.933.000 | 11.135.800 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 628.797.200 | 639.933.000 | 11.135.800 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 628.797.200 | 639.933.000 | 11.135.800 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 147.540.000 | 138.540.000 | (9.000.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 147.540.000 | 138.540.000 | (9.000.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 147.540.000 | 138.540.000 | (9.000.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 165.375.161 | 87.445.001 | (77.930.160) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 165.375.161 | 87.445.001 | (77.930.160) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 165.375.161 | 87.445.001 | (77.930.160) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 475.080.000 | 644.073.945 | 168.993.945 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 475.080.000 | 644.073.945 | 168.993.945 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 475.080.000 | 644.073.945 | 168.993.945 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 05 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 250.560.800 | 164.280.000 | (86.280.800) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 250.560.800 | 164.280.000 | (86.280.800) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 250.560.800 | 164.280.000 | (86.280.800) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 06 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 173.474.950 | 190.510.000 | 17.035.050 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 173.474.950 | 190.510.000 | 17.035.050 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 173.474.950 | 190.510.000 | 17.035.050 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 07 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 221.375.000 | 284.535.000 | 63.160.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 221.375.000 | 284.535.000 | 63.160.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 221.375.000 | 284.535.000 | 63.160.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 08 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 19.200.000 | 0 | (19.200.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 19.200.000 | 0 | (19.200.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 19.200.000 | 0 | (19.200.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 10 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 35.018.000 | 35.018.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 10 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 35.018.000 | 35.018.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 10 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.018.000 | 35.018.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 11 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 186.910.800 | 94.240.000 | (92.670.800) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 11 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 186.910.800 | 94.240.000 | (92.670.800) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 11 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 186.910.800 | 94.240.000 | (92.670.800) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 12 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 17.100.000 | 17.100.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 12 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 17.100.000 | 17.100.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 12 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.100.000 | 17.100.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 13 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 104.700.000 | 108.900.000 | 4.200.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 13 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 104.700.000 | 108.900.000 | 4.200.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 13 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 104.700.000 | 108.900.000 | 4.200.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 15 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 405.852.000 | 604.682.000 | 198.830.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 15 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 405.852.000 | 604.682.000 | 198.830.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 15 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 0 | 480.000 | 480.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 15 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 405.852.000 | 604.202.000 | 198.350.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 16 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 189.840.000 | 170.550.001 | (19.289.999) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 16 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 189.840.000 | 170.550.001 | (19.289.999) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 16 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 189.840.000 | 170.550.001 | (19.289.999) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 17 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 279.541.500 | 296.051.000 | 16.509.500 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 17 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 279.541.500 | 296.051.000 | 16.509.500 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 17 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 279.541.500 | 296.051.000 | 16.509.500 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 18 | | | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 928.650.339 | 1.165.665.842 | 237.015.503 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 18 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 928.650.339 | 1.165.665.842 | 237.015.503 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 18 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 928.650.339 | 1.165.665.842 | 237.015.503 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 20 | | | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1.343.722.151 | 896.602.790 | (447.119.361) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 20 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.343.722.151 | 896.602.790 | (447.119.361) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 20 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.343.722.151 | 896.602.790 | (447.119.361) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 21 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 35.310.000 | 40.550.000 | 5.240.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 21 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 35.310.000 | 40.550.000 | 5.240.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 21 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.310.000 | 40.550.000 | 5.240.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 22 | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 29.440.000 | 29.440.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 22 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 29.440.000 | 29.440.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 22 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.440.000 | 29.440.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 25 | | | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 3.173.065.595 | 3.278.068.837 | 105.003.242 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 25 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 3.173.065.595 | 3.278.068.837 | 105.003.242 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 25 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.173.065.595 | 3.278.068.837 | 105.003.242 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 26 | | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 13.387.555.000 | 13.945.054.156 | 557.499.156 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 26 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 13.387.555.000 | 13.945.054.156 | 557.499.156 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 26 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 13.387.555.000 | 13.945.054.156 | 557.499.156 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 28 | | | | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 177.720.000 | 81.970.000 | (95.750.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 28 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 177.720.000 | 81.970.000 | (95.750.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 28 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 177.720.000 | 81.970.000 | (95.750.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 32 | | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 1.453.265.800 | 2.826.761.251 | 1.373.495.451 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 32 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.453.265.800 | 2.826.761.251 | 1.373.495.451 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 32 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 716.726.994 | 856.302.501 | 139.575.507 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 32 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 736.538.806 | 1.970.458.750 | 1.233.919.944 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 33 | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | 3.155.802.905 | 3.991.465.553 | 835.662.648 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 33 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.824.149.188 | 3.572.458.737 | 748.309.549 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 33 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 1.073.451.232 | 1.476.532.402 | 403.081.170 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 33 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.750.697.956 | 2.095.926.335 | 345.228.379 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 33 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 331.653.717 | 419.006.816 | 87.353.099 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 33 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 331.653.717 | 419.006.816 | 87.353.099 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 35 | | | | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 153.660.000 | 153.660.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 35 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 153.660.000 | 153.660.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 35 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 153.660.000 | 153.660.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 36 | | | | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 85.700.000 | 89.820.000 | 4.120.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 36 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 85.700.000 | 89.820.000 | 4.120.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 36 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.700.000 | 89.820.000 | 4.120.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 37 | | | | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 1.766.659.776 | 4.702.516.843 | 2.935.857.067 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 37 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.766.659.776 | 4.657.989.843 | 2.891.330.067 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 37 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.766.659.776 | 4.657.989.843 | 2.891.330.067 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 37 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 44.527.000 | 44.527.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 37 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 44.527.000 | 44.527.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 38 | | | | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu | 278.421.500 | 259.921.400 | (18.500.100) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | (SPGDT) | | | | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 38 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 278.421.500 | 9.921.400 | (268.500.100) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 38 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 150.000 | 0 | (150.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 38 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 278.271.500 | 9.921.400 | (268.350.100) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 38 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 38 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 34.564.500 | 34.564.500 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 38 | 5 | 2 | 05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0 | 215.435.500 | 215.435.500 | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **785.512.334** | **195.863.341** | **(589.648.993)** | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **03** | **2.02** | **00** | | | | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | **485.512.334** | **0** | **(485.512.334)** | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | | | | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | 485.512.334 | 0 | (485.512.334) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 485.512.334 | 0 | (485.512.334) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 485.512.334 | 0 | (485.512.334) | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **03** | **2.03** | **00** | | | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **300.000.000** | **195.863.341** | **(104.136.659)** | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 300.000.000 | 195.863.341 | (104.136.659) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 300.000.000 | 195.863.341 | (104.136.659) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 300.000.000 | 195.863.341 | (104.136.659) | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **718.727.242** | **571.664.067** | **(147.063.175)** | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **345.370.992** | **192.628.692** | **(152.742.300)** | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | 01 | | | | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 345.370.992 | 192.628.692 | (152.742.300) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 345.370.992 | 192.628.692 | (152.742.300) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 345.370.992 | 192.628.692 | (152.742.300) | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **05** | **2.02** | **00** | | | | **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **373.356.250** | **379.035.375** | **5.679.125** | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 05 | 2.02 | 01 | | | | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 373.356.250 | 379.035.375 | 5.679.125 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 05 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 373.356.250 | 379.035.375 | 5.679.125 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 05 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 373.356.250 | 379.035.375 | 5.679.125 | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **95.499.000.643** | **93.147.752.351** | **(2.351.248.292)** | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **737.608.000** | **935.608.000** | **198.000.000** | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 737.608.000 | 935.608.000 | 198.000.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 737.608.000 | 935.608.000 | 198.000.000 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 737.608.000 | 935.608.000 | 198.000.000 | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **57.555.139.941** | **57.242.646.599** | **(312.493.342)** | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 56.298.039.941 | 55.985.546.599 | (312.493.342) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 56.298.039.941 | 55.985.546.599 | (312.493.342) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 56.298.039.941 | 55.985.546.599 | (312.493.342) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.257.100.000 | 1.257.100.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.257.100.000 | 1.257.100.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 1.224.300.000 | 1.224.300.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.800.000 | 32.800.000 | 0 | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **01** | **2.03** | **00** | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **60.500.000** | **14.600.000** | **(45.900.000)** | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 04 | | | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 60.500.000 | 14.600.000 | (45.900.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 60.500.000 | 14.600.000 | (45.900.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.500.000 | 14.600.000 | (45.900.000) | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **01** | **2.05** | **00** | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **124.580.000** | **0** | **(124.580.000)** | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 01 | | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 124.580.000 | 0 | (124.580.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 830.000 | 0 | (830.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 830.000 | 0 | (830.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 01 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 123.750.000 | 0 | (123.750.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 01 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 123.750.000 | 0 | (123.750.000) | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **5.344.147.053** | **5.371.707.028** | **27.559.975** | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 144.444.760 | 333.146.798 | 188.702.038 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 142.244.760 | 333.146.798 | 190.902.038 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 142.244.760 | 333.146.798 | 190.902.038 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 2.200.000 | 0 | (2.200.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.200.000 | 0 | (2.200.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 536.349.133 | 557.711.811 | 21.362.678 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 45.500.597 | 40.425.570 | (5.075.027) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 1.810.000 | 0 | (1.810.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 43.690.597 | 40.425.570 | (3.265.027) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 490.848.536 | 517.286.241 | 26.437.705 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 490.848.536 | 517.286.241 | 26.437.705 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 374.707.500 | 389.040.189 | 14.332.689 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 369.708.000 | 384.040.689 | 14.332.689 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 369.708.000 | 384.040.689 | 14.332.689 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 4.999.500 | 4.999.500 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.999.500 | 4.999.500 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2.703.453.010 | 2.799.815.639 | 96.362.629 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.703.453.010 | 2.799.815.639 | 96.362.629 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.703.453.010 | 2.799.815.639 | 96.362.629 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 408.867.650 | 375.033.601 | (33.834.049) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 408.867.650 | 375.033.601 | (33.834.049) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 408.867.650 | 375.033.601 | (33.834.049) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.176.325.000 | 916.958.990 | (259.366.010) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.176.325.000 | 916.958.990 | (259.366.010) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.176.325.000 | 916.958.990 | (259.366.010) | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **30.237.641.669** | **28.283.126.382** | **(1.954.515.287)** | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 614.984.504 | 688.313.376 | 73.328.872 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 614.984.504 | 688.313.376 | 73.328.872 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 1.130.000 | 0 | (1.130.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 613.854.504 | 688.313.376 | 74.458.872 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.296.695.053 | 1.136.615.053 | (160.080.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.296.695.053 | 1.136.615.053 | (160.080.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.296.695.053 | 1.136.615.053 | (160.080.000) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 196.614.000 | 244.082.768 | 47.468.768 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 196.614.000 | 244.082.768 | 47.468.768 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 196.614.000 | 244.082.768 | 47.468.768 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 28.129.348.112 | 26.214.115.185 | (1.915.232.927) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 28.129.348.112 | 26.214.115.185 | (1.915.232.927) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.129.348.112 | 26.214.115.185 | (1.915.232.927) | |
| **1** | **02** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.439.383.980** | **1.300.064.342** | **(139.319.638)** | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 465.929.500 | 289.453.601 | (176.475.899) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 465.929.500 | 289.453.601 | (176.475.899) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 465.929.500 | 289.453.601 | (176.475.899) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 240.460.000 | 215.958.500 | (24.501.500) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 240.460.000 | 215.958.500 | (24.501.500) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 240.460.000 | 215.958.500 | (24.501.500) | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 07 | | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 10.490.000 | 10.490.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 10.490.000 | 10.490.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.490.000 | 10.490.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 722.504.480 | 784.162.241 | 61.657.761 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 722.504.480 | 784.162.241 | 61.657.761 | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 722.504.480 | 784.162.241 | 61.657.761 | |
| **2** | **14** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **2.198.190.328** | **1.879.682.564** | **(318.507.764)** | |
| **2** | **14** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **1.990.197.994** | **1.837.922.164** | **(152.275.830)** | |
| **2** | **14** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **452.815.000** | **452.815.000** | **0** | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | | | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | 452.815.000 | 452.815.000 | 0 | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 452.815.000 | 452.815.000 | 0 | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 452.815.000 | 452.815.000 | 0 | |
| **2** | **14** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **03** | **2.03** | **00** | | | | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | **919.062.994** | **766.787.164** | **(152.275.830)** | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | | | | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas | 297.372.500 | 297.372.500 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 297.372.500 | 297.372.500 | 0 | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 297.372.500 | 297.372.500 | 0 | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | | | | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 41.023.500 | 41.023.500 | 0 | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 41.023.500 | 41.023.500 | 0 | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.023.500 | 41.023.500 | 0 | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 06 | | | | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 297.667.044 | 266.741.244 | (30.925.800) | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 119.596.044 | 232.670.244 | 113.074.200 | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 6.400.000 | 0 | (6.400.000) | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 113.196.044 | 232.670.244 | 119.474.200 | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 06 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 178.071.000 | 34.071.000 | (144.000.000) | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 06 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 178.071.000 | 34.071.000 | (144.000.000) | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 10 | | | | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 282.999.950 | 161.649.920 | (121.350.030) | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 10 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 282.999.950 | 161.649.920 | (121.350.030) | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 10 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 282.999.950 | 161.649.920 | (121.350.030) | |
| **2** | **14** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **03** | **2.04** | **00** | | | | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | **618.320.000** | **618.320.000** | **0** | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.04 | 03 | | | | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | 463.070.000 | 463.070.000 | 0 | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.04 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 463.070.000 | 463.070.000 | 0 | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.04 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 463.070.000 | 463.070.000 | 0 | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.04 | 04 | | | | Pembinaan Terpadu Kampung KB | 155.250.000 | 155.250.000 | 0 | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.04 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 155.250.000 | 155.250.000 | 0 | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.04 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 155.250.000 | 155.250.000 | 0 | |
| **2** | **14** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **04** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **123.999.400** | **24.960.400** | **(99.039.000)** | |
| **2** | **14** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **04** | **2.02** | **00** | | | | **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **123.999.400** | **24.960.400** | **(99.039.000)** | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 04 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 123.999.400 | 24.960.400 | (99.039.000) | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 04 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 123.999.400 | 24.960.400 | (99.039.000) | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 04 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 123.999.400 | 24.960.400 | (99.039.000) | |
| **2** | **14** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **83.992.934** | **16.800.000** | **(67.192.934)** | |
| **2** | **14** | **1.02.2.14.0.00.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **83.992.934** | **16.800.000** | **(67.192.934)** | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 83.992.934 | 16.800.000 | (67.192.934) | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 83.992.934 | 16.800.000 | (67.192.934) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 14 1.02.2.14.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | 83.992.934 | 16.800.000 | (67.192.934) | |
| **Jumlah Belanja** | | **155.517.299.918** | **166.228.152.609** | **10.710.852.691** | |
| **Total Surplus/(Defisit)** | | **(155.517.299.918)** | **(166.228.152.609)** | **(10.710.852.691)** | |
| **0 00 1.02.2.14.0.00.01.0000 00 0.00 00 6** | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | **BELANJA** | | | | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **119.325.133.761** | **100.353.056.061** | **(18.972.077.700)** | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **29.899.188.000** | **1.973.863.814** | **(27.925.324.186)** | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **29.899.188.000** | **1.757.408.814** | **(28.141.779.186)** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | 199.188.000 | 494.923.000 | 295.735.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 199.188.000 | 494.923.000 | 295.735.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 199.188.000 | 494.923.000 | 295.735.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | | | | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | 0 | 80.343.000 | 80.343.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 80.343.000 | 80.343.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 2 | 01 | Belanja Modal Tanah | 0 | 80.343.000 | 80.343.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | | | | Pembangunan Tanggul Sungai | 0 | 449.534.548 | 449.534.548 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 151.140.000 | 151.140.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 151.140.000 | 151.140.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 298.394.548 | 298.394.548 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0 | 298.394.548 | 298.394.548 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 10 | | | | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 0 | 732.608.266 | 732.608.266 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 10 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 414.095.000 | 414.095.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 10 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 414.095.000 | 414.095.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 10 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 318.513.266 | 318.513.266 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 10 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0 | 318.513.266 | 318.513.266 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 21 | | | | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | 29.700.000.000 | 0 | (29.700.000.000) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 21 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 29.700.000.000 | 0 | (29.700.000.000) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 21 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 29.700.000.000 | 0 | (29.700.000.000) | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **0** | **216.455.000** | **216.455.000** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.02 | 14 | | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 0 | 99.360.000 | 99.360.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.02 | 14 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 99.360.000 | 99.360.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.02 | 14 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 99.360.000 | 99.360.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.02 | 21 | | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 0 | 117.095.000 | 117.095.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.02 | 21 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 117.095.000 | 117.095.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.02 | 21 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 117.095.000 | 117.095.000 | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **24.741.137.331** | **6.969.266.380** | **(17.771.870.951)** | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **24.741.137.331** | **6.969.266.380** | **(17.771.870.951)** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 04 | | | | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 5.817.122.835 | 5.817.122.835 | 0 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 276.073.948 | 276.073.948 | 0 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 276.073.948 | 276.073.948 | 0 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 04 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 5.541.048.887 | 5.541.048.887 | 0 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 04 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.541.048.887 | 5.541.048.887 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 06 | | | | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 18.924.014.496 | 1.152.143.545 | (17.771.870.951) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 625.897.245 | 1.100.003.545 | 474.106.300 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 680.000 | 680.000 | 0 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 625.217.245 | 1.004.149.545 | 378.932.300 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 0 | 95.174.000 | 95.174.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 06 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 18.298.117.251 | 52.140.000 | (18.245.977.251) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 06 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 52.140.000 | 52.140.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 06 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 18.298.117.251 | 0 | (18.298.117.251) | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **04** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | **750.000.000** | **839.188.000** | **89.188.000** | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **04** | **2.01** | **00** | | | | **Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota** | **750.000.000** | **839.188.000** | **89.188.000** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 | 44.594.000 | 44.594.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 44.594.000 | 44.594.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 44.594.000 | 44.594.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 04 | 2.01 | 03 | | | | Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS | 750.000.000 | 794.594.000 | 44.594.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 04 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 750.000.000 | 794.594.000 | 44.594.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 04 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 44.594.000 | 44.594.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 04 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 750.000.000 | 750.000.000 | 0 | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **4.184.395.914** | **4.846.534.000** | **662.138.086** | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **4.184.395.914** | **4.846.534.000** | **662.138.086** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 05 | 2.01 | 12 | | | | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 4.184.395.914 | 4.846.534.000 | 662.138.086 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 05 | 2.01 | 12 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 4.184.395.914 | 4.846.534.000 | 662.138.086 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 05 | 2.01 | 12 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 584.395.914 | 286.534.000 | (297.861.914) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 05 | 2.01 | 12 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 3.600.000.000 | 4.560.000.000 | 960.000.000 | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **06** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **201.800.000** | **678.734.142** | **476.934.142** | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **06** | **2.01** | **00** | | | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **201.800.000** | **678.734.142** | **476.934.142** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 06 | 2.01 | 05 | | | | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 0 | 453.889.142 | 453.889.142 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 06 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 15.180.000 | 15.180.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 06 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 15.180.000 | 15.180.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 06 | 2.01 | 05 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 438.709.142 | 438.709.142 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 06 | 2.01 | 05 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0 | 438.709.142 | 438.709.142 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 06 | 2.01 | 12 | | | | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | 201.800.000 | 224.845.000 | 23.045.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 06 | 2.01 | 12 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.800.000 | 24.845.000 | 23.045.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 06 | 2.01 | 12 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000 | 24.845.000 | 23.045.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 06 | 2.01 | 12 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 06 | 2.01 | 12 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **07** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | **0** | **2.566.919.440** | **2.566.919.440** | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **07** | **2.01** | **00** | | | | **Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | **0** | **2.566.919.440** | **2.566.919.440** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 07 | 2.01 | 01 | | | | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 2.566.919.440 | 2.566.919.440 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 07 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 1.474.465.620 | 1.474.465.620 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 07 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 1.474.465.620 | 1.474.465.620 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 07 | 2.01 | 01 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 1.092.453.820 | 1.092.453.820 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 07 | 2.01 | 01 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0 | 1.092.453.820 | 1.092.453.820 | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **08** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **12.373.127.686** | **17.703.513.422** | **5.330.385.736** | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **08** | **2.01** | **00** | | | | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | **12.373.127.686** | **17.703.513.422** | **5.330.385.736** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 08 | 2.01 | 01 | | | | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 163.405.000 | 149.455.000 | (13.950.000) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 08 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 163.405.000 | 149.455.000 | (13.950.000) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 08 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 163.405.000 | 149.455.000 | (13.950.000) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 08 | 2.01 | 02 | | | | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 12.209.722.686 | 17.554.058.422 | 5.344.335.736 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 08 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 3.888.204.657 | 8.884.322.464 | 4.996.117.807 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 08 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 6.800.000 | 6.800.000 | 0 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 08 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.881.404.657 | 8.877.522.464 | 4.996.117.807 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 08 | 2.01 | 02 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 8.321.518.029 | 8.669.735.958 | 348.217.929 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 08 | 2.01 | 02 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 1.378.929 | 1.378.929 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 08 | 2.01 | 02 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 8.321.518.029 | 8.472.447.029 | 150.929.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 08 | 2.01 | 02 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0 | 195.910.000 | 195.910.000 | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **10** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **29.800.131.374** | **50.910.530.853** | **21.110.399.479** | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **10** | **2.01** | **00** | | | | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **29.800.131.374** | **50.910.530.853** | **21.110.399.479** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 05 | | | | Pembangunan Jalan | 1.699.993.000 | 37.467.596.282 | 35.767.603.282 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 199.993.000 | 4.140.118.280 | 3.940.125.280 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 199.993.000 | 4.140.118.280 | 3.940.125.280 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 05 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 1.500.000.000 | 33.327.478.002 | 31.827.478.002 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 05 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.500.000.000 | 33.327.478.002 | 31.827.478.002 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 08 | | | | Rekonstruksi Jalan | 8.650.138.374 | 8.084.548.175 | (565.590.199) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 603.824.560 | 603.824.560 | 0 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 603.824.560 | 603.824.560 | 0 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 08 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 8.046.313.814 | 7.480.723.615 | (565.590.199) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 08 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 8.046.313.814 | 7.480.723.615 | (565.590.199) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 09 | | | | Rehabilitasi Jalan | 350.000.000 | 798.376.000 | 448.376.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 250.000.000 | 698.376.000 | 448.376.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 09 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 2.040.000 | 2.040.000 | 0 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 247.960.000 | 696.336.000 | 448.376.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 09 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 09 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 12 | | | | Pembangunan Jembatan | 19.100.000.000 | 4.560.010.396 | (14.539.989.604) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 12 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.555.000.000 | 3.005.795.596 | 1.450.795.596 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 12 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 4.960.000 | 1.360.000 | (3.600.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 12 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.550.040.000 | 3.004.435.596 | 1.454.395.596 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 12 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 17.545.000.000 | 1.554.214.800 | (15.990.785.200) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 12 | 5 | 2 | 01 | Belanja Modal Tanah | 1.000.000.000 | 0 | (1.000.000.000) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 12 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 16.545.000.000 | 1.554.214.800 | (14.990.785.200) | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **11** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **129.744.000** | **9.744.000** | **(120.000.000)** | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **11** | **2.04** | **00** | | | | **Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi** | **129.744.000** | **9.744.000** | **(120.000.000)** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 11 | 2.04 | 02 | | | | Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 129.744.000 | 9.744.000 | (120.000.000) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 11 | 2.04 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 129.744.000 | 9.744.000 | (120.000.000) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 11 | 2.04 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 129.744.000 | 9.744.000 | (120.000.000) | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **12** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **499.096.000** | **139.096.000** | **(360.000.000)** | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **12** | **2.01** | **00** | | | | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | **206.960.000** | **11.960.000** | **(195.000.000)** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | 2.01 | 01 | | | | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 206.960.000 | 11.960.000 | (195.000.000) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 206.960.000 | 11.960.000 | (195.000.000) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 206.960.000 | 11.960.000 | (195.000.000) | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **12** | **2.02** | **00** | | | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **101.140.000** | **66.140.000** | **(35.000.000)** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | 2.02 | 01 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | 101.140.000 | 66.140.000 | (35.000.000) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 101.140.000 | 66.140.000 | (35.000.000) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 101.140.000 | 66.140.000 | (35.000.000) | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **12** | **2.03** | **00** | | | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **190.996.000** | **60.996.000** | **(130.000.000)** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | 2.03 | 01 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 190.996.000 | 60.996.000 | (130.000.000) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 190.996.000 | 60.990.000 | (130.006.000) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 190.996.000 | 60.990.000 | (130.006.000) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | 2.03 | 01 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 6.000 | 6.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | 2.03 | 01 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 6.000 | 6.000 | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **16.746.513.456** | **13.715.666.010** | **(3.030.847.446)** | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **45.000.000** | **45.000.000** | **0** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **9.614.512.811** | **7.123.370.190** | **(2.491.142.621)** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.544.652.811 | 6.053.510.190 | (2.491.142.621) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 8.544.652.811 | 6.053.510.190 | (2.491.142.621) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 8.544.652.811 | 6.053.510.190 | (2.491.142.621) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.069.860.000 | 1.069.860.000 | 0 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.069.860.000 | 1.069.860.000 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 1.069.860.000 | 1.069.860.000 | 0 | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **01** | **2.05** | **00** | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **0** | **338.824.750** | **338.824.750** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 338.824.750 | 338.824.750 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 338.824.750 | 338.824.750 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 338.824.750 | 338.824.750 | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **3.441.232.951** | **3.357.410.529** | **(83.822.422)** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.062.201.951 | 1.928.519.529 | (133.682.422) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.035.605.151 | 1.411.635.129 | 376.029.978 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.035.605.151 | 1.408.235.129 | 372.629.978 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 1.026.596.800 | 516.884.400 | (509.712.400) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.026.596.800 | 516.884.400 | (509.712.400) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.379.031.000 | 1.428.891.000 | 49.860.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.379.031.000 | 1.428.891.000 | 49.860.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.379.031.000 | 1.428.891.000 | 49.860.000 | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.645.767.694** | **2.752.233.541** | **(893.534.153)** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100.000.000 | 1 | (99.999.999) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 100.000.000 | 0 | (100.000.000) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.000.000 | 0 | (100.000.000) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.545.767.694 | 2.752.233.540 | (793.534.154) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 3.545.767.694 | 2.752.233.540 | (793.534.154) | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.545.767.694 | 2.752.233.540 | (793.534.154) | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **0** | **98.827.000** | **98.827.000** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | 98.827.000 | 98.827.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 98.827.000 | 98.827.000 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 98.827.000 | 98.827.000 | |
| **1** | **04** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **419.890.796** | **3.622.285.575** | **3.202.394.779** | |
| **1** | **04** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | |
| **1** | **04** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **02** | **2.03** | **00** | | | | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.03 | 05 | | | | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.03 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.03 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.03 | 05 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.03 | 05 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | |
| **1** | **04** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **419.890.796** | **3.522.285.575** | **3.102.394.779** | |
| **1** | **04** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | **Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman** | **0** | **2.199.999.739** | **2.199.999.739** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | 0 | 2.199.999.739 | 2.199.999.739 | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 2.199.999.739 | 2.199.999.739 | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0 | 2.199.999.739 | 2.199.999.739 | |
| **1** | **04** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **03** | **2.02** | **00** | | | | **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** | **419.890.796** | **1.322.285.836** | **902.395.040** | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | | | | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 0 | 149.508.900 | 149.508.900 | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 59.508.900 | 59.508.900 | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 59.508.900 | 59.508.900 | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | | | | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | 419.890.796 | 1.172.776.936 | 752.886.140 | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 221.688.000 | 468.376.900 | 246.688.900 | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 0 | 5.440.000 | 5.440.000 | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 221.688.000 | 462.936.900 | 241.248.900 | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 198.202.796 | 704.400.036 | 506.197.240 | |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 198.202.796 | 704.400.036 | 506.197.240 | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **386.034.088** | **386.034.088** | **0** | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **386.034.088** | **386.034.088** | **0** | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **386.034.088** | **386.034.088** | **0** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.09 | 10 | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 386.034.088 | 386.034.088 | 0 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.09 | 10 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 386.034.088 | 386.034.088 | 0 | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.09 | 10 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 386.034.088 | 386.034.088 | 0 | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **120.131.058.645** | **104.361.375.724** | **(15.769.682.921)** | |
| | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(120.131.058.645)** | **(104.361.375.724)** | **15.769.682.921** | |
| **0** | **00** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| **1** | **03** | **1.03.1.04.2.10.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | **1** | | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **29.692.910.204** | **48.091.005.786** | **18.398.095.582** | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 00 | 0.00 | 00 | 6 | 1 | 01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 29.692.910.204 | 48.091.005.786 | 18.398.095.582 | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **29.692.910.204** | **48.091.005.786** | **18.398.095.582** | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| 0 | 00 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 00 | 0.00 | 00 | 5 | | | | **BELANJA** | | | | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 00 | 0.00 | 00 | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **0** | **27.044.000** | **27.044.000** | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 0.00 | 00 | | | | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **0** | **27.044.000** | **27.044.000** | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.04 | 00 | | | | | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | **0** | **27.044.000** | **27.044.000** | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.04 | 02 | | | | | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | 0 | 27.044.000 | 27.044.000 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.04 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 27.044.000 | 27.044.000 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.04 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 27.044.000 | 27.044.000 | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **0** | **27.044.000** | **27.044.000** | |
| | | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **0** | **(27.044.000)** | **(27.044.000)** | |
| 0 | 00 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 00 | 0.00 | 00 | 6 | | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **1.05.0.00.0.00.04.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **1** | **05** | **1.05.0.00.0.00.04.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **9.380.910.928** | **11.053.645.973** | **1.672.735.045** | |
| **1** | **05** | **1.05.0.00.0.00.04.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **971.000.000** | **894.849.775** | **(76.150.225)** | |
| **1** | **05** | **1.05.0.00.0.00.04.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | **625.665.000** | **419.789.020** | **(205.875.980)** | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | | | | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | 625.665.000 | 419.789.020 | (205.875.980) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 625.665.000 | 419.789.020 | (205.875.980) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 625.665.000 | 419.789.020 | (205.875.980) | |
| **1** | **05** | **1.05.0.00.0.00.04.0000** | **03** | **2.02** | **00** | | | | | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **244.335.000** | **447.705.755** | **203.370.755** | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.02 | 06 | | | | | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 74.335.000 | 97.284.500 | 22.949.500 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.02 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 74.335.000 | 97.284.500 | 22.949.500 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.02 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 74.335.000 | 97.284.500 | 22.949.500 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.02 | 07 | | | | | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 170.000.000 | 350.421.255 | 180.421.255 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.02 | 07 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 170.000.000 | 350.421.255 | 180.421.255 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.02 | 07 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 135.026.000 | 210.687.755 | 75.661.755 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.02 | 07 | 5 | 1 | 06 | | Belanja Bantuan Sosial | 34.974.000 | 139.733.500 | 104.759.500 | |
| **1** | **05** | **1.05.0.00.0.00.04.0000** | **03** | **2.03** | **00** | | | | | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **101.000.000** | **27.355.000** | **(73.645.000)** | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.03 | 04 | | | | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 101.000.000 | 27.355.000 | (73.645.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.03 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 101.000.000 | 27.355.000 | (73.645.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.03 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 101.000.000 | 27.355.000 | (73.645.000) | |
| **1** | **05** | **1.05.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **8.409.910.928** | **10.158.796.198** | **1.748.885.270** | |
| **1** | **05** | **1.05.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.222.561.050** | **4.670.631.543** | **448.070.493** | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.059.145.050 | 4.507.215.543 | 448.070.493 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 4.059.145.050 | 4.507.215.543 | 448.070.493 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 4.059.145.050 | 4.507.215.543 | 448.070.493 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 163.416.000 | 163.416.000 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 163.416.000 | 163.416.000 | 0 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 157.680.000 | 157.680.000 | 0 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.736.000 | 5.736.000 | 0 | |
| **1** | **05** | **1.05.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.013.235.200** | **980.982.057** | **(32.253.143)** | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.581.000 | 5.581.000 | 0 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 5.581.000 | 5.581.000 | 0 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.581.000 | 5.581.000 | 0 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 129.807.500 | 309.155.500 | 179.348.000 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 129.807.500 | 284.163.500 | 154.356.000 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 129.807.500 | 284.163.500 | 154.356.000 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 24.992.000 | 24.992.000 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 24.992.000 | 24.992.000 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.019.000 | 0 | (6.019.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 6.019.000 | 0 | (6.019.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.019.000 | 0 | (6.019.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 159.615.700 | 137.975.086 | (21.640.614) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 159.615.700 | 137.975.086 | (21.640.614) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 159.615.700 | 137.975.086 | (21.640.614) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.750.000 | 9.800.000 | (25.950.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 35.750.000 | 9.800.000 | (25.950.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.750.000 | 9.800.000 | (25.950.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 676.462.000 | 518.470.471 | (157.991.529) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 676.462.000 | 518.470.471 | (157.991.529) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 676.462.000 | 518.470.471 | (157.991.529) | |
| **1** | **05** | **1.05.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **383.345.000** | **381.343.000** | **(2.002.000)** | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 11 | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 383.345.000 | 381.343.000 | (2.002.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 11 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 383.345.000 | 381.343.000 | (2.002.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 11 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 2.720.000 | 2.720.000 | 0 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 11 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 380.625.000 | 378.623.000 | (2.002.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **05** | **1.05.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.627.449.648** | **4.023.755.808** | **1.396.306.160** | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 80.832.000 | 77.232.000 | (3.600.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 80.832.000 | 77.232.000 | (3.600.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 80.832.000 | 77.232.000 | (3.600.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.546.617.648 | 3.946.523.808 | 1.399.906.160 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.546.617.648 | 3.946.523.808 | 1.399.906.160 | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.546.617.648 | 3.946.523.808 | 1.399.906.160 | |
| **1** | **05** | **1.05.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **163.320.030** | **102.083.790** | **(61.236.240)** | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.09 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 163.320.030 | 102.083.790 | (61.236.240) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 163.320.030 | 102.083.790 | (61.236.240) | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 163.320.030 | 102.083.790 | (61.236.240) | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **9.380.910.928** | **11.053.645.973** | **1.672.735.045** | |
| | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(9.380.910.928)** | **(11.053.645.973)** | **(1.672.735.045)** | |
| **0** | **00** | **1.05.0.00.0.00.04.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **1.05.8.01.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | **BELANJA** | | | | |
| **1** | **05** | **1.05.8.01.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **16.028.837.088** | **15.699.524.860** | **(329.312.228)** | |
| **1** | **05** | **1.05.8.01.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **1.000.633.000** | **402.471.490** | **(598.161.510)** | |
| **1** | **05** | **1.05.8.01.0.00.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **583.163.000** | **226.097.240** | **(357.065.760)** | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 352.800.000 | 162.045.500 | (190.754.500) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 352.800.000 | 162.045.500 | (190.754.500) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 352.800.000 | 162.045.500 | (190.754.500) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 223.865.000 | 63.751.740 | (160.113.260) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 223.865.000 | 63.751.740 | (160.113.260) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 223.865.000 | 63.751.740 | (160.113.260) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | | | | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 6.498.000 | 300.000 | (6.198.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 6.498.000 | 300.000 | (6.198.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.498.000 | 300.000 | (6.198.000) | |
| **1** | **05** | **1.05.8.01.0.00.01.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **242.996.000** | **76.374.250** | **(166.621.750)** | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | | | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 72.091.000 | 51.671.500 | (20.419.500) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 72.091.000 | 51.671.500 | (20.419.500) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.091.000 | 51.671.500 | (20.419.500) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | | | | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 153.575.000 | 24.502.750 | (129.072.250) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 153.575.000 | 24.502.750 | (129.072.250) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 153.575.000 | 24.502.750 | (129.072.250) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | | | | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 17.330.000 | 200.000 | (17.130.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 17.330.000 | 200.000 | (17.130.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.330.000 | 200.000 | (17.130.000) | |
| **1** | **05** | **1.05.8.01.0.00.01.0000** | **02** | **2.03** | **00** | | | | **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota** | **174.474.000** | **100.000.000** | **(74.474.000)** | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 01 | | | | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 174.474.000 | 100.000.000 | (74.474.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 174.474.000 | 100.000.000 | (74.474.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 174.474.000 | 100.000.000 | (74.474.000) | |
| **1** | **05** | **1.05.8.01.0.00.01.0000** | **04** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **102.193.000** | **72.307.310** | **(29.885.690)** | |
| **1** | **05** | **1.05.8.01.0.00.01.0000** | **04** | **2.01** | **00** | | | | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **102.193.000** | **72.307.310** | **(29.885.690)** | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 07 | | | | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | 102.193.000 | 72.307.310 | (29.885.690) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 102.193.000 | 72.307.310 | (29.885.690) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 102.193.000 | 72.307.310 | (29.885.690) | |
| **1** | **05** | **1.05.8.01.0.00.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **14.926.011.088** | **15.224.746.060** | **298.734.972** | |
| **1** | **05** | **1.05.8.01.0.00.01.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **62.916.830** | **61.838.059** | **(1.078.771)** | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.264.830 | 7.228.569 | (36.261) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 7.264.830 | 7.228.569 | (36.261) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.264.830 | 7.228.569 | (36.261) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 55.652.000 | 54.609.490 | (1.042.510) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 55.652.000 | 54.609.490 | (1.042.510) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.652.000 | 54.609.490 | (1.042.510) | |
| **1** | **05** | **1.05.8.01.0.00.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.752.894.560** | **5.704.247.831** | **(48.646.729)** | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.592.585.060 | 5.543.963.501 | (48.621.559) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 5.592.585.060 | 5.543.963.501 | (48.621.559) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 5.592.585.060 | 5.543.963.501 | (48.621.559) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 156.000.000 | 156.000.000 | 0 | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 156.000.000 | 156.000.000 | 0 | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 156.000.000 | 156.000.000 | 0 | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.309.500 | 4.284.330 | (25.170) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 4.309.500 | 4.284.330 | (25.170) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.309.500 | 4.284.330 | (25.170) | |
| **1** | **05** | **1.05.8.01.0.00.01.0000** | **01** | **2.03** | **00** | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **36.000.000** | **36.000.000** | **0** | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | |
| **1** | **05** | **1.05.8.01.0.00.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **680.777.000** | **729.983.578** | **49.206.578** | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.762.000 | 8.750.830 | (11.170) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 8.762.000 | 8.750.830 | (11.170) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.762.000 | 8.750.830 | (11.170) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 81.378.000 | 81.378.000 | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 81.378.000 | 81.378.000 | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 81.378.000 | 81.378.000 | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18.500.000 | 16.861.651 | (1.638.349) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 18.500.000 | 16.861.651 | (1.638.349) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.500.000 | 16.861.651 | (1.638.349) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 105.405.000 | 95.442.992 | (9.962.008) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 105.405.000 | 95.442.992 | (9.962.008) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 105.405.000 | 95.442.992 | (9.962.008) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17.500.000 | 14.124.105 | (3.375.895) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 17.500.000 | 14.124.105 | (3.375.895) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.500.000 | 14.124.105 | (3.375.895) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 530.610.000 | 513.426.000 | (17.184.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 530.610.000 | 513.426.000 | (17.184.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 530.610.000 | 513.426.000 | (17.184.000) | |
| **1** | **05** | **1.05.8.01.0.00.01.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **330.000.000** | **558.431.500** | **228.431.500** | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 05 | | | | Pengadaan Mebel | 0 | 228.651.500 | 228.651.500 | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 05 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 228.651.500 | 228.651.500 | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 05 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 228.651.500 | 228.651.500 | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 330.000.000 | 329.780.000 | (220.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 330.000.000 | 329.780.000 | (220.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 330.000.000 | 329.780.000 | (220.000) | |
| **1** | **05** | **1.05.8.01.0.00.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **7.895.657.328** | **7.993.309.122** | **97.651.794** | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 95.097.200 | 75.710.644 | (19.386.556) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 95.097.200 | 75.710.644 | (19.386.556) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 95.097.200 | 75.710.644 | (19.386.556) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 75.825.600 | 75.825.600 | 0 | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 75.825.600 | 75.825.600 | 0 | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.825.600 | 75.825.600 | 0 | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 7.724.734.528 | 7.841.772.878 | 117.038.350 | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 7.724.734.528 | 7.841.772.878 | 117.038.350 | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.724.734.528 | 7.841.772.878 | 117.038.350 | |
| **1** | **05** | **1.05.8.01.0.00.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **167.765.370** | **140.935.970** | **(26.829.400)** | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 143.815.370 | 131.699.970 | (12.115.400) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 143.815.370 | 131.699.970 | (12.115.400) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 143.815.370 | 131.699.970 | (12.115.400) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 23.950.000 | 9.236.000 | (14.714.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 23.950.000 | 9.236.000 | (14.714.000) | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 23.950.000 | 9.236.000 | (14.714.000) | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **16.028.837.088** | **15.699.524.860** | **(329.312.228)** | |
| | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(16.028.837.088)** | **(15.699.524.860)** | **329.312.228** | |
| **0** | **00** | **1.05.8.01.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.8.01.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.8.01.0.00.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | **BELANJA** | | | | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **6.036.341.593** | **5.128.860.832** | **(907.480.761)** | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **73.941.400** | **55.941.400** | **(18.000.000)** | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **73.941.400** | **55.941.400** | **(18.000.000)** | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 02 | 2.01 | 04 | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 73.941.400 | 55.941.400 | (18.000.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 73.941.400 | 55.941.400 | (18.000.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 73.941.400 | 55.941.400 | (18.000.000) | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **553.798.718** | **545.798.718** | **(8.000.000)** | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | **553.798.718** | **545.798.718** | **(8.000.000)** | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | | | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | 518.048.718 | 518.048.718 | 0 | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 518.048.718 | 518.048.718 | 0 | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 120.921.000 | 120.921.000 | 0 | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 397.127.718 | 397.127.718 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.8.01.0.00.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 03 | 2.01 | 05 | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 35.750.000 | 27.750.000 | (8.000.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 03 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 35.750.000 | 27.750.000 | (8.000.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 03 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.750.000 | 27.750.000 | (8.000.000) | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **04** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **60.289.600** | **57.272.600** | **(3.017.000)** | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **04** | **2.01** | **00** | | | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **60.289.600** | **57.272.600** | **(3.017.000)** | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 04 | 2.01 | 05 | | | | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 60.289.600 | 57.272.600 | (3.017.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 04 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 60.289.600 | 57.272.600 | (3.017.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 04 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.289.600 | 57.272.600 | (3.017.000) | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **289.069.500** | **254.725.400** | **(34.344.100)** | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **289.069.500** | **254.725.400** | **(34.344.100)** | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 42.344.100 | 0 | (42.344.100) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 42.344.100 | 0 | (42.344.100) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.8.01.0.00.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 42.344.100 | 0 | (42.344.100) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | 04 | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 246.725.400 | 254.725.400 | 8.000.000 | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 246.725.400 | 254.725.400 | 8.000.000 | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 76.725.400 | 84.725.400 | 8.000.000 | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 170.000.000 | 170.000.000 | 0 | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **06** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **465.389.800** | **322.145.800** | **(143.244.000)** | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **06** | **2.01** | **00** | | | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **465.389.800** | **322.145.800** | **(143.244.000)** | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 36.960.300 | 32.704.300 | (4.256.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 36.960.300 | 32.704.300 | (4.256.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.960.300 | 32.704.300 | (4.256.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 02 | | | | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 79.024.300 | 58.275.300 | (20.749.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 79.024.300 | 58.275.300 | (20.749.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 79.024.300 | 58.275.300 | (20.749.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.8.01.0.00.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 03 | | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 85.847.000 | 0 | (85.847.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 85.847.000 | 0 | (85.847.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.847.000 | 0 | (85.847.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 04 | | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 71.492.900 | 56.403.900 | (15.089.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 71.492.900 | 56.403.900 | (15.089.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 71.492.900 | 56.403.900 | (15.089.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 05 | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 58.527.100 | 45.469.100 | (13.058.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 58.527.100 | 45.469.100 | (13.058.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.527.100 | 45.469.100 | (13.058.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 06 | | | | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 133.538.200 | 129.293.200 | (4.245.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 133.538.200 | 129.293.200 | (4.245.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 133.538.200 | 129.293.200 | (4.245.000) | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.593.852.575** | **3.892.976.914** | **(700.875.661)** | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8.967.900** | **5.485.000** | **(3.482.900)** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.8.01.0.00.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.981.000 | 1.870.000 | (111.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.981.000 | 1.870.000 | (111.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.981.000 | 1.870.000 | (111.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 785.000 | 675.000 | (110.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 785.000 | 675.000 | (110.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 785.000 | 675.000 | (110.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 03 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.650.000 | 800.000 | (850.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.650.000 | 800.000 | (850.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.650.000 | 800.000 | (850.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 04 | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.447.500 | 0 | (1.447.500) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.447.500 | 0 | (1.447.500) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.447.500 | 0 | (1.447.500) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 853.400 | 0 | (853.400) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 853.400 | 0 | (853.400) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 853.400 | 0 | (853.400) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 06 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.251.000 | 2.140.000 | (111.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.251.000 | 2.140.000 | (111.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.251.000 | 2.140.000 | (111.000) | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.426.115.921** | **2.866.661.700** | **(559.454.221)** | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.300.215.921 | 2.740.761.700 | (559.454.221) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 3.300.215.921 | 2.740.761.700 | (559.454.221) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 3.300.215.921 | 2.740.761.700 | (559.454.221) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 125.900.000 | 125.900.000 | 0 | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 125.900.000 | 125.900.000 | 0 | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 125.900.000 | 125.900.000 | 0 | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **317.326.200** | **249.959.200** | **(67.367.000)** | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 41.434.300 | 35.175.300 | (6.259.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.8.01.0.00.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 41.434.300 | 35.175.300 | (6.259.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 41.434.300 | 35.175.300 | (6.259.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.245.000 | 3.965.000 | (280.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 4.245.000 | 3.965.000 | (280.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 4.245.000 | 3.965.000 | (280.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 56.356.900 | 46.126.900 | (10.230.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 56.356.900 | 46.126.900 | (10.230.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 56.356.900 | 46.126.900 | (10.230.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.510.000 | 24.938.000 | (10.572.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 35.510.000 | 24.938.000 | (10.572.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 35.510.000 | 24.938.000 | (10.572.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 179.780.000 | 139.754.000 | (40.026.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 179.780.000 | 139.754.000 | (40.026.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 179.780.000 | 139.754.000 | (40.026.000) | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **195.876.650** | **195.413.000** | **(463.650)** | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 195.876.650 | 195.413.000 | (463.650) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 195.876.650 | 195.413.000 | (463.650) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 680.000 | 680.000 | 0 | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 195.196.650 | 194.733.000 | (463.650) | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **617.215.904** | **559.278.014** | **(57.937.890)** | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 16.200.000 | 13.200.000 | (3.000.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 16.200.000 | 13.200.000 | (3.000.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 16.200.000 | 13.200.000 | (3.000.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18.864.000 | 25.418.000 | 6.554.000 | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 18.864.000 | 25.418.000 | 6.554.000 | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 18.864.000 | 25.418.000 | 6.554.000 | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 03 | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26.240.000 | 26.240.000 | 0 | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 26.240.000 | 26.240.000 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.8.01.0.00.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 26.240.000 | 26.240.000 | 0 | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 555.911.904 | 494.420.014 | (61.491.890) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 555.911.904 | 494.420.014 | (61.491.890) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 555.911.904 | 494.420.014 | (61.491.890) | |
| **8** | **01** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **28.350.000** | **16.180.000** | **(12.170.000)** | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28.350.000 | 16.180.000 | (12.170.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 28.350.000 | 16.180.000 | (12.170.000) | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 28.350.000 | 16.180.000 | (12.170.000) | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **6.036.341.593** | **5.128.860.832** | **(907.480.761)** | |
| | | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(6.036.341.593)** | **(5.128.860.832)** | **907.480.761** | |
| **0** | **00** | **1.05.8.01.0.00.02.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.2.13.03 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **1** | **06** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **10.073.754.840** | **11.892.150.809** | **1.818.395.969** | |
| **1** | **06** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **81.984.000** | **56.175.000** | **(25.809.000)** | |
| **1** | **06** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **02** | **2.03** | **00** | | | | | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | **81.984.000** | **56.175.000** | **(25.809.000)** | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | 02 | | | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 41.043.000 | 22.193.000 | (18.850.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 37.543.000 | 22.193.000 | (15.350.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 37.543.000 | 22.193.000 | (15.350.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | 02 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 3.500.000 | 0 | (3.500.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | 02 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.500.000 | 0 | (3.500.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | 04 | | | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 40.941.000 | 33.982.000 | (6.959.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 40.941.000 | 33.982.000 | (6.959.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 40.941.000 | 33.982.000 | (6.959.000) | |
| **1** | **06** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **04** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **228.000.000** | **348.000.000** | **120.000.000** | |
| **1** | **06** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **04** | **2.01** | **00** | | | | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **228.000.000** | **348.000.000** | **120.000.000** | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 12 | | | | | Pemberian Layanan Rujukan | 228.000.000 | 348.000.000 | 120.000.000 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 12 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 228.000.000 | 348.000.000 | 120.000.000 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 12 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 228.000.000 | 348.000.000 | 120.000.000 | |
| **1** | **06** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **345.635.400** | **3.154.355.601** | **2.808.720.201** | |
| **1** | **06** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **05** | **2.02** | **00** | | | | | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **345.635.400** | **3.154.355.601** | **2.808.720.201** | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.02 | 01 | | | | | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 187.875.400 | 165.695.600 | (22.179.800) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 176.875.400 | 165.695.600 | (11.179.800) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 176.875.400 | 165.695.600 | (11.179.800) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.02 | 01 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 11.000.000 | 0 | (11.000.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.2.13.03 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.02 | 01 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 11.000.000 | 0 | (11.000.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.02 | 02 | | | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 157.760.000 | 127.340.000 | (30.420.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 157.760.000 | 127.340.000 | (30.420.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 157.760.000 | 127.340.000 | (30.420.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.02 | 03 | | | | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 0 | 2.861.320.001 | 2.861.320.001 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 2.861.320.001 | 2.861.320.001 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 189.364.001 | 189.364.001 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 06 | | Belanja Bantuan Sosial | 0 | 2.671.956.000 | 2.671.956.000 | |
| **1** | **06** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **06** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **97.900.000** | **97.900.000** | **0** | |
| **1** | **06** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **06** | **2.02** | **00** | | | | | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | **97.900.000** | **97.900.000** | **0** | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 06 | 2.02 | 02 | | | | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 97.900.000 | 97.900.000 | 0 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 06 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 97.900.000 | 97.900.000 | 0 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 06 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 97.900.000 | 97.900.000 | 0 | |
| **1** | **06** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **9.320.235.440** | **8.235.720.208** | **(1.084.515.232)** | |
| **1** | **06** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **125.152.800** | **94.082.800** | **(31.070.000)** | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 91.427.400 | 76.487.400 | (14.940.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 91.427.400 | 76.487.400 | (14.940.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 91.427.400 | 76.487.400 | (14.940.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.01 | 06 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 33.725.400 | 17.595.400 | (16.130.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 33.725.400 | 17.595.400 | (16.130.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 33.725.400 | 17.595.400 | (16.130.000) | |
| **1** | **06** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.617.859.024** | **5.523.461.881** | **(1.094.397.143)** | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.458.315.824 | 5.370.678.681 | (1.087.637.143) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 6.458.315.824 | 5.370.678.681 | (1.087.637.143) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 6.458.315.824 | 5.370.678.681 | (1.087.637.143) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.2.13.03 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 148.800.000 | 142.040.000 | (6.760.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 148.800.000 | 142.040.000 | (6.760.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 148.800.000 | 142.040.000 | (6.760.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.743.200 | 10.743.200 | 0 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 10.743.200 | 10.743.200 | 0 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.743.200 | 10.743.200 | 0 | |
| **1** | **06** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **01** | **2.03** | **00** | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **28.200.000** | **28.200.000** | **0** | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 28.200.000 | 28.200.000 | 0 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 28.200.000 | 28.200.000 | 0 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 28.200.000 | 28.200.000 | 0 | |
| **1** | **06** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **258.208.200** | **321.916.360** | **63.708.160** | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.530.000 | 2.970.000 | (1.560.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 4.530.000 | 2.970.000 | (1.560.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.530.000 | 2.970.000 | (1.560.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.770.200 | 6.583.360 | (186.840) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 6.770.200 | 6.583.360 | (186.840) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.770.200 | 6.583.360 | (186.840) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 21.400.000 | 16.855.000 | (4.545.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 21.400.000 | 16.855.000 | (4.545.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.400.000 | 16.855.000 | (4.545.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 199.508.000 | 269.508.000 | 70.000.000 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 199.508.000 | 269.508.000 | 70.000.000 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 199.508.000 | 269.508.000 | 70.000.000 | |
| **1** | **06** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **527.627.000** | **445.959.815** | **(81.667.185)** | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 527.627.000 | 445.959.815 | (81.667.185) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 527.627.000 | 445.959.815 | (81.667.185) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.2.13.03 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 527.627.000 | 445.959.815 | (81.667.185) | |
| **1** | **06** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.717.005.416** | **1.783.325.352** | **66.319.936** | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 64.553.400 | 60.553.400 | (4.000.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 64.553.400 | 60.553.400 | (4.000.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 64.553.400 | 60.553.400 | (4.000.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 42.090.000 | 76.320.000 | 34.230.000 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 42.090.000 | 76.320.000 | 34.230.000 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 42.090.000 | 76.320.000 | 34.230.000 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.610.362.016 | 1.646.451.952 | 36.089.936 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.610.362.016 | 1.646.451.952 | 36.089.936 | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.610.362.016 | 1.646.451.952 | 36.089.936 | |
| **1** | **06** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **46.183.000** | **38.774.000** | **(7.409.000)** | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 23.433.000 | 19.024.000 | (4.409.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 23.433.000 | 19.024.000 | (4.409.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 23.433.000 | 19.024.000 | (4.409.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 22.750.000 | 19.750.000 | (3.000.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 22.750.000 | 19.750.000 | (3.000.000) | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 22.750.000 | 19.750.000 | (3.000.000) | |
| **2** | **08** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **1.284.136.900** | **1.316.525.660** | **32.388.760** | |
| **2** | **08** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **491.971.400** | **493.208.390** | **1.236.990** | |
| **2** | **08** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | **91.978.500** | **93.215.490** | **1.236.990** | |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | 91.978.500 | 93.215.490 | 1.236.990 | |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 91.978.500 | 93.215.490 | 1.236.990 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.2.13.03 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 91.978.500 | 93.215.490 | 1.236.990 | |
| **2** | **08** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **02** | **2.03** | **00** | | | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **399.992.900** | **399.992.900** | **0** | |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | 03 | | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 399.992.900 | 399.992.900 | 0 | |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 396.492.900 | 396.492.900 | 0 | |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 396.492.900 | 396.492.900 | 0 | |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | 03 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | 03 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | |
| **2** | **08** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **06** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **792.165.500** | **823.317.270** | **31.151.770** | |
| **2** | **08** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **06** | **2.01** | **00** | | | | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | **792.165.500** | **823.317.270** | **31.151.770** | |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 06 | 2.01 | 01 | | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 738.029.500 | 778.307.390 | 40.277.890 | |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 06 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 738.029.500 | 778.307.390 | 40.277.890 | |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 06 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 119.029.500 | 179.307.390 | 60.277.890 | |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 06 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 619.000.000 | 599.000.000 | (20.000.000) | |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 06 | 2.01 | 02 | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 54.136.000 | 45.009.880 | (9.126.120) | |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 06 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 54.136.000 | 45.009.880 | (9.126.120) | |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 06 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.136.000 | 45.009.880 | (9.126.120) | |
| **2** | **13** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **1.921.106.184** | **1.455.037.038** | **(466.069.146)** | |
| **2** | **13** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **126.797.000** | **108.793.608** | **(18.003.392)** | |
| **2** | **13** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | **126.797.000** | **108.793.608** | **(18.003.392)** | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.01 | 06 | | | | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | 126.797.000 | 108.793.608 | (18.003.392) | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 126.797.000 | 108.793.608 | (18.003.392) | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 1.440.000 | 0 | (1.440.000) | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 125.357.000 | 108.793.608 | (16.563.392) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.2.13.03 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **13** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **04** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **1.381.894.184** | **1.066.380.180** | **(315.514.004)** | |
| **2** | **13** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **04** | **2.01** | **00** | | | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **1.381.894.184** | **1.066.380.180** | **(315.514.004)** | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 01 | | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 1.007.313.184 | 835.307.480 | (172.005.704) | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.007.313.184 | 835.307.480 | (172.005.704) | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.007.313.184 | 835.307.480 | (172.005.704) | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 04 | | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 161.746.200 | 140.910.300 | (20.835.900) | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 161.746.200 | 140.910.300 | (20.835.900) | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 161.746.200 | 140.910.300 | (20.835.900) | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 05 | | | | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 136.271.000 | 38.808.000 | (97.463.000) | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 136.271.000 | 38.808.000 | (97.463.000) | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 136.271.000 | 38.808.000 | (97.463.000) | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 08 | | | | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | 48.950.000 | 48.950.000 | 0 | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 48.950.000 | 48.950.000 | 0 | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.950.000 | 48.950.000 | 0 | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 13 | | | | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 27.613.800 | 2.404.400 | (25.209.400) | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 27.613.800 | 2.404.400 | (25.209.400) | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.613.800 | 2.404.400 | (25.209.400) | |
| **2** | **13** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **412.415.000** | **279.863.250** | **(132.551.750)** | |
| **2** | **13** | **1.06.2.08.2.13.03.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **412.415.000** | **279.863.250** | **(132.551.750)** | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.01 | 09 | | | | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan | 412.415.000 | 279.863.250 | (132.551.750) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.2.13.03 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Keluarga | | | | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.01 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 412.415.000 | 279.863.250 | (132.551.750) | |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.01 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 412.415.000 | 279.863.250 | (132.551.750) | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **13.278.997.924** | **14.663.713.507** | **1.384.715.583** | |
| | | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(13.278.997.924)** | **(14.663.713.507)** | **(1.384.715.583)** | |
| 0 | 00 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 00 | 0.00 | 00 | 6 | | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **2** | **12** | **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **7.221.894.578** | **6.992.852.281** | **(229.042.297)** | |
| **2** | **12** | **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **471.391.700** | **305.201.575** | **(166.190.125)** | |
| **2** | **12** | **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **471.391.700** | **305.201.575** | **(166.190.125)** | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | | | | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 92.204.100 | 14.837.000 | (77.367.100) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 92.204.100 | 14.837.000 | (77.367.100) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 92.204.100 | 14.837.000 | (77.367.100) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | | | | | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 197.850.000 | 184.195.675 | (13.654.325) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 197.850.000 | 184.195.675 | (13.654.325) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 680.000 | 0 | (680.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 197.170.000 | 184.195.675 | (12.974.325) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | | | | | Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 181.337.600 | 106.168.900 | (75.168.700) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 181.337.600 | 106.168.900 | (75.168.700) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 680.000 | 0 | (680.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 180.657.600 | 106.168.900 | (74.488.700) | |
| **2** | **12** | **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **231.313.800** | **116.678.342** | **(114.635.458)** | |
| **2** | **12** | **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **231.313.800** | **116.678.342** | **(114.635.458)** | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | | | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | 181.063.800 | 79.493.342 | (101.570.458) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 181.063.800 | 79.493.342 | (101.570.458) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 181.063.800 | 79.493.342 | (101.570.458) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 05 | | | | | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan | 50.250.000 | 37.185.000 | (13.065.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 50.250.000 | 37.185.000 | (13.065.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 50.250.000 | 37.185.000 | (13.065.000) | |
| **2** | **12** | **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **04** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **130.687.500** | **42.669.000** | **(88.018.500)** | |
| **2** | **12** | **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **04** | **2.03** | **00** | | | | | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **130.687.500** | **42.669.000** | **(88.018.500)** | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.03 | 04 | | | | | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 130.687.500 | 42.669.000 | (88.018.500) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.03 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 130.687.500 | 42.669.000 | (88.018.500) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.03 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 130.687.500 | 42.669.000 | (88.018.500) | |
| **2** | **12** | **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **6.388.501.578** | **6.528.303.364** | **139.801.786** | |
| **2** | **12** | **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **16.710.000** | **7.200.000** | **(9.510.000)** | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.355.000 | 3.600.000 | (4.755.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 8.355.000 | 3.600.000 | (4.755.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 8.355.000 | 3.600.000 | (4.755.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 06 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 8.355.000 | 3.600.000 | (4.755.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | SKPD | | | | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 8.355.000 | 3.600.000 | (4.755.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.355.000 | 3.600.000 | (4.755.000) | |
| **2** | **12** | **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.078.890.753** | **4.216.366.566** | **137.475.813** | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.942.379.753 | 4.082.756.566 | 140.376.813 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 3.942.379.753 | 4.082.756.566 | 140.376.813 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 3.942.379.753 | 4.082.756.566 | 140.376.813 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 131.160.000 | 131.160.000 | 0 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 131.160.000 | 131.160.000 | 0 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 131.160.000 | 131.160.000 | 0 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.351.000 | 2.450.000 | (2.901.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 5.351.000 | 2.450.000 | (2.901.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.351.000 | 2.450.000 | (2.901.000) | |
| **2** | **12** | **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **739.712.225** | **675.669.860** | **(64.042.365)** | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 322.579.025 | 173.838.000 | (148.741.025) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 62.482.000 | 900.000 | (61.582.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 900.000 | 900.000 | 0 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 61.582.000 | 0 | (61.582.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 260.097.025 | 172.938.000 | (87.159.025) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 180.097.025 | 172.938.000 | (7.159.025) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | 05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 80.000.000 | 0 | (80.000.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12.912.000 | 10.812.000 | (2.100.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 12.912.000 | 10.812.000 | (2.100.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.912.000 | 10.812.000 | (2.100.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 34.676.000 | 18.700.000 | (15.976.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 34.676.000 | 18.700.000 | (15.976.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 34.676.000 | 18.700.000 | (15.976.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.757.200 | 17.657.200 | (3.100.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 20.757.200 | 17.657.200 | (3.100.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.757.200 | 17.657.200 | (3.100.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.750.000 | 2.741.420 | (5.008.580) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 7.750.000 | 2.741.420 | (5.008.580) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.750.000 | 2.741.420 | (5.008.580) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 336.038.000 | 451.921.240 | 115.883.240 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 336.038.000 | 451.921.240 | 115.883.240 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 336.038.000 | 451.921.240 | 115.883.240 | |
| **2** | **12** | **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **34.850.000** | **68.851.000** | **34.001.000** | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 01 | | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 34.850.000 | 68.851.000 | 34.001.000 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 01 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 34.850.000 | 68.851.000 | 34.001.000 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 01 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 34.850.000 | 68.851.000 | 34.001.000 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **12** | **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.245.059.180** | **1.294.726.518** | **49.667.338** | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 90.601.500 | 91.301.500 | 700.000 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 90.601.500 | 91.301.500 | 700.000 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 0 | 900.000 | 900.000 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 90.601.500 | 90.401.500 | (200.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 88.720.720 | 86.920.720 | (1.800.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 88.720.720 | 86.920.720 | (1.800.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 88.720.720 | 86.920.720 | (1.800.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.065.736.960 | 1.116.504.298 | 50.767.338 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.065.736.960 | 1.116.504.298 | 50.767.338 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.065.736.960 | 1.116.504.298 | 50.767.338 | |
| **2** | **12** | **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **273.279.420** | **265.489.420** | **(7.790.000)** | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5.000.000 | 2.700.000 | (2.300.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 5.000.000 | 2.700.000 | (2.300.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | 2.700.000 | (2.300.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 18.280.000 | 12.790.000 | (5.490.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 18.280.000 | 12.790.000 | (5.490.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 18.280.000 | 12.790.000 | (5.490.000) | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 249.999.420 | 249.999.420 | 0 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 249.999.420 | 249.999.420 | 0 | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 249.999.420 | 249.999.420 | 0 | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **7.221.894.578** | **6.992.852.281** | **(229.042.297)** | |
| | | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(7.221.894.578)** | **(6.992.852.281)** | **229.042.297** | |
| **0** | **00** | **2.12.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **2.13.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | **BELANJA** | | | | |
| **2** | **13** | **2.13.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **0** | **314.076.164** | **314.076.164** | |
| **2** | **13** | **2.13.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **0** | **1.440.000** | **1.440.000** | |
| **2** | **13** | **2.13.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | **0** | **1.440.000** | **1.440.000** | |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | | | | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | 0 | 1.440.000 | 1.440.000 | |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 1.440.000 | 1.440.000 | |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 0 | 1.440.000 | 1.440.000 | |
| **2** | **13** | **2.13.0.00.0.00.01.0000** | **04** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **0** | **312.636.164** | **312.636.164** | |
| **2** | **13** | **2.13.0.00.0.00.01.0000** | **04** | **2.01** | **00** | | | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **0** | **312.636.164** | **312.636.164** | |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 0 | 167.000.364 | 167.000.364 | |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 167.000.364 | 167.000.364 | |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 167.000.364 | 167.000.364 | |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 04 | | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 0 | 27.423.400 | 27.423.400 | |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 27.423.400 | 27.423.400 | |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 27.423.400 | 27.423.400 | |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 05 | | | | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 0 | 93.003.000 | 93.003.000 | |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 93.003.000 | 93.003.000 | |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 93.003.000 | 93.003.000 | |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 13 | | | | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 0 | 25.209.400 | 25.209.400 | |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 25.209.400 | 25.209.400 | |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 25.209.400 | 25.209.400 | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **0** | **314.076.164** | **314.076.164** | |
| | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **0** | **(314.076.164)** | **(314.076.164)** | |
| **0** | **00** | **2.13.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.2.11.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **1.156.230.930** | **1.618.727.600** | **462.496.670** | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **130.134.732** | **218.878.100** | **88.743.368** | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | **40.002.544** | **200.538.000** | **160.535.456** | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | | | | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | 40.002.544 | 200.538.000 | 160.535.456 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 40.002.544 | 200.538.000 | 160.535.456 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 0 | 680.000 | 680.000 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 40.002.544 | 199.858.000 | 159.855.456 | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** | **90.132.188** | **18.340.100** | **(71.792.088)** | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | | | | | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 90.132.188 | 18.340.100 | (71.792.088) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 90.132.188 | 18.340.100 | (71.792.088) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 90.132.188 | 18.340.100 | (71.792.088) | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **83.207.400** | **74.209.400** | **(8.998.000)** | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **80.807.400** | **74.209.400** | **(6.598.000)** | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 80.007.400 | 74.209.400 | (5.798.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 80.007.400 | 74.209.400 | (5.798.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 80.007.400 | 74.209.400 | (5.798.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **03** | **2.02** | **00** | | | | | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **1.600.000** | **0** | **(1.600.000)** | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | | | | | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | | | | | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **03** | **2.03** | **00** | | | | | **Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **800.000** | **0** | **(800.000)** | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 04 | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 800.000 | 0 | (800.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.2.11.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **04** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **62.103.000** | **110.289.000** | **48.186.000** | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **04** | **2.01** | **00** | | | | | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | **62.103.000** | **110.289.000** | **48.186.000** | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | | | | | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 04 | | | | | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 59.703.000 | 110.289.000 | 50.586.000 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 59.703.000 | 105.163.000 | 45.460.000 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 59.703.000 | 105.163.000 | 45.460.000 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 04 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 0 | 5.126.000 | 5.126.000 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 04 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 5.126.000 | 5.126.000 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 06 | | | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 07 | | | | | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **800.000** | **0** | **(800.000)** | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | | **Penyimpanan Sementara Limbah B3** | **800.000** | **0** | **(800.000)** | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | 02 | | | | | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **06** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **109.115.800** | **52.867.300** | **(56.248.500)** | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **06** | **2.01** | **00** | | | | | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **109.115.800** | **52.867.300** | **(56.248.500)** | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 01 | | | | | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 59.292.400 | 26.152.200 | (33.140.200) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 59.292.400 | 26.152.200 | (33.140.200) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 59.292.400 | 26.152.200 | (33.140.200) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 03 | | | | | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 49.823.400 | 26.715.100 | (23.108.300) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 49.823.400 | 26.715.100 | (23.108.300) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 49.823.400 | 26.715.100 | (23.108.300) | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **08** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP** | **54.378.400** | **65.824.200** | **11.445.800** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.2.11.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **UNTUK MASYARAKAT** | | | | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **08** | **2.01** | **00** | | | | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **54.378.400** | **65.824.200** | **11.445.800** | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 08 | 2.01 | 02 | | | | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 53.578.400 | 65.824.200 | 12.245.800 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 08 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 53.578.400 | 65.824.200 | 12.245.800 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 08 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.578.400 | 65.824.200 | 12.245.800 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 08 | 2.01 | 03 | | | | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 08 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 08 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **09** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **51.492.198** | **3.168.000** | **(48.324.198)** | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **09** | **2.01** | **00** | | | | **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **51.492.198** | **3.168.000** | **(48.324.198)** | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 09 | 2.01 | 01 | | | | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 51.492.198 | 3.168.000 | (48.324.198) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 09 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 51.492.198 | 3.168.000 | (48.324.198) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 09 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.492.198 | 3.168.000 | (48.324.198) | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **10** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **800.000** | **0** | **(800.000)** | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **10** | **2.01** | **00** | | | | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | **800.000** | **0** | **(800.000)** | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 10 | 2.01 | 01 | | | | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 10 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 10 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **11** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **181.758.600** | **424.985.800** | **243.227.200** | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **11** | **2.01** | **00** | | | | **Pengelolaan Sampah** | **181.758.600** | **424.985.800** | **243.227.200** | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 02 | | | | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | 63.411.600 | 151.610.800 | 88.199.200 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 63.411.600 | 151.610.800 | 88.199.200 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 2.720.000 | 680.000 | (2.040.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.691.600 | 150.930.800 | 90.239.200 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 03 | | | | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 62.330.000 | 250.866.000 | 188.536.000 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 62.330.000 | 250.866.000 | 188.536.000 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 2.720.000 | 680.000 | (2.040.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.2.11.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.610.000 | 250.186.000 | 190.576.000 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 04 | | | | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 54.417.000 | 22.509.000 | (31.908.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 54.417.000 | 19.759.000 | (34.658.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.417.000 | 19.759.000 | (34.658.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 04 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 2.750.000 | 2.750.000 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 04 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 2.750.000 | 2.750.000 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 07 | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **482.440.800** | **668.505.800** | **186.065.000** | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **89.374.600** | **254.374.600** | **165.000.000** | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 846.000 | 846.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 846.000 | 846.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 846.000 | 846.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 680.000 | 165.680.000 | 165.000.000 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 680.000 | 680.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 680.000 | 680.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 165.000.000 | 165.000.000 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 165.000.000 | 165.000.000 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2.880.000 | 2.880.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.880.000 | 2.880.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.880.000 | 2.880.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 07 | | | | Penyediaan Bahan/Material | 38.270.600 | 38.270.600 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 38.270.600 | 38.270.600 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.270.600 | 38.270.600 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4.550.000 | 4.550.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 4.550.000 | 4.550.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.550.000 | 4.550.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 41.148.000 | 41.148.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 41.148.000 | 41.148.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.148.000 | 41.148.000 | 0 | |
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **5.808.200** | **5.808.200** | **0** | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.720.000 | 2.720.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.720.000 | 2.720.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.720.000 | 2.720.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3.088.200 | 3.088.200 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 3.088.200 | 3.088.200 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.088.200 | 3.088.200 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.2.11.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **11** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **387.258.000** | **408.323.000** | **21.065.000** | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 384.578.000 | 405.643.000 | 21.065.000 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 384.578.000 | 405.643.000 | 21.065.000 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 384.578.000 | 405.643.000 | 21.065.000 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.680.000 | 2.680.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.680.000 | 2.680.000 | 0 | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.680.000 | 2.680.000 | 0 | |
| **2** | **15** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **16.247.003.819** | **24.497.748.361** | **8.250.744.542** | |
| **2** | **15** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **1.066.282.155** | **3.488.110.260** | **2.421.828.105** | |
| **2** | **15** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **182.631.155** | **1.762.156.760** | **1.579.525.605** | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | | | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 73.807.155 | 1.521.140.160 | 1.447.333.005 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 73.807.155 | 360.756.160 | 286.949.005 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 73.807.155 | 360.756.160 | 286.949.005 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 0 | 1.160.384.000 | 1.160.384.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 772.964.000 | 772.964.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 2 | 03 | | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 387.420.000 | 387.420.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 108.824.000 | 241.016.600 | 132.192.600 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 108.824.000 | 241.016.600 | 132.192.600 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 108.824.000 | 241.016.600 | 132.192.600 | |
| **2** | **15** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **02** | **2.06** | **00** | | | | | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **800.000** | **0** | **(800.000)** | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.06 | 05 | | | | | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| **2** | **15** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **02** | **2.09** | **00** | | | | | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **882.851.000** | **1.725.953.500** | **843.102.500** | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.09 | 01 | | | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 882.051.000 | 1.725.953.500 | 843.902.500 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 882.051.000 | 1.725.953.500 | 843.902.500 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 0 | 1.360.000 | 1.360.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 882.051.000 | 1.724.593.500 | 842.542.500 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.09 | 02 | | | | | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| **2** | **15** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **419.671.600** | **7.182.763.846** | **6.763.092.246** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.2.11.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **15** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **03** | **2.12** | **00** | | | | **Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal** | **419.671.600** | **7.182.763.846** | **6.763.092.246** | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.12 | 02 | | | | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | 71.900.500 | 6.773.131.746 | 6.701.231.246 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.12 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 71.900.500 | 3.060.693.207 | 2.988.792.707 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.12 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.12 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 71.900.500 | 3.057.293.207 | 2.985.392.707 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.12 | 02 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 3.712.438.539 | 3.712.438.539 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.12 | 02 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 2.109.233.478 | 2.109.233.478 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.12 | 02 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0 | 1.603.205.061 | 1.603.205.061 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.12 | 03 | | | | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal | 347.771.100 | 409.632.100 | 61.861.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.12 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 58.097.100 | 121.858.100 | 63.761.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.12 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 2.596.000 | 1.360.000 | (1.236.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.12 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 55.501.100 | 40.498.100 | (15.003.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.12 | 03 | 5 | 1 | 06 | Belanja Bantuan Sosial | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.12 | 03 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 289.674.000 | 287.774.000 | (1.900.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.12 | 03 | 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 289.674.000 | 287.774.000 | (1.900.000) | |
| **2** | **15** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **14.761.050.064** | **13.826.874.255** | **(934.175.809)** | |
| **2** | **15** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **32.870.200** | **24.214.491** | **(8.655.709)** | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 27.813.200 | 20.593.891 | (7.219.309) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 27.813.200 | 20.593.891 | (7.219.309) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 27.813.200 | 20.593.891 | (7.219.309) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.057.000 | 3.620.600 | (1.436.400) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 5.057.000 | 3.620.600 | (1.436.400) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.057.000 | 3.620.600 | (1.436.400) | |
| **2** | **15** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.485.060.700** | **5.669.385.100** | **(815.675.600)** | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.085.160.700 | 5.275.160.700 | (810.000.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 6.085.160.700 | 5.275.160.700 | (810.000.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 6.085.160.700 | 5.275.160.700 | (810.000.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 399.900.000 | 394.224.400 | (5.675.600) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 399.900.000 | 394.224.400 | (5.675.600) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 397.500.000 | 391.824.400 | (5.675.600) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | |
| **2** | **15** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **01** | **2.05** | **00** | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **775.000** | **0** | **(775.000)** | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 775.000 | 0 | (775.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 775.000 | 0 | (775.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 775.000 | 0 | (775.000) | |
| **2** | **15** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **647.297.600** | **838.742.100** | **191.444.500** | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 17.907.600 | 4.907.600 | (13.000.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 17.907.600 | 4.907.600 | (13.000.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.907.600 | 4.907.600 | (13.000.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.2.11.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.600.000 | 192.060.000 | 190.460.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.600.000 | 0 | (1.600.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.600.000 | 0 | (1.600.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 192.060.000 | 192.060.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 192.060.000 | 192.060.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 760.000 | 69.744.500 | 68.984.500 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 760.000 | 69.744.500 | 68.984.500 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 760.000 | 69.744.500 | 68.984.500 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 276.683.000 | 289.683.000 | 13.000.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 276.683.000 | 289.683.000 | 13.000.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 276.683.000 | 289.683.000 | 13.000.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 49.200.000 | 16.200.000 | (33.000.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 49.200.000 | 16.200.000 | (33.000.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.200.000 | 16.200.000 | (33.000.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 56.945.000 | 61.945.000 | 5.000.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 56.945.000 | 61.945.000 | 5.000.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.945.000 | 61.945.000 | 5.000.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 244.202.000 | 204.202.000 | (40.000.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 244.202.000 | 204.202.000 | (40.000.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 244.202.000 | 204.202.000 | (40.000.000) | |
| **2** | **15** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **40.840.000** | **39.000.000** | **(1.840.000)** | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 06 | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 800.000 | 0 | (800.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 40.040.000 | 39.000.000 | (1.040.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 40.040.000 | 39.000.000 | (1.040.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 40.040.000 | 39.000.000 | (1.040.000) | |
| **2** | **15** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **7.106.896.564** | **6.826.896.564** | **(280.000.000)** | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60.370.700 | 40.370.700 | (20.000.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 60.370.700 | 40.370.700 | (20.000.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.370.700 | 40.370.700 | (20.000.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 86.545.416 | 96.545.416 | 10.000.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 86.545.416 | 96.545.416 | 10.000.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 86.545.416 | 96.545.416 | 10.000.000 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 16.123.064 | 16.123.064 | 0 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 16.123.064 | 16.123.064 | 0 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.123.064 | 16.123.064 | 0 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6.943.857.384 | 6.673.857.384 | (270.000.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 6.943.857.384 | 6.673.857.384 | (270.000.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.943.857.384 | 6.673.857.384 | (270.000.000) | |
| **2** | **15** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **447.310.000** | **428.636.000** | **(18.674.000)** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.2.11.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 346.680.000 | 328.275.000 | (18.405.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 346.680.000 | 328.275.000 | (18.405.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 346.680.000 | 328.275.000 | (18.405.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.030.000 | 2.030.000 | 0 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.030.000 | 2.030.000 | 0 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.030.000 | 2.030.000 | 0 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 97.600.000 | 97.331.000 | (269.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 97.600.000 | 97.331.000 | (269.000) | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 97.600.000 | 97.331.000 | (269.000) | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **17.403.234.749** | **26.116.475.961** | **8.713.241.212** | |
| | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(17.403.234.749)** | **(26.116.475.961)** | **(8.713.241.212)** | |
| **0** | **00** | **2.15.2.11.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **2** | **16** | **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **16.781.819.514** | **14.894.201.564** | **(1.887.617.950)** | |
| **2** | **16** | **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **5.125.557.400** | **4.492.521.456** | **(633.035.944)** | |
| **2** | **16** | **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **5.125.557.400** | **4.492.521.456** | **(633.035.944)** | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | | | | | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 943.969.100 | 733.597.561 | (210.371.539) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 409.589.100 | 318.017.450 | (91.571.650) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 8.160.000 | 2.040.000 | (6.120.000) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 401.429.100 | 315.977.450 | (85.451.650) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 534.380.000 | 415.580.111 | (118.799.889) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 513.700.000 | 394.900.111 | (118.799.889) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 2 | 05 | | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 20.680.000 | 20.680.000 | 0 | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | | | | | Pelayanan Informasi Publik | 256.144.500 | 114.130.345 | (142.014.155) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 256.144.500 | 114.130.345 | (142.014.155) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 256.144.500 | 114.130.345 | (142.014.155) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | | | | | Layanan Hubungan Media | 3.925.443.800 | 3.644.793.550 | (280.650.250) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.925.443.800 | 3.644.793.550 | (280.650.250) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.925.443.800 | 3.644.793.550 | (280.650.250) | |
| **2** | **16** | **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** | **4.593.016.740** | **4.872.914.110** | **279.897.370** | |
| **2** | **16** | **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | | **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **3.571.486.540** | **3.973.311.054** | **401.824.514** | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | | | | | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 181.292.500 | 151.196.000 | (30.096.500) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 181.292.500 | 151.196.000 | (30.096.500) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 1.360.000 | 680.000 | (680.000) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 179.932.500 | 150.516.000 | (29.416.500) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | | | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 3.390.194.040 | 3.822.115.054 | 431.921.014 | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.335.194.040 | 3.227.806.054 | (107.387.986) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 1.360.000 | 680.000 | (680.000) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.333.834.040 | 3.227.126.054 | (106.707.986) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 55.000.000 | 594.309.000 | 539.309.000 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 55.000.000 | 49.500.000 | (5.500.000) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 2 | 03 | | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 544.809.000 | 544.809.000 | |
| **2** | **16** | **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **03** | **2.02** | **00** | | | | | **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **1.021.530.200** | **899.603.056** | **(121.927.144)** | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | | | | | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 309.456.000 | 265.597.500 | (43.858.500) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 309.456.000 | 265.597.500 | (43.858.500) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 309.456.000 | 265.597.500 | (43.858.500) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | | | | | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | 272.503.000 | 345.084.400 | 72.581.400 | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 172.678.000 | 51.547.600 | (121.130.400) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 1.360.000 | 0 | (1.360.000) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 171.318.000 | 51.547.600 | (119.770.400) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 99.825.000 | 293.536.800 | 193.711.800 | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 99.825.000 | 0 | (99.825.000) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 2 | 03 | | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 293.536.800 | 293.536.800 | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 07 | | | | | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 319.227.200 | 197.861.700 | (121.365.500) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 07 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 319.227.200 | 197.861.700 | (121.365.500) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 07 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 319.227.200 | 197.861.700 | (121.365.500) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 09 | | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 120.344.000 | 91.059.456 | (29.284.544) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 120.344.000 | 91.059.456 | (29.284.544) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 120.344.000 | 91.059.456 | (29.284.544) | |
| **2** | **16** | **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **7.063.245.374** | **5.528.765.998** | **(1.534.479.376)** | |
| **2** | **16** | **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **12.360.500** | **1.649.000** | **(10.711.500)** | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.316.500 | 676.000 | (8.640.500) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 9.316.500 | 676.000 | (8.640.500) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 9.316.500 | 676.000 | (8.640.500) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.044.000 | 973.000 | (2.071.000) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.044.000 | 973.000 | (2.071.000) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.044.000 | 973.000 | (2.071.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **16** | **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.936.267.229** | **3.958.870.414** | **(977.396.815)** | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.679.412.229 | 3.744.532.414 | (934.879.815) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 4.679.412.229 | 3.744.532.414 | (934.879.815) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 4.679.412.229 | 3.744.532.414 | (934.879.815) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 254.760.000 | 213.630.000 | (41.130.000) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 254.760.000 | 213.630.000 | (41.130.000) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 254.760.000 | 213.630.000 | (41.130.000) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.095.000 | 708.000 | (1.387.000) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.095.000 | 708.000 | (1.387.000) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.095.000 | 708.000 | (1.387.000) | |
| **2** | **16** | **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **881.495.850** | **533.042.100** | **(348.453.750)** | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.113.200 | 2.560.000 | (4.553.200) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 7.113.200 | 2.560.000 | (4.553.200) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 7.113.200 | 2.560.000 | (4.553.200) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26.520.120 | 22.311.000 | (4.209.120) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 26.520.120 | 22.311.000 | (4.209.120) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 26.520.120 | 22.311.000 | (4.209.120) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 22.396.000 | 11.354.086 | (11.041.914) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 22.396.000 | 11.354.086 | (11.041.914) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 22.396.000 | 11.354.086 | (11.041.914) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 85.057.800 | 31.663.200 | (53.394.600) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 85.057.800 | 31.663.200 | (53.394.600) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 85.057.800 | 31.663.200 | (53.394.600) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 117.044.730 | 49.073.008 | (67.971.722) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 117.044.730 | 49.073.008 | (67.971.722) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 117.044.730 | 49.073.008 | (67.971.722) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 623.364.000 | 416.080.806 | (207.283.194) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 623.364.000 | 416.080.806 | (207.283.194) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 623.364.000 | 416.080.806 | (207.283.194) | |
| **2** | **16** | **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **52.875.000** | **52.710.000** | **(165.000)** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 52.875.000 | 52.710.000 | (165.000) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 52.875.000 | 52.710.000 | (165.000) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 680.000 | 680.000 | 0 | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 52.195.000 | 52.030.000 | (165.000) | |
| **2** | **16** | **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.104.576.160** | **967.576.234** | **(136.999.926)** | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 153.170.260 | 105.485.726 | (47.684.534) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 153.170.260 | 105.485.726 | (47.684.534) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 153.170.260 | 105.485.726 | (47.684.534) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25.270.500 | 25.270.500 | 0 | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 25.270.500 | 25.270.500 | 0 | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 25.270.500 | 25.270.500 | 0 | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 926.135.400 | 836.820.008 | (89.315.392) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 926.135.400 | 836.820.008 | (89.315.392) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 926.135.400 | 836.820.008 | (89.315.392) | |
| **2** | **16** | **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **75.670.635** | **14.918.250** | **(60.752.385)** | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 61.337.635 | 14.918.250 | (46.419.385) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 61.337.635 | 14.918.250 | (46.419.385) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 61.337.635 | 14.918.250 | (46.419.385) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.333.000 | 0 | (14.333.000) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 14.333.000 | 0 | (14.333.000) | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 14.333.000 | 0 | (14.333.000) | |
| **2** | **20** | **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | **193.218.000** | **114.987.600** | **(78.230.400)** | |
| **2** | **20** | **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **193.218.000** | **114.987.600** | **(78.230.400)** | |
| **2** | **20** | **2.16.2.21.2.20.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **193.218.000** | **114.987.600** | **(78.230.400)** | |
| 2 | 20 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 161.468.000 | 96.730.600 | (64.737.400) | |
| 2 | 20 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 161.468.000 | 96.730.600 | (64.737.400) | |
| 2 | 20 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 161.468.000 | 96.730.600 | (64.737.400) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | 31.750.000 | 18.257.000 | (13.493.000) | |
| 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 5 1 | BELANJA OPERASI | 31.750.000 | 18.257.000 | (13.493.000) | |
| 2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.750.000 | 18.257.000 | (13.493.000) | |
| **2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | **170.763.800** | **79.246.000** | **(91.517.800)** | |
| **2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 0.00 00** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **170.763.800** | **79.246.000** | **(91.517.800)** | |
| **2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 00** | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **41.097.000** | **22.427.000** | **(18.670.000)** | |
| 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 41.097.000 | 22.427.000 | (18.670.000) | |
| 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 5 1 | BELANJA OPERASI | 41.097.000 | 22.427.000 | (18.670.000) | |
| 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | 41.097.000 | 22.427.000 | (18.670.000) | |
| **2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 00** | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | **129.666.800** | **56.819.000** | **(72.847.800)** | |
| 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 129.666.800 | 56.819.000 | (72.847.800) | |
| 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 5 1 | BELANJA OPERASI | 129.666.800 | 56.819.000 | (72.847.800) | |
| 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 | Belanja Pegawai | 1.360.000 | 0 | (1.360.000) | |
| 2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | 128.306.800 | 56.819.000 | (71.487.800) | |
| **Jumlah Belanja** | | **17.145.801.314** | **15.088.435.164** | **(2.057.366.150)** | |
| **Total Surplus/(Defisit)** | | **(17.145.801.314)** | **(15.088.435.164)** | **2.057.366.150** | |
| **0 00 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00 6** | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **2** | **07** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **0** | **932.879.733** | **932.879.733** | |
| **2** | **07** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **0** | **51.648.000** | **51.648.000** | |
| **2** | **07** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | **0** | **51.648.000** | **51.648.000** | |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 0 | 51.648.000 | 51.648.000 | |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 51.648.000 | 51.648.000 | |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 51.648.000 | 51.648.000 | |
| **2** | **07** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **0** | **881.231.733** | **881.231.733** | |
| **2** | **07** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **0** | **735.231.733** | **735.231.733** | |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 05 | 2.01 | 03 | | | | | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 0 | 735.231.733 | 735.231.733 | |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 05 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 735.231.733 | 735.231.733 | |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 05 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 735.231.733 | 735.231.733 | |
| **2** | **07** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **05** | **2.02** | **00** | | | | | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **0** | **146.000.000** | **146.000.000** | |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 05 | 2.02 | 04 | | | | | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 146.000.000 | 146.000.000 | |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 05 | 2.02 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 146.000.000 | 146.000.000 | |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 05 | 2.02 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 146.000.000 | 146.000.000 | |
| **2** | **17** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **8.452.231.021** | **7.857.195.962** | **(595.035.059)** | |
| **2** | **17** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **65.588.000** | **25.643.000** | **(39.945.000)** | |
| **2** | **17** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **65.588.000** | **25.643.000** | **(39.945.000)** | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | | | | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 65.588.000 | 25.643.000 | (39.945.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 65.588.000 | 25.643.000 | (39.945.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 65.588.000 | 25.643.000 | (39.945.000) | |
| **2** | **17** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **07** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **81.100.000** | **98.425.000** | **17.325.000** | |
| **2** | **17** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **07** | **2.01** | **00** | | | | | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para** | **81.100.000** | **98.425.000** | **17.325.000** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Pemangku Kepentingan** | | | | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 07 | 2.01 | 02 | | | | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | 81.100.000 | 98.425.000 | 17.325.000 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 07 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 81.100.000 | 98.425.000 | 17.325.000 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 07 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 81.100.000 | 98.425.000 | 17.325.000 | |
| **2** | **17** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **08** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **496.470.100** | **386.012.550** | **(110.457.550)** | |
| **2** | **17** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **08** | **2.01** | **00** | | | | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | **496.470.100** | **386.012.550** | **(110.457.550)** | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 08 | 2.01 | 01 | | | | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 496.470.100 | 386.012.550 | (110.457.550) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 08 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 496.470.100 | 386.012.550 | (110.457.550) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 08 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 496.470.100 | 386.012.550 | (110.457.550) | |
| **2** | **17** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **7.809.072.921** | **7.347.115.412** | **(461.957.509)** | |
| **2** | **17** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **186.145.630** | **202.928.955** | **16.783.325** | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 21.030.330 | 21.035.753 | 5.423 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 21.030.330 | 21.035.753 | 5.423 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.030.330 | 21.035.753 | 5.423 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 20.135.660 | 24.985.660 | 4.850.000 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 20.135.660 | 24.985.660 | 4.850.000 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.135.660 | 24.985.660 | 4.850.000 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 03 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 22.460.660 | 26.940.660 | 4.480.000 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 22.460.660 | 26.940.660 | 4.480.000 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.460.660 | 26.940.660 | 4.480.000 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 04 | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 18.935.660 | 24.985.660 | 6.050.000 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 18.935.660 | 24.985.660 | 6.050.000 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.935.660 | 24.985.660 | 6.050.000 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 18.935.660 | 24.835.660 | 5.900.000 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 18.935.660 | 24.835.660 | 5.900.000 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.935.660 | 24.835.660 | 5.900.000 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 06 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 58.242.330 | 57.290.232 | (952.098) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 58.242.330 | 57.290.232 | (952.098) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.242.330 | 57.290.232 | (952.098) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.405.330 | 22.855.330 | (3.550.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 26.405.330 | 22.855.330 | (3.550.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.405.330 | 22.855.330 | (3.550.000) | |
| **2** | **17** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.365.138.372** | **4.219.193.033** | **(145.945.339)** | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.077.578.042 | 4.015.152.703 | (62.425.339) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 4.077.578.042 | 4.015.152.703 | (62.425.339) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 4.077.578.042 | 4.015.152.703 | (62.425.339) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 279.060.000 | 194.290.000 | (84.770.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 279.060.000 | 194.290.000 | (84.770.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 279.060.000 | 194.290.000 | (84.770.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 8.500.330 | 9.750.330 | 1.250.000 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 8.500.330 | 9.750.330 | 1.250.000 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.500.330 | 9.750.330 | 1.250.000 | |
| **2** | **17** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **896.772.000** | **667.696.070** | **(229.075.930)** | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 58.484.000 | 25.020.000 | (33.464.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 58.484.000 | 25.020.000 | (33.464.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 58.484.000 | 25.020.000 | (33.464.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 35.710.000 | 10.250.000 | (25.460.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 24.550.000 | 10.250.000 | (14.300.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.550.000 | 10.250.000 | (14.300.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 11.160.000 | 0 | (11.160.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 11.160.000 | 0 | (11.160.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 66.068.000 | 65.735.000 | (333.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 66.068.000 | 65.735.000 | (333.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.068.000 | 65.735.000 | (333.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 147.184.000 | 88.350.000 | (58.834.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 147.184.000 | 88.350.000 | (58.834.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 147.184.000 | 88.350.000 | (58.834.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 100.990.000 | 68.552.500 | (32.437.500) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 100.990.000 | 68.552.500 | (32.437.500) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 100.990.000 | 68.552.500 | (32.437.500) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 488.336.000 | 409.788.570 | (78.547.430) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 488.336.000 | 409.788.570 | (78.547.430) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 488.336.000 | 409.788.570 | (78.547.430) | |
| **2** | **17** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **11.348.000** | **4.580.000** | **(6.768.000)** | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.07 | 10 | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 11.348.000 | 4.580.000 | (6.768.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.07 | 10 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 11.348.000 | 4.580.000 | (6.768.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.07 | 10 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.348.000 | 4.580.000 | (6.768.000) | |
| **2** | **17** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.032.341.709** | **1.962.477.144** | **(69.864.565)** | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 502.799.442 | 435.934.877 | (66.864.565) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 502.799.442 | 435.934.877 | (66.864.565) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 502.799.442 | 435.934.877 | (66.864.565) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 75.373.211 | 75.373.211 | 0 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 75.373.211 | 75.373.211 | 0 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.373.211 | 75.373.211 | 0 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.454.169.056 | 1.451.169.056 | (3.000.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.454.169.056 | 1.451.169.056 | (3.000.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 258.240.000 | 258.240.000 | 0 | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.195.929.056 | 1.192.929.056 | (3.000.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **17** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **317.327.210** | **290.240.210** | **(27.087.000)** | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 138.717.210 | 130.815.210 | (7.902.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 138.717.210 | 130.815.210 | (7.902.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 138.717.210 | 130.815.210 | (7.902.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 91.350.000 | 74.500.000 | (16.850.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 91.350.000 | 74.500.000 | (16.850.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 91.350.000 | 74.500.000 | (16.850.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 87.260.000 | 84.925.000 | (2.335.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 87.260.000 | 84.925.000 | (2.335.000) | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 87.260.000 | 84.925.000 | (2.335.000) | |
| **3** | **30** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | **638.865.575** | **785.945.265** | **147.079.690** | |
| **3** | **30** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | **102.005.720** | **99.240.720** | **(2.765.000)** | |
| **3** | **30** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | | **Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan** | **102.005.720** | **99.240.720** | **(2.765.000)** | |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | | | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 102.005.720 | 99.240.720 | (2.765.000) | |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 102.005.720 | 99.240.720 | (2.765.000) | |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 102.005.720 | 99.240.720 | (2.765.000) | |
| **3** | **30** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **04** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **486.889.855** | **653.145.105** | **166.255.250** | |
| **3** | **30** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **04** | **2.01** | **00** | | | | | **Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | **486.889.855** | **653.145.105** | **166.255.250** | |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 103.987.700 | 84.490.060 | (19.497.640) | |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 103.987.700 | 84.490.060 | (19.497.640) | |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 103.987.700 | 84.490.060 | (19.497.640) | |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 04 | 2.01 | 02 | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 382.902.155 | 280.455.615 | (102.446.540) | |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 04 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 382.902.155 | 280.455.615 | (102.446.540) | |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 04 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 382.902.155 | 280.455.615 | (102.446.540) | |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 04 | 2.01 | 03 | | | | | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 0 | 288.199.430 | 288.199.430 | |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 04 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 288.199.430 | 288.199.430 | |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 04 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 288.199.430 | 288.199.430 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **30** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **06** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **49.970.000** | **33.559.440** | **(16.410.560)** | |
| **3** | **30** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **06** | **2.01** | **00** | | | | | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | **49.970.000** | **33.559.440** | **(16.410.560)** | |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 06 | 2.01 | 01 | | | | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 49.970.000 | 33.559.440 | (16.410.560) | |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 06 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 49.970.000 | 33.559.440 | (16.410.560) | |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 06 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 49.970.000 | 33.559.440 | (16.410.560) | |
| **3** | **31** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | **269.989.200** | **2.136.900.725** | **1.866.911.525** | |
| **3** | **31** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **269.989.200** | **2.136.900.725** | **1.866.911.525** | |
| **3** | **31** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | **269.989.200** | **2.136.900.725** | **1.866.911.525** | |
| 3 | 31 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 269.989.200 | 121.528.028 | (148.461.172) | |
| 3 | 31 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 264.789.200 | 121.528.028 | (143.261.172) | |
| 3 | 31 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 264.789.200 | 121.528.028 | (143.261.172) | |
| 3 | 31 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 5.200.000 | 0 | (5.200.000) | |
| 3 | 31 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.200.000 | 0 | (5.200.000) | |
| 3 | 31 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 0 | 2.015.372.697 | 2.015.372.697 | |
| 3 | 31 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 0 | 2.015.372.697 | 2.015.372.697 | |
| 3 | 31 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | 5 | 2 | 03 | | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 2.015.372.697 | 2.015.372.697 | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **9.361.085.796** | **11.712.921.685** | **2.351.835.889** | |
| | | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(9.361.085.796)** | **(11.712.921.685)** | **(2.351.835.889)** | |
| **0** | **00** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| **2** | **17** | **2.17.3.30.3.31.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | **2** | | | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **1.000.000.000** | **1.000.000.000** | **0** | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 00 | 0.00 | 00 | 6 | 2 | 04 | | Pemberian Pinjaman Daerah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **1.000.000.000** | **1.000.000.000** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.2.07.3.32.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **2** | **07** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **1.899.662.466** | **1.762.142.965** | **(137.519.501)** | |
| **2** | **07** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **230.000.000** | **249.212.000** | **19.212.000** | |
| **2** | **07** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | **230.000.000** | **249.212.000** | **19.212.000** | |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 230.000.000 | 249.212.000 | 19.212.000 | |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 230.000.000 | 249.212.000 | 19.212.000 | |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 230.000.000 | 249.212.000 | 19.212.000 | |
| **2** | **07** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **1.669.662.466** | **1.512.930.965** | **(156.731.501)** | |
| **2** | **07** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **1.533.653.933** | **1.385.734.833** | **(147.919.100)** | |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.01 | 03 | | | | | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 1.533.653.933 | 1.385.734.833 | (147.919.100) | |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.533.653.933 | 1.385.734.833 | (147.919.100) | |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.533.653.933 | 1.385.734.833 | (147.919.100) | |
| **2** | **07** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **05** | **2.02** | **00** | | | | | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **136.008.533** | **127.196.132** | **(8.812.401)** | |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.02 | 04 | | | | | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 136.008.533 | 127.196.132 | (8.812.401) | |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.02 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 136.008.533 | 127.196.132 | (8.812.401) | |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.02 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 136.008.533 | 127.196.132 | (8.812.401) | |
| **2** | **18** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **8.743.999.775** | **7.885.431.549** | **(858.568.226)** | |
| **2** | **18** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **280.000.900** | **234.415.380** | **(45.585.520)** | |
| **2** | **18** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **280.000.900** | **234.415.380** | **(45.585.520)** | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | | | | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 280.000.900 | 234.415.380 | (45.585.520) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 280.000.900 | 234.415.380 | (45.585.520) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 280.000.900 | 234.415.380 | (45.585.520) | |
| **2** | **18** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **04** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **608.000.000** | **421.603.300** | **(186.396.700)** | |
| **2** | **18** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **04** | **2.01** | **00** | | | | | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **608.000.000** | **421.603.300** | **(186.396.700)** | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | | | | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 424.629.000 | 385.880.500 | (38.748.500) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 424.629.000 | 385.880.500 | (38.748.500) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.2.07.3.32.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 424.629.000 | 385.880.500 | (38.748.500) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 04 | 2.01 | 02 | | | | | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | 183.371.000 | 35.722.800 | (147.648.200) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 04 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 183.371.000 | 35.722.800 | (147.648.200) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 04 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 183.371.000 | 35.722.800 | (147.648.200) | |
| **2** | **18** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **379.174.900** | **379.174.900** | **0** | |
| **2** | **18** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **379.174.900** | **379.174.900** | **0** | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.01 | 02 | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 221.821.900 | 221.821.900 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 221.821.900 | 221.821.900 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 221.821.900 | 221.821.900 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.01 | 03 | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 157.353.000 | 157.353.000 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 157.353.000 | 157.353.000 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 157.353.000 | 157.353.000 | 0 | |
| **2** | **18** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **7.476.823.975** | **6.850.237.969** | **(626.586.006)** | |
| **2** | **18** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **31.829.570** | **14.957.570** | **(16.872.000)** | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.542.570 | 12.542.570 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 12.542.570 | 12.542.570 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 12.542.570 | 12.542.570 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.345.000 | 0 | (2.345.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.345.000 | 0 | (2.345.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.345.000 | 0 | (2.345.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 03 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.345.000 | 0 | (2.345.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.345.000 | 0 | (2.345.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.345.000 | 0 | (2.345.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 04 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.352.000 | 0 | (2.352.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.352.000 | 0 | (2.352.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.352.000 | 0 | (2.352.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 05 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.345.000 | 0 | (2.345.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.345.000 | 0 | (2.345.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.345.000 | 0 | (2.345.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 06 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.415.000 | 2.415.000 | (5.000.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 7.415.000 | 2.415.000 | (5.000.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 7.415.000 | 2.415.000 | (5.000.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.485.000 | 0 | (2.485.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.485.000 | 0 | (2.485.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.485.000 | 0 | (2.485.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.2.07.3.32.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **18** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.763.281.629** | **5.257.352.049** | **(505.929.580)** | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.589.891.629 | 5.087.912.049 | (501.979.580) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 5.589.891.629 | 5.087.912.049 | (501.979.580) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 5.589.891.629 | 5.087.912.049 | (501.979.580) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 169.440.000 | 169.440.000 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 169.440.000 | 169.440.000 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 169.440.000 | 169.440.000 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.950.000 | 0 | (3.950.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.950.000 | 0 | (3.950.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.950.000 | 0 | (3.950.000) | |
| **2** | **18** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **01** | **2.03** | **00** | | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **19.800.000** | **19.800.000** | **0** | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 | |
| **2** | **18** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **552.011.400** | **518.170.145** | **(33.841.255)** | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.488.500 | 4.800.480 | (5.688.020) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 10.488.500 | 4.800.480 | (5.688.020) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 10.488.500 | 4.800.480 | (5.688.020) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.566.500 | 6.000.000 | (3.566.500) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 9.566.500 | 6.000.000 | (3.566.500) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 830.000 | 0 | (830.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 8.736.500 | 6.000.000 | (2.736.500) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 11.361.700 | 8.009.500 | (3.352.200) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 11.361.700 | 8.009.500 | (3.352.200) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 830.000 | 0 | (830.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 10.531.700 | 8.009.500 | (2.522.200) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 48.629.700 | 41.752.165 | (6.877.535) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 48.629.700 | 41.752.165 | (6.877.535) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 48.629.700 | 41.752.165 | (6.877.535) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 18.425.000 | 11.498.000 | (6.927.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 18.425.000 | 11.498.000 | (6.927.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 18.425.000 | 11.498.000 | (6.927.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5.400.000 | 0 | (5.400.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 5.400.000 | 0 | (5.400.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 5.400.000 | 0 | (5.400.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12.500.000 | 10.470.000 | (2.030.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 12.500.000 | 10.470.000 | (2.030.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000 | 10.470.000 | (2.030.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 435.640.000 | 435.640.000 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 435.640.000 | 435.640.000 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 435.640.000 | 435.640.000 | 0 | |
| **2** | **18** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **0** | **16.126.000** | **16.126.000** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.2.07.3.32.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.07 | 05 | | | | | Pengadaan Mebel | 0 | 16.126.000 | 16.126.000 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.07 | 05 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 0 | 16.126.000 | 16.126.000 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.07 | 05 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 16.126.000 | 16.126.000 | |
| **2** | **18** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **939.908.876** | **894.698.105** | **(45.210.771)** | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 54.119.500 | 46.929.149 | (7.190.351) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 54.119.500 | 46.929.149 | (7.190.351) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 54.119.500 | 46.929.149 | (7.190.351) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3.960.000 | 3.960.000 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.960.000 | 3.960.000 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.960.000 | 3.960.000 | 0 | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 881.829.376 | 843.808.956 | (38.020.420) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 881.829.376 | 843.808.956 | (38.020.420) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 881.829.376 | 843.808.956 | (38.020.420) | |
| **2** | **18** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **169.992.500** | **129.134.100** | **(40.858.400)** | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 45.102.500 | 31.165.600 | (13.936.900) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 45.102.500 | 31.165.600 | (13.936.900) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 45.102.500 | 31.165.600 | (13.936.900) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 31.500.000 | 13.942.500 | (17.557.500) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 31.500.000 | 13.942.500 | (17.557.500) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 31.500.000 | 13.942.500 | (17.557.500) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.09 | 10 | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 93.390.000 | 84.026.000 | (9.364.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.09 | 10 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 93.390.000 | 84.026.000 | (9.364.000) | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.09 | 10 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 93.390.000 | 84.026.000 | (9.364.000) | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **10.643.662.241** | **9.647.574.514** | **(996.087.727)** | |
| | | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(10.643.662.241)** | **(9.647.574.514)** | **996.087.727** | |
| **0** | **00** | **2.18.2.07.3.32.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **2.23.2.24.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **2** | **23** | **2.23.2.24.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **0** | **156.045.100** | **156.045.100** | |
| **2** | **23** | **2.23.2.24.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **0** | **156.045.100** | **156.045.100** | |
| **2** | **23** | **2.23.2.24.0.00.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **0** | **87.859.100** | **87.859.100** | |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | | | | | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 80.359.100 | 80.359.100 | |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 80.359.100 | 80.359.100 | |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 80.359.100 | 80.359.100 | |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | | | | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | |
| **2** | **23** | **2.23.2.24.0.00.01.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **0** | **68.186.000** | **68.186.000** | |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | | | | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 0 | 68.186.000 | 68.186.000 | |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 68.186.000 | 68.186.000 | |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 68.186.000 | 68.186.000 | |
| **2** | **24** | **2.23.2.24.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | **0** | **32.499.000** | **32.499.000** | |
| **2** | **24** | **2.23.2.24.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **0** | **32.499.000** | **32.499.000** | |
| **2** | **24** | **2.23.2.24.0.00.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **0** | **32.499.000** | **32.499.000** | |
| 2 | 24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | | | | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 0 | 32.499.000 | 32.499.000 | |
| 2 | 24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 32.499.000 | 32.499.000 | |
| 2 | 24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 32.499.000 | 32.499.000 | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **0** | **188.544.100** | **188.544.100** | |
| | | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **0** | **(188.544.100)** | **(188.544.100)** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 00 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | | **0** | **0** | **0** | |
| **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.3.27.2.09.01 DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **2** | **09** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **721.449.140** | **671.168.890** | **(50.280.250)** | |
| **2** | **09** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **701.086.250** | **650.806.000** | **(50.280.250)** | |
| **2** | **09** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **15.553.200** | **10.064.000** | **(5.489.200)** | |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.01 | 04 | | | | | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 15.553.200 | 10.064.000 | (5.489.200) | |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 15.553.200 | 10.064.000 | (5.489.200) | |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 15.553.200 | 10.064.000 | (5.489.200) | |
| **2** | **09** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **03** | **2.02** | **00** | | | | | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | **30.233.550** | **6.980.500** | **(23.253.050)** | |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | | | | | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 30.233.550 | 6.980.500 | (23.253.050) | |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 30.233.550 | 6.980.500 | (23.253.050) | |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 30.233.550 | 6.980.500 | (23.253.050) | |
| **2** | **09** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **03** | **2.04** | **00** | | | | | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **655.299.500** | **633.761.500** | **(21.538.000)** | |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.04 | 02 | | | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 655.299.500 | 633.761.500 | (21.538.000) | |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.04 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 633.761.500 | 633.761.500 | 0 | |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.04 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 633.761.500 | 633.761.500 | 0 | |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.04 | 02 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 21.538.000 | 0 | (21.538.000) | |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.04 | 02 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 21.538.000 | 0 | (21.538.000) | |
| **2** | **09** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **20.362.890** | **20.362.890** | **0** | |
| **2** | **09** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **20.362.890** | **20.362.890** | **0** | |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 05 | 2.01 | 05 | | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 20.362.890 | 20.362.890 | 0 | |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 05 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 20.362.890 | 20.362.890 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.3.27.2.09.01 DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 05 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 20.362.890 | 20.362.890 | 0 | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **15.105.032.642** | **14.555.571.564** | **(549.461.078)** | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **241.993.820** | **1.221.530.122** | **979.536.302** | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **03** | **2.02** | **00** | | | | | **Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **69.993.820** | **912.065.402** | **842.071.582** | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | | | | | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 20.000.000 | 745.099.800 | 725.099.800 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 20.000.000 | 745.099.800 | 725.099.800 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | 745.099.800 | 725.099.800 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | | | | | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 20.000.000 | 157.017.500 | 137.017.500 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 20.000.000 | 157.017.500 | 137.017.500 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | 157.017.500 | 137.017.500 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | | | | | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 29.993.820 | 9.948.102 | (20.045.718) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 29.993.820 | 9.948.102 | (20.045.718) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 29.993.820 | 9.948.102 | (20.045.718) | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **03** | **2.03** | **00** | | | | | **Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** | **172.000.000** | **309.464.720** | **137.464.720** | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | | | | | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 21.000.000 | 12.736.200 | (8.263.800) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 21.000.000 | 12.736.200 | (8.263.800) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 21.000.000 | 12.736.200 | (8.263.800) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | | | | | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 151.000.000 | 296.728.520 | 145.728.520 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 139.514.100 | 206.968.520 | 67.454.420 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 76.209.464 | 85.803.446 | 9.593.982 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | 05 | | Belanja Hibah | 63.304.636 | 121.165.074 | 57.860.438 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 11.485.900 | 89.760.000 | 78.274.100 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 11.485.900 | 0 | (11.485.900) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | 5 | 2 | 03 | | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 89.760.000 | 89.760.000 | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **04** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **192.321.000** | **231.395.200** | **39.074.200** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.3.27.2.09.01 DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **04** | **2.02** | **00** | | | | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | **64.314.800** | **50.745.000** | **(13.569.800)** | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.02 | 01 | | | | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 4.315.200 | 0 | (4.315.200) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 4.315.200 | 0 | (4.315.200) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.315.200 | 0 | (4.315.200) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.02 | 02 | | | | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 59.999.600 | 50.745.000 | (9.254.600) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 59.999.600 | 50.745.000 | (9.254.600) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 680.000 | 0 | (680.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.319.600 | 50.745.000 | (8.574.600) | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **04** | **2.03** | **00** | | | | **Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **21.000.000** | **0** | **(21.000.000)** | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.03 | 02 | | | | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 21.000.000 | 0 | (21.000.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 21.000.000 | 0 | (21.000.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.000.000 | 0 | (21.000.000) | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **04** | **2.04** | **00** | | | | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **107.006.200** | **180.650.200** | **73.644.000** | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.04 | 01 | | | | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 29.998.200 | 21.248.200 | (8.750.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.04 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 29.998.200 | 21.248.200 | (8.750.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.04 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.998.200 | 21.248.200 | (8.750.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.04 | 02 | | | | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7.566.000 | 0 | (7.566.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.04 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 7.566.000 | 0 | (7.566.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.04 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.566.000 | 0 | (7.566.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.04 | 03 | | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 21.682.800 | 142.546.800 | 120.864.000 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.04 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 21.682.800 | 142.546.800 | 120.864.000 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.04 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.682.800 | 142.546.800 | 120.864.000 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.04 | 04 | | | | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 | 47.759.200 | 16.855.200 | (30.904.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.3.27.2.09.01 DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.04 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 47.759.200 | 16.855.200 | (30.904.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.04 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 47.759.200 | 16.855.200 | (30.904.000) | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **06** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **94.798.772** | **112.123.000** | **17.324.228** | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **06** | **2.01** | **00** | | | | | **Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil** | **21.000.000** | **9.849.500** | **(11.150.500)** | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 06 | 2.01 | 01 | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 21.000.000 | 9.849.500 | (11.150.500) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 06 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 21.000.000 | 9.849.500 | (11.150.500) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 06 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 21.000.000 | 9.849.500 | (11.150.500) | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **06** | **2.02** | **00** | | | | | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | **42.798.772** | **21.323.500** | **(21.475.272)** | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 06 | 2.02 | 01 | | | | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 42.798.772 | 21.323.500 | (21.475.272) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 06 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 42.798.772 | 21.323.500 | (21.475.272) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 06 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 42.798.772 | 21.323.500 | (21.475.272) | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **06** | **2.03** | **00** | | | | | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **31.000.000** | **80.950.000** | **49.950.000** | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 06 | 2.03 | 02 | | | | | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 31.000.000 | 80.950.000 | 49.950.000 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 06 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 31.000.000 | 80.950.000 | 49.950.000 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 06 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 31.000.000 | 80.950.000 | 49.950.000 | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **14.575.919.050** | **12.990.523.242** | **(1.585.395.808)** | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **6.000.000** | **95.396.000** | **89.396.000** | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.000.000 | 60.396.000 | 57.396.000 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.000.000 | 35.062.000 | 32.062.000 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.3.27.2.09.01 DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000 | 35.062.000 | 32.062.000 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 0 | 25.334.000 | 25.334.000 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 2 | 03 | | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0 | 25.334.000 | 25.334.000 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.000.000 | 35.000.000 | 32.000.000 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.000.000 | 35.000.000 | 32.000.000 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000 | 35.000.000 | 32.000.000 | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **9.483.423.300** | **8.019.643.106** | **(1.463.780.194)** | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.206.744.000 | 7.778.593.106 | (1.428.150.894) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 9.206.744.000 | 7.778.593.106 | (1.428.150.894) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 9.206.744.000 | 7.778.593.106 | (1.428.150.894) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 271.680.000 | 240.600.000 | (31.080.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 271.680.000 | 240.600.000 | (31.080.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 271.680.000 | 240.600.000 | (31.080.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.999.300 | 450.000 | (4.549.300) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 4.999.300 | 450.000 | (4.549.300) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 4.999.300 | 450.000 | (4.549.300) | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **01** | **2.03** | **00** | | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **49.900.000** | **43.800.000** | **(6.100.000)** | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.03 | 01 | | | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 6.100.000 | 0 | (6.100.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 6.100.000 | 0 | (6.100.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 6.100.000 | 0 | (6.100.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 43.800.000 | 43.800.000 | 0 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 43.800.000 | 43.800.000 | 0 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 43.800.000 | 43.800.000 | 0 | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **01** | **2.05** | **00** | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **243.151.500** | **130.847.501** | **(112.303.999)** | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 212.927.500 | 130.847.500 | (82.080.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 212.927.500 | 130.847.500 | (82.080.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 2.040.000 | 1.360.000 | (680.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 210.887.500 | 129.487.500 | (81.400.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 30.224.000 | 1 | (30.223.999) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 30.224.000 | 1 | (30.223.999) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.3.27.2.09.01 DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 30.224.000 | 1 | (30.223.999) | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **642.444.532** | **610.568.800** | **(31.875.732)** | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.992.000 | 2.692.000 | (2.300.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 4.992.000 | 2.692.000 | (2.300.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 4.992.000 | 2.692.000 | (2.300.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 63.069.732 | 29.546.000 | (33.523.732) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.040.000 | 680.000 | (1.360.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 2.040.000 | 680.000 | (1.360.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 61.029.732 | 28.866.000 | (32.163.732) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 61.029.732 | 28.866.000 | (32.163.732) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 19.992.000 | 12.944.000 | (7.048.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 19.992.000 | 12.944.000 | (7.048.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 19.992.000 | 12.944.000 | (7.048.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 39.820.600 | 34.778.800 | (5.041.800) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 39.820.600 | 34.778.800 | (5.041.800) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 39.820.600 | 34.778.800 | (5.041.800) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.000.000 | 25.000.000 | (10.000.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 35.000.000 | 25.000.000 | (10.000.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000 | 25.000.000 | (10.000.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 07 | | | | | Penyediaan Bahan/Material | 4.990.200 | 3.677.000 | (1.313.200) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 07 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 4.990.200 | 3.677.000 | (1.313.200) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 07 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 4.990.200 | 3.677.000 | (1.313.200) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24.915.000 | 12.266.000 | (12.649.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 24.915.000 | 12.266.000 | (12.649.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 24.915.000 | 12.266.000 | (12.649.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 449.665.000 | 489.665.000 | 40.000.000 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 449.665.000 | 489.665.000 | 40.000.000 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 449.665.000 | 489.665.000 | 40.000.000 | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **266.705.000** | **266.705.000** | **0** | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 266.705.000 | 266.705.000 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.3.27.2.09.01 DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 266.705.000 | 266.705.000 | 0 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 680.000 | 680.000 | 0 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 266.025.000 | 266.025.000 | 0 | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **3.815.459.718** | **3.792.272.835** | **(23.186.883)** | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 156.727.540 | 140.617.401 | (16.110.139) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 156.727.540 | 140.617.401 | (16.110.139) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 1.360.000 | 680.000 | (680.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 155.367.540 | 139.937.401 | (15.430.139) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 43.869.938 | 43.869.938 | 0 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 43.869.938 | 43.869.938 | 0 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 43.869.938 | 43.869.938 | 0 | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.614.862.240 | 3.607.785.496 | (7.076.744) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.614.862.240 | 3.607.785.496 | (7.076.744) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.614.862.240 | 3.607.785.496 | (7.076.744) | |
| **3** | **25** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **68.835.000** | **31.290.000** | **(37.545.000)** | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.345.000 | 13.300.000 | (11.045.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 24.345.000 | 13.300.000 | (11.045.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 24.345.000 | 13.300.000 | (11.045.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 44.490.000 | 17.990.000 | (26.500.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 44.490.000 | 17.990.000 | (26.500.000) | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 44.490.000 | 17.990.000 | (26.500.000) | |
| **3** | **27** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **949.955.669** | **679.773.664** | **(270.182.005)** | |
| **3** | **27** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **304.542.000** | **232.986.600** | **(71.555.400)** | |
| **3** | **27** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | **299.992.000** | **232.986.600** | **(67.005.400)** | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | | | | | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 299.992.000 | 232.986.600 | (67.005.400) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 299.992.000 | 232.986.600 | (67.005.400) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.3.27.2.09.01 DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 2.060.000 | 680.000 | (1.380.000) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 297.932.000 | 232.306.600 | (65.625.400) | |
| **3** | **27** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **02** | **2.06** | **00** | | | | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | **4.550.000** | **0** | **(4.550.000)** | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 02 | 2.06 | 01 | | | | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 1.800.000 | 0 | (1.800.000) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 02 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.800.000 | 0 | (1.800.000) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 02 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000 | 0 | (1.800.000) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 02 | 2.06 | 02 | | | | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 2.750.000 | 0 | (2.750.000) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 02 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.750.000 | 0 | (2.750.000) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 02 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.750.000 | 0 | (2.750.000) | |
| **3** | **27** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **274.978.699** | **131.477.768** | **(143.500.931)** | |
| **3** | **27** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **03** | **2.02** | **00** | | | | **Pembangunan Prasarana Pertanian** | **274.978.699** | **131.477.768** | **(143.500.931)** | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 09 | | | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 274.978.699 | 131.477.768 | (143.500.931) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 79.978.699 | 91.504.768 | 11.526.069 | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 09 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 2.040.000 | 680.000 | (1.360.000) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 77.938.699 | 90.824.768 | 12.886.069 | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 09 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 195.000.000 | 39.973.000 | (155.027.000) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 09 | 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 195.000.000 | 39.973.000 | (155.027.000) | |
| **3** | **27** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **04** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **279.950.900** | **222.963.330** | **(56.987.570)** | |
| **3** | **27** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **04** | **2.01** | **00** | | | | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **103.902.000** | **83.814.430** | **(20.087.570)** | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | | | | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 103.902.000 | 83.814.430 | (20.087.570) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 103.902.000 | 83.814.430 | (20.087.570) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 0 | 680.000 | 680.000 | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 103.902.000 | 83.134.430 | (20.767.570) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.3.27.2.09.01 DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **27** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **04** | **2.03** | **00** | | | | | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **176.048.900** | **139.148.900** | **(36.900.000)** | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.03 | 02 | | | | | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 176.048.900 | 139.148.900 | (36.900.000) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 176.048.900 | 139.148.900 | (36.900.000) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 176.048.900 | 139.148.900 | (36.900.000) | |
| **3** | **27** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **07** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **90.484.070** | **92.345.966** | **1.861.896** | |
| **3** | **27** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **07** | **2.01** | **00** | | | | | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **90.484.070** | **92.345.966** | **1.861.896** | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 07 | 2.01 | 01 | | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 39.929.500 | 4.265.000 | (35.664.500) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 07 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 39.929.500 | 4.265.000 | (35.664.500) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 07 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 39.929.500 | 4.265.000 | (35.664.500) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 07 | 2.01 | 02 | | | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 20.129.390 | 8.084.900 | (12.044.490) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 07 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 20.129.390 | 8.084.900 | (12.044.490) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 07 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 20.129.390 | 8.084.900 | (12.044.490) | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 07 | 2.01 | 03 | | | | | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 30.425.180 | 79.996.066 | 49.570.886 | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 07 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 30.425.180 | 79.996.066 | 49.570.886 | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 07 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 0 | 2.040.000 | 2.040.000 | |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 07 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 30.425.180 | 77.956.066 | 47.530.886 | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **16.776.437.451** | **15.906.514.118** | **(869.923.333)** | |
| | | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(16.776.437.451)** | **(15.906.514.118)** | **869.923.333** | |
| **0** | **00** | **3.25.3.27.2.09.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **2** | **22** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | **280.611.600** | **840.695.760** | **560.084.160** | |
| **2** | **22** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **280.611.600** | **798.345.760** | **517.734.160** | |
| **2** | **22** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **0** | **131.604.000** | **131.604.000** | |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 0 | 131.604.000 | 131.604.000 | |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 131.604.000 | 131.604.000 | |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 131.604.000 | 131.604.000 | |
| **2** | **22** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **280.611.600** | **666.741.760** | **386.130.160** | |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 280.611.600 | 666.741.760 | 386.130.160 | |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 280.611.600 | 666.741.760 | 386.130.160 | |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 280.611.600 | 666.741.760 | 386.130.160 | |
| **2** | **22** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **0** | **42.350.000** | **42.350.000** | |
| **2** | **22** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **0** | **42.350.000** | **42.350.000** | |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | | | | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | 0 | 42.350.000 | 42.350.000 | |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 42.350.000 | 42.350.000 | |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 42.350.000 | 42.350.000 | |
| **3** | **26** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | **8.258.324.216** | **8.732.005.661** | **473.681.445** | |
| **3** | **26** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **221.745.313** | **1.176.020.648** | **954.275.335** | |
| **3** | **26** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** | **221.745.313** | **1.176.020.648** | **954.275.335** | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | | | | | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 0 | 127.500.000 | 127.500.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 127.500.000 | 127.500.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 127.500.000 | 127.500.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | | | | | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 221.745.313 | 1.048.520.648 | 826.775.335 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 149.995.313 | 998.520.648 | 848.525.335 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 0 | 680.000 | 680.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 149.995.313 | 997.840.648 | 847.845.335 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 71.750.000 | 50.000.000 | (21.750.000) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 71.750.000 | 50.000.000 | (21.750.000) | |
| **3** | **26** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **396.054.423** | **463.877.674** | **67.823.251** | |
| **3** | **26** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **396.054.423** | **463.877.674** | **67.823.251** | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | | | | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 0 | 210.870.000 | 210.870.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 210.870.000 | 210.870.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 210.870.000 | 210.870.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | | | | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata | 396.054.423 | 253.007.674 | (143.046.749) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Kabupaten/Kota | | | | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 396.054.423 | 253.007.674 | (143.046.749) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 396.054.423 | 253.007.674 | (143.046.749) | |
| **3** | **26** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **606.600.000** | **606.600.000** | **0** | |
| **3** | **26** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | **606.600.000** | **606.600.000** | **0** | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | 02 | | | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 606.600.000 | 606.600.000 | 0 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 606.600.000 | 606.600.000 | 0 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 606.600.000 | 606.600.000 | 0 | |
| **3** | **26** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **7.033.924.480** | **6.485.507.339** | **(548.417.141)** | |
| **3** | **26** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **162.833.600** | **200.549.264** | **37.715.664** | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 162.833.600 | 200.549.264 | 37.715.664 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 162.833.600 | 200.549.264 | 37.715.664 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 162.833.600 | 200.549.264 | 37.715.664 | |
| **3** | **26** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **4.569.696.261** | **3.766.173.838** | **(803.522.423)** | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.342.876.261 | 3.581.353.838 | (761.522.423) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 4.342.876.261 | 3.581.353.838 | (761.522.423) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 4.342.876.261 | 3.581.353.838 | (761.522.423) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 226.820.000 | 184.820.000 | (42.000.000) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 226.820.000 | 184.820.000 | (42.000.000) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 226.820.000 | 184.820.000 | (42.000.000) | |
| **3** | **26** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **01** | **2.05** | **00** | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **540.113.000** | **662.782.785** | **122.669.785** | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 10 | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 200.250.000 | 221.903.000 | 21.653.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 10 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 200.250.000 | 221.903.000 | 21.653.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 10 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 200.250.000 | 221.903.000 | 21.653.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 11 | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 339.863.000 | 440.879.785 | 101.016.785 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 11 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 339.863.000 | 440.879.785 | 101.016.785 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 11 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 339.863.000 | 440.879.785 | 101.016.785 | |
| **3** | **26** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **148.642.000** | **189.283.946** | **40.641.946** | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 36.264.000 | 40.143.000 | 3.879.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 36.264.000 | 40.143.000 | 3.879.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.264.000 | 40.143.000 | 3.879.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 22.646.000 | 30.500.000 | 7.854.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 22.646.000 | 30.500.000 | 7.854.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.646.000 | 30.500.000 | 7.854.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.332.000 | 33.840.000 | 3.508.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 30.332.000 | 33.840.000 | 3.508.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.332.000 | 33.840.000 | 3.508.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 14.400.000 | 20.310.000 | 5.910.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 14.400.000 | 20.310.000 | 5.910.000 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.400.000 | 20.310.000 | 5.910.000 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5.000.000 | 4.500.000 | (500.000) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 5.000.000 | 4.500.000 | (500.000) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | 4.500.000 | (500.000) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40.000.000 | 59.990.946 | 19.990.946 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 40.000.000 | 59.990.946 | 19.990.946 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000 | 59.990.946 | 19.990.946 | |
| **3** | **26** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.239.937.089** | **1.296.784.976** | **56.847.887** | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 53.690.000 | 53.345.000 | (345.000) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 53.690.000 | 53.345.000 | (345.000) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 53.690.000 | 53.345.000 | (345.000) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 74.369.265 | 74.369.265 | 0 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 74.369.265 | 74.369.265 | 0 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 74.369.265 | 74.369.265 | 0 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13.131.600 | 8.834.000 | (4.297.600) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 8.131.600 | 8.834.000 | 702.400 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 8.131.600 | 8.834.000 | 702.400 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.098.746.224 | 1.160.236.711 | 61.490.487 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.098.746.224 | 1.160.236.711 | 61.490.487 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.098.746.224 | 1.160.236.711 | 61.490.487 | |
| **3** | **26** | **3.26.2.22.0.00.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **372.702.530** | **369.932.530** | **(2.770.000)** | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5.242.530 | 5.242.530 | 0 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 5.242.530 | 5.242.530 | 0 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 5.242.530 | 5.242.530 | 0 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.460.000 | 17.460.000 | 0 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 17.460.000 | 17.460.000 | 0 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 17.460.000 | 17.460.000 | 0 | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 350.000.000 | 347.230.000 | (2.770.000) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 350.000.000 | 347.230.000 | (2.770.000) | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 350.000.000 | 347.230.000 | (2.770.000) | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **8.538.935.816** | **9.572.701.421** | **1.033.765.605** | |
| | | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(8.538.935.816)** | **(9.572.701.421)** | **(1.033.765.605)** | |
| 0 | 00 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 00 | 0.00 | 00 | 6 | | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 SEKRETARIAT DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **2** | **23** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **983.331.100** | **919.317.700** | **(64.013.400)** | |
| **2** | **23** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **983.331.100** | **919.317.700** | **(64.013.400)** | |
| **2** | **23** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **721.031.100** | **673.289.700** | **(47.741.400)** | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | | | | | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 558.081.100 | 517.839.700 | (40.241.400) | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 456.121.100 | 437.839.700 | (18.281.400) | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 456.121.100 | 437.839.700 | (18.281.400) | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 101.960.000 | 80.000.000 | (21.960.000) | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 21.960.000 | 0 | (21.960.000) | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 2 | 05 | | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | | | | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 99.480.000 | 91.980.000 | (7.500.000) | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 99.480.000 | 91.980.000 | (7.500.000) | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 99.480.000 | 91.980.000 | (7.500.000) | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | | | | | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 63.470.000 | 63.470.000 | 0 | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 63.470.000 | 63.470.000 | 0 | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 63.470.000 | 63.470.000 | 0 | |
| **2** | **23** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **262.300.000** | **246.028.000** | **(16.272.000)** | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | | | | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 242.050.000 | 225.778.000 | (16.272.000) | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 242.050.000 | 225.778.000 | (16.272.000) | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 242.050.000 | 225.778.000 | (16.272.000) | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | | | | | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 20.250.000 | 20.250.000 | 0 | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 20.250.000 | 20.250.000 | 0 | |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 20.250.000 | 20.250.000 | 0 | |
| **2** | **24** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | **61.308.000** | **38.768.000** | **(22.540.000)** | |
| **2** | **24** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **61.308.000** | **38.768.000** | **(22.540.000)** | |
| **2** | **24** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **61.308.000** | **38.768.000** | **(22.540.000)** | |
| 2 | 24 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | | | | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 61.308.000 | 38.768.000 | (22.540.000) | |
| 2 | 24 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 61.308.000 | 38.768.000 | (22.540.000) | |
| 2 | 24 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 61.308.000 | 38.768.000 | (22.540.000) | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | **55.424.316.411** | **54.173.019.913** | **(1.251.296.498)** | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **12.042.888.300** | **11.625.848.300** | **(417.040.000)** | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **403.313.200** | **403.313.200** | **0** | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | | | | Penataan Administrasi Pemerintahan | 262.609.200 | 262.609.200 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 262.609.200 | 262.609.200 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 262.609.200 | 262.609.200 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 140.704.000 | 140.704.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 140.704.000 | 140.704.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 140.704.000 | 140.704.000 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 SEKRETARIAT DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **10.929.250.100** | **10.396.250.100** | **(533.000.000)** | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 3.756.238.700 | 4.106.238.700 | 350.000.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 3.737.238.700 | 3.955.660.700 | 218.422.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 1.030.000 | 0 | (1.030.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.456.016.000 | 1.675.468.000 | 219.452.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 2.280.192.700 | 2.280.192.700 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 19.000.000 | 150.578.000 | 131.578.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19.000.000 | 150.578.000 | 131.578.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 7.173.011.400 | 6.290.011.400 | (883.000.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 7.173.011.400 | 6.290.011.400 | (883.000.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 9.270.000 | 0 | (9.270.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.163.741.400 | 6.290.011.400 | (873.730.000) | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **02** | **2.03** | **00** | | | | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **710.325.000** | **826.285.000** | **115.960.000** | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.03 | 01 | | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 251.894.000 | 342.854.000 | 90.960.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 251.894.000 | 342.854.000 | 90.960.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 251.894.000 | 342.854.000 | 90.960.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | 260.630.000 | 269.630.000 | 9.000.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 260.630.000 | 269.630.000 | 9.000.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 260.630.000 | 269.630.000 | 9.000.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | | | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 197.801.000 | 213.801.000 | 16.000.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 197.801.000 | 213.801.000 | 16.000.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 197.801.000 | 213.801.000 | 16.000.000 | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **1.825.854.940** | **1.871.336.940** | **45.482.000** | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **315.306.500** | **367.210.500** | **51.904.000** | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 167.486.200 | 212.961.200 | 45.475.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 167.486.200 | 212.961.200 | 45.475.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 167.486.200 | 212.961.200 | 45.475.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | | | | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 68.932.200 | 100.503.200 | 31.571.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 68.932.200 | 100.503.200 | 31.571.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.932.200 | 100.503.200 | 31.571.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | | | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | 78.888.100 | 53.746.100 | (25.142.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 78.888.100 | 53.746.100 | (25.142.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 78.888.100 | 53.746.100 | (25.142.000) | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **03** | **2.02** | **00** | | | | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **314.556.100** | **362.556.100** | **48.000.000** | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | | | | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 75.327.100 | 75.327.100 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 75.327.100 | 75.327.100 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 75.327.100 | 75.327.100 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | | | | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 172.632.000 | 220.632.000 | 48.000.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 172.632.000 | 220.632.000 | 48.000.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 172.632.000 | 220.632.000 | 48.000.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | | | | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 66.597.000 | 66.597.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 66.597.000 | 66.597.000 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 SEKRETARIAT DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 66.597.000 | 66.597.000 | 0 | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **03** | **2.03** | **00** | | | | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **961.524.940** | **959.006.940** | **(2.518.000)** | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | | | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 394.882.440 | 411.916.440 | 17.034.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 394.882.440 | 411.916.440 | 17.034.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 0 | 25.060.000 | 25.060.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 394.882.440 | 386.856.440 | (8.026.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | | | | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | 226.099.000 | 206.547.000 | (19.552.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 224.099.000 | 204.547.000 | (19.552.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 224.099.000 | 204.547.000 | (19.552.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | | | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 340.543.500 | 340.543.500 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 340.543.500 | 340.543.500 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 340.543.500 | 340.543.500 | 0 | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **03** | **2.04** | **00** | | | | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | **234.467.400** | **182.563.400** | **(51.904.000)** | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.04 | 01 | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 85.794.200 | 40.319.200 | (45.475.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.04 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 85.794.200 | 40.319.200 | (45.475.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.04 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 85.794.200 | 40.319.200 | (45.475.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.04 | 02 | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 57.986.100 | 26.415.100 | (31.571.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.04 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 57.986.100 | 26.415.100 | (31.571.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.04 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.986.100 | 26.415.100 | (31.571.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.04 | 03 | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 90.687.100 | 115.829.100 | 25.142.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.04 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 90.687.100 | 115.829.100 | 25.142.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.04 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.687.100 | 115.829.100 | 25.142.000 | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **41.555.573.171** | **40.675.834.673** | **(879.738.498)** | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **17.567.066.639** | **16.166.448.839** | **(1.400.617.800)** | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16.477.616.639 | 15.348.048.839 | (1.129.567.800) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 16.477.616.639 | 15.348.048.839 | (1.129.567.800) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 16.477.616.639 | 15.348.048.839 | (1.129.567.800) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.089.450.000 | 818.400.000 | (271.050.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.089.450.000 | 818.400.000 | (271.050.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 1.089.450.000 | 803.400.000 | (286.050.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **01** | **2.05** | **00** | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **379.890.200** | **12.000.000** | **(367.890.200)** | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 379.890.200 | 12.000.000 | (367.890.200) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 379.890.200 | 12.000.000 | (367.890.200) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 379.890.200 | 12.000.000 | (367.890.200) | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **7.931.082.880** | **9.215.933.680** | **1.284.850.800** | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 535.946.680 | 336.146.680 | (199.800.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 535.946.680 | 336.146.680 | (199.800.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 SEKRETARIAT DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 535.946.680 | 336.146.680 | (199.800.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 304.204.200 | 351.168.700 | 46.964.500 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 304.204.200 | 351.168.700 | 46.964.500 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 304.204.200 | 351.168.700 | 46.964.500 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 123.256.000 | 123.256.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 123.256.000 | 123.256.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 123.256.000 | 123.256.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1.803.718.000 | 2.532.776.300 | 729.058.300 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.803.718.000 | 2.532.776.300 | 729.058.300 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.803.718.000 | 2.532.776.300 | 729.058.300 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 247.070.000 | 309.970.000 | 62.900.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 247.070.000 | 309.970.000 | 62.900.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 247.070.000 | 309.970.000 | 62.900.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.896.900.000 | 1.896.820.000 | (80.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.896.900.000 | 1.896.820.000 | (80.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.896.900.000 | 1.896.820.000 | (80.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3.019.988.000 | 3.665.796.000 | 645.808.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.019.988.000 | 3.665.796.000 | 645.808.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.019.988.000 | 3.665.796.000 | 645.808.000 | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.484.856.510** | **469.036.310** | **(1.015.820.200)** | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.07 | 07 | | | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 1.484.856.510 | 469.036.310 | (1.015.820.200) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.07 | 07 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 23.509.800 | 23.509.800 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.07 | 07 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 23.509.800 | 23.509.800 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.07 | 07 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 1.484.856.510 | 445.526.510 | (1.039.330.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.07 | 07 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.057.230.000 | 246.500.000 | (810.730.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.07 | 07 | 5 | 2 | 03 | | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 427.626.510 | 199.026.510 | (228.600.000) | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **9.076.657.899** | **9.789.902.101** | **713.244.202** | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 199.499.500 | 199.499.500 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 199.499.500 | 199.499.500 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 199.499.500 | 199.499.500 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.637.169.455 | 1.637.169.455 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.637.169.455 | 1.637.169.455 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.637.169.455 | 1.637.169.455 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 7.239.988.944 | 7.953.233.146 | 713.244.202 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 7.239.988.944 | 7.953.233.146 | 713.244.202 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 379.621.848 | 359.611.764 | (20.010.084) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 6.860.367.096 | 7.593.621.382 | 733.254.286 | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.554.129.848** | **1.247.585.108** | **(306.544.740)** | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 527.111.260 | 527.111.260 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 527.111.260 | 527.111.260 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 SEKRETARIAT DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 527.111.260 | 527.111.260 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 161.129.740 | 139.670.000 | (21.459.740) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 161.129.740 | 139.670.000 | (21.459.740) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 161.129.740 | 139.670.000 | (21.459.740) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 865.888.848 | 580.803.848 | (285.085.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 865.888.848 | 580.803.848 | (285.085.000) | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 865.888.848 | 580.803.848 | (285.085.000) | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **01** | **2.11** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **1.275.336.215** | **1.275.336.215** | **0** | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.11 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 194.913.655 | 194.913.655 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.11 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 194.913.655 | 194.913.655 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.11 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 194.913.655 | 194.913.655 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.11 | 02 | | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 96.942.000 | 96.942.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.11 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 96.942.000 | 96.942.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.11 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 96.942.000 | 96.942.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.11 | 03 | | | | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.11 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.11 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.11 | 04 | | | | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 963.480.560 | 963.480.560 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.11 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 963.480.560 | 963.480.560 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.11 | 04 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 963.480.560 | 963.480.560 | 0 | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **01** | **2.12** | **00** | | | | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **629.121.600** | **632.201.600** | **3.080.000** | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.12 | 01 | | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 152.372.400 | 152.372.400 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.12 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 152.372.400 | 152.372.400 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.12 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 152.372.400 | 152.372.400 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.12 | 02 | | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 144.114.000 | 144.114.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.12 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 144.114.000 | 144.114.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.12 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 144.114.000 | 144.114.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.12 | 03 | | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 332.635.200 | 335.715.200 | 3.080.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.12 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 332.635.200 | 335.715.200 | 3.080.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.12 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 332.635.200 | 335.715.200 | 3.080.000 | |
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **01** | **2.13** | **00** | | | | **Penataan Organisasi** | **487.055.700** | **487.055.700** | **0** | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.13 | 01 | | | | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 157.980.000 | 157.980.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.13 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 157.980.000 | 157.980.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.13 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 157.980.000 | 157.980.000 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.13 | 02 | | | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 154.250.200 | 154.250.200 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.13 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 154.250.200 | 154.250.200 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.13 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 154.250.200 | 154.250.200 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.13 | 03 | | | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 174.825.500 | 174.825.500 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.13 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 174.825.500 | 174.825.500 | 0 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.13 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 174.825.500 | 174.825.500 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 SEKRETARIAT DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **01** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **01** | **2.14** | **00** | | | | | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **1.170.375.680** | **1.380.335.120** | **209.959.440** | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.14 | 01 | | | | | Fasilitasi Keprotokolan | 385.750.000 | 455.750.000 | 70.000.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.14 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 385.750.000 | 455.750.000 | 70.000.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.14 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 385.750.000 | 455.750.000 | 70.000.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.14 | 02 | | | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 201.022.000 | 270.996.000 | 69.974.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.14 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 201.022.000 | 270.996.000 | 69.974.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.14 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 201.022.000 | 270.996.000 | 69.974.000 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.14 | 03 | | | | | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 583.603.680 | 653.589.120 | 69.985.440 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.14 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 543.603.680 | 567.044.920 | 23.441.240 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.14 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 543.603.680 | 567.044.920 | 23.441.240 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.14 | 03 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 40.000.000 | 86.544.200 | 46.544.200 | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.14 | 03 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 40.000.000 | 86.544.200 | 46.544.200 | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **56.468.955.511** | **55.131.105.613** | **(1.337.849.898)** | |
| | | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(56.468.955.511)** | **(55.131.105.613)** | **1.337.849.898** | |
| **0** | **00** | **4.01.2.23.2.24.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **4** | **02** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **SEKRETARIAT DPRD** | **34.935.034.720** | **37.190.850.702** | **2.255.815.982** | |
| **4** | **02** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **15.523.677.460** | **17.064.408.460** | **1.540.731.000** | |
| **4** | **02** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **4.851.236.800** | **4.284.059.400** | **(567.177.400)** | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | | | | | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 4.264.039.500 | 4.284.059.400 | 20.019.900 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 4.122.011.500 | 4.122.011.400 | (100) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 4.122.011.500 | 4.122.011.400 | (100) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 142.028.000 | 162.048.000 | 20.020.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 142.028.000 | 162.048.000 | 20.020.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | | | | | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | 587.197.300 | 0 | (587.197.300) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 587.197.300 | 0 | (587.197.300) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 587.197.300 | 0 | (587.197.300) | |
| **4** | **02** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **692.020.100** | **792.020.100** | **100.000.000** | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | | | | Pembahasan KUA dan PPAS | 22.432.600 | 72.432.600 | 50.000.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 22.432.600 | 72.432.600 | 50.000.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 22.432.600 | 72.432.600 | 50.000.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | | | | | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 45.317.100 | 45.317.100 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 45.317.100 | 45.317.100 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 45.317.100 | 45.317.100 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | | | | | Pembahasan APBD | 321.105.400 | 371.105.400 | 50.000.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 321.105.400 | 371.105.400 | 50.000.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 680.000 | 680.000 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 320.425.400 | 370.425.400 | 50.000.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | | | | | Pembahasan APBD Perubahan | 303.165.000 | 303.165.000 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 303.165.000 | 303.165.000 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 680.000 | 680.000 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 302.485.000 | 302.485.000 | 0 | |
| **4** | **02** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **2.04** | **00** | | | | | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **3.428.475.960** | **3.653.067.960** | **224.592.000** | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 02 | | | | | Pendalaman Tugas DPRD | 768.661.000 | 896.661.000 | 128.000.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 768.661.000 | 896.661.000 | 128.000.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 768.661.000 | 896.661.000 | 128.000.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 03 | | | | | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 1.565.534.000 | 2.139.600.000 | 574.066.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.565.534.000 | 2.050.830.000 | 485.296.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.565.534.000 | 2.050.830.000 | 485.296.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 03 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 0 | 88.770.000 | 88.770.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 03 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 88.770.000 | 88.770.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 05 | | | | | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 616.806.960 | 616.806.960 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 616.806.960 | 616.806.960 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 616.806.960 | 616.806.960 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 07 | | | | | Penyusunan Program Kerja DPRD | 477.474.000 | 0 | (477.474.000) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 07 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 477.474.000 | 0 | (477.474.000) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 07 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 477.474.000 | 0 | (477.474.000) | |
| **4** | **02** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **2.05** | **00** | | | | | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **2.170.516.100** | **2.953.832.600** | **783.316.500** | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 01 | | | | | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 218.303.400 | 218.303.400 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 218.303.400 | 218.303.400 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 218.303.400 | 218.303.400 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 02 | | | | | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 452.899.700 | 486.559.700 | 33.660.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 452.899.700 | 486.559.700 | 33.660.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 452.899.700 | 486.559.700 | 33.660.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 03 | | | | | Pelaksanaan Reses | 1.499.313.000 | 2.248.969.500 | 749.656.500 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.499.313.000 | 2.248.969.500 | 749.656.500 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.499.313.000 | 2.248.969.500 | 749.656.500 | |
| **4** | **02** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **2.08** | **00** | | | | | **Fasilitasi Tugas DPRD** | **4.381.428.500** | **5.381.428.400** | **999.999.900** | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.08 | 01 | | | | | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 4.381.428.500 | 5.381.428.400 | 999.999.900 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 4.381.428.500 | 5.381.428.400 | 999.999.900 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 4.381.428.500 | 5.381.428.400 | 999.999.900 | |
| **4** | **02** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **19.411.357.260** | **20.126.442.242** | **715.084.982** | |
| **4** | **02** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **108.148.800** | **85.906.400** | **(22.242.400)** | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 89.744.600 | 82.942.100 | (6.802.500) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 89.744.600 | 82.942.100 | (6.802.500) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 89.744.600 | 82.942.100 | (6.802.500) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.000.900 | 500.000 | (3.500.900) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 4.000.900 | 500.000 | (3.500.900) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.900 | 500.000 | (3.500.900) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 03 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.919.700 | 452.400 | (3.467.300) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.919.700 | 452.400 | (3.467.300) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.919.700 | 452.400 | (3.467.300) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 04 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.949.900 | 140.000 | (2.809.900) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.949.900 | 140.000 | (2.809.900) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.949.900 | 140.000 | (2.809.900) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 05 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.513.700 | 1.013.500 | (1.500.200) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.513.700 | 1.013.500 | (1.500.200) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.513.700 | 1.013.500 | (1.500.200) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 06 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.955.100 | 555.100 | (2.400.000) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.955.100 | 555.100 | (2.400.000) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.955.100 | 555.100 | (2.400.000) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.064.900 | 303.300 | (1.761.600) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.064.900 | 303.300 | (1.761.600) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.064.900 | 303.300 | (1.761.600) | |
| **4** | **02** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **14.192.740.496** | **13.934.118.720** | **(258.621.776)** | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.919.544.096 | 13.699.308.720 | (220.235.376) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 13.919.544.096 | 13.699.308.720 | (220.235.376) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 13.919.544.096 | 13.699.308.720 | (220.235.376) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 270.600.000 | 234.600.000 | (36.000.000) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 270.600.000 | 234.600.000 | (36.000.000) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 270.600.000 | 234.600.000 | (36.000.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.596.400 | 210.000 | (2.386.400) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.596.400 | 210.000 | (2.386.400) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.596.400 | 210.000 | (2.386.400) | |
| **4** | **02** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.05** | **00** | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **97.968.000** | **308.258.500** | **210.290.500** | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 308.258.500 | 308.258.500 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 308.258.500 | 308.258.500 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 308.258.500 | 308.258.500 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 11 | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 97.968.000 | 0 | (97.968.000) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 11 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 97.968.000 | 0 | (97.968.000) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 11 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 97.968.000 | 0 | (97.968.000) | |
| **4** | **02** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.046.472.300** | **1.385.109.210** | **338.636.910** | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 70.794.000 | 88.714.100 | 17.920.100 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 70.794.000 | 88.714.100 | 17.920.100 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 70.794.000 | 88.714.100 | 17.920.100 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 118.683.000 | 264.908.950 | 146.225.950 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 118.683.000 | 264.908.950 | 146.225.950 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 118.683.000 | 264.908.950 | 146.225.950 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 60.477.400 | 98.202.560 | 37.725.160 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 60.477.400 | 74.860.560 | 14.383.160 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 60.477.400 | 74.860.560 | 14.383.160 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 0 | 23.342.000 | 23.342.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 23.342.000 | 23.342.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 203.515.900 | 226.392.600 | 22.876.700 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 203.515.900 | 226.392.600 | 22.876.700 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 203.515.900 | 226.392.600 | 22.876.700 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 139.300.000 | 120.383.000 | (18.917.000) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 139.300.000 | 120.383.000 | (18.917.000) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 139.300.000 | 120.383.000 | (18.917.000) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100.010.000 | 100.010.000 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 100.010.000 | 100.010.000 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 100.010.000 | 100.010.000 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 303.692.000 | 436.498.000 | 132.806.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 303.692.000 | 436.498.000 | 132.806.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 303.692.000 | 436.498.000 | 132.806.000 | |
| **4** | **02** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.516.760.164** | **2.561.474.312** | **44.714.148** | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 179.630.600 | 194.091.200 | 14.460.600 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 179.630.600 | 194.091.200 | 14.460.600 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 179.630.600 | 194.091.200 | 14.460.600 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 245.499.068 | 159.499.068 | (86.000.000) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 245.499.068 | 159.499.068 | (86.000.000) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 245.499.068 | 159.499.068 | (86.000.000) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.091.630.496 | 2.207.884.044 | 116.253.548 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.091.630.496 | 2.207.884.044 | 116.253.548 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.091.630.496 | 2.207.884.044 | 116.253.548 | |
| **4** | **02** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **428.048.700** | **563.525.700** | **135.477.000** | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 87.591.200 | 87.591.200 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 87.591.200 | 87.591.200 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 87.591.200 | 87.591.200 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 56.550.000 | 56.550.000 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 56.550.000 | 56.550.000 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 56.550.000 | 56.550.000 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 283.907.500 | 419.384.500 | 135.477.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 283.907.500 | 419.384.500 | 135.477.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 283.907.500 | 419.384.500 | 135.477.000 | |
| **4** | **02** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.15** | **00** | | | | | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **670.593.000** | **929.753.000** | **259.160.000** | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.15 | 02 | | | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 0 | 259.160.000 | 259.160.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.15 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 259.160.000 | 259.160.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.15 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 259.160.000 | 259.160.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.15 | 03 | | | | | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 670.593.000 | 670.593.000 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.15 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 670.593.000 | 670.593.000 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.15 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 670.593.000 | 670.593.000 | 0 | |
| **4** | **02** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.16** | **00** | | | | | **Layanan Administrasi DPRD** | **350.625.800** | **358.296.400** | **7.670.600** | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.16 | 01 | | | | | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | 98.485.400 | 50.485.000 | (48.000.400) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.16 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 98.485.400 | 50.485.000 | (48.000.400) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.16 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 450.000 | 450.000 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.16 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 98.035.400 | 50.035.000 | (48.000.400) | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.16 | 03 | | | | | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 252.140.400 | 307.811.400 | 55.671.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.16 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 252.140.400 | 267.771.400 | 15.631.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.16 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 680.000 | 680.000 | 0 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.16 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 251.460.400 | 267.091.400 | 15.631.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.16 | 03 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 0 | 40.040.000 | 40.040.000 | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.16 | 03 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 40.040.000 | 40.040.000 | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **34.935.034.720** | **37.190.850.702** | **2.255.815.982** | |
| | | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(34.935.034.720)** | **(37.190.850.702)** | **(2.255.815.982)** | |
| **0** | **00** | **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **5** | **01** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **PERENCANAAN** | **12.683.846.195** | **9.700.689.280** | **(2.983.156.915)** | |
| **5** | **01** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **895.937.600** | **455.852.880** | **(440.084.720)** | |
| **5** | **01** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **543.270.100** | **280.248.800** | **(263.021.300)** | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | | | | | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | 4.570.000 | 675.000 | (3.895.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 4.570.000 | 675.000 | (3.895.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 4.570.000 | 675.000 | (3.895.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | | | | | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 308.450.200 | 113.829.400 | (194.620.800) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 308.450.200 | 113.829.400 | (194.620.800) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 1.360.000 | 0 | (1.360.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 307.090.200 | 113.829.400 | (193.260.800) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | | | | | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | 54.180.000 | 19.330.000 | (34.850.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 54.180.000 | 19.330.000 | (34.850.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 54.180.000 | 19.330.000 | (34.850.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | | | | | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 176.069.900 | 146.414.400 | (29.655.500) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 176.069.900 | 146.414.400 | (29.655.500) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 680.000 | 680.000 | 0 | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 175.389.900 | 145.734.400 | (29.655.500) | |
| **5** | **01** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **101.440.400** | **31.976.040** | **(69.464.360)** | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | | | | | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | 101.440.400 | 31.976.040 | (69.464.360) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 101.440.400 | 31.976.040 | (69.464.360) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 680.000 | 0 | (680.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 100.760.400 | 31.976.040 | (68.784.360) | |
| **5** | **01** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **02** | **2.03** | **00** | | | | | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **251.227.100** | **143.628.040** | **(107.599.060)** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | | | | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 251.227.100 | 143.628.040 | (107.599.060) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 251.227.100 | 143.628.040 | (107.599.060) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 1.360.000 | 0 | (1.360.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 249.867.100 | 143.628.040 | (106.239.060) | |
| **5** | **01** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **1.208.465.000** | **502.453.027** | **(706.011.973)** | |
| **5** | **01** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **459.793.600** | **227.297.343** | **(232.496.257)** | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 133.428.000 | 83.340.682 | (50.087.318) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 133.428.000 | 83.340.682 | (50.087.318) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 133.428.000 | 83.340.682 | (50.087.318) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 57.004.800 | 21.885.000 | (35.119.800) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 57.004.800 | 21.885.000 | (35.119.800) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 680.000 | 0 | (680.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.324.800 | 21.885.000 | (34.439.800) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 6.875.000 | 0 | (6.875.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 6.875.000 | 0 | (6.875.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.875.000 | 0 | (6.875.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 05 | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 128.928.000 | 61.090.105 | (67.837.895) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 128.928.000 | 61.090.105 | (67.837.895) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 128.928.000 | 61.090.105 | (67.837.895) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 06 | | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 107.182.800 | 43.002.550 | (64.180.250) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 107.182.800 | 43.002.550 | (64.180.250) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 680.000 | 0 | (680.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.502.800 | 43.002.550 | (63.500.250) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 07 | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 26.375.000 | 17.979.006 | (8.395.994) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 26.375.000 | 17.979.006 | (8.395.994) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.375.000 | 17.979.006 | (8.395.994) | |
| **5** | **01** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **03** | **2.02** | **00** | | | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **274.641.400** | **93.419.674** | **(181.221.726)** | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 52.148.000 | 30.705.013 | (21.442.987) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 52.148.000 | 30.705.013 | (21.442.987) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.148.000 | 30.705.013 | (21.442.987) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 49.351.600 | 20.788.661 | (28.562.939) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 49.351.600 | 20.788.661 | (28.562.939) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 680.000 | 0 | (680.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.671.600 | 20.788.661 | (27.882.939) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 129.650.000 | 17.200.000 | (112.450.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 129.650.000 | 17.200.000 | (112.450.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 129.650.000 | 17.200.000 | (112.450.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 05 | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 16.448.000 | 12.747.200 | (3.700.800) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 16.448.000 | 12.747.200 | (3.700.800) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.448.000 | 12.747.200 | (3.700.800) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 06 | | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 12.493.800 | 6.328.800 | (6.165.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 12.493.800 | 6.328.800 | (6.165.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 06 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 680.000 | 0 | (680.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.813.800 | 6.328.800 | (5.485.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 07 | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 14.550.000 | 5.650.000 | (8.900.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 14.550.000 | 5.650.000 | (8.900.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.550.000 | 5.650.000 | (8.900.000) | |
| **5** | **01** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **03** | **2.03** | **00** | | | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **474.030.000** | **181.736.010** | **(292.293.990)** | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 107.174.000 | 45.075.027 | (62.098.973) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 107.174.000 | 45.075.027 | (62.098.973) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 107.174.000 | 45.075.027 | (62.098.973) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 49.871.600 | 16.984.600 | (32.887.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 49.871.600 | 16.984.600 | (32.887.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 680.000 | 0 | (680.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.191.600 | 16.984.600 | (32.207.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang | 114.350.000 | 20.250.000 | (94.100.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Infrastruktur | | | | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 114.350.000 | 20.250.000 | (94.100.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 114.350.000 | 20.250.000 | (94.100.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 05 | | | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 16.448.000 | 12.001.283 | (4.446.717) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 16.448.000 | 12.001.283 | (4.446.717) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.448.000 | 12.001.283 | (4.446.717) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 06 | | | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 155.636.400 | 80.774.600 | (74.861.800) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 155.636.400 | 80.774.600 | (74.861.800) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 680.000 | 0 | (680.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 154.956.400 | 80.774.600 | (74.181.800) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 07 | | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 30.550.000 | 6.650.500 | (23.899.500) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 30.550.000 | 6.650.500 | (23.899.500) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 30.550.000 | 6.650.500 | (23.899.500) | |
| **5** | **01** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **10.579.443.595** | **8.742.383.373** | **(1.837.060.222)** | |
| **5** | **01** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **80.755.000** | **24.155.000** | **(56.600.000)** | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 62.905.000 | 19.745.000 | (43.160.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 62.905.000 | 19.745.000 | (43.160.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 680.000 | 680.000 | 0 | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 62.225.000 | 19.065.000 | (43.160.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.850.000 | 4.410.000 | (13.440.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 17.850.000 | 4.410.000 | (13.440.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.850.000 | 4.410.000 | (13.440.000) | |
| **5** | **01** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.594.281.250** | **4.814.495.654** | **(779.785.596)** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.523.226.250 | 4.791.785.654 | (731.440.596) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 5.523.226.250 | 4.791.785.654 | (731.440.596) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 5.523.226.250 | 4.791.785.654 | (731.440.596) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 71.055.000 | 22.710.000 | (48.345.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 71.055.000 | 22.710.000 | (48.345.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 680.000 | 680.000 | 0 | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 70.375.000 | 22.030.000 | (48.345.000) | |
| **5** | **01** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **01** | **2.05** | **00** | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **335.676.000** | **64.763.000** | **(270.913.000)** | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 125.590.000 | 0 | (125.590.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 125.590.000 | 0 | (125.590.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 2.040.000 | 0 | (2.040.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 123.550.000 | 0 | (123.550.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 210.086.000 | 64.763.000 | (145.323.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 210.086.000 | 64.763.000 | (145.323.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 210.086.000 | 64.763.000 | (145.323.000) | |
| **5** | **01** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.588.634.900** | **1.301.497.400** | **(287.137.500)** | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 17.732.000 | 14.372.000 | (3.360.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 15.732.000 | 14.372.000 | (1.360.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 1.360.000 | 0 | (1.360.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.372.000 | 14.372.000 | 0 | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 2.000.000 | 0 | (2.000.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.000.000 | 0 | (2.000.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 158.976.900 | 158.976.900 | 0 | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 158.976.900 | 158.976.900 | 0 | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 2.040.000 | 2.040.000 | 0 | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 156.936.900 | 156.936.900 | 0 | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 54.389.000 | 49.178.000 | (5.211.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 54.389.000 | 49.178.000 | (5.211.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 2.040.000 | 680.000 | (1.360.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 52.349.000 | 48.498.000 | (3.851.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 174.413.000 | 85.596.000 | (88.817.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 174.413.000 | 85.596.000 | (88.817.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 680.000 | 680.000 | 0 | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 173.733.000 | 84.916.000 | (88.817.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 111.540.000 | 106.960.000 | (4.580.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 111.540.000 | 106.960.000 | (4.580.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 2.040.000 | 1.360.000 | (680.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 109.500.000 | 105.600.000 | (3.900.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.000.000 | 420.000 | (2.580.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.000.000 | 420.000 | (2.580.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000 | 420.000 | (2.580.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 882.584.000 | 699.994.500 | (182.589.500) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 882.584.000 | 699.994.500 | (182.589.500) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 882.584.000 | 699.994.500 | (182.589.500) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 11 | | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 186.000.000 | 186.000.000 | 0 | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 11 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 186.000.000 | 186.000.000 | 0 | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 11 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 186.000.000 | 186.000.000 | 0 | |
| **5** | **01** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **789.674.500** | **456.784.500** | **(332.890.000)** | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 06 | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 45.780.000 | 0 | (45.780.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.780.000 | 0 | (2.780.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 06 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 680.000 | 0 | (680.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.100.000 | 0 | (2.100.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 06 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 43.000.000 | 0 | (43.000.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 06 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 43.000.000 | 0 | (43.000.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 743.894.500 | 456.784.500 | (287.110.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 743.894.500 | 456.784.500 | (287.110.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 2.040.000 | 680.000 | (1.360.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 741.854.500 | 456.104.500 | (285.750.000) | |
| **5** | **01** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.113.124.970** | **2.003.390.844** | **(109.734.126)** | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.000.000 | 5.000.000 | (5.000.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 10.000.000 | 5.000.000 | (5.000.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000 | 5.000.000 | (5.000.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 134.154.858 | 126.630.900 | (7.523.958) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 134.154.858 | 126.630.900 | (7.523.958) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 134.154.858 | 126.630.900 | (7.523.958) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.968.970.112 | 1.871.759.944 | (97.210.168) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.968.970.112 | 1.871.759.944 | (97.210.168) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 276.720.000 | 226.530.000 | (50.190.000) | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.692.250.112 | 1.645.229.944 | (47.020.168) | |
| **5** | **01** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **77.296.975** | **77.296.975** | **0** | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 48.370.475 | 48.370.475 | 0 | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 48.370.475 | 48.370.475 | 0 | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.370.475 | 48.370.475 | 0 | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28.926.500 | 28.926.500 | 0 | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 28.926.500 | 28.926.500 | 0 | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.926.500 | 28.926.500 | 0 | |
| **5** | **05** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **807.037.400** | **11.286.600** | **(795.750.800)** | |
| **5** | **05** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **807.037.400** | **11.286.600** | **(795.750.800)** | |
| **5** | **05** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **02** | **2.03** | **00** | | | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | **807.037.400** | **11.286.600** | **(795.750.800)** | |
| 5 | 05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 11 | | | | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 807.037.400 | 11.286.600 | (795.750.800) | |
| 5 | 05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 11 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 707.037.400 | 11.286.600 | (695.750.800) | |
| 5 | 05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 11 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 680.000 | 0 | (680.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 11 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 706.357.400 | 11.286.600 | (695.070.800) | |
| 5 | 05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 11 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 100.000.000 | 0 | (100.000.000) | |
| 5 | 05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 11 | 5 | 2 | 05 | | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 100.000.000 | 0 | (100.000.000) | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **13.490.883.595** | **9.711.975.880** | **(3.778.907.715)** | |
| | | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(13.490.883.595)** | **(9.711.975.880)** | **3.778.907.715** | |
| **0** | **00** | **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **4** | | | **PENDAPATAN DAERAH** | | | | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **4** | **1** | | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **40.661.242.655** | **41.450.650.040** | **789.407.385** | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 00 | 0.00 | 00 | 4 | 1 | 01 | Pajak Daerah | 20.111.728.377 | 20.111.728.377 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 00 | 0.00 | 00 | 4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | 4.190.959.515 | 4.190.959.515 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 00 | 0.00 | 00 | 4 | 1 | 03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.318.019.763 | 1.318.019.763 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 00 | 0.00 | 00 | 4 | 1 | 04 | Lain-lain PAD yang Sah | 15.040.535.000 | 15.829.942.385 | 789.407.385 | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **4** | **2** | | **PENDAPATAN TRANSFER** | **848.486.966.072** | **815.808.870.490** | **(32.678.095.582)** | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 00 | 0.00 | 00 | 4 | 2 | 01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 782.396.713.718 | 753.329.744.257 | (29.066.969.461) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 00 | 0.00 | 00 | 4 | 2 | 02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 66.090.252.354 | 62.479.126.233 | (3.611.126.121) | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **4** | **3** | | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **11.797.340.000** | **11.797.340.000** | **0** | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 00 | 0.00 | 00 | 4 | 3 | 03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 11.797.340.000 | 11.797.340.000 | 0 | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **900.945.548.727** | **869.056.860.530** | **(31.888.688.197)** | |
| **0** | **00** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | **BELANJA** | | | | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **KEUANGAN** | **163.967.526.118** | **148.012.957.293** | **(15.954.568.825)** | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **111.427.074.490** | **113.370.937.919** | **1.943.863.429** | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **2.292.680.000** | **2.510.366.000** | **217.686.000** | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | | | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 38.600.000 | 38.600.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 38.600.000 | 38.600.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.600.000 | 38.600.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 44.000.000 | 44.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 44.000.000 | 44.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.000.000 | 44.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 654.030.000 | 716.570.000 | 62.540.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 654.030.000 | 716.570.000 | 62.540.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 654.030.000 | 716.570.000 | 62.540.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 08 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 719.176.000 | 653.614.000 | (65.562.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 719.176.000 | 653.614.000 | (65.562.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 719.176.000 | 653.614.000 | (65.562.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 236.794.000 | 236.794.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 236.794.000 | 236.794.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 236.794.000 | 236.794.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 10 | | | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 174.784.000 | 336.368.000 | 161.584.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 10 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 174.784.000 | 336.368.000 | 161.584.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 10 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 174.784.000 | 336.368.000 | 161.584.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 11 | | | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 111.750.000 | 161.020.000 | 49.270.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 11 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 111.750.000 | 161.020.000 | 49.270.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 11 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 111.750.000 | 161.020.000 | 49.270.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 12 | | | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 31.212.000 | 31.212.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 12 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 31.212.000 | 31.212.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 12 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.212.000 | 31.212.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 13 | | | | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 182.334.000 | 192.188.000 | 9.854.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 182.334.000 | 192.188.000 | 9.854.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 182.334.000 | 192.188.000 | 9.854.000 | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **293.380.000** | **289.908.000** | **(3.472.000)** | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 09 | | | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | 131.542.000 | 128.070.000 | (3.472.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 131.542.000 | 128.070.000 | (3.472.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 131.542.000 | 128.070.000 | (3.472.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 11 | | | | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 161.838.000 | 161.838.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 11 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 161.838.000 | 161.838.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 11 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 161.838.000 | 161.838.000 | 0 | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **2.03** | **00** | | | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **863.494.700** | **862.778.700** | **(716.000)** | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | | | | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 60.359.000 | 60.359.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 60.359.000 | 60.359.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 60.359.000 | 60.359.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 2.818.100 | 2.818.100 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.818.100 | 2.818.100 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.818.100 | 2.818.100 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 04 | | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 472.923.600 | 397.807.600 | (75.116.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 472.923.600 | 397.807.600 | (75.116.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 472.923.600 | 397.807.600 | (75.116.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang | 35.680.000 | 35.680.000 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 35.680.000 | 35.680.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.680.000 | 35.680.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 06 | | | | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 555.000 | 555.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 555.000 | 555.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 555.000 | 555.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 07 | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 113.660.000 | 111.650.000 | (2.010.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 113.660.000 | 111.650.000 | (2.010.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 113.660.000 | 111.650.000 | (2.010.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 08 | | | | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2.765.000 | 2.765.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.765.000 | 2.765.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.765.000 | 2.765.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 09 | | | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 83.821.000 | 119.824.000 | 36.003.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 83.821.000 | 119.824.000 | 36.003.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 83.821.000 | 119.824.000 | 36.003.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 10 | | | | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 90.913.000 | 131.320.000 | 40.407.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 10 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 90.913.000 | 131.320.000 | 40.407.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 10 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.913.000 | 131.320.000 | 40.407.000 | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **2.04** | **00** | | | | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **107.128.139.790** | **108.866.959.219** | **1.738.819.429** | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 09 | | | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 09 | 5 | 3 | | BELANJA TIDAK TERDUGA | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 09 | 5 | 3 | 01 | Belanja Tidak Terduga | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 10 | | | | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | 106.128.139.790 | 107.866.959.219 | 1.738.819.429 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 10 | 5 | 4 | | BELANJA TRANSFER | 106.128.139.790 | 107.866.959.219 | 1.738.819.429 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 10 | 5 | 4 | 01 | Belanja Bagi Hasil | 2.430.268.790 | 2.430.268.790 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 10 | 5 | 4 | 02 | Belanja Bantuan Keuangan | 103.697.871.000 | 105.436.690.429 | 1.738.819.429 | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **2.05** | **00** | | | | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | **849.380.000** | **840.926.000** | **(8.454.000)** | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 02 | | | | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 849.380.000 | 840.926.000 | (8.454.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 742.880.000 | 804.426.000 | 61.546.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 742.880.000 | 804.426.000 | 61.546.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 02 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 106.500.000 | 36.500.000 | (70.000.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 02 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 24.000.000 | 36.500.000 | 12.500.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 02 | 5 | 2 | 05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 82.500.000 | 0 | (82.500.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **1.361.506.000** | **1.584.668.000** | **223.162.000** | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **1.361.506.000** | **1.584.668.000** | **223.162.000** | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Standar Harga | 597.339.000 | 533.210.000 | (64.129.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 597.339.000 | 533.210.000 | (64.129.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 597.339.000 | 533.210.000 | (64.129.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 09 | | | | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 764.167.000 | 1.051.458.000 | 287.291.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 764.167.000 | 1.051.458.000 | 287.291.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 764.167.000 | 1.051.458.000 | 287.291.000 | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **04** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **1.045.905.850** | **952.857.950** | **(93.047.900)** | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **04** | **2.01** | **00** | | | | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | **1.045.905.850** | **952.857.950** | **(93.047.900)** | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 02 | | | | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | 264.168.900 | 264.168.500 | (400) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 264.168.900 | 264.168.500 | (400) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 264.168.900 | 264.168.500 | (400) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 03 | | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 123.506.000 | 203.506.000 | 80.000.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 123.506.000 | 194.626.000 | 71.120.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 123.506.000 | 194.626.000 | 71.120.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 03 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 8.880.000 | 8.880.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 03 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 8.880.000 | 8.880.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 04 | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 252.425.000 | 186.335.000 | (66.090.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 152.425.000 | 86.335.000 | (66.090.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 152.425.000 | 86.335.000 | (66.090.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 04 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 04 | 5 | 2 | 05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 10 | | | | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 218.375.950 | 213.676.450 | (4.699.500) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 10 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 218.375.950 | 213.676.450 | (4.699.500) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 10 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 218.375.950 | 205.963.950 | (12.412.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 10 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 0 | 7.712.500 | 7.712.500 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 13 | | | | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 187.430.000 | 85.172.000 | (102.258.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 187.430.000 | 85.172.000 | (102.258.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 187.430.000 | 85.172.000 | (102.258.000) | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **50.133.039.778** | **32.104.493.424** | **(18.028.546.354)** | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.100.000** | **5.100.000** | **0** | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.380.000 | 4.380.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 4.380.000 | 4.380.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.380.000 | 4.380.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 720.000 | 720.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 720.000 | 720.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 720.000 | 720.000 | 0 | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **46.731.735.744** | **28.144.640.439** | **(18.587.095.305)** | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 44.998.115.744 | 26.340.220.439 | (18.657.895.305) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 44.998.115.744 | 26.340.220.439 | (18.657.895.305) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 44.998.115.744 | 26.340.220.439 | (18.657.895.305) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.729.320.000 | 1.800.120.000 | 70.800.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.729.320.000 | 1.800.120.000 | 70.800.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 1.729.320.000 | 1.800.120.000 | 70.800.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.300.000 | 4.300.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 4.300.000 | 4.300.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.300.000 | 4.300.000 | 0 | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **682.569.600** | **729.240.830** | **46.671.230** | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18.245.000 | 18.245.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 18.245.000 | 18.245.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 18.245.000 | 18.245.000 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 139.734.000 | 99.509.200 | (40.224.800) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 139.734.000 | 99.509.200 | (40.224.800) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 139.734.000 | 99.509.200 | (40.224.800) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 105.409.600 | 111.374.630 | 5.965.030 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 105.409.600 | 111.374.630 | 5.965.030 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 105.409.600 | 111.374.630 | 5.965.030 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6.000.000 | 2.400.000 | (3.600.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 6.000.000 | 2.400.000 | (3.600.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000 | 2.400.000 | (3.600.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 53.900.000 | 38.500.000 | (15.400.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 53.900.000 | 38.500.000 | (15.400.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.900.000 | 38.500.000 | (15.400.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 359.281.000 | 459.212.000 | 99.931.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 359.281.000 | 459.212.000 | 99.931.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 359.281.000 | 459.212.000 | 99.931.000 | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **271.700.000** | **244.644.000** | **(27.056.000)** | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 271.700.000 | 244.644.000 | (27.056.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 271.700.000 | 244.644.000 | (27.056.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 271.700.000 | 244.644.000 | (27.056.000) | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.284.012.934** | **2.846.107.155** | **562.094.221** | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.500.000 | 7.500.000 | 2.000.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 5.500.000 | 7.500.000 | 2.000.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.500.000 | 7.500.000 | 2.000.000 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 107.253.142 | 107.253.142 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 107.253.142 | 107.253.142 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 107.253.142 | 107.253.142 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 132.062.288 | 132.062.288 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 132.062.288 | 132.062.288 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 132.062.288 | 132.062.288 | 0 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.039.197.504 | 2.599.291.725 | 560.094.221 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.039.197.504 | 2.599.291.725 | 560.094.221 | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 600.000 | 0 | (600.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.038.597.504 | 2.599.291.725 | 560.694.221 | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **157.921.500** | **134.761.000** | **(23.160.500)** | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 91.732.500 | 75.412.500 | (16.320.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 91.732.500 | 75.412.500 | (16.320.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 91.732.500 | 75.412.500 | (16.320.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 51.174.000 | 49.338.500 | (1.835.500) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 51.174.000 | 49.338.500 | (1.835.500) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 51.174.000 | 49.338.500 | (1.835.500) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 10 | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.015.000 | 10.010.000 | (5.005.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 10 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 15.015.000 | 10.010.000 | (5.005.000) | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 10 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.015.000 | 10.010.000 | (5.005.000) | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **163.967.526.118** | **148.012.957.293** | **(15.954.568.825)** | |
| | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **736.978.022.609** | **721.043.903.237** | **(15.934.119.372)** | |
| **0** | **00** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| **5** | **02** | **5.02.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | **1** | | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **500.000.000** | **500.000.000** | **0** | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 00 | 0.00 | 00 | 6 | 1 | 05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **500.000.000** | **500.000.000** | **0** | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | **BELANJA** | | | | |
| **5** | **03** | **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **KEPEGAWAIAN** | **7.821.850.377** | **6.422.806.002** | **(1.399.044.375)** | |
| **5** | **03** | **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **1.608.773.285** | **1.256.580.846** | **(352.192.439)** | |
| **5** | **03** | **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **637.307.285** | **385.799.500** | **(251.507.785)** | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | | | | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 248.999.585 | 143.795.600 | (105.203.985) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 237.049.585 | 143.795.600 | (93.253.985) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 3.090.000 | 0 | (3.090.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 233.959.585 | 143.795.600 | (90.163.985) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 11.950.000 | 0 | (11.950.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 11.950.000 | 0 | (11.950.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 08 | | | | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 299.999.800 | 199.885.000 | (100.114.800) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 299.999.800 | 199.885.000 | (100.114.800) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 1.030.000 | 0 | (1.030.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 99.944.800 | 0 | (99.944.800) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | 199.025.000 | 199.885.000 | 860.000 | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 10 | | | | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 88.307.900 | 42.118.900 | (46.189.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 10 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 79.057.900 | 42.118.900 | (36.939.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 10 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 79.057.900 | 42.118.900 | (36.939.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 10 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 9.250.000 | 0 | (9.250.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 10 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 9.250.000 | 0 | (9.250.000) | |
| **5** | **03** | **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | **Mutasi dan Promosi ASN** | **435.636.000** | **505.615.800** | **69.979.800** | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | | | Pengelolaan Mutasi ASN | 344.660.000 | 463.222.000 | 118.562.000 | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 344.660.000 | 463.222.000 | 118.562.000 | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 344.660.000 | 463.222.000 | 118.562.000 | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | | | | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 90.976.000 | 42.393.800 | (48.582.200) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 90.976.000 | 42.393.800 | (48.582.200) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 90.976.000 | 42.393.800 | (48.582.200) | |
| **5** | **03** | **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **02** | **2.03** | **00** | | | | **Pengembangan Kompetensi ASN** | **436.984.000** | **268.353.546** | **(168.630.454)** | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 04 | | | | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 436.984.000 | 268.353.546 | (168.630.454) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 436.984.000 | 268.353.546 | (168.630.454) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 436.984.000 | 268.353.546 | (168.630.454) | |
| **5** | **03** | **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **02** | **2.04** | **00** | | | | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **98.846.000** | **96.812.000** | **(2.034.000)** | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 02 | | | | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 44.946.000 | 14.912.000 | (30.034.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 44.946.000 | 14.912.000 | (30.034.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 44.946.000 | 14.912.000 | (30.034.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 07 | | | | Pembinaan Disiplin ASN | 53.900.000 | 81.900.000 | 28.000.000 | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 53.900.000 | 81.900.000 | 28.000.000 | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 53.900.000 | 81.900.000 | 28.000.000 | |
| **5** | **03** | **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **6.213.077.092** | **5.166.225.156** | **(1.046.851.936)** | |
| **5** | **03** | **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.037.077.501** | **4.163.825.208** | **(873.252.293)** | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.870.638.101 | 4.018.265.208 | (852.372.893) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 4.870.638.101 | 4.018.265.208 | (852.372.893) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 4.870.638.101 | 4.018.265.208 | (852.372.893) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 162.480.000 | 145.560.000 | (16.920.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 162.480.000 | 145.560.000 | (16.920.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 162.480.000 | 145.560.000 | (16.920.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.959.400 | 0 | (3.959.400) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 3.959.400 | 0 | (3.959.400) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.959.400 | 0 | (3.959.400) | |
| **5** | **03** | **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **01** | **2.05** | **00** | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **146.415.000** | **124.090.000** | **(22.325.000)** | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 72.415.000 | 69.190.000 | (3.225.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 72.415.000 | 69.190.000 | (3.225.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 72.415.000 | 69.190.000 | (3.225.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 74.000.000 | 54.900.000 | (19.100.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 74.000.000 | 54.900.000 | (19.100.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 74.000.000 | 54.900.000 | (19.100.000) | |
| **5** | **03** | **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **349.697.600** | **228.999.600** | **(120.698.000)** | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.654.000 | 3.745.000 | (909.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 4.654.000 | 3.745.000 | (909.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.654.000 | 3.745.000 | (909.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14.232.000 | 9.695.000 | (4.537.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 14.232.000 | 9.695.000 | (4.537.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.232.000 | 9.695.000 | (4.537.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 87.289.600 | 58.999.000 | (28.290.600) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 87.289.600 | 58.999.000 | (28.290.600) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 87.289.600 | 58.999.000 | (28.290.600) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.500.000 | 6.962.400 | (5.537.600) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 12.500.000 | 6.962.400 | (5.537.600) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000 | 6.962.400 | (5.537.600) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.100.000 | 693.000 | (9.407.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 10.100.000 | 693.000 | (9.407.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.100.000 | 693.000 | (9.407.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 220.922.000 | 148.905.200 | (72.016.800) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 220.922.000 | 148.905.200 | (72.016.800) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 220.922.000 | 148.905.200 | (72.016.800) | |
| **5** | **03** | **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **558.369.416** | **564.832.773** | **6.463.357** | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60.133.000 | 56.851.259 | (3.281.741) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 60.133.000 | 56.851.259 | (3.281.741) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 1.030.000 | 1.030.000 | 0 | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 59.103.000 | 55.821.259 | (3.281.741) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.720.000 | 10.320.000 | (2.400.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 12.720.000 | 10.320.000 | (2.400.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.720.000 | 10.320.000 | (2.400.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 485.516.416 | 497.661.514 | 12.145.098 | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 485.516.416 | 497.661.514 | 12.145.098 | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 485.516.416 | 497.661.514 | 12.145.098 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **03** | **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **121.517.575** | **84.477.575** | **(37.040.000)** | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 31.837.575 | 20.781.575 | (11.056.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 31.837.575 | 20.781.575 | (11.056.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 31.837.575 | 20.781.575 | (11.056.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 32.650.000 | 12.050.000 | (20.600.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 32.650.000 | 12.050.000 | (20.600.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.650.000 | 12.050.000 | (20.600.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 57.030.000 | 51.646.000 | (5.384.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 57.030.000 | 51.646.000 | (5.384.000) | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 1.030.000 | 1.030.000 | 0 | |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 56.000.000 | 50.616.000 | (5.384.000) | |
| **5** | **04** | **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | **1.274.652.000** | **1.274.647.000** | **(5.000)** | |
| **5** | **04** | **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **1.274.652.000** | **1.274.647.000** | **(5.000)** | |
| **5** | **04** | **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | **1.274.652.000** | **1.274.647.000** | **(5.000)** | |
| 5 | 04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 07 | | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1.274.652.000 | 1.274.647.000 | (5.000) | |
| 5 | 04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.274.652.000 | 1.274.647.000 | (5.000) | |
| 5 | 04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 07 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 680.000 | 1.360.000 | 680.000 | |
| 5 | 04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.273.972.000 | 1.273.287.000 | (685.000) | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **9.096.502.377** | **7.697.453.002** | **(1.399.049.375)** | |
| | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(9.096.502.377)** | **(7.697.453.002)** | **1.399.049.375** | |
| **0** | **00** | **5.03.5.04.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Organisasi : 5.06.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **5.06.0.00.0.00.04.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **5** | **06** | **5.06.0.00.0.00.04.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **PENGELOLAAN PERBATASAN** | **1.404.999.885** | **857.132.796** | **(547.867.089)** | |
| **5** | **06** | **5.06.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **1.404.999.885** | **857.132.796** | **(547.867.089)** | |
| **5** | **06** | **5.06.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **9.048.000** | **3.100.000** | **(5.948.000)** | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.275.000 | 775.000 | (500.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.275.000 | 775.000 | (500.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.275.000 | 775.000 | (500.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 03 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.275.000 | 0 | (1.275.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.275.000 | 0 | (1.275.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.275.000 | 0 | (1.275.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 04 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.875.000 | 775.000 | (1.100.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.875.000 | 775.000 | (1.100.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.875.000 | 775.000 | (1.100.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 05 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1.875.000 | 0 | (1.875.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.875.000 | 0 | (1.875.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.875.000 | 0 | (1.875.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 06 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.374.000 | 775.000 | (599.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.374.000 | 775.000 | (599.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.374.000 | 775.000 | (599.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.374.000 | 775.000 | (599.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.374.000 | 775.000 | (599.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.374.000 | 775.000 | (599.000) | |
| **5** | **06** | **5.06.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **54.000.000** | **54.000.000** | **0** | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Organisasi : 5.06.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **06** | **5.06.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **626.580.200** | **390.457.611** | **(236.122.589)** | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 39.164.000 | 16.085.000 | (23.079.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 39.164.000 | 16.085.000 | (23.079.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.164.000 | 16.085.000 | (23.079.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 11.440.000 | 11.440.000 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 11.440.000 | 11.440.000 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.440.000 | 11.440.000 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 19.028.200 | 29.028.200 | 10.000.000 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 14.054.000 | 24.054.000 | 10.000.000 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.054.000 | 24.054.000 | 10.000.000 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 4.974.200 | 4.974.200 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.974.200 | 4.974.200 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 556.948.000 | 333.904.411 | (223.043.589) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 556.948.000 | 333.904.411 | (223.043.589) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 556.948.000 | 333.904.411 | (223.043.589) | |
| **5** | **06** | **5.06.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **679.621.525** | **373.825.025** | **(305.796.500)** | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 01 | | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 115.753.000 | 115.753.000 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 748.000 | 748.000 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 748.000 | 748.000 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 01 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 115.005.000 | 115.005.000 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 01 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 115.005.000 | 115.005.000 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 05 | | | | Pengadaan Mebel | 118.222.525 | 118.222.525 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.086.000 | 2.086.000 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 05 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 748.000 | 748.000 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.338.000 | 1.338.000 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 05 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 116.136.525 | 116.136.525 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 05 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 116.136.525 | 116.136.525 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 06 | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 240.710.500 | 21.000.000 | (219.710.500) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.496.000 | 0 | (1.496.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 06 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 1.496.000 | 0 | (1.496.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Organisasi : 5.06.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 06 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 239.214.500 | 21.000.000 | (218.214.500) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 06 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 239.214.500 | 21.000.000 | (218.214.500) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 204.935.500 | 118.849.500 | (86.086.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 204.935.500 | 118.849.500 | (86.086.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 748.000 | 0 | (748.000) | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 204.187.500 | 118.849.500 | (85.338.000) | |
| **5** | **06** | **5.06.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **35.750.160** | **35.750.160** | **0** | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 35.750.160 | 35.750.160 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 35.750.160 | 35.750.160 | 0 | |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 35.750.160 | 35.750.160 | 0 | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **1.404.999.885** | **857.132.796** | **(547.867.089)** | |
| | | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(1.404.999.885)** | **(857.132.796)** | **547.867.089** | |
| 0 | 00 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 00 | 0.00 | 00 | 6 | | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | **BELANJA** | | | | |
| **6** | **01** | **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **INSPEKTORAT DAERAH** | **12.563.659.281** | **11.615.350.300** | **(948.308.981)** | |
| **6** | **01** | **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **1.264.546.300** | **848.605.112** | **(415.941.188)** | |
| **6** | **01** | **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **2.01** | **00** | | | | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **1.144.499.300** | **789.591.712** | **(354.907.588)** | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | | | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 57.115.400 | 19.577.500 | (37.537.900) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 57.115.400 | 19.577.500 | (37.537.900) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 57.115.400 | 19.577.500 | (37.537.900) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | | | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 132.367.000 | 72.272.230 | (60.094.770) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 132.367.000 | 72.272.230 | (60.094.770) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 132.367.000 | 72.272.230 | (60.094.770) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | | | | Reviu Laporan Kinerja | 101.110.400 | 17.014.345 | (84.096.055) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 101.110.400 | 17.014.345 | (84.096.055) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 101.110.400 | 17.014.345 | (84.096.055) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | | | | Reviu Laporan Keuangan | 168.520.400 | 132.546.237 | (35.974.163) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 168.520.400 | 132.546.237 | (35.974.163) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 168.520.400 | 132.546.237 | (35.974.163) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | | | | Pengawasan Desa | 201.614.500 | 82.630.900 | (118.983.600) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 201.614.500 | 82.630.900 | (118.983.600) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 201.614.500 | 82.630.900 | (118.983.600) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | | | | Kerjasama Pengawasan Internal | 375.145.600 | 375.145.600 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 375.145.600 | 375.145.600 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 375.145.600 | 375.145.600 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | | | | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 108.626.000 | 90.404.900 | (18.221.100) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 108.626.000 | 90.404.900 | (18.221.100) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 108.626.000 | 90.404.900 | (18.221.100) | |
| **6** | **01** | **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **120.047.000** | **59.013.400** | **(61.033.600)** | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | | | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 25.816.000 | 0 | (25.816.000) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 25.816.000 | 0 | (25.816.000) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.816.000 | 0 | (25.816.000) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | | | | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 94.231.000 | 59.013.400 | (35.217.600) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 94.231.000 | 59.013.400 | (35.217.600) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 94.231.000 | 59.013.400 | (35.217.600) | |
| **6** | **01** | **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **749.432.700** | **641.495.731** | **(107.936.969)** | |
| **6** | **01** | **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **29.569.000** | **10.421.500** | **(19.147.500)** | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 29.569.000 | 10.421.500 | (19.147.500) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 29.569.000 | 10.421.500 | (19.147.500) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.569.000 | 10.421.500 | (19.147.500) | |
| **6** | **01** | **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **03** | **2.02** | **00** | | | | **Pendampingan dan Asistensi** | **719.863.700** | **631.074.231** | **(88.789.469)** | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | | | | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 121.905.600 | 42.164.151 | (79.741.449) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 121.905.600 | 42.164.151 | (79.741.449) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 121.905.600 | 42.164.151 | (79.741.449) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | | | | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 46.507.200 | 23.632.304 | (22.874.896) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 46.507.200 | 23.632.304 | (22.874.896) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 46.507.200 | 23.632.304 | (22.874.896) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | | | | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 501.450.900 | 501.450.900 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 501.450.900 | 501.450.900 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 501.450.900 | 501.450.900 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 04 | | | | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 50.000.000 | 63.826.876 | 13.826.876 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 50.000.000 | 63.826.876 | 13.826.876 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | 63.826.876 | 13.826.876 | |
| **6** | **01** | **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **10.549.680.281** | **10.125.249.457** | **(424.430.824)** | |
| **6** | **01** | **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **54.986.800** | **24.923.100** | **(30.063.700)** | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 52.581.800 | 22.518.100 | (30.063.700) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 52.581.800 | 22.518.100 | (30.063.700) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 52.581.800 | 22.518.100 | (30.063.700) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.405.000 | 2.405.000 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.405.000 | 2.405.000 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.405.000 | 2.405.000 | 0 | |
| **6** | **01** | **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.924.051.490** | **7.694.409.790** | **(229.641.700)** | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.779.016.290 | 7.549.374.590 | (229.641.700) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 7.779.016.290 | 7.549.374.590 | (229.641.700) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 7.779.016.290 | 7.549.374.590 | (229.641.700) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 141.480.000 | 141.480.000 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 141.480.000 | 141.480.000 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 141.480.000 | 141.480.000 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.555.200 | 3.555.200 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 3.555.200 | 3.555.200 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.555.200 | 3.555.200 | 0 | |
| **6** | **01** | **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.03** | **00** | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **48.000.000** | **48.000.000** | **0** | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 48.000.000 | 48.000.000 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 48.000.000 | 48.000.000 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 48.000.000 | 48.000.000 | 0 | |
| **6** | **01** | **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.05** | **00** | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **378.254.600** | **243.218.402** | **(135.036.198)** | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 03 | | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 21.963.600 | 67.242.586 | 45.278.986 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 21.963.600 | 67.242.586 | 45.278.986 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 21.963.600 | 67.242.586 | 45.278.986 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 356.291.000 | 175.975.816 | (180.315.184) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 356.291.000 | 175.975.816 | (180.315.184) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 356.291.000 | 175.975.816 | (180.315.184) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **01** | **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **621.889.600** | **525.250.494** | **(96.639.106)** | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.205.400 | 5.459.200 | (1.746.200) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 7.205.400 | 5.459.200 | (1.746.200) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 7.205.400 | 5.459.200 | (1.746.200) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 53.247.000 | 59.123.000 | 5.876.000 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 53.247.000 | 59.123.000 | 5.876.000 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 53.247.000 | 59.123.000 | 5.876.000 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.166.800 | 5.235.600 | (1.931.200) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 7.166.800 | 5.235.600 | (1.931.200) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 7.166.800 | 5.235.600 | (1.931.200) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 7.218.400 | 4.963.200 | (2.255.200) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 7.218.400 | 4.963.200 | (2.255.200) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 7.218.400 | 4.963.200 | (2.255.200) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.320.000 | 30.320.000 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 30.320.000 | 30.320.000 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 30.320.000 | 30.320.000 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 149.633.000 | 18.425.500 | (131.207.500) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 149.633.000 | 18.425.500 | (131.207.500) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 149.633.000 | 18.425.500 | (131.207.500) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 367.099.000 | 401.723.994 | 34.624.994 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 367.099.000 | 401.723.994 | 34.624.994 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 367.099.000 | 401.723.994 | 34.624.994 | |
| **6** | **01** | **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.111.899.686** | **1.187.183.122** | **75.283.436** | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.808.000 | 1.032.000 | (3.776.000) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 4.808.000 | 1.032.000 | (3.776.000) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 4.808.000 | 1.032.000 | (3.776.000) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 36.550.910 | 36.550.910 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 36.550.910 | 36.550.910 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 36.550.910 | 36.550.910 | 0 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.050.000 | 3.889.000 | (1.161.000) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 5.050.000 | 3.889.000 | (1.161.000) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 5.050.000 | 3.889.000 | (1.161.000) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.065.490.776 | 1.145.711.212 | 80.220.436 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.065.490.776 | 1.145.711.212 | 80.220.436 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.065.490.776 | 1.145.711.212 | 80.220.436 | |
| **6** | **01** | **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **410.598.105** | **402.264.549** | **(8.333.556)** | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 9.820.105 | 8.698.605 | (1.121.500) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 9.820.105 | 8.698.605 | (1.121.500) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 9.820.105 | 8.698.605 | (1.121.500) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 33.180.000 | 53.841.226 | 20.661.226 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 33.180.000 | 53.841.226 | 20.661.226 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 33.180.000 | 53.841.226 | 20.661.226 | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 317.625.000 | 317.243.000 | (382.000) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 317.625.000 | 317.243.000 | (382.000) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 317.625.000 | 317.243.000 | (382.000) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 11 | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49.973.000 | 22.481.718 | (27.491.282) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 11 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 49.973.000 | 22.481.718 | (27.491.282) | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 11 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 49.973.000 | 22.481.718 | (27.491.282) | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **12.563.659.281** | **11.615.350.300** | **(948.308.981)** | |
| | | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(12.563.659.281)** | **(11.615.350.300)** | **948.308.981** | |
| **0** | **00** | **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN SIANTAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **KECAMATAN** | **5.228.358.295** | **5.412.048.333** | **183.690.038** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.160.175.945** | **3.916.251.623** | **(243.924.322)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **7.895.600** | **2.795.600** | **(5.100.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.630.600 | 1.990.600 | (2.640.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 4.630.600 | 1.990.600 | (2.640.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 4.630.600 | 1.990.600 | (2.640.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.265.000 | 805.000 | (2.460.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.265.000 | 805.000 | (2.460.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.265.000 | 805.000 | (2.460.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.924.350.303** | **2.677.230.426** | **(247.119.877)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.737.451.303 | 2.495.790.426 | (241.660.877) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.737.451.303 | 2.495.790.426 | (241.660.877) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 2.737.451.303 | 2.495.790.426 | (241.660.877) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 183.840.000 | 181.440.000 | (2.400.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 183.840.000 | 181.440.000 | (2.400.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 176.640.000 | 176.640.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 7.200.000 | 4.800.000 | (2.400.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.059.000 | 0 | (3.059.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.059.000 | 0 | (3.059.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.059.000 | 0 | (3.059.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.03** | **00** | | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **31.314.200** | **31.269.005** | **(45.195)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 05 | | | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3.114.200 | 3.069.005 | (45.195) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.114.200 | 3.069.005 | (45.195) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.114.200 | 3.069.005 | (45.195) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 28.200.000 | 28.200.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 28.200.000 | 28.200.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 25.800.000 | 25.800.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.05** | **00** | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **3.721.000** | **76.503.500** | **72.782.500** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 73.287.500 | 73.287.500 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 73.287.500 | 73.287.500 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 73.287.500 | 73.287.500 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 03 | | | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 3.721.000 | 3.216.000 | (505.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.721.000 | 3.216.000 | (505.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.721.000 | 3.216.000 | (505.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **183.051.000** | **160.403.200** | **(22.647.800)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.525.000 | 8.525.000 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN SIANTAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 8.525.000 | 8.525.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.525.000 | 8.525.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 16.230.000 | 14.969.500 | (1.260.500) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 16.230.000 | 14.969.500 | (1.260.500) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.230.000 | 14.969.500 | (1.260.500) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32.530.000 | 28.210.800 | (4.319.200) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 32.530.000 | 28.210.800 | (4.319.200) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 32.530.000 | 28.210.800 | (4.319.200) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.000.000 | 17.950.000 | (2.050.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 20.000.000 | 17.950.000 | (2.050.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000 | 17.950.000 | (2.050.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.400.000 | 0 | (2.400.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.400.000 | 0 | (2.400.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.400.000 | 0 | (2.400.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 17.250.000 | 31.962.000 | 14.712.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 17.250.000 | 31.962.000 | 14.712.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.250.000 | 31.962.000 | 14.712.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 86.116.000 | 58.785.900 | (27.330.100) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 86.116.000 | 58.785.900 | (27.330.100) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 86.116.000 | 58.785.900 | (27.330.100) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **946.553.842** | **914.534.992** | **(32.018.850)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 63.198.200 | 54.287.161 | (8.911.039) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 63.198.200 | 54.287.161 | (8.911.039) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.198.200 | 54.287.161 | (8.911.039) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 54.474.050 | 40.036.050 | (14.438.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 54.474.050 | 40.036.050 | (14.438.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 54.474.050 | 40.036.050 | (14.438.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 828.881.592 | 820.211.781 | (8.669.811) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 828.881.592 | 820.211.781 | (8.669.811) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 828.881.592 | 820.211.781 | (8.669.811) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **63.290.000** | **53.514.900** | **(9.775.100)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12.090.000 | 9.786.500 | (2.303.500) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 12.090.000 | 9.786.500 | (2.303.500) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.090.000 | 9.786.500 | (2.303.500) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.700.000 | 10.565.400 | (7.134.600) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 17.700.000 | 10.565.400 | (7.134.600) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.700.000 | 10.565.400 | (7.134.600) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 33.500.000 | 33.163.000 | (337.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 33.500.000 | 33.163.000 | (337.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.500.000 | 33.163.000 | (337.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN SIANTAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **987.468.850** | **1.424.293.410** | **436.824.560** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **179.800.400** | **377.087.600** | **197.287.200** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 179.800.400 | 377.087.600 | 197.287.200 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 179.800.400 | 377.087.600 | 197.287.200 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 179.800.400 | 377.087.600 | 197.287.200 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **03** | **2.02** | **00** | | | | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **742.331.300** | **851.204.900** | **108.873.600** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 8.659.100 | 8.632.700 | (26.400) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 8.659.100 | 8.632.700 | (26.400) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 8.659.100 | 8.632.700 | (26.400) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 733.672.200 | 842.572.200 | 108.900.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 733.672.200 | 842.572.200 | 108.900.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 733.672.200 | 842.572.200 | 108.900.000 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **03** | **2.03** | **00** | | | | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **0** | **130.900.000** | **130.900.000** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | 0 | 130.900.000 | 130.900.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 130.900.000 | 130.900.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 130.900.000 | 130.900.000 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **03** | **2.05** | **00** | | | | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)** | **65.337.150** | **65.100.910** | **(236.240)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.05 | 01 | | | | | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 65.337.150 | 65.100.910 | (236.240) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.05 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 65.337.150 | 65.100.910 | (236.240) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.05 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 65.337.150 | 65.100.910 | (236.240) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **28.545.000** | **28.545.000** | **0** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **28.545.000** | **28.545.000** | **0** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | 08 | | | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 28.545.000 | 28.545.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 28.545.000 | 28.545.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 28.545.000 | 28.545.000 | 0 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **06** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **52.168.500** | **42.958.300** | **(9.210.200)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **06** | **2.01** | **00** | | | | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **52.168.500** | **42.958.300** | **(9.210.200)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 11 | | | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 8.162.100 | 8.162.100 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 11 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 8.162.100 | 8.162.100 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 11 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 8.162.100 | 8.162.100 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 13 | | | | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 10.788.200 | 10.766.200 | (22.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 10.788.200 | 10.766.200 | (22.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN SIANTAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.788.200 | 10.766.200 | (22.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 17 | | | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 33.218.200 | 24.030.000 | (9.188.200) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 17 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 33.218.200 | 24.030.000 | (9.188.200) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 17 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.218.200 | 24.030.000 | (9.188.200) | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **5.228.358.295** | **5.412.048.333** | **183.690.038** | |
| | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(5.228.358.295)** | **(5.412.048.333)** | **(183.690.038)** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN JEMAJA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | **BELANJA** | | | | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **KECAMATAN** | **5.959.825.359** | **5.728.832.910** | **(230.992.449)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.311.155.359** | **5.054.461.028** | **(256.694.331)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **31.049.300** | **19.392.900** | **(11.656.400)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.526.200 | 9.526.200 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 9.526.200 | 9.526.200 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.526.200 | 9.526.200 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 9.397.200 | 4.187.200 | (5.210.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 9.397.200 | 4.187.200 | (5.210.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.397.200 | 4.187.200 | (5.210.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 03 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 8.046.500 | 3.046.500 | (5.000.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 8.046.500 | 3.046.500 | (5.000.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.046.500 | 3.046.500 | (5.000.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 04 | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.050.200 | 1.475.000 | (575.200) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.050.200 | 1.475.000 | (575.200) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.050.200 | 1.475.000 | (575.200) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.029.200 | 1.158.000 | (871.200) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.029.200 | 1.158.000 | (871.200) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.029.200 | 1.158.000 | (871.200) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **3.830.055.351** | **3.518.318.691** | **(311.736.660)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.644.139.851 | 3.342.123.191 | (302.016.660) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 3.644.139.851 | 3.342.123.191 | (302.016.660) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 3.644.139.851 | 3.342.123.191 | (302.016.660) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 179.280.000 | 169.560.000 | (9.720.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 179.280.000 | 169.560.000 | (9.720.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 179.280.000 | 169.560.000 | (9.720.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6.635.500 | 6.635.500 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 6.635.500 | 6.635.500 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.635.500 | 6.635.500 | 0 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **01** | **2.05** | **00** | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **0** | **19.047.225** | **19.047.225** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 19.047.225 | 19.047.225 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 19.047.225 | 19.047.225 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 19.047.225 | 19.047.225 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **325.101.700** | **377.116.820** | **52.015.120** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.389.000 | 5.290.000 | (2.099.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 7.389.000 | 5.290.000 | (2.099.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.389.000 | 5.290.000 | (2.099.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18.828.700 | 21.103.520 | 2.274.820 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 18.828.700 | 21.103.520 | 2.274.820 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN JEMAJA

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 18.828.700 | 21.103.520 | 2.274.820 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 53.941.000 | 54.437.900 | 496.900 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 53.941.000 | 54.437.900 | 496.900 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 53.941.000 | 54.437.900 | 496.900 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 19.500.000 | 21.814.000 | 2.314.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 19.500.000 | 21.814.000 | 2.314.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 19.500.000 | 21.814.000 | 2.314.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 40.885.000 | 51.310.000 | 10.425.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 40.885.000 | 51.310.000 | 10.425.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 40.885.000 | 51.310.000 | 10.425.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 184.558.000 | 223.161.400 | 38.603.400 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 184.558.000 | 223.161.400 | 38.603.400 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 184.558.000 | 223.161.400 | 38.603.400 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.093.686.208** | **1.088.605.391** | **(5.080.817)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 75.391.170 | 84.296.821 | 8.905.651 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 75.391.170 | 84.296.821 | 8.905.651 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 75.391.170 | 84.296.821 | 8.905.651 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 31.888.350 | 39.581.994 | 7.693.644 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 31.888.350 | 39.581.994 | 7.693.644 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 31.888.350 | 39.581.994 | 7.693.644 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 986.406.688 | 964.726.576 | (21.680.112) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 986.406.688 | 964.726.576 | (21.680.112) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 986.406.688 | 964.726.576 | (21.680.112) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **31.262.800** | **31.980.001** | **717.201** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12.625.000 | 11.850.000 | (775.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 12.625.000 | 11.850.000 | (775.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 12.625.000 | 11.850.000 | (775.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.130.000 | 20.130.000 | 6.000.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 14.130.000 | 20.130.000 | 6.000.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 14.130.000 | 20.130.000 | 6.000.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4.507.800 | 1 | (4.507.799) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 4.507.800 | 1 | (4.507.799) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 4.507.800 | 1 | (4.507.799) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **592.980.600** | **623.047.482** | **30.066.882** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **51.540.000** | **56.715.000** | **5.175.000** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 51.540.000 | 56.715.000 | 5.175.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 51.540.000 | 56.715.000 | 5.175.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 51.540.000 | 56.715.000 | 5.175.000 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN JEMAJA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **03** | **2.02** | **00** | | | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **470.640.150** | **495.569.900** | **24.929.750** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 03 | 2.02 | 01 | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5.240.150 | 1.890.000 | (3.350.150) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 5.240.150 | 1.890.000 | (3.350.150) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 03 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.240.150 | 1.890.000 | (3.350.150) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 03 | 2.02 | 03 | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 465.400.000 | 493.679.900 | 28.279.900 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 465.400.000 | 493.679.900 | 28.279.900 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 03 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 465.400.000 | 493.679.900 | 28.279.900 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **03** | **2.05** | **00** | | | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)** | **70.800.450** | **70.762.582** | **(37.868)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 03 | 2.05 | 01 | | | | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 70.800.450 | 70.762.582 | (37.868) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 03 | 2.05 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 70.800.450 | 70.762.582 | (37.868) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 03 | 2.05 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 70.800.450 | 70.762.582 | (37.868) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **37.050.000** | **40.585.000** | **3.535.000** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **37.050.000** | **40.585.000** | **3.535.000** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | 03 | | | | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 37.050.000 | 37.035.000 | (15.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 37.050.000 | 37.035.000 | (15.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 37.050.000 | 37.035.000 | (15.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | 08 | | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0 | 3.550.000 | 3.550.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 3.550.000 | 3.550.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 3.550.000 | 3.550.000 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **06** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **18.639.400** | **10.739.400** | **(7.900.000)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **06** | **2.01** | **00** | | | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **18.639.400** | **10.739.400** | **(7.900.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 13 | | | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 10.739.400 | 8.639.400 | (2.100.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 10.739.400 | 8.639.400 | (2.100.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.739.400 | 8.639.400 | (2.100.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 17 | | | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 7.900.000 | 2.100.000 | (5.800.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 17 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 7.900.000 | 2.100.000 | (5.800.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 17 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 7.900.000 | 2.100.000 | (5.800.000) | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **5.959.825.359** | **5.728.832.910** | **(230.992.449)** | |
| | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(5.959.825.359)** | **(5.728.832.910)** | **230.992.449** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.02.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN PALMATAK

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **KECAMATAN** | **4.710.567.529** | **4.818.081.369** | **107.513.840** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **4.464.055.529** | **4.410.245.789** | **(53.809.740)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.921.952.905** | **2.779.861.693** | **(142.091.212)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.848.272.905 | 2.706.181.693 | (142.091.212) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.848.272.905 | 2.706.181.693 | (142.091.212) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 2.848.272.905 | 2.706.181.693 | (142.091.212) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 73.680.000 | 73.680.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 73.680.000 | 73.680.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 73.680.000 | 73.680.000 | 0 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **01** | **2.03** | **00** | | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **25.200.000** | **25.200.000** | **0** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **156.972.000** | **211.771.500** | **54.799.500** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.179.000 | 4.177.500 | (1.500) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 4.179.000 | 4.177.500 | (1.500) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 4.179.000 | 4.177.500 | (1.500) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 24.110.000 | 30.970.000 | 6.860.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 24.110.000 | 30.970.000 | 6.860.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 24.110.000 | 30.970.000 | 6.860.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.863.000 | 1.860.000 | (3.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.863.000 | 1.860.000 | (3.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.863.000 | 1.860.000 | (3.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50.500.000 | 60.009.000 | 9.509.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 50.500.000 | 60.009.000 | 9.509.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 50.500.000 | 60.009.000 | 9.509.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 76.320.000 | 114.755.000 | 38.435.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 76.320.000 | 114.755.000 | 38.435.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 76.320.000 | 114.755.000 | 38.435.000 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN PALMATAK

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.359.930.624** | **1.393.412.596** | **33.481.972** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 63.216.000 | 73.000.460 | 9.784.460 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 63.216.000 | 73.000.460 | 9.784.460 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 63.216.000 | 73.000.460 | 9.784.460 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 33.300.000 | 33.300.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 33.300.000 | 33.300.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 33.300.000 | 33.300.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.263.414.624 | 1.287.112.136 | 23.697.512 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.263.414.624 | 1.287.112.136 | 23.697.512 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.263.414.624 | 1.287.112.136 | 23.697.512 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **167.087.000** | **318.649.380** | **151.562.380** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **167.087.000** | **166.948.380** | **(138.620)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 167.087.000 | 166.948.380 | (138.620) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 167.087.000 | 166.948.380 | (138.620) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 167.087.000 | 166.948.380 | (138.620) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **03** | **2.03** | **00** | | | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **0** | **151.701.000** | **151.701.000** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 03 | 2.03 | 03 | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | 0 | 151.701.000 | 151.701.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 03 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 0 | 151.701.000 | 151.701.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 03 | 2.03 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 151.701.000 | 151.701.000 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **68.250.000** | **78.011.200** | **9.761.200** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **68.250.000** | **78.011.200** | **9.761.200** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 05 | 2.01 | 03 | | | | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 68.250.000 | 78.011.200 | 9.761.200 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 05 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 68.250.000 | 78.011.200 | 9.761.200 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 05 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 68.250.000 | 78.011.200 | 9.761.200 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **06** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **11.175.000** | **11.175.000** | **0** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN PALMATAK

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **06** | **2.01** | **00** | | | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **11.175.000** | **11.175.000** | **0** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 06 | 2.01 | 13 | | | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 11.175.000 | 11.175.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 06 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 11.175.000 | 11.175.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 06 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.175.000 | 11.175.000 | 0 | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **4.710.567.529** | **4.818.081.369** | **107.513.840** | |
| | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(4.710.567.529)** | **(4.818.081.369)** | **(107.513.840)** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN SIANTAN TIMUR

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **KECAMATAN** | **2.919.405.586** | **2.977.690.597** | **58.285.011** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.765.517.586** | **2.513.315.597** | **(252.201.989)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **6.150.000** | **4.648.500** | **(1.501.500)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.550.000 | 1.050.000 | (1.500.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.550.000 | 1.050.000 | (1.500.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.550.000 | 1.050.000 | (1.500.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.600.000 | 3.598.500 | (1.500) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.600.000 | 3.598.500 | (1.500) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.600.000 | 3.598.500 | (1.500) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.717.446.472** | **1.439.645.983** | **(277.800.489)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.626.466.472 | 1.349.645.983 | (276.820.489) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.626.466.472 | 1.349.645.983 | (276.820.489) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 1.626.466.472 | 1.349.645.983 | (276.820.489) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 87.000.000 | 87.000.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 87.000.000 | 87.000.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 87.000.000 | 87.000.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.980.000 | 3.000.000 | (980.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.980.000 | 3.000.000 | (980.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.980.000 | 3.000.000 | (980.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **2.03** | **00** | | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **18.600.000** | **18.600.000** | **0** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **270.709.000** | **267.609.000** | **(3.100.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.588.000 | 1.088.000 | (1.500.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.588.000 | 1.088.000 | (1.500.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.588.000 | 1.088.000 | (1.500.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN SIANTAN TIMUR

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.074.000 | 4.074.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 4.074.000 | 4.074.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 4.074.000 | 4.074.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 126.315.000 | 125.565.000 | (750.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 126.315.000 | 125.565.000 | (750.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 126.315.000 | 125.565.000 | (750.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.032.000 | 12.832.000 | (200.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 13.032.000 | 12.832.000 | (200.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 13.032.000 | 12.832.000 | (200.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 71.795.000 | 71.645.000 | (150.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 71.795.000 | 71.645.000 | (150.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 71.795.000 | 71.645.000 | (150.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 52.905.000 | 52.405.000 | (500.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 52.905.000 | 52.405.000 | (500.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 52.905.000 | 52.405.000 | (500.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **744.652.099** | **775.152.099** | **30.500.000** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 59.935.000 | 58.435.000 | (1.500.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 59.935.000 | 58.435.000 | (1.500.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 59.935.000 | 58.435.000 | (1.500.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15.077.971 | 15.077.971 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 15.077.971 | 15.077.971 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 15.077.971 | 15.077.971 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 669.639.128 | 701.639.128 | 32.000.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 669.639.128 | 701.639.128 | 32.000.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 669.639.128 | 701.639.128 | 32.000.000 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **7.960.015** | **7.660.015** | **(300.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 7.960.015 | 7.660.015 | (300.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 7.960.015 | 7.660.015 | (300.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN SIANTAN TIMUR

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 7.960.015 | 7.660.015 | (300.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **68.008.000** | **382.245.000** | **314.237.000** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **68.008.000** | **382.245.000** | **314.237.000** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 68.008.000 | 382.245.000 | 314.237.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 68.008.000 | 382.245.000 | 314.237.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 68.008.000 | 382.245.000 | 314.237.000 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **55.968.000** | **55.968.000** | **0** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **55.968.000** | **55.968.000** | **0** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 05 | 2.01 | 03 | | | | | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 55.968.000 | 55.968.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 05 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 55.968.000 | 55.968.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 05 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 55.968.000 | 55.968.000 | 0 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **06** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **29.912.000** | **26.162.000** | **(3.750.000)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **06** | **2.01** | **00** | | | | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **29.912.000** | **26.162.000** | **(3.750.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 06 | 2.01 | 13 | | | | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 12.662.000 | 8.912.000 | (3.750.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 06 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 12.662.000 | 8.912.000 | (3.750.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 06 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 12.662.000 | 8.912.000 | (3.750.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 06 | 2.01 | 17 | | | | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 17.250.000 | 17.250.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 06 | 2.01 | 17 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 17.250.000 | 17.250.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 06 | 2.01 | 17 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 17.250.000 | 17.250.000 | 0 | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **2.919.405.586** | **2.977.690.597** | **58.285.011** | |
| | | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(2.919.405.586)** | **(2.977.690.597)** | **(58.285.011)** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.04.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN SIANTAN SELATAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | **BELANJA** | | | | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **KECAMATAN** | **2.810.313.329** | **2.584.732.476** | **(225.580.853)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.633.630.829** | **2.410.805.306** | **(222.825.523)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.846.449.097** | **1.708.951.562** | **(137.497.535)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.753.449.097 | 1.616.851.562 | (136.597.535) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.753.449.097 | 1.616.851.562 | (136.597.535) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 1.753.449.097 | 1.616.851.562 | (136.597.535) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 93.000.000 | 92.100.000 | (900.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 93.000.000 | 92.100.000 | (900.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 93.000.000 | 92.100.000 | (900.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **01** | **2.03** | **00** | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **25.200.000** | **25.200.000** | **0** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **01** | **2.05** | **00** | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **29.464.000** | **9.301.400** | **(20.162.600)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.05 | 09 | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 29.464.000 | 9.301.400 | (20.162.600) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.05 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 29.464.000 | 9.301.400 | (20.162.600) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.05 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 29.464.000 | 9.301.400 | (20.162.600) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **150.698.000** | **129.350.600** | **(21.347.400)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.861.000 | 7.267.000 | (1.594.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 8.861.000 | 7.267.000 | (1.594.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.861.000 | 7.267.000 | (1.594.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12.862.000 | 10.979.000 | (1.883.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 12.862.000 | 10.979.000 | (1.883.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 12.862.000 | 10.979.000 | (1.883.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 11.486.000 | 8.969.600 | (2.516.400) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 11.486.000 | 8.969.600 | (2.516.400) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.486.000 | 8.969.600 | (2.516.400) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 35.000.000 | 19.690.000 | (15.310.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 35.000.000 | 19.690.000 | (15.310.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 35.000.000 | 19.690.000 | (15.310.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 82.489.000 | 82.445.000 | (44.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 82.489.000 | 82.445.000 | (44.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 82.489.000 | 82.445.000 | (44.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **507.314.172** | **470.096.184** | **(37.217.988)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 49.979.000 | 39.684.600 | (10.294.400) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 49.979.000 | 39.684.600 | (10.294.400) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 49.979.000 | 39.684.600 | (10.294.400) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9.030.820 | 9.030.820 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 9.030.820 | 9.030.820 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.030.820 | 9.030.820 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN SIANTAN SELATAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.08 | 03 | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.660.000 | 3.290.000 | (6.370.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 9.660.000 | 3.290.000 | (6.370.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 9.660.000 | 3.290.000 | (6.370.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 438.644.352 | 418.090.764 | (20.553.588) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 438.644.352 | 418.090.764 | (20.553.588) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 438.644.352 | 418.090.764 | (20.553.588) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **74.505.560** | **67.905.560** | **(6.600.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 63.585.560 | 56.985.560 | (6.600.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 63.585.560 | 56.985.560 | (6.600.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 63.585.560 | 56.985.560 | (6.600.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10.920.000 | 10.920.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 10.920.000 | 10.920.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 10.920.000 | 10.920.000 | 0 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **143.071.000** | **142.557.000** | **(514.000)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **143.071.000** | **142.557.000** | **(514.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 143.071.000 | 142.557.000 | (514.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 143.071.000 | 142.557.000 | (514.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 680.000 | 680.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 142.391.000 | 141.877.000 | (514.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **33.611.500** | **31.370.170** | **(2.241.330)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **33.611.500** | **31.370.170** | **(2.241.330)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 05 | 2.01 | 03 | | | | | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 11.811.500 | 11.770.170 | (41.330) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 05 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 11.811.500 | 11.770.170 | (41.330) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 05 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 11.811.500 | 11.770.170 | (41.330) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 05 | 2.01 | 08 | | | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.800.000 | 19.600.000 | (2.200.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 05 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 21.800.000 | 19.600.000 | (2.200.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 05 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 21.800.000 | 19.600.000 | (2.200.000) | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **2.810.313.329** | **2.584.732.476** | **(225.580.853)** | |
| | | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(2.810.313.329)** | **(2.584.732.476)** | **225.580.853** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.05.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN JEMAJA TIMUR

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.06.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.06.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **KECAMATAN** | **3.275.099.258** | **3.321.502.348** | **46.403.090** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.06.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.115.594.258** | **3.006.374.848** | **(109.219.410)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.06.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **18.714.800** | **10.885.000** | **(7.829.800)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.246.000 | 3.225.000 | (21.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.246.000 | 3.225.000 | (21.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.246.000 | 3.225.000 | (21.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.459.400 | 2.760.000 | (699.400) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.459.400 | 2.760.000 | (699.400) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.459.400 | 2.760.000 | (699.400) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 03 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.855.000 | 2.200.000 | (655.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.855.000 | 2.200.000 | (655.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.855.000 | 2.200.000 | (655.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 04 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.459.400 | 2.700.000 | (759.400) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 3.459.400 | 2.700.000 | (759.400) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 3.459.400 | 2.700.000 | (759.400) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 05 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.855.000 | 0 | (2.855.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.855.000 | 0 | (2.855.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.855.000 | 0 | (2.855.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 06 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.840.000 | 0 | (2.840.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.840.000 | 0 | (2.840.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.840.000 | 0 | (2.840.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.06.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.160.191.576** | **1.861.921.546** | **(298.270.030)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.055.862.176 | 1.768.921.546 | (286.940.630) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.055.862.176 | 1.768.921.546 | (286.940.630) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 2.055.862.176 | 1.768.921.546 | (286.940.630) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN JEMAJA TIMUR

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 99.840.000 | 93.000.000 | (6.840.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 99.840.000 | 93.000.000 | (6.840.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 99.840.000 | 93.000.000 | (6.840.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.489.400 | 0 | (4.489.400) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 4.489.400 | 0 | (4.489.400) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.489.400 | 0 | (4.489.400) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.06.0000** | **01** | **2.03** | **00** | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **19.800.000** | **19.800.000** | **0** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.06.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **251.609.100** | **231.480.530** | **(20.128.570)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.420.000 | 3.209.000 | (1.211.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 4.420.000 | 3.209.000 | (1.211.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.420.000 | 3.209.000 | (1.211.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.132.600 | 10.064.550 | (68.050) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 10.132.600 | 10.064.550 | (68.050) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 10.132.600 | 10.064.550 | (68.050) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 38.128.500 | 37.318.980 | (809.520) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 38.128.500 | 37.318.980 | (809.520) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 38.128.500 | 37.318.980 | (809.520) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.000.000 | 1.500.000 | (3.500.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 5.000.000 | 1.500.000 | (3.500.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | 1.500.000 | (3.500.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50.050.000 | 35.510.000 | (14.540.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 50.050.000 | 35.510.000 | (14.540.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 50.050.000 | 35.510.000 | (14.540.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 143.878.000 | 143.878.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 143.878.000 | 143.878.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 143.878.000 | 143.878.000 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN JEMAJA TIMUR

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.06.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **0** | **121.545.600** | **121.545.600** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.07 | 06 | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 121.545.600 | 121.545.600 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.07 | 06 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 121.545.600 | 121.545.600 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.07 | 06 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 121.545.600 | 121.545.600 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.06.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **649.427.182** | **752.342.172** | **102.914.990** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 39.860.000 | 32.774.990 | (7.085.010) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 39.860.000 | 32.774.990 | (7.085.010) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 39.860.000 | 32.774.990 | (7.085.010) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9.968.430 | 9.968.430 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 9.968.430 | 9.968.430 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.968.430 | 9.968.430 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 599.598.752 | 709.598.752 | 110.000.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 599.598.752 | 709.598.752 | 110.000.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 599.598.752 | 709.598.752 | 110.000.000 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.06.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **15.851.600** | **8.400.000** | **(7.451.600)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 15.851.600 | 8.400.000 | (7.451.600) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 15.851.600 | 8.400.000 | (7.451.600) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 15.851.600 | 8.400.000 | (7.451.600) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.06.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **159.505.000** | **315.127.500** | **155.622.500** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.06.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **159.505.000** | **147.548.000** | **(11.957.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 159.505.000 | 147.548.000 | (11.957.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 159.505.000 | 147.548.000 | (11.957.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 159.505.000 | 147.548.000 | (11.957.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.06.0000** | **03** | **2.03** | **00** | | | | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **0** | **167.579.500** | **167.579.500** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 03 | 2.03 | 03 | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | 0 | 167.579.500 | 167.579.500 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN JEMAJA TIMUR

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 03 | 2.03 | 03 | 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 0 | 167.579.500 | 167.579.500 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 03 | 2.03 | 03 | 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 167.579.500 | 167.579.500 | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **3.275.099.258** | **3.321.502.348** | **46.403.090** | |
| | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(3.275.099.258)** | **(3.321.502.348)** | **(46.403.090)** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.06.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN SIANTAN TENGAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **KECAMATAN** | **3.106.747.543** | **3.061.400.471** | **(45.347.072)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.054.167.543** | **3.033.400.471** | **(20.767.072)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **38.987.020** | **17.933.020** | **(21.054.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.312.520 | 8.312.520 | (6.000.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 14.312.520 | 8.312.520 | (6.000.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 14.312.520 | 8.312.520 | (6.000.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 12.895.500 | 8.696.500 | (4.199.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 12.895.500 | 8.696.500 | (4.199.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 12.895.500 | 8.696.500 | (4.199.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.01 | 03 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 11.779.000 | 924.000 | (10.855.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 11.779.000 | 924.000 | (10.855.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 11.779.000 | 924.000 | (10.855.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.893.247.483** | **1.865.637.483** | **(27.610.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.769.173.563 | 1.753.843.563 | (15.330.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.769.173.563 | 1.753.843.563 | (15.330.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 1.769.173.563 | 1.753.843.563 | (15.330.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 118.560.000 | 110.400.000 | (8.160.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 118.560.000 | 110.400.000 | (8.160.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 118.560.000 | 110.400.000 | (8.160.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.513.920 | 1.393.920 | (4.120.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 5.513.920 | 1.393.920 | (4.120.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 5.513.920 | 1.393.920 | (4.120.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **01** | **2.05** | **00** | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **0** | **63.162.000** | **63.162.000** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 63.162.000 | 63.162.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 33.462.000 | 33.462.000 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN SIANTAN TENGAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 33.462.000 | 33.462.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 0 | 29.700.000 | 29.700.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 29.700.000 | 29.700.000 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **256.898.800** | **199.661.000** | **(57.237.800)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.270.000 | 2.200.000 | (4.070.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 6.270.000 | 2.200.000 | (4.070.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 6.270.000 | 2.200.000 | (4.070.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 5.401.500 | 5.401.500 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 0 | 5.401.500 | 5.401.500 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 5.401.500 | 5.401.500 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13.018.500 | 9.000.000 | (4.018.500) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 13.018.500 | 9.000.000 | (4.018.500) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 13.018.500 | 9.000.000 | (4.018.500) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 26.260.300 | 16.855.500 | (9.404.800) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 26.260.300 | 16.855.500 | (9.404.800) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 26.260.300 | 16.855.500 | (9.404.800) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.600.000 | 4.200.000 | (2.400.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 6.600.000 | 4.200.000 | (2.400.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 6.600.000 | 4.200.000 | (2.400.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 75.350.000 | 74.600.000 | (750.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 75.350.000 | 74.600.000 | (750.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 75.350.000 | 74.600.000 | (750.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 129.400.000 | 87.404.000 | (41.996.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 129.400.000 | 87.404.000 | (41.996.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 129.400.000 | 87.404.000 | (41.996.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **22.900.900** | **15.606.060** | **(7.294.840)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 22.900.900 | 15.606.060 | (7.294.840) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 22.900.900 | 15.606.060 | (7.294.840) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN SIANTAN TENGAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 22.900.900 | 15.606.060 | (7.294.840) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **826.133.340** | **865.720.908** | **39.587.568** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 92.597.468 | 89.894.700 | (2.702.768) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 92.597.468 | 89.894.700 | (2.702.768) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 92.597.468 | 89.894.700 | (2.702.768) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.120.000 | 24.120.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 24.120.000 | 24.120.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 24.120.000 | 24.120.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 709.415.872 | 751.706.208 | 42.290.336 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 709.415.872 | 751.706.208 | 42.290.336 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 709.415.872 | 751.706.208 | 42.290.336 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **16.000.000** | **5.680.000** | **(10.320.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 16.000.000 | 5.680.000 | (10.320.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 16.000.000 | 5.680.000 | (10.320.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.000.000 | 5.680.000 | (10.320.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **16.800.000** | **4.940.000** | **(11.860.000)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **16.800.000** | **4.940.000** | **(11.860.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 05 | 2.01 | 08 | | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 16.800.000 | 4.940.000 | (11.860.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 05 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 16.800.000 | 4.940.000 | (11.860.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 05 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.800.000 | 4.940.000 | (11.860.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **06** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **35.780.000** | **23.060.000** | **(12.720.000)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **06** | **2.01** | **00** | | | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **35.780.000** | **23.060.000** | **(12.720.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 06 | 2.01 | 13 | | | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 14.770.000 | 14.770.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 06 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 14.770.000 | 14.770.000 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN SIANTAN TENGAH

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 06 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 14.770.000 | 14.770.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 06 | 2.01 | 17 | | | | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 21.010.000 | 8.290.000 | (12.720.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 06 | 2.01 | 17 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 21.010.000 | 8.290.000 | (12.720.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 06 | 2.01 | 17 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 21.010.000 | 8.290.000 | (12.720.000) | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **3.106.747.543** | **3.061.400.471** | **(45.347.072)** | |
| | | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(3.106.747.543)** | **(3.061.400.471)** | **45.347.072** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.07.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN SIANTAN UTARA

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **KECAMATAN** | **2.793.233.132** | **2.376.967.590** | **(416.265.542)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.636.075.238** | **2.219.809.696** | **(416.265.542)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **5.938.291** | **2.745.097** | **(3.193.194)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.995.097 | 895.097 | (1.100.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.995.097 | 895.097 | (1.100.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.995.097 | 895.097 | (1.100.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.01 | 03 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.943.194 | 350.000 | (1.593.194) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.943.194 | 350.000 | (1.593.194) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.943.194 | 350.000 | (1.593.194) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.01 | 06 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000 | 1.500.000 | (500.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.000.000 | 1.500.000 | (500.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000 | 1.500.000 | (500.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.759.241.002** | **1.377.886.258** | **(381.354.744)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.683.085.002 | 1.302.206.258 | (380.878.744) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.683.085.002 | 1.302.206.258 | (380.878.744) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 1.683.085.002 | 1.302.206.258 | (380.878.744) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 73.680.000 | 73.680.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 73.680.000 | 73.680.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 73.680.000 | 73.680.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.476.000 | 2.000.000 | (476.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.476.000 | 2.000.000 | (476.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.476.000 | 2.000.000 | (476.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **01** | **2.03** | **00** | | | | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **12.160.000** | **10.800.000** | **(1.360.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12.160.000 | 10.800.000 | (1.360.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 12.160.000 | 10.800.000 | (1.360.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.03 | 06 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 12.160.000 | 10.800.000 | (1.360.000) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN SIANTAN UTARA

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **01** | **2.05** | **00** | | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **0** | **17.974.000** | **17.974.000** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 17.974.000 | 17.974.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 0 | 17.974.000 | 17.974.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.05 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 0 | 17.974.000 | 17.974.000 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **198.210.200** | **166.097.400** | **(32.112.800)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.106.000 | 1.982.000 | (124.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.106.000 | 1.982.000 | (124.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.106.000 | 1.982.000 | (124.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.541.400 | 4.491.400 | (50.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 4.541.400 | 4.491.400 | (50.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 4.541.400 | 4.491.400 | (50.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 35.911.000 | 35.911.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 35.911.000 | 35.911.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 35.911.000 | 35.911.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.754.800 | 6.570.000 | (3.184.800) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 9.754.800 | 6.570.000 | (3.184.800) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 9.754.800 | 6.570.000 | (3.184.800) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 27.250.000 | 26.250.000 | (1.000.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 27.250.000 | 26.250.000 | (1.000.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 27.250.000 | 26.250.000 | (1.000.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 118.647.000 | 90.893.000 | (27.754.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 118.647.000 | 90.893.000 | (27.754.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 118.647.000 | 90.893.000 | (27.754.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **48.000.000** | **47.056.000** | **(944.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 48.000.000 | 47.056.000 | (944.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 48.000.000 | 47.056.000 | (944.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 48.000.000 | 47.056.000 | (944.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **597.244.215** | **586.381.511** | **(10.862.704)** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN SIANTAN UTARA

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 19.136.000 | 13.308.150 | (5.827.850) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 19.136.000 | 13.308.150 | (5.827.850) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 19.136.000 | 13.308.150 | (5.827.850) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.639.735 | 1.639.735 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.639.735 | 1.639.735 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 1.639.735 | 1.639.735 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.08 | 03 | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 55.000.000 | 0 | (55.000.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 55.000.000 | 0 | (55.000.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.08 | 03 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 55.000.000 | 0 | (55.000.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 521.468.480 | 571.433.626 | 49.965.146 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 521.468.480 | 571.433.626 | 49.965.146 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 521.468.480 | 571.433.626 | 49.965.146 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **15.281.530** | **10.869.430** | **(4.412.100)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 5.458.530 | 3.625.330 | (1.833.200) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 5.458.530 | 3.625.330 | (1.833.200) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 5.458.530 | 3.625.330 | (1.833.200) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.823.000 | 7.244.100 | (2.578.900) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 9.823.000 | 7.244.100 | (2.578.900) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 9.823.000 | 7.244.100 | (2.578.900) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **02** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **117.855.500** | **117.855.500** | **0** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **02** | **2.02** | **00** | | | | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **117.855.500** | **117.855.500** | **0** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 02 | 2.02 | 03 | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 117.855.500 | 117.855.500 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 117.855.500 | 117.855.500 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 02 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 117.855.500 | 117.855.500 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN SIANTAN UTARA

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **31.308.194** | **31.308.194** | **0** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **31.308.194** | **31.308.194** | **0** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 05 | 2.01 | 03 | | | | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 28.272.000 | 28.272.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 05 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 28.272.000 | 28.272.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 05 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 28.272.000 | 28.272.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 05 | 2.01 | 08 | | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 3.036.194 | 3.036.194 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 05 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 3.036.194 | 3.036.194 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 05 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.036.194 | 3.036.194 | 0 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **06** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **7.994.200** | **7.994.200** | **0** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **06** | **2.01** | **00** | | | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **7.994.200** | **7.994.200** | **0** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 06 | 2.01 | 13 | | | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 06 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 06 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 06 | 2.01 | 17 | | | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1.994.200 | 1.994.200 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 06 | 2.01 | 17 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.994.200 | 1.994.200 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 06 | 2.01 | 17 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.994.200 | 1.994.200 | 0 | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **2.793.233.132** | **2.376.967.590** | **(416.265.542)** | |
| | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(2.793.233.132)** | **(2.376.967.590)** | **416.265.542** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.08.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN JEMAJA BARAT

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | **BELANJA** | | | | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | **KECAMATAN** | **2.852.722.295** | **2.593.882.264** | **(258.840.031)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.683.247.295** | **2.434.007.264** | **(249.240.031)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **22.164.200** | **10.014.200** | **(12.150.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.580.400 | 4.580.400 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 4.580.400 | 4.580.400 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.580.400 | 4.580.400 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.120.800 | 1.095.800 | (2.025.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 3.120.800 | 1.095.800 | (2.025.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.120.800 | 1.095.800 | (2.025.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 03 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.900.800 | 875.800 | (2.025.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.900.800 | 875.800 | (2.025.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.900.800 | 875.800 | (2.025.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 04 | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.750.000 | 725.000 | (2.025.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.750.000 | 725.000 | (2.025.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.750.000 | 725.000 | (2.025.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.831.800 | 806.800 | (2.025.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.831.800 | 806.800 | (2.025.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.831.800 | 806.800 | (2.025.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 06 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.130.800 | 930.800 | (2.200.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 3.130.800 | 930.800 | (2.200.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.130.800 | 930.800 | (2.200.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.849.600 | 999.600 | (1.850.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 2.849.600 | 999.600 | (1.850.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 07 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 2.849.600 | 999.600 | (1.850.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.968.346.335** | **1.718.692.144** | **(249.654.191)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.862.443.935 | 1.619.629.744 | (242.814.191) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 1.862.443.935 | 1.619.629.744 | (242.814.191) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 1.862.443.935 | 1.619.629.744 | (242.814.191) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 102.840.000 | 96.000.000 | (6.840.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 102.840.000 | 96.000.000 | (6.840.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 102.840.000 | 96.000.000 | (6.840.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.062.400 | 3.062.400 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 3.062.400 | 3.062.400 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.062.400 | 3.062.400 | 0 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **253.889.000** | **256.203.000** | **2.314.000** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.440.800 | 4.440.800 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 4.440.800 | 4.440.800 | 0 | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN JEMAJA BARAT

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 4.440.800 | 4.440.800 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.559.000 | 6.559.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 6.559.000 | 6.559.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 6.559.000 | 6.559.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 34.235.200 | 29.089.200 | (5.146.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 34.235.200 | 29.089.200 | (5.146.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 34.235.200 | 29.089.200 | (5.146.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.300.000 | 7.100.000 | (2.200.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 9.300.000 | 7.100.000 | (2.200.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 9.300.000 | 7.100.000 | (2.200.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 62.500.000 | 56.060.000 | (6.440.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 62.500.000 | 56.060.000 | (6.440.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 08 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 62.500.000 | 56.060.000 | (6.440.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 136.854.000 | 152.954.000 | 16.100.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 136.854.000 | 152.954.000 | 16.100.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 136.854.000 | 152.954.000 | 16.100.000 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **416.597.760** | **426.865.920** | **10.268.160** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 35.284.800 | 34.679.800 | (605.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 35.284.800 | 34.679.800 | (605.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 35.284.800 | 34.679.800 | (605.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 381.312.960 | 392.186.120 | 10.873.160 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 381.312.960 | 392.186.120 | 10.873.160 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 381.312.960 | 392.186.120 | 10.873.160 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **22.250.000** | **22.232.000** | **(18.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.570.000 | 6.570.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 6.570.000 | 6.570.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 6.570.000 | 6.570.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 15.680.000 | 15.662.000 | (18.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 15.680.000 | 15.662.000 | (18.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 680.000 | 680.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.09 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000 | 14.982.000 | (18.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **03** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **141.640.000** | **133.690.000** | **(7.950.000)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **03** | **2.01** | **00** | | | | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **141.640.000** | **133.690.000** | **(7.950.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 141.640.000 | 133.690.000 | (7.950.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 141.640.000 | 133.690.000 | (7.950.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 03 | 2.01 | 03 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 141.640.000 | 133.690.000 | (7.950.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **11.775.000** | **11.775.000** | **0** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **11.775.000** | **11.775.000** | **0** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN JEMAJA BARAT

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 05 | 2.01 | 08 | | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 11.775.000 | 11.775.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 05 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 11.775.000 | 11.775.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 05 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.775.000 | 11.775.000 | 0 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **06** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **16.060.000** | **14.410.000** | **(1.650.000)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **06** | **2.01** | **00** | | | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **16.060.000** | **14.410.000** | **(1.650.000)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 06 | 2.01 | 13 | | | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 16.060.000 | 14.410.000 | (1.650.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 06 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 16.060.000 | 14.410.000 | (1.650.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 06 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 16.060.000 | 14.410.000 | (1.650.000) | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **2.852.722.295** | **2.593.882.264** | **(258.840.031)** | |
| | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(2.852.722.295)** | **(2.593.882.264)** | **258.840.031** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.09.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN KUTE SIANTAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **5** | | | | **BELANJA** | | | | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **00** | **0.00** | **00** | | | | | **KECAMATAN** | **3.270.728.212** | **3.804.151.740** | **533.423.528** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **01** | **0.00** | **00** | | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **3.226.889.212** | **3.760.450.240** | **533.561.028** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **01** | **2.01** | **00** | | | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **8.310.500** | **8.310.500** | **0** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 8.310.500 | 8.310.500 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 8.310.500 | 8.310.500 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.01 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 8.310.500 | 8.310.500 | 0 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **01** | **2.02** | **00** | | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.934.899.910** | **1.898.022.624** | **(36.877.286)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.843.263.910 | 1.806.386.624 | (36.877.286) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 1.843.263.910 | 1.806.386.624 | (36.877.286) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.02 | 01 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 1.843.263.910 | 1.806.386.624 | (36.877.286) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 88.680.000 | 88.680.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 88.680.000 | 88.680.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.02 | 03 | 5 | 1 | 01 | | Belanja Pegawai | 88.680.000 | 88.680.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.956.000 | 2.956.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 2.956.000 | 2.956.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.02 | 05 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 2.956.000 | 2.956.000 | 0 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **01** | **2.06** | **00** | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **137.736.400** | **552.082.500** | **414.346.100** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 18.361.400 | 441.087.500 | 422.726.100 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 18.361.400 | 192.682.500 | 174.321.100 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 18.361.400 | 192.682.500 | 174.321.100 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | | | BELANJA MODAL | 0 | 248.405.000 | 248.405.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.06 | 02 | 5 | 2 | 02 | | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 248.405.000 | 248.405.000 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 119.375.000 | 110.995.000 | (8.380.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 119.375.000 | 110.995.000 | (8.380.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.06 | 09 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 119.375.000 | 110.995.000 | (8.380.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **01** | **2.07** | **00** | | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **154.700.000** | **154.700.000** | **0** | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN KUTE SIANTAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 154.700.000 | 154.700.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 154.700.000 | 154.700.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 700.000 | 700.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.07 | 09 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 154.000.000 | 154.000.000 | 0 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **01** | **2.08** | **00** | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **971.232.372** | **1.138.834.616** | **167.602.244** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 106.498.804 | 99.716.400 | (6.782.404) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 106.498.804 | 99.716.400 | (6.782.404) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.08 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 106.498.804 | 99.716.400 | (6.782.404) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25.944.000 | 22.042.000 | (3.902.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 25.944.000 | 22.042.000 | (3.902.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.08 | 02 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 25.944.000 | 22.042.000 | (3.902.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 838.789.568 | 1.017.076.216 | 178.286.648 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 838.789.568 | 1.017.076.216 | 178.286.648 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.08 | 04 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 838.789.568 | 1.017.076.216 | 178.286.648 | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **01** | **2.09** | **00** | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **20.010.030** | **8.500.000** | **(11.510.030)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 8.160.030 | 3.500.000 | (4.660.030) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 8.160.030 | 3.500.000 | (4.660.030) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.09 | 01 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.160.030 | 3.500.000 | (4.660.030) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 11.850.000 | 5.000.000 | (6.850.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 11.850.000 | 5.000.000 | (6.850.000) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.09 | 06 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.850.000 | 5.000.000 | (6.850.000) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **05** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **26.045.000** | **25.907.500** | **(137.500)** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **05** | **2.01** | **00** | | | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **26.045.000** | **25.907.500** | **(137.500)** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 05 | 2.01 | 08 | | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 26.045.000 | 25.907.500 | (137.500) | |

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN KUTE SIANTAN

| Kode Rekening | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 05 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 26.045.000 | 25.907.500 | (137.500) | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 05 | 2.01 | 08 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 26.045.000 | 25.907.500 | (137.500) | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **06** | **0.00** | **00** | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **17.794.000** | **17.794.000** | **0** | |
| **7** | **01** | **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **06** | **2.01** | **00** | | | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **17.794.000** | **17.794.000** | **0** | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 06 | 2.01 | 13 | | | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 9.600.000 | 9.600.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 06 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 9.600.000 | 9.600.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 06 | 2.01 | 13 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.600.000 | 9.600.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 06 | 2.01 | 17 | | | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 8.194.000 | 8.194.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 06 | 2.01 | 17 | 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 8.194.000 | 8.194.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 06 | 2.01 | 17 | 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 8.194.000 | 8.194.000 | 0 | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Belanja** | **3.270.728.212** | **3.804.151.740** | **533.423.528** | |
| | | | | | | | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(3.270.728.212)** | **(3.804.151.740)** | **(533.423.528)** | |
| **0** | **00** | **7.01.0.00.0.00.10.0000** | **00** | **0.00** | **00** | **6** | | | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | **Jumlah Penerimaan Pengeluaran** | **0** | **0** | **0** | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **370.415.029.441** | **130.818.099.581** | **0** | **0** | **501.233.129.022** | **389.672.209.154** | **112.393.663.047** | **0** | **0** | **502.065.872.201** | **832.743.179** |
| **1 01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | **166.131.525.306** | **26.167.932.625** | **0** | **0** | **192.299.457.931** | **165.621.426.903** | **29.062.233.887** | **0** | **0** | **194.683.660.790** | **2.384.202.859** |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 166.131.525.306 | 26.167.932.625 | 0 | 0 | 192.299.457.931 | 165.621.426.903 | 29.062.233.887 | 0 | 0 | 194.683.660.790 | 2.384.202.859 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 149.175.258.510 | 0 | 0 | 0 | 149.175.258.510 | 144.008.309.328 | 0 | 0 | 0 | 144.008.309.328 | (5.166.949.182) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 215.584.600 | 0 | 0 | 0 | 215.584.600 | 120.072.100 | 0 | 0 | 0 | 120.072.100 | (95.512.500) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 215.584.600 | 0 | 0 | 0 | 215.584.600 | 120.072.100 | 0 | 0 | 0 | 120.072.100 | (95.512.500) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 99.091.611.704 | 0 | 0 | 0 | 99.091.611.704 | 97.735.043.653 | 0 | 0 | 0 | 97.735.043.653 | (1.356.568.051) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 99.091.611.704 | 0 | 0 | 0 | 99.091.611.704 | 97.735.043.653 | 0 | 0 | 0 | 97.735.043.653 | (1.356.568.051) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 156.254.700 | 0 | 0 | 0 | 156.254.700 | 703.783.700 | 0 | 0 | 0 | 703.783.700 | 547.529.000 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.529.000 | 0 | 0 | 0 | 547.529.000 | 547.529.000 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 156.254.700 | 0 | 0 | 0 | 156.254.700 | 156.254.700 | 0 | 0 | 0 | 156.254.700 | 0 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.693.481.770 | 0 | 0 | 0 | 1.693.481.770 | 1.405.335.815 | 0 | 0 | 0 | 1.405.335.815 | (288.145.955) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 36.449.600 | 0 | 0 | 0 | 36.449.600 | 28.642.038 | 0 | 0 | 0 | 28.642.038 | (7.807.562) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 226.761.290 | 0 | 0 | 0 | 226.761.290 | 215.758.222 | 0 | 0 | 0 | 215.758.222 | (11.003.068) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 31.125.270 | 0 | 0 | 0 | 31.125.270 | 26.923.024 | 0 | 0 | 0 | 26.923.024 | (4.202.246) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 356.807.110 | 0 | 0 | 0 | 356.807.110 | 221.794.831 | 0 | 0 | 0 | 221.794.831 | (135.012.279) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 78.512.500 | 0 | 0 | 0 | 78.512.500 | 58.510.700 | 0 | 0 | 0 | 58.510.700 | (20.001.800) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 963.826.000 | 0 | 0 | 0 | 963.826.000 | 853.707.000 | 0 | 0 | 0 | 853.707.000 | (110.119.000) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 47.671.484.736 | 0 | 0 | 0 | 47.671.484.736 | 43.864.207.720 | 0 | 0 | 0 | 43.864.207.720 | (3.807.277.016) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 161.263.400 | 0 | 0 | 0 | 161.263.400 | 171.028.100 | 0 | 0 | 0 | 171.028.100 | 9.764.700 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 65.450.000 | 0 | 0 | 0 | 65.450.000 | 27.225.100 | 0 | 0 | 0 | 27.225.100 | (38.224.900) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 47.404.771.336 | 0 | 0 | 0 | 47.404.771.336 | 43.625.954.520 | 0 | 0 | 0 | 43.625.954.520 | (3.778.816.816) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 346.841.000 | 0 | 0 | 0 | 346.841.000 | 179.866.340 | 0 | 0 | 0 | 179.866.340 | (166.974.660) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.750.000 | 0 | 0 | 0 | 35.750.000 | 11.160.000 | 0 | 0 | 0 | 11.160.000 | (24.590.000) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 257.873.000 | 0 | 0 | 0 | 257.873.000 | 102.487.000 | 0 | 0 | 0 | 102.487.000 | (155.386.000) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 53.218.000 | 0 | 0 | 0 | 53.218.000 | 66.219.340 | 0 | 0 | 0 | 66.219.340 | 13.001.340 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 16.956.266.796 | 26.167.932.625 | 0 | 0 | 43.124.199.421 | 21.613.117.575 | 29.062.233.887 | 0 | 0 | 50.675.351.462 | 7.551.152.041 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 8.813.773.842 | 11.335.844.086 | 0 | 0 | 20.149.617.928 | 10.477.454.280 | 13.181.465.196 | 0 | 0 | 23.658.919.476 | 3.509.301.548 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | 0 | 4.228.928.675 | 0 | 0 | 4.228.928.675 | 47.535.400 | 1.273.827.000 | 0 | 0 | 1.321.362.400 | (2.907.566.275) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 0 | 1.027.239.133 | 0 | 0 | 1.027.239.133 | 297.962.000 | 1.288.053.100 | 0 | 0 | 1.586.015.100 | 558.775.967 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 0 | 379.220.418 | 0 | 0 | 379.220.418 | 117.759.000 | 547.650.000 | 0 | 0 | 665.409.000 | 286.188.582 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 0 | 652.556.732 | 0 | 0 | 652.556.732 | 75.024.000 | 655.974.000 | 0 | 0 | 730.998.000 | 78.441.268 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 199.600.000 | 430.383.901 | 0 | 0 | 629.983.901 | 826.485.030 | 2.405.276.461 | 0 | 0 | 3.231.761.491 | 2.601.777.590 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 07 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 0 | 1.133.970.724 | 0 | 0 | 1.133.970.724 | 225.089.000 | 1.289.272.832 | 0 | 0 | 1.514.361.832 | 380.391.108 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.120.000 | 0 | 0 | 0 | 269.120.000 | 269.120.000 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.264.000 | 0 | 0 | 0 | 22.264.000 | 22.264.000 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 13 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.357.500 | 0 | 0 | 0 | 275.357.500 | 275.357.500 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 1.134.183.392 | 0 | 0 | 0 | 1.134.183.392 | 643.570.600 | 2.237.867.300 | 0 | 0 | 2.881.437.900 | 1.747.254.508 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.281.200 | 0 | 0 | 0 | 587.281.200 | 587.281.200 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 1.812.325.575 | 0 | 0 | 0 | 1.812.325.575 | 1.666.769.175 | 0 | 0 | 0 | 1.666.769.175 | (145.556.400) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 404.795.500 | 0 | 0 | 0 | 404.795.500 | 160.368.000 | 0 | 0 | 0 | 160.368.000 | (244.427.500) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 5.262.869.375 | 3.483.544.503 | 0 | 0 | 8.746.413.878 | 5.262.869.375 | 3.483.544.503 | 0 | 0 | 8.746.413.878 | 0 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 6.087.477.930 | 13.548.765.501 | 0 | 0 | 19.636.243.431 | 7.376.228.505 | 14.300.394.691 | 0 | 0 | 21.676.623.196 | 2.040.379.765 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.243.680 | 463.625.000 | 0 | 0 | 500.868.680 | 500.868.680 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 0 | 3.982.333.137 | 0 | 0 | 3.982.333.137 | 176.226.076 | 3.848.631.500 | 0 | 0 | 4.024.857.576 | 42.524.439 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 0 | 1.126.367.344 | 0 | 0 | 1.126.367.344 | 187.116.717 | 1.223.375.088 | 0 | 0 | 1.410.491.805 | 284.124.461 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 | Pembangunan Laboratorium | 680.596.000 | 6.085.134.513 | 0 | 0 | 6.765.730.513 | 490.885.590 | 4.845.635.498 | 0 | 0 | 5.336.521.088 | (1.429.209.425) |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 09 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 0 | 699.392.366 | 0 | 0 | 699.392.366 | 87.829.847 | 694.166.664 | 0 | 0 | 781.996.511 | 82.604.145 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 99.850.000 | 0 | 0 | 0 | 99.850.000 | 406.871.000 | 710.458.700 | 0 | 0 | 1.117.329.700 | 1.017.479.700 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.724.000 | 0 | 0 | 0 | 97.724.000 | 97.724.000 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 21 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.234.000 | 0 | 0 | 0 | 3.234.000 | 3.234.000 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.812.000 | 0 | 0 | 0 | 20.812.000 | 20.812.000 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 581.739.285 | 0 | 0 | 0 | 581.739.285 | 432.055.120 | 663.329.100 | 0 | 0 | 1.095.384.220 | 513.644.935 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 28 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.078.380 | 195.635.000 | 0 | 0 | 580.713.380 | 580.713.380 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.782.034.925 | 0 | 0 | 0 | 1.782.034.925 | 2.068.390.575 | 0 | 0 | 0 | 2.068.390.575 | 286.355.650 |
| 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan | 10.496.200 | 0 | 0 | 0 | 10.496.200 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 39.503.800 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| | | | | | | | Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 42 | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 2.932.761.520 | 1.655.538.141 | 0 | 0 | 4.588.299.661 | 2.932.761.520 | 1.655.538.141 | 0 | 0 | 4.588.299.661 | 0 |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 1.788.615.024 | 1.283.323.038 | 0 | 0 | 3.071.938.062 | 3.493.034.790 | 1.580.374.000 | 0 | 0 | 5.073.408.790 | 2.001.470.728 |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 01 | | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 0 | 1.283.323.038 | 0 | 0 | 1.283.323.038 | 147.788.000 | 740.955.000 | 0 | 0 | 888.743.000 | (394.580.038) |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.886.000 | 421.920.000 | 0 | 0 | 1.082.806.000 | 1.082.806.000 |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.187.000 | 0 | 0 | 0 | 11.187.000 | 11.187.000 |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 07 | | Pengadaan Mebel PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.559.000 | 0 | 0 | 317.559.000 | 317.559.000 |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 09 | | Pengadaan Perlengkapan PAUD | 100.015.334 | 0 | 0 | 0 | 100.015.334 | 10.059.600 | 99.940.000 | 0 | 0 | 109.999.600 | 9.984.266 |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 10 | | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.592.000 | 0 | 0 | 0 | 782.592.000 | 782.592.000 |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 12 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.922.500 | 0 | 0 | 0 | 191.922.500 | 191.922.500 |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 13 | | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 1.658.599.650 | 0 | 0 | 0 | 1.658.599.650 | 1.658.599.650 | 0 | 0 | 0 | 1.658.599.650 | 0 |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 16 | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 30.000.040 | 0 | 0 | 0 | 30.000.040 | 30.000.040 | 0 | 0 | 0 | 30.000.040 | 0 |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 266.400.000 | 0 | 0 | 0 | 266.400.000 | 266.400.000 | 0 | 0 | 0 | 266.400.000 | 0 |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 12 | | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 266.400.000 | 0 | 0 | 0 | 266.400.000 | 266.400.000 | 0 | 0 | 0 | 266.400.000 | 0 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **02** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **139.160.240.211** | **14.158.869.379** | **0** | **0** | **153.319.109.590** | **144.076.616.499** | **20.271.853.546** | **0** | **0** | **164.348.470.045** | **11.029.360.455** |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | | | | | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 122.984.953.475 | 13.512.667.626 | 0 | 0 | 136.497.621.101 | 127.492.994.260 | 19.419.208.179 | 0 | 0 | 146.912.202.439 | 10.414.581.338 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 89.268.433.965 | 307.250.000 | 0 | 0 | 89.575.683.965 | 86.619.262.199 | 88.647.190 | 0 | 0 | 86.707.909.389 | (2.867.774.576) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 737.608.000 | 0 | 0 | 0 | 737.608.000 | 935.608.000 | 0 | 0 | 0 | 935.608.000 | 198.000.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 737.608.000 | 0 | 0 | 0 | 737.608.000 | 935.608.000 | 0 | 0 | 0 | 935.608.000 | 198.000.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 57.555.139.941 | 0 | 0 | 0 | 57.555.139.941 | 57.242.646.599 | 0 | 0 | 0 | 57.242.646.599 | (312.493.342) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 56.298.039.941 | 0 | 0 | 0 | 56.298.039.941 | 55.985.546.599 | 0 | 0 | 0 | 55.985.546.599 | (312.493.342) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.257.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.257.100.000 | 1.257.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.257.100.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 60.500.000 | 0 | 0 | 0 | 60.500.000 | 14.600.000 | 0 | 0 | 0 | 14.600.000 | (45.900.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 04 | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 60.500.000 | 0 | 0 | 0 | 60.500.000 | 14.600.000 | 0 | 0 | 0 | 14.600.000 | (45.900.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 830.000 | 123.750.000 | 0 | 0 | 124.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (124.580.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 01 | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 830.000 | 123.750.000 | 0 | 0 | 124.580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (124.580.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.738.557.797 | 183.500.000 | 0 | 0 | 1.922.057.797 | 1.358.722.100 | 88.647.190 | 0 | 0 | 1.447.369.290 | (474.688.507) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.545.700 | 0 | 0 | 0 | 10.545.700 | 10.545.700 | 0 | 0 | 0 | 10.545.700 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 22.641.497 | 183.500.000 | 0 | 0 | 206.141.497 | 4.052.810 | 88.647.190 | 0 | 0 | 92.700.000 | (113.441.497) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 15.550.000 | 0 | 0 | 0 | 15.550.000 | 14.795.000 | 0 | 0 | 0 | 14.795.000 | (755.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 976.880.600 | 0 | 0 | 0 | 976.880.600 | 801.385.900 | 0 | 0 | 0 | 801.385.900 | (175.494.700) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 62.755.000 | 0 | 0 | 0 | 62.755.000 | 55.731.750 | 0 | 0 | 0 | 55.731.750 | (7.023.250) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 650.185.000 | 0 | 0 | 0 | 650.185.000 | 472.210.940 | 0 | 0 | 0 | 472.210.940 | (177.974.060) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 28.493.431.727 | 0 | 0 | 0 | 28.493.431.727 | 26.573.768.800 | 0 | 0 | 0 | 26.573.768.800 | (1.919.662.927) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 130.425.100 | 0 | 0 | 0 | 130.425.100 | 128.995.100 | 0 | 0 | 0 | 128.995.100 | (1.430.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 216.597.515 | 0 | 0 | 0 | 216.597.515 | 209.397.515 | 0 | 0 | 0 | 209.397.515 | (7.200.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17.061.000 | 0 | 0 | 0 | 17.061.000 | 21.261.000 | 0 | 0 | 0 | 21.261.000 | 4.200.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 28.129.348.112 | 0 | 0 | 0 | 28.129.348.112 | 26.214.115.185 | 0 | 0 | 0 | 26.214.115.185 | (1.915.232.927) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 682.366.500 | 0 | 0 | 0 | 682.366.500 | 493.916.700 | 0 | 0 | 0 | 493.916.700 | (188.449.800) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 175.806.500 | 0 | 0 | 0 | 175.806.500 | 32.458.500 | 0 | 0 | 0 | 32.458.500 | (143.348.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 182.160.000 | 0 | 0 | 0 | 182.160.000 | 65.000.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000.000 | (117.160.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 324.400.000 | 0 | 0 | 0 | 324.400.000 | 396.458.200 | 0 | 0 | 0 | 396.458.200 | 72.058.200 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 32.581.007.476 | 13.205.417.626 | 0 | 0 | 45.786.425.102 | 40.463.961.320 | 19.330.560.989 | 0 | 0 | 59.794.522.309 | 14.008.097.207 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 13.577.113.268 | 13.205.417.626 | 0 | 0 | 26.782.530.894 | 16.178.942.178 | 19.036.033.989 | 0 | 0 | 35.214.976.167 | 8.432.445.273 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 12 | | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.544.578 | 3.044.718.600 | 0 | 0 | 3.242.263.178 | 3.242.263.178 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 13 | | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 516.984.400 | 5.944.112.000 | 0 | 0 | 6.461.096.400 | 1.606.282.224 | 6.592.942.000 | 0 | 0 | 8.199.224.224 | 1.738.127.824 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 14 | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 125.068.922 | 7.261.305.626 | 0 | 0 | 7.386.374.548 | 30.248.098 | 8.960.661.389 | 0 | 0 | 8.990.909.487 | 1.604.534.939 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 16 | | Pengadaan Obat, Vaksin | 11.012.025.961 | 0 | 0 | 0 | 11.012.025.961 | 12.543.616.838 | 437.712.000 | 0 | 0 | 12.981.328.838 | 1.969.302.877 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 17 | | Pengadaan Bahan Habis Pakai | 1.923.033.985 | 0 | 0 | 0 | 1.923.033.985 | 1.801.250.440 | 0 | 0 | 0 | 1.801.250.440 | (121.783.545) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 19.003.894.208 | 0 | 0 | 0 | 19.003.894.208 | 24.285.019.142 | 294.527.000 | 0 | 0 | 24.579.546.142 | 5.575.651.934 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 295.858.500 | 0 | 0 | 0 | 295.858.500 | 295.858.500 | 0 | 0 | 0 | 295.858.500 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 07 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 15 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 227.457.000 | 0 | 0 | 0 | 227.457.000 | 427.457.000 | 0 | 0 | 0 | 427.457.000 | 200.000.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 16 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 17 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 70.986.000 | 0 | 0 | 0 | 70.986.000 | 70.986.000 | 0 | 0 | 0 | 70.986.000 | 0 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 283.785.000 | 0 | 0 | 0 | 283.785.000 | 283.785.000 | 0 | 0 | 0 | 283.785.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 1.075.329.750 | 0 | 0 | 0 | 1.075.329.750 | 1.365.731.338 | 0 | 0 | 0 | 1.365.731.338 | 290.401.588 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 13.387.555.000 | 0 | 0 | 0 | 13.387.555.000 | 13.945.054.156 | 0 | 0 | 0 | 13.945.054.156 | 557.499.156 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 1.453.265.800 | 0 | 0 | 0 | 1.453.265.800 | 2.826.761.251 | 0 | 0 | 0 | 2.826.761.251 | 1.373.495.451 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 86.971.658 | 0 | 0 | 0 | 86.971.658 | 123.562.654 | 0 | 0 | 0 | 123.562.654 | 36.590.996 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 153.660.000 | 0 | 0 | 0 | 153.660.000 | 153.660.000 | 0 | 0 | 0 | 153.660.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 1.480.604.000 | 0 | 0 | 0 | 1.480.604.000 | 4.572.241.843 | 44.527.000 | 0 | 0 | 4.616.768.843 | 3.136.164.843 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 38 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 278.421.500 | 0 | 0 | 0 | 278.421.500 | 9.921.400 | 250.000.000 | 0 | 0 | 259.921.400 | (18.500.100) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 785.512.334 | 0 | 0 | 0 | 785.512.334 | 195.863.341 | 0 | 0 | 0 | 195.863.341 | (589.648.993) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 485.512.334 | 0 | 0 | 0 | 485.512.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (485.512.334) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | 485.512.334 | 0 | 0 | 0 | 485.512.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (485.512.334) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 195.863.341 | 0 | 0 | 0 | 195.863.341 | (104.136.659) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 195.863.341 | 0 | 0 | 0 | 195.863.341 | (104.136.659) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 349.999.700 | 0 | 0 | 0 | 349.999.700 | 213.907.400 | 0 | 0 | 0 | 213.907.400 | (136.092.300) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 149.999.700 | 0 | 0 | 0 | 149.999.700 | 13.907.400 | 0 | 0 | 0 | 13.907.400 | (136.092.300) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 149.999.700 | 0 | 0 | 0 | 149.999.700 | 13.907.400 | 0 | 0 | 0 | 13.907.400 | (136.092.300) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 05 | 2.02 | | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 05 | 2.02 | 01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2. | 4.0. | 0. | RSUD Tarempa | 1.025.768.885 | 0 | 0 | 0 | 1.025.768.885 | 1.239.712.485 | 0 | 0 | 0 | 1.239.712.485 | 213.943.600 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | | | | Puskesmas Siantan Timur | 1.375.008.863 | 0 | 0 | 0 | 1.375.008.863 | 1.378.108.175 | 4.662.000 | 0 | 0 | 1.382.770.175 | 7.761.312 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 356.298.565 | 0 | 0 | 0 | 356.298.565 | 324.980.865 | 0 | 0 | 0 | 324.980.865 | (31.317.700) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 184.302.705 | 0 | 0 | 0 | 184.302.705 | 186.920.505 | 0 | 0 | 0 | 186.920.505 | 2.617.800 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.788.180 | 0 | 0 | 0 | 3.788.180 | 5.628.480 | 0 | 0 | 0 | 5.628.480 | 1.840.300 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 26.478.100 | 0 | 0 | 0 | 26.478.100 | 29.255.600 | 0 | 0 | 0 | 29.255.600 | 2.777.500 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 108.824.925 | 0 | 0 | 0 | 108.824.925 | 101.824.925 | 0 | 0 | 0 | 101.824.925 | (7.000.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 25.261.500 | 0 | 0 | 0 | 25.261.500 | 25.261.500 | 0 | 0 | 0 | 25.261.500 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19.950.000 | 0 | 0 | 0 | 19.950.000 | 24.950.000 | 0 | 0 | 0 | 24.950.000 | 5.000.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 137.565.060 | 0 | 0 | 0 | 137.565.060 | 113.210.460 | 0 | 0 | 0 | 113.210.460 | (24.354.600) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 40.887.660 | 0 | 0 | 0 | 40.887.660 | 47.613.060 | 0 | 0 | 0 | 47.613.060 | 6.725.400 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 96.677.400 | 0 | 0 | 0 | 96.677.400 | 63.677.400 | 0 | 0 | 0 | 63.677.400 | (33.000.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920.000 | 0 | 0 | 0 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 34.430.800 | 0 | 0 | 0 | 34.430.800 | 24.849.900 | 0 | 0 | 0 | 24.849.900 | (9.580.900) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 22.619.000 | 0 | 0 | 0 | 22.619.000 | 13.038.100 | 0 | 0 | 0 | 13.038.100 | (9.580.900) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 11.811.800 | 0 | 0 | 0 | 11.811.800 | 11.811.800 | 0 | 0 | 0 | 11.811.800 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.003.560.298 | 0 | 0 | 0 | 1.003.560.298 | 1.036.027.310 | 4.662.000 | 0 | 0 | 1.040.689.310 | 37.129.012 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.003.560.298 | 0 | 0 | 0 | 1.003.560.298 | 1.036.027.310 | 4.662.000 | 0 | 0 | 1.040.689.310 | 37.129.012 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 29.550.000 | 0 | 0 | 0 | 29.550.000 | 38.700.000 | 0 | 0 | 0 | 38.700.000 | 9.150.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 36.750.000 | 0 | 0 | 0 | 36.750.000 | 38.700.000 | 0 | 0 | 0 | 38.700.000 | 1.950.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 70.350.000 | 0 | 0 | 0 | 70.350.000 | 72.300.000 | 0 | 0 | 0 | 72.300.000 | 1.950.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 9.400.000 | 0 | 0 | 0 | 9.400.000 | 9.400.000 | 0 | 0 | 0 | 9.400.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 15.600.000 | 0 | 0 | 0 | 15.600.000 | 15.600.000 | 0 | 0 | 0 | 15.600.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 9.600.000 | 19.200.000 | 0 | 0 | 0 | 19.200.000 | 9.600.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 9.600.000 | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 9.600.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 26.400.000 | 0 | 0 | 0 | 26.400.000 | 26.400.000 | 0 | 0 | 0 | 26.400.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 9.600.000 | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 9.600.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 28.800.000 | 0 | 0 | 0 | 28.800.000 | 31.200.000 | 0 | 0 | 0 | 31.200.000 | 2.400.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 77.891.292 | 0 | 0 | 0 | 77.891.292 | 77.891.292 | 0 | 0 | 0 | 77.891.292 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 187.540.043 | 0 | 0 | 0 | 187.540.043 | 202.473.688 | 0 | 0 | 0 | 202.473.688 | 14.933.645 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 9.600.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 2.400.000 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 9.600.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 2.400.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 149.400.000 | 0 | 0 | 0 | 149.400.000 | 53.700.000 | 0 | 0 | 0 | 53.700.000 | (95.700.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 244.678.963 | 0 | 0 | 0 | 244.678.963 | 325.662.330 | 4.662.000 | 0 | 0 | 330.324.330 | 85.645.367 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 45.600.000 | 0 | 0 | 0 | 45.600.000 | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000.000 | 2.400.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 02 | 2.02 | 37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 15.150.000 | 0 | 0 | 0 | 15.150.000 | 17.100.000 | 0 | 0 | 0 | 17.100.000 | 1.950.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 05 | 2.02 | | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 15.150.000 | 0 | 0 | 0 | 15.150.000 | 17.100.000 | 0 | 0 | 0 | 17.100.000 | 1.950.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.10 | 05 | 2.02 | 01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 15.150.000 | 0 | 0 | 0 | 15.150.000 | 17.100.000 | 0 | 0 | 0 | 17.100.000 | 1.950.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | | | | Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK) | 189.739.766 | 0 | 0 | 0 | 189.739.766 | 186.206.869 | 0 | 0 | 0 | 186.206.869 | (3.532.897) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 838.768.885 | 0 | 0 | 0 | 838.768.885 | 1.015.852.985 | 0 | 0 | 0 | 1.015.852.985 | 177.084.100 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 520.358.155 | 0 | 0 | 0 | 520.358.155 | 629.506.466 | 0 | 0 | 0 | 629.506.466 | 109.148.311 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 21.202.500 | 0 | 0 | 0 | 21.202.500 | 107.202.500 | 0 | 0 | 0 | 107.202.500 | 86.000.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 43.626.000 | 0 | 0 | 0 | 43.626.000 | 53.526.000 | 0 | 0 | 0 | 53.526.000 | 9.900.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 347.035.655 | 0 | 0 | 0 | 347.035.655 | 396.202.155 | 0 | 0 | 0 | 396.202.155 | 49.166.500 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 59.004.000 | 0 | 0 | 0 | 59.004.000 | 23.085.811 | 0 | 0 | 0 | 23.085.811 | (35.918.189) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 49.490.000 | 0 | 0 | 0 | 49.490.000 | 49.490.000 | 0 | 0 | 0 | 49.490.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 285.960.730 | 0 | 0 | 0 | 285.960.730 | 367.729.019 | 0 | 0 | 0 | 367.729.019 | 81.768.289 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 70.984.430 | 0 | 0 | 0 | 70.984.430 | 94.403.519 | 0 | 0 | 0 | 94.403.519 | 23.419.089 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 163.738.300 | 0 | 0 | 0 | 163.738.300 | 156.678.300 | 0 | 0 | 0 | 156.678.300 | (7.060.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 51.238.000 | 0 | 0 | 0 | 51.238.000 | 116.647.200 | 0 | 0 | 0 | 116.647.200 | 65.409.200 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 32.450.000 | 0 | 0 | 0 | 32.450.000 | 18.617.500 | 0 | 0 | 0 | 18.617.500 | (13.832.500) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 32.450.000 | 0 | 0 | 0 | 32.450.000 | 18.617.500 | 0 | 0 | 0 | 18.617.500 | (13.832.500) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 187.000.000 | 0 | 0 | 0 | 187.000.000 | 223.859.500 | 0 | 0 | 0 | 223.859.500 | 36.859.500 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 187.000.000 | 0 | 0 | 0 | 187.000.000 | 223.859.500 | 0 | 0 | 0 | 223.859.500 | 36.859.500 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 02 | 2.01 | 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 187.000.000 | 0 | 0 | 0 | 187.000.000 | 223.859.500 | 0 | 0 | 0 | 223.859.500 | 36.859.500 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 189.739.766 | 0 | 0 | 0 | 189.739.766 | 186.206.869 | 0 | 0 | 0 | 186.206.869 | (3.532.897) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 72.740.160 | 0 | 0 | 0 | 72.740.160 | 69.543.087 | 0 | 0 | 0 | 69.543.087 | (3.197.073) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.408.220 | 0 | 0 | 0 | 1.408.220 | 1.280.200 | 0 | 0 | 0 | 1.280.200 | (128.020) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.928.140 | 0 | 0 | 0 | 7.928.140 | 7.780.502 | 0 | 0 | 0 | 7.780.502 | (147.638) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 8.228.000 | 0 | 0 | 0 | 8.228.000 | 8.228.000 | 0 | 0 | 0 | 8.228.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 34.115.800 | 0 | 0 | 0 | 34.115.800 | 34.114.385 | 0 | 0 | 0 | 34.114.385 | (1.415) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 21.060.000 | 0 | 0 | 0 | 21.060.000 | 18.140.000 | 0 | 0 | 0 | 18.140.000 | (2.920.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 106.509.606 | 0 | 0 | 0 | 106.509.606 | 106.173.782 | 0 | 0 | 0 | 106.173.782 | (335.824) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 18.670.190 | 0 | 0 | 0 | 18.670.190 | 18.334.366 | 0 | 0 | 0 | 18.334.366 | (335.824) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 87.839.416 | 0 | 0 | 0 | 87.839.416 | 87.839.416 | 0 | 0 | 0 | 87.839.416 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10.490.000 | 0 | 0 | 0 | 10.490.000 | 10.490.000 | 0 | 0 | 0 | 10.490.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.11 | 01 | 2.09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 10.490.000 | 0 | 0 | 0 | 10.490.000 | 10.490.000 | 0 | 0 | 0 | 10.490.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | | | | Puskesmas Jemaja Barat | 745.796.740 | 92.454.076 | 0 | 0 | 838.250.816 | 750.372.782 | 91.734.828 | 0 | 0 | 842.107.610 | 3.856.794 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 110.780.940 | 92.454.076 | 0 | 0 | 203.235.016 | 75.356.982 | 91.734.828 | 0 | 0 | 167.091.810 | (36.143.206) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 68.986.550 | 92.454.076 | 0 | 0 | 161.440.626 | 50.032.591 | 91.734.828 | 0 | 0 | 141.767.419 | (19.673.207) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.891.050 | 0 | 0 | 0 | 5.891.050 | 5.891.050 | 0 | 0 | 0 | 5.891.050 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7.400.800 | 92.454.076 | 0 | 0 | 99.854.876 | 510.642 | 91.734.828 | 0 | 0 | 92.245.470 | (7.609.406) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.989.500 | 0 | 0 | 0 | 5.989.500 | 5.389.500 | 0 | 0 | 0 | 5.389.500 | (600.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 19.945.200 | 0 | 0 | 0 | 19.945.200 | 13.692.199 | 0 | 0 | 0 | 13.692.199 | (6.253.001) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.010.000 | 0 | 0 | 0 | 10.010.000 | 4.799.200 | 0 | 0 | 0 | 4.799.200 | (5.210.800) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19.750.000 | 0 | 0 | 0 | 19.750.000 | 19.750.000 | 0 | 0 | 0 | 19.750.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 29.914.390 | 0 | 0 | 0 | 29.914.390 | 10.314.390 | 0 | 0 | 0 | 10.314.390 | (19.600.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.054.990 | 0 | 0 | 0 | 10.054.990 | 9.254.990 | 0 | 0 | 0 | 9.254.990 | (800.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 19.859.400 | 0 | 0 | 0 | 19.859.400 | 1.059.400 | 0 | 0 | 0 | 1.059.400 | (18.800.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 11.880.000 | 0 | 0 | 0 | 11.880.000 | 15.010.001 | 0 | 0 | 0 | 15.010.001 | 3.130.001 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.870.000 | 0 | 0 | 0 | 1.870.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (1.869.999) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10.010.000 | 0 | 0 | 0 | 10.010.000 | 15.010.000 | 0 | 0 | 0 | 15.010.000 | 5.000.000 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 635.015.800 | 0 | 0 | 0 | 635.015.800 | 675.015.800 | 0 | 0 | 0 | 675.015.800 | 40.000.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 635.015.800 | 0 | 0 | 0 | 635.015.800 | 675.015.800 | 0 | 0 | 0 | 675.015.800 | 40.000.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 21.600.000 | 0 | 0 | 0 | 21.600.000 | 21.600.000 | 0 | 0 | 0 | 21.600.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 7.200.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | 2.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | 2.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 34.500.000 | 0 | 0 | 0 | 34.500.000 | 34.500.000 | 0 | 0 | 0 | 34.500.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | 2.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 26.400.000 | 0 | 0 | 0 | 26.400.000 | 31.200.000 | 0 | 0 | 0 | 31.200.000 | 4.800.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | 2.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | 2.02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 7.200.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 9.600.000 | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 | (4.800.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 14.400.000 | 0 | 0 | 0 | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 | 0 | 0 | 14.400.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 117.433.300 | 0 | 0 | 0 | 117.433.300 | 245.575.800 | 0 | 0 | 0 | 245.575.800 | 128.142.500 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 271.882.500 | 0 | 0 | 0 | 271.882.500 | 143.740.000 | 0 | 0 | 0 | 143.740.000 | (128.142.500) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.12 | 02 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | | | | Puskesmas Siantan Utara | 639.262.100 | 106.128.000 | 0 | 0 | 745.390.100 | 485.693.492 | 105.907.212 | 0 | 0 | 591.600.704 | (153.789.396) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 91.639.800 | 106.128.000 | 0 | 0 | 197.767.800 | 58.364.670 | 105.907.212 | 0 | 0 | 164.271.882 | (33.495.918) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 52.644.900 | 106.128.000 | 0 | 0 | 158.772.900 | 33.999.769 | 105.907.212 | 0 | 0 | 139.906.981 | (18.865.919) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.560.000 | 0 | 0 | 0 | 4.560.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | (4.110.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 106.128.000 | 0 | 0 | 106.128.000 | 42.369 | 105.907.212 | 0 | 0 | 105.949.581 | (178.419) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.007.400 | 0 | 0 | 0 | 6.007.400 | 6.007.400 | 0 | 0 | 0 | 6.007.400 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 19.997.500 | 0 | 0 | 0 | 19.997.500 | 9.500.000 | 0 | 0 | 0 | 9.500.000 | (10.497.500) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7.080.000 | 0 | 0 | 0 | 7.080.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | (3.080.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | (1.000.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 26.984.900 | 0 | 0 | 0 | 26.984.900 | 22.364.900 | 0 | 0 | 0 | 22.364.900 | (4.620.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.172.700 | 0 | 0 | 0 | 8.172.700 | 8.172.700 | 0 | 0 | 0 | 8.172.700 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18.812.200 | 0 | 0 | 0 | 18.812.200 | 14.192.200 | 0 | 0 | 0 | 14.192.200 | (4.620.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12.010.000 | 0 | 0 | 0 | 12.010.000 | 2.000.001 | 0 | 0 | 0 | 2.000.001 | (10.009.999) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10.010.000 | 0 | 0 | 0 | 10.010.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (10.009.999) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 478.968.300 | 0 | 0 | 0 | 478.968.300 | 390.924.822 | 0 | 0 | 0 | 390.924.822 | (88.043.478) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 478.968.300 | 0 | 0 | 0 | 478.968.300 | 390.924.822 | 0 | 0 | 0 | 390.924.822 | (88.043.478) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 22.100.000 | 0 | 0 | 0 | 22.100.000 | 22.100.000 | 0 | 0 | 0 | 22.100.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 58.500.000 | 0 | 0 | 0 | 58.500.000 | 42.900.000 | 0 | 0 | 0 | 42.900.000 | (15.600.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 31.200.000 | 0 | 0 | 0 | 31.200.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (31.199.999) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 02 | 2.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 31.200.000 | 0 | 0 | 0 | 31.200.000 | 31.200.000 | 0 | 0 | 0 | 31.200.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 02 | 2.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 33.750.800 | 0 | 0 | 0 | 33.750.800 | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | (31.150.800) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 02 | 2.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 02 | 2.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 14.300.000 | 0 | 0 | 0 | 14.300.000 | 14.300.000 | 0 | 0 | 0 | 14.300.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 02 | 2.02 | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 19.200.000 | 0 | 0 | 0 | 19.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19.200.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 02 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 17.800.000 | 0 | 0 | 0 | 17.800.000 | 14.300.000 | 0 | 0 | 0 | 14.300.000 | (3.500.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 02 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 7.800.000 | 0 | 0 | 0 | 7.800.000 | 7.800.000 | 0 | 0 | 0 | 7.800.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 02 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 15.600.000 | 0 | 0 | 0 | 15.600.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (15.599.999) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 61.700.000 | 0 | 0 | 0 | 61.700.000 | 52.553.320 | 0 | 0 | 0 | 52.553.320 | (9.146.680) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 02 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 16.700.000 | 0 | 0 | 0 | 16.700.000 | 14.300.000 | 0 | 0 | 0 | 14.300.000 | (2.400.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 02 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 142.117.500 | 0 | 0 | 0 | 142.117.500 | 135.867.500 | 0 | 0 | 0 | 135.867.500 | (6.250.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.004.000 | 0 | 0 | 0 | 46.004.000 | 46.004.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 68.654.000 | 0 | 0 | 0 | 68.654.000 | 36.404.000 | 0 | 0 | 0 | 36.404.000 | (32.250.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 05 | 2.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 37.454.000 | 0 | 0 | 0 | 37.454.000 | 20.804.000 | 0 | 0 | 0 | 20.804.000 | (16.650.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 37.454.000 | 0 | 0 | 0 | 37.454.000 | 20.804.000 | 0 | 0 | 0 | 20.804.000 | (16.650.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 05 | 2.02 | | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 31.200.000 | 0 | 0 | 0 | 31.200.000 | 15.600.000 | 0 | 0 | 0 | 15.600.000 | (15.600.000) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.13 | 05 | 2.02 | 01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 31.200.000 | 0 | 0 | 0 | 31.200.000 | 15.600.000 | 0 | 0 | 0 | 15.600.000 | (15.600.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | | | | Puskesmas Kute Siantan | 712.252.808 | 113.765.960 | 0 | 0 | 826.018.768 | 712.111.457 | 89.401.511 | 0 | 0 | 801.512.968 | (24.505.800) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 89.236.750 | 113.765.960 | 0 | 0 | 203.002.710 | 78.345.399 | 89.401.511 | 0 | 0 | 167.746.910 | (35.255.800) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 55.355.450 | 113.765.960 | 0 | 0 | 169.121.410 | 50.097.899 | 89.401.511 | 0 | 0 | 139.499.410 | (29.622.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.158.450 | 0 | 0 | 0 | 5.158.450 | 4.659.250 | 0 | 0 | 0 | 4.659.250 | (499.200) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 108.766.460 | 0 | 0 | 108.766.460 | 683.649 | 84.402.011 | 0 | 0 | 85.085.660 | (23.680.800) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.137.000 | 4.999.500 | 0 | 0 | 10.136.500 | 2.370.000 | 4.999.500 | 0 | 0 | 7.369.500 | (2.767.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 7.700.000 | 0 | 0 | 0 | 7.700.000 | 5.025.000 | 0 | 0 | 0 | 5.025.000 | (2.675.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.010.000 | 0 | 0 | 0 | 10.010.000 | 10.010.000 | 0 | 0 | 0 | 10.010.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 27.350.000 | 0 | 0 | 0 | 27.350.000 | 27.350.000 | 0 | 0 | 0 | 27.350.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 23.871.300 | 0 | 0 | 0 | 23.871.300 | 18.247.500 | 0 | 0 | 0 | 18.247.500 | (5.623.800) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 17.271.300 | 0 | 0 | 0 | 17.271.300 | 11.647.500 | 0 | 0 | 0 | 11.647.500 | (5.623.800) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 6.600.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 10.010.000 | 0 | 0 | 0 | 10.010.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | (10.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10.010.000 | 0 | 0 | 0 | 10.010.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | (10.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 559.816.058 | 0 | 0 | 0 | 559.816.058 | 570.566.058 | 0 | 0 | 0 | 570.566.058 | 10.750.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 559.816.058 | 0 | 0 | 0 | 559.816.058 | 570.566.058 | 0 | 0 | 0 | 570.566.058 | 10.750.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 21.488.000 | 0 | 0 | 0 | 21.488.000 | 21.488.000 | 0 | 0 | 0 | 21.488.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 24.500.000 | 0 | 0 | 0 | 24.500.000 | 24.500.000 | 0 | 0 | 0 | 24.500.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 18.555.000 | 0 | 0 | 0 | 18.555.000 | 18.555.000 | 0 | 0 | 0 | 18.555.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 28.100.000 | 0 | 0 | 0 | 28.100.000 | 28.100.000 | 0 | 0 | 0 | 28.100.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 29.750.000 | 0 | 0 | 0 | 29.750.000 | 24.750.000 | 0 | 0 | 0 | 24.750.000 | (5.000.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 24.675.000 | 0 | 0 | 0 | 24.675.000 | 24.675.000 | 0 | 0 | 0 | 24.675.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 23.108.000 | 0 | 0 | 0 | 23.108.000 | 23.108.000 | 0 | 0 | 0 | 23.108.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 20.300.000 | 0 | 0 | 0 | 20.300.000 | 20.300.000 | 0 | 0 | 0 | 20.300.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 29.925.000 | 0 | 0 | 0 | 29.925.000 | 29.925.000 | 0 | 0 | 0 | 29.925.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 21.730.000 | 0 | 0 | 0 | 21.730.000 | 21.730.000 | 0 | 0 | 0 | 21.730.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 29.000.000 | 0 | 0 | 0 | 29.000.000 | 29.000.000 | 0 | 0 | 0 | 29.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 64.251.521 | 0 | 0 | 0 | 64.251.521 | 64.251.521 | 0 | 0 | 0 | 64.251.521 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 107.017.292 | 0 | 0 | 0 | 107.017.292 | 95.017.292 | 0 | 0 | 0 | 95.017.292 | (12.000.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 117.416.245 | 0 | 0 | 0 | 117.416.245 | 98.066.245 | 0 | 0 | 0 | 98.066.245 | (19.350.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.100.000 | 0 | 0 | 0 | 47.100.000 | 47.100.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 63.200.000 | 0 | 0 | 0 | 63.200.000 | 63.200.000 | 0 | 0 | 0 | 63.200.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 05 | 2.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 23.050.000 | 0 | 0 | 0 | 23.050.000 | 23.050.000 | 0 | 0 | 0 | 23.050.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 23.050.000 | 0 | 0 | 0 | 23.050.000 | 23.050.000 | 0 | 0 | 0 | 23.050.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 05 | 2.02 | | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 40.150.000 | 0 | 0 | 0 | 40.150.000 | 40.150.000 | 0 | 0 | 0 | 40.150.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 05 | 2.02 | 01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 40.150.000 | 0 | 0 | 0 | 40.150.000 | 40.150.000 | 0 | 0 | 0 | 40.150.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 2. | 4.0. | 0. | RSUD Jemaja | 941.724.605 | 2.200.000 | 0 | 0 | 943.924.605 | 881.944.717 | 0 | 0 | 0 | 881.944.717 | (61.979.888) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 919.724.605 | 2.200.000 | 0 | 0 | 921.924.605 | 859.944.717 | 0 | 0 | 0 | 859.944.717 | (61.979.888) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 567.181.935 | 2.200.000 | 0 | 0 | 569.381.935 | 452.916.981 | 0 | 0 | 0 | 452.916.981 | (116.464.954) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 36.935.800 | 2.200.000 | 0 | 0 | 39.135.800 | 21.903.632 | 0 | 0 | 0 | 21.903.632 | (17.232.168) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 63.610.800 | 0 | 0 | 0 | 63.610.800 | 58.274.889 | 0 | 0 | 0 | 58.274.889 | (5.335.911) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 291.371.335 | 0 | 0 | 0 | 291.371.335 | 268.371.335 | 0 | 0 | 0 | 268.371.335 | (23.000.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55.968.000 | 0 | 0 | 0 | 55.968.000 | 45.898.075 | 0 | 0 | 0 | 45.898.075 | (10.069.925) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 119.296.000 | 0 | 0 | 0 | 119.296.000 | 58.469.050 | 0 | 0 | 0 | 58.469.050 | (60.826.950) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 188.050.670 | 0 | 0 | 0 | 188.050.670 | 180.165.136 | 0 | 0 | 0 | 180.165.136 | (7.885.534) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 48.647.170 | 0 | 0 | 0 | 48.647.170 | 47.183.068 | 0 | 0 | 0 | 47.183.068 | (1.464.102) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 112.552.500 | 0 | 0 | 0 | 112.552.500 | 108.352.500 | 0 | 0 | 0 | 108.352.500 | (4.200.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26.851.000 | 0 | 0 | 0 | 26.851.000 | 24.629.568 | 0 | 0 | 0 | 24.629.568 | (2.221.432) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 164.492.000 | 0 | 0 | 0 | 164.492.000 | 226.862.600 | 0 | 0 | 0 | 226.862.600 | 62.370.600 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 44.462.000 | 0 | 0 | 0 | 44.462.000 | 42.213.000 | 0 | 0 | 0 | 42.213.000 | (2.249.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 120.030.000 | 0 | 0 | 0 | 120.030.000 | 94.649.600 | 0 | 0 | 0 | 94.649.600 | (25.380.400) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 0 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.01 | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.01 | 20 | | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 2. | 4.0. | 0. | | RSUD Palmatak | 1.123.019.140 | 0 | 0 | 0 | 1.123.019.140 | 1.306.109.450 | 0 | 0 | 0 | 1.306.109.450 | 183.090.310 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.068.019.140 | 0 | 0 | 0 | 1.068.019.140 | 1.271.109.450 | 0 | 0 | 0 | 1.271.109.450 | 203.090.310 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 571.113.000 | 0 | 0 | 0 | 571.113.000 | 822.856.410 | 0 | 0 | 0 | 822.856.410 | 251.743.410 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 22.390.500 | 0 | 0 | 0 | 22.390.500 | 140.190.000 | 0 | 0 | 0 | 140.190.000 | 117.799.500 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 80.064.600 | 0 | 0 | 0 | 80.064.600 | 92.603.530 | 0 | 0 | 0 | 92.603.530 | 12.538.930 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 293.981.900 | 0 | 0 | 0 | 293.981.900 | 474.390.380 | 0 | 0 | 0 | 474.390.380 | 180.408.480 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 38.500.000 | 0 | 0 | 0 | 38.500.000 | 38.472.500 | 0 | 0 | 0 | 38.472.500 | (27.500) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 136.176.000 | 0 | 0 | 0 | 136.176.000 | 77.200.000 | 0 | 0 | 0 | 77.200.000 | (58.976.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 235.491.340 | 0 | 0 | 0 | 235.491.340 | 234.338.280 | 0 | 0 | 0 | 234.338.280 | (1.153.060) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 46.648.455 | 0 | 0 | 0 | 46.648.455 | 45.565.395 | 0 | 0 | 0 | 45.565.395 | (1.083.060) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 179.448.885 | 0 | 0 | 0 | 179.448.885 | 179.448.885 | 0 | 0 | 0 | 179.448.885 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 03 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.394.000 | 0 | 0 | 0 | 9.394.000 | 9.324.000 | 0 | 0 | 0 | 9.324.000 | (70.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 261.414.800 | 0 | 0 | 0 | 261.414.800 | 213.914.760 | 0 | 0 | 0 | 213.914.760 | (47.500.040) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 98.010.000 | 0 | 0 | 0 | 98.010.000 | 30.510.000 | 0 | 0 | 0 | 30.510.000 | (67.500.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | 09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 163.404.800 | 0 | 0 | 0 | 163.404.800 | 183.404.760 | 0 | 0 | 0 | 183.404.760 | 19.999.960 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | (20.000.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.01 | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | (20.000.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.01 | 20 | | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | (20.000.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 2. | 4.0. | 0. | | Puskesmas Siantan Tengah | 1.459.973.003 | 0 | 0 | 0 | 1.459.973.003 | 1.429.357.203 | 28.943.250 | 0 | 0 | 1.458.300.453 | (1.672.550) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 476.689.003 | 0 | 0 | 0 | 476.689.003 | 460.988.693 | 0 | 0 | 0 | 460.988.693 | (15.700.310) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 258.979.385 | 0 | 0 | 0 | 258.979.385 | 305.062.255 | 0 | 0 | 0 | 305.062.255 | 46.082.870 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.086.480 | 0 | 0 | 0 | 2.086.480 | 2.086.480 | 0 | 0 | 0 | 2.086.480 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13.380.400 | 0 | 0 | 0 | 13.380.400 | 12.213.270 | 0 | 0 | 0 | 12.213.270 | (1.167.130) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 212.012.555 | 0 | 0 | 0 | 212.012.555 | 259.262.555 | 0 | 0 | 0 | 259.262.555 | 47.250.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 11.499.950 | 0 | 0 | 0 | 11.499.950 | 11.499.950 | 0 | 0 | 0 | 11.499.950 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 182.135.618 | 0 | 0 | 0 | 182.135.618 | 120.352.438 | 0 | 0 | 0 | 120.352.438 | (61.783.180) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 37.895.054 | 0 | 0 | 0 | 37.895.054 | 35.371.874 | 0 | 0 | 0 | 35.371.874 | (2.523.180) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 96.346.564 | 0 | 0 | 0 | 96.346.564 | 72.346.564 | 0 | 0 | 0 | 72.346.564 | (24.000.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 03 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 47.894.000 | 0 | 0 | 0 | 47.894.000 | 12.634.000 | 0 | 0 | 0 | 12.634.000 | (35.260.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 35.574.000 | 0 | 0 | 0 | 35.574.000 | 35.574.000 | 0 | 0 | 0 | 35.574.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.574.000 | 0 | 0 | 0 | 35.574.000 | 35.574.000 | 0 | 0 | 0 | 35.574.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 983.284.000 | 0 | 0 | 0 | 983.284.000 | 968.368.510 | 28.943.250 | 0 | 0 | 997.311.760 | 14.027.760 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 983.284.000 | 0 | 0 | 0 | 983.284.000 | 968.368.510 | 28.943.250 | 0 | 0 | 997.311.760 | 14.027.760 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 01 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 32.970.000 | 0 | 0 | 0 | 32.970.000 | 32.970.000 | 0 | 0 | 0 | 32.970.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 02 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 15.700.000 | 0 | 0 | 0 | 15.700.000 | 15.700.000 | 0 | 0 | 0 | 15.700.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 03 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 10.990.000 | 0 | 0 | 0 | 10.990.000 | 10.990.000 | 0 | 0 | 0 | 10.990.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 04 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 83.890.000 | 0 | 0 | 0 | 83.890.000 | 83.890.000 | 0 | 0 | 0 | 83.890.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 05 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 9.420.000 | 0 | 0 | 0 | 9.420.000 | 9.420.000 | 0 | 0 | 0 | 9.420.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 06 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 36.800.000 | 0 | 0 | 0 | 36.800.000 | 36.800.000 | 0 | 0 | 0 | 36.800.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 07 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 18.840.000 | 0 | 0 | 0 | 18.840.000 | 18.840.000 | 0 | 0 | 0 | 18.840.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 10 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 4.710.000 | 0 | 0 | 0 | 4.710.000 | 4.710.000 | 0 | 0 | 0 | 4.710.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 11 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 10.990.000 | 0 | 0 | 0 | 10.990.000 | 10.990.000 | 0 | 0 | 0 | 10.990.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 13 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 3.140.000 | 0 | 0 | 0 | 3.140.000 | 3.140.000 | 0 | 0 | 0 | 3.140.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 16 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 27.520.000 | 0 | 0 | 0 | 27.520.000 | 27.520.000 | 0 | 0 | 0 | 27.520.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 17 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 15.690.000 | 0 | 0 | 0 | 15.690.000 | 15.690.000 | 0 | 0 | 0 | 15.690.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 18 | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 62.887.000 | 0 | 0 | 0 | 62.887.000 | 81.246.375 | 0 | 0 | 0 | 81.246.375 | 18.359.375 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 20 | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 308.563.000 | 0 | 0 | 0 | 308.563.000 | 233.449.150 | 0 | 0 | 0 | 233.449.150 | (75.113.850) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 22 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 3.140.000 | 0 | 0 | 0 | 3.140.000 | 3.140.000 | 0 | 0 | 0 | 3.140.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 25 | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 73.320.000 | 0 | 0 | 0 | 73.320.000 | 76.470.000 | 0 | 0 | 0 | 76.470.000 | 3.150.000 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 28.320.000 | 0 | 0 | 0 | 28.320.000 | 28.270.000 | 0 | 0 | 0 | 28.270.000 | (50.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 230.114.000 | 0 | 0 | 0 | 230.114.000 | 268.852.985 | 28.943.250 | 0 | 0 | 297.796.235 | 67.682.235 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 6.280.000 | 0 | 0 | 0 | 6.280.000 | 6.280.000 | 0 | 0 | 0 | 6.280.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 2. | 4.0. | 0. | Puskesmas Letung | 1.578.655.185 | 38.500.000 | 0 | 0 | 1.617.155.185 | 1.648.895.910 | 47.590.000 | 0 | 0 | 1.696.485.910 | 79.330.725 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 255.678.535 | 0 | 0 | 0 | 255.678.535 | 314.527.000 | 0 | 0 | 0 | 314.527.000 | 58.848.465 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 114.578.150 | 0 | 0 | 0 | 114.578.150 | 165.717.000 | 0 | 0 | 0 | 165.717.000 | 51.138.850 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.368.000 | 0 | 0 | 0 | 5.368.000 | 5.368.000 | 0 | 0 | 0 | 5.368.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 16.718.000 | 0 | 0 | 0 | 16.718.000 | 16.718.000 | 0 | 0 | 0 | 16.718.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 71.742.150 | 0 | 0 | 0 | 71.742.150 | 75.050.000 | 0 | 0 | 0 | 75.050.000 | 3.307.850 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20.750.000 | 0 | 0 | 0 | 20.750.000 | 68.581.000 | 0 | 0 | 0 | 68.581.000 | 47.831.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 119.375.385 | 0 | 0 | 0 | 119.375.385 | 115.594.000 | 0 | 0 | 0 | 115.594.000 | (3.781.385) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 29.167.385 | 0 | 0 | 0 | 29.167.385 | 38.175.000 | 0 | 0 | 0 | 38.175.000 | 9.007.615 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 66.019.000 | 0 | 0 | 0 | 66.019.000 | 51.019.000 | 0 | 0 | 0 | 51.019.000 | (15.000.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 24.189.000 | 0 | 0 | 0 | 24.189.000 | 26.400.000 | 0 | 0 | 0 | 26.400.000 | 2.211.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 21.725.000 | 0 | 0 | 0 | 21.725.000 | 33.216.000 | 0 | 0 | 0 | 33.216.000 | 11.491.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 21.725.000 | 0 | 0 | 0 | 21.725.000 | 33.216.000 | 0 | 0 | 0 | 33.216.000 | 11.491.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.314.226.650 | 38.500.000 | 0 | 0 | 1.352.726.650 | 1.325.618.910 | 47.590.000 | 0 | 0 | 1.373.208.910 | 20.482.260 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.314.226.650 | 38.500.000 | 0 | 0 | 1.352.726.650 | 1.325.618.910 | 47.590.000 | 0 | 0 | 1.373.208.910 | 20.482.260 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 91.050.000 | 0 | 0 | 0 | 91.050.000 | 91.050.000 | 0 | 0 | 0 | 91.050.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (45.000.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 109.880.800 | 0 | 0 | 0 | 109.880.800 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | (89.880.800) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 49.800.000 | 0 | 0 | 0 | 49.800.000 | 49.800.000 | 0 | 0 | 0 | 49.800.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 37.100.000 | 0 | 0 | 0 | 37.100.000 | 37.100.000 | 0 | 0 | 0 | 37.100.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 108.727.000 | 0 | 0 | 0 | 108.727.000 | 108.727.000 | 0 | 0 | 0 | 108.727.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 483.248.850 | 0 | 0 | 0 | 483.248.850 | 558.129.650 | 0 | 0 | 0 | 558.129.650 | 74.880.800 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 374.420.000 | 38.500.000 | 0 | 0 | 412.920.000 | 445.812.260 | 47.590.000 | 0 | 0 | 493.402.260 | 80.482.260 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 8.750.000 | 0 | 0 | 0 | 8.750.000 | 8.750.000 | 0 | 0 | 0 | 8.750.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 05 | 2.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 8.750.000 | 0 | 0 | 0 | 8.750.000 | 8.750.000 | 0 | 0 | 0 | 8.750.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 8.750.000 | 0 | 0 | 0 | 8.750.000 | 8.750.000 | 0 | 0 | 0 | 8.750.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 2. | 4.0. | 0. | Puskesmas Jemaja Timur | 1.196.492.621 | 3.520.000 | 0 | 0 | 1.200.012.621 | 1.274.788.493 | 20.170.000 | 0 | 0 | 1.294.958.493 | 94.945.872 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 262.448.000 | 0 | 0 | 0 | 262.448.000 | 337.912.000 | 0 | 0 | 0 | 337.912.000 | 75.464.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 88.598.000 | 0 | 0 | 0 | 88.598.000 | 132.938.000 | 0 | 0 | 0 | 132.938.000 | 44.340.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.646.000 | 0 | 0 | 0 | 1.646.000 | 7.521.000 | 0 | 0 | 0 | 7.521.000 | 5.875.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.644.000 | 0 | 0 | 0 | 10.644.000 | 12.509.000 | 0 | 0 | 0 | 12.509.000 | 1.865.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 46.958.000 | 0 | 0 | 0 | 46.958.000 | 78.508.000 | 0 | 0 | 0 | 78.508.000 | 31.550.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.400.000 | 0 | 0 | 0 | 9.400.000 | 14.450.000 | 0 | 0 | 0 | 14.450.000 | 5.050.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19.950.000 | 0 | 0 | 0 | 19.950.000 | 19.950.000 | 0 | 0 | 0 | 19.950.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93.515.600 | 0 | 0 | 0 | 93.515.600 | 83.795.600 | 0 | 0 | 0 | 83.795.600 | (9.720.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 26.836.000 | 0 | 0 | 0 | 26.836.000 | 26.836.000 | 0 | 0 | 0 | 26.836.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 66.679.600 | 0 | 0 | 0 | 66.679.600 | 45.679.600 | 0 | 0 | 0 | 45.679.600 | (21.000.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.280.000 | 0 | 0 | 0 | 11.280.000 | 11.280.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80.334.400 | 0 | 0 | 0 | 80.334.400 | 121.178.400 | 0 | 0 | 0 | 121.178.400 | 40.844.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42.490.000 | 0 | 0 | 0 | 42.490.000 | 83.334.000 | 0 | 0 | 0 | 83.334.000 | 40.844.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 37.844.400 | 0 | 0 | 0 | 37.844.400 | 37.844.400 | 0 | 0 | 0 | 37.844.400 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 847.188.371 | 3.520.000 | 0 | 0 | 850.708.371 | 830.691.118 | 20.170.000 | 0 | 0 | 850.861.118 | 152.747 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 847.188.371 | 3.520.000 | 0 | 0 | 850.708.371 | 830.691.118 | 20.170.000 | 0 | 0 | 850.861.118 | 152.747 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 29.700.000 | 0 | 0 | 0 | 29.700.000 | 45.900.000 | 0 | 0 | 0 | 45.900.000 | 16.200.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 6.300.000 | 0 | 0 | 0 | 6.300.000 | 12.600.000 | 0 | 0 | 0 | 12.600.000 | 6.300.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 3.600.161 | 0 | 0 | 0 | 3.600.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3.600.161) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 70.950.000 | 0 | 0 | 0 | 70.950.000 | 202.350.000 | 0 | 0 | 0 | 202.350.000 | 131.400.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 40.500.000 | 0 | 0 | 0 | 40.500.000 | 40.500.000 | 0 | 0 | 0 | 40.500.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 13.800.000 | 0 | 0 | 0 | 13.800.000 | 13.800.000 | 0 | 0 | 0 | 13.800.000 | 0 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000.000 | 18.000.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 4.500.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 10.200.000 | 0 | 0 | 0 | 10.200.000 | 20.800.000 | 0 | 0 | 0 | 20.800.000 | 10.600.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 42.156.600 | 0 | 0 | 0 | 42.156.600 | 11.797.448 | 0 | 0 | 0 | 11.797.448 | (30.359.152) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28.000.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 5.400.000 | 0 | 0 | 0 | 5.400.000 | 10.800.000 | 0 | 0 | 0 | 10.800.000 | 5.400.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 378.487.300 | 0 | 0 | 0 | 378.487.300 | 186.561.350 | 0 | 0 | 0 | 186.561.350 | (191.925.950) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 182.094.310 | 3.520.000 | 0 | 0 | 185.614.310 | 227.082.320 | 20.170.000 | 0 | 0 | 247.252.320 | 61.638.010 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 86.856.250 | 0 | 0 | 0 | 86.856.250 | 106.185.375 | 0 | 0 | 0 | 106.185.375 | 19.329.125 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 05 | 2.02 | | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 86.856.250 | 0 | 0 | 0 | 86.856.250 | 106.185.375 | 0 | 0 | 0 | 106.185.375 | 19.329.125 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 05 | 2.02 | 01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 86.856.250 | 0 | 0 | 0 | 86.856.250 | 106.185.375 | 0 | 0 | 0 | 106.185.375 | 19.329.125 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 2. | 4.0. | 0. | Puskesmas Palmatak | 2.267.026.015 | 104.544.000 | 0 | 0 | 2.371.570.015 | 2.264.540.867 | 248.919.000 | 0 | 0 | 2.513.459.867 | 141.889.852 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 473.066.200 | 0 | 0 | 0 | 473.066.200 | 469.966.200 | 144.375.000 | 0 | 0 | 614.341.200 | 141.275.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 285.267.790 | 0 | 0 | 0 | 285.267.790 | 294.167.790 | 144.375.000 | 0 | 0 | 438.542.790 | 153.275.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.339.500 | 0 | 0 | 0 | 4.339.500 | 4.339.500 | 0 | 0 | 0 | 4.339.500 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.375.000 | 0 | 0 | 144.375.000 | 144.375.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 32.813.000 | 0 | 0 | 0 | 32.813.000 | 32.813.000 | 0 | 0 | 0 | 32.813.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 200.665.290 | 0 | 0 | 0 | 200.665.290 | 206.565.290 | 0 | 0 | 0 | 206.565.290 | 5.900.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 27.500.000 | 0 | 0 | 0 | 27.500.000 | 27.500.000 | 0 | 0 | 0 | 27.500.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19.950.000 | 0 | 0 | 0 | 19.950.000 | 22.950.000 | 0 | 0 | 0 | 22.950.000 | 3.000.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 138.445.410 | 0 | 0 | 0 | 138.445.410 | 126.445.410 | 0 | 0 | 0 | 126.445.410 | (12.000.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50.524.410 | 0 | 0 | 0 | 50.524.410 | 50.524.410 | 0 | 0 | 0 | 50.524.410 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 79.341.000 | 0 | 0 | 0 | 79.341.000 | 67.341.000 | 0 | 0 | 0 | 67.341.000 | (12.000.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8.580.000 | 0 | 0 | 0 | 8.580.000 | 8.580.000 | 0 | 0 | 0 | 8.580.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 49.353.000 | 0 | 0 | 0 | 49.353.000 | 49.353.000 | 0 | 0 | 0 | 49.353.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.354.000 | 0 | 0 | 0 | 24.354.000 | 24.354.000 | 0 | 0 | 0 | 24.354.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 24.999.000 | 0 | 0 | 0 | 24.999.000 | 24.999.000 | 0 | 0 | 0 | 24.999.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.793.959.815 | 104.544.000 | 0 | 0 | 1.898.503.815 | 1.794.574.667 | 104.544.000 | 0 | 0 | 1.899.118.667 | 614.852 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.793.959.815 | 104.544.000 | 0 | 0 | 1.898.503.815 | 1.794.574.667 | 104.544.000 | 0 | 0 | 1.899.118.667 | 614.852 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 37.930.000 | 0 | 0 | 0 | 37.930.000 | 22.080.000 | 0 | 0 | 0 | 22.080.000 | (15.850.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 7.440.000 | 0 | 0 | 0 | 7.440.000 | 8.440.000 | 0 | 0 | 0 | 8.440.000 | 1.000.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 28.560.000 | 0 | 0 | 0 | 28.560.000 | 7.440.000 | 0 | 0 | 0 | 7.440.000 | (21.120.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 52.080.000 | 0 | 0 | 0 | 52.080.000 | 7.440.000 | 0 | 0 | 0 | 7.440.000 | (44.640.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 14.880.000 | 0 | 0 | 0 | 14.880.000 | 32.440.000 | 0 | 0 | 0 | 32.440.000 | 17.560.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 7.440.000 | 0 | 0 | 0 | 7.440.000 | 7.440.000 | 0 | 0 | 0 | 7.440.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 43.960.000 | 0 | 0 | 0 | 43.960.000 | 36.900.000 | 0 | 0 | 0 | 36.900.000 | (7.060.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 180.114.584 | 0 | 0 | 0 | 180.114.584 | 247.224.584 | 0 | 0 | 0 | 247.224.584 | 67.110.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 248.031.116 | 0 | 0 | 0 | 248.031.116 | 45.093.160 | 0 | 0 | 0 | 45.093.160 | (202.937.956) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 372.073.200 | 0 | 0 | 0 | 372.073.200 | 420.725.704 | 0 | 0 | 0 | 420.725.704 | 48.652.504 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 801.450.915 | 104.544.000 | 0 | 0 | 905.994.915 | 959.351.219 | 104.544.000 | 0 | 0 | 1.063.895.219 | 157.900.304 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 2. | 4.0. | 0. | Puskesmas Tarempa | 1.806.311.506 | 129.902.717 | 0 | 0 | 1.936.214.223 | 1.868.541.812 | 157.408.866 | 0 | 0 | 2.025.950.678 | 89.736.455 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 279.522.233 | 0 | 0 | 0 | 279.522.233 | 254.360.377 | 0 | 0 | 0 | 254.360.377 | (25.161.856) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 129.596.960 | 0 | 0 | 0 | 129.596.960 | 113.135.104 | 0 | 0 | 0 | 113.135.104 | (16.461.856) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.923.600 | 0 | 0 | 0 | 4.923.600 | 4.080.226 | 0 | 0 | 0 | 4.080.226 | (843.374) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 26.320.360 | 0 | 0 | 0 | 26.320.360 | 24.344.298 | 0 | 0 | 0 | 24.344.298 | (1.976.062) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 53.078.000 | 0 | 0 | 0 | 53.078.000 | 56.778.000 | 0 | 0 | 0 | 56.778.000 | 3.700.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 27.775.000 | 0 | 0 | 0 | 27.775.000 | 23.932.580 | 0 | 0 | 0 | 23.932.580 | (3.842.420) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | (13.500.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 145.800.273 | 0 | 0 | 0 | 145.800.273 | 132.100.273 | 0 | 0 | 0 | 132.100.273 | (13.700.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 48.210.000 | 0 | 0 | 0 | 48.210.000 | 47.710.000 | 0 | 0 | 0 | 47.710.000 | (500.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 86.183.273 | 0 | 0 | 0 | 86.183.273 | 72.983.273 | 0 | 0 | 0 | 72.983.273 | (13.200.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11.407.000 | 0 | 0 | 0 | 11.407.000 | 11.407.000 | 0 | 0 | 0 | 11.407.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4.125.000 | 0 | 0 | 0 | 4.125.000 | 9.125.000 | 0 | 0 | 0 | 9.125.000 | 5.000.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4.125.000 | 0 | 0 | 0 | 4.125.000 | 9.125.000 | 0 | 0 | 0 | 9.125.000 | 5.000.000 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.526.789.273 | 129.902.717 | 0 | 0 | 1.656.691.990 | 1.614.181.435 | 157.408.866 | 0 | 0 | 1.771.590.301 | 114.898.311 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.526.789.273 | 129.902.717 | 0 | 0 | 1.656.691.990 | 1.614.181.435 | 157.408.866 | 0 | 0 | 1.771.590.301 | 114.898.311 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 9.750.700 | 0 | 0 | 0 | 9.750.700 | 11.586.500 | 0 | 0 | 0 | 11.586.500 | 1.835.800 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 6.300.000 | 0 | 0 | 0 | 6.300.000 | (700.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 7.280.000 | 0 | 0 | 0 | 7.280.000 | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 7.200.000 | (80.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 93.880.000 | 0 | 0 | 0 | 93.880.000 | 142.493.945 | 0 | 0 | 0 | 142.493.945 | 48.613.945 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 30.460.000 | 0 | 0 | 0 | 30.460.000 | 19.970.000 | 0 | 0 | 0 | 19.970.000 | (10.490.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 12.944.950 | 0 | 0 | 0 | 12.944.950 | 12.620.000 | 0 | 0 | 0 | 12.620.000 | (324.950) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 34.380.000 | 0 | 0 | 0 | 34.380.000 | 37.080.000 | 0 | 0 | 0 | 37.080.000 | 2.700.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 4.240.000 | 0 | 0 | 0 | 4.240.000 | 5.250.000 | 0 | 0 | 0 | 5.250.000 | 1.010.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 52.660.000 | 0 | 0 | 0 | 52.660.000 | 56.860.000 | 0 | 0 | 0 | 56.860.000 | 4.200.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12.720.000 | 0 | 0 | 0 | 12.720.000 | 11.550.000 | 0 | 0 | 0 | 11.550.000 | (1.170.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 15.840.000 | 0 | 0 | 0 | 15.840.000 | 12.150.000 | 0 | 0 | 0 | 12.150.000 | (3.690.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 9.955.500 | 0 | 0 | 0 | 9.955.500 | 11.975.000 | 0 | 0 | 0 | 11.975.000 | 2.019.500 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 143.489.042 | 0 | 0 | 0 | 143.489.042 | 206.398.502 | 0 | 0 | 0 | 206.398.502 | 62.909.460 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 180.785.700 | 0 | 0 | 0 | 180.785.700 | 36.784.500 | 0 | 0 | 0 | 36.784.500 | (144.001.200) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 12.160.000 | 0 | 0 | 0 | 12.160.000 | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 9.600.000 | (2.560.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 138.890.250 | 0 | 0 | 0 | 138.890.250 | 158.572.050 | 0 | 0 | 0 | 158.572.050 | 19.681.800 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 754.833.131 | 129.902.717 | 0 | 0 | 884.735.848 | 860.550.938 | 157.408.866 | 0 | 0 | 1.017.959.804 | 133.223.956 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 5.520.000 | 0 | 0 | 0 | 5.520.000 | 7.240.000 | 0 | 0 | 0 | 7.240.000 | 1.720.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 2. | 4.0. | 0. | Puskesmas Siantan Selatan | 1.114.255.499 | 55.187.000 | 0 | 0 | 1.169.442.499 | 1.157.238.527 | 57.908.700 | 0 | 0 | 1.215.147.227 | 45.704.728 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 197.156.220 | 0 | 0 | 0 | 197.156.220 | 298.288.204 | 2.220.000 | 0 | 0 | 300.508.204 | 103.351.984 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 137.838.080 | 0 | 0 | 0 | 137.838.080 | 183.805.330 | 2.220.000 | 0 | 0 | 186.025.330 | 48.187.250 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.000.780 | 0 | 0 | 0 | 12.000.780 | 12.000.780 | 0 | 0 | 0 | 12.000.780 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.458.300 | 0 | 0 | 0 | 15.458.300 | 35.136.100 | 2.220.000 | 0 | 0 | 37.356.100 | 21.897.800 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 15.440.700 | 0 | 0 | 0 | 15.440.700 | 15.440.700 | 0 | 0 | 0 | 15.440.700 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 45.031.900 | 0 | 0 | 0 | 45.031.900 | 45.031.900 | 0 | 0 | 0 | 45.031.900 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 29.988.400 | 0 | 0 | 0 | 29.988.400 | 56.277.850 | 0 | 0 | 0 | 56.277.850 | 26.289.450 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 19.918.000 | 0 | 0 | 0 | 19.918.000 | 19.918.000 | 0 | 0 | 0 | 19.918.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 30.589.660 | 0 | 0 | 0 | 30.589.660 | 78.526.394 | 0 | 0 | 0 | 78.526.394 | 47.936.734 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 30.589.660 | 0 | 0 | 0 | 30.589.660 | 78.526.394 | 0 | 0 | 0 | 78.526.394 | 47.936.734 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 28.728.480 | 0 | 0 | 0 | 28.728.480 | 35.956.480 | 0 | 0 | 0 | 35.956.480 | 7.228.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 18.744.000 | 0 | 0 | 0 | 18.744.000 | 25.972.000 | 0 | 0 | 0 | 25.972.000 | 7.228.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 9.984.480 | 0 | 0 | 0 | 9.984.480 | 9.984.480 | 0 | 0 | 0 | 9.984.480 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 790.981.987 | 55.187.000 | 0 | 0 | 846.168.987 | 732.833.031 | 55.688.700 | 0 | 0 | 788.521.731 | (57.647.256) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 790.981.987 | 55.187.000 | 0 | 0 | 846.168.987 | 732.833.031 | 55.688.700 | 0 | 0 | 788.521.731 | (57.647.256) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 36.800.000 | 0 | 0 | 0 | 36.800.000 | 36.600.000 | 0 | 0 | 0 | 36.600.000 | (200.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 16.100.000 | 0 | 0 | 0 | 16.100.000 | 16.100.000 | 0 | 0 | 0 | 16.100.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 8.150.000 | 0 | 0 | 0 | 8.150.000 | 16.300.000 | 0 | 0 | 0 | 16.300.000 | 8.150.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 25.450.000 | 0 | 0 | 0 | 25.450.000 | 25.450.000 | 0 | 0 | 0 | 25.450.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 16.300.000 | 0 | 0 | 0 | 16.300.000 | 16.300.000 | 0 | 0 | 0 | 16.300.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 33.000.000 | 0 | 0 | 0 | 33.000.000 | 32.860.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 48.900.000 | 0 | 0 | 0 | 48.900.000 | 48.900.000 | 0 | 0 | 0 | 48.900.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 54.750.000 | 0 | 0 | 0 | 54.750.000 | 54.750.000 | 0 | 0 | 0 | 54.750.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 8.550.000 | 0 | 0 | 0 | 8.550.000 | 8.550.000 | 0 | 0 | 0 | 8.550.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 19.450.000 | 0 | 0 | 0 | 19.450.000 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000.000 | 8.550.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 8.150.000 | 0 | 0 | 0 | 8.150.000 | 8.150.000 | 0 | 0 | 0 | 8.150.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 120.300.000 | 0 | 0 | 0 | 120.300.000 | 134.205.000 | 0 | 0 | 0 | 134.205.000 | 13.905.000 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 149.586.211 | 55.187.000 | 0 | 0 | 204.773.211 | 228.480.031 | 55.688.700 | 0 | 0 | 284.168.731 | 79.395.520 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 16.300.000 | 0 | 0 | 0 | 16.300.000 | 16.300.000 | 0 | 0 | 0 | 16.300.000 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 02 | 2.02 | 37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 262.055.776 | 0 | 0 | 0 | 262.055.776 | 61.748.000 | 0 | 0 | 0 | 61.748.000 | (200.307.776) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 126.117.292 | 0 | 0 | 0 | 126.117.292 | 126.117.292 | 0 | 0 | 0 | 126.117.292 | 0 |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 05 | 2.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 126.117.292 | 0 | 0 | 0 | 126.117.292 | 126.117.292 | 0 | 0 | 0 | 126.117.292 | 0 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.14 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 126.117.292 | 0 | 0 | 0 | 126.117.292 | 126.117.292 | 0 | 0 | 0 | 126.117.292 | 0 |
| **1** | **03** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **29.432.573.068** | **90.278.594.781** | **0** | **0** | **119.711.167.849** | **41.068.444.710** | **59.670.645.439** | **0** | **0** | **100.739.090.149** | **(18.972.077.700)** |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 28.667.166.017 | 89.933.134.281 | 0 | 0 | 118.600.300.298 | 40.074.247.681 | 59.489.414.939 | 0 | 0 | 99.563.662.620 | (19.036.637.678) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 15.340.543.693 | 681.136.300 | 0 | 0 | 16.021.679.993 | 12.590.618.668 | 335.653.901 | 0 | 0 | 12.926.272.569 | (3.095.407.424) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.614.512.811 | 0 | 0 | 0 | 9.614.512.811 | 7.123.370.190 | 0 | 0 | 0 | 7.123.370.190 | (2.491.142.621) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.544.652.811 | 0 | 0 | 0 | 8.544.652.811 | 6.053.510.190 | 0 | 0 | 0 | 6.053.510.190 | (2.491.142.621) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.069.860.000 | 0 | 0 | 0 | 1.069.860.000 | 1.069.860.000 | 0 | 0 | 0 | 1.069.860.000 | 0 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.824.750 | 0 | 0 | 0 | 338.824.750 | 338.824.750 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.824.750 | 0 | 0 | 0 | 338.824.750 | 338.824.750 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.649.229.100 | 681.136.300 | 0 | 0 | 2.330.365.400 | 1.846.329.100 | 335.653.900 | 0 | 0 | 2.181.983.000 | (148.382.400) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 333.614.100 | 681.136.300 | 0 | 0 | 1.014.750.400 | 480.854.100 | 335.653.900 | 0 | 0 | 816.508.000 | (198.242.400) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.315.615.000 | 0 | 0 | 0 | 1.315.615.000 | 1.365.475.000 | 0 | 0 | 0 | 1.365.475.000 | 49.860.000 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.645.767.694 | 0 | 0 | 0 | 3.645.767.694 | 2.752.233.540 | 1 | 0 | 0 | 2.752.233.541 | (893.534.153) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | (99.999.999) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.545.767.694 | 0 | 0 | 0 | 3.545.767.694 | 2.752.233.540 | 0 | 0 | 0 | 2.752.233.540 | (793.534.154) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 386.034.088 | 0 | 0 | 0 | 386.034.088 | 484.861.088 | 0 | 0 | 0 | 484.861.088 | 98.827.000 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.827.000 | 0 | 0 | 0 | 98.827.000 | 98.827.000 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 386.034.088 | 0 | 0 | 0 | 386.034.088 | 386.034.088 | 0 | 0 | 0 | 386.034.088 | 0 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 199.188.000 | 29.700.000.000 | 0 | 0 | 29.899.188.000 | 1.276.613.000 | 697.250.814 | 0 | 0 | 1.973.863.814 | (27.925.324.186) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 199.188.000 | 29.700.000.000 | 0 | 0 | 29.899.188.000 | 1.060.158.000 | 697.250.814 | 0 | 0 | 1.757.408.814 | (28.141.779.186) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | 199.188.000 | 0 | 0 | 0 | 199.188.000 | 494.923.000 | 0 | 0 | 0 | 494.923.000 | 295.735.000 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.343.000 | 0 | 0 | 80.343.000 | 80.343.000 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | Pembangunan Tanggul Sungai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.140.000 | 298.394.548 | 0 | 0 | 449.534.548 | 449.534.548 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.095.000 | 318.513.266 | 0 | 0 | 732.608.266 | 732.608.266 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.01 | 21 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | 0 | 29.700.000.000 | 0 | 0 | 29.700.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (29.700.000.000) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.455.000 | 0 | 0 | 0 | 216.455.000 | 216.455.000 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.360.000 | 0 | 0 | 0 | 99.360.000 | 99.360.000 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.02 | 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.095.000 | 0 | 0 | 0 | 117.095.000 | 117.095.000 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 901.971.193 | 23.839.166.138 | 0 | 0 | 24.741.137.331 | 1.376.077.493 | 5.593.188.887 | 0 | 0 | 6.969.266.380 | (17.771.870.951) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 901.971.193 | 23.839.166.138 | 0 | 0 | 24.741.137.331 | 1.376.077.493 | 5.593.188.887 | 0 | 0 | 6.969.266.380 | (17.771.870.951) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 276.073.948 | 5.541.048.887 | 0 | 0 | 5.817.122.835 | 276.073.948 | 5.541.048.887 | 0 | 0 | 5.817.122.835 | 0 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 06 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 625.897.245 | 18.298.117.251 | 0 | 0 | 18.924.014.496 | 1.100.003.545 | 52.140.000 | 0 | 0 | 1.152.143.545 | (17.771.870.951) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000.000 | 839.188.000 | 0 | 0 | 0 | 839.188.000 | 89.188.000 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 04 | 2.01 | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | 750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000.000 | 839.188.000 | 0 | 0 | 0 | 839.188.000 | 89.188.000 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.594.000 | 0 | 0 | 0 | 44.594.000 | 44.594.000 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 04 | 2.01 | 03 | Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS | 750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000.000 | 794.594.000 | 0 | 0 | 0 | 794.594.000 | 44.594.000 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 4.184.395.914 | 0 | 0 | 0 | 4.184.395.914 | 4.846.534.000 | 0 | 0 | 0 | 4.846.534.000 | 662.138.086 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 05 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4.184.395.914 | 0 | 0 | 0 | 4.184.395.914 | 4.846.534.000 | 0 | 0 | 0 | 4.846.534.000 | 662.138.086 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 05 | 2.01 | 12 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 4.184.395.914 | 0 | 0 | 0 | 4.184.395.914 | 4.846.534.000 | 0 | 0 | 0 | 4.846.534.000 | 662.138.086 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 1.800.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 201.800.000 | 40.025.000 | 638.709.142 | 0 | 0 | 678.734.142 | 476.934.142 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.800.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 201.800.000 | 40.025.000 | 638.709.142 | 0 | 0 | 678.734.142 | 476.934.142 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 06 | 2.01 | 05 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.180.000 | 438.709.142 | 0 | 0 | 453.889.142 | 453.889.142 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 06 | 2.01 | 12 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | 1.800.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 201.800.000 | 24.845.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 224.845.000 | 23.045.000 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 07 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.474.465.620 | 1.092.453.820 | 0 | 0 | 2.566.919.440 | 2.566.919.440 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 07 | 2.01 | | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.474.465.620 | 1.092.453.820 | 0 | 0 | 2.566.919.440 | 2.566.919.440 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 07 | 2.01 | 01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.474.465.620 | 1.092.453.820 | 0 | 0 | 2.566.919.440 | 2.566.919.440 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| | | | | | | Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 4.051.609.657 | 8.321.518.029 | 0 | 0 | 12.373.127.686 | 9.033.777.464 | 8.669.735.958 | 0 | 0 | 17.703.513.422 | 5.330.385.736 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 08 | 2.01 | | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 4.051.609.657 | 8.321.518.029 | 0 | 0 | 12.373.127.686 | 9.033.777.464 | 8.669.735.958 | 0 | 0 | 17.703.513.422 | 5.330.385.736 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 08 | 2.01 | 01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 163.405.000 | 0 | 0 | 0 | 163.405.000 | 149.455.000 | 0 | 0 | 0 | 149.455.000 | (13.950.000) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 08 | 2.01 | 02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 3.888.204.657 | 8.321.518.029 | 0 | 0 | 12.209.722.686 | 8.884.322.464 | 8.669.735.958 | 0 | 0 | 17.554.058.422 | 5.344.335.736 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 2.608.817.560 | 27.191.313.814 | 0 | 0 | 29.800.131.374 | 8.448.114.436 | 42.462.416.417 | 0 | 0 | 50.910.530.853 | 21.110.399.479 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 2.608.817.560 | 27.191.313.814 | 0 | 0 | 29.800.131.374 | 8.448.114.436 | 42.462.416.417 | 0 | 0 | 50.910.530.853 | 21.110.399.479 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 05 | Pembangunan Jalan | 199.993.000 | 1.500.000.000 | 0 | 0 | 1.699.993.000 | 4.140.118.280 | 33.327.478.002 | 0 | 0 | 37.467.596.282 | 35.767.603.282 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 08 | Rekonstruksi Jalan | 603.824.560 | 8.046.313.814 | 0 | 0 | 8.650.138.374 | 603.824.560 | 7.480.723.615 | 0 | 0 | 8.084.548.175 | (565.590.199) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 09 | Rehabilitasi Jalan | 250.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 350.000.000 | 698.376.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 798.376.000 | 448.376.000 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 10 | 2.01 | 12 | Pembangunan Jembatan | 1.555.000.000 | 17.545.000.000 | 0 | 0 | 19.100.000.000 | 3.005.795.596 | 1.554.214.800 | 0 | 0 | 4.560.010.396 | (14.539.989.604) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 11 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 129.744.000 | 0 | 0 | 0 | 129.744.000 | 9.744.000 | 0 | 0 | 0 | 9.744.000 | (120.000.000) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 11 | 2.04 | | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 129.744.000 | 0 | 0 | 0 | 129.744.000 | 9.744.000 | 0 | 0 | 0 | 9.744.000 | (120.000.000) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 11 | 2.04 | 02 | Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 129.744.000 | 0 | 0 | 0 | 129.744.000 | 9.744.000 | 0 | 0 | 0 | 9.744.000 | (120.000.000) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 499.096.000 | 0 | 0 | 0 | 499.096.000 | 139.090.000 | 6.000 | 0 | 0 | 139.096.000 | (360.000.000) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | 2.01 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 206.960.000 | 0 | 0 | 0 | 206.960.000 | 11.960.000 | 0 | 0 | 0 | 11.960.000 | (195.000.000) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 206.960.000 | 0 | 0 | 0 | 206.960.000 | 11.960.000 | 0 | 0 | 0 | 11.960.000 | (195.000.000) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | 2.02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 101.140.000 | 0 | 0 | 0 | 101.140.000 | 66.140.000 | 0 | 0 | 0 | 66.140.000 | (35.000.000) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | 101.140.000 | 0 | 0 | 0 | 101.140.000 | 66.140.000 | 0 | 0 | 0 | 66.140.000 | (35.000.000) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | 2.03 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 190.996.000 | 0 | 0 | 0 | 190.996.000 | 60.990.000 | 6.000 | 0 | 0 | 60.996.000 | (130.000.000) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 12 | 2.03 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 190.996.000 | 0 | 0 | 0 | 190.996.000 | 60.990.000 | 6.000 | 0 | 0 | 60.996.000 | (130.000.000) |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0001 | | | | UPTD SPAM SIANTAN | 765.407.051 | 345.460.500 | 0 | 0 | 1.110.867.551 | 994.197.029 | 181.230.500 | 0 | 0 | 1.175.427.529 | 64.559.978 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 765.407.051 | 345.460.500 | 0 | 0 | 1.110.867.551 | 994.197.029 | 181.230.500 | 0 | 0 | 1.175.427.529 | 64.559.978 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 765.407.051 | 345.460.500 | 0 | 0 | 1.110.867.551 | 994.197.029 | 181.230.500 | 0 | 0 | 1.175.427.529 | 64.559.978 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 701.991.051 | 345.460.500 | 0 | 0 | 1.047.451.551 | 930.781.029 | 181.230.500 | 0 | 0 | 1.112.011.529 | 64.559.978 |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 63.416.000 | 0 | 0 | 0 | 63.416.000 | 63.416.000 | 0 | 0 | 0 | 63.416.000 | 0 |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **04** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **221.688.000** | **198.202.796** | **0** | **0** | **419.890.796** | **568.376.900** | **3.053.908.675** | **0** | **0** | **3.622.285.575** | **3.202.394.779** |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 221.688.000 | 198.202.796 | 0 | 0 | 419.890.796 | 568.376.900 | 3.053.908.675 | 0 | 0 | 3.622.285.575 | 3.202.394.779 |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 90.000.000 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.03 | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 90.000.000 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 02 | 2.03 | 05 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 90.000.000 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 221.688.000 | 198.202.796 | 0 | 0 | 419.890.796 | 558.376.900 | 2.963.908.675 | 0 | 0 | 3.522.285.575 | 3.102.394.779 |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199.999.739 | 0 | 0 | 2.199.999.739 | 2.199.999.739 |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199.999.739 | 0 | 0 | 2.199.999.739 | 2.199.999.739 |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.02 | | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 221.688.000 | 198.202.796 | 0 | 0 | 419.890.796 | 558.376.900 | 763.908.936 | 0 | 0 | 1.322.285.836 | 902.395.040 |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | 59.508.900 | 0 | 0 | 149.508.900 | 149.508.900 |
| 1 | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | 221.688.000 | 198.202.796 | 0 | 0 | 419.890.796 | 468.376.900 | 704.400.036 | 0 | 0 | 1.172.776.936 | 752.886.140 |
| **1** | **05** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **25.409.748.016** | **0** | **0** | **0** | **25.409.748.016** | **26.445.193.333** | **335.021.500** | **0** | **0** | **26.780.214.833** | **1.370.466.817** |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | | | | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.044.000 | 0 | 0 | 0 | 27.044.000 | 27.044.000 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 04 | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.044.000 | 0 | 0 | 0 | 27.044.000 | 27.044.000 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.04 | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.044.000 | 0 | 0 | 0 | 27.044.000 | 27.044.000 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.04 | 02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.044.000 | 0 | 0 | 0 | 27.044.000 | 27.044.000 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 9.380.910.928 | 0 | 0 | 0 | 9.380.910.928 | 11.028.653.973 | 24.992.000 | 0 | 0 | 11.053.645.973 | 1.672.735.045 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.409.910.928 | 0 | 0 | 0 | 8.409.910.928 | 10.133.804.198 | 24.992.000 | 0 | 0 | 10.158.796.198 | 1.748.885.270 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.222.561.050 | 0 | 0 | 0 | 4.222.561.050 | 4.670.631.543 | 0 | 0 | 0 | 4.670.631.543 | 448.070.493 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.059.145.050 | 0 | 0 | 0 | 4.059.145.050 | 4.507.215.543 | 0 | 0 | 0 | 4.507.215.543 | 448.070.493 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 163.416.000 | 0 | 0 | 0 | 163.416.000 | 163.416.000 | 0 | 0 | 0 | 163.416.000 | 0 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.013.235.200 | 0 | 0 | 0 | 1.013.235.200 | 955.990.057 | 24.992.000 | 0 | 0 | 980.982.057 | (32.253.143) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.581.000 | 0 | 0 | 0 | 5.581.000 | 5.581.000 | 0 | 0 | 0 | 5.581.000 | 0 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 129.807.500 | 0 | 0 | 0 | 129.807.500 | 284.163.500 | 24.992.000 | 0 | 0 | 309.155.500 | 179.348.000 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.019.000 | 0 | 0 | 0 | 6.019.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6.019.000) |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 159.615.700 | 0 | 0 | 0 | 159.615.700 | 137.975.086 | 0 | 0 | 0 | 137.975.086 | (21.640.614) |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.750.000 | 0 | 0 | 0 | 35.750.000 | 9.800.000 | 0 | 0 | 0 | 9.800.000 | (25.950.000) |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 676.462.000 | 0 | 0 | 0 | 676.462.000 | 518.470.471 | 0 | 0 | 0 | 518.470.471 | (157.991.529) |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 383.345.000 | 0 | 0 | 0 | 383.345.000 | 381.343.000 | 0 | 0 | 0 | 381.343.000 | (2.002.000) |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 11 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 383.345.000 | 0 | 0 | 0 | 383.345.000 | 381.343.000 | 0 | 0 | 0 | 381.343.000 | (2.002.000) |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.627.449.648 | 0 | 0 | 0 | 2.627.449.648 | 4.023.755.808 | 0 | 0 | 0 | 4.023.755.808 | 1.396.306.160 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 80.832.000 | 0 | 0 | 0 | 80.832.000 | 77.232.000 | 0 | 0 | 0 | 77.232.000 | (3.600.000) |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.546.617.648 | 0 | 0 | 0 | 2.546.617.648 | 3.946.523.808 | 0 | 0 | 0 | 3.946.523.808 | 1.399.906.160 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 163.320.030 | 0 | 0 | 0 | 163.320.030 | 102.083.790 | 0 | 0 | 0 | 102.083.790 | (61.236.240) |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.09 | 02 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 163.320.030 | 0 | 0 | 0 | 163.320.030 | 102.083.790 | 0 | 0 | 0 | 102.083.790 | (61.236.240) |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 971.000.000 | 0 | 0 | 0 | 971.000.000 | 894.849.775 | 0 | 0 | 0 | 894.849.775 | (76.150.225) |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.01 | | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 625.665.000 | 0 | 0 | 0 | 625.665.000 | 419.789.020 | 0 | 0 | 0 | 419.789.020 | (205.875.980) |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | 625.665.000 | 0 | 0 | 0 | 625.665.000 | 419.789.020 | 0 | 0 | 0 | 419.789.020 | (205.875.980) |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.02 | | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 244.335.000 | 0 | 0 | 0 | 244.335.000 | 447.705.755 | 0 | 0 | 0 | 447.705.755 | 203.370.755 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.02 | 06 | | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 74.335.000 | 0 | 0 | 0 | 74.335.000 | 97.284.500 | 0 | 0 | 0 | 97.284.500 | 22.949.500 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.02 | 07 | | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 170.000.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000.000 | 350.421.255 | 0 | 0 | 0 | 350.421.255 | 180.421.255 |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.03 | | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 101.000.000 | 0 | 0 | 0 | 101.000.000 | 27.355.000 | 0 | 0 | 0 | 27.355.000 | (73.645.000) |
| 1 | 05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.03 | 04 | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 101.000.000 | 0 | 0 | 0 | 101.000.000 | 27.355.000 | 0 | 0 | 0 | 27.355.000 | (73.645.000) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 16.028.837.088 | 0 | 0 | 0 | 16.028.837.088 | 15.389.495.360 | 310.029.500 | 0 | 0 | 15.699.524.860 | (329.312.228) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.926.011.088 | 0 | 0 | 0 | 14.926.011.088 | 14.914.716.560 | 310.029.500 | 0 | 0 | 15.224.746.060 | 298.734.972 |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 62.916.830 | 0 | 0 | 0 | 62.916.830 | 61.838.059 | 0 | 0 | 0 | 61.838.059 | (1.078.771) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.264.830 | 0 | 0 | 0 | 7.264.830 | 7.228.569 | 0 | 0 | 0 | 7.228.569 | (36.261) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 55.652.000 | 0 | 0 | 0 | 55.652.000 | 54.609.490 | 0 | 0 | 0 | 54.609.490 | (1.042.510) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.752.894.560 | 0 | 0 | 0 | 5.752.894.560 | 5.704.247.831 | 0 | 0 | 0 | 5.704.247.831 | (48.646.729) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.592.585.060 | 0 | 0 | 0 | 5.592.585.060 | 5.543.963.501 | 0 | 0 | 0 | 5.543.963.501 | (48.621.559) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 156.000.000 | 0 | 0 | 0 | 156.000.000 | 156.000.000 | 0 | 0 | 0 | 156.000.000 | 0 |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.309.500 | 0 | 0 | 0 | 4.309.500 | 4.284.330 | 0 | 0 | 0 | 4.284.330 | (25.170) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000.000 | 0 |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000.000 | 0 |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 680.777.000 | 0 | 0 | 0 | 680.777.000 | 648.605.578 | 81.378.000 | 0 | 0 | 729.983.578 | 49.206.578 |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.762.000 | 0 | 0 | 0 | 8.762.000 | 8.750.830 | 0 | 0 | 0 | 8.750.830 | (11.170) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.378.000 | 0 | 0 | 81.378.000 | 81.378.000 |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18.500.000 | 0 | 0 | 0 | 18.500.000 | 16.861.651 | 0 | 0 | 0 | 16.861.651 | (1.638.349) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 105.405.000 | 0 | 0 | 0 | 105.405.000 | 95.442.992 | 0 | 0 | 0 | 95.442.992 | (9.962.008) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 17.500.000 | 14.124.105 | 0 | 0 | 0 | 14.124.105 | (3.375.895) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 530.610.000 | 0 | 0 | 0 | 530.610.000 | 513.426.000 | 0 | 0 | 0 | 513.426.000 | (17.184.000) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 330.000.000 | 0 | 0 | 0 | 330.000.000 | 329.780.000 | 228.651.500 | 0 | 0 | 558.431.500 | 228.431.500 |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 05 | | Pengadaan Mebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.651.500 | 0 | 0 | 228.651.500 | 228.651.500 |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 330.000.000 | 0 | 0 | 0 | 330.000.000 | 329.780.000 | 0 | 0 | 0 | 329.780.000 | (220.000) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.895.657.328 | 0 | 0 | 0 | 7.895.657.328 | 7.993.309.122 | 0 | 0 | 0 | 7.993.309.122 | 97.651.794 |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 95.097.200 | 0 | 0 | 0 | 95.097.200 | 75.710.644 | 0 | 0 | 0 | 75.710.644 | (19.386.556) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 75.825.600 | 0 | 0 | 0 | 75.825.600 | 75.825.600 | 0 | 0 | 0 | 75.825.600 | 0 |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 7.724.734.528 | 0 | 0 | 0 | 7.724.734.528 | 7.841.772.878 | 0 | 0 | 0 | 7.841.772.878 | 117.038.350 |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 167.765.370 | 0 | 0 | 0 | 167.765.370 | 140.935.970 | 0 | 0 | 0 | 140.935.970 | (26.829.400) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 143.815.370 | 0 | 0 | 0 | 143.815.370 | 131.699.970 | 0 | 0 | 0 | 131.699.970 | (12.115.400) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 23.950.000 | 0 | 0 | 0 | 23.950.000 | 9.236.000 | 0 | 0 | 0 | 9.236.000 | (14.714.000) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.000.633.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.633.000 | 402.471.490 | 0 | 0 | 0 | 402.471.490 | (598.161.510) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 583.163.000 | 0 | 0 | 0 | 583.163.000 | 226.097.240 | 0 | 0 | 0 | 226.097.240 | (357.065.760) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 352.800.000 | 0 | 0 | 0 | 352.800.000 | 162.045.500 | 0 | 0 | 0 | 162.045.500 | (190.754.500) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 223.865.000 | 0 | 0 | 0 | 223.865.000 | 63.751.740 | 0 | 0 | 0 | 63.751.740 | (160.113.260) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 6.498.000 | 0 | 0 | 0 | 6.498.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | (6.198.000) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 242.996.000 | 0 | 0 | 0 | 242.996.000 | 76.374.250 | 0 | 0 | 0 | 76.374.250 | (166.621.750) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 72.091.000 | 0 | 0 | 0 | 72.091.000 | 51.671.500 | 0 | 0 | 0 | 51.671.500 | (20.419.500) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 153.575.000 | 0 | 0 | 0 | 153.575.000 | 24.502.750 | 0 | 0 | 0 | 24.502.750 | (129.072.250) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 17.330.000 | 0 | 0 | 0 | 17.330.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | (17.130.000) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | 174.474.000 | 0 | 0 | 0 | 174.474.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | (74.474.000) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 01 | | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 174.474.000 | 0 | 0 | 0 | 174.474.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | (74.474.000) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 04 | | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 102.193.000 | 0 | 0 | 0 | 102.193.000 | 72.307.310 | 0 | 0 | 0 | 72.307.310 | (29.885.690) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 102.193.000 | 0 | 0 | 0 | 102.193.000 | 72.307.310 | 0 | 0 | 0 | 72.307.310 | (29.885.690) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 07 | | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | 102.193.000 | 0 | 0 | 0 | 102.193.000 | 72.307.310 | 0 | 0 | 0 | 72.307.310 | (29.885.690) |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **06** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **10.059.254.840** | **14.500.000** | **0** | **0** | **10.073.754.840** | **11.892.150.809** | **0** | **0** | **0** | **11.892.150.809** | **1.818.395.969** |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | | | | | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10.059.254.840 | 14.500.000 | 0 | 0 | 10.073.754.840 | 11.892.150.809 | 0 | 0 | 0 | 11.892.150.809 | 1.818.395.969 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.320.235.440 | 0 | 0 | 0 | 9.320.235.440 | 8.235.720.208 | 0 | 0 | 0 | 8.235.720.208 | (1.084.515.232) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 125.152.800 | 0 | 0 | 0 | 125.152.800 | 94.082.800 | 0 | 0 | 0 | 94.082.800 | (31.070.000) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 91.427.400 | 0 | 0 | 0 | 91.427.400 | 76.487.400 | 0 | 0 | 0 | 76.487.400 | (14.940.000) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.01 | 06 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 33.725.400 | 0 | 0 | 0 | 33.725.400 | 17.595.400 | 0 | 0 | 0 | 17.595.400 | (16.130.000) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.617.859.024 | 0 | 0 | 0 | 6.617.859.024 | 5.523.461.881 | 0 | 0 | 0 | 5.523.461.881 | (1.094.397.143) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.458.315.824 | 0 | 0 | 0 | 6.458.315.824 | 5.370.678.681 | 0 | 0 | 0 | 5.370.678.681 | (1.087.637.143) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 148.800.000 | 0 | 0 | 0 | 148.800.000 | 142.040.000 | 0 | 0 | 0 | 142.040.000 | (6.760.000) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.743.200 | 0 | 0 | 0 | 10.743.200 | 10.743.200 | 0 | 0 | 0 | 10.743.200 | 0 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 28.200.000 | 0 | 0 | 0 | 28.200.000 | 28.200.000 | 0 | 0 | 0 | 28.200.000 | 0 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 28.200.000 | 0 | 0 | 0 | 28.200.000 | 28.200.000 | 0 | 0 | 0 | 28.200.000 | 0 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 258.208.200 | 0 | 0 | 0 | 258.208.200 | 321.916.360 | 0 | 0 | 0 | 321.916.360 | 63.708.160 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.530.000 | 0 | 0 | 0 | 4.530.000 | 2.970.000 | 0 | 0 | 0 | 2.970.000 | (1.560.000) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.770.200 | 0 | 0 | 0 | 6.770.200 | 6.583.360 | 0 | 0 | 0 | 6.583.360 | (186.840) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 21.400.000 | 0 | 0 | 0 | 21.400.000 | 16.855.000 | 0 | 0 | 0 | 16.855.000 | (4.545.000) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | 0 | 0 | 26.000.000 | 0 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 199.508.000 | 0 | 0 | 0 | 199.508.000 | 269.508.000 | 0 | 0 | 0 | 269.508.000 | 70.000.000 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 527.627.000 | 0 | 0 | 0 | 527.627.000 | 445.959.815 | 0 | 0 | 0 | 445.959.815 | (81.667.185) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 527.627.000 | 0 | 0 | 0 | 527.627.000 | 445.959.815 | 0 | 0 | 0 | 445.959.815 | (81.667.185) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.717.005.416 | 0 | 0 | 0 | 1.717.005.416 | 1.783.325.352 | 0 | 0 | 0 | 1.783.325.352 | 66.319.936 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 64.553.400 | 0 | 0 | 0 | 64.553.400 | 60.553.400 | 0 | 0 | 0 | 60.553.400 | (4.000.000) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 42.090.000 | 0 | 0 | 0 | 42.090.000 | 76.320.000 | 0 | 0 | 0 | 76.320.000 | 34.230.000 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.610.362.016 | 0 | 0 | 0 | 1.610.362.016 | 1.646.451.952 | 0 | 0 | 0 | 1.646.451.952 | 36.089.936 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 46.183.000 | 0 | 0 | 0 | 46.183.000 | 38.774.000 | 0 | 0 | 0 | 38.774.000 | (7.409.000) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 23.433.000 | 0 | 0 | 0 | 23.433.000 | 19.024.000 | 0 | 0 | 0 | 19.024.000 | (4.409.000) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 22.750.000 | 0 | 0 | 0 | 22.750.000 | 19.750.000 | 0 | 0 | 0 | 19.750.000 | (3.000.000) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 78.484.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 81.984.000 | 56.175.000 | 0 | 0 | 0 | 56.175.000 | (25.809.000) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 78.484.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 81.984.000 | 56.175.000 | 0 | 0 | 0 | 56.175.000 | (25.809.000) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | 02 | | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 37.543.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 41.043.000 | 22.193.000 | 0 | 0 | 0 | 22.193.000 | (18.850.000) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | 04 | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 40.941.000 | 0 | 0 | 0 | 40.941.000 | 33.982.000 | 0 | 0 | 0 | 33.982.000 | (6.959.000) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 228.000.000 | 0 | 0 | 0 | 228.000.000 | 348.000.000 | 0 | 0 | 0 | 348.000.000 | 120.000.000 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 228.000.000 | 0 | 0 | 0 | 228.000.000 | 348.000.000 | 0 | 0 | 0 | 348.000.000 | 120.000.000 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 12 | | Pemberian Layanan Rujukan | 228.000.000 | 0 | 0 | 0 | 228.000.000 | 348.000.000 | 0 | 0 | 0 | 348.000.000 | 120.000.000 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 334.635.400 | 11.000.000 | 0 | 0 | 345.635.400 | 3.154.355.601 | 0 | 0 | 0 | 3.154.355.601 | 2.808.720.201 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.02 | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 334.635.400 | 11.000.000 | 0 | 0 | 345.635.400 | 3.154.355.601 | 0 | 0 | 0 | 3.154.355.601 | 2.808.720.201 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.02 | 01 | | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 176.875.400 | 11.000.000 | 0 | 0 | 187.875.400 | 165.695.600 | 0 | 0 | 0 | 165.695.600 | (22.179.800) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.02 | 02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 157.760.000 | 0 | 0 | 0 | 157.760.000 | 127.340.000 | 0 | 0 | 0 | 127.340.000 | (30.420.000) |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.02 | 03 | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.861.320.001 | 0 | 0 | 0 | 2.861.320.001 | 2.861.320.001 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 06 | | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 97.900.000 | 0 | 0 | 0 | 97.900.000 | 97.900.000 | 0 | 0 | 0 | 97.900.000 | 0 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 06 | 2.02 | | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 97.900.000 | 0 | 0 | 0 | 97.900.000 | 97.900.000 | 0 | 0 | 0 | 97.900.000 | 0 |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 06 | 2.02 | 02 | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 97.900.000 | 0 | 0 | 0 | 97.900.000 | 97.900.000 | 0 | 0 | 0 | 97.900.000 | 0 |
| **2** | | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **68.246.843.064** | **1.590.055.025** | **0** | **0** | **69.836.898.089** | **69.297.931.970** | **7.326.974.450** | **0** | **0** | **76.624.906.420** | **6.788.008.331** |
| **2** | **07** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **1.899.662.466** | **0** | **0** | **0** | **1.899.662.466** | **2.695.022.698** | **0** | **0** | **0** | **2.695.022.698** | **795.360.232** |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | | | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.879.733 | 0 | 0 | 0 | 932.879.733 | 932.879.733 |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 03 | | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.648.000 | 0 | 0 | 0 | 51.648.000 | 51.648.000 |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 03 | 2.01 | | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.648.000 | 0 | 0 | 0 | 51.648.000 | 51.648.000 |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.648.000 | 0 | 0 | 0 | 51.648.000 | 51.648.000 |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 05 | | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.231.733 | 0 | 0 | 0 | 881.231.733 | 881.231.733 |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 05 | 2.01 | | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.231.733 | 0 | 0 | 0 | 735.231.733 | 735.231.733 |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 05 | 2.01 | 03 | | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.231.733 | 0 | 0 | 0 | 735.231.733 | 735.231.733 |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 05 | 2.02 | | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.000.000 | 0 | 0 | 0 | 146.000.000 | 146.000.000 |
| 2 | 07 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 05 | 2.02 | 04 | | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.000.000 | 0 | 0 | 0 | 146.000.000 | 146.000.000 |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1.899.662.466 | 0 | 0 | 0 | 1.899.662.466 | 1.762.142.965 | 0 | 0 | 0 | 1.762.142.965 | (137.519.501) |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 03 | | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 230.000.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000.000 | 249.212.000 | 0 | 0 | 0 | 249.212.000 | 19.212.000 |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 03 | 2.01 | | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 230.000.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000.000 | 249.212.000 | 0 | 0 | 0 | 249.212.000 | 19.212.000 |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 230.000.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000.000 | 249.212.000 | 0 | 0 | 0 | 249.212.000 | 19.212.000 |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1.669.662.466 | 0 | 0 | 0 | 1.669.662.466 | 1.512.930.965 | 0 | 0 | 0 | 1.512.930.965 | (156.731.501) |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.01 | | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.533.653.933 | 0 | 0 | 0 | 1.533.653.933 | 1.385.734.833 | 0 | 0 | 0 | 1.385.734.833 | (147.919.100) |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.01 | 03 | | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 1.533.653.933 | 0 | 0 | 0 | 1.533.653.933 | 1.385.734.833 | 0 | 0 | 0 | 1.385.734.833 | (147.919.100) |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.02 | | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 136.008.533 | 0 | 0 | 0 | 136.008.533 | 127.196.132 | 0 | 0 | 0 | 127.196.132 | (8.812.401) |
| 2 | 07 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.02 | 04 | | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 136.008.533 | 0 | 0 | 0 | 136.008.533 | 127.196.132 | 0 | 0 | 0 | 127.196.132 | (8.812.401) |
| **2** | **08** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **1.280.636.900** | **3.500.000** | **0** | **0** | **1.284.136.900** | **1.313.025.660** | **3.500.000** | **0** | **0** | **1.316.525.660** | **32.388.760** |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | | | | | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1.280.636.900 | 3.500.000 | 0 | 0 | 1.284.136.900 | 1.313.025.660 | 3.500.000 | 0 | 0 | 1.316.525.660 | 32.388.760 |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 488.471.400 | 3.500.000 | 0 | 0 | 491.971.400 | 489.708.390 | 3.500.000 | 0 | 0 | 493.208.390 | 1.236.990 |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.01 | | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 91.978.500 | 0 | 0 | 0 | 91.978.500 | 93.215.490 | 0 | 0 | 0 | 93.215.490 | 1.236.990 |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | 91.978.500 | 0 | 0 | 0 | 91.978.500 | 93.215.490 | 0 | 0 | 0 | 93.215.490 | 1.236.990 |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 396.492.900 | 3.500.000 | 0 | 0 | 399.992.900 | 396.492.900 | 3.500.000 | 0 | 0 | 399.992.900 | 0 |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.03 | 03 | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 396.492.900 | 3.500.000 | 0 | 0 | 399.992.900 | 396.492.900 | 3.500.000 | 0 | 0 | 399.992.900 | 0 |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 06 | | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 792.165.500 | 0 | 0 | 0 | 792.165.500 | 823.317.270 | 0 | 0 | 0 | 823.317.270 | 31.151.770 |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 06 | 2.01 | | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 792.165.500 | 0 | 0 | 0 | 792.165.500 | 823.317.270 | 0 | 0 | 0 | 823.317.270 | 31.151.770 |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 06 | 2.01 | 01 | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 738.029.500 | 0 | 0 | 0 | 738.029.500 | 778.307.390 | 0 | 0 | 0 | 778.307.390 | 40.277.890 |
| 2 | 08 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 06 | 2.01 | 02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 54.136.000 | 0 | 0 | 0 | 54.136.000 | 45.009.880 | 0 | 0 | 0 | 45.009.880 | (9.126.120) |
| **2** | **09** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **699.911.140** | **21.538.000** | **0** | **0** | **721.449.140** | **671.168.890** | **0** | **0** | **0** | **671.168.890** | **(50.280.250)** |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | | | | | DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN | 699.911.140 | 21.538.000 | 0 | 0 | 721.449.140 | 671.168.890 | 0 | 0 | 0 | 671.168.890 | (50.280.250) |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 679.548.250 | 21.538.000 | 0 | 0 | 701.086.250 | 650.806.000 | 0 | 0 | 0 | 650.806.000 | (50.280.250) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.01 | | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 15.553.200 | 0 | 0 | 0 | 15.553.200 | 10.064.000 | 0 | 0 | 0 | 10.064.000 | (5.489.200) |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.01 | 04 | | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 15.553.200 | 0 | 0 | 0 | 15.553.200 | 10.064.000 | 0 | 0 | 0 | 10.064.000 | (5.489.200) |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 30.233.550 | 0 | 0 | 0 | 30.233.550 | 6.980.500 | 0 | 0 | 0 | 6.980.500 | (23.253.050) |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 30.233.550 | 0 | 0 | 0 | 30.233.550 | 6.980.500 | 0 | 0 | 0 | 6.980.500 | (23.253.050) |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.04 | | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 633.761.500 | 21.538.000 | 0 | 0 | 655.299.500 | 633.761.500 | 0 | 0 | 0 | 633.761.500 | (21.538.000) |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.04 | 02 | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 633.761.500 | 21.538.000 | 0 | 0 | 655.299.500 | 633.761.500 | 0 | 0 | 0 | 633.761.500 | (21.538.000) |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 05 | | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 20.362.890 | 0 | 0 | 0 | 20.362.890 | 20.362.890 | 0 | 0 | 0 | 20.362.890 | 0 |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 05 | 2.01 | | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 20.362.890 | 0 | 0 | 0 | 20.362.890 | 20.362.890 | 0 | 0 | 0 | 20.362.890 | 0 |
| 2 | 09 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 05 | 2.01 | 05 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 20.362.890 | 0 | 0 | 0 | 20.362.890 | 20.362.890 | 0 | 0 | 0 | 20.362.890 | 0 |
| **2** | **10** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **11** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **1.156.230.930** | **0** | **0** | **0** | **1.156.230.930** | **1.445.851.600** | **172.876.000** | **0** | **0** | **1.618.727.600** | **462.496.670** |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | | | | | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 673.790.130 | 0 | 0 | 0 | 673.790.130 | 942.345.800 | 7.876.000 | 0 | 0 | 950.221.800 | 276.431.670 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 130.134.732 | 0 | 0 | 0 | 130.134.732 | 218.878.100 | 0 | 0 | 0 | 218.878.100 | 88.743.368 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | 40.002.544 | 0 | 0 | 0 | 40.002.544 | 200.538.000 | 0 | 0 | 0 | 200.538.000 | 160.535.456 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | 40.002.544 | 0 | 0 | 0 | 40.002.544 | 200.538.000 | 0 | 0 | 0 | 200.538.000 | 160.535.456 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | 90.132.188 | 0 | 0 | 0 | 90.132.188 | 18.340.100 | 0 | 0 | 0 | 18.340.100 | (71.792.088) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 90.132.188 | 0 | 0 | 0 | 90.132.188 | 18.340.100 | 0 | 0 | 0 | 18.340.100 | (71.792.088) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 83.207.400 | 0 | 0 | 0 | 83.207.400 | 74.209.400 | 0 | 0 | 0 | 74.209.400 | (8.998.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 80.807.400 | 0 | 0 | 0 | 80.807.400 | 74.209.400 | 0 | 0 | 0 | 74.209.400 | (6.598.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 80.007.400 | 0 | 0 | 0 | 80.007.400 | 74.209.400 | 0 | 0 | 0 | 74.209.400 | (5.798.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.600.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 04 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 62.103.000 | 0 | 0 | 0 | 62.103.000 | 105.163.000 | 5.126.000 | 0 | 0 | 110.289.000 | 48.186.000 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 62.103.000 | 0 | 0 | 0 | 62.103.000 | 105.163.000 | 5.126.000 | 0 | 0 | 110.289.000 | 48.186.000 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 04 | | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 59.703.000 | 0 | 0 | 0 | 59.703.000 | 105.163.000 | 5.126.000 | 0 | 0 | 110.289.000 | 50.586.000 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 06 | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 07 | | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 05 | | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | | | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | 02 | | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 06 | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 109.115.800 | 0 | 0 | 0 | 109.115.800 | 52.867.300 | 0 | 0 | 0 | 52.867.300 | (56.248.500) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 109.115.800 | 0 | 0 | 0 | 109.115.800 | 52.867.300 | 0 | 0 | 0 | 52.867.300 | (56.248.500) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 01 | | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 59.292.400 | 0 | 0 | 0 | 59.292.400 | 26.152.200 | 0 | 0 | 0 | 26.152.200 | (33.140.200) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 03 | | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 49.823.400 | 0 | 0 | 0 | 49.823.400 | 26.715.100 | 0 | 0 | 0 | 26.715.100 | (23.108.300) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 08 | | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 54.378.400 | 0 | 0 | 0 | 54.378.400 | 65.824.200 | 0 | 0 | 0 | 65.824.200 | 11.445.800 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 08 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 54.378.400 | 0 | 0 | 0 | 54.378.400 | 65.824.200 | 0 | 0 | 0 | 65.824.200 | 11.445.800 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 08 | 2.01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 53.578.400 | 0 | 0 | 0 | 53.578.400 | 65.824.200 | 0 | 0 | 0 | 65.824.200 | 12.245.800 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 08 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 09 | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 51.492.198 | 0 | 0 | 0 | 51.492.198 | 3.168.000 | 0 | 0 | 0 | 3.168.000 | (48.324.198) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 09 | 2.01 | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 51.492.198 | 0 | 0 | 0 | 51.492.198 | 3.168.000 | 0 | 0 | 0 | 3.168.000 | (48.324.198) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 09 | 2.01 | 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 51.492.198 | 0 | 0 | 0 | 51.492.198 | 3.168.000 | 0 | 0 | 0 | 3.168.000 | (48.324.198) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 10 | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 10 | 2.01 | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 10 | 2.01 | 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 181.758.600 | 0 | 0 | 0 | 181.758.600 | 422.235.800 | 2.750.000 | 0 | 0 | 424.985.800 | 243.227.200 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | | Pengelolaan Sampah | 181.758.600 | 0 | 0 | 0 | 181.758.600 | 422.235.800 | 2.750.000 | 0 | 0 | 424.985.800 | 243.227.200 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 01 | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 02 | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | 63.411.600 | 0 | 0 | 0 | 63.411.600 | 151.610.800 | 0 | 0 | 0 | 151.610.800 | 88.199.200 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 03 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 62.330.000 | 0 | 0 | 0 | 62.330.000 | 250.866.000 | 0 | 0 | 0 | 250.866.000 | 188.536.000 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 04 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 54.417.000 | 0 | 0 | 0 | 54.417.000 | 19.759.000 | 2.750.000 | 0 | 0 | 22.509.000 | (31.908.000) |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 11 | 2.01 | 07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2. | 1.0. | 0. | UPT PENGELOLAAN SAMPAH | 482.440.800 | 0 | 0 | 0 | 482.440.800 | 503.505.800 | 165.000.000 | 0 | 0 | 668.505.800 | 186.065.000 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 482.440.800 | 0 | 0 | 0 | 482.440.800 | 503.505.800 | 165.000.000 | 0 | 0 | 668.505.800 | 186.065.000 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 89.374.600 | 0 | 0 | 0 | 89.374.600 | 89.374.600 | 165.000.000 | 0 | 0 | 254.374.600 | 165.000.000 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 846.000 | 0 | 0 | 0 | 846.000 | 846.000 | 0 | 0 | 0 | 846.000 | 0 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 680.000 | 680.000 | 165.000.000 | 0 | 0 | 165.680.000 | 165.000.000 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2.880.000 | 0 | 0 | 0 | 2.880.000 | 2.880.000 | 0 | 0 | 0 | 2.880.000 | 0 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | 38.270.600 | 0 | 0 | 0 | 38.270.600 | 38.270.600 | 0 | 0 | 0 | 38.270.600 | 0 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4.550.000 | 0 | 0 | 0 | 4.550.000 | 4.550.000 | 0 | 0 | 0 | 4.550.000 | 0 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 41.148.000 | 0 | 0 | 0 | 41.148.000 | 41.148.000 | 0 | 0 | 0 | 41.148.000 | 0 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5.808.200 | 0 | 0 | 0 | 5.808.200 | 5.808.200 | 0 | 0 | 0 | 5.808.200 | 0 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.720.000 | 0 | 0 | 0 | 2.720.000 | 2.720.000 | 0 | 0 | 0 | 2.720.000 | 0 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3.088.200 | 0 | 0 | 0 | 3.088.200 | 3.088.200 | 0 | 0 | 0 | 3.088.200 | 0 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 387.258.000 | 0 | 0 | 0 | 387.258.000 | 408.323.000 | 0 | 0 | 0 | 408.323.000 | 21.065.000 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 384.578.000 | 0 | 0 | 0 | 384.578.000 | 405.643.000 | 0 | 0 | 0 | 405.643.000 | 21.065.000 |
| 2 | 11 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.680.000 | 0 | 0 | 0 | 2.680.000 | 2.680.000 | 0 | 0 | 0 | 2.680.000 | 0 |
| **2** | **12** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **6.926.947.553** | **294.947.025** | **0** | **0** | **7.221.894.578** | **6.751.063.281** | **241.789.000** | **0** | **0** | **6.992.852.281** | **(229.042.297)** |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6.926.947.553 | 294.947.025 | 0 | 0 | 7.221.894.578 | 6.751.063.281 | 241.789.000 | 0 | 0 | 6.992.852.281 | (229.042.297) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.093.554.553 | 294.947.025 | 0 | 0 | 6.388.501.578 | 6.286.514.364 | 241.789.000 | 0 | 0 | 6.528.303.364 | 139.801.786 |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.710.000 | 0 | 0 | 0 | 16.710.000 | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 7.200.000 | (9.510.000) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.355.000 | 0 | 0 | 0 | 8.355.000 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | (4.755.000) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8.355.000 | 0 | 0 | 0 | 8.355.000 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | (4.755.000) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.078.890.753 | 0 | 0 | 0 | 4.078.890.753 | 4.216.366.566 | 0 | 0 | 0 | 4.216.366.566 | 137.475.813 |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.942.379.753 | 0 | 0 | 0 | 3.942.379.753 | 4.082.756.566 | 0 | 0 | 0 | 4.082.756.566 | 140.376.813 |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 131.160.000 | 0 | 0 | 0 | 131.160.000 | 131.160.000 | 0 | 0 | 0 | 131.160.000 | 0 |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.351.000 | 0 | 0 | 0 | 5.351.000 | 2.450.000 | 0 | 0 | 0 | 2.450.000 | (2.901.000) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 479.615.200 | 260.097.025 | 0 | 0 | 739.712.225 | 502.731.860 | 172.938.000 | 0 | 0 | 675.669.860 | (64.042.365) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 62.482.000 | 260.097.025 | 0 | 0 | 322.579.025 | 900.000 | 172.938.000 | 0 | 0 | 173.838.000 | (148.741.025) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12.912.000 | 0 | 0 | 0 | 12.912.000 | 10.812.000 | 0 | 0 | 0 | 10.812.000 | (2.100.000) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 34.676.000 | 0 | 0 | 0 | 34.676.000 | 18.700.000 | 0 | 0 | 0 | 18.700.000 | (15.976.000) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.757.200 | 0 | 0 | 0 | 20.757.200 | 17.657.200 | 0 | 0 | 0 | 17.657.200 | (3.100.000) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5.000.000) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.750.000 | 0 | 0 | 0 | 7.750.000 | 2.741.420 | 0 | 0 | 0 | 2.741.420 | (5.008.580) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 336.038.000 | 0 | 0 | 0 | 336.038.000 | 451.921.240 | 0 | 0 | 0 | 451.921.240 | 115.883.240 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 34.850.000 | 0 | 0 | 34.850.000 | 0 | 68.851.000 | 0 | 0 | 68.851.000 | 34.001.000 |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | 34.850.000 | 0 | 0 | 34.850.000 | 0 | 68.851.000 | 0 | 0 | 68.851.000 | 34.001.000 |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.245.059.180 | 0 | 0 | 0 | 1.245.059.180 | 1.294.726.518 | 0 | 0 | 0 | 1.294.726.518 | 49.667.338 |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 90.601.500 | 0 | 0 | 0 | 90.601.500 | 91.301.500 | 0 | 0 | 0 | 91.301.500 | 700.000 |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 88.720.720 | 0 | 0 | 0 | 88.720.720 | 86.920.720 | 0 | 0 | 0 | 86.920.720 | (1.800.000) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.065.736.960 | 0 | 0 | 0 | 1.065.736.960 | 1.116.504.298 | 0 | 0 | 0 | 1.116.504.298 | 50.767.338 |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 273.279.420 | 0 | 0 | 0 | 273.279.420 | 265.489.420 | 0 | 0 | 0 | 265.489.420 | (7.790.000) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | (2.300.000) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 18.280.000 | 0 | 0 | 0 | 18.280.000 | 12.790.000 | 0 | 0 | 0 | 12.790.000 | (5.490.000) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 249.999.420 | 0 | 0 | 0 | 249.999.420 | 249.999.420 | 0 | 0 | 0 | 249.999.420 | 0 |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 02 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 471.391.700 | 0 | 0 | 0 | 471.391.700 | 305.201.575 | 0 | 0 | 0 | 305.201.575 | (166.190.125) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 471.391.700 | 0 | 0 | 0 | 471.391.700 | 305.201.575 | 0 | 0 | 0 | 305.201.575 | (166.190.125) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 92.204.100 | 0 | 0 | 0 | 92.204.100 | 14.837.000 | 0 | 0 | 0 | 14.837.000 | (77.367.100) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 197.850.000 | 0 | 0 | 0 | 197.850.000 | 184.195.675 | 0 | 0 | 0 | 184.195.675 | (13.654.325) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 181.337.600 | 0 | 0 | 0 | 181.337.600 | 106.168.900 | 0 | 0 | 0 | 106.168.900 | (75.168.700) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 03 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 231.313.800 | 0 | 0 | 0 | 231.313.800 | 116.678.342 | 0 | 0 | 0 | 116.678.342 | (114.635.458) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Pencatatan Sipil | 231.313.800 | 0 | 0 | 0 | 231.313.800 | 116.678.342 | 0 | 0 | 0 | 116.678.342 | (114.635.458) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | 181.063.800 | 0 | 0 | 0 | 181.063.800 | 79.493.342 | 0 | 0 | 0 | 79.493.342 | (101.570.458) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 05 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan | 50.250.000 | 0 | 0 | 0 | 50.250.000 | 37.185.000 | 0 | 0 | 0 | 37.185.000 | (13.065.000) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 130.687.500 | 0 | 0 | 0 | 130.687.500 | 42.669.000 | 0 | 0 | 0 | 42.669.000 | (88.018.500) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 130.687.500 | 0 | 0 | 0 | 130.687.500 | 42.669.000 | 0 | 0 | 0 | 42.669.000 | (88.018.500) |
| 2 | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.03 | 04 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 130.687.500 | 0 | 0 | 0 | 130.687.500 | 42.669.000 | 0 | 0 | 0 | 42.669.000 | (88.018.500) |
| **2** | **13** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **1.921.106.184** | **0** | **0** | **0** | **1.921.106.184** | **1.769.113.202** | **0** | **0** | **0** | **1.769.113.202** | **(151.992.982)** |
| 1 | 06 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | | | | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1.921.106.184 | 0 | 0 | 0 | 1.921.106.184 | 1.455.037.038 | 0 | 0 | 0 | 1.455.037.038 | (466.069.146) |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | | | PROGRAM PENATAAN DESA | 126.797.000 | 0 | 0 | 0 | 126.797.000 | 108.793.608 | 0 | 0 | 0 | 108.793.608 | (18.003.392) |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Penataan Desa | 126.797.000 | 0 | 0 | 0 | 126.797.000 | 108.793.608 | 0 | 0 | 0 | 108.793.608 | (18.003.392) |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 02 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | 126.797.000 | 0 | 0 | 0 | 126.797.000 | 108.793.608 | 0 | 0 | 0 | 108.793.608 | (18.003.392) |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 1.381.894.184 | 0 | 0 | 0 | 1.381.894.184 | 1.066.380.180 | 0 | 0 | 0 | 1.066.380.180 | (315.514.004) |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 1.381.894.184 | 0 | 0 | 0 | 1.381.894.184 | 1.066.380.180 | 0 | 0 | 0 | 1.066.380.180 | (315.514.004) |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 1.007.313.184 | 0 | 0 | 0 | 1.007.313.184 | 835.307.480 | 0 | 0 | 0 | 835.307.480 | (172.005.704) |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 161.746.200 | 0 | 0 | 0 | 161.746.200 | 140.910.300 | 0 | 0 | 0 | 140.910.300 | (20.835.900) |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 136.271.000 | 0 | 0 | 0 | 136.271.000 | 38.808.000 | 0 | 0 | 0 | 38.808.000 | (97.463.000) |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | 48.950.000 | 0 | 0 | 0 | 48.950.000 | 48.950.000 | 0 | 0 | 0 | 48.950.000 | 0 |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 04 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 27.613.800 | 0 | 0 | 0 | 27.613.800 | 2.404.400 | 0 | 0 | 0 | 2.404.400 | (25.209.400) |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 412.415.000 | 0 | 0 | 0 | 412.415.000 | 279.863.250 | 0 | 0 | 0 | 279.863.250 | (132.551.750) |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.01 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 412.415.000 | 0 | 0 | 0 | 412.415.000 | 279.863.250 | 0 | 0 | 0 | 279.863.250 | (132.551.750) |
| 2 | 13 | 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 05 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 412.415.000 | 0 | 0 | 0 | 412.415.000 | 279.863.250 | 0 | 0 | 0 | 279.863.250 | (132.551.750) |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.076.164 | 0 | 0 | 0 | 314.076.164 | 314.076.164 |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 02 | | | PROGRAM PENATAAN DESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440.000 | 0 | 0 | 0 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Penataan Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440.000 | 0 | 0 | 0 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440.000 | 0 | 0 | 0 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.636.164 | 0 | 0 | 0 | 312.636.164 | 312.636.164 |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.636.164 | 0 | 0 | 0 | 312.636.164 | 312.636.164 |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.000.364 | 0 | 0 | 0 | 167.000.364 | 167.000.364 |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.423.400 | 0 | 0 | 0 | 27.423.400 | 27.423.400 |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.003.000 | 0 | 0 | 0 | 93.003.000 | 93.003.000 |
| 2 | 13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.209.400 | 0 | 0 | 0 | 25.209.400 | 25.209.400 |
| **2** | **14** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **2.020.119.328** | **178.071.000** | **0** | **0** | **2.198.190.328** | **1.845.611.564** | **34.071.000** | **0** | **0** | **1.879.682.564** | **(318.507.764)** |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | | | | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1.936.126.394 | 178.071.000 | 0 | 0 | 2.114.197.394 | 1.828.811.564 | 34.071.000 | 0 | 0 | 1.862.882.564 | (251.314.830) |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 1.812.126.994 | 178.071.000 | 0 | 0 | 1.990.197.994 | 1.803.851.164 | 34.071.000 | 0 | 0 | 1.837.922.164 | (152.275.830) |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 452.815.000 | 0 | 0 | 0 | 452.815.000 | 452.815.000 | 0 | 0 | 0 | 452.815.000 | 0 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | 452.815.000 | 0 | 0 | 0 | 452.815.000 | 452.815.000 | 0 | 0 | 0 | 452.815.000 | 0 |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 740.991.994 | 178.071.000 | 0 | 0 | 919.062.994 | 732.716.164 | 34.071.000 | 0 | 0 | 766.787.164 | (152.275.830) |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 297.372.500 | 0 | 0 | 0 | 297.372.500 | 297.372.500 | 0 | 0 | 0 | 297.372.500 | 0 |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 41.023.500 | 0 | 0 | 0 | 41.023.500 | 41.023.500 | 0 | 0 | 0 | 41.023.500 | 0 |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 119.596.044 | 178.071.000 | 0 | 0 | 297.667.044 | 232.670.244 | 34.071.000 | 0 | 0 | 266.741.244 | (30.925.800) |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 10 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 282.999.950 | 0 | 0 | 0 | 282.999.950 | 161.649.920 | 0 | 0 | 0 | 161.649.920 | (121.350.030) |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.04 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 618.320.000 | 0 | 0 | 0 | 618.320.000 | 618.320.000 | 0 | 0 | 0 | 618.320.000 | 0 |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | 463.070.000 | 0 | 0 | 0 | 463.070.000 | 463.070.000 | 0 | 0 | 0 | 463.070.000 | 0 |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 03 | 2.04 | 04 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | 155.250.000 | 0 | 0 | 0 | 155.250.000 | 155.250.000 | 0 | 0 | 0 | 155.250.000 | 0 |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 123.999.400 | 0 | 0 | 0 | 123.999.400 | 24.960.400 | 0 | 0 | 0 | 24.960.400 | (99.039.000) |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 04 | 2.02 | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 123.999.400 | 0 | 0 | 0 | 123.999.400 | 24.960.400 | 0 | 0 | 0 | 24.960.400 | (99.039.000) |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 123.999.400 | 0 | 0 | 0 | 123.999.400 | 24.960.400 | 0 | 0 | 0 | 24.960.400 | (99.039.000) |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2. | 4.0. | 0. | Puskesmas Siantan Selatan | 83.992.934 | 0 | 0 | 0 | 83.992.934 | 16.800.000 | 0 | 0 | 0 | 16.800.000 | (67.192.934) |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 83.992.934 | 0 | 0 | 0 | 83.992.934 | 16.800.000 | 0 | 0 | 0 | 16.800.000 | (67.192.934) |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 83.992.934 | 0 | 0 | 0 | 83.992.934 | 16.800.000 | 0 | 0 | 0 | 16.800.000 | (67.192.934) |
| 2 | 14 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 83.992.934 | 0 | 0 | 0 | 83.992.934 | 16.800.000 | 0 | 0 | 0 | 16.800.000 | (67.192.934) |
| **2** | **15** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **15.957.329.819** | **289.674.000** | **0** | **0** | **16.247.003.819** | **19.145.091.822** | **5.352.656.539** | **0** | **0** | **24.497.748.361** | **8.250.744.542** |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | | | | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 15.828.071.003 | 289.674.000 | 0 | 0 | 16.117.745.003 | 19.017.408.006 | 5.352.656.539 | 0 | 0 | 24.370.064.545 | 8.252.319.542 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.631.791.248 | 0 | 0 | 0 | 14.631.791.248 | 13.507.130.439 | 192.060.000 | 0 | 0 | 13.699.190.439 | (932.600.809) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 32.870.200 | 0 | 0 | 0 | 32.870.200 | 24.214.491 | 0 | 0 | 0 | 24.214.491 | (8.655.709) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 27.813.200 | 0 | 0 | 0 | 27.813.200 | 20.593.891 | 0 | 0 | 0 | 20.593.891 | (7.219.309) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.057.000 | 0 | 0 | 0 | 5.057.000 | 3.620.600 | 0 | 0 | 0 | 3.620.600 | (1.436.400) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.485.060.700 | 0 | 0 | 0 | 6.485.060.700 | 5.669.385.100 | 0 | 0 | 0 | 5.669.385.100 | (815.675.600) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.085.160.700 | 0 | 0 | 0 | 6.085.160.700 | 5.275.160.700 | 0 | 0 | 0 | 5.275.160.700 | (810.000.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 399.900.000 | 0 | 0 | 0 | 399.900.000 | 394.224.400 | 0 | 0 | 0 | 394.224.400 | (5.675.600) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 544.256.400 | 0 | 0 | 0 | 544.256.400 | 544.440.900 | 192.060.000 | 0 | 0 | 736.500.900 | 192.244.500 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 16.851.400 | 0 | 0 | 0 | 16.851.400 | 3.851.400 | 0 | 0 | 0 | 3.851.400 | (13.000.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 192.060.000 | 0 | 0 | 192.060.000 | 191.260.000 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.984.500 | 0 | 0 | 0 | 68.984.500 | 68.984.500 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 233.258.000 | 0 | 0 | 0 | 233.258.000 | 246.258.000 | 0 | 0 | 0 | 246.258.000 | 13.000.000 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 47.200.000 | 0 | 0 | 0 | 47.200.000 | 14.200.000 | 0 | 0 | 0 | 14.200.000 | (33.000.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 36.945.000 | 0 | 0 | 0 | 36.945.000 | 41.945.000 | 0 | 0 | 0 | 41.945.000 | 5.000.000 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 209.202.000 | 0 | 0 | 0 | 209.202.000 | 169.202.000 | 0 | 0 | 0 | 169.202.000 | (40.000.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 40.840.000 | 0 | 0 | 0 | 40.840.000 | 39.000.000 | 0 | 0 | 0 | 39.000.000 | (1.840.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 40.040.000 | 0 | 0 | 0 | 40.040.000 | 39.000.000 | 0 | 0 | 0 | 39.000.000 | (1.040.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.084.483.948 | 0 | 0 | 0 | 7.084.483.948 | 6.804.483.948 | 0 | 0 | 0 | 6.804.483.948 | (280.000.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 54.720.200 | 0 | 0 | 0 | 54.720.200 | 34.720.200 | 0 | 0 | 0 | 34.720.200 | (20.000.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 69.783.300 | 0 | 0 | 0 | 69.783.300 | 79.783.300 | 0 | 0 | 0 | 79.783.300 | 10.000.000 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 16.123.064 | 0 | 0 | 0 | 16.123.064 | 16.123.064 | 0 | 0 | 0 | 16.123.064 | 0 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6.943.857.384 | 0 | 0 | 0 | 6.943.857.384 | 6.673.857.384 | 0 | 0 | 0 | 6.673.857.384 | (270.000.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 444.280.000 | 0 | 0 | 0 | 444.280.000 | 425.606.000 | 0 | 0 | 0 | 425.606.000 | (18.674.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 346.680.000 | 0 | 0 | 0 | 346.680.000 | 328.275.000 | 0 | 0 | 0 | 328.275.000 | (18.405.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 97.600.000 | 0 | 0 | 0 | 97.600.000 | 97.331.000 | 0 | 0 | 0 | 97.331.000 | (269.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 1.066.282.155 | 0 | 0 | 0 | 1.066.282.155 | 2.327.726.260 | 1.160.384.000 | 0 | 0 | 3.488.110.260 | 2.421.828.105 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 182.631.155 | 0 | 0 | 0 | 182.631.155 | 601.772.760 | 1.160.384.000 | 0 | 0 | 1.762.156.760 | 1.579.525.605 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 73.807.155 | 0 | 0 | 0 | 73.807.155 | 360.756.160 | 1.160.384.000 | 0 | 0 | 1.521.140.160 | 1.447.333.005 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 108.824.000 | 0 | 0 | 0 | 108.824.000 | 241.016.600 | 0 | 0 | 0 | 241.016.600 | 132.192.600 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.06 | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.06 | 05 | | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.09 | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 882.851.000 | 0 | 0 | 0 | 882.851.000 | 1.725.953.500 | 0 | 0 | 0 | 1.725.953.500 | 843.102.500 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 882.051.000 | 0 | 0 | 0 | 882.051.000 | 1.725.953.500 | 0 | 0 | 0 | 1.725.953.500 | 843.902.500 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 02 | 2.09 | 02 | | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 129.997.600 | 289.674.000 | 0 | 0 | 419.671.600 | 3.182.551.307 | 4.000.212.539 | 0 | 0 | 7.182.763.846 | 6.763.092.246 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.12 | | | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 129.997.600 | 289.674.000 | 0 | 0 | 419.671.600 | 3.182.551.307 | 4.000.212.539 | 0 | 0 | 7.182.763.846 | 6.763.092.246 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.12 | 02 | | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | 71.900.500 | 0 | 0 | 0 | 71.900.500 | 3.060.693.207 | 3.712.438.539 | 0 | 0 | 6.773.131.746 | 6.701.231.246 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 03 | 2.12 | 03 | | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal | 58.097.100 | 289.674.000 | 0 | 0 | 347.771.100 | 121.858.100 | 287.774.000 | 0 | 0 | 409.632.100 | 61.861.000 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2. | 1.0. | 0. | | UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI | 129.258.816 | 0 | 0 | 0 | 129.258.816 | 127.683.816 | 0 | 0 | 0 | 127.683.816 | (1.575.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 129.258.816 | 0 | 0 | 0 | 129.258.816 | 127.683.816 | 0 | 0 | 0 | 127.683.816 | (1.575.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 775.000 | 0 | 0 | 0 | 775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (775.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 775.000 | 0 | 0 | 0 | 775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (775.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 103.041.200 | 0 | 0 | 0 | 103.041.200 | 102.241.200 | 0 | 0 | 0 | 102.241.200 | (800.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.056.200 | 0 | 0 | 0 | 1.056.200 | 1.056.200 | 0 | 0 | 0 | 1.056.200 | 0 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (800.000) |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 760.000 | 0 | 0 | 0 | 760.000 | 760.000 | 0 | 0 | 0 | 760.000 | 0 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 43.425.000 | 0 | 0 | 0 | 43.425.000 | 43.425.000 | 0 | 0 | 0 | 43.425.000 | 0 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 0 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 22.412.616 | 0 | 0 | 0 | 22.412.616 | 22.412.616 | 0 | 0 | 0 | 22.412.616 | 0 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.650.500 | 0 | 0 | 0 | 5.650.500 | 5.650.500 | 0 | 0 | 0 | 5.650.500 | 0 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 16.762.116 | 0 | 0 | 0 | 16.762.116 | 16.762.116 | 0 | 0 | 0 | 16.762.116 | 0 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.030.000 | 0 | 0 | 0 | 3.030.000 | 3.030.000 | 0 | 0 | 0 | 3.030.000 | 0 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.030.000 | 0 | 0 | 0 | 2.030.000 | 2.030.000 | 0 | 0 | 0 | 2.030.000 | 0 |
| 2 | 15 | 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| **2** | **16** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **16.092.614.514** | **689.205.000** | **0** | **0** | **16.781.819.514** | **13.590.775.653** | **1.303.425.911** | **0** | **0** | **14.894.201.564** | **(1.887.617.950)** |
| 1 | 02 | 1.02.2.14.0.00.01.0000 | | | | | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 16.092.614.514 | 689.205.000 | 0 | 0 | 16.781.819.514 | 13.590.775.653 | 1.303.425.911 | 0 | 0 | 14.894.201.564 | (1.887.617.950) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.063.245.374 | 0 | 0 | 0 | 7.063.245.374 | 5.528.765.998 | 0 | 0 | 0 | 5.528.765.998 | (1.534.479.376) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.360.500 | 0 | 0 | 0 | 12.360.500 | 1.649.000 | 0 | 0 | 0 | 1.649.000 | (10.711.500) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.316.500 | 0 | 0 | 0 | 9.316.500 | 676.000 | 0 | 0 | 0 | 676.000 | (8.640.500) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.044.000 | 0 | 0 | 0 | 3.044.000 | 973.000 | 0 | 0 | 0 | 973.000 | (2.071.000) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.936.267.229 | 0 | 0 | 0 | 4.936.267.229 | 3.958.870.414 | 0 | 0 | 0 | 3.958.870.414 | (977.396.815) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.679.412.229 | 0 | 0 | 0 | 4.679.412.229 | 3.744.532.414 | 0 | 0 | 0 | 3.744.532.414 | (934.879.815) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 254.760.000 | 0 | 0 | 0 | 254.760.000 | 213.630.000 | 0 | 0 | 0 | 213.630.000 | (41.130.000) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.095.000 | 0 | 0 | 0 | 2.095.000 | 708.000 | 0 | 0 | 0 | 708.000 | (1.387.000) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 881.495.850 | 0 | 0 | 0 | 881.495.850 | 533.042.100 | 0 | 0 | 0 | 533.042.100 | (348.453.750) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.113.200 | 0 | 0 | 0 | 7.113.200 | 2.560.000 | 0 | 0 | 0 | 2.560.000 | (4.553.200) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26.520.120 | 0 | 0 | 0 | 26.520.120 | 22.311.000 | 0 | 0 | 0 | 22.311.000 | (4.209.120) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 22.396.000 | 0 | 0 | 0 | 22.396.000 | 11.354.086 | 0 | 0 | 0 | 11.354.086 | (11.041.914) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 85.057.800 | 0 | 0 | 0 | 85.057.800 | 31.663.200 | 0 | 0 | 0 | 31.663.200 | (53.394.600) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 117.044.730 | 0 | 0 | 0 | 117.044.730 | 49.073.008 | 0 | 0 | 0 | 49.073.008 | (67.971.722) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 623.364.000 | 0 | 0 | 0 | 623.364.000 | 416.080.806 | 0 | 0 | 0 | 416.080.806 | (207.283.194) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 52.875.000 | 0 | 0 | 0 | 52.875.000 | 52.710.000 | 0 | 0 | 0 | 52.710.000 | (165.000) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 52.875.000 | 0 | 0 | 0 | 52.875.000 | 52.710.000 | 0 | 0 | 0 | 52.710.000 | (165.000) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.104.576.160 | 0 | 0 | 0 | 1.104.576.160 | 967.576.234 | 0 | 0 | 0 | 967.576.234 | (136.999.926) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 153.170.260 | 0 | 0 | 0 | 153.170.260 | 105.485.726 | 0 | 0 | 0 | 105.485.726 | (47.684.534) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25.270.500 | 0 | 0 | 0 | 25.270.500 | 25.270.500 | 0 | 0 | 0 | 25.270.500 | 0 |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 926.135.400 | 0 | 0 | 0 | 926.135.400 | 836.820.008 | 0 | 0 | 0 | 836.820.008 | (89.315.392) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 75.670.635 | 0 | 0 | 0 | 75.670.635 | 14.918.250 | 0 | 0 | 0 | 14.918.250 | (60.752.385) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 61.337.635 | 0 | 0 | 0 | 61.337.635 | 14.918.250 | 0 | 0 | 0 | 14.918.250 | (46.419.385) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.333.000 | 0 | 0 | 0 | 14.333.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14.333.000) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 4.591.177.400 | 534.380.000 | 0 | 0 | 5.125.557.400 | 4.076.941.345 | 415.580.111 | 0 | 0 | 4.492.521.456 | (633.035.944) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 4.591.177.400 | 534.380.000 | 0 | 0 | 5.125.557.400 | 4.076.941.345 | 415.580.111 | 0 | 0 | 4.492.521.456 | (633.035.944) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 409.589.100 | 534.380.000 | 0 | 0 | 943.969.100 | 318.017.450 | 415.580.111 | 0 | 0 | 733.597.561 | (210.371.539) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | | Pelayanan Informasi Publik | 256.144.500 | 0 | 0 | 0 | 256.144.500 | 114.130.345 | 0 | 0 | 0 | 114.130.345 | (142.014.155) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | | Layanan Hubungan Media | 3.925.443.800 | 0 | 0 | 0 | 3.925.443.800 | 3.644.793.550 | 0 | 0 | 0 | 3.644.793.550 | (280.650.250) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | | | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | 4.438.191.740 | 154.825.000 | 0 | 0 | 4.593.016.740 | 3.985.068.310 | 887.845.800 | 0 | 0 | 4.872.914.110 | 279.897.370 |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.01 | | | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3.516.486.540 | 55.000.000 | 0 | 0 | 3.571.486.540 | 3.379.002.054 | 594.309.000 | 0 | 0 | 3.973.311.054 | 401.824.514 |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 181.292.500 | 0 | 0 | 0 | 181.292.500 | 151.196.000 | 0 | 0 | 0 | 151.196.000 | (30.096.500) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 3.335.194.040 | 55.000.000 | 0 | 0 | 3.390.194.040 | 3.227.806.054 | 594.309.000 | 0 | 0 | 3.822.115.054 | 431.921.014 |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | | | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 921.705.200 | 99.825.000 | 0 | 0 | 1.021.530.200 | 606.066.256 | 293.536.800 | 0 | 0 | 899.603.056 | (121.927.144) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 309.456.000 | 0 | 0 | 0 | 309.456.000 | 265.597.500 | 0 | 0 | 0 | 265.597.500 | (43.858.500) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | 172.678.000 | 99.825.000 | 0 | 0 | 272.503.000 | 51.547.600 | 293.536.800 | 0 | 0 | 345.084.400 | 72.581.400 |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 07 | | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 319.227.200 | 0 | 0 | 0 | 319.227.200 | 197.861.700 | 0 | 0 | 0 | 197.861.700 | (121.365.500) |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 03 | 2.02 | 09 | | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 120.344.000 | 0 | 0 | 0 | 120.344.000 | 91.059.456 | 0 | 0 | 0 | 91.059.456 | (29.284.544) |
| **2** | **17** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **8.441.071.021** | **11.160.000** | **0** | **0** | **8.452.231.021** | **7.857.195.962** | **0** | **0** | **0** | **7.857.195.962** | **(595.035.059)** |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | | | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 8.441.071.021 | 11.160.000 | 0 | 0 | 8.452.231.021 | 7.857.195.962 | 0 | 0 | 0 | 7.857.195.962 | (595.035.059) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.797.912.921 | 11.160.000 | 0 | 0 | 7.809.072.921 | 7.347.115.412 | 0 | 0 | 0 | 7.347.115.412 | (461.957.509) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 186.145.630 | 0 | 0 | 0 | 186.145.630 | 202.928.955 | 0 | 0 | 0 | 202.928.955 | 16.783.325 |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 21.030.330 | 0 | 0 | 0 | 21.030.330 | 21.035.753 | 0 | 0 | 0 | 21.035.753 | 5.423 |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 20.135.660 | 0 | 0 | 0 | 20.135.660 | 24.985.660 | 0 | 0 | 0 | 24.985.660 | 4.850.000 |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 03 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 22.460.660 | 0 | 0 | 0 | 22.460.660 | 26.940.660 | 0 | 0 | 0 | 26.940.660 | 4.480.000 |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 04 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 18.935.660 | 0 | 0 | 0 | 18.935.660 | 24.985.660 | 0 | 0 | 0 | 24.985.660 | 6.050.000 |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 18.935.660 | 0 | 0 | 0 | 18.935.660 | 24.835.660 | 0 | 0 | 0 | 24.835.660 | 5.900.000 |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 06 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 58.242.330 | 0 | 0 | 0 | 58.242.330 | 57.290.232 | 0 | 0 | 0 | 57.290.232 | (952.098) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.405.330 | 0 | 0 | 0 | 26.405.330 | 22.855.330 | 0 | 0 | 0 | 22.855.330 | (3.550.000) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.365.138.372 | 0 | 0 | 0 | 4.365.138.372 | 4.219.193.033 | 0 | 0 | 0 | 4.219.193.033 | (145.945.339) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.077.578.042 | 0 | 0 | 0 | 4.077.578.042 | 4.015.152.703 | 0 | 0 | 0 | 4.015.152.703 | (62.425.339) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 279.060.000 | 0 | 0 | 0 | 279.060.000 | 194.290.000 | 0 | 0 | 0 | 194.290.000 | (84.770.000) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 8.500.330 | 0 | 0 | 0 | 8.500.330 | 9.750.330 | 0 | 0 | 0 | 9.750.330 | 1.250.000 |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 885.612.000 | 11.160.000 | 0 | 0 | 896.772.000 | 667.696.070 | 0 | 0 | 0 | 667.696.070 | (229.075.930) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 58.484.000 | 0 | 0 | 0 | 58.484.000 | 25.020.000 | 0 | 0 | 0 | 25.020.000 | (33.464.000) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 24.550.000 | 11.160.000 | 0 | 0 | 35.710.000 | 10.250.000 | 0 | 0 | 0 | 10.250.000 | (25.460.000) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 66.068.000 | 0 | 0 | 0 | 66.068.000 | 65.735.000 | 0 | 0 | 0 | 65.735.000 | (333.000) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 147.184.000 | 0 | 0 | 0 | 147.184.000 | 88.350.000 | 0 | 0 | 0 | 88.350.000 | (58.834.000) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 100.990.000 | 0 | 0 | 0 | 100.990.000 | 68.552.500 | 0 | 0 | 0 | 68.552.500 | (32.437.500) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 488.336.000 | 0 | 0 | 0 | 488.336.000 | 409.788.570 | 0 | 0 | 0 | 409.788.570 | (78.547.430) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 11.348.000 | 0 | 0 | 0 | 11.348.000 | 4.580.000 | 0 | 0 | 0 | 4.580.000 | (6.768.000) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.07 | 10 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 11.348.000 | 0 | 0 | 0 | 11.348.000 | 4.580.000 | 0 | 0 | 0 | 4.580.000 | (6.768.000) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.032.341.709 | 0 | 0 | 0 | 2.032.341.709 | 1.962.477.144 | 0 | 0 | 0 | 1.962.477.144 | (69.864.565) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 502.799.442 | 0 | 0 | 0 | 502.799.442 | 435.934.877 | 0 | 0 | 0 | 435.934.877 | (66.864.565) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 75.373.211 | 0 | 0 | 0 | 75.373.211 | 75.373.211 | 0 | 0 | 0 | 75.373.211 | 0 |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.454.169.056 | 0 | 0 | 0 | 1.454.169.056 | 1.451.169.056 | 0 | 0 | 0 | 1.451.169.056 | (3.000.000) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 317.327.210 | 0 | 0 | 0 | 317.327.210 | 290.240.210 | 0 | 0 | 0 | 290.240.210 | (27.087.000) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 138.717.210 | 0 | 0 | 0 | 138.717.210 | 130.815.210 | 0 | 0 | 0 | 130.815.210 | (7.902.000) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 91.350.000 | 0 | 0 | 0 | 91.350.000 | 74.500.000 | 0 | 0 | 0 | 74.500.000 | (16.850.000) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 87.260.000 | 0 | 0 | 0 | 87.260.000 | 84.925.000 | 0 | 0 | 0 | 84.925.000 | (2.335.000) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 03 | | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 65.588.000 | 0 | 0 | 0 | 65.588.000 | 25.643.000 | 0 | 0 | 0 | 25.643.000 | (39.945.000) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 03 | 2.01 | | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 65.588.000 | 0 | 0 | 0 | 65.588.000 | 25.643.000 | 0 | 0 | 0 | 25.643.000 | (39.945.000) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 65.588.000 | 0 | 0 | 0 | 65.588.000 | 25.643.000 | 0 | 0 | 0 | 25.643.000 | (39.945.000) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 07 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 81.100.000 | 0 | 0 | 0 | 81.100.000 | 98.425.000 | 0 | 0 | 0 | 98.425.000 | 17.325.000 |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 07 | 2.01 | | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 81.100.000 | 0 | 0 | 0 | 81.100.000 | 98.425.000 | 0 | 0 | 0 | 98.425.000 | 17.325.000 |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 07 | 2.01 | 02 | | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | 81.100.000 | 0 | 0 | 0 | 81.100.000 | 98.425.000 | 0 | 0 | 0 | 98.425.000 | 17.325.000 |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 08 | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 496.470.100 | 0 | 0 | 0 | 496.470.100 | 386.012.550 | 0 | 0 | 0 | 386.012.550 | (110.457.550) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 08 | 2.01 | | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 496.470.100 | 0 | 0 | 0 | 496.470.100 | 386.012.550 | 0 | 0 | 0 | 386.012.550 | (110.457.550) |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 08 | 2.01 | 01 | | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 496.470.100 | 0 | 0 | 0 | 496.470.100 | 386.012.550 | 0 | 0 | 0 | 386.012.550 | (110.457.550) |
| **2** | **18** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **8.743.999.775** | **0** | **0** | **0** | **8.743.999.775** | **7.869.305.549** | **16.126.000** | **0** | **0** | **7.885.431.549** | **(858.568.226)** |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 8.743.999.775 | 0 | 0 | 0 | 8.743.999.775 | 7.869.305.549 | 16.126.000 | 0 | 0 | 7.885.431.549 | (858.568.226) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.476.823.975 | 0 | 0 | 0 | 7.476.823.975 | 6.834.111.969 | 16.126.000 | 0 | 0 | 6.850.237.969 | (626.586.006) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 31.829.570 | 0 | 0 | 0 | 31.829.570 | 14.957.570 | 0 | 0 | 0 | 14.957.570 | (16.872.000) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.542.570 | 0 | 0 | 0 | 12.542.570 | 12.542.570 | 0 | 0 | 0 | 12.542.570 | 0 |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.345.000 | 0 | 0 | 0 | 2.345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.345.000) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 03 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.345.000 | 0 | 0 | 0 | 2.345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.345.000) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 04 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.352.000 | 0 | 0 | 0 | 2.352.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.352.000) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.345.000 | 0 | 0 | 0 | 2.345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.345.000) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 06 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.415.000 | 0 | 0 | 0 | 7.415.000 | 2.415.000 | 0 | 0 | 0 | 2.415.000 | (5.000.000) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.485.000 | 0 | 0 | 0 | 2.485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.485.000) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.763.281.629 | 0 | 0 | 0 | 5.763.281.629 | 5.257.352.049 | 0 | 0 | 0 | 5.257.352.049 | (505.929.580) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.589.891.629 | 0 | 0 | 0 | 5.589.891.629 | 5.087.912.049 | 0 | 0 | 0 | 5.087.912.049 | (501.979.580) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 169.440.000 | 0 | 0 | 0 | 169.440.000 | 169.440.000 | 0 | 0 | 0 | 169.440.000 | 0 |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.950.000 | 0 | 0 | 0 | 3.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3.950.000) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 19.800.000 | 0 | 0 | 0 | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 | 0 | 0 | 19.800.000 | 0 |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 19.800.000 | 0 | 0 | 0 | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 | 0 | 0 | 19.800.000 | 0 |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 552.011.400 | 0 | 0 | 0 | 552.011.400 | 518.170.145 | 0 | 0 | 0 | 518.170.145 | (33.841.255) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.488.500 | 0 | 0 | 0 | 10.488.500 | 4.800.480 | 0 | 0 | 0 | 4.800.480 | (5.688.020) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.566.500 | 0 | 0 | 0 | 9.566.500 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | (3.566.500) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 11.361.700 | 0 | 0 | 0 | 11.361.700 | 8.009.500 | 0 | 0 | 0 | 8.009.500 | (3.352.200) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 48.629.700 | 0 | 0 | 0 | 48.629.700 | 41.752.165 | 0 | 0 | 0 | 41.752.165 | (6.877.535) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 18.425.000 | 0 | 0 | 0 | 18.425.000 | 11.498.000 | 0 | 0 | 0 | 11.498.000 | (6.927.000) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5.400.000 | 0 | 0 | 0 | 5.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5.400.000) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12.500.000 | 0 | 0 | 0 | 12.500.000 | 10.470.000 | 0 | 0 | 0 | 10.470.000 | (2.030.000) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 435.640.000 | 0 | 0 | 0 | 435.640.000 | 435.640.000 | 0 | 0 | 0 | 435.640.000 | 0 |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.126.000 | 0 | 0 | 16.126.000 | 16.126.000 |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.07 | 05 | | Pengadaan Mebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.126.000 | 0 | 0 | 16.126.000 | 16.126.000 |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 939.908.876 | 0 | 0 | 0 | 939.908.876 | 894.698.105 | 0 | 0 | 0 | 894.698.105 | (45.210.771) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 54.119.500 | 0 | 0 | 0 | 54.119.500 | 46.929.149 | 0 | 0 | 0 | 46.929.149 | (7.190.351) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3.960.000 | 0 | 0 | 0 | 3.960.000 | 3.960.000 | 0 | 0 | 0 | 3.960.000 | 0 |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 881.829.376 | 0 | 0 | 0 | 881.829.376 | 843.808.956 | 0 | 0 | 0 | 843.808.956 | (38.020.420) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 169.992.500 | 0 | 0 | 0 | 169.992.500 | 129.134.100 | 0 | 0 | 0 | 129.134.100 | (40.858.400) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 45.102.500 | 0 | 0 | 0 | 45.102.500 | 31.165.600 | 0 | 0 | 0 | 31.165.600 | (13.936.900) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 31.500.000 | 0 | 0 | 0 | 31.500.000 | 13.942.500 | 0 | 0 | 0 | 13.942.500 | (17.557.500) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 01 | 2.09 | 10 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 93.390.000 | 0 | 0 | 0 | 93.390.000 | 84.026.000 | 0 | 0 | 0 | 84.026.000 | (9.364.000) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 03 | | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 280.000.900 | 0 | 0 | 0 | 280.000.900 | 234.415.380 | 0 | 0 | 0 | 234.415.380 | (45.585.520) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 03 | 2.01 | | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 280.000.900 | 0 | 0 | 0 | 280.000.900 | 234.415.380 | 0 | 0 | 0 | 234.415.380 | (45.585.520) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 280.000.900 | 0 | 0 | 0 | 280.000.900 | 234.415.380 | 0 | 0 | 0 | 234.415.380 | (45.585.520) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 04 | | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 608.000.000 | 0 | 0 | 0 | 608.000.000 | 421.603.300 | 0 | 0 | 0 | 421.603.300 | (186.396.700) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 04 | 2.01 | | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 608.000.000 | 0 | 0 | 0 | 608.000.000 | 421.603.300 | 0 | 0 | 0 | 421.603.300 | (186.396.700) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 424.629.000 | 0 | 0 | 0 | 424.629.000 | 385.880.500 | 0 | 0 | 0 | 385.880.500 | (38.748.500) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 04 | 2.01 | 02 | | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | 183.371.000 | 0 | 0 | 0 | 183.371.000 | 35.722.800 | 0 | 0 | 0 | 35.722.800 | (147.648.200) |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 379.174.900 | 0 | 0 | 0 | 379.174.900 | 379.174.900 | 0 | 0 | 0 | 379.174.900 | 0 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.01 | | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 379.174.900 | 0 | 0 | 0 | 379.174.900 | 379.174.900 | 0 | 0 | 0 | 379.174.900 | 0 |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.01 | 02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 221.821.900 | 0 | 0 | 0 | 221.821.900 | 221.821.900 | 0 | 0 | 0 | 221.821.900 | 0 |
| 2 | 18 | 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 05 | 2.01 | 03 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 157.353.000 | 0 | 0 | 0 | 157.353.000 | 157.353.000 | 0 | 0 | 0 | 157.353.000 | 0 |
| **2** | **19** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **1.519.940.934** | **0** | **0** | **0** | **1.519.940.934** | **2.243.146.929** | **122.530.000** | **0** | **0** | **2.365.676.929** | **845.735.995** |
| 1 | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | | | | | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.519.940.934 | 0 | 0 | 0 | 1.519.940.934 | 2.243.146.929 | 122.530.000 | 0 | 0 | 2.365.676.929 | 845.735.995 |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 819.845.973 | 0 | 0 | 0 | 819.845.973 | 691.980.048 | 0 | 0 | 0 | 691.980.048 | (127.865.925) |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 819.845.973 | 0 | 0 | 0 | 819.845.973 | 691.980.048 | 0 | 0 | 0 | 691.980.048 | (127.865.925) |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | 18.746.811 | 0 | 0 | 0 | 18.746.811 | 18.746.811 | 0 | 0 | 0 | 18.746.811 | 0 |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | 801.099.162 | 0 | 0 | 0 | 801.099.162 | 673.233.237 | 0 | 0 | 0 | 673.233.237 | (127.865.925) |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 499.999.900 | 0 | 0 | 0 | 499.999.900 | 1.351.122.720 | 122.530.000 | 0 | 0 | 1.473.652.720 | 973.652.820 |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 295.400.000 | 0 | 0 | 0 | 295.400.000 | 95.400.000 |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 45.400.000 | 0 | 0 | 0 | 45.400.000 | (104.600.000) |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 200.000.000 |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 99.999.900 | 0 | 0 | 0 | 99.999.900 | 299.999.900 | 0 | 0 | 0 | 299.999.900 | 200.000.000 |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | 99.999.900 | 0 | 0 | 0 | 99.999.900 | 299.999.900 | 0 | 0 | 0 | 299.999.900 | 200.000.000 |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.04 | | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.04 | 02 | | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 0 |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.05 | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.722.820 | 122.530.000 | 0 | 0 | 678.252.820 | 678.252.820 |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 03 | 2.05 | 03 | | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.722.820 | 122.530.000 | 0 | 0 | 678.252.820 | 678.252.820 |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 04 | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 200.095.061 | 0 | 0 | 0 | 200.095.061 | 200.044.161 | 0 | 0 | 0 | 200.044.161 | (50.900) |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 200.095.061 | 0 | 0 | 0 | 200.095.061 | 200.044.161 | 0 | 0 | 0 | 200.044.161 | (50.900) |
| 2 | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 02 | | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 200.095.061 | 0 | 0 | 0 | 200.095.061 | 200.044.161 | 0 | 0 | 0 | 200.044.161 | (50.900) |
| **2** | **20** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | **193.218.000** | **0** | **0** | **0** | **193.218.000** | **114.987.600** | **0** | **0** | **0** | **114.987.600** | **(78.230.400)** |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 193.218.000 | 0 | 0 | 0 | 193.218.000 | 114.987.600 | 0 | 0 | 0 | 114.987.600 | (78.230.400) |
| 2 | 20 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 193.218.000 | 0 | 0 | 0 | 193.218.000 | 114.987.600 | 0 | 0 | 0 | 114.987.600 | (78.230.400) |
| 2 | 20 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 193.218.000 | 0 | 0 | 0 | 193.218.000 | 114.987.600 | 0 | 0 | 0 | 114.987.600 | (78.230.400) |
| 2 | 20 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 161.468.000 | 0 | 0 | 0 | 161.468.000 | 96.730.600 | 0 | 0 | 0 | 96.730.600 | (64.737.400) |
| 2 | 20 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | | Membangun Metadata Statistik Sektoral | 31.750.000 | 0 | 0 | 0 | 31.750.000 | 18.257.000 | 0 | 0 | 0 | 18.257.000 | (13.493.000) |
| **2** | **21** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | **170.763.800** | **0** | **0** | **0** | **170.763.800** | **79.246.000** | **0** | **0** | **0** | **79.246.000** | **(91.517.800)** |
| 2 | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 170.763.800 | 0 | 0 | 0 | 170.763.800 | 79.246.000 | 0 | 0 | 0 | 79.246.000 | (91.517.800) |
| 2 | 21 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 170.763.800 | 0 | 0 | 0 | 170.763.800 | 79.246.000 | 0 | 0 | 0 | 79.246.000 | (91.517.800) |
| 2 | 21 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 41.097.000 | 0 | 0 | 0 | 41.097.000 | 22.427.000 | 0 | 0 | 0 | 22.427.000 | (18.670.000) |
| 2 | 21 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 41.097.000 | 0 | 0 | 0 | 41.097.000 | 22.427.000 | 0 | 0 | 0 | 22.427.000 | (18.670.000) |
| 2 | 21 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.02 | | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 129.666.800 | 0 | 0 | 0 | 129.666.800 | 56.819.000 | 0 | 0 | 0 | 56.819.000 | (72.847.800) |
| 2 | 21 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 129.666.800 | 0 | 0 | 0 | 129.666.800 | 56.819.000 | 0 | 0 | 0 | 56.819.000 | (72.847.800) |
| **2** | **22** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | **280.611.600** | **0** | **0** | **0** | **280.611.600** | **840.695.760** | **0** | **0** | **0** | **840.695.760** | **560.084.160** |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | | | | | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 280.611.600 | 0 | 0 | 0 | 280.611.600 | 840.695.760 | 0 | 0 | 0 | 840.695.760 | 560.084.160 |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 280.611.600 | 0 | 0 | 0 | 280.611.600 | 798.345.760 | 0 | 0 | 0 | 798.345.760 | 517.734.160 |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.604.000 | 0 | 0 | 0 | 131.604.000 | 131.604.000 |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.604.000 | 0 | 0 | 0 | 131.604.000 | 131.604.000 |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 280.611.600 | 0 | 0 | 0 | 280.611.600 | 666.741.760 | 0 | 0 | 0 | 666.741.760 | 386.130.160 |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 280.611.600 | 0 | 0 | 0 | 280.611.600 | 666.741.760 | 0 | 0 | 0 | 666.741.760 | 386.130.160 |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 03 | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.350.000 | 0 | 0 | 0 | 42.350.000 | 42.350.000 |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.350.000 | 0 | 0 | 0 | 42.350.000 | 42.350.000 |
| 2 | 22 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.350.000 | 0 | 0 | 0 | 42.350.000 | 42.350.000 |
| **2** | **23** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **881.371.100** | **101.960.000** | **0** | **0** | **983.331.100** | **995.362.800** | **80.000.000** | **0** | **0** | **1.075.362.800** | **92.031.700** |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.045.100 | 0 | 0 | 0 | 156.045.100 | 156.045.100 |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.045.100 | 0 | 0 | 0 | 156.045.100 | 156.045.100 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.859.100 | 0 | 0 | 0 | 87.859.100 | 87.859.100 |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.359.100 | 0 | 0 | 0 | 80.359.100 | 80.359.100 |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.186.000 | 0 | 0 | 0 | 68.186.000 | 68.186.000 |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.186.000 | 0 | 0 | 0 | 68.186.000 | 68.186.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 881.371.100 | 101.960.000 | 0 | 0 | 983.331.100 | 839.317.700 | 80.000.000 | 0 | 0 | 919.317.700 | (64.013.400) |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 881.371.100 | 101.960.000 | 0 | 0 | 983.331.100 | 839.317.700 | 80.000.000 | 0 | 0 | 919.317.700 | (64.013.400) |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 619.071.100 | 101.960.000 | 0 | 0 | 721.031.100 | 593.289.700 | 80.000.000 | 0 | 0 | 673.289.700 | (47.741.400) |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 456.121.100 | 101.960.000 | 0 | 0 | 558.081.100 | 437.839.700 | 80.000.000 | 0 | 0 | 517.839.700 | (40.241.400) |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 99.480.000 | 0 | 0 | 0 | 99.480.000 | 91.980.000 | 0 | 0 | 0 | 91.980.000 | (7.500.000) |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 63.470.000 | 0 | 0 | 0 | 63.470.000 | 63.470.000 | 0 | 0 | 0 | 63.470.000 | 0 |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 262.300.000 | 0 | 0 | 0 | 262.300.000 | 246.028.000 | 0 | 0 | 0 | 246.028.000 | (16.272.000) |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 242.050.000 | 0 | 0 | 0 | 242.050.000 | 225.778.000 | 0 | 0 | 0 | 225.778.000 | (16.272.000) |
| 2 | 23 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 20.250.000 | 0 | 0 | 0 | 20.250.000 | 20.250.000 | 0 | 0 | 0 | 20.250.000 | 0 |
| **2** | **24** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | **61.308.000** | **0** | **0** | **0** | **61.308.000** | **71.267.000** | **0** | **0** | **0** | **71.267.000** | **9.959.000** |
| 2 | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.499.000 | 0 | 0 | 0 | 32.499.000 | 32.499.000 |
| 2 | 24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.499.000 | 0 | 0 | 0 | 32.499.000 | 32.499.000 |
| 2 | 24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.499.000 | 0 | 0 | 0 | 32.499.000 | 32.499.000 |
| 2 | 24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.499.000 | 0 | 0 | 0 | 32.499.000 | 32.499.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 61.308.000 | 0 | 0 | 0 | 61.308.000 | 38.768.000 | 0 | 0 | 0 | 38.768.000 | (22.540.000) |
| 2 | 24 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 61.308.000 | 0 | 0 | 0 | 61.308.000 | 38.768.000 | 0 | 0 | 0 | 38.768.000 | (22.540.000) |
| 2 | 24 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | 61.308.000 | 0 | 0 | 0 | 61.308.000 | 38.768.000 | 0 | 0 | 0 | 38.768.000 | (22.540.000) |
| 2 | 24 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 61.308.000 | 0 | 0 | 0 | 61.308.000 | 38.768.000 | 0 | 0 | 0 | 38.768.000 | (22.540.000) |
| **3** | | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **24.872.701.670** | **349.465.632** | **0** | **0** | **25.222.167.302** | **24.640.891.182** | **2.249.305.697** | **0** | **0** | **26.890.196.879** | **1.668.029.577** |
| **3** | **25** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **15.032.517.010** | **72.515.632** | **0** | **0** | **15.105.032.642** | **14.411.611.564** | **143.960.000** | **0** | **0** | **14.555.571.564** | **(549.461.078)** |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | | | | | DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN | 15.032.517.010 | 72.515.632 | 0 | 0 | 15.105.032.642 | 14.411.611.564 | 143.960.000 | 0 | 0 | 14.555.571.564 | (549.461.078) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.514.889.318 | 61.029.732 | 0 | 0 | 14.575.919.050 | 12.936.323.242 | 54.200.000 | 0 | 0 | 12.990.523.242 | (1.585.395.808) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 70.062.000 | 25.334.000 | 0 | 0 | 95.396.000 | 89.396.000 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 35.062.000 | 25.334.000 | 0 | 0 | 60.396.000 | 57.396.000 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 32.000.000 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.483.423.300 | 0 | 0 | 0 | 9.483.423.300 | 8.019.643.106 | 0 | 0 | 0 | 8.019.643.106 | (1.463.780.194) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.206.744.000 | 0 | 0 | 0 | 9.206.744.000 | 7.778.593.106 | 0 | 0 | 0 | 7.778.593.106 | (1.428.150.894) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 271.680.000 | 0 | 0 | 0 | 271.680.000 | 240.600.000 | 0 | 0 | 0 | 240.600.000 | (31.080.000) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.999.300 | 0 | 0 | 0 | 4.999.300 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | (4.549.300) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 49.900.000 | 0 | 0 | 0 | 49.900.000 | 43.800.000 | 0 | 0 | 0 | 43.800.000 | (6.100.000) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.03 | 01 | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 6.100.000 | 0 | 0 | 0 | 6.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6.100.000) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 43.800.000 | 0 | 0 | 0 | 43.800.000 | 43.800.000 | 0 | 0 | 0 | 43.800.000 | 0 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 243.151.500 | 0 | 0 | 0 | 243.151.500 | 130.847.501 | 0 | 0 | 0 | 130.847.501 | (112.303.999) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 212.927.500 | 0 | 0 | 0 | 212.927.500 | 130.847.500 | 0 | 0 | 0 | 130.847.500 | (82.080.000) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 30.224.000 | 0 | 0 | 0 | 30.224.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (30.223.999) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 581.414.800 | 61.029.732 | 0 | 0 | 642.444.532 | 581.702.800 | 28.866.000 | 0 | 0 | 610.568.800 | (31.875.732) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.992.000 | 0 | 0 | 0 | 4.992.000 | 2.692.000 | 0 | 0 | 0 | 2.692.000 | (2.300.000) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.040.000 | 61.029.732 | 0 | 0 | 63.069.732 | 680.000 | 28.866.000 | 0 | 0 | 29.546.000 | (33.523.732) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 19.992.000 | 0 | 0 | 0 | 19.992.000 | 12.944.000 | 0 | 0 | 0 | 12.944.000 | (7.048.000) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 39.820.600 | 0 | 0 | 0 | 39.820.600 | 34.778.800 | 0 | 0 | 0 | 34.778.800 | (5.041.800) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | (10.000.000) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 07 | | Penyediaan Bahan/Material | 4.990.200 | 0 | 0 | 0 | 4.990.200 | 3.677.000 | 0 | 0 | 0 | 3.677.000 | (1.313.200) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24.915.000 | 0 | 0 | 0 | 24.915.000 | 12.266.000 | 0 | 0 | 0 | 12.266.000 | (12.649.000) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 449.665.000 | 0 | 0 | 0 | 449.665.000 | 489.665.000 | 0 | 0 | 0 | 489.665.000 | 40.000.000 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 266.705.000 | 0 | 0 | 0 | 266.705.000 | 266.705.000 | 0 | 0 | 0 | 266.705.000 | 0 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 266.705.000 | 0 | 0 | 0 | 266.705.000 | 266.705.000 | 0 | 0 | 0 | 266.705.000 | 0 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.815.459.718 | 0 | 0 | 0 | 3.815.459.718 | 3.792.272.835 | 0 | 0 | 0 | 3.792.272.835 | (23.186.883) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 156.727.540 | 0 | 0 | 0 | 156.727.540 | 140.617.401 | 0 | 0 | 0 | 140.617.401 | (16.110.139) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 43.869.938 | 0 | 0 | 0 | 43.869.938 | 43.869.938 | 0 | 0 | 0 | 43.869.938 | 0 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.614.862.240 | 0 | 0 | 0 | 3.614.862.240 | 3.607.785.496 | 0 | 0 | 0 | 3.607.785.496 | (7.076.744) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 68.835.000 | 0 | 0 | 0 | 68.835.000 | 31.290.000 | 0 | 0 | 0 | 31.290.000 | (37.545.000) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.345.000 | 0 | 0 | 0 | 24.345.000 | 13.300.000 | 0 | 0 | 0 | 13.300.000 | (11.045.000) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 44.490.000 | 0 | 0 | 0 | 44.490.000 | 17.990.000 | 0 | 0 | 0 | 17.990.000 | (26.500.000) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 230.507.920 | 11.485.900 | 0 | 0 | 241.993.820 | 1.131.770.122 | 89.760.000 | 0 | 0 | 1.221.530.122 | 979.536.302 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | | | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 69.993.820 | 0 | 0 | 0 | 69.993.820 | 912.065.402 | 0 | 0 | 0 | 912.065.402 | 842.071.582 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 745.099.800 | 0 | 0 | 0 | 745.099.800 | 725.099.800 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 157.017.500 | 0 | 0 | 0 | 157.017.500 | 137.017.500 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 29.993.820 | 0 | 0 | 0 | 29.993.820 | 9.948.102 | 0 | 0 | 0 | 9.948.102 | (20.045.718) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.03 | | | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 160.514.100 | 11.485.900 | 0 | 0 | 172.000.000 | 219.704.720 | 89.760.000 | 0 | 0 | 309.464.720 | 137.464.720 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000.000 | 12.736.200 | 0 | 0 | 0 | 12.736.200 | (8.263.800) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 139.514.100 | 11.485.900 | 0 | 0 | 151.000.000 | 206.968.520 | 89.760.000 | 0 | 0 | 296.728.520 | 145.728.520 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 192.321.000 | 0 | 0 | 0 | 192.321.000 | 231.395.200 | 0 | 0 | 0 | 231.395.200 | 39.074.200 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.02 | | | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 64.314.800 | 0 | 0 | 0 | 64.314.800 | 50.745.000 | 0 | 0 | 0 | 50.745.000 | (13.569.800) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.02 | 01 | | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 4.315.200 | 0 | 0 | 0 | 4.315.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.315.200) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.02 | 02 | | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 59.999.600 | 0 | 0 | 0 | 59.999.600 | 50.745.000 | 0 | 0 | 0 | 50.745.000 | (9.254.600) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.03 | | | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (21.000.000) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.03 | 02 | | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (21.000.000) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.04 | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 107.006.200 | 0 | 0 | 0 | 107.006.200 | 180.650.200 | 0 | 0 | 0 | 180.650.200 | 73.644.000 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.04 | 01 | | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 29.998.200 | 0 | 0 | 0 | 29.998.200 | 21.248.200 | 0 | 0 | 0 | 21.248.200 | (8.750.000) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.04 | 02 | | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7.566.000 | 0 | 0 | 0 | 7.566.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7.566.000) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.04 | 03 | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 21.682.800 | 0 | 0 | 0 | 21.682.800 | 142.546.800 | 0 | 0 | 0 | 142.546.800 | 120.864.000 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.04 | 04 | | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 47.759.200 | 0 | 0 | 0 | 47.759.200 | 16.855.200 | 0 | 0 | 0 | 16.855.200 | (30.904.000) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 06 | | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 94.798.772 | 0 | 0 | 0 | 94.798.772 | 112.123.000 | 0 | 0 | 0 | 112.123.000 | 17.324.228 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 06 | 2.01 | | | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000.000 | 9.849.500 | 0 | 0 | 0 | 9.849.500 | (11.150.500) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 06 | 2.01 | 01 | | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 21.000.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000.000 | 9.849.500 | 0 | 0 | 0 | 9.849.500 | (11.150.500) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 06 | 2.02 | | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 42.798.772 | 0 | 0 | 0 | 42.798.772 | 21.323.500 | 0 | 0 | 0 | 21.323.500 | (21.475.272) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 06 | 2.02 | 01 | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 42.798.772 | 0 | 0 | 0 | 42.798.772 | 21.323.500 | 0 | 0 | 0 | 21.323.500 | (21.475.272) |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 06 | 2.03 | | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 31.000.000 | 0 | 0 | 0 | 31.000.000 | 80.950.000 | 0 | 0 | 0 | 80.950.000 | 49.950.000 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 06 | 2.03 | 02 | | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 31.000.000 | 0 | 0 | 0 | 31.000.000 | 80.950.000 | 0 | 0 | 0 | 80.950.000 | 49.950.000 |
| **3** | **26** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | **8.181.574.216** | **76.750.000** | **0** | **0** | **8.258.324.216** | **8.682.005.661** | **50.000.000** | **0** | **0** | **8.732.005.661** | **473.681.445** |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | | | | | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 8.181.574.216 | 76.750.000 | 0 | 0 | 8.258.324.216 | 8.682.005.661 | 50.000.000 | 0 | 0 | 8.732.005.661 | 473.681.445 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.028.924.480 | 5.000.000 | 0 | 0 | 7.033.924.480 | 6.485.507.339 | 0 | 0 | 0 | 6.485.507.339 | (548.417.141) |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 162.833.600 | 0 | 0 | 0 | 162.833.600 | 200.549.264 | 0 | 0 | 0 | 200.549.264 | 37.715.664 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 162.833.600 | 0 | 0 | 0 | 162.833.600 | 200.549.264 | 0 | 0 | 0 | 200.549.264 | 37.715.664 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.569.696.261 | 0 | 0 | 0 | 4.569.696.261 | 3.766.173.838 | 0 | 0 | 0 | 3.766.173.838 | (803.522.423) |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.342.876.261 | 0 | 0 | 0 | 4.342.876.261 | 3.581.353.838 | 0 | 0 | 0 | 3.581.353.838 | (761.522.423) |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 226.820.000 | 0 | 0 | 0 | 226.820.000 | 184.820.000 | 0 | 0 | 0 | 184.820.000 | (42.000.000) |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 540.113.000 | 0 | 0 | 0 | 540.113.000 | 662.782.785 | 0 | 0 | 0 | 662.782.785 | 122.669.785 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 10 | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 200.250.000 | 0 | 0 | 0 | 200.250.000 | 221.903.000 | 0 | 0 | 0 | 221.903.000 | 21.653.000 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 11 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 339.863.000 | 0 | 0 | 0 | 339.863.000 | 440.879.785 | 0 | 0 | 0 | 440.879.785 | 101.016.785 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 148.642.000 | 0 | 0 | 0 | 148.642.000 | 189.283.946 | 0 | 0 | 0 | 189.283.946 | 40.641.946 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 36.264.000 | 0 | 0 | 0 | 36.264.000 | 40.143.000 | 0 | 0 | 0 | 40.143.000 | 3.879.000 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 22.646.000 | 0 | 0 | 0 | 22.646.000 | 30.500.000 | 0 | 0 | 0 | 30.500.000 | 7.854.000 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.332.000 | 0 | 0 | 0 | 30.332.000 | 33.840.000 | 0 | 0 | 0 | 33.840.000 | 3.508.000 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 14.400.000 | 0 | 0 | 0 | 14.400.000 | 20.310.000 | 0 | 0 | 0 | 20.310.000 | 5.910.000 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | (500.000) |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 59.990.946 | 0 | 0 | 0 | 59.990.946 | 19.990.946 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.234.937.089 | 5.000.000 | 0 | 0 | 1.239.937.089 | 1.296.784.976 | 0 | 0 | 0 | 1.296.784.976 | 56.847.887 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 53.690.000 | 0 | 0 | 0 | 53.690.000 | 53.345.000 | 0 | 0 | 0 | 53.345.000 | (345.000) |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 74.369.265 | 0 | 0 | 0 | 74.369.265 | 74.369.265 | 0 | 0 | 0 | 74.369.265 | 0 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8.131.600 | 5.000.000 | 0 | 0 | 13.131.600 | 8.834.000 | 0 | 0 | 0 | 8.834.000 | (4.297.600) |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.098.746.224 | 0 | 0 | 0 | 1.098.746.224 | 1.160.236.711 | 0 | 0 | 0 | 1.160.236.711 | 61.490.487 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 372.702.530 | 0 | 0 | 0 | 372.702.530 | 369.932.530 | 0 | 0 | 0 | 369.932.530 | (2.770.000) |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5.242.530 | 0 | 0 | 0 | 5.242.530 | 5.242.530 | 0 | 0 | 0 | 5.242.530 | 0 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.460.000 | 0 | 0 | 0 | 17.460.000 | 17.460.000 | 0 | 0 | 0 | 17.460.000 | 0 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000.000 | 347.230.000 | 0 | 0 | 0 | 347.230.000 | (2.770.000) |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 149.995.313 | 71.750.000 | 0 | 0 | 221.745.313 | 1.126.020.648 | 50.000.000 | 0 | 0 | 1.176.020.648 | 954.275.335 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 149.995.313 | 71.750.000 | 0 | 0 | 221.745.313 | 1.126.020.648 | 50.000.000 | 0 | 0 | 1.176.020.648 | 954.275.335 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.500.000 | 0 | 0 | 0 | 127.500.000 | 127.500.000 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 149.995.313 | 71.750.000 | 0 | 0 | 221.745.313 | 998.520.648 | 50.000.000 | 0 | 0 | 1.048.520.648 | 826.775.335 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 03 | | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 396.054.423 | 0 | 0 | 0 | 396.054.423 | 463.877.674 | 0 | 0 | 0 | 463.877.674 | 67.823.251 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 396.054.423 | 0 | 0 | 0 | 396.054.423 | 463.877.674 | 0 | 0 | 0 | 463.877.674 | 67.823.251 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.870.000 | 0 | 0 | 0 | 210.870.000 | 210.870.000 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 396.054.423 | 0 | 0 | 0 | 396.054.423 | 253.007.674 | 0 | 0 | 0 | 253.007.674 | (143.046.749) |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 05 | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 606.600.000 | 0 | 0 | 0 | 606.600.000 | 606.600.000 | 0 | 0 | 0 | 606.600.000 | 0 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 606.600.000 | 0 | 0 | 0 | 606.600.000 | 606.600.000 | 0 | 0 | 0 | 606.600.000 | 0 |
| 3 | 26 | 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | 02 | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 606.600.000 | 0 | 0 | 0 | 606.600.000 | 606.600.000 | 0 | 0 | 0 | 606.600.000 | 0 |
| **3** | **27** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **754.955.669** | **195.000.000** | **0** | **0** | **949.955.669** | **639.800.664** | **39.973.000** | **0** | **0** | **679.773.664** | **(270.182.005)** |
| 1 | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | | | | | DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN | 754.955.669 | 195.000.000 | 0 | 0 | 949.955.669 | 639.800.664 | 39.973.000 | 0 | 0 | 679.773.664 | (270.182.005) |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 304.542.000 | 0 | 0 | 0 | 304.542.000 | 232.986.600 | 0 | 0 | 0 | 232.986.600 | (71.555.400) |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 02 | 2.02 | | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 299.992.000 | 0 | 0 | 0 | 299.992.000 | 232.986.600 | 0 | 0 | 0 | 232.986.600 | (67.005.400) |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 299.992.000 | 0 | 0 | 0 | 299.992.000 | 232.986.600 | 0 | 0 | 0 | 232.986.600 | (67.005.400) |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 02 | 2.06 | | | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | 4.550.000 | 0 | 0 | 0 | 4.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.550.000) |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 02 | 2.06 | 01 | | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.800.000) |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 02 | 2.06 | 02 | | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.750.000) |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 79.978.699 | 195.000.000 | 0 | 0 | 274.978.699 | 91.504.768 | 39.973.000 | 0 | 0 | 131.477.768 | (143.500.931) |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | | | Pembangunan Prasarana Pertanian | 79.978.699 | 195.000.000 | 0 | 0 | 274.978.699 | 91.504.768 | 39.973.000 | 0 | 0 | 131.477.768 | (143.500.931) |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 03 | 2.02 | 09 | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 79.978.699 | 195.000.000 | 0 | 0 | 274.978.699 | 91.504.768 | 39.973.000 | 0 | 0 | 131.477.768 | (143.500.931) |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 279.950.900 | 0 | 0 | 0 | 279.950.900 | 222.963.330 | 0 | 0 | 0 | 222.963.330 | (56.987.570) |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.01 | | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 103.902.000 | 0 | 0 | 0 | 103.902.000 | 83.814.430 | 0 | 0 | 0 | 83.814.430 | (20.087.570) |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 103.902.000 | 0 | 0 | 0 | 103.902.000 | 83.814.430 | 0 | 0 | 0 | 83.814.430 | (20.087.570) |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.03 | | | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 176.048.900 | 0 | 0 | 0 | 176.048.900 | 139.148.900 | 0 | 0 | 0 | 139.148.900 | (36.900.000) |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 04 | 2.03 | 02 | | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 176.048.900 | 0 | 0 | 0 | 176.048.900 | 139.148.900 | 0 | 0 | 0 | 139.148.900 | (36.900.000) |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 07 | | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 90.484.070 | 0 | 0 | 0 | 90.484.070 | 92.345.966 | 0 | 0 | 0 | 92.345.966 | 1.861.896 |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 07 | 2.01 | | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 90.484.070 | 0 | 0 | 0 | 90.484.070 | 92.345.966 | 0 | 0 | 0 | 92.345.966 | 1.861.896 |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 07 | 2.01 | 01 | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 39.929.500 | 0 | 0 | 0 | 39.929.500 | 4.265.000 | 0 | 0 | 0 | 4.265.000 | (35.664.500) |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 07 | 2.01 | 02 | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 20.129.390 | 0 | 0 | 0 | 20.129.390 | 8.084.900 | 0 | 0 | 0 | 8.084.900 | (12.044.490) |
| 3 | 27 | 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 07 | 2.01 | 03 | | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 30.425.180 | 0 | 0 | 0 | 30.425.180 | 79.996.066 | 0 | 0 | 0 | 79.996.066 | 49.570.886 |
| **3** | **30** | | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | **638.865.575** | **0** | **0** | **0** | **638.865.575** | **785.945.265** | **0** | **0** | **0** | **785.945.265** | **147.079.690** |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | | | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 638.865.575 | 0 | 0 | 0 | 638.865.575 | 785.945.265 | 0 | 0 | 0 | 785.945.265 | 147.079.690 |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 102.005.720 | 0 | 0 | 0 | 102.005.720 | 99.240.720 | 0 | 0 | 0 | 99.240.720 | (2.765.000) |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | 102.005.720 | 0 | 0 | 0 | 102.005.720 | 99.240.720 | 0 | 0 | 0 | 99.240.720 | (2.765.000) |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 102.005.720 | 0 | 0 | 0 | 102.005.720 | 99.240.720 | 0 | 0 | 0 | 99.240.720 | (2.765.000) |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 04 | | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 486.889.855 | 0 | 0 | 0 | 486.889.855 | 653.145.105 | 0 | 0 | 0 | 653.145.105 | 166.255.250 |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 04 | 2.01 | | | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 486.889.855 | 0 | 0 | 0 | 486.889.855 | 653.145.105 | 0 | 0 | 0 | 653.145.105 | 166.255.250 |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 04 | 2.01 | 01 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar | 103.987.700 | 0 | 0 | 0 | 103.987.700 | 84.490.060 | 0 | 0 | 0 | 84.490.060 | (19.497.640) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| | | | | | | Rakyat | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 04 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 382.902.155 | 0 | 0 | 0 | 382.902.155 | 280.455.615 | 0 | 0 | 0 | 280.455.615 | (102.446.540) |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 04 | 2.01 | 03 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.199.430 | 0 | 0 | 0 | 288.199.430 | 288.199.430 |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 06 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 49.970.000 | 0 | 0 | 0 | 49.970.000 | 33.559.440 | 0 | 0 | 0 | 33.559.440 | (16.410.560) |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 06 | 2.01 | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | 49.970.000 | 0 | 0 | 0 | 49.970.000 | 33.559.440 | 0 | 0 | 0 | 33.559.440 | (16.410.560) |
| 3 | 30 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 06 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 49.970.000 | 0 | 0 | 0 | 49.970.000 | 33.559.440 | 0 | 0 | 0 | 33.559.440 | (16.410.560) |
| **3** | **31** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | **264.789.200** | **5.200.000** | **0** | **0** | **269.989.200** | **121.528.028** | **2.015.372.697** | **0** | **0** | **2.136.900.725** | **1.866.911.525** |
| 2 | 17 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 264.789.200 | 5.200.000 | 0 | 0 | 269.989.200 | 121.528.028 | 2.015.372.697 | 0 | 0 | 2.136.900.725 | 1.866.911.525 |
| 3 | 31 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 264.789.200 | 5.200.000 | 0 | 0 | 269.989.200 | 121.528.028 | 2.015.372.697 | 0 | 0 | 2.136.900.725 | 1.866.911.525 |
| 3 | 31 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | 2.01 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 264.789.200 | 5.200.000 | 0 | 0 | 269.989.200 | 121.528.028 | 2.015.372.697 | 0 | 0 | 2.136.900.725 | 1.866.911.525 |
| 3 | 31 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 264.789.200 | 5.200.000 | 0 | 0 | 269.989.200 | 121.528.028 | 0 | 0 | 0 | 121.528.028 | (148.461.172) |
| 3 | 31 | 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015.372.697 | 0 | 0 | 2.015.372.697 | 2.015.372.697 |
| **4** | | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | **88.552.783.621** | **1.806.567.510** | **0** | **0** | **90.359.351.131** | **90.100.112.955** | **1.263.757.660** | **0** | **0** | **91.363.870.615** | **1.004.519.484** |
| **4** | **01** | | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | **53.878.459.901** | **1.545.856.510** | **0** | **0** | **55.424.316.411** | **53.488.371.203** | **684.648.710** | **0** | **0** | **54.173.019.913** | **(1.251.296.498)** |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 53.878.459.901 | 1.545.856.510 | 0 | 0 | 55.424.316.411 | 53.488.371.203 | 684.648.710 | 0 | 0 | 54.173.019.913 | (1.251.296.498) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 40.030.716.661 | 1.524.856.510 | 0 | 0 | 41.555.573.171 | 40.143.763.963 | 532.070.710 | 0 | 0 | 40.675.834.673 | (879.738.498) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 17.567.066.639 | 0 | 0 | 0 | 17.567.066.639 | 16.166.448.839 | 0 | 0 | 0 | 16.166.448.839 | (1.400.617.800) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16.477.616.639 | 0 | 0 | 0 | 16.477.616.639 | 15.348.048.839 | 0 | 0 | 0 | 15.348.048.839 | (1.129.567.800) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.089.450.000 | 0 | 0 | 0 | 1.089.450.000 | 818.400.000 | 0 | 0 | 0 | 818.400.000 | (271.050.000) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 379.890.200 | 0 | 0 | 0 | 379.890.200 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | (367.890.200) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 379.890.200 | 0 | 0 | 0 | 379.890.200 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | (367.890.200) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7.931.082.880 | 0 | 0 | 0 | 7.931.082.880 | 9.215.933.680 | 0 | 0 | 0 | 9.215.933.680 | 1.284.850.800 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 535.946.680 | 0 | 0 | 0 | 535.946.680 | 336.146.680 | 0 | 0 | 0 | 336.146.680 | (199.800.000) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 304.204.200 | 0 | 0 | 0 | 304.204.200 | 351.168.700 | 0 | 0 | 0 | 351.168.700 | 46.964.500 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 123.256.000 | 0 | 0 | 0 | 123.256.000 | 123.256.000 | 0 | 0 | 0 | 123.256.000 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1.803.718.000 | 0 | 0 | 0 | 1.803.718.000 | 2.532.776.300 | 0 | 0 | 0 | 2.532.776.300 | 729.058.300 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 247.070.000 | 0 | 0 | 0 | 247.070.000 | 309.970.000 | 0 | 0 | 0 | 309.970.000 | 62.900.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.896.900.000 | 0 | 0 | 0 | 1.896.900.000 | 1.896.820.000 | 0 | 0 | 0 | 1.896.820.000 | (80.000) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3.019.988.000 | 0 | 0 | 0 | 3.019.988.000 | 3.665.796.000 | 0 | 0 | 0 | 3.665.796.000 | 645.808.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 1.484.856.510 | 0 | 0 | 1.484.856.510 | 23.509.800 | 445.526.510 | 0 | 0 | 469.036.310 | (1.015.820.200) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.07 | 07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 0 | 1.484.856.510 | 0 | 0 | 1.484.856.510 | 23.509.800 | 445.526.510 | 0 | 0 | 469.036.310 | (1.015.820.200) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 9.076.657.899 | 0 | 0 | 0 | 9.076.657.899 | 9.789.902.101 | 0 | 0 | 0 | 9.789.902.101 | 713.244.202 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 199.499.500 | 0 | 0 | 0 | 199.499.500 | 199.499.500 | 0 | 0 | 0 | 199.499.500 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.637.169.455 | 0 | 0 | 0 | 1.637.169.455 | 1.637.169.455 | 0 | 0 | 0 | 1.637.169.455 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 7.239.988.944 | 0 | 0 | 0 | 7.239.988.944 | 7.953.233.146 | 0 | 0 | 0 | 7.953.233.146 | 713.244.202 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.554.129.848 | 0 | 0 | 0 | 1.554.129.848 | 1.247.585.108 | 0 | 0 | 0 | 1.247.585.108 | (306.544.740) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 527.111.260 | 0 | 0 | 0 | 527.111.260 | 527.111.260 | 0 | 0 | 0 | 527.111.260 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 161.129.740 | 0 | 0 | 0 | 161.129.740 | 139.670.000 | 0 | 0 | 0 | 139.670.000 | (21.459.740) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 865.888.848 | 0 | 0 | 0 | 865.888.848 | 580.803.848 | 0 | 0 | 0 | 580.803.848 | (285.085.000) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1.275.336.215 | 0 | 0 | 0 | 1.275.336.215 | 1.275.336.215 | 0 | 0 | 0 | 1.275.336.215 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.11 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 194.913.655 | 0 | 0 | 0 | 194.913.655 | 194.913.655 | 0 | 0 | 0 | 194.913.655 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.11 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 96.942.000 | 0 | 0 | 0 | 96.942.000 | 96.942.000 | 0 | 0 | 0 | 96.942.000 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.11 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.11 | 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 963.480.560 | 0 | 0 | 0 | 963.480.560 | 963.480.560 | 0 | 0 | 0 | 963.480.560 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 629.121.600 | 0 | 0 | 0 | 629.121.600 | 632.201.600 | 0 | 0 | 0 | 632.201.600 | 3.080.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.12 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 152.372.400 | 0 | 0 | 0 | 152.372.400 | 152.372.400 | 0 | 0 | 0 | 152.372.400 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.12 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 144.114.000 | 0 | 0 | 0 | 144.114.000 | 144.114.000 | 0 | 0 | 0 | 144.114.000 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.12 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 332.635.200 | 0 | 0 | 0 | 332.635.200 | 335.715.200 | 0 | 0 | 0 | 335.715.200 | 3.080.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | 487.055.700 | 0 | 0 | 0 | 487.055.700 | 487.055.700 | 0 | 0 | 0 | 487.055.700 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.13 | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 157.980.000 | 0 | 0 | 0 | 157.980.000 | 157.980.000 | 0 | 0 | 0 | 157.980.000 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.13 | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 154.250.200 | 0 | 0 | 0 | 154.250.200 | 154.250.200 | 0 | 0 | 0 | 154.250.200 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.13 | 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 174.825.500 | 0 | 0 | 0 | 174.825.500 | 174.825.500 | 0 | 0 | 0 | 174.825.500 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1.130.375.680 | 40.000.000 | 0 | 0 | 1.170.375.680 | 1.293.790.920 | 86.544.200 | 0 | 0 | 1.380.335.120 | 209.959.440 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.14 | 01 | Fasilitasi Keprotokolan | 385.750.000 | 0 | 0 | 0 | 385.750.000 | 455.750.000 | 0 | 0 | 0 | 455.750.000 | 70.000.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.14 | 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 201.022.000 | 0 | 0 | 0 | 201.022.000 | 270.996.000 | 0 | 0 | 0 | 270.996.000 | 69.974.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 01 | 2.14 | 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 543.603.680 | 40.000.000 | 0 | 0 | 583.603.680 | 567.044.920 | 86.544.200 | 0 | 0 | 653.589.120 | 69.985.440 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 12.023.888.300 | 19.000.000 | 0 | 0 | 12.042.888.300 | 11.475.270.300 | 150.578.000 | 0 | 0 | 11.625.848.300 | (417.040.000) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | | Administrasi Tata Pemerintahan | 403.313.200 | 0 | 0 | 0 | 403.313.200 | 403.313.200 | 0 | 0 | 0 | 403.313.200 | 0 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | Penataan Administrasi Pemerintahan | 262.609.200 | 0 | 0 | 0 | 262.609.200 | 262.609.200 | 0 | 0 | 0 | 262.609.200 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 140.704.000 | 0 | 0 | 0 | 140.704.000 | 140.704.000 | 0 | 0 | 0 | 140.704.000 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 10.910.250.100 | 19.000.000 | 0 | 0 | 10.929.250.100 | 10.245.672.100 | 150.578.000 | 0 | 0 | 10.396.250.100 | (533.000.000) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 3.737.238.700 | 19.000.000 | 0 | 0 | 3.756.238.700 | 3.955.660.700 | 150.578.000 | 0 | 0 | 4.106.238.700 | 350.000.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 7.173.011.400 | 0 | 0 | 0 | 7.173.011.400 | 6.290.011.400 | 0 | 0 | 0 | 6.290.011.400 | (883.000.000) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.03 | | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 710.325.000 | 0 | 0 | 0 | 710.325.000 | 826.285.000 | 0 | 0 | 0 | 826.285.000 | 115.960.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.03 | 01 | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 251.894.000 | 0 | 0 | 0 | 251.894.000 | 342.854.000 | 0 | 0 | 0 | 342.854.000 | 90.960.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | | Fasilitasi Bantuan Hukum | 260.630.000 | 0 | 0 | 0 | 260.630.000 | 269.630.000 | 0 | 0 | 0 | 269.630.000 | 9.000.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 197.801.000 | 0 | 0 | 0 | 197.801.000 | 213.801.000 | 0 | 0 | 0 | 213.801.000 | 16.000.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 1.823.854.940 | 2.000.000 | 0 | 0 | 1.825.854.940 | 1.869.336.940 | 2.000.000 | 0 | 0 | 1.871.336.940 | 45.482.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.01 | | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 315.306.500 | 0 | 0 | 0 | 315.306.500 | 367.210.500 | 0 | 0 | 0 | 367.210.500 | 51.904.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 167.486.200 | 0 | 0 | 0 | 167.486.200 | 212.961.200 | 0 | 0 | 0 | 212.961.200 | 45.475.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 68.932.200 | 0 | 0 | 0 | 68.932.200 | 100.503.200 | 0 | 0 | 0 | 100.503.200 | 31.571.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | 78.888.100 | 0 | 0 | 0 | 78.888.100 | 53.746.100 | 0 | 0 | 0 | 53.746.100 | (25.142.000) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.02 | | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 314.556.100 | 0 | 0 | 0 | 314.556.100 | 362.556.100 | 0 | 0 | 0 | 362.556.100 | 48.000.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 75.327.100 | 0 | 0 | 0 | 75.327.100 | 75.327.100 | 0 | 0 | 0 | 75.327.100 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 172.632.000 | 0 | 0 | 0 | 172.632.000 | 220.632.000 | 0 | 0 | 0 | 220.632.000 | 48.000.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 66.597.000 | 0 | 0 | 0 | 66.597.000 | 66.597.000 | 0 | 0 | 0 | 66.597.000 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.03 | | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 959.524.940 | 2.000.000 | 0 | 0 | 961.524.940 | 957.006.940 | 2.000.000 | 0 | 0 | 959.006.940 | (2.518.000) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 394.882.440 | 0 | 0 | 0 | 394.882.440 | 411.916.440 | 0 | 0 | 0 | 411.916.440 | 17.034.000 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | 224.099.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 226.099.000 | 204.547.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 206.547.000 | (19.552.000) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 340.543.500 | 0 | 0 | 0 | 340.543.500 | 340.543.500 | 0 | 0 | 0 | 340.543.500 | 0 |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.04 | | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 234.467.400 | 0 | 0 | 0 | 234.467.400 | 182.563.400 | 0 | 0 | 0 | 182.563.400 | (51.904.000) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.04 | 01 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 85.794.200 | 0 | 0 | 0 | 85.794.200 | 40.319.200 | 0 | 0 | 0 | 40.319.200 | (45.475.000) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.04 | 02 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 57.986.100 | 0 | 0 | 0 | 57.986.100 | 26.415.100 | 0 | 0 | 0 | 26.415.100 | (31.571.000) |
| 4 | 01 | 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 03 | 2.04 | 03 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 90.687.100 | 0 | 0 | 0 | 90.687.100 | 115.829.100 | 0 | 0 | 0 | 115.829.100 | 25.142.000 |
| **4** | **02** | | | | | | **SEKRETARIAT DPRD** | **34.674.323.720** | **260.711.000** | **0** | **0** | **34.935.034.720** | **36.611.741.752** | **579.108.950** | **0** | **0** | **37.190.850.702** | **2.255.815.982** |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 34.674.323.720 | 260.711.000 | 0 | 0 | 34.935.034.720 | 36.611.741.752 | 579.108.950 | 0 | 0 | 37.190.850.702 | 2.255.815.982 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 19.292.674.260 | 118.683.000 | 0 | 0 | 19.411.357.260 | 19.798.151.292 | 328.290.950 | 0 | 0 | 20.126.442.242 | 715.084.982 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 108.148.800 | 0 | 0 | 0 | 108.148.800 | 85.906.400 | 0 | 0 | 0 | 85.906.400 | (22.242.400) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 89.744.600 | 0 | 0 | 0 | 89.744.600 | 82.942.100 | 0 | 0 | 0 | 82.942.100 | (6.802.500) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.000.900 | 0 | 0 | 0 | 4.000.900 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | (3.500.900) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 03 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.919.700 | 0 | 0 | 0 | 3.919.700 | 452.400 | 0 | 0 | 0 | 452.400 | (3.467.300) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 04 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.949.900 | 0 | 0 | 0 | 2.949.900 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | (2.809.900) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.513.700 | 0 | 0 | 0 | 2.513.700 | 1.013.500 | 0 | 0 | 0 | 1.013.500 | (1.500.200) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 06 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.955.100 | 0 | 0 | 0 | 2.955.100 | 555.100 | 0 | 0 | 0 | 555.100 | (2.400.000) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.064.900 | 0 | 0 | 0 | 2.064.900 | 303.300 | 0 | 0 | 0 | 303.300 | (1.761.600) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 14.192.740.496 | 0 | 0 | 0 | 14.192.740.496 | 13.934.118.720 | 0 | 0 | 0 | 13.934.118.720 | (258.621.776) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.919.544.096 | 0 | 0 | 0 | 13.919.544.096 | 13.699.308.720 | 0 | 0 | 0 | 13.699.308.720 | (220.235.376) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 270.600.000 | 0 | 0 | 0 | 270.600.000 | 234.600.000 | 0 | 0 | 0 | 234.600.000 | (36.000.000) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.596.400 | 0 | 0 | 0 | 2.596.400 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | (2.386.400) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 97.968.000 | 0 | 0 | 0 | 97.968.000 | 308.258.500 | 0 | 0 | 0 | 308.258.500 | 210.290.500 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.258.500 | 0 | 0 | 0 | 308.258.500 | 308.258.500 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 11 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 97.968.000 | 0 | 0 | 0 | 97.968.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (97.968.000) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 927.789.300 | 118.683.000 | 0 | 0 | 1.046.472.300 | 1.096.858.260 | 288.250.950 | 0 | 0 | 1.385.109.210 | 338.636.910 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 70.794.000 | 0 | 0 | 0 | 70.794.000 | 88.714.100 | 0 | 0 | 0 | 88.714.100 | 17.920.100 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 118.683.000 | 0 | 0 | 118.683.000 | 0 | 264.908.950 | 0 | 0 | 264.908.950 | 146.225.950 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 60.477.400 | 0 | 0 | 0 | 60.477.400 | 74.860.560 | 23.342.000 | 0 | 0 | 98.202.560 | 37.725.160 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 203.515.900 | 0 | 0 | 0 | 203.515.900 | 226.392.600 | 0 | 0 | 0 | 226.392.600 | 22.876.700 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 139.300.000 | 0 | 0 | 0 | 139.300.000 | 120.383.000 | 0 | 0 | 0 | 120.383.000 | (18.917.000) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100.010.000 | 0 | 0 | 0 | 100.010.000 | 100.010.000 | 0 | 0 | 0 | 100.010.000 | 0 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 303.692.000 | 0 | 0 | 0 | 303.692.000 | 436.498.000 | 0 | 0 | 0 | 436.498.000 | 132.806.000 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.516.760.164 | 0 | 0 | 0 | 2.516.760.164 | 2.561.474.312 | 0 | 0 | 0 | 2.561.474.312 | 44.714.148 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 179.630.600 | 0 | 0 | 0 | 179.630.600 | 194.091.200 | 0 | 0 | 0 | 194.091.200 | 14.460.600 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 245.499.068 | 0 | 0 | 0 | 245.499.068 | 159.499.068 | 0 | 0 | 0 | 159.499.068 | (86.000.000) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.091.630.496 | 0 | 0 | 0 | 2.091.630.496 | 2.207.884.044 | 0 | 0 | 0 | 2.207.884.044 | 116.253.548 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 428.048.700 | 0 | 0 | 0 | 428.048.700 | 563.525.700 | 0 | 0 | 0 | 563.525.700 | 135.477.000 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 87.591.200 | 0 | 0 | 0 | 87.591.200 | 87.591.200 | 0 | 0 | 0 | 87.591.200 | 0 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 56.550.000 | 0 | 0 | 0 | 56.550.000 | 56.550.000 | 0 | 0 | 0 | 56.550.000 | 0 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 283.907.500 | 0 | 0 | 0 | 283.907.500 | 419.384.500 | 0 | 0 | 0 | 419.384.500 | 135.477.000 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.15 | | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 670.593.000 | 0 | 0 | 0 | 670.593.000 | 929.753.000 | 0 | 0 | 0 | 929.753.000 | 259.160.000 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.15 | 02 | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.160.000 | 0 | 0 | 0 | 259.160.000 | 259.160.000 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.15 | 03 | | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 670.593.000 | 0 | 0 | 0 | 670.593.000 | 670.593.000 | 0 | 0 | 0 | 670.593.000 | 0 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.16 | | | Layanan Administrasi DPRD | 350.625.800 | 0 | 0 | 0 | 350.625.800 | 318.256.400 | 40.040.000 | 0 | 0 | 358.296.400 | 7.670.600 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.16 | 01 | | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | 98.485.400 | 0 | 0 | 0 | 98.485.400 | 50.485.000 | 0 | 0 | 0 | 50.485.000 | (48.000.400) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.16 | 03 | | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 252.140.400 | 0 | 0 | 0 | 252.140.400 | 267.771.400 | 40.040.000 | 0 | 0 | 307.811.400 | 55.671.000 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 15.381.649.460 | 142.028.000 | 0 | 0 | 15.523.677.460 | 16.813.590.460 | 250.818.000 | 0 | 0 | 17.064.408.460 | 1.540.731.000 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 4.709.208.800 | 142.028.000 | 0 | 0 | 4.851.236.800 | 4.122.011.400 | 162.048.000 | 0 | 0 | 4.284.059.400 | (567.177.400) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 4.122.011.500 | 142.028.000 | 0 | 0 | 4.264.039.500 | 4.122.011.400 | 162.048.000 | 0 | 0 | 4.284.059.400 | 20.019.900 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | 587.197.300 | 0 | 0 | 0 | 587.197.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (587.197.300) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 692.020.100 | 0 | 0 | 0 | 692.020.100 | 792.020.100 | 0 | 0 | 0 | 792.020.100 | 100.000.000 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | Pembahasan KUA dan PPAS | 22.432.600 | 0 | 0 | 0 | 22.432.600 | 72.432.600 | 0 | 0 | 0 | 72.432.600 | 50.000.000 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 45.317.100 | 0 | 0 | 0 | 45.317.100 | 45.317.100 | 0 | 0 | 0 | 45.317.100 | 0 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 03 | | Pembahasan APBD | 321.105.400 | 0 | 0 | 0 | 321.105.400 | 371.105.400 | 0 | 0 | 0 | 371.105.400 | 50.000.000 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 04 | | Pembahasan APBD Perubahan | 303.165.000 | 0 | 0 | 0 | 303.165.000 | 303.165.000 | 0 | 0 | 0 | 303.165.000 | 0 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | | | Peningkatan Kapasitas DPRD | 3.428.475.960 | 0 | 0 | 0 | 3.428.475.960 | 3.564.297.960 | 88.770.000 | 0 | 0 | 3.653.067.960 | 224.592.000 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 02 | | Pendalaman Tugas DPRD | 768.661.000 | 0 | 0 | 0 | 768.661.000 | 896.661.000 | 0 | 0 | 0 | 896.661.000 | 128.000.000 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 03 | | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 1.565.534.000 | 0 | 0 | 0 | 1.565.534.000 | 2.050.830.000 | 88.770.000 | 0 | 0 | 2.139.600.000 | 574.066.000 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 05 | | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 616.806.960 | 0 | 0 | 0 | 616.806.960 | 616.806.960 | 0 | 0 | 0 | 616.806.960 | 0 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 07 | | Penyusunan Program Kerja DPRD | 477.474.000 | 0 | 0 | 0 | 477.474.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (477.474.000) |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 2.170.516.100 | 0 | 0 | 0 | 2.170.516.100 | 2.953.832.600 | 0 | 0 | 0 | 2.953.832.600 | 783.316.500 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 01 | | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 218.303.400 | 0 | 0 | 0 | 218.303.400 | 218.303.400 | 0 | 0 | 0 | 218.303.400 | 0 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 02 | | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 452.899.700 | 0 | 0 | 0 | 452.899.700 | 486.559.700 | 0 | 0 | 0 | 486.559.700 | 33.660.000 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 03 | | Pelaksanaan Reses | 1.499.313.000 | 0 | 0 | 0 | 1.499.313.000 | 2.248.969.500 | 0 | 0 | 0 | 2.248.969.500 | 749.656.500 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.08 | | | Fasilitasi Tugas DPRD | 4.381.428.500 | 0 | 0 | 0 | 4.381.428.500 | 5.381.428.400 | 0 | 0 | 0 | 5.381.428.400 | 999.999.900 |
| 4 | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.08 | 01 | | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 4.381.428.500 | 0 | 0 | 0 | 4.381.428.500 | 5.381.428.400 | 0 | 0 | 0 | 5.381.428.400 | 999.999.900 |
| **5** | | | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | **79.983.741.960** | **848.030.225** | **1.000.000.000** | **106.128.139.790** | **187.959.911.975** | **57.010.064.027** | **402.495.725** | **1.000.000.000** | **107.866.959.219** | **166.279.518.971** | **(21.680.393.004)** |
| **5** | **01** | | | | | | **PERENCANAAN** | **12.638.846.195** | **45.000.000** | **0** | **0** | **12.683.846.195** | **9.700.689.280** | **0** | **0** | **0** | **9.700.689.280** | **(2.983.156.915)** |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 12.638.846.195 | 45.000.000 | 0 | 0 | 12.683.846.195 | 9.700.689.280 | 0 | 0 | 0 | 9.700.689.280 | (2.983.156.915) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.534.443.595 | 45.000.000 | 0 | 0 | 10.579.443.595 | 8.742.383.373 | 0 | 0 | 0 | 8.742.383.373 | (1.837.060.222) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 80.755.000 | 0 | 0 | 0 | 80.755.000 | 24.155.000 | 0 | 0 | 0 | 24.155.000 | (56.600.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 62.905.000 | 0 | 0 | 0 | 62.905.000 | 19.745.000 | 0 | 0 | 0 | 19.745.000 | (43.160.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.850.000 | 0 | 0 | 0 | 17.850.000 | 4.410.000 | 0 | 0 | 0 | 4.410.000 | (13.440.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.594.281.250 | 0 | 0 | 0 | 5.594.281.250 | 4.814.495.654 | 0 | 0 | 0 | 4.814.495.654 | (779.785.596) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.523.226.250 | 0 | 0 | 0 | 5.523.226.250 | 4.791.785.654 | 0 | 0 | 0 | 4.791.785.654 | (731.440.596) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 71.055.000 | 0 | 0 | 0 | 71.055.000 | 22.710.000 | 0 | 0 | 0 | 22.710.000 | (48.345.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 335.676.000 | 0 | 0 | 0 | 335.676.000 | 64.763.000 | 0 | 0 | 0 | 64.763.000 | (270.913.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 125.590.000 | 0 | 0 | 0 | 125.590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (125.590.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 210.086.000 | 0 | 0 | 0 | 210.086.000 | 64.763.000 | 0 | 0 | 0 | 64.763.000 | (145.323.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.586.634.900 | 2.000.000 | 0 | 0 | 1.588.634.900 | 1.301.497.400 | 0 | 0 | 0 | 1.301.497.400 | (287.137.500) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.732.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 17.732.000 | 14.372.000 | 0 | 0 | 0 | 14.372.000 | (3.360.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 158.976.900 | 0 | 0 | 0 | 158.976.900 | 158.976.900 | 0 | 0 | 0 | 158.976.900 | 0 |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 54.389.000 | 0 | 0 | 0 | 54.389.000 | 49.178.000 | 0 | 0 | 0 | 49.178.000 | (5.211.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 174.413.000 | 0 | 0 | 0 | 174.413.000 | 85.596.000 | 0 | 0 | 0 | 85.596.000 | (88.817.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 111.540.000 | 0 | 0 | 0 | 111.540.000 | 106.960.000 | 0 | 0 | 0 | 106.960.000 | (4.580.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | (2.580.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 882.584.000 | 0 | 0 | 0 | 882.584.000 | 699.994.500 | 0 | 0 | 0 | 699.994.500 | (182.589.500) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 11 | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 186.000.000 | 0 | 0 | 0 | 186.000.000 | 186.000.000 | 0 | 0 | 0 | 186.000.000 | 0 |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 746.674.500 | 43.000.000 | 0 | 0 | 789.674.500 | 456.784.500 | 0 | 0 | 0 | 456.784.500 | (332.890.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 06 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.780.000 | 43.000.000 | 0 | 0 | 45.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (45.780.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 743.894.500 | 0 | 0 | 0 | 743.894.500 | 456.784.500 | 0 | 0 | 0 | 456.784.500 | (287.110.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.113.124.970 | 0 | 0 | 0 | 2.113.124.970 | 2.003.390.844 | 0 | 0 | 0 | 2.003.390.844 | (109.734.126) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | (5.000.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 134.154.858 | 0 | 0 | 0 | 134.154.858 | 126.630.900 | 0 | 0 | 0 | 126.630.900 | (7.523.958) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.968.970.112 | 0 | 0 | 0 | 1.968.970.112 | 1.871.759.944 | 0 | 0 | 0 | 1.871.759.944 | (97.210.168) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 77.296.975 | 0 | 0 | 0 | 77.296.975 | 77.296.975 | 0 | 0 | 0 | 77.296.975 | 0 |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 48.370.475 | 0 | 0 | 0 | 48.370.475 | 48.370.475 | 0 | 0 | 0 | 48.370.475 | 0 |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28.926.500 | 0 | 0 | 0 | 28.926.500 | 28.926.500 | 0 | 0 | 0 | 28.926.500 | 0 |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 895.937.600 | 0 | 0 | 0 | 895.937.600 | 455.852.880 | 0 | 0 | 0 | 455.852.880 | (440.084.720) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 543.270.100 | 0 | 0 | 0 | 543.270.100 | 280.248.800 | 0 | 0 | 0 | 280.248.800 | (263.021.300) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | 4.570.000 | 0 | 0 | 0 | 4.570.000 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | (3.895.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 308.450.200 | 0 | 0 | 0 | 308.450.200 | 113.829.400 | 0 | 0 | 0 | 113.829.400 | (194.620.800) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | 54.180.000 | 0 | 0 | 0 | 54.180.000 | 19.330.000 | 0 | 0 | 0 | 19.330.000 | (34.850.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 176.069.900 | 0 | 0 | 0 | 176.069.900 | 146.414.400 | 0 | 0 | 0 | 146.414.400 | (29.655.500) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 101.440.400 | 0 | 0 | 0 | 101.440.400 | 31.976.040 | 0 | 0 | 0 | 31.976.040 | (69.464.360) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | 101.440.400 | 0 | 0 | 0 | 101.440.400 | 31.976.040 | 0 | 0 | 0 | 31.976.040 | (69.464.360) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 251.227.100 | 0 | 0 | 0 | 251.227.100 | 143.628.040 | 0 | 0 | 0 | 143.628.040 | (107.599.060) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 251.227.100 | 0 | 0 | 0 | 251.227.100 | 143.628.040 | 0 | 0 | 0 | 143.628.040 | (107.599.060) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.208.465.000 | 0 | 0 | 0 | 1.208.465.000 | 502.453.027 | 0 | 0 | 0 | 502.453.027 | (706.011.973) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 459.793.600 | 0 | 0 | 0 | 459.793.600 | 227.297.343 | 0 | 0 | 0 | 227.297.343 | (232.496.257) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 133.428.000 | 0 | 0 | 0 | 133.428.000 | 83.340.682 | 0 | 0 | 0 | 83.340.682 | (50.087.318) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 57.004.800 | 0 | 0 | 0 | 57.004.800 | 21.885.000 | 0 | 0 | 0 | 21.885.000 | (35.119.800) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 6.875.000 | 0 | 0 | 0 | 6.875.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6.875.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 128.928.000 | 0 | 0 | 0 | 128.928.000 | 61.090.105 | 0 | 0 | 0 | 61.090.105 | (67.837.895) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 107.182.800 | 0 | 0 | 0 | 107.182.800 | 43.002.550 | 0 | 0 | 0 | 43.002.550 | (64.180.250) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 26.375.000 | 0 | 0 | 0 | 26.375.000 | 17.979.006 | 0 | 0 | 0 | 17.979.006 | (8.395.994) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 274.641.400 | 0 | 0 | 0 | 274.641.400 | 93.419.674 | 0 | 0 | 0 | 93.419.674 | (181.221.726) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 52.148.000 | 0 | 0 | 0 | 52.148.000 | 30.705.013 | 0 | 0 | 0 | 30.705.013 | (21.442.987) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 49.351.600 | 0 | 0 | 0 | 49.351.600 | 20.788.661 | 0 | 0 | 0 | 20.788.661 | (28.562.939) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 129.650.000 | 0 | 0 | 0 | 129.650.000 | 17.200.000 | 0 | 0 | 0 | 17.200.000 | (112.450.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 16.448.000 | 0 | 0 | 0 | 16.448.000 | 12.747.200 | 0 | 0 | 0 | 12.747.200 | (3.700.800) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 12.493.800 | 0 | 0 | 0 | 12.493.800 | 6.328.800 | 0 | 0 | 0 | 6.328.800 | (6.165.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 14.550.000 | 0 | 0 | 0 | 14.550.000 | 5.650.000 | 0 | 0 | 0 | 5.650.000 | (8.900.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 474.030.000 | 0 | 0 | 0 | 474.030.000 | 181.736.010 | 0 | 0 | 0 | 181.736.010 | (292.293.990) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 107.174.000 | 0 | 0 | 0 | 107.174.000 | 45.075.027 | 0 | 0 | 0 | 45.075.027 | (62.098.973) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 49.871.600 | 0 | 0 | 0 | 49.871.600 | 16.984.600 | 0 | 0 | 0 | 16.984.600 | (32.887.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 114.350.000 | 0 | 0 | 0 | 114.350.000 | 20.250.000 | 0 | 0 | 0 | 20.250.000 | (94.100.000) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 16.448.000 | 0 | 0 | 0 | 16.448.000 | 12.001.283 | 0 | 0 | 0 | 12.001.283 | (4.446.717) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 155.636.400 | 0 | 0 | 0 | 155.636.400 | 80.774.600 | 0 | 0 | 0 | 80.774.600 | (74.861.800) |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 30.550.000 | 0 | 0 | 0 | 30.550.000 | 6.650.500 | 0 | 0 | 0 | 6.650.500 | (23.899.500) |
| **5** | **02** | | | | | **KEUANGAN** | **56.632.886.328** | **206.500.000** | **1.000.000.000** | **106.128.139.790** | **163.967.526.118** | **39.000.618.074** | **145.380.000** | **1.000.000.000** | **107.866.959.219** | **148.012.957.293** | **(15.954.568.825)** |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | | | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 56.632.886.328 | 206.500.000 | 1.000.000.000 | 106.128.139.790 | 163.967.526.118 | 39.000.618.074 | 145.380.000 | 1.000.000.000 | 107.866.959.219 | 148.012.957.293 | (15.954.568.825) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 50.133.039.778 | 0 | 0 | 0 | 50.133.039.778 | 32.104.493.424 | 0 | 0 | 0 | 32.104.493.424 | (18.028.546.354) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.100.000 | 0 | 0 | 0 | 5.100.000 | 5.100.000 | 0 | 0 | 0 | 5.100.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.380.000 | 0 | 0 | 0 | 4.380.000 | 4.380.000 | 0 | 0 | 0 | 4.380.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 46.731.735.744 | 0 | 0 | 0 | 46.731.735.744 | 28.144.640.439 | 0 | 0 | 0 | 28.144.640.439 | (18.587.095.305) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 44.998.115.744 | 0 | 0 | 0 | 44.998.115.744 | 26.340.220.439 | 0 | 0 | 0 | 26.340.220.439 | (18.657.895.305) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.729.320.000 | 0 | 0 | 0 | 1.729.320.000 | 1.800.120.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.120.000 | 70.800.000 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 4.300.000 | 4.300.000 | 0 | 0 | 0 | 4.300.000 | 0 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 682.569.600 | 0 | 0 | 0 | 682.569.600 | 729.240.830 | 0 | 0 | 0 | 729.240.830 | 46.671.230 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18.245.000 | 0 | 0 | 0 | 18.245.000 | 18.245.000 | 0 | 0 | 0 | 18.245.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 139.734.000 | 0 | 0 | 0 | 139.734.000 | 99.509.200 | 0 | 0 | 0 | 99.509.200 | (40.224.800) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 105.409.600 | 0 | 0 | 0 | 105.409.600 | 111.374.630 | 0 | 0 | 0 | 111.374.630 | 5.965.030 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | (3.600.000) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 53.900.000 | 0 | 0 | 0 | 53.900.000 | 38.500.000 | 0 | 0 | 0 | 38.500.000 | (15.400.000) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 359.281.000 | 0 | 0 | 0 | 359.281.000 | 459.212.000 | 0 | 0 | 0 | 459.212.000 | 99.931.000 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 271.700.000 | 0 | 0 | 0 | 271.700.000 | 244.644.000 | 0 | 0 | 0 | 244.644.000 | (27.056.000) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 271.700.000 | 0 | 0 | 0 | 271.700.000 | 244.644.000 | 0 | 0 | 0 | 244.644.000 | (27.056.000) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.284.012.934 | 0 | 0 | 0 | 2.284.012.934 | 2.846.107.155 | 0 | 0 | 0 | 2.846.107.155 | 562.094.221 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 5.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 2.000.000 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 107.253.142 | 0 | 0 | 0 | 107.253.142 | 107.253.142 | 0 | 0 | 0 | 107.253.142 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 132.062.288 | 0 | 0 | 0 | 132.062.288 | 132.062.288 | 0 | 0 | 0 | 132.062.288 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.039.197.504 | 0 | 0 | 0 | 2.039.197.504 | 2.599.291.725 | 0 | 0 | 0 | 2.599.291.725 | 560.094.221 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 157.921.500 | 0 | 0 | 0 | 157.921.500 | 134.761.000 | 0 | 0 | 0 | 134.761.000 | (23.160.500) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 91.732.500 | 0 | 0 | 0 | 91.732.500 | 75.412.500 | 0 | 0 | 0 | 75.412.500 | (16.320.000) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 51.174.000 | 0 | 0 | 0 | 51.174.000 | 49.338.500 | 0 | 0 | 0 | 49.338.500 | (1.835.500) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 10 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.015.000 | 0 | 0 | 0 | 15.015.000 | 10.010.000 | 0 | 0 | 0 | 10.010.000 | (5.005.000) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 4.192.434.700 | 106.500.000 | 1.000.000.000 | 106.128.139.790 | 111.427.074.490 | 4.467.478.700 | 36.500.000 | 1.000.000.000 | 107.866.959.219 | 113.370.937.919 | 1.943.863.429 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 2.292.680.000 | 0 | 0 | 0 | 2.292.680.000 | 2.510.366.000 | 0 | 0 | 0 | 2.510.366.000 | 217.686.000 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 38.600.000 | 0 | 0 | 0 | 38.600.000 | 38.600.000 | 0 | 0 | 0 | 38.600.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 44.000.000 | 0 | 0 | 0 | 44.000.000 | 44.000.000 | 0 | 0 | 0 | 44.000.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 654.030.000 | 0 | 0 | 0 | 654.030.000 | 716.570.000 | 0 | 0 | 0 | 716.570.000 | 62.540.000 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 08 | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 719.176.000 | 0 | 0 | 0 | 719.176.000 | 653.614.000 | 0 | 0 | 0 | 653.614.000 | (65.562.000) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 09 | | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 236.794.000 | 0 | 0 | 0 | 236.794.000 | 236.794.000 | 0 | 0 | 0 | 236.794.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 10 | | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 174.784.000 | 0 | 0 | 0 | 174.784.000 | 336.368.000 | 0 | 0 | 0 | 336.368.000 | 161.584.000 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 11 | | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 111.750.000 | 0 | 0 | 0 | 111.750.000 | 161.020.000 | 0 | 0 | 0 | 161.020.000 | 49.270.000 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 12 | | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 31.212.000 | 0 | 0 | 0 | 31.212.000 | 31.212.000 | 0 | 0 | 0 | 31.212.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 13 | | | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 182.334.000 | 0 | 0 | 0 | 182.334.000 | 192.188.000 | 0 | 0 | 0 | 192.188.000 | 9.854.000 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 293.380.000 | 0 | 0 | 0 | 293.380.000 | 289.908.000 | 0 | 0 | 0 | 289.908.000 | (3.472.000) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 09 | | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | 131.542.000 | 0 | 0 | 0 | 131.542.000 | 128.070.000 | 0 | 0 | 0 | 128.070.000 | (3.472.000) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 11 | | | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 161.838.000 | 0 | 0 | 0 | 161.838.000 | 161.838.000 | 0 | 0 | 0 | 161.838.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 863.494.700 | 0 | 0 | 0 | 863.494.700 | 862.778.700 | 0 | 0 | 0 | 862.778.700 | (716.000) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 02 | | | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 60.359.000 | 0 | 0 | 0 | 60.359.000 | 60.359.000 | 0 | 0 | 0 | 60.359.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 03 | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 2.818.100 | 0 | 0 | 0 | 2.818.100 | 2.818.100 | 0 | 0 | 0 | 2.818.100 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 04 | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 472.923.600 | 0 | 0 | 0 | 472.923.600 | 397.807.600 | 0 | 0 | 0 | 397.807.600 | (75.116.000) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 05 | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 35.680.000 | 0 | 0 | 0 | 35.680.000 | 35.680.000 | 0 | 0 | 0 | 35.680.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 06 | | | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 555.000 | 0 | 0 | 0 | 555.000 | 555.000 | 0 | 0 | 0 | 555.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 07 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 113.660.000 | 0 | 0 | 0 | 113.660.000 | 111.650.000 | 0 | 0 | 0 | 111.650.000 | (2.010.000) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 08 | | | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2.765.000 | 0 | 0 | 0 | 2.765.000 | 2.765.000 | 0 | 0 | 0 | 2.765.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 09 | | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 83.821.000 | 0 | 0 | 0 | 83.821.000 | 119.824.000 | 0 | 0 | 0 | 119.824.000 | 36.003.000 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 10 | | | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 90.913.000 | 0 | 0 | 0 | 90.913.000 | 131.320.000 | 0 | 0 | 0 | 131.320.000 | 40.407.000 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 106.128.139.790 | 107.128.139.790 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 107.866.959.219 | 108.866.959.219 | 1.738.819.429 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 09 | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 10 | | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 106.128.139.790 | 106.128.139.790 | 0 | 0 | 0 | 107.866.959.219 | 107.866.959.219 | 1.738.819.429 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 742.880.000 | 106.500.000 | 0 | 0 | 849.380.000 | 804.426.000 | 36.500.000 | 0 | 0 | 840.926.000 | (8.454.000) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.05 | 02 | | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 742.880.000 | 106.500.000 | 0 | 0 | 849.380.000 | 804.426.000 | 36.500.000 | 0 | 0 | 840.926.000 | (8.454.000) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 1.361.506.000 | 0 | 0 | 0 | 1.361.506.000 | 1.584.668.000 | 0 | 0 | 0 | 1.584.668.000 | 223.162.000 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1.361.506.000 | 0 | 0 | 0 | 1.361.506.000 | 1.584.668.000 | 0 | 0 | 0 | 1.584.668.000 | 223.162.000 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Standar Harga | 597.339.000 | 0 | 0 | 0 | 597.339.000 | 533.210.000 | 0 | 0 | 0 | 533.210.000 | (64.129.000) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 09 | | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 764.167.000 | 0 | 0 | 0 | 764.167.000 | 1.051.458.000 | 0 | 0 | 0 | 1.051.458.000 | 287.291.000 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 945.905.850 | 100.000.000 | 0 | 0 | 1.045.905.850 | 843.977.950 | 108.880.000 | 0 | 0 | 952.857.950 | (93.047.900) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | | | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | 945.905.850 | 100.000.000 | 0 | 0 | 1.045.905.850 | 843.977.950 | 108.880.000 | 0 | 0 | 952.857.950 | (93.047.900) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 02 | | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | 264.168.900 | 0 | 0 | 0 | 264.168.900 | 264.168.500 | 0 | 0 | 0 | 264.168.500 | (400) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 03 | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 123.506.000 | 0 | 0 | 0 | 123.506.000 | 194.626.000 | 8.880.000 | 0 | 0 | 203.506.000 | 80.000.000 |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 04 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 152.425.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 252.425.000 | 86.335.000 | 100.000.000 | 0 | 0 | 186.335.000 | (66.090.000) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 10 | | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 218.375.950 | 0 | 0 | 0 | 218.375.950 | 213.676.450 | 0 | 0 | 0 | 213.676.450 | (4.699.500) |
| 5 | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 04 | 2.01 | 13 | | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 187.430.000 | 0 | 0 | 0 | 187.430.000 | 85.172.000 | 0 | 0 | 0 | 85.172.000 | (102.258.000) |
| **5** | **03** | | | | | | **KEPEGAWAIAN** | **7.800.650.377** | **21.200.000** | **0** | **0** | **7.821.850.377** | **6.422.806.002** | **0** | **0** | **0** | **6.422.806.002** | **(1.399.044.375)** |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 7.800.650.377 | 21.200.000 | 0 | 0 | 7.821.850.377 | 6.422.806.002 | 0 | 0 | 0 | 6.422.806.002 | (1.399.044.375) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.213.077.092 | 0 | 0 | 0 | 6.213.077.092 | 5.166.225.156 | 0 | 0 | 0 | 5.166.225.156 | (1.046.851.936) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.037.077.501 | 0 | 0 | 0 | 5.037.077.501 | 4.163.825.208 | 0 | 0 | 0 | 4.163.825.208 | (873.252.293) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.870.638.101 | 0 | 0 | 0 | 4.870.638.101 | 4.018.265.208 | 0 | 0 | 0 | 4.018.265.208 | (852.372.893) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 162.480.000 | 0 | 0 | 0 | 162.480.000 | 145.560.000 | 0 | 0 | 0 | 145.560.000 | (16.920.000) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.959.400 | 0 | 0 | 0 | 3.959.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3.959.400) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 146.415.000 | 0 | 0 | 0 | 146.415.000 | 124.090.000 | 0 | 0 | 0 | 124.090.000 | (22.325.000) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 72.415.000 | 0 | 0 | 0 | 72.415.000 | 69.190.000 | 0 | 0 | 0 | 69.190.000 | (3.225.000) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 74.000.000 | 0 | 0 | 0 | 74.000.000 | 54.900.000 | 0 | 0 | 0 | 54.900.000 | (19.100.000) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 349.697.600 | 0 | 0 | 0 | 349.697.600 | 228.999.600 | 0 | 0 | 0 | 228.999.600 | (120.698.000) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.654.000 | 0 | 0 | 0 | 4.654.000 | 3.745.000 | 0 | 0 | 0 | 3.745.000 | (909.000) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14.232.000 | 0 | 0 | 0 | 14.232.000 | 9.695.000 | 0 | 0 | 0 | 9.695.000 | (4.537.000) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 87.289.600 | 0 | 0 | 0 | 87.289.600 | 58.999.000 | 0 | 0 | 0 | 58.999.000 | (28.290.600) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.500.000 | 0 | 0 | 0 | 12.500.000 | 6.962.400 | 0 | 0 | 0 | 6.962.400 | (5.537.600) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.100.000 | 0 | 0 | 0 | 10.100.000 | 693.000 | 0 | 0 | 0 | 693.000 | (9.407.000) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 220.922.000 | 0 | 0 | 0 | 220.922.000 | 148.905.200 | 0 | 0 | 0 | 148.905.200 | (72.016.800) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 558.369.416 | 0 | 0 | 0 | 558.369.416 | 564.832.773 | 0 | 0 | 0 | 564.832.773 | 6.463.357 |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60.133.000 | 0 | 0 | 0 | 60.133.000 | 56.851.259 | 0 | 0 | 0 | 56.851.259 | (3.281.741) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.720.000 | 0 | 0 | 0 | 12.720.000 | 10.320.000 | 0 | 0 | 0 | 10.320.000 | (2.400.000) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 485.516.416 | 0 | 0 | 0 | 485.516.416 | 497.661.514 | 0 | 0 | 0 | 497.661.514 | 12.145.098 |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 121.517.575 | 0 | 0 | 0 | 121.517.575 | 84.477.575 | 0 | 0 | 0 | 84.477.575 | (37.040.000) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 02 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 31.837.575 | 0 | 0 | 0 | 31.837.575 | 20.781.575 | 0 | 0 | 0 | 20.781.575 | (11.056.000) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 32.650.000 | 0 | 0 | 0 | 32.650.000 | 12.050.000 | 0 | 0 | 0 | 12.050.000 | (20.600.000) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 57.030.000 | 0 | 0 | 0 | 57.030.000 | 51.646.000 | 0 | 0 | 0 | 51.646.000 | (5.384.000) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 1.587.573.285 | 21.200.000 | 0 | 0 | 1.608.773.285 | 1.256.580.846 | 0 | 0 | 0 | 1.256.580.846 | (352.192.439) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 616.107.285 | 21.200.000 | 0 | 0 | 637.307.285 | 385.799.500 | 0 | 0 | 0 | 385.799.500 | (251.507.785) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 237.049.585 | 11.950.000 | 0 | 0 | 248.999.585 | 143.795.600 | 0 | 0 | 0 | 143.795.600 | (105.203.985) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 08 | | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 299.999.800 | 0 | 0 | 0 | 299.999.800 | 199.885.000 | 0 | 0 | 0 | 199.885.000 | (100.114.800) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 10 | | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 79.057.900 | 9.250.000 | 0 | 0 | 88.307.900 | 42.118.900 | 0 | 0 | 0 | 42.118.900 | (46.189.000) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | | | Mutasi dan Promosi ASN | 435.636.000 | 0 | 0 | 0 | 435.636.000 | 505.615.800 | 0 | 0 | 0 | 505.615.800 | 69.979.800 |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | Pengelolaan Mutasi ASN | 344.660.000 | 0 | 0 | 0 | 344.660.000 | 463.222.000 | 0 | 0 | 0 | 463.222.000 | 118.562.000 |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 90.976.000 | 0 | 0 | 0 | 90.976.000 | 42.393.800 | 0 | 0 | 0 | 42.393.800 | (48.582.200) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | | | Pengembangan Kompetensi ASN | 436.984.000 | 0 | 0 | 0 | 436.984.000 | 268.353.546 | 0 | 0 | 0 | 268.353.546 | (168.630.454) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 04 | | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 436.984.000 | 0 | 0 | 0 | 436.984.000 | 268.353.546 | 0 | 0 | 0 | 268.353.546 | (168.630.454) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 98.846.000 | 0 | 0 | 0 | 98.846.000 | 96.812.000 | 0 | 0 | 0 | 96.812.000 | (2.034.000) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 02 | | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 44.946.000 | 0 | 0 | 0 | 44.946.000 | 14.912.000 | 0 | 0 | 0 | 14.912.000 | (30.034.000) |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.04 | 07 | | Pembinaan Disiplin ASN | 53.900.000 | 0 | 0 | 0 | 53.900.000 | 81.900.000 | 0 | 0 | 0 | 81.900.000 | 28.000.000 |
| **5** | **04** | | | | | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | **1.274.652.000** | **0** | **0** | **0** | **1.274.652.000** | **1.274.647.000** | **0** | **0** | **0** | **1.274.647.000** | **(5.000)** |
| 5 | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1.274.652.000 | 0 | 0 | 0 | 1.274.652.000 | 1.274.647.000 | 0 | 0 | 0 | 1.274.647.000 | (5.000) |
| 5 | 04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1.274.652.000 | 0 | 0 | 0 | 1.274.652.000 | 1.274.647.000 | 0 | 0 | 0 | 1.274.647.000 | (5.000) |
| 5 | 04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 1.274.652.000 | 0 | 0 | 0 | 1.274.652.000 | 1.274.647.000 | 0 | 0 | 0 | 1.274.647.000 | (5.000) |
| 5 | 04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 07 | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1.274.652.000 | 0 | 0 | 0 | 1.274.652.000 | 1.274.647.000 | 0 | 0 | 0 | 1.274.647.000 | (5.000) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| **5** | **05** | | | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **707.037.400** | **100.000.000** | **0** | **0** | **807.037.400** | **11.286.600** | **0** | **0** | **0** | **11.286.600** | **(795.750.800)** |
| 5 | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 707.037.400 | 100.000.000 | 0 | 0 | 807.037.400 | 11.286.600 | 0 | 0 | 0 | 11.286.600 | (795.750.800) |
| 5 | 05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 707.037.400 | 100.000.000 | 0 | 0 | 807.037.400 | 11.286.600 | 0 | 0 | 0 | 11.286.600 | (795.750.800) |
| 5 | 05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 707.037.400 | 100.000.000 | 0 | 0 | 807.037.400 | 11.286.600 | 0 | 0 | 0 | 11.286.600 | (795.750.800) |
| 5 | 05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 02 | 2.03 | 11 | | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 707.037.400 | 100.000.000 | 0 | 0 | 807.037.400 | 11.286.600 | 0 | 0 | 0 | 11.286.600 | (795.750.800) |
| **5** | **06** | | | | | | **PENGELOLAAN PERBATASAN** | **929.669.660** | **475.330.225** | **0** | **0** | **1.404.999.885** | **600.017.071** | **257.115.725** | **0** | **0** | **857.132.796** | **(547.867.089)** |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | | | | | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH | 929.669.660 | 475.330.225 | 0 | 0 | 1.404.999.885 | 600.017.071 | 257.115.725 | 0 | 0 | 857.132.796 | (547.867.089) |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 929.669.660 | 475.330.225 | 0 | 0 | 1.404.999.885 | 600.017.071 | 257.115.725 | 0 | 0 | 857.132.796 | (547.867.089) |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.048.000 | 0 | 0 | 0 | 9.048.000 | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 3.100.000 | (5.948.000) |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.275.000 | 0 | 0 | 0 | 1.275.000 | 775.000 | 0 | 0 | 0 | 775.000 | (500.000) |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 03 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.275.000 | 0 | 0 | 0 | 1.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.275.000) |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 04 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.875.000 | 0 | 0 | 0 | 1.875.000 | 775.000 | 0 | 0 | 0 | 775.000 | (1.100.000) |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1.875.000 | 0 | 0 | 0 | 1.875.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.875.000) |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 06 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.374.000 | 0 | 0 | 0 | 1.374.000 | 775.000 | 0 | 0 | 0 | 775.000 | (599.000) |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.374.000 | 0 | 0 | 0 | 1.374.000 | 775.000 | 0 | 0 | 0 | 775.000 | (599.000) |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 54.000.000 | 0 | 0 | 0 | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 | 0 | 0 | 54.000.000 | 0 |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 54.000.000 | 0 | 0 | 0 | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 | 0 | 0 | 54.000.000 | 0 |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 621.606.000 | 4.974.200 | 0 | 0 | 626.580.200 | 385.483.411 | 4.974.200 | 0 | 0 | 390.457.611 | (236.122.589) |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 39.164.000 | 0 | 0 | 0 | 39.164.000 | 16.085.000 | 0 | 0 | 0 | 16.085.000 | (23.079.000) |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 11.440.000 | 0 | 0 | 0 | 11.440.000 | 11.440.000 | 0 | 0 | 0 | 11.440.000 | 0 |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 14.054.000 | 4.974.200 | 0 | 0 | 19.028.200 | 24.054.000 | 4.974.200 | 0 | 0 | 29.028.200 | 10.000.000 |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 556.948.000 | 0 | 0 | 0 | 556.948.000 | 333.904.411 | 0 | 0 | 0 | 333.904.411 | (223.043.589) |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 209.265.500 | 470.356.025 | 0 | 0 | 679.621.525 | 121.683.500 | 252.141.525 | 0 | 0 | 373.825.025 | (305.796.500) |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 01 | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 748.000 | 115.005.000 | 0 | 0 | 115.753.000 | 748.000 | 115.005.000 | 0 | 0 | 115.753.000 | 0 |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 05 | | Pengadaan Mebel | 2.086.000 | 116.136.525 | 0 | 0 | 118.222.525 | 2.086.000 | 116.136.525 | 0 | 0 | 118.222.525 | 0 |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 06 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.496.000 | 239.214.500 | 0 | 0 | 240.710.500 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 | 21.000.000 | (219.710.500) |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 204.935.500 | 0 | 0 | 0 | 204.935.500 | 118.849.500 | 0 | 0 | 0 | 118.849.500 | (86.086.000) |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 35.750.160 | 0 | 0 | 0 | 35.750.160 | 35.750.160 | 0 | 0 | 0 | 35.750.160 | 0 |
| 5 | 06 | 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 35.750.160 | 0 | 0 | 0 | 35.750.160 | 35.750.160 | 0 | 0 | 0 | 35.750.160 | 0 |
| **6** | | | | | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | **12.563.659.281** | **0** | **0** | **0** | **12.563.659.281** | **11.615.350.300** | **0** | **0** | **0** | **11.615.350.300** | **(948.308.981)** |
| **6** | **01** | | | | | | **INSPEKTORAT DAERAH** | **12.563.659.281** | **0** | **0** | **0** | **12.563.659.281** | **11.615.350.300** | **0** | **0** | **0** | **11.615.350.300** | **(948.308.981)** |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | | | | | INSPEKTORAT DAERAH | 12.563.659.281 | 0 | 0 | 0 | 12.563.659.281 | 11.615.350.300 | 0 | 0 | 0 | 11.615.350.300 | (948.308.981) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.549.680.281 | 0 | 0 | 0 | 10.549.680.281 | 10.125.249.457 | 0 | 0 | 0 | 10.125.249.457 | (424.430.824) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 54.986.800 | 0 | 0 | 0 | 54.986.800 | 24.923.100 | 0 | 0 | 0 | 24.923.100 | (30.063.700) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 52.581.800 | 0 | 0 | 0 | 52.581.800 | 22.518.100 | 0 | 0 | 0 | 22.518.100 | (30.063.700) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.405.000 | 0 | 0 | 0 | 2.405.000 | 2.405.000 | 0 | 0 | 0 | 2.405.000 | 0 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.924.051.490 | 0 | 0 | 0 | 7.924.051.490 | 7.694.409.790 | 0 | 0 | 0 | 7.694.409.790 | (229.641.700) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.779.016.290 | 0 | 0 | 0 | 7.779.016.290 | 7.549.374.590 | 0 | 0 | 0 | 7.549.374.590 | (229.641.700) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 141.480.000 | 0 | 0 | 0 | 141.480.000 | 141.480.000 | 0 | 0 | 0 | 141.480.000 | 0 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.555.200 | 0 | 0 | 0 | 3.555.200 | 3.555.200 | 0 | 0 | 0 | 3.555.200 | 0 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000.000 | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000.000 | 0 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000.000 | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000.000 | 0 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 378.254.600 | 0 | 0 | 0 | 378.254.600 | 243.218.402 | 0 | 0 | 0 | 243.218.402 | (135.036.198) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 03 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 21.963.600 | 0 | 0 | 0 | 21.963.600 | 67.242.586 | 0 | 0 | 0 | 67.242.586 | 45.278.986 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 09 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 356.291.000 | 0 | 0 | 0 | 356.291.000 | 175.975.816 | 0 | 0 | 0 | 175.975.816 | (180.315.184) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 621.889.600 | 0 | 0 | 0 | 621.889.600 | 525.250.494 | 0 | 0 | 0 | 525.250.494 | (96.639.106) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.205.400 | 0 | 0 | 0 | 7.205.400 | 5.459.200 | 0 | 0 | 0 | 5.459.200 | (1.746.200) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 53.247.000 | 0 | 0 | 0 | 53.247.000 | 59.123.000 | 0 | 0 | 0 | 59.123.000 | 5.876.000 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.166.800 | 0 | 0 | 0 | 7.166.800 | 5.235.600 | 0 | 0 | 0 | 5.235.600 | (1.931.200) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 7.218.400 | 0 | 0 | 0 | 7.218.400 | 4.963.200 | 0 | 0 | 0 | 4.963.200 | (2.255.200) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.320.000 | 0 | 0 | 0 | 30.320.000 | 30.320.000 | 0 | 0 | 0 | 30.320.000 | 0 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 149.633.000 | 0 | 0 | 0 | 149.633.000 | 18.425.500 | 0 | 0 | 0 | 18.425.500 | (131.207.500) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 367.099.000 | 0 | 0 | 0 | 367.099.000 | 401.723.994 | 0 | 0 | 0 | 401.723.994 | 34.624.994 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.111.899.686 | 0 | 0 | 0 | 1.111.899.686 | 1.187.183.122 | 0 | 0 | 0 | 1.187.183.122 | 75.283.436 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.808.000 | 0 | 0 | 0 | 4.808.000 | 1.032.000 | 0 | 0 | 0 | 1.032.000 | (3.776.000) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 36.550.910 | 0 | 0 | 0 | 36.550.910 | 36.550.910 | 0 | 0 | 0 | 36.550.910 | 0 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 03 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.050.000 | 0 | 0 | 0 | 5.050.000 | 3.889.000 | 0 | 0 | 0 | 3.889.000 | (1.161.000) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.065.490.776 | 0 | 0 | 0 | 1.065.490.776 | 1.145.711.212 | 0 | 0 | 0 | 1.145.711.212 | 80.220.436 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 410.598.105 | 0 | 0 | 0 | 410.598.105 | 402.264.549 | 0 | 0 | 0 | 402.264.549 | (8.333.556) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | 9.820.105 | 0 | 0 | 0 | 9.820.105 | 8.698.605 | 0 | 0 | 0 | 8.698.605 | (1.121.500) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| | | | | | | | Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 33.180.000 | 0 | 0 | 0 | 33.180.000 | 53.841.226 | 0 | 0 | 0 | 53.841.226 | 20.661.226 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 317.625.000 | 0 | 0 | 0 | 317.625.000 | 317.243.000 | 0 | 0 | 0 | 317.243.000 | (382.000) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 11 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49.973.000 | 0 | 0 | 0 | 49.973.000 | 22.481.718 | 0 | 0 | 0 | 22.481.718 | (27.491.282) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 1.264.546.300 | 0 | 0 | 0 | 1.264.546.300 | 848.605.112 | 0 | 0 | 0 | 848.605.112 | (415.941.188) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1.144.499.300 | 0 | 0 | 0 | 1.144.499.300 | 789.591.712 | 0 | 0 | 0 | 789.591.712 | (354.907.588) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 01 | | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 57.115.400 | 0 | 0 | 0 | 57.115.400 | 19.577.500 | 0 | 0 | 0 | 19.577.500 | (37.537.900) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 02 | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 132.367.000 | 0 | 0 | 0 | 132.367.000 | 72.272.230 | 0 | 0 | 0 | 72.272.230 | (60.094.770) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 03 | | Reviu Laporan Kinerja | 101.110.400 | 0 | 0 | 0 | 101.110.400 | 17.014.345 | 0 | 0 | 0 | 17.014.345 | (84.096.055) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 04 | | Reviu Laporan Keuangan | 168.520.400 | 0 | 0 | 0 | 168.520.400 | 132.546.237 | 0 | 0 | 0 | 132.546.237 | (35.974.163) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 05 | | Pengawasan Desa | 201.614.500 | 0 | 0 | 0 | 201.614.500 | 82.630.900 | 0 | 0 | 0 | 82.630.900 | (118.983.600) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 06 | | Kerjasama Pengawasan Internal | 375.145.600 | 0 | 0 | 0 | 375.145.600 | 375.145.600 | 0 | 0 | 0 | 375.145.600 | 0 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.01 | 07 | | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 108.626.000 | 0 | 0 | 0 | 108.626.000 | 90.404.900 | 0 | 0 | 0 | 90.404.900 | (18.221.100) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 120.047.000 | 0 | 0 | 0 | 120.047.000 | 59.013.400 | 0 | 0 | 0 | 59.013.400 | (61.033.600) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 01 | | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 25.816.000 | 0 | 0 | 0 | 25.816.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25.816.000) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 02 | 2.02 | 02 | | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 94.231.000 | 0 | 0 | 0 | 94.231.000 | 59.013.400 | 0 | 0 | 0 | 59.013.400 | (35.217.600) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 749.432.700 | 0 | 0 | 0 | 749.432.700 | 641.495.731 | 0 | 0 | 0 | 641.495.731 | (107.936.969) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 29.569.000 | 0 | 0 | 0 | 29.569.000 | 10.421.500 | 0 | 0 | 0 | 10.421.500 | (19.147.500) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 01 | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 29.569.000 | 0 | 0 | 0 | 29.569.000 | 10.421.500 | 0 | 0 | 0 | 10.421.500 | (19.147.500) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | | | Pendampingan dan Asistensi | 719.863.700 | 0 | 0 | 0 | 719.863.700 | 631.074.231 | 0 | 0 | 0 | 631.074.231 | (88.789.469) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 01 | | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 121.905.600 | 0 | 0 | 0 | 121.905.600 | 42.164.151 | 0 | 0 | 0 | 42.164.151 | (79.741.449) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 02 | | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 46.507.200 | 0 | 0 | 0 | 46.507.200 | 23.632.304 | 0 | 0 | 0 | 23.632.304 | (22.874.896) |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 03 | | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 501.450.900 | 0 | 0 | 0 | 501.450.900 | 501.450.900 | 0 | 0 | 0 | 501.450.900 | 0 |
| 6 | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.02 | 04 | | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | 63.826.876 | 0 | 0 | 0 | 63.826.876 | 13.826.876 |
| **7** | | | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | **36.872.000.538** | **55.000.000** | **0** | **0** | **36.927.000.538** | **36.106.658.498** | **572.631.600** | **0** | **0** | **36.679.290.098** | **(247.710.440)** |
| **7** | **01** | | | | | | **KECAMATAN** | **36.872.000.538** | **55.000.000** | **0** | **0** | **36.927.000.538** | **36.106.658.498** | **572.631.600** | **0** | **0** | **36.679.290.098** | **(247.710.440)** |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | | | | | KECAMATAN SIANTAN | 4.294.654.995 | 0 | 0 | 0 | 4.294.654.995 | 4.303.346.512 | 0 | 0 | 0 | 4.303.346.512 | 8.691.517 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.034.141.095 | 0 | 0 | 0 | 4.034.141.095 | 3.723.855.612 | 0 | 0 | 0 | 3.723.855.612 | (310.285.483) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.895.600 | 0 | 0 | 0 | 7.895.600 | 2.795.600 | 0 | 0 | 0 | 2.795.600 | (5.100.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.630.600 | 0 | 0 | 0 | 4.630.600 | 1.990.600 | 0 | 0 | 0 | 1.990.600 | (2.640.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.265.000 | 0 | 0 | 0 | 3.265.000 | 805.000 | 0 | 0 | 0 | 805.000 | (2.460.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.924.350.303 | 0 | 0 | 0 | 2.924.350.303 | 2.677.230.426 | 0 | 0 | 0 | 2.677.230.426 | (247.119.877) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.737.451.303 | 0 | 0 | 0 | 2.737.451.303 | 2.495.790.426 | 0 | 0 | 0 | 2.495.790.426 | (241.660.877) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 183.840.000 | 0 | 0 | 0 | 183.840.000 | 181.440.000 | 0 | 0 | 0 | 181.440.000 | (2.400.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.059.000 | 0 | 0 | 0 | 3.059.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3.059.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 31.314.200 | 0 | 0 | 0 | 31.314.200 | 31.269.005 | 0 | 0 | 0 | 31.269.005 | (45.195) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 05 | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3.114.200 | 0 | 0 | 0 | 3.114.200 | 3.069.005 | 0 | 0 | 0 | 3.069.005 | (45.195) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 28.200.000 | 0 | 0 | 0 | 28.200.000 | 28.200.000 | 0 | 0 | 0 | 28.200.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 3.721.000 | 0 | 0 | 0 | 3.721.000 | 3.216.000 | 0 | 0 | 0 | 3.216.000 | (505.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.05 | 03 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 3.721.000 | 0 | 0 | 0 | 3.721.000 | 3.216.000 | 0 | 0 | 0 | 3.216.000 | (505.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 119.971.000 | 0 | 0 | 0 | 119.971.000 | 99.436.700 | 0 | 0 | 0 | 99.436.700 | (20.534.300) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.933.000 | 0 | 0 | 0 | 4.933.000 | 4.933.000 | 0 | 0 | 0 | 4.933.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 11.230.000 | 0 | 0 | 0 | 11.230.000 | 10.030.000 | 0 | 0 | 0 | 10.030.000 | (1.200.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 13.700.800 | 0 | 0 | 0 | 13.700.800 | (4.299.200) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000.000 | 12.950.000 | 0 | 0 | 0 | 12.950.000 | (50.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 06 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.400.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 23.745.000 | 0 | 0 | 0 | 23.745.000 | 14.745.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 61.408.000 | 0 | 0 | 0 | 61.408.000 | 34.077.900 | 0 | 0 | 0 | 34.077.900 | (27.330.100) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 902.608.992 | 0 | 0 | 0 | 902.608.992 | 870.967.981 | 0 | 0 | 0 | 870.967.981 | (31.641.011) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 35.867.400 | 0 | 0 | 0 | 35.867.400 | 27.334.200 | 0 | 0 | 0 | 27.334.200 | (8.533.200) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 37.860.000 | 0 | 0 | 0 | 37.860.000 | 23.422.000 | 0 | 0 | 0 | 23.422.000 | (14.438.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 828.881.592 | 0 | 0 | 0 | 828.881.592 | 820.211.781 | 0 | 0 | 0 | 820.211.781 | (8.669.811) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 44.280.000 | 0 | 0 | 0 | 44.280.000 | 38.939.900 | 0 | 0 | 0 | 38.939.900 | (5.340.100) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 7.700.000 | 0 | 0 | 0 | 7.700.000 | 5.396.500 | 0 | 0 | 0 | 5.396.500 | (2.303.500) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12.180.000 | 0 | 0 | 0 | 12.180.000 | 9.345.400 | 0 | 0 | 0 | 9.345.400 | (2.834.600) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 01 | 2.09 | 09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 24.400.000 | 0 | 0 | 0 | 24.400.000 | 24.198.000 | 0 | 0 | 0 | 24.198.000 | (202.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 179.800.400 | 0 | 0 | 0 | 179.800.400 | 507.987.600 | 0 | 0 | 0 | 507.987.600 | 328.187.200 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 179.800.400 | 0 | 0 | 0 | 179.800.400 | 377.087.600 | 0 | 0 | 0 | 377.087.600 | 197.287.200 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 179.800.400 | 0 | 0 | 0 | 179.800.400 | 377.087.600 | 0 | 0 | 0 | 377.087.600 | 197.287.200 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.900.000 | 0 | 0 | 0 | 130.900.000 | 130.900.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 03 | 2.03 | 03 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.900.000 | 0 | 0 | 0 | 130.900.000 | 130.900.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 05 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 28.545.000 | 0 | 0 | 0 | 28.545.000 | 28.545.000 | 0 | 0 | 0 | 28.545.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 28.545.000 | 0 | 0 | 0 | 28.545.000 | 28.545.000 | 0 | 0 | 0 | 28.545.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 05 | 2.01 | 08 | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 28.545.000 | 0 | 0 | 0 | 28.545.000 | 28.545.000 | 0 | 0 | 0 | 28.545.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 06 | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 52.168.500 | 0 | 0 | 0 | 52.168.500 | 42.958.300 | 0 | 0 | 0 | 42.958.300 | (9.210.200) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 52.168.500 | 0 | 0 | 0 | 52.168.500 | 42.958.300 | 0 | 0 | 0 | 42.958.300 | (9.210.200) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 11 | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 8.162.100 | 0 | 0 | 0 | 8.162.100 | 8.162.100 | 0 | 0 | 0 | 8.162.100 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 13 | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 10.788.200 | 0 | 0 | 0 | 10.788.200 | 10.766.200 | 0 | 0 | 0 | 10.766.200 | (22.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 06 | 2.01 | 17 | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 33.218.200 | 0 | 0 | 0 | 33.218.200 | 24.030.000 | 0 | 0 | 0 | 24.030.000 | (9.188.200) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | | | | | KELURAHAN TAREMPA | 933.703.300 | 0 | 0 | 0 | 933.703.300 | 1.108.701.821 | 0 | 0 | 0 | 1.108.701.821 | 174.998.521 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 126.034.850 | 0 | 0 | 0 | 126.034.850 | 192.396.011 | 0 | 0 | 0 | 192.396.011 | 66.361.161 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.287.500 | 0 | 0 | 0 | 73.287.500 | 73.287.500 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 01 | 2.05 | 02 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.287.500 | 0 | 0 | 0 | 73.287.500 | 73.287.500 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 63.080.000 | 0 | 0 | 0 | 63.080.000 | 60.966.500 | 0 | 0 | 0 | 60.966.500 | (2.113.500) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.592.000 | 0 | 0 | 0 | 3.592.000 | 3.592.000 | 0 | 0 | 0 | 3.592.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 4.939.500 | 0 | 0 | 0 | 4.939.500 | (60.500) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 14.530.000 | 0 | 0 | 0 | 14.530.000 | 14.510.000 | 0 | 0 | 0 | 14.510.000 | (20.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | (2.000.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 01 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8.250.000 | 0 | 0 | 0 | 8.250.000 | 8.217.000 | 0 | 0 | 0 | 8.217.000 | (33.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24.708.000 | 0 | 0 | 0 | 24.708.000 | 24.708.000 | 0 | 0 | 0 | 24.708.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 43.944.850 | 0 | 0 | 0 | 43.944.850 | 43.567.011 | 0 | 0 | 0 | 43.567.011 | (377.839) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 27.330.800 | 0 | 0 | 0 | 27.330.800 | 26.952.961 | 0 | 0 | 0 | 26.952.961 | (377.839) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 16.614.050 | 0 | 0 | 0 | 16.614.050 | 16.614.050 | 0 | 0 | 0 | 16.614.050 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 19.010.000 | 0 | 0 | 0 | 19.010.000 | 14.575.000 | 0 | 0 | 0 | 14.575.000 | (4.435.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4.390.000 | 0 | 0 | 0 | 4.390.000 | 4.390.000 | 0 | 0 | 0 | 4.390.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.520.000 | 0 | 0 | 0 | 5.520.000 | 1.220.000 | 0 | 0 | 0 | 1.220.000 | (4.300.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 01 | 2.09 | 09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 9.100.000 | 0 | 0 | 0 | 9.100.000 | 8.965.000 | 0 | 0 | 0 | 8.965.000 | (135.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 807.668.450 | 0 | 0 | 0 | 807.668.450 | 916.305.810 | 0 | 0 | 0 | 916.305.810 | 108.637.360 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 03 | 2.02 | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 742.331.300 | 0 | 0 | 0 | 742.331.300 | 851.204.900 | 0 | 0 | 0 | 851.204.900 | 108.873.600 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 03 | 2.02 | 01 | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 8.659.100 | 0 | 0 | 0 | 8.659.100 | 8.632.700 | 0 | 0 | 0 | 8.632.700 | (26.400) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 03 | 2.02 | 03 | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 733.672.200 | 0 | 0 | 0 | 733.672.200 | 842.572.200 | 0 | 0 | 0 | 842.572.200 | 108.900.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 03 | 2.05 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | 65.337.150 | 0 | 0 | 0 | 65.337.150 | 65.100.910 | 0 | 0 | 0 | 65.100.910 | (236.240) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.01 | 03 | 2.05 | 01 | | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 65.337.150 | 0 | 0 | 0 | 65.337.150 | 65.100.910 | 0 | 0 | 0 | 65.100.910 | (236.240) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | | | | | KECAMATAN JEMAJA | 5.296.011.988 | 0 | 0 | 0 | 5.296.011.988 | 5.060.296.758 | 0 | 0 | 0 | 5.060.296.758 | (235.715.230) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.188.782.588 | 0 | 0 | 0 | 5.188.782.588 | 4.952.257.358 | 0 | 0 | 0 | 4.952.257.358 | (236.525.230) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 31.049.300 | 0 | 0 | 0 | 31.049.300 | 19.392.900 | 0 | 0 | 0 | 19.392.900 | (11.656.400) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.526.200 | 0 | 0 | 0 | 9.526.200 | 9.526.200 | 0 | 0 | 0 | 9.526.200 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 9.397.200 | 0 | 0 | 0 | 9.397.200 | 4.187.200 | 0 | 0 | 0 | 4.187.200 | (5.210.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 03 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 8.046.500 | 0 | 0 | 0 | 8.046.500 | 3.046.500 | 0 | 0 | 0 | 3.046.500 | (5.000.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 04 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.050.200 | 0 | 0 | 0 | 2.050.200 | 1.475.000 | 0 | 0 | 0 | 1.475.000 | (575.200) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.029.200 | 0 | 0 | 0 | 2.029.200 | 1.158.000 | 0 | 0 | 0 | 1.158.000 | (871.200) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.830.055.351 | 0 | 0 | 0 | 3.830.055.351 | 3.518.318.691 | 0 | 0 | 0 | 3.518.318.691 | (311.736.660) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.644.139.851 | 0 | 0 | 0 | 3.644.139.851 | 3.342.123.191 | 0 | 0 | 0 | 3.342.123.191 | (302.016.660) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 179.280.000 | 0 | 0 | 0 | 179.280.000 | 169.560.000 | 0 | 0 | 0 | 169.560.000 | (9.720.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6.635.500 | 0 | 0 | 0 | 6.635.500 | 6.635.500 | 0 | 0 | 0 | 6.635.500 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.047.225 | 0 | 0 | 0 | 19.047.225 | 19.047.225 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.05 | 02 | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.047.225 | 0 | 0 | 0 | 19.047.225 | 19.047.225 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 239.321.900 | 0 | 0 | 0 | 239.321.900 | 311.047.160 | 0 | 0 | 0 | 311.047.160 | 71.725.260 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.499.000 | 0 | 0 | 0 | 4.499.000 | 4.090.000 | 0 | 0 | 0 | 4.090.000 | (409.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.739.300 | 0 | 0 | 0 | 10.739.300 | 15.103.260 | 0 | 0 | 0 | 15.103.260 | 4.363.960 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 44.175.600 | 0 | 0 | 0 | 44.175.600 | 46.672.500 | 0 | 0 | 0 | 46.672.500 | 2.496.900 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000.000 | 17.814.000 | 0 | 0 | 0 | 17.814.000 | 4.814.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 25.750.000 | 0 | 0 | 0 | 25.750.000 | 44.450.000 | 0 | 0 | 0 | 44.450.000 | 18.700.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 141.158.000 | 0 | 0 | 0 | 141.158.000 | 182.917.400 | 0 | 0 | 0 | 182.917.400 | 41.759.400 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.064.121.037 | 0 | 0 | 0 | 1.064.121.037 | 1.054.991.382 | 0 | 0 | 0 | 1.054.991.382 | (9.129.655) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 53.524.820 | 0 | 0 | 0 | 53.524.820 | 58.381.633 | 0 | 0 | 0 | 58.381.633 | 4.856.813 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.189.529 | 0 | 0 | 0 | 24.189.529 | 31.883.173 | 0 | 0 | 0 | 31.883.173 | 7.693.644 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 986.406.688 | 0 | 0 | 0 | 986.406.688 | 964.726.576 | 0 | 0 | 0 | 964.726.576 | (21.680.112) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 24.235.000 | 0 | 0 | 0 | 24.235.000 | 29.460.000 | 0 | 0 | 0 | 29.460.000 | 5.225.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 11.525.000 | 0 | 0 | 0 | 11.525.000 | 10.750.000 | 0 | 0 | 0 | 10.750.000 | (775.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12.710.000 | 0 | 0 | 0 | 12.710.000 | 18.710.000 | 0 | 0 | 0 | 18.710.000 | 6.000.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 51.540.000 | 0 | 0 | 0 | 51.540.000 | 56.715.000 | 0 | 0 | 0 | 56.715.000 | 5.175.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 03 | 2.01 | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 51.540.000 | 0 | 0 | 0 | 51.540.000 | 56.715.000 | 0 | 0 | 0 | 56.715.000 | 5.175.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 51.540.000 | 0 | 0 | 0 | 51.540.000 | 56.715.000 | 0 | 0 | 0 | 56.715.000 | 5.175.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 05 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 37.050.000 | 0 | 0 | 0 | 37.050.000 | 40.585.000 | 0 | 0 | 0 | 40.585.000 | 3.535.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 37.050.000 | 0 | 0 | 0 | 37.050.000 | 40.585.000 | 0 | 0 | 0 | 40.585.000 | 3.535.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | 03 | | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 37.050.000 | 0 | 0 | 0 | 37.050.000 | 37.035.000 | 0 | 0 | 0 | 37.035.000 | (15.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | 08 | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.550.000 | 0 | 0 | 0 | 3.550.000 | 3.550.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 06 | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 18.639.400 | 0 | 0 | 0 | 18.639.400 | 10.739.400 | 0 | 0 | 0 | 10.739.400 | (7.900.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 18.639.400 | 0 | 0 | 0 | 18.639.400 | 10.739.400 | 0 | 0 | 0 | 10.739.400 | (7.900.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 13 | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 10.739.400 | 0 | 0 | 0 | 10.739.400 | 8.639.400 | 0 | 0 | 0 | 8.639.400 | (2.100.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 17 | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 7.900.000 | 0 | 0 | 0 | 7.900.000 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | (5.800.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | | | | | KELURAHAN LETUNG | 663.813.371 | 0 | 0 | 0 | 663.813.371 | 668.536.152 | 0 | 0 | 0 | 668.536.152 | 4.722.781 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 122.372.771 | 0 | 0 | 0 | 122.372.771 | 102.203.670 | 0 | 0 | 0 | 102.203.670 | (20.169.101) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 85.779.800 | 0 | 0 | 0 | 85.779.800 | 66.069.660 | 0 | 0 | 0 | 66.069.660 | (19.710.140) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.890.000 | 0 | 0 | 0 | 2.890.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | (1.690.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 8.089.400 | 0 | 0 | 0 | 8.089.400 | 6.000.260 | 0 | 0 | 0 | 6.000.260 | (2.089.140) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 9.765.400 | 0 | 0 | 0 | 9.765.400 | 7.765.400 | 0 | 0 | 0 | 7.765.400 | (2.000.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | (2.500.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 01 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15.135.000 | 0 | 0 | 0 | 15.135.000 | 6.860.000 | 0 | 0 | 0 | 6.860.000 | (8.275.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 43.400.000 | 0 | 0 | 0 | 43.400.000 | 40.244.000 | 0 | 0 | 0 | 40.244.000 | (3.156.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 29.565.171 | 0 | 0 | 0 | 29.565.171 | 33.614.009 | 0 | 0 | 0 | 33.614.009 | 4.048.838 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 21.866.350 | 0 | 0 | 0 | 21.866.350 | 25.915.188 | 0 | 0 | 0 | 25.915.188 | 4.048.838 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 7.698.821 | 0 | 0 | 0 | 7.698.821 | 7.698.821 | 0 | 0 | 0 | 7.698.821 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.027.800 | 0 | 0 | 0 | 7.027.800 | 2.520.001 | 0 | 0 | 0 | 2.520.001 | (4.507.799) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.420.000 | 0 | 0 | 0 | 1.420.000 | 1.420.000 | 0 | 0 | 0 | 1.420.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 01 | 2.09 | 09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4.507.800 | 0 | 0 | 0 | 4.507.800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (4.507.799) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 541.440.600 | 0 | 0 | 0 | 541.440.600 | 566.332.482 | 0 | 0 | 0 | 566.332.482 | 24.891.882 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 03 | 2.02 | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 470.640.150 | 0 | 0 | 0 | 470.640.150 | 495.569.900 | 0 | 0 | 0 | 495.569.900 | 24.929.750 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 03 | 2.02 | 01 | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5.240.150 | 0 | 0 | 0 | 5.240.150 | 1.890.000 | 0 | 0 | 0 | 1.890.000 | (3.350.150) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 03 | 2.02 | 03 | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 465.400.000 | 0 | 0 | 0 | 465.400.000 | 493.679.900 | 0 | 0 | 0 | 493.679.900 | 28.279.900 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 03 | 2.05 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | 70.800.450 | 0 | 0 | 0 | 70.800.450 | 70.762.582 | 0 | 0 | 0 | 70.762.582 | (37.868) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.01 | 03 | 2.05 | 01 | | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 70.800.450 | 0 | 0 | 0 | 70.800.450 | 70.762.582 | 0 | 0 | 0 | 70.762.582 | (37.868) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | | | | | KECAMATAN PALMATAK | 4.710.567.529 | 0 | 0 | 0 | 4.710.567.529 | 4.818.081.369 | 0 | 0 | 0 | 4.818.081.369 | 107.513.840 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.464.055.529 | 0 | 0 | 0 | 4.464.055.529 | 4.410.245.789 | 0 | 0 | 0 | 4.410.245.789 | (53.809.740) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.921.952.905 | 0 | 0 | 0 | 2.921.952.905 | 2.779.861.693 | 0 | 0 | 0 | 2.779.861.693 | (142.091.212) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.848.272.905 | 0 | 0 | 0 | 2.848.272.905 | 2.706.181.693 | 0 | 0 | 0 | 2.706.181.693 | (142.091.212) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 73.680.000 | 0 | 0 | 0 | 73.680.000 | 73.680.000 | 0 | 0 | 0 | 73.680.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 25.200.000 | 0 | 0 | 0 | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 | 0 | 0 | 25.200.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25.200.000 | 0 | 0 | 0 | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 | 0 | 0 | 25.200.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 156.972.000 | 0 | 0 | 0 | 156.972.000 | 211.771.500 | 0 | 0 | 0 | 211.771.500 | 54.799.500 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.179.000 | 0 | 0 | 0 | 4.179.000 | 4.177.500 | 0 | 0 | 0 | 4.177.500 | (1.500) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 24.110.000 | 0 | 0 | 0 | 24.110.000 | 30.970.000 | 0 | 0 | 0 | 30.970.000 | 6.860.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.863.000 | 0 | 0 | 0 | 1.863.000 | 1.860.000 | 0 | 0 | 0 | 1.860.000 | (3.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50.500.000 | 0 | 0 | 0 | 50.500.000 | 60.009.000 | 0 | 0 | 0 | 60.009.000 | 9.509.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 76.320.000 | 0 | 0 | 0 | 76.320.000 | 114.755.000 | 0 | 0 | 0 | 114.755.000 | 38.435.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.359.930.624 | 0 | 0 | 0 | 1.359.930.624 | 1.393.412.596 | 0 | 0 | 0 | 1.393.412.596 | 33.481.972 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 63.216.000 | 0 | 0 | 0 | 63.216.000 | 73.000.460 | 0 | 0 | 0 | 73.000.460 | 9.784.460 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 33.300.000 | 0 | 0 | 0 | 33.300.000 | 33.300.000 | 0 | 0 | 0 | 33.300.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.263.414.624 | 0 | 0 | 0 | 1.263.414.624 | 1.287.112.136 | 0 | 0 | 0 | 1.287.112.136 | 23.697.512 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 167.087.000 | 0 | 0 | 0 | 167.087.000 | 318.649.380 | 0 | 0 | 0 | 318.649.380 | 151.562.380 |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 03 | 2.01 | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 167.087.000 | 0 | 0 | 0 | 167.087.000 | 166.948.380 | 0 | 0 | 0 | 166.948.380 | (138.620) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 167.087.000 | 0 | 0 | 0 | 167.087.000 | 166.948.380 | 0 | 0 | 0 | 166.948.380 | (138.620) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 03 | 2.03 | | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.701.000 | 0 | 0 | 0 | 151.701.000 | 151.701.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 03 | 2.03 | 03 | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.701.000 | 0 | 0 | 0 | 151.701.000 | 151.701.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 05 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 68.250.000 | 0 | 0 | 0 | 68.250.000 | 78.011.200 | 0 | 0 | 0 | 78.011.200 | 9.761.200 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 05 | 2.01 | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 68.250.000 | 0 | 0 | 0 | 68.250.000 | 78.011.200 | 0 | 0 | 0 | 78.011.200 | 9.761.200 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 05 | 2.01 | 03 | | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 68.250.000 | 0 | 0 | 0 | 68.250.000 | 78.011.200 | 0 | 0 | 0 | 78.011.200 | 9.761.200 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 06 | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 11.175.000 | 0 | 0 | 0 | 11.175.000 | 11.175.000 | 0 | 0 | 0 | 11.175.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 06 | 2.01 | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 11.175.000 | 0 | 0 | 0 | 11.175.000 | 11.175.000 | 0 | 0 | 0 | 11.175.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 06 | 2.01 | 13 | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 11.175.000 | 0 | 0 | 0 | 11.175.000 | 11.175.000 | 0 | 0 | 0 | 11.175.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | | | | | KECAMATAN SIANTAN TIMUR | 2.919.405.586 | 0 | 0 | 0 | 2.919.405.586 | 2.977.690.597 | 0 | 0 | 0 | 2.977.690.597 | 58.285.011 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.765.517.586 | 0 | 0 | 0 | 2.765.517.586 | 2.513.315.597 | 0 | 0 | 0 | 2.513.315.597 | (252.201.989) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.150.000 | 0 | 0 | 0 | 6.150.000 | 4.648.500 | 0 | 0 | 0 | 4.648.500 | (1.501.500) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 2.550.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | (1.500.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | 3.598.500 | 0 | 0 | 0 | 3.598.500 | (1.500) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.717.446.472 | 0 | 0 | 0 | 1.717.446.472 | 1.439.645.983 | 0 | 0 | 0 | 1.439.645.983 | (277.800.489) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.626.466.472 | 0 | 0 | 0 | 1.626.466.472 | 1.349.645.983 | 0 | 0 | 0 | 1.349.645.983 | (276.820.489) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 87.000.000 | 0 | 0 | 0 | 87.000.000 | 87.000.000 | 0 | 0 | 0 | 87.000.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.980.000 | 0 | 0 | 0 | 3.980.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | (980.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 18.600.000 | 0 | 0 | 0 | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 | 0 | 0 | 18.600.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 18.600.000 | 0 | 0 | 0 | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 | 0 | 0 | 18.600.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 270.709.000 | 0 | 0 | 0 | 270.709.000 | 267.609.000 | 0 | 0 | 0 | 267.609.000 | (3.100.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.588.000 | 0 | 0 | 0 | 2.588.000 | 1.088.000 | 0 | 0 | 0 | 1.088.000 | (1.500.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.074.000 | 0 | 0 | 0 | 4.074.000 | 4.074.000 | 0 | 0 | 0 | 4.074.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 126.315.000 | 0 | 0 | 0 | 126.315.000 | 125.565.000 | 0 | 0 | 0 | 125.565.000 | (750.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.032.000 | 0 | 0 | 0 | 13.032.000 | 12.832.000 | 0 | 0 | 0 | 12.832.000 | (200.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 08 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 71.795.000 | 0 | 0 | 0 | 71.795.000 | 71.645.000 | 0 | 0 | 0 | 71.645.000 | (150.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 52.905.000 | 0 | 0 | 0 | 52.905.000 | 52.405.000 | 0 | 0 | 0 | 52.405.000 | (500.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 744.652.099 | 0 | 0 | 0 | 744.652.099 | 775.152.099 | 0 | 0 | 0 | 775.152.099 | 30.500.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 59.935.000 | 0 | 0 | 0 | 59.935.000 | 58.435.000 | 0 | 0 | 0 | 58.435.000 | (1.500.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15.077.971 | 0 | 0 | 0 | 15.077.971 | 15.077.971 | 0 | 0 | 0 | 15.077.971 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 669.639.128 | 0 | 0 | 0 | 669.639.128 | 701.639.128 | 0 | 0 | 0 | 701.639.128 | 32.000.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.960.015 | 0 | 0 | 0 | 7.960.015 | 7.660.015 | 0 | 0 | 0 | 7.660.015 | (300.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 7.960.015 | 0 | 0 | 0 | 7.960.015 | 7.660.015 | 0 | 0 | 0 | 7.660.015 | (300.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 68.008.000 | 0 | 0 | 0 | 68.008.000 | 382.245.000 | 0 | 0 | 0 | 382.245.000 | 314.237.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.01 | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 68.008.000 | 0 | 0 | 0 | 68.008.000 | 382.245.000 | 0 | 0 | 0 | 382.245.000 | 314.237.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 68.008.000 | 0 | 0 | 0 | 68.008.000 | 382.245.000 | 0 | 0 | 0 | 382.245.000 | 314.237.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 05 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 55.968.000 | 0 | 0 | 0 | 55.968.000 | 55.968.000 | 0 | 0 | 0 | 55.968.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 05 | 2.01 | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 55.968.000 | 0 | 0 | 0 | 55.968.000 | 55.968.000 | 0 | 0 | 0 | 55.968.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 05 | 2.01 | 03 | | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 55.968.000 | 0 | 0 | 0 | 55.968.000 | 55.968.000 | 0 | 0 | 0 | 55.968.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 06 | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 29.912.000 | 0 | 0 | 0 | 29.912.000 | 26.162.000 | 0 | 0 | 0 | 26.162.000 | (3.750.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 06 | 2.01 | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 29.912.000 | 0 | 0 | 0 | 29.912.000 | 26.162.000 | 0 | 0 | 0 | 26.162.000 | (3.750.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 06 | 2.01 | 13 | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 12.662.000 | 0 | 0 | 0 | 12.662.000 | 8.912.000 | 0 | 0 | 0 | 8.912.000 | (3.750.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 06 | 2.01 | 17 | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 17.250.000 | 0 | 0 | 0 | 17.250.000 | 17.250.000 | 0 | 0 | 0 | 17.250.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | | | | | KECAMATAN SIANTAN SELATAN | 2.810.313.329 | 0 | 0 | 0 | 2.810.313.329 | 2.584.732.476 | 0 | 0 | 0 | 2.584.732.476 | (225.580.853) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.633.630.829 | 0 | 0 | 0 | 2.633.630.829 | 2.410.805.306 | 0 | 0 | 0 | 2.410.805.306 | (222.825.523) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.846.449.097 | 0 | 0 | 0 | 1.846.449.097 | 1.708.951.562 | 0 | 0 | 0 | 1.708.951.562 | (137.497.535) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.753.449.097 | 0 | 0 | 0 | 1.753.449.097 | 1.616.851.562 | 0 | 0 | 0 | 1.616.851.562 | (136.597.535) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 93.000.000 | 0 | 0 | 0 | 93.000.000 | 92.100.000 | 0 | 0 | 0 | 92.100.000 | (900.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.03 | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 25.200.000 | 0 | 0 | 0 | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 | 0 | 0 | 25.200.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.03 | 06 | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25.200.000 | 0 | 0 | 0 | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 | 0 | 0 | 25.200.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 29.464.000 | 0 | 0 | 0 | 29.464.000 | 9.301.400 | 0 | 0 | 0 | 9.301.400 | (20.162.600) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.05 | 09 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 29.464.000 | 0 | 0 | 0 | 29.464.000 | 9.301.400 | 0 | 0 | 0 | 9.301.400 | (20.162.600) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 150.698.000 | 0 | 0 | 0 | 150.698.000 | 129.350.600 | 0 | 0 | 0 | 129.350.600 | (21.347.400) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.861.000 | 0 | 0 | 0 | 8.861.000 | 7.267.000 | 0 | 0 | 0 | 7.267.000 | (1.594.000) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12.862.000 | 0 | 0 | 0 | 12.862.000 | 10.979.000 | 0 | 0 | 0 | 10.979.000 | (1.883.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 11.486.000 | 0 | 0 | 0 | 11.486.000 | 8.969.600 | 0 | 0 | 0 | 8.969.600 | (2.516.400) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 19.690.000 | 0 | 0 | 0 | 19.690.000 | (15.310.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 82.489.000 | 0 | 0 | 0 | 82.489.000 | 82.445.000 | 0 | 0 | 0 | 82.445.000 | (44.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 507.314.172 | 0 | 0 | 0 | 507.314.172 | 470.096.184 | 0 | 0 | 0 | 470.096.184 | (37.217.988) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 49.979.000 | 0 | 0 | 0 | 49.979.000 | 39.684.600 | 0 | 0 | 0 | 39.684.600 | (10.294.400) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9.030.820 | 0 | 0 | 0 | 9.030.820 | 9.030.820 | 0 | 0 | 0 | 9.030.820 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.660.000 | 0 | 0 | 0 | 9.660.000 | 3.290.000 | 0 | 0 | 0 | 3.290.000 | (6.370.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 438.644.352 | 0 | 0 | 0 | 438.644.352 | 418.090.764 | 0 | 0 | 0 | 418.090.764 | (20.553.588) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 74.505.560 | 0 | 0 | 0 | 74.505.560 | 67.905.560 | 0 | 0 | 0 | 67.905.560 | (6.600.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 63.585.560 | 0 | 0 | 0 | 63.585.560 | 56.985.560 | 0 | 0 | 0 | 56.985.560 | (6.600.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10.920.000 | 0 | 0 | 0 | 10.920.000 | 10.920.000 | 0 | 0 | 0 | 10.920.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 143.071.000 | 0 | 0 | 0 | 143.071.000 | 142.557.000 | 0 | 0 | 0 | 142.557.000 | (514.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 143.071.000 | 0 | 0 | 0 | 143.071.000 | 142.557.000 | 0 | 0 | 0 | 142.557.000 | (514.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 143.071.000 | 0 | 0 | 0 | 143.071.000 | 142.557.000 | 0 | 0 | 0 | 142.557.000 | (514.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 33.611.500 | 0 | 0 | 0 | 33.611.500 | 31.370.170 | 0 | 0 | 0 | 31.370.170 | (2.241.330) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 33.611.500 | 0 | 0 | 0 | 33.611.500 | 31.370.170 | 0 | 0 | 0 | 31.370.170 | (2.241.330) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 05 | 2.01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 11.811.500 | 0 | 0 | 0 | 11.811.500 | 11.770.170 | 0 | 0 | 0 | 11.770.170 | (41.330) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.800.000 | 0 | 0 | 0 | 21.800.000 | 19.600.000 | 0 | 0 | 0 | 19.600.000 | (2.200.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | | | | KECAMATAN JEMAJA TIMUR | 3.275.099.258 | 0 | 0 | 0 | 3.275.099.258 | 3.032.377.248 | 289.125.100 | 0 | 0 | 3.321.502.348 | 46.403.090 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.115.594.258 | 0 | 0 | 0 | 3.115.594.258 | 2.884.829.248 | 121.545.600 | 0 | 0 | 3.006.374.848 | (109.219.410) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18.714.800 | 0 | 0 | 0 | 18.714.800 | 10.885.000 | 0 | 0 | 0 | 10.885.000 | (7.829.800) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.246.000 | 0 | 0 | 0 | 3.246.000 | 3.225.000 | 0 | 0 | 0 | 3.225.000 | (21.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.459.400 | 0 | 0 | 0 | 3.459.400 | 2.760.000 | 0 | 0 | 0 | 2.760.000 | (699.400) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.855.000 | 0 | 0 | 0 | 2.855.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | (655.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.459.400 | 0 | 0 | 0 | 3.459.400 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | (759.400) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.855.000 | 0 | 0 | 0 | 2.855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.855.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.840.000 | 0 | 0 | 0 | 2.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2.840.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.160.191.576 | 0 | 0 | 0 | 2.160.191.576 | 1.861.921.546 | 0 | 0 | 0 | 1.861.921.546 | (298.270.030) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.055.862.176 | 0 | 0 | 0 | 2.055.862.176 | 1.768.921.546 | 0 | 0 | 0 | 1.768.921.546 | (286.940.630) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 99.840.000 | 0 | 0 | 0 | 99.840.000 | 93.000.000 | 0 | 0 | 0 | 93.000.000 | (6.840.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.489.400 | 0 | 0 | 0 | 4.489.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4.489.400) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 19.800.000 | 0 | 0 | 0 | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 | 0 | 0 | 19.800.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 19.800.000 | 0 | 0 | 0 | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 | 0 | 0 | 19.800.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 251.609.100 | 0 | 0 | 0 | 251.609.100 | 231.480.530 | 0 | 0 | 0 | 231.480.530 | (20.128.570) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.420.000 | 0 | 0 | 0 | 4.420.000 | 3.209.000 | 0 | 0 | 0 | 3.209.000 | (1.211.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.132.600 | 0 | 0 | 0 | 10.132.600 | 10.064.550 | 0 | 0 | 0 | 10.064.550 | (68.050) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 38.128.500 | 0 | 0 | 0 | 38.128.500 | 37.318.980 | 0 | 0 | 0 | 37.318.980 | (809.520) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | (3.500.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50.050.000 | 0 | 0 | 0 | 50.050.000 | 35.510.000 | 0 | 0 | 0 | 35.510.000 | (14.540.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 143.878.000 | 0 | 0 | 0 | 143.878.000 | 143.878.000 | 0 | 0 | 0 | 143.878.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.545.600 | 0 | 0 | 121.545.600 | 121.545.600 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.545.600 | 0 | 0 | 121.545.600 | 121.545.600 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 649.427.182 | 0 | 0 | 0 | 649.427.182 | 752.342.172 | 0 | 0 | 0 | 752.342.172 | 102.914.990 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 39.860.000 | 0 | 0 | 0 | 39.860.000 | 32.774.990 | 0 | 0 | 0 | 32.774.990 | (7.085.010) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9.968.430 | 0 | 0 | 0 | 9.968.430 | 9.968.430 | 0 | 0 | 0 | 9.968.430 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 599.598.752 | 0 | 0 | 0 | 599.598.752 | 709.598.752 | 0 | 0 | 0 | 709.598.752 | 110.000.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 15.851.600 | 0 | 0 | 0 | 15.851.600 | 8.400.000 | 0 | 0 | 0 | 8.400.000 | (7.451.600) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 15.851.600 | 0 | 0 | 0 | 15.851.600 | 8.400.000 | 0 | 0 | 0 | 8.400.000 | (7.451.600) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 159.505.000 | 0 | 0 | 0 | 159.505.000 | 147.548.000 | 167.579.500 | 0 | 0 | 315.127.500 | 155.622.500 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 159.505.000 | 0 | 0 | 0 | 159.505.000 | 147.548.000 | 0 | 0 | 0 | 147.548.000 | (11.957.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 159.505.000 | 0 | 0 | 0 | 159.505.000 | 147.548.000 | 0 | 0 | 0 | 147.548.000 | (11.957.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.579.500 | 0 | 0 | 167.579.500 | 167.579.500 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 03 | 2.03 | 03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.579.500 | 0 | 0 | 167.579.500 | 167.579.500 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | | | | KECAMATAN SIANTAN TENGAH | 3.106.747.543 | 0 | 0 | 0 | 3.106.747.543 | 3.026.298.971 | 35.101.500 | 0 | 0 | 3.061.400.471 | (45.347.072) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.054.167.543 | 0 | 0 | 0 | 3.054.167.543 | 2.998.298.971 | 35.101.500 | 0 | 0 | 3.033.400.471 | (20.767.072) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 38.987.020 | 0 | 0 | 0 | 38.987.020 | 17.933.020 | 0 | 0 | 0 | 17.933.020 | (21.054.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.312.520 | 0 | 0 | 0 | 14.312.520 | 8.312.520 | 0 | 0 | 0 | 8.312.520 | (6.000.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 12.895.500 | 0 | 0 | 0 | 12.895.500 | 8.696.500 | 0 | 0 | 0 | 8.696.500 | (4.199.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 11.779.000 | 0 | 0 | 0 | 11.779.000 | 924.000 | 0 | 0 | 0 | 924.000 | (10.855.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.893.247.483 | 0 | 0 | 0 | 1.893.247.483 | 1.865.637.483 | 0 | 0 | 0 | 1.865.637.483 | (27.610.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.769.173.563 | 0 | 0 | 0 | 1.769.173.563 | 1.753.843.563 | 0 | 0 | 0 | 1.753.843.563 | (15.330.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 118.560.000 | 0 | 0 | 0 | 118.560.000 | 110.400.000 | 0 | 0 | 0 | 110.400.000 | (8.160.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.513.920 | 0 | 0 | 0 | 5.513.920 | 1.393.920 | 0 | 0 | 0 | 1.393.920 | (4.120.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.462.000 | 29.700.000 | 0 | 0 | 63.162.000 | 63.162.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.462.000 | 29.700.000 | 0 | 0 | 63.162.000 | 63.162.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 256.898.800 | 0 | 0 | 0 | 256.898.800 | 194.259.500 | 5.401.500 | 0 | 0 | 199.661.000 | (57.237.800) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.270.000 | 0 | 0 | 0 | 6.270.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | (4.070.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.401.500 | 0 | 0 | 5.401.500 | 5.401.500 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13.018.500 | 0 | 0 | 0 | 13.018.500 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | (4.018.500) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 26.260.300 | 0 | 0 | 0 | 26.260.300 | 16.855.500 | 0 | 0 | 0 | 16.855.500 | (9.404.800) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 6.600.000 | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 4.200.000 | (2.400.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 75.350.000 | 0 | 0 | 0 | 75.350.000 | 74.600.000 | 0 | 0 | 0 | 74.600.000 | (750.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 129.400.000 | 0 | 0 | 0 | 129.400.000 | 87.404.000 | 0 | 0 | 0 | 87.404.000 | (41.996.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 22.900.900 | 0 | 0 | 0 | 22.900.900 | 15.606.060 | 0 | 0 | 0 | 15.606.060 | (7.294.840) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 22.900.900 | 0 | 0 | 0 | 22.900.900 | 15.606.060 | 0 | 0 | 0 | 15.606.060 | (7.294.840) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 826.133.340 | 0 | 0 | 0 | 826.133.340 | 865.720.908 | 0 | 0 | 0 | 865.720.908 | 39.587.568 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 92.597.468 | 0 | 0 | 0 | 92.597.468 | 89.894.700 | 0 | 0 | 0 | 89.894.700 | (2.702.768) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.120.000 | 0 | 0 | 0 | 24.120.000 | 24.120.000 | 0 | 0 | 0 | 24.120.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 709.415.872 | 0 | 0 | 0 | 709.415.872 | 751.706.208 | 0 | 0 | 0 | 751.706.208 | 42.290.336 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 5.680.000 | 0 | 0 | 0 | 5.680.000 | (10.320.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000.000 | 5.680.000 | 0 | 0 | 0 | 5.680.000 | (10.320.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 16.800.000 | 0 | 0 | 0 | 16.800.000 | 4.940.000 | 0 | 0 | 0 | 4.940.000 | (11.860.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 16.800.000 | 0 | 0 | 0 | 16.800.000 | 4.940.000 | 0 | 0 | 0 | 4.940.000 | (11.860.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 16.800.000 | 0 | 0 | 0 | 16.800.000 | 4.940.000 | 0 | 0 | 0 | 4.940.000 | (11.860.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 35.780.000 | 0 | 0 | 0 | 35.780.000 | 23.060.000 | 0 | 0 | 0 | 23.060.000 | (12.720.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 35.780.000 | 0 | 0 | 0 | 35.780.000 | 23.060.000 | 0 | 0 | 0 | 23.060.000 | (12.720.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 14.770.000 | 0 | 0 | 0 | 14.770.000 | 14.770.000 | 0 | 0 | 0 | 14.770.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 21.010.000 | 0 | 0 | 0 | 21.010.000 | 8.290.000 | 0 | 0 | 0 | 8.290.000 | (12.720.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | | | | KECAMATAN SIANTAN UTARA | 2.738.233.132 | 55.000.000 | 0 | 0 | 2.793.233.132 | 2.376.967.590 | 0 | 0 | 0 | 2.376.967.590 | (416.265.542) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.581.075.238 | 55.000.000 | 0 | 0 | 2.636.075.238 | 2.219.809.696 | 0 | 0 | 0 | 2.219.809.696 | (416.265.542) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.938.291 | 0 | 0 | 0 | 5.938.291 | 2.745.097 | 0 | 0 | 0 | 2.745.097 | (3.193.194) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.995.097 | 0 | 0 | 0 | 1.995.097 | 895.097 | 0 | 0 | 0 | 895.097 | (1.100.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.943.194 | 0 | 0 | 0 | 1.943.194 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | (1.593.194) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | (500.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.759.241.002 | 0 | 0 | 0 | 1.759.241.002 | 1.377.886.258 | 0 | 0 | 0 | 1.377.886.258 | (381.354.744) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.683.085.002 | 0 | 0 | 0 | 1.683.085.002 | 1.302.206.258 | 0 | 0 | 0 | 1.302.206.258 | (380.878.744) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 73.680.000 | 0 | 0 | 0 | 73.680.000 | 73.680.000 | 0 | 0 | 0 | 73.680.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.476.000 | 0 | 0 | 0 | 2.476.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | (476.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 12.160.000 | 0 | 0 | 0 | 12.160.000 | 10.800.000 | 0 | 0 | 0 | 10.800.000 | (1.360.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12.160.000 | 0 | 0 | 0 | 12.160.000 | 10.800.000 | 0 | 0 | 0 | 10.800.000 | (1.360.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.974.000 | 0 | 0 | 0 | 17.974.000 | 17.974.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.974.000 | 0 | 0 | 0 | 17.974.000 | 17.974.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 198.210.200 | 0 | 0 | 0 | 198.210.200 | 166.097.400 | 0 | 0 | 0 | 166.097.400 | (32.112.800) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.106.000 | 0 | 0 | 0 | 2.106.000 | 1.982.000 | 0 | 0 | 0 | 1.982.000 | (124.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.541.400 | 0 | 0 | 0 | 4.541.400 | 4.491.400 | 0 | 0 | 0 | 4.491.400 | (50.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 35.911.000 | 0 | 0 | 0 | 35.911.000 | 35.911.000 | 0 | 0 | 0 | 35.911.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.754.800 | 0 | 0 | 0 | 9.754.800 | 6.570.000 | 0 | 0 | 0 | 6.570.000 | (3.184.800) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 27.250.000 | 0 | 0 | 0 | 27.250.000 | 26.250.000 | 0 | 0 | 0 | 26.250.000 | (1.000.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 118.647.000 | 0 | 0 | 0 | 118.647.000 | 90.893.000 | 0 | 0 | 0 | 90.893.000 | (27.754.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000.000 | 47.056.000 | 0 | 0 | 0 | 47.056.000 | (944.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 48.000.000 | 47.056.000 | 0 | 0 | 0 | 47.056.000 | (944.000) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 542.244.215 | 55.000.000 | 0 | 0 | 597.244.215 | 586.381.511 | 0 | 0 | 0 | 586.381.511 | (10.862.704) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 19.136.000 | 0 | 0 | 0 | 19.136.000 | 13.308.150 | 0 | 0 | 0 | 13.308.150 | (5.827.850) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.639.735 | 0 | 0 | 0 | 1.639.735 | 1.639.735 | 0 | 0 | 0 | 1.639.735 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (55.000.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 521.468.480 | 0 | 0 | 0 | 521.468.480 | 571.433.626 | 0 | 0 | 0 | 571.433.626 | 49.965.146 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 15.281.530 | 0 | 0 | 0 | 15.281.530 | 10.869.430 | 0 | 0 | 0 | 10.869.430 | (4.412.100) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 5.458.530 | 0 | 0 | 0 | 5.458.530 | 3.625.330 | 0 | 0 | 0 | 3.625.330 | (1.833.200) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.823.000 | 0 | 0 | 0 | 9.823.000 | 7.244.100 | 0 | 0 | 0 | 7.244.100 | (2.578.900) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 117.855.500 | 0 | 0 | 0 | 117.855.500 | 117.855.500 | 0 | 0 | 0 | 117.855.500 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 117.855.500 | 0 | 0 | 0 | 117.855.500 | 117.855.500 | 0 | 0 | 0 | 117.855.500 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 117.855.500 | 0 | 0 | 0 | 117.855.500 | 117.855.500 | 0 | 0 | 0 | 117.855.500 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 31.308.194 | 0 | 0 | 0 | 31.308.194 | 31.308.194 | 0 | 0 | 0 | 31.308.194 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 31.308.194 | 0 | 0 | 0 | 31.308.194 | 31.308.194 | 0 | 0 | 0 | 31.308.194 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 05 | 2.01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 28.272.000 | 0 | 0 | 0 | 28.272.000 | 28.272.000 | 0 | 0 | 0 | 28.272.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 3.036.194 | 0 | 0 | 0 | 3.036.194 | 3.036.194 | 0 | 0 | 0 | 3.036.194 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 7.994.200 | 0 | 0 | 0 | 7.994.200 | 7.994.200 | 0 | 0 | 0 | 7.994.200 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 7.994.200 | 0 | 0 | 0 | 7.994.200 | 7.994.200 | 0 | 0 | 0 | 7.994.200 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1.994.200 | 0 | 0 | 0 | 1.994.200 | 1.994.200 | 0 | 0 | 0 | 1.994.200 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | | | | KECAMATAN JEMAJA BARAT | 2.852.722.295 | 0 | 0 | 0 | 2.852.722.295 | 2.593.882.264 | 0 | 0 | 0 | 2.593.882.264 | (258.840.031) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.683.247.295 | 0 | 0 | 0 | 2.683.247.295 | 2.434.007.264 | 0 | 0 | 0 | 2.434.007.264 | (249.240.031) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 22.164.200 | 0 | 0 | 0 | 22.164.200 | 10.014.200 | 0 | 0 | 0 | 10.014.200 | (12.150.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.580.400 | 0 | 0 | 0 | 4.580.400 | 4.580.400 | 0 | 0 | 0 | 4.580.400 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.120.800 | 0 | 0 | 0 | 3.120.800 | 1.095.800 | 0 | 0 | 0 | 1.095.800 | (2.025.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.900.800 | 0 | 0 | 0 | 2.900.800 | 875.800 | 0 | 0 | 0 | 875.800 | (2.025.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | 2.750.000 | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 725.000 | (2.025.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.831.800 | 0 | 0 | 0 | 2.831.800 | 806.800 | 0 | 0 | 0 | 806.800 | (2.025.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.130.800 | 0 | 0 | 0 | 3.130.800 | 930.800 | 0 | 0 | 0 | 930.800 | (2.200.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.849.600 | 0 | 0 | 0 | 2.849.600 | 999.600 | 0 | 0 | 0 | 999.600 | (1.850.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.968.346.335 | 0 | 0 | 0 | 1.968.346.335 | 1.718.692.144 | 0 | 0 | 0 | 1.718.692.144 | (249.654.191) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.862.443.935 | 0 | 0 | 0 | 1.862.443.935 | 1.619.629.744 | 0 | 0 | 0 | 1.619.629.744 | (242.814.191) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 102.840.000 | 0 | 0 | 0 | 102.840.000 | 96.000.000 | 0 | 0 | 0 | 96.000.000 | (6.840.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.062.400 | 0 | 0 | 0 | 3.062.400 | 3.062.400 | 0 | 0 | 0 | 3.062.400 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 253.889.000 | 0 | 0 | 0 | 253.889.000 | 256.203.000 | 0 | 0 | 0 | 256.203.000 | 2.314.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.440.800 | 0 | 0 | 0 | 4.440.800 | 4.440.800 | 0 | 0 | 0 | 4.440.800 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.559.000 | 0 | 0 | 0 | 6.559.000 | 6.559.000 | 0 | 0 | 0 | 6.559.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 34.235.200 | 0 | 0 | 0 | 34.235.200 | 29.089.200 | 0 | 0 | 0 | 29.089.200 | (5.146.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.300.000 | 0 | 0 | 0 | 9.300.000 | 7.100.000 | 0 | 0 | 0 | 7.100.000 | (2.200.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 62.500.000 | 0 | 0 | 0 | 62.500.000 | 56.060.000 | 0 | 0 | 0 | 56.060.000 | (6.440.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 136.854.000 | 0 | 0 | 0 | 136.854.000 | 152.954.000 | 0 | 0 | 0 | 152.954.000 | 16.100.000 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 416.597.760 | 0 | 0 | 0 | 416.597.760 | 426.865.920 | 0 | 0 | 0 | 426.865.920 | 10.268.160 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 35.284.800 | 0 | 0 | 0 | 35.284.800 | 34.679.800 | 0 | 0 | 0 | 34.679.800 | (605.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 381.312.960 | 0 | 0 | 0 | 381.312.960 | 392.186.120 | 0 | 0 | 0 | 392.186.120 | 10.873.160 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 22.250.000 | 0 | 0 | 0 | 22.250.000 | 22.232.000 | 0 | 0 | 0 | 22.232.000 | (18.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.570.000 | 0 | 0 | 0 | 6.570.000 | 6.570.000 | 0 | 0 | 0 | 6.570.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 15.680.000 | 0 | 0 | 0 | 15.680.000 | 15.662.000 | 0 | 0 | 0 | 15.662.000 | (18.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 141.640.000 | 0 | 0 | 0 | 141.640.000 | 133.690.000 | 0 | 0 | 0 | 133.690.000 | (7.950.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 141.640.000 | 0 | 0 | 0 | 141.640.000 | 133.690.000 | 0 | 0 | 0 | 133.690.000 | (7.950.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 141.640.000 | 0 | 0 | 0 | 141.640.000 | 133.690.000 | 0 | 0 | 0 | 133.690.000 | (7.950.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 11.775.000 | 0 | 0 | 0 | 11.775.000 | 11.775.000 | 0 | 0 | 0 | 11.775.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 11.775.000 | 0 | 0 | 0 | 11.775.000 | 11.775.000 | 0 | 0 | 0 | 11.775.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 11.775.000 | 0 | 0 | 0 | 11.775.000 | 11.775.000 | 0 | 0 | 0 | 11.775.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 16.060.000 | 0 | 0 | 0 | 16.060.000 | 14.410.000 | 0 | 0 | 0 | 14.410.000 | (1.650.000) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 06 | 2.01 | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 16.060.000 | 0 | 0 | 0 | 16.060.000 | 14.410.000 | 0 | 0 | 0 | 14.410.000 | (1.650.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 06 | 2.01 | 13 | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 16.060.000 | 0 | 0 | 0 | 16.060.000 | 14.410.000 | 0 | 0 | 0 | 14.410.000 | (1.650.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | | | | | KECAMATAN KUTE SIANTAN | 3.270.728.212 | 0 | 0 | 0 | 3.270.728.212 | 3.555.746.740 | 248.405.000 | 0 | 0 | 3.804.151.740 | 533.423.528 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.226.889.212 | 0 | 0 | 0 | 3.226.889.212 | 3.512.045.240 | 248.405.000 | 0 | 0 | 3.760.450.240 | 533.561.028 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.310.500 | 0 | 0 | 0 | 8.310.500 | 8.310.500 | 0 | 0 | 0 | 8.310.500 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 8.310.500 | 0 | 0 | 0 | 8.310.500 | 8.310.500 | 0 | 0 | 0 | 8.310.500 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.934.899.910 | 0 | 0 | 0 | 1.934.899.910 | 1.898.022.624 | 0 | 0 | 0 | 1.898.022.624 | (36.877.286) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.843.263.910 | 0 | 0 | 0 | 1.843.263.910 | 1.806.386.624 | 0 | 0 | 0 | 1.806.386.624 | (36.877.286) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 88.680.000 | 0 | 0 | 0 | 88.680.000 | 88.680.000 | 0 | 0 | 0 | 88.680.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.02 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.956.000 | 0 | 0 | 0 | 2.956.000 | 2.956.000 | 0 | 0 | 0 | 2.956.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 137.736.400 | 0 | 0 | 0 | 137.736.400 | 303.677.500 | 248.405.000 | 0 | 0 | 552.082.500 | 414.346.100 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 18.361.400 | 0 | 0 | 0 | 18.361.400 | 192.682.500 | 248.405.000 | 0 | 0 | 441.087.500 | 422.726.100 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 119.375.000 | 0 | 0 | 0 | 119.375.000 | 110.995.000 | 0 | 0 | 0 | 110.995.000 | (8.380.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 154.700.000 | 0 | 0 | 0 | 154.700.000 | 154.700.000 | 0 | 0 | 0 | 154.700.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 154.700.000 | 0 | 0 | 0 | 154.700.000 | 154.700.000 | 0 | 0 | 0 | 154.700.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 971.232.372 | 0 | 0 | 0 | 971.232.372 | 1.138.834.616 | 0 | 0 | 0 | 1.138.834.616 | 167.602.244 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 106.498.804 | 0 | 0 | 0 | 106.498.804 | 99.716.400 | 0 | 0 | 0 | 99.716.400 | (6.782.404) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25.944.000 | 0 | 0 | 0 | 25.944.000 | 22.042.000 | 0 | 0 | 0 | 22.042.000 | (3.902.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 838.789.568 | 0 | 0 | 0 | 838.789.568 | 1.017.076.216 | 0 | 0 | 0 | 1.017.076.216 | 178.286.648 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 20.010.030 | 0 | 0 | 0 | 20.010.030 | 8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 8.500.000 | (11.510.030) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.09 | 01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 8.160.030 | 0 | 0 | 0 | 8.160.030 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | (4.660.030) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 11.850.000 | 0 | 0 | 0 | 11.850.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | (6.850.000) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 05 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 26.045.000 | 0 | 0 | 0 | 26.045.000 | 25.907.500 | 0 | 0 | 0 | 25.907.500 | (137.500) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 05 | 2.01 | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 26.045.000 | 0 | 0 | 0 | 26.045.000 | 25.907.500 | 0 | 0 | 0 | 25.907.500 | (137.500) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 05 | 2.01 | 08 | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 26.045.000 | 0 | 0 | 0 | 26.045.000 | 25.907.500 | 0 | 0 | 0 | 25.907.500 | (137.500) |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 06 | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 17.794.000 | 0 | 0 | 0 | 17.794.000 | 17.794.000 | 0 | 0 | 0 | 17.794.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 06 | 2.01 | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 17.794.000 | 0 | 0 | 0 | 17.794.000 | 17.794.000 | 0 | 0 | 0 | 17.794.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 06 | 2.01 | 13 | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 9.600.000 | 9.600.000 | 0 | 0 | 0 | 9.600.000 | 0 |
| 7 | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 06 | 2.01 | 17 | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 8.194.000 | 0 | 0 | 0 | 8.194.000 | 8.194.000 | 0 | 0 | 0 | 8.194.000 | 0 |
| **8** | | | | | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | **6.036.341.593** | **0** | **0** | **0** | **6.036.341.593** | **5.128.860.832** | **0** | **0** | **0** | **5.128.860.832** | **(907.480.761)** |
| **8** | **01** | | | | | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **6.036.341.593** | **0** | **0** | **0** | **6.036.341.593** | **5.128.860.832** | **0** | **0** | **0** | **5.128.860.832** | **(907.480.761)** |
| 1 | 05 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6.036.341.593 | 0 | 0 | 0 | 6.036.341.593 | 5.128.860.832 | 0 | 0 | 0 | 5.128.860.832 | (907.480.761) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.593.852.575 | 0 | 0 | 0 | 4.593.852.575 | 3.892.976.914 | 0 | 0 | 0 | 3.892.976.914 | (700.875.661) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.967.900 | 0 | 0 | 0 | 8.967.900 | 5.485.000 | 0 | 0 | 0 | 5.485.000 | (3.482.900) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.981.000 | 0 | 0 | 0 | 1.981.000 | 1.870.000 | 0 | 0 | 0 | 1.870.000 | (111.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 02 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 785.000 | 0 | 0 | 0 | 785.000 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | (110.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 03 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | (850.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 04 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.447.500 | 0 | 0 | 0 | 1.447.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.447.500) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 853.400 | 0 | 0 | 0 | 853.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (853.400) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.01 | 06 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.251.000 | 0 | 0 | 0 | 2.251.000 | 2.140.000 | 0 | 0 | 0 | 2.140.000 | (111.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.426.115.921 | 0 | 0 | 0 | 3.426.115.921 | 2.866.661.700 | 0 | 0 | 0 | 2.866.661.700 | (559.454.221) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.300.215.921 | 0 | 0 | 0 | 3.300.215.921 | 2.740.761.700 | 0 | 0 | 0 | 2.740.761.700 | (559.454.221) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 125.900.000 | 0 | 0 | 0 | 125.900.000 | 125.900.000 | 0 | 0 | 0 | 125.900.000 | 0 |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 317.326.200 | 0 | 0 | 0 | 317.326.200 | 249.959.200 | 0 | 0 | 0 | 249.959.200 | (67.367.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 41.434.300 | 0 | 0 | 0 | 41.434.300 | 35.175.300 | 0 | 0 | 0 | 35.175.300 | (6.259.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.245.000 | 0 | 0 | 0 | 4.245.000 | 3.965.000 | 0 | 0 | 0 | 3.965.000 | (280.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 56.356.900 | 0 | 0 | 0 | 56.356.900 | 46.126.900 | 0 | 0 | 0 | 46.126.900 | (10.230.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.510.000 | 0 | 0 | 0 | 35.510.000 | 24.938.000 | 0 | 0 | 0 | 24.938.000 | (10.572.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 179.780.000 | 0 | 0 | 0 | 179.780.000 | 139.754.000 | 0 | 0 | 0 | 139.754.000 | (40.026.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 195.876.650 | 0 | 0 | 0 | 195.876.650 | 195.413.000 | 0 | 0 | 0 | 195.413.000 | (463.650) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.07 | 09 | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 195.876.650 | 0 | 0 | 0 | 195.876.650 | 195.413.000 | 0 | 0 | 0 | 195.413.000 | (463.650) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 617.215.904 | 0 | 0 | 0 | 617.215.904 | 559.278.014 | 0 | 0 | 0 | 559.278.014 | (57.937.890) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 16.200.000 | 0 | 0 | 0 | 16.200.000 | 13.200.000 | 0 | 0 | 0 | 13.200.000 | (3.000.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18.864.000 | 0 | 0 | 0 | 18.864.000 | 25.418.000 | 0 | 0 | 0 | 25.418.000 | 6.554.000 |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 03 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26.240.000 | 0 | 0 | 0 | 26.240.000 | 26.240.000 | 0 | 0 | 0 | 26.240.000 | 0 |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 555.911.904 | 0 | 0 | 0 | 555.911.904 | 494.420.014 | 0 | 0 | 0 | 494.420.014 | (61.491.890) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 28.350.000 | 0 | 0 | 0 | 28.350.000 | 16.180.000 | 0 | 0 | 0 | 16.180.000 | (12.170.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 01 | 2.09 | 06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28.350.000 | 0 | 0 | 0 | 28.350.000 | 16.180.000 | 0 | 0 | 0 | 16.180.000 | (12.170.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 02 | | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 73.941.400 | 0 | 0 | 0 | 73.941.400 | 55.941.400 | 0 | 0 | 0 | 55.941.400 | (18.000.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 02 | 2.01 | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 73.941.400 | 0 | 0 | 0 | 73.941.400 | 55.941.400 | 0 | 0 | 0 | 55.941.400 | (18.000.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 02 | 2.01 | 04 | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 73.941.400 | 0 | 0 | 0 | 73.941.400 | 55.941.400 | 0 | 0 | 0 | 55.941.400 | (18.000.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 03 | | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 553.798.718 | 0 | 0 | 0 | 553.798.718 | 545.798.718 | 0 | 0 | 0 | 545.798.718 | (8.000.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 03 | 2.01 | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 553.798.718 | 0 | 0 | 0 | 553.798.718 | 545.798.718 | 0 | 0 | 0 | 545.798.718 | (8.000.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 03 | 2.01 | 03 | | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | 518.048.718 | 0 | 0 | 0 | 518.048.718 | 518.048.718 | 0 | 0 | 0 | 518.048.718 | 0 |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 03 | 2.01 | 05 | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 35.750.000 | 0 | 0 | 0 | 35.750.000 | 27.750.000 | 0 | 0 | 0 | 27.750.000 | (8.000.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 04 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 60.289.600 | 0 | 0 | 0 | 60.289.600 | 57.272.600 | 0 | 0 | 0 | 57.272.600 | (3.017.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 04 | 2.01 | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 60.289.600 | 0 | 0 | 0 | 60.289.600 | 57.272.600 | 0 | 0 | 0 | 57.272.600 | (3.017.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 04 | 2.01 | 05 | | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 60.289.600 | 0 | 0 | 0 | 60.289.600 | 57.272.600 | 0 | 0 | 0 | 57.272.600 | (3.017.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 05 | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 289.069.500 | 0 | 0 | 0 | 289.069.500 | 254.725.400 | 0 | 0 | 0 | 254.725.400 | (34.344.100) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 289.069.500 | 0 | 0 | 0 | 289.069.500 | 254.725.400 | 0 | 0 | 0 | 254.725.400 | (34.344.100) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 42.344.100 | 0 | 0 | 0 | 42.344.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (42.344.100) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 05 | 2.01 | 04 | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 246.725.400 | 0 | 0 | 0 | 246.725.400 | 254.725.400 | 0 | 0 | 0 | 254.725.400 | 8.000.000 |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 465.389.800 | 0 | 0 | 0 | 465.389.800 | 322.145.800 | 0 | 0 | 0 | 322.145.800 | (143.244.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 465.389.800 | 0 | 0 | 0 | 465.389.800 | 322.145.800 | 0 | 0 | 0 | 322.145.800 | (143.244.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 36.960.300 | 0 | 0 | 0 | 36.960.300 | 32.704.300 | 0 | 0 | 0 | 32.704.300 | (4.256.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 02 | | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 79.024.300 | 0 | 0 | 0 | 79.024.300 | 58.275.300 | 0 | 0 | 0 | 58.275.300 | (20.749.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 03 | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 85.847.000 | 0 | 0 | 0 | 85.847.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (85.847.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 04 | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 71.492.900 | 0 | 0 | 0 | 71.492.900 | 56.403.900 | 0 | 0 | 0 | 56.403.900 | (15.089.000) |

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Belanja | | | | | Belanja | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah Belanja | |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 58.527.100 | 0 | 0 | 0 | 58.527.100 | 45.469.100 | 0 | 0 | 0 | 45.469.100 | (13.058.000) |
| 8 | 01 | 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 06 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 133.538.200 | 0 | 0 | 0 | 133.538.200 | 129.293.200 | 0 | 0 | 0 | 129.293.200 | (4.245.000) |
| | | | | | | **TOTAL** | **687.543.101.168** | **135.467.217.973** | **1.000.000.000** | **106.128.139.790** | **930.138.458.931** | **683.572.078.918** | **124.208.828.179** | **1.000.000.000** | **107.866.959.219** | **916.647.866.316** | **(13.490.592.615)** |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kelompok Belanja | | | | Jumlah Belanja | Kelompok Belanja | | | | Jumlah Belanja | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | |
| **01** | | | | **PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 1 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 149.175.258.510 | 0 | 0 | 0 | 149.175.258.510 | 144.008.309.328 | 0 | 0 | 0 | 144.008.309.328 | (5.166.949.182) |
| 01 | 02 | 1 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 94.877.202.607 | 621.798.036 | 0 | 0 | 95.499.000.643 | 92.625.466.610 | 522.285.741 | 0 | 0 | 93.147.752.351 | (2.351.248.292) |
| 01 | 03 | 1 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 16.105.950.744 | 1.026.596.800 | 0 | 0 | 17.132.547.544 | 13.584.815.697 | 516.884.401 | 0 | 0 | 14.101.700.098 | (3.030.847.446) |
| 01 | 04 | 1 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 23.335.922.016 | 0 | 0 | 0 | 23.335.922.016 | 25.048.520.758 | 335.021.500 | 0 | 0 | 25.383.542.258 | 2.047.620.242 |
| 01 | 05 | 1 | 06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 9.320.235.440 | 0 | 0 | 0 | 9.320.235.440 | 8.235.720.208 | 0 | 0 | 0 | 8.235.720.208 | (1.084.515.232) |
| 01 | 06 | 2 | 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 482.440.800 | 0 | 0 | 0 | 482.440.800 | 503.505.800 | 165.000.000 | 0 | 0 | 668.505.800 | 186.065.000 |
| 01 | 07 | 2 | 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6.926.947.553 | 294.947.025 | 0 | 0 | 7.221.894.578 | 6.751.063.281 | 241.789.000 | 0 | 0 | 6.992.852.281 | (229.042.297) |
| 01 | 08 | 2 | 13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1.921.106.184 | 0 | 0 | 0 | 1.921.106.184 | 1.769.113.202 | 0 | 0 | 0 | 1.769.113.202 | (151.992.982) |
| 01 | 09 | 2 | 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 83.992.934 | 0 | 0 | 0 | 83.992.934 | 16.800.000 | 0 | 0 | 0 | 16.800.000 | (67.192.934) |
| 01 | 10 | 2 | 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 14.761.050.064 | 0 | 0 | 0 | 14.761.050.064 | 13.634.814.255 | 192.060.000 | 0 | 0 | 13.826.874.255 | (934.175.809) |
| 01 | 11 | 2 | 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 7.063.245.374 | 0 | 0 | 0 | 7.063.245.374 | 5.528.765.998 | 0 | 0 | 0 | 5.528.765.998 | (1.534.479.376) |
| 01 | 12 | 2 | 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 7.797.912.921 | 11.160.000 | 0 | 0 | 7.809.072.921 | 7.347.115.412 | 0 | 0 | 0 | 7.347.115.412 | (461.957.509) |
| 01 | 13 | 2 | 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 7.476.823.975 | 0 | 0 | 0 | 7.476.823.975 | 6.834.111.969 | 16.126.000 | 0 | 0 | 6.850.237.969 | (626.586.006) |
| 01 | 14 | 2 | 20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 193.218.000 | 0 | 0 | 0 | 193.218.000 | 114.987.600 | 0 | 0 | 0 | 114.987.600 | (78.230.400) |
| 01 | 15 | 2 | 24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 61.308.000 | 0 | 0 | 0 | 61.308.000 | 71.267.000 | 0 | 0 | 0 | 71.267.000 | 9.959.000 |
| 01 | 16 | 3 | 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 14.514.889.318 | 61.029.732 | 0 | 0 | 14.575.919.050 | 12.936.323.242 | 54.200.000 | 0 | 0 | 12.990.523.242 | (1.585.395.808) |
| 01 | 17 | 3 | 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 7.028.924.480 | 5.000.000 | 0 | 0 | 7.033.924.480 | 6.485.507.339 | 0 | 0 | 0 | 6.485.507.339 | (548.417.141) |
| 01 | 18 | 4 | 01 | SEKRETARIAT DAERAH | 53.878.459.901 | 1.545.856.510 | 0 | 0 | 55.424.316.411 | 53.488.371.203 | 684.648.710 | 0 | 0 | 54.173.019.913 | (1.251.296.498) |
| 01 | 19 | 4 | 02 | SEKRETARIAT DPRD | 34.674.323.720 | 260.711.000 | 0 | 0 | 34.935.034.720 | 36.611.741.752 | 579.108.950 | 0 | 0 | 37.190.850.702 | 2.255.815.982 |
| 01 | 20 | 5 | 01 | PERENCANAAN | 12.638.846.195 | 45.000.000 | 0 | 0 | 12.683.846.195 | 9.700.689.280 | 0 | 0 | 0 | 9.700.689.280 | (2.983.156.915) |
| 01 | 21 | 5 | 02 | KEUANGAN | 56.632.886.328 | 206.500.000 | 1.000.000.000 | 106.128.139.790 | 163.967.526.118 | 39.000.618.074 | 145.380.000 | 1.000.000.000 | 107.866.959.219 | 148.012.957.293 | (15.954.568.825) |
| 01 | 22 | 5 | 03 | KEPEGAWAIAN | 7.800.650.377 | 21.200.000 | 0 | 0 | 7.821.850.377 | 6.422.806.002 | 0 | 0 | 0 | 6.422.806.002 | (1.399.044.375) |
| 01 | 23 | 5 | 04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 1.274.652.000 | 0 | 0 | 0 | 1.274.652.000 | 1.274.647.000 | 0 | 0 | 0 | 1.274.647.000 | (5.000) |
| 01 | 24 | 5 | 05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 707.037.400 | 100.000.000 | 0 | 0 | 807.037.400 | 11.286.600 | 0 | 0 | 0 | 11.286.600 | (795.750.800) |
| 01 | 25 | 5 | 06 | PENGELOLAAN PERBATASAN | 929.669.660 | 475.330.225 | 0 | 0 | 1.404.999.885 | 600.017.071 | 257.115.725 | 0 | 0 | 857.132.796 | (547.867.089) |
| 01 | 26 | 6 | 01 | INSPEKTORAT DAERAH | 12.563.659.281 | 0 | 0 | 0 | 12.563.659.281 | 11.615.350.300 | 0 | 0 | 0 | 11.615.350.300 | (948.308.981) |
| 01 | 27 | 7 | 01 | KECAMATAN | 36.735.862.938 | 55.000.000 | 0 | 0 | 36.790.862.938 | 35.970.795.006 | 572.631.600 | 0 | 0 | 36.543.426.606 | (247.436.332) |
| 01 | 28 | 8 | 01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6.036.341.593 | 0 | 0 | 0 | 6.036.341.593 | 5.128.860.832 | 0 | 0 | 0 | 5.128.860.832 | (907.480.761) |
| **03** | | | | **KETERTIBAN DAN KEAMANAN** | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 1 | 05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 2.073.826.000 | 0 | 0 | 0 | 2.073.826.000 | 1.396.672.575 | 0 | 0 | 0 | 1.396.672.575 | (677.153.425) |
| 03 | 02 | 1 | 06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 97.900.000 | 0 | 0 | 0 | 97.900.000 | 97.900.000 | 0 | 0 | 0 | 97.900.000 | 0 |
| **04** | | | | **EKONOMI** | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 1 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6.991.159.217 | 65.412.831.843 | 0 | 0 | 72.403.991.060 | 18.808.273.900 | 52.468.112.331 | 0 | 0 | 71.276.386.231 | (1.127.604.829) |
| 04 | 02 | 2 | 07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 1.899.662.466 | 0 | 0 | 0 | 1.899.662.466 | 2.695.022.698 | 0 | 0 | 0 | 2.695.022.698 | 795.360.232 |
| 04 | 03 | 2 | 09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 699.911.140 | 21.538.000 | 0 | 0 | 721.449.140 | 671.168.890 | 0 | 0 | 0 | 671.168.890 | (50.280.250) |
| 04 | 04 | 2 | 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 1.196.279.755 | 289.674.000 | 0 | 0 | 1.485.953.755 | 5.510.277.567 | 5.160.596.539 | 0 | 0 | 10.670.874.106 | 9.184.920.351 |
| 04 | 05 | 2 | 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 9.029.369.140 | 689.205.000 | 0 | 0 | 9.718.574.140 | 8.062.009.655 | 1.303.425.911 | 0 | 0 | 9.365.435.566 | (353.138.574) |
| 04 | 06 | 2 | 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 643.158.100 | 0 | 0 | 0 | 643.158.100 | 510.080.550 | 0 | 0 | 0 | 510.080.550 | (133.077.550) |
| 04 | 07 | 2 | 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 1.267.175.800 | 0 | 0 | 0 | 1.267.175.800 | 1.035.193.580 | 0 | 0 | 0 | 1.035.193.580 | (231.982.220) |

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | | Sesudah Perubahan | | | | | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kelompok Belanja | | | | Jumlah Belanja | Kelompok Belanja | | | | Jumlah Belanja | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer | | |
| 04 | 08 | 2 | 21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 170.763.800 | 0 | 0 | 0 | 170.763.800 | 79.246.000 | 0 | 0 | 0 | 79.246.000 | (91.517.800) |
| 04 | 09 | 3 | 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 517.627.692 | 11.485.900 | 0 | 0 | 529.113.592 | 1.475.288.322 | 89.760.000 | 0 | 0 | 1.565.048.322 | 1.035.934.730 |
| 04 | 10 | 3 | 27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 754.955.669 | 195.000.000 | 0 | 0 | 949.955.669 | 639.800.664 | 39.973.000 | 0 | 0 | 679.773.664 | (270.182.005) |
| 04 | 11 | 3 | 30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 638.865.575 | 0 | 0 | 0 | 638.865.575 | 785.945.265 | 0 | 0 | 0 | 785.945.265 | 147.079.690 |
| 04 | 12 | 3 | 31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 264.789.200 | 5.200.000 | 0 | 0 | 269.989.200 | 121.528.028 | 2.015.372.697 | 0 | 0 | 2.136.900.725 | 1.866.911.525 |
| **05** | | | | **PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 1 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 5.433.491.914 | 0 | 0 | 0 | 5.433.491.914 | 5.824.812.000 | 6.000 | 0 | 0 | 5.824.818.000 | 391.326.086 |
| 05 | 02 | 2 | 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 03 | 2 | 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 673.790.130 | 0 | 0 | 0 | 673.790.130 | 942.345.800 | 7.876.000 | 0 | 0 | 950.221.800 | 276.431.670 |
| **06** | | | | **PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM** | | | | | | | | | | | |
| 06 | 01 | 1 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 901.971.193 | 23.839.166.138 | 0 | 0 | 24.741.137.331 | 2.850.543.113 | 6.685.642.707 | 0 | 0 | 9.536.185.820 | (15.204.951.511) |
| 06 | 02 | 1 | 04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 221.688.000 | 198.202.796 | 0 | 0 | 419.890.796 | 568.376.900 | 3.053.908.675 | 0 | 0 | 3.622.285.575 | 3.202.394.779 |
| **07** | | | | **KESEHATAN** | | | | | | | | | | | |
| 07 | 01 | 1 | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 44.283.037.604 | 13.537.071.343 | 0 | 0 | 57.820.108.947 | 51.451.149.889 | 19.749.567.805 | 0 | 0 | 71.200.717.694 | 13.380.608.747 |
| 07 | 02 | 2 | 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1.936.126.394 | 178.071.000 | 0 | 0 | 2.114.197.394 | 1.828.811.564 | 34.071.000 | 0 | 0 | 1.862.882.564 | (251.314.830) |
| 07 | 03 | 7 | 01 | KECAMATAN | 136.137.600 | 0 | 0 | 0 | 136.137.600 | 135.863.492 | 0 | 0 | 0 | 135.863.492 | (274.108) |
| **08** | | | | **PARIWISATA** | | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 3 | 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 1.152.649.736 | 71.750.000 | 0 | 0 | 1.224.399.736 | 2.196.498.322 | 50.000.000 | 0 | 0 | 2.246.498.322 | 1.022.098.586 |
| **10** | | | | **PENDIDIKAN** | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 1 | 01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 16.956.266.796 | 26.167.932.625 | 0 | 0 | 43.124.199.421 | 21.613.117.575 | 29.062.233.887 | 0 | 0 | 50.675.351.462 | 7.551.152.041 |
| 10 | 02 | 2 | 19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1.519.940.934 | 0 | 0 | 0 | 1.519.940.934 | 2.243.146.929 | 122.530.000 | 0 | 0 | 2.365.676.929 | 845.735.995 |
| 10 | 03 | 2 | 22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 280.611.600 | 0 | 0 | 0 | 280.611.600 | 840.695.760 | 0 | 0 | 0 | 840.695.760 | 560.084.160 |
| 10 | 04 | 2 | 23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 881.371.100 | 101.960.000 | 0 | 0 | 983.331.100 | 995.362.800 | 80.000.000 | 0 | 0 | 1.075.362.800 | 92.031.700 |
| **11** | | | | **PERLINDUNGAN SOSIAL** | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 1 | 06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 641.119.400 | 14.500.000 | 0 | 0 | 655.619.400 | 3.558.530.601 | 0 | 0 | 0 | 3.558.530.601 | 2.902.911.201 |
| 11 | 02 | 2 | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1.280.636.900 | 3.500.000 | 0 | 0 | 1.284.136.900 | 1.313.025.660 | 3.500.000 | 0 | 0 | 1.316.525.660 | 32.388.760 |
| | | | | **TOTAL** | **687.543.101.168** | **135.467.217.973** | **1.000.000.000** | **106.128.139.790** | **930.138.458.931** | **683.572.078.918** | **124.208.828.179** | **1.000.000.000** | **107.866.959.219** | **916.647.866.316** | **(13.490.592.615)** |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) | Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A SPM Bidang Pendidikan** | | | | | |
| | **Pendidikan Dasar** | | | | | |
| | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | | | | |
| | | | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 0 | 0 | 0 |
| | | | Penambahan Ruang Kelas Baru | 4.228.928.675 | 1.321.362.400 | (2.907.566.275) |
| | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 1.027.239.133 | 1.586.015.100 | 558.775.967 |
| | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 379.220.418 | 665.409.000 | 286.188.582 |
| | | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 652.556.732 | 730.998.000 | 78.441.268 |
| | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 629.983.901 | 3.231.761.491 | 2.601.777.590 |
| | | | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 1.133.970.724 | 1.514.361.832 | 380.391.108 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | 0 | 269.120.000 | 269.120.000 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 0 | 22.264.000 | 22.264.000 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 0 | 0 | 0 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 0 | 0 | 0 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 0 | 275.357.500 | 275.357.500 |
| | | | Pengadaan Mebel Sekolah | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 1.134.183.392 | 2.881.437.900 | 1.747.254.508 |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Siswa | 0 | 587.281.200 | 587.281.200 |
| | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 1.812.325.575 | 1.666.769.175 | (145.556.400) |
| | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 0 | 0 | 0 |
| | | | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 404.795.500 | 160.368.000 | (244.427.500) |
| | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 8.746.413.878 | 8.746.413.878 | 0 |
| | **Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | | | **20.149.617.928** | **23.658.919.476** | **3.509.301.548** |

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) | Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jumlah Pendidikan Dasar** | | | **20.149.617.928** | **23.658.919.476** | **3.509.301.548** |
| | **Pendidikan Kesetaraan** | | | | | |
| | | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | | |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 |
| | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 |
| | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 266.400.000 | 266.400.000 | 0 |
| | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | | | **266.400.000** | **266.400.000** | **0** |
| | **Jumlah Pendidikan Kesetaraan** | | | **266.400.000** | **266.400.000** | **0** |
| | **Pendidikan Anak Usia Dini** | | | | | |
| | | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | | | | |
| | | | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 1.283.323.038 | 888.743.000 | (394.580.038) |
| | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 0 | 1.082.806.000 | 1.082.806.000 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 0 | 11.187.000 | 11.187.000 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pengadaan Mebel PAUD | 0 | 317.559.000 | 317.559.000 |
| | | | Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pengadaan Perlengkapan PAUD | 100.015.334 | 109.999.600 | 9.984.266 |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | 0 | 782.592.000 | 782.592.000 |
| | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) | Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 0 | 191.922.500 | 191.922.500 |
| | | | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 1.658.599.650 | 1.658.599.650 | 0 |
| | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 30.000.040 | 30.000.040 | 0 |
| | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | | | **3.071.938.062** | **5.073.408.790** | **2.001.470.728** |
| | **Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini** | | | **3.071.938.062** | **5.073.408.790** | **2.001.470.728** |
| | **Jumlah SPM Bidang Pendidikan** | | | **23.487.955.990** | **28.998.728.266** | **5.510.772.276** |
| | **B SPM Bidang Kesehatan** | | | | | |
| | **Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil** | | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 628.797.200 | 639.933.000 | 11.135.800 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **628.797.200** | **639.933.000** | **11.135.800** |
| | **Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil** | | | **628.797.200** | **639.933.000** | **11.135.800** |
| | **Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin** | | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 147.540.000 | 138.540.000 | (9.000.000) |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **147.540.000** | **138.540.000** | **(9.000.000)** |
| | **Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin** | | | **147.540.000** | **138.540.000** | **(9.000.000)** |
| | **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir** | | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 165.375.161 | 87.445.001 | (77.930.160) |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **165.375.161** | **87.445.001** | **(77.930.160)** |
| | **Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir** | | | **165.375.161** | **87.445.001** | **(77.930.160)** |
| | **Pelayanan Kesehatan Balita** | | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 475.080.000 | 644.073.945 | 168.993.945 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **475.080.000** | **644.073.945** | **168.993.945** |
| | **Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita** | | | **475.080.000** | **644.073.945** | **168.993.945** |
| | **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar** | | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) | Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 250.560.800 | 164.280.000 | (86.280.800) |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **250.560.800** | **164.280.000** | **(86.280.800)** |
| | **Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar** | | | **250.560.800** | **164.280.000** | **(86.280.800)** |
| | **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif** | | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 173.474.950 | 190.510.000 | 17.035.050 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **173.474.950** | **190.510.000** | **17.035.050** |
| | **Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif** | | | **173.474.950** | **190.510.000** | **17.035.050** |
| | **Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut** | | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 221.375.000 | 284.535.000 | 63.160.000 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **221.375.000** | **284.535.000** | **63.160.000** |
| | **Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut** | | | **221.375.000** | **284.535.000** | **63.160.000** |
| | **Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi** | | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 19.200.000 | 0 | (19.200.000) |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **19.200.000** | **0** | **(19.200.000)** |
| | **Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi** | | | **19.200.000** | **0** | **(19.200.000)** |
| | **Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat** | | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 35.018.000 | 35.018.000 | 0 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **35.018.000** | **35.018.000** | **0** |
| | **Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat** | | | **35.018.000** | **35.018.000** | **0** |
| | **Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis** | | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 186.910.800 | 94.240.000 | (92.670.800) |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **186.910.800** | **94.240.000** | **(92.670.800)** |
| | **Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis** | | | **186.910.800** | **94.240.000** | **(92.670.800)** |

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) | Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)** | | | | | |
| | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 17.100.000 | 17.100.000 | 0 |
| | **Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | **17.100.000** | **17.100.000** | **0** |
| | **Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)** | | | **17.100.000** | **17.100.000** | **0** |
| | **Jumlah SPM Bidang Kesehatan** | | | **2.320.431.911** | **2.295.674.946** | **(24.756.965)** |
| | **C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang** | | | | | |
| | **Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari** | | | | | |
| | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | 0 | 0 | 0 |
| | | | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 5.817.122.835 | 5.817.122.835 | 0 |
| | | | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 0 | 0 | 0 |
| | | | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 18.924.014.496 | 1.152.143.545 | (17.771.870.951) |
| | | | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM | 0 | 0 | 0 |
| | | | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | 0 | 0 | 0 |
| | | | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan | 0 | 0 | 0 |
| | | | Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 0 | 0 | 0 |
| | | | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) | Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | | | **24.741.137.331** | **6.969.266.380** | **(17.771.870.951)** |
| | **Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari** | | | **24.741.137.331** | **6.969.266.380** | **(17.771.870.951)** |
| | **Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik** | | | | | |
| | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | | | Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | 0 | 0 | 0 |
| | | | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 0 | 0 | 0 |
| | | | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 4.184.395.914 | 4.846.534.000 | 662.138.086 |
| | **Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | **4.184.395.914** | **4.846.534.000** | **662.138.086** |
| | **Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik** | | | **4.184.395.914** | **4.846.534.000** | **662.138.086** |
| | **Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang** | | | **28.925.533.245** | **11.815.800.380** | **(17.109.732.865)** |
| | **D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | | | | |
| | **Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota** | | | | | |
| | | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | | |
| | | | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | **Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | | | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** |
| | **Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota** | | | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** |
| | **Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** | | | **0** | **100.000.000** | **100.000.000** |
| | **E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum** | | | | | |
| | **Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum** | | | | | |

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) | Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 352.800.000 | 162.045.500 | (190.754.500) |
| | | | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 0 | 0 | 0 |
| | | | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 | 0 | 0 |
| | | | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | 0 | 0 | 0 |
| | | | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | **352.800.000** | **162.045.500** | **(190.754.500)** |
| | **Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum** | | | **352.800.000** | **162.045.500** | **(190.754.500)** |
| | **Pelayanan informasi rawan bencana** | | | | | |
| | | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | | | | |
| | | | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | 625.665.000 | 419.789.020 | (205.875.980) |
| | **Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | | | **625.665.000** | **419.789.020** | **(205.875.980)** |
| | **Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana** | | | **625.665.000** | **419.789.020** | **(205.875.980)** |
| | **Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** | | | | | |
| | | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | | | | |
| | | | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| | | | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 74.335.000 | 97.284.500 | 22.949.500 |

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) | Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 170.000.000 | 350.421.255 | 180.421.255 |
| | | | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | | | **244.335.000** | **447.705.755** | **203.370.755** |
| | **Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** | | | **244.335.000** | **447.705.755** | **203.370.755** |
| | **Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** | | | | | |
| | | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | | | | |
| | | | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| | | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 101.000.000 | 27.355.000 | (73.645.000) |
| | **Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | | | **101.000.000** | **27.355.000** | **(73.645.000)** |
| | **Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** | | | **101.000.000** | **27.355.000** | **(73.645.000)** |
| | **Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | | | | | |
| | | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | |
| | | | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| | | | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | 0 | 0 | 0 |
| | | | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| | | | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | 102.193.000 | 72.307.310 | (29.885.690) |
| | | | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Kegiatan | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) | Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | **102.193.000** | **72.307.310** | **(29.885.690)** |
| | **Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | | | **102.193.000** | **72.307.310** | **(29.885.690)** |
| | **Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum** | | | **1.425.993.000** | **1.129.202.585** | **(296.790.415)** |
| | F SPM Bidang Sosial | | | | | |
| | **Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti** | | | | | |
| | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | | | | |
| | | | Penyediaan Permakanan | 0 | 0 | 0 |
| | | | Penyediaan Sandang | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pemberian Layanan Rujukan | 228.000.000 | 348.000.000 | 120.000.000 |
| | **Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | | | **228.000.000** | **348.000.000** | **120.000.000** |
| | **Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti** | | | **228.000.000** | **348.000.000** | **120.000.000** |
| | **Jumlah SPM Bidang Sosial** | | | **228.000.000** | **348.000.000** | **120.000.000** |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | Uraian | RPJMD (Rp) | APBD (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 645.749.013.743 | 501.233.129.022 | 502.065.872.201 | 832.743.179 | 0 % |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 238.274.773.770 | 192.299.457.931 | 194.683.660.790 | 2.384.202.859 | 1 % |
| 1 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 147.218.035.820 | 149.175.258.510 | 144.008.309.328 | (5.166.949.182) | 3 % |
| 1 | 01 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 79.577.754.601 | 43.124.199.421 | 50.675.351.462 | 7.551.152.041 | 18 % |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 178.808.188.092 | 153.319.109.590 | 164.348.470.045 | 11.029.360.455 | 7 % |
| 1 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.335.362.109.975 | 95.499.000.643 | 93.147.752.351 | (2.351.248.292) | 2 % |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 1.237.562.271.022 | 56.315.869.371 | 70.433.190.286 | 14.117.320.915 | 25 % |
| 1 | 02 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 838.302.038 | 785.512.334 | 195.863.341 | (589.648.993) | 75 % |
| 1 | 02 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 2.053.462.579 | 718.727.242 | 571.664.067 | (147.063.175) | 20 % |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 170.188.292.604 | 119.711.167.849 | 100.739.090.149 | (18.972.077.700) | 16 % |
| 1 | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 34.952.176.000 | 17.132.547.544 | 14.101.700.098 | (3.030.847.446) | 18 % |
| 1 | 03 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 0 | 29.899.188.000 | 1.973.863.814 | (27.925.324.186) | 93 % |
| 1 | 03 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 17.798.221.658 | 24.741.137.331 | 6.969.266.380 | (17.771.870.951) | 72 % |

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | Uraian | RPJMD (Rp) | APBD (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| 1 | 03 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 3.478.479.803 | 750.000.000 | 839.188.000 | 89.188.000 | 12 % |
| 1 | 03 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 1.159.493.268 | 4.184.395.914 | 4.846.534.000 | 662.138.086 | 16 % |
| 1 | 03 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 1.663.397.911 | 201.800.000 | 678.734.142 | 476.934.142 | 236 % |
| 1 | 03 | 07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 4.369.719.482 | 0 | 2.566.919.440 | 2.566.919.440 | 100 % |
| 1 | 03 | 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 5.797.466.338 | 12.373.127.686 | 17.703.513.422 | 5.330.385.736 | 43 % |
| 1 | 03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 113.250.896.304 | 29.800.131.374 | 50.910.530.853 | 21.110.399.479 | 71 % |
| 1 | 03 | 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 695.695.961 | 129.744.000 | 9.744.000 | (120.000.000) | 92 % |
| 1 | 03 | 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1.159.493.268 | 499.096.000 | 139.096.000 | (360.000.000) | 72 % |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 11.594.932.676 | 419.890.796 | 3.622.285.575 | 3.202.394.779 | 763 % |
| 1 | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100 % |
| 1 | 04 | 03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 11.594.932.676 | 419.890.796 | 3.522.285.575 | 3.102.394.779 | 739 % |
| 1 | 05 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 34.737.433.425 | 25.409.748.016 | 26.780.214.833 | 1.370.466.817 | 5 % |
| 1 | 05 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 24.541.551.123 | 23.335.922.016 | 25.383.542.258 | 2.047.620.242 | 9 % |
| 1 | 05 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 3.859.251.594 | 1.000.633.000 | 402.471.490 | (598.161.510) | 60 % |
| 1 | 05 | 03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 3.119.036.890 | 971.000.000 | 894.849.775 | (76.150.225) | 8 % |

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | Uraian | RPJMD (Rp) | APBD (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| 1 | 05 | 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 3.217.593.818 | 102.193.000 | 99.351.310 | (2.841.690) | 3 % |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 12.145.393.176 | 10.073.754.840 | 11.892.150.809 | 1.818.395.969 | 18 % |
| 1 | 06 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.730.883.412 | 9.320.235.440 | 8.235.720.208 | (1.084.515.232) | 12 % |
| 1 | 06 | 02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 440.607.442 | 81.984.000 | 56.175.000 | (25.809.000) | 31 % |
| 1 | 06 | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 620.328.898 | 228.000.000 | 348.000.000 | 120.000.000 | 53 % |
| 1 | 06 | 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 831.801.454 | 345.635.400 | 3.154.355.601 | 2.808.720.201 | 813 % |
| 1 | 06 | 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 521.771.970 | 97.900.000 | 97.900.000 | 0 | 0 % |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 229.837.438.797 | 69.836.898.089 | 76.624.906.420 | 6.788.008.331 | 10 % |
| 2 | 07 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 3.958.425.604 | 1.899.662.466 | 2.695.022.698 | 795.360.232 | 42 % |
| 2 | 07 | 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1.968.819.568 | 230.000.000 | 300.860.000 | 70.860.000 | 31 % |
| 2 | 07 | 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1.868.842.493 | 1.669.662.466 | 2.394.162.698 | 724.500.232 | 43 % |
| 2 | 08 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1.173.000.000 | 1.284.136.900 | 1.316.525.660 | 32.388.760 | 3 % |
| 2 | 08 | 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 450.000.000 | 491.971.400 | 493.208.390 | 1.236.990 | 0 % |
| 2 | 08 | 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 723.000.000 | 792.165.500 | 823.317.270 | 31.151.770 | 4 % |
| 2 | 09 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 640.565.504 | 721.449.140 | 671.168.890 | (50.280.250) | 7 % |

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | Uraian | RPJMD (Rp) | APBD (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| 2 | 09 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 530.587.304 | 701.086.250 | 650.806.000 | (50.280.250) | 7 % |
| 2 | 09 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 109.978.200 | 20.362.890 | 20.362.890 | 0 | 0 % |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 18.185.647.246 | 1.156.230.930 | 1.618.727.600 | 462.496.670 | 40 % |
| 2 | 11 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 15.376.186.246 | 482.440.800 | 668.505.800 | 186.065.000 | 39 % |
| 2 | 11 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 200.000.000 | 130.134.732 | 218.878.100 | 88.743.368 | 68 % |
| 2 | 11 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 156.283.000 | 83.207.400 | 74.209.400 | (8.998.000) | 11 % |
| 2 | 11 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 543.757.000 | 62.103.000 | 110.289.000 | 48.186.000 | 78 % |
| 2 | 11 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 15.000.000 | 800.000 | 0 | (800.000) | 100 % |
| 2 | 11 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 571.921.000 | 109.115.800 | 52.867.300 | (56.248.500) | 52 % |
| 2 | 11 | 08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 125.000.000 | 54.378.400 | 65.824.200 | 11.445.800 | 21 % |
| 2 | 11 | 09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 70.000.000 | 51.492.198 | 3.168.000 | (48.324.198) | 94 % |

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | Uraian | RPJMD (Rp) | APBD (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| 2 | 11 | 10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 5.000.000 | 800.000 | 0 | (800.000) | 100 % |
| 2 | 11 | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 1.122.500.000 | 181.758.600 | 424.985.800 | 243.227.200 | 134 % |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 8.342.161.377 | 7.221.894.578 | 6.992.852.281 | (229.042.297) | 3 % |
| 2 | 12 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.526.709.508 | 6.388.501.578 | 6.528.303.364 | 139.801.786 | 2 % |
| 2 | 12 | 02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 838.816.869 | 471.391.700 | 305.201.575 | (166.190.125) | 35 % |
| 2 | 12 | 03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 540.331.000 | 231.313.800 | 116.678.342 | (114.635.458) | 50 % |
| 2 | 12 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 364.766.000 | 130.687.500 | 42.669.000 | (88.018.500) | 67 % |
| 2 | 13 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3.802.987.984 | 1.921.106.184 | 1.769.113.202 | (151.992.982) | 8 % |
| 2 | 13 | 02 | PROGRAM PENATAAN DESA | 324.380.000 | 126.797.000 | 110.233.608 | (16.563.392) | 13 % |
| 2 | 13 | 04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 2.187.071.984 | 1.381.894.184 | 1.379.016.344 | (2.877.840) | 0 % |
| 2 | 13 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 1.291.536.000 | 412.415.000 | 279.863.250 | (132.551.750) | 32 % |
| 2 | 14 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 90.032.200.665 | 2.198.190.328 | 1.879.682.564 | (318.507.764) | 14 % |
| 2 | 14 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 89.024.140.665 | 83.992.934 | 16.800.000 | (67.192.934) | 80 % |

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | Uraian | RPJMD (Rp) | APBD (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| 2 | 14 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 399.840.000 | 1.990.197.994 | 1.837.922.164 | (152.275.830) | 8 % |
| 2 | 14 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 258.220.000 | 123.999.400 | 24.960.400 | (99.039.000) | 80 % |
| 2 | 15 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 56.249.038.150 | 16.247.003.819 | 24.497.748.361 | 8.250.744.542 | 51 % |
| 2 | 15 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 30.752.372.492 | 14.761.050.064 | 13.826.874.255 | (934.175.809) | 6 % |
| 2 | 15 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 5.558.314.301 | 1.066.282.155 | 3.488.110.260 | 2.421.828.105 | 227 % |
| 2 | 15 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 35.314.537.603 | 419.671.600 | 7.182.763.846 | 6.763.092.246 | 1.612 % |
| 2 | 16 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 19.613.619.897 | 16.781.819.514 | 14.894.201.564 | (1.887.617.950) | 11 % |
| 2 | 16 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.174.012.697 | 7.063.245.374 | 5.528.765.998 | (1.534.479.376) | 22 % |
| 2 | 16 | 02 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 5.488.844.700 | 5.125.557.400 | 4.492.521.456 | (633.035.944) | 12 % |
| 2 | 16 | 03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | 6.950.762.500 | 4.593.016.740 | 4.872.914.110 | 279.897.370 | 6 % |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 9.819.118.235 | 8.452.231.021 | 7.857.195.962 | (595.035.059) | 7 % |
| 2 | 17 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.213.217.740 | 7.809.072.921 | 7.347.115.412 | (461.957.509) | 6 % |
| 2 | 17 | 03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 150.734.125 | 65.588.000 | 25.643.000 | (39.945.000) | 61 % |

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | Uraian | RPJMD (Rp) | APBD (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| 2 | 17 | 07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 666.708.629 | 81.100.000 | 98.425.000 | 17.325.000 | 21 % |
| 2 | 17 | 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 672.506.095 | 496.470.100 | 386.012.550 | (110.457.550) | 22 % |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 9.768.520.998 | 8.743.999.775 | 7.885.431.549 | (858.568.226) | 10 % |
| 2 | 18 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.802.624.998 | 7.476.823.975 | 6.850.237.969 | (626.586.006) | 8 % |
| 2 | 18 | 03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 275.000.000 | 280.000.900 | 234.415.380 | (45.585.520) | 16 % |
| 2 | 18 | 04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 740.896.000 | 608.000.000 | 421.603.300 | (186.396.700) | 31 % |
| 2 | 18 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 100.000.000 | 379.174.900 | 379.174.900 | 0 | 0 % |
| 2 | 19 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 18.135.594.500 | 1.519.940.934 | 2.365.676.929 | 845.735.995 | 56 % |
| 2 | 19 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 2.235.594.500 | 819.845.973 | 691.980.048 | (127.865.925) | 16 % |
| 2 | 19 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 14.000.000.000 | 499.999.900 | 1.473.652.720 | 973.652.820 | 195 % |
| 2 | 19 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 1.900.000.000 | 200.095.061 | 200.044.161 | (50.900) | 0 % |
| 2 | 20 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 1.295.984.672 | 193.218.000 | 114.987.600 | (78.230.400) | 40 % |
| 2 | 20 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 1.295.984.672 | 193.218.000 | 114.987.600 | (78.230.400) | 40 % |
| 2 | 21 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 335.000.000 | 170.763.800 | 79.246.000 | (91.517.800) | 54 % |
| 2 | 21 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 335.000.000 | 170.763.800 | 79.246.000 | (91.517.800) | 54 % |

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | Uraian | RPJMD (Rp) | APBD (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| 2 | 22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 3.033.447.907 | 280.611.600 | 840.695.760 | 560.084.160 | 200 % |
| 2 | 22 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 2.533.447.907 | 280.611.600 | 798.345.760 | 517.734.160 | 185 % |
| 2 | 22 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 500.000.000 | 0 | 42.350.000 | 42.350.000 | 100 % |
| 2 | 23 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 766.070.304 | 983.331.100 | 1.075.362.800 | 92.031.700 | 9 % |
| 2 | 23 | 02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 766.070.304 | 983.331.100 | 1.075.362.800 | 92.031.700 | 9 % |
| 2 | 24 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 62.242.000 | 61.308.000 | 71.267.000 | 9.959.000 | 16 % |
| 2 | 24 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 62.242.000 | 61.308.000 | 71.267.000 | 9.959.000 | 16 % |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 54.028.523.380 | 25.222.167.302 | 26.890.196.879 | 1.668.029.577 | 7 % |
| 3 | 25 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 27.376.223.846 | 15.105.032.642 | 14.555.571.564 | (549.461.078) | 4 % |
| 3 | 25 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 17.926.112.950 | 14.575.919.050 | 12.990.523.242 | (1.585.395.808) | 11 % |
| 3 | 25 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 6.214.883.914 | 241.993.820 | 1.221.530.122 | 979.536.302 | 405 % |
| 3 | 25 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 2.800.417.007 | 192.321.000 | 231.395.200 | 39.074.200 | 20 % |
| 3 | 25 | 06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 434.809.975 | 94.798.772 | 112.123.000 | 17.324.228 | 18 % |
| 3 | 26 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 15.683.750.359 | 8.258.324.216 | 8.732.005.661 | 473.681.445 | 6 % |
| 3 | 26 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.091.905.246 | 7.033.924.480 | 6.485.507.339 | (548.417.141) | 8 % |
| 3 | 26 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 4.243.745.359 | 221.745.313 | 1.176.020.648 | 954.275.335 | 430 % |

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | Uraian | RPJMD (Rp) | APBD (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| 3 | 26 | 03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 4.348.099.754 | 396.054.423 | 463.877.674 | 67.823.251 | 17 % |
| 3 | 26 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 0 | 606.600.000 | 606.600.000 | 0 | 0 % |
| 3 | 27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 4.022.545.175 | 949.955.669 | 679.773.664 | (270.182.005) | 28 % |
| 3 | 27 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 1.520.385.024 | 304.542.000 | 232.986.600 | (71.555.400) | 23 % |
| 3 | 27 | 03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 1.680.263.436 | 274.978.699 | 131.477.768 | (143.500.931) | 52 % |
| 3 | 27 | 04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 313.063.182 | 279.950.900 | 222.963.330 | (56.987.570) | 20 % |
| 3 | 27 | 07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 508.833.533 | 90.484.070 | 92.345.966 | 1.861.896 | 2 % |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 5.346.003.000 | 638.865.575 | 785.945.265 | 147.079.690 | 23 % |
| 3 | 30 | 02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 66.001.000 | 102.005.720 | 99.240.720 | (2.765.000) | 3 % |
| 3 | 30 | 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 400.001.000 | 486.889.855 | 653.145.105 | 166.255.250 | 34 % |
| 3 | 30 | 06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 90.000.000 | 49.970.000 | 33.559.440 | (16.410.560) | 33 % |
| 3 | 31 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 1.600.001.000 | 269.989.200 | 2.136.900.725 | 1.866.911.525 | 691 % |
| 3 | 31 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 1.600.001.000 | 269.989.200 | 2.136.900.725 | 1.866.911.525 | 691 % |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 95.776.815.784 | 90.359.351.131 | 91.363.870.615 | 1.004.519.484 | 1 % |
| 4 | 01 | | SEKRETARIAT DAERAH | 59.911.687.696 | 55.424.316.411 | 54.173.019.913 | (1.251.296.498) | 2 % |

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | Uraian | RPJMD (Rp) | APBD (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| 4 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 46.271.687.696 | 41.555.573.171 | 40.675.834.673 | (879.738.498) | 2 % |
| 4 | 01 | 02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 9.940.000.000 | 12.042.888.300 | 11.625.848.300 | (417.040.000) | 3 % |
| 4 | 01 | 03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 3.700.000.000 | 1.825.854.940 | 1.871.336.940 | 45.482.000 | 2 % |
| 4 | 02 | | SEKRETARIAT DPRD | 35.865.128.088 | 34.935.034.720 | 37.190.850.702 | 2.255.815.982 | 6 % |
| 4 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 21.586.355.530 | 19.411.357.260 | 20.126.442.242 | 715.084.982 | 4 % |
| 4 | 02 | 02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 14.278.772.558 | 15.523.677.460 | 17.064.408.460 | 1.540.731.000 | 10 % |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 161.228.986.894 | 187.959.911.975 | 166.279.518.971 | (21.680.393.004) | 12 % |
| 5 | 01 | | PERENCANAAN | 13.580.435.481 | 12.683.846.195 | 9.700.689.280 | (2.983.156.915) | 24 % |
| 5 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 11.493.478.484 | 10.579.443.595 | 8.742.383.373 | (1.837.060.222) | 17 % |
| 5 | 01 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 884.407.997 | 895.937.600 | 455.852.880 | (440.084.720) | 49 % |
| 5 | 01 | 03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.202.549.000 | 1.208.465.000 | 502.453.027 | (706.011.973) | 58 % |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | 125.618.175.363 | 163.967.526.118 | 148.012.957.293 | (15.954.568.825) | 10 % |
| 5 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 16.941.191.372 | 50.133.039.778 | 32.104.493.424 | (18.028.546.354) | 36 % |
| 5 | 02 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 104.857.676.741 | 111.427.074.490 | 113.370.937.919 | 1.943.863.429 | 2 % |
| 5 | 02 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 2.133.379.000 | 1.361.506.000 | 1.584.668.000 | 223.162.000 | 16 % |

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | Uraian | RPJMD (Rp) | APBD (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| 5 | 02 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 1.685.928.250 | 1.045.905.850 | 952.857.950 | (93.047.900) | 9 % |
| 5 | 03 | | KEPEGAWAIAN | 12.446.691.664 | 7.821.850.377 | 6.422.806.002 | (1.399.044.375) | 18 % |
| 5 | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.142.862.414 | 6.213.077.092 | 5.166.225.156 | (1.046.851.936) | 17 % |
| 5 | 03 | 02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 4.303.829.250 | 1.608.773.285 | 1.256.580.846 | (352.192.439) | 22 % |
| 5 | 04 | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 3.183.880.886 | 1.274.652.000 | 1.274.647.000 | (5.000) | 0 % |
| 5 | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3.183.880.886 | 1.274.652.000 | 1.274.647.000 | (5.000) | 0 % |
| 5 | 05 | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1.279.817.000 | 807.037.400 | 11.286.600 | (795.750.800) | 99 % |
| 5 | 05 | 02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1.279.817.000 | 807.037.400 | 11.286.600 | (795.750.800) | 99 % |
| 5 | 06 | | PENGELOLAAN PERBATASAN | 5.119.986.500 | 1.404.999.885 | 857.132.796 | (547.867.089) | 39 % |
| 5 | 06 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.119.986.500 | 1.404.999.885 | 857.132.796 | (547.867.089) | 39 % |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 16.359.500.000 | 12.563.659.281 | 11.615.350.300 | (948.308.981) | 8 % |
| 6 | 01 | | INSPEKTORAT DAERAH | 16.359.500.000 | 12.563.659.281 | 11.615.350.300 | (948.308.981) | 8 % |
| 6 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.709.500.000 | 10.549.680.281 | 10.125.249.457 | (424.430.824) | 4 % |
| 6 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 1.400.000.000 | 1.264.546.300 | 848.605.112 | (415.941.188) | 33 % |
| 6 | 01 | 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1.250.000.000 | 749.432.700 | 641.495.731 | (107.936.969) | 14 % |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 43.573.480.755 | 36.927.000.538 | 36.679.290.098 | (247.710.440) | 1 % |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | 43.573.480.755 | 36.927.000.538 | 36.679.290.098 | (247.710.440) | 1 % |
| 7 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 46.401.087.958 | 34.050.508.794 | 32.759.121.862 | (1.291.386.932) | 4 % |

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | Uraian | RPJMD (Rp) | APBD (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| | | | DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 265.113.000 | 117.855.500 | 117.855.500 | 0 | 0 % |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 6.208.584.063 | 2.259.760.450 | 3.339.609.772 | 1.079.849.322 | 48 % |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 1.053.590.000 | 309.352.694 | 308.410.064 | (942.630) | 0 % |
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 332.686.280 | 189.523.100 | 154.292.900 | (35.230.200) | 19 % |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 9.576.411.783 | 6.036.341.593 | 5.128.860.832 | (907.480.761) | 15 % |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 9.576.411.783 | 6.036.341.593 | 5.128.860.832 | (907.480.761) | 15 % |
| 8 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.597.696.205 | 4.593.852.575 | 3.892.976.914 | (700.875.661) | 15 % |
| 8 | 01 | 02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 1.730.000.000 | 73.941.400 | 55.941.400 | (18.000.000) | 24 % |
| 8 | 01 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 857.127.718 | 553.798.718 | 545.798.718 | (8.000.000) | 1 % |
| 8 | 01 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 260.000.000 | 60.289.600 | 57.272.600 | (3.017.000) | 5 % |
| 8 | 01 | 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 930.000.000 | 289.069.500 | 254.725.400 | (34.344.100) | 12 % |

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | Uraian | RPJMD (Rp) | APBD (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Jumlah | % |
| 8 | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 1.201.587.860 | 465.389.800 | 322.145.800 | (143.244.000) | 31 % |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 198.699.736.385 | 195.421.073.159 | 197.049.337.719 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 196.864.107.331 | 193.166.527.630 | 194.683.660.790 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 196.864.107.331 | 193.166.527.630 | 194.683.660.790 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 149.361.624.510 | 143.675.644.528 | 144.008.309.328 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 215.584.600 | 120.072.100 | 120.072.100 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 215.584.600 | 120.072.100 | 120.072.100 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 99.091.611.704 | 97.556.106.053 | 97.735.043.653 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 99.091.611.704 | 97.556.106.053 | 97.735.043.653 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 319.465.700 | 550.056.500 | 703.783.700 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 163.211.000 | 393.801.800 | 547.529.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 156.254.700 | 156.254.700 | 156.254.700 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.693.481.770 | 1.405.335.815 | 1.405.335.815 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 36.449.600 | 28.642.038 | 28.642.038 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 226.761.290 | 215.758.222 | 215.758.222 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 31.125.270 | 26.923.024 | 26.923.024 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 356.807.110 | 221.794.831 | 221.794.831 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 78.512.500 | 58.510.700 | 58.510.700 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 963.826.000 | 853.707.000 | 853.707.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 47.671.484.736 | 43.864.207.720 | 43.864.207.720 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 161.263.400 | 171.028.100 | 171.028.100 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 65.450.000 | 27.225.100 | 27.225.100 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 47.404.771.336 | 43.625.954.520 | 43.625.954.520 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 369.996.000 | 179.866.340 | 179.866.340 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.750.000 | 11.160.000 | 11.160.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 257.873.000 | 102.487.000 | 102.487.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 76.373.000 | 66.219.340 | 66.219.340 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 47.502.482.821 | 49.490.883.102 | 50.675.351.462 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 22.822.378.485 | 23.186.243.516 | 23.658.919.476 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | 1.321.362.400 | 1.321.362.400 | 1.321.362.400 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 1.541.180.100 | 1.586.015.100 | 1.586.015.100 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 665.409.000 | 665.409.000 | 665.409.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 730.998.000 | 730.998.000 | 730.998.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 2.829.542.600 | 3.070.873.931 | 3.231.761.491 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah | 1.514.361.832 | 1.514.361.832 | 1.514.361.832 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | 269.120.000 | 269.120.000 | 269.120.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 09 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 22.264.000 | 22.264.000 | 22.264.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 13 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 79.898.500 | 197.173.900 | 275.357.500 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Mebel Sekolah | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 2.689.597.900 | 2.804.701.900 | 2.881.437.900 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | 195.109.200 | 430.412.400 | 587.281.200 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 1.812.325.575 | 1.666.769.175 | 1.666.769.175 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 23 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 404.795.500 | 160.368.000 | 160.368.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 8.746.413.878 | 8.746.413.878 | 8.746.413.878 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 20.495.467.146 | 21.414.488.316 | 21.676.623.196 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | 500.871.000 | 500.868.680 | 500.868.680 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 4.024.862.500 | 4.024.857.576 | 4.024.857.576 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 1.410.492.088 | 1.410.491.805 | 1.410.491.805 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 06 | Pembangunan Laboratorium | 5.336.521.308 | 5.336.521.088 | 5.336.521.088 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 09 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah | 782.002.664 | 781.996.511 | 781.996.511 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 10 | Pembangunan Fasilitas Parkir | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 804.780.500 | 992.310.020 | 1.117.329.700 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 13 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 15 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | 97.724.000 | 97.724.000 | 97.724.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 21 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | 3.234.000 | 3.234.000 | 3.234.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 20.812.000 | 20.812.000 | 20.812.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 25 | Pengadaan Mebel Sekolah | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | 1.095.386.300 | 1.095.384.220 | 1.095.384.220 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 28 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | 37.950.000 | 443.598.180 | 580.713.380 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 1.782.034.925 | 2.068.390.575 | 2.068.390.575 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 34 | Perlengkapan Belajar Peserta Didik | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 36 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 10.496.200 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 4.588.299.661 | 4.588.299.661 | 4.588.299.661 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 3.918.237.190 | 4.623.751.270 | 5.073.408.790 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 867.774.800 | 888.743.000 | 888.743.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 933.176.700 | 1.022.954.280 | 1.082.806.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 11.187.000 | 11.187.000 | 11.187.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 04 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 07 | Pengadaan Mebel PAUD | 317.559.000 | 317.559.000 | 317.559.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 08 | Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 09 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | 99.940.000 | 109.999.600 | 109.999.600 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 10 | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | 0 | 469.555.200 | 782.592.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 11 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | 0 | 115.153.500 | 191.922.500 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 1.658.599.650 | 1.658.599.650 | 1.658.599.650 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 30.000.040 | 30.000.040 | 30.000.040 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 266.400.000 | 266.400.000 | 266.400.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 04 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 07 | Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 08 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 09 | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 10 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 266.400.000 | 266.400.000 | 266.400.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 15 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.01 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.02 | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | 2.01 | | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1.835.629.054 | 2.254.545.529 | 2.365.676.929 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1.835.629.054 | 2.254.545.529 | 2.365.676.929 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 819.845.973 | 691.980.048 | 691.980.048 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 819.845.973 | 691.980.048 | 691.980.048 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | 18.746.811 | 18.746.811 | 18.746.811 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 07 | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 08 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 09 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | 801.099.162 | 673.233.237 | 673.233.237 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.02 | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.02 | 02 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 815.688.920 | 1.362.521.320 | 1.473.652.720 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.02 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 295.400.000 | 295.400.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 01 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 02 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | 150.000.000 | 45.400.000 | 45.400.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 50.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 99.999.900 | 299.999.900 | 299.999.900 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 01 | Seleksi Atlet Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | 99.999.900 | 299.999.900 | 299.999.900 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 04 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.04 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.04 | 01 | Standardisasi Organisasi Keolahragaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.04 | 02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 315.689.020 | 567.121.420 | 678.252.820 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 01 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 02 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 03 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | 315.689.020 | 567.121.420 | 678.252.820 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 05 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 200.094.161 | 200.044.161 | 200.044.161 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | 200.094.161 | 200.044.161 | 200.044.161 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 200.094.161 | 200.044.161 | 200.044.161 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 03 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 06 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 07 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 08 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 164.446.846.292 | 165.807.293.145 | 166.228.152.609 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 162.248.655.964 | 163.877.610.581 | 164.348.470.045 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 162.248.655.964 | 163.877.610.581 | 164.348.470.045 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 95.945.348.553 | 92.213.250.352 | 93.147.752.351 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 937.808.000 | 935.608.000 | 935.608.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 937.808.000 | 935.608.000 | 935.608.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 57.555.139.941 | 59.308.614.971 | 57.242.646.599 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 56.298.039.941 | 58.051.514.971 | 55.985.546.599 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.257.100.000 | 1.257.100.000 | 1.257.100.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 60.500.000 | 14.600.000 | 14.600.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 60.500.000 | 14.600.000 | 14.600.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 124.580.000 | 1 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 124.580.000 | 1 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5.421.328.503 | 5.414.740.029 | 5.371.707.028 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 161.212.360 | 383.146.798 | 333.146.798 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 547.246.933 | 499.961.811 | 557.711.811 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 377.089.500 | 389.040.189 | 389.040.189 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2.730.357.810 | 2.821.468.640 | 2.799.815.639 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 429.096.900 | 384.163.601 | 375.033.601 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.176.325.000 | 936.958.990 | 916.958.990 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 30.280.021.069 | 25.253.292.109 | 28.283.126.382 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 630.760.904 | 688.313.376 | 688.313.376 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.297.335.053 | 1.149.815.053 | 1.136.615.053 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 222.577.000 | 266.815.568 | 244.082.768 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 28.129.348.112 | 23.148.348.112 | 26.214.115.185 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.565.971.040 | 1.286.395.242 | 1.300.064.342 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 470.329.500 | 297.434.501 | 289.453.601 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 253.027.500 | 189.308.500 | 215.958.500 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 10.490.000 | 10.490.000 | 10.490.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 832.124.040 | 789.162.241 | 784.162.241 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 64.799.067.835 | 70.896.832.820 | 70.433.190.286 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 31.527.355.525 | 35.336.557.564 | 35.495.835.667 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 3.044.718.600 | 3.163.245.347 | 3.242.263.178 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 7.308.235.374 | 8.179.173.424 | 8.199.224.224 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 7.463.988.179 | 8.939.718.287 | 8.990.909.487 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 16 | Pengadaan Obat, Vaksin | 11.523.379.387 | 12.872.310.566 | 12.981.328.838 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | 1.923.033.985 | 1.801.250.440 | 1.801.250.440 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 264.000.000 | 380.859.500 | 280.859.500 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 33.271.712.310 | 35.560.275.256 | 34.937.354.619 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 628.797.200 | 639.933.000 | 639.933.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 147.540.000 | 138.540.000 | 138.540.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 165.375.161 | 87.445.001 | 87.445.001 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 475.080.000 | 644.073.945 | 644.073.945 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 250.560.800 | 164.280.000 | 164.280.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 173.474.950 | 190.510.000 | 190.510.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 221.375.000 | 284.535.000 | 284.535.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 19.200.000 | 1 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 35.018.000 | 35.018.000 | 35.018.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 186.910.800 | 94.240.000 | 94.240.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 17.100.000 | 17.100.000 | 17.100.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 104.700.000 | 108.900.000 | 108.900.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 405.852.000 | 604.682.000 | 604.682.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 189.840.000 | 170.550.001 | 170.550.001 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 279.541.500 | 296.051.000 | 296.051.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 928.650.339 | 1.165.665.842 | 1.165.665.842 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1.343.722.151 | 896.602.790 | 896.602.790 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 35.310.000 | 40.550.000 | 40.550.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 29.440.000 | 29.440.000 | 29.440.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 3.204.943.595 | 3.548.068.837 | 3.278.068.837 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 14.292.003.000 | 14.365.054.156 | 13.945.054.156 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 27 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 177.720.000 | 81.970.000 | 81.970.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 1.453.265.800 | 2.826.761.251 | 2.826.761.251 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 3.155.802.905 | 3.991.465.553 | 3.991.465.553 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 153.660.000 | 153.660.000 | 153.660.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 85.700.000 | 89.820.000 | 89.820.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 4.832.707.609 | 4.635.437.479 | 4.702.516.843 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 38 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 278.421.500 | 259.921.400 | 259.921.400 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 785.512.334 | 195.863.342 | 195.863.341 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.01 | | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.01 | 02 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.02 | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 485.512.334 | 1 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 01 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | 485.512.334 | 1 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.03 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 300.000.000 | 195.863.341 | 195.863.341 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.03 | 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 300.000.000 | 195.863.341 | 195.863.341 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.03 | | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.03 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.05 | | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.05 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.06 | | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.06 | 01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Lanjut Pengawasan | | | |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.06 | 02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 718.727.242 | 571.664.067 | 571.664.067 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 345.370.992 | 192.628.692 | 192.628.692 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 345.370.992 | 192.628.692 | 192.628.692 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.02 | | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 373.356.250 | 379.035.375 | 379.035.375 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.02 | 01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 373.356.250 | 379.035.375 | 379.035.375 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2.198.190.328 | 1.929.682.564 | 1.879.682.564 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2.198.190.328 | 1.929.682.564 | 1.879.682.564 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 83.992.934 | 16.800.000 | 16.800.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 83.992.934 | 16.800.000 | 16.800.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 83.992.934 | 16.800.000 | 16.800.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.01 | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 12 | Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 13 | Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 15 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 03 | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 05 | Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 14 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 1.990.197.994 | 1.837.922.164 | 1.837.922.164 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 452.815.000 | 452.815.000 | 452.815.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 03 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK | 452.815.000 | 452.815.000 | 452.815.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 919.062.994 | 766.787.164 | 766.787.164 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 297.372.500 | 297.372.500 | 297.372.500 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 41.023.500 | 41.023.500 | 41.023.500 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 297.667.044 | 266.741.244 | 266.741.244 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 09 | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 10 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 282.999.950 | 161.649.920 | 161.649.920 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.04 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 618.320.000 | 618.320.000 | 618.320.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | 463.070.000 | 463.070.000 | 463.070.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 04 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | 155.250.000 | 155.250.000 | 155.250.000 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 123.999.400 | 74.960.400 | 24.960.400 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.01 | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 03 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.02 | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 123.999.400 | 74.960.400 | 24.960.400 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 123.999.400 | 74.960.400 | 24.960.400 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 16 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 16 | 02 | | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 13 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 93.711.018.500 | 120.720.553.882 | 104.361.375.724 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 93.711.018.500 | 120.720.553.882 | 104.361.375.724 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 92.492.562.204 | 117.112.392.245 | 100.739.090.149 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 16.494.003.244 | 13.828.210.220 | 14.101.700.098 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.914.512.811 | 7.123.370.190 | 7.123.370.190 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.844.652.811 | 6.053.510.190 | 6.053.510.190 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.069.860.000 | 1.069.860.000 | 1.069.860.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 203.294.850 | 338.824.750 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 203.294.850 | 338.824.750 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3.403.861.651 | 3.219.450.551 | 3.357.410.529 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.024.970.651 | 1.790.559.551 | 1.928.519.529 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1.378.891.000 | 1.428.891.000 | 1.428.891.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.645.767.694 | 2.752.233.541 | 2.752.233.541 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100.000.000 | 1 | 1 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.545.767.694 | 2.752.233.540 | 2.752.233.540 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 484.861.088 | 484.861.088 | 484.861.088 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 98.827.000 | 98.827.000 | 98.827.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 386.034.088 | 386.034.088 | 386.034.088 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 890.062.548 | 1.953.583.560 | 1.973.863.814 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 890.062.548 | 1.823.710.560 | 1.757.408.814 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku | 494.923.000 | 494.923.000 | 494.923.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 03 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 06 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | 0 | 48.205.800 | 80.343.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 09 | Pembangunan Tanggul Sungai | 298.394.548 | 389.078.548 | 449.534.548 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 10 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 96.745.000 | 891.503.212 | 732.608.266 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 17 | Pembangunan Breakwater | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 18 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 21 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 24 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 32 | Rehabilitasi Breakwater | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 46 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 49 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 53 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 59 | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 129.873.000 | 216.455.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 02 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 0 | 59.616.000 | 99.360.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 0 | 70.257.000 | 117.095.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 6.871.049.857 | 6.946.826.380 | 6.969.266.380 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 6.871.049.857 | 6.946.826.380 | 6.969.266.380 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 02 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 03 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 5.817.122.835 | 5.817.122.835 | 5.817.122.835 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 05 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 06 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 1.053.927.022 | 1.129.703.545 | 1.152.143.545 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 08 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 11 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 14 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 15 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 16 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 18 | Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 20 | Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 750.000.000 | 839.188.000 | 839.188.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 2.01 | | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | 750.000.000 | 839.188.000 | 839.188.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 | 44.594.000 | 44.594.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 03 | Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS | 750.000.000 | 794.594.000 | 794.594.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 08 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 4.846.534.000 | 4.846.534.000 | 4.846.534.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4.846.534.000 | 4.846.534.000 | 4.846.534.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 05 | Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 06 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 07 | Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 08 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 12 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 4.846.534.000 | 4.846.534.000 | 4.846.534.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 542.838.342 | 678.734.142 | 678.734.142 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 542.838.342 | 678.734.142 | 678.734.142 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 03 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 05 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 341.038.342 | 453.889.142 | 453.889.142 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 06 | Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 07 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 12 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | 201.800.000 | 224.845.000 | 224.845.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 07 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 330.143.500 | 2.310.642.120 | 2.566.919.440 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 07 | 2.01 | | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 330.143.500 | 2.310.642.120 | 2.566.919.440 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 07 | 2.01 | 01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 330.143.500 | 2.310.642.120 | 2.566.919.440 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 07 | 2.01 | 02 | Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 07 | 2.01 | 03 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 07 | 2.01 | 04 | Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 14.342.686.583 | 16.929.304.476 | 17.703.513.422 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 14.342.686.583 | 16.929.304.476 | 17.703.513.422 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 149.455.000 | 149.455.000 | 149.455.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 14.193.231.583 | 16.779.849.476 | 17.554.058.422 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 03 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 04 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 13 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 09 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 2.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 02 | Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 06 | Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 46.796.404.130 | 68.630.529.347 | 50.910.530.853 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 46.796.404.130 | 68.630.529.347 | 50.910.530.853 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 02 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 05 | Pembangunan Jalan | 18.678.182.304 | 37.289.498.722 | 37.467.596.282 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 08 | Rekonstruksi Jalan | 8.084.548.175 | 8.901.370.578 | 8.084.548.175 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 09 | Rehabilitasi Jalan | 350.000.000 | 603.019.200 | 798.376.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 12 | Pembangunan Jembatan | 19.683.673.651 | 21.836.640.847 | 4.560.010.396 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 16 | Penggantian Jembatan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 18 | Rehabilitasi Jembatan | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 129.744.000 | 9.744.000 | 9.744.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 05 | Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.03 | | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.03 | 03 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.04 | | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 129.744.000 | 9.744.000 | 9.744.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.04 | 01 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.04 | 02 | Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 129.744.000 | 9.744.000 | 9.744.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 499.096.000 | 139.096.000 | 139.096.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.01 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 206.960.000 | 11.960.000 | 11.960.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 206.960.000 | 11.960.000 | 11.960.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 101.140.000 | 66.140.000 | 66.140.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | 101.140.000 | 66.140.000 | 66.140.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.03 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 190.996.000 | 60.996.000 | 60.996.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.03 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 190.996.000 | 60.996.000 | 60.996.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1.218.456.296 | 3.608.161.637 | 3.622.285.575 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 0 | 0 | 100.000.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.03 | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 100.000.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.03 | 05 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 100.000.000 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 1.218.456.296 | 3.608.161.637 | 3.522.285.575 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.01 | | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | 700.000.000 | 2.200.000.001 | 2.199.999.739 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | 700.000.000 | 2.200.000.001 | 2.199.999.739 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.02 | | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 518.456.296 | 1.408.161.636 | 1.322.285.836 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.02 | 01 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 0 | 89.705.340 | 149.508.900 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.02 | 02 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | 518.456.296 | 1.318.456.296 | 1.172.776.936 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 | | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 02 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 03 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 02 | 2.01 | | Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 05 | | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 05 | 2.01 | | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 05 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 09 | | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 09 | 2.01 | | Penerbitan Izin Membuka Tanah | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 09 | 2.01 | 02 | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 10 | | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 10 | 2.01 | | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 10 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 10 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 27.044.000 | 27.044.000 | 27.044.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 27.044.000 | 27.044.000 | 27.044.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN | 27.044.000 | 27.044.000 | 27.044.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MASYARAKAT | | | |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 27.044.000 | 27.044.000 | 27.044.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.04 | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 27.044.000 | 27.044.000 | 27.044.000 |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.04 | 02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | 27.044.000 | 27.044.000 | 27.044.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 9.668.797.428 | 11.088.045.973 | 11.053.645.973 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 9.668.797.428 | 11.088.045.973 | 11.053.645.973 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 9.668.797.428 | 11.088.045.973 | 11.053.645.973 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.600.512.928 | 10.193.196.198 | 10.158.796.198 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.222.561.050 | 4.705.031.543 | 4.670.631.543 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.059.145.050 | 4.541.615.543 | 4.507.215.543 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 163.416.000 | 163.416.000 | 163.416.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.192.667.200 | 980.982.057 | 980.982.057 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.581.000 | 5.581.000 | 5.581.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 309.239.500 | 309.155.500 | 309.155.500 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.019.000 | 0 | 0 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 159.615.700 | 137.975.086 | 137.975.086 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.750.000 | 9.800.000 | 9.800.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 676.462.000 | 518.470.471 | 518.470.471 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 383.345.000 | 381.343.000 | 381.343.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 383.345.000 | 381.343.000 | 381.343.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.627.449.648 | 4.023.755.808 | 4.023.755.808 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 80.832.000 | 77.232.000 | 77.232.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.546.617.648 | 3.946.523.808 | 3.946.523.808 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 174.490.030 | 102.083.790 | 102.083.790 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 174.490.030 | 102.083.790 | 102.083.790 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 07 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 1.068.284.500 | 894.849.775 | 894.849.775 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 625.665.000 | 419.789.020 | 419.789.020 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | 625.665.000 | 419.789.020 | 419.789.020 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 341.619.500 | 447.705.755 | 447.705.755 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 171.619.500 | 97.284.500 | 97.284.500 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 07 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 170.000.000 | 350.421.255 | 350.421.255 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 101.000.000 | 27.355.000 | 27.355.000 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 101.000.000 | 27.355.000 | 27.355.000 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 16.311.822.588 | 15.737.499.860 | 15.699.524.860 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 16.311.822.588 | 15.737.499.860 | 15.699.524.860 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 17 | Pembangunan Breakwater | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 16.311.822.588 | 15.737.499.860 | 15.699.524.860 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 15.236.040.588 | 15.262.721.060 | 15.224.746.060 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 62.916.830 | 61.838.059 | 61.838.059 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7.264.830 | 7.228.569 | 7.228.569 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 55.652.000 | 54.609.490 | 54.609.490 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.752.894.560 | 5.760.558.843 | 5.704.247.831 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.592.585.060 | 5.600.274.513 | 5.543.963.501 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 156.000.000 | 156.000.000 | 156.000.000 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.309.500 | 4.284.330 | 4.284.330 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 762.155.000 | 729.983.578 | 729.983.578 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.762.000 | 8.750.830 | 8.750.830 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 81.378.000 | 81.378.000 | 81.378.000 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18.500.000 | 16.861.651 | 16.861.651 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 105.405.000 | 95.442.992 | 95.442.992 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17.500.000 | 14.124.105 | 14.124.105 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 530.610.000 | 513.426.000 | 513.426.000 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 558.651.500 | 558.431.500 | 558.431.500 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | 228.651.500 | 228.651.500 | 228.651.500 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 330.000.000 | 329.780.000 | 329.780.000 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.895.657.328 | 7.974.973.110 | 7.993.309.122 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 95.097.200 | 75.710.644 | 75.710.644 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 75.825.600 | 75.825.600 | 75.825.600 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 7.724.734.528 | 7.823.436.866 | 7.841.772.878 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 167.765.370 | 140.935.970 | 140.935.970 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 143.815.370 | 131.699.970 | 131.699.970 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 23.950.000 | 9.236.000 | 9.236.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.000.633.000 | 402.471.490 | 402.471.490 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 583.163.000 | 226.097.240 | 226.097.240 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 352.800.000 | 162.045.500 | 162.045.500 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 223.865.000 | 63.751.740 | 63.751.740 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 07 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 6.498.000 | 300.000 | 300.000 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 08 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 09 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 10 | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 242.996.000 | 76.374.250 | 76.374.250 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 72.091.000 | 51.671.500 | 51.671.500 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 153.575.000 | 24.502.750 | 24.502.750 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 17.330.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.03 | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | 174.474.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.03 | 01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 174.474.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 75.149.000 | 72.307.310 | 72.307.310 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 75.149.000 | 72.307.310 | 72.307.310 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 03 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 04 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 05 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 07 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | 75.149.000 | 72.307.310 | 72.307.310 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 08 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 09 | Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.02 | | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.02 | 01 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.02 | 02 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.03 | | Investigasi Kejadian Kebakaran | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.03 | 01 | Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.04 | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.04 | 02 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6.036.341.593 | 5.113.860.832 | 5.128.860.832 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | | | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 6.036.341.593 | 5.113.860.832 | 5.128.860.832 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6.036.341.593 | 5.113.860.832 | 5.128.860.832 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.593.852.575 | 3.892.976.914 | 3.892.976.914 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.967.900 | 5.485.000 | 5.485.000 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.981.000 | 1.870.000 | 1.870.000 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 785.000 | 675.000 | 675.000 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.650.000 | 800.000 | 800.000 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.447.500 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 853.400 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.251.000 | 2.140.000 | 2.140.000 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.426.115.921 | 2.866.661.700 | 2.866.661.700 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.300.215.921 | 2.740.761.700 | 2.740.761.700 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 125.900.000 | 125.900.000 | 125.900.000 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 317.326.200 | 249.959.200 | 249.959.200 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 41.434.300 | 35.175.300 | 35.175.300 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.245.000 | 3.965.000 | 3.965.000 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 56.356.900 | 46.126.900 | 46.126.900 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.510.000 | 24.938.000 | 24.938.000 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 179.780.000 | 139.754.000 | 139.754.000 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 195.876.650 | 195.413.000 | 195.413.000 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 195.876.650 | 195.413.000 | 195.413.000 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 617.215.904 | 559.278.014 | 559.278.014 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 16.200.000 | 13.200.000 | 13.200.000 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18.864.000 | 25.418.000 | 25.418.000 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26.240.000 | 26.240.000 | 26.240.000 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 555.911.904 | 494.420.014 | 494.420.014 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 28.350.000 | 16.180.000 | 16.180.000 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28.350.000 | 16.180.000 | 16.180.000 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 73.941.400 | 55.941.400 | 55.941.400 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 73.941.400 | 55.941.400 | 55.941.400 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 73.941.400 | 55.941.400 | 55.941.400 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 553.798.718 | 545.798.718 | 545.798.718 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 553.798.718 | 545.798.718 | 545.798.718 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | 518.048.718 | 518.048.718 | 518.048.718 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 35.750.000 | 27.750.000 | 27.750.000 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 60.289.600 | 57.272.600 | 57.272.600 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 04 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 60.289.600 | 57.272.600 | 57.272.600 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 04 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 04 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 60.289.600 | 57.272.600 | 57.272.600 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 05 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 289.069.500 | 239.725.400 | 254.725.400 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 289.069.500 | 239.725.400 | 254.725.400 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 42.344.100 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 246.725.400 | 239.725.400 | 254.725.400 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 06 | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 465.389.800 | 322.145.800 | 322.145.800 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 465.389.800 | 322.145.800 | 322.145.800 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 36.960.300 | 32.704.300 | 32.704.300 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 79.024.300 | 58.275.300 | 58.275.300 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 85.847.000 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 71.492.900 | 56.403.900 | 56.403.900 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 58.527.100 | 45.469.100 | 45.469.100 |
| 1.05.8.01.0.00.02.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 133.538.200 | 129.293.200 | 129.293.200 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | | | | | | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 12.964.921.760 | 13.183.641.204 | 14.663.713.507 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 10.073.754.840 | 10.508.120.808 | 11.892.150.809 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 10.073.754.840 | 10.508.120.808 | 11.892.150.809 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.320.235.440 | 8.235.720.208 | 8.235.720.208 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 125.152.800 | 94.082.800 | 94.082.800 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 91.427.400 | 76.487.400 | 76.487.400 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 33.725.400 | 17.595.400 | 17.595.400 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.617.859.024 | 5.523.461.881 | 5.523.461.881 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.458.315.824 | 5.370.678.681 | 5.370.678.681 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 148.800.000 | 142.040.000 | 142.040.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.743.200 | 10.743.200 | 10.743.200 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 28.200.000 | 28.200.000 | 28.200.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 28.200.000 | 28.200.000 | 28.200.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 258.208.200 | 321.916.360 | 321.916.360 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.530.000 | 2.970.000 | 2.970.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.770.200 | 6.583.360 | 6.583.360 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 21.400.000 | 16.855.000 | 16.855.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 199.508.000 | 269.508.000 | 269.508.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 527.627.000 | 445.959.815 | 445.959.815 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 527.627.000 | 445.959.815 | 445.959.815 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.717.005.416 | 1.783.325.352 | 1.783.325.352 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 64.553.400 | 60.553.400 | 60.553.400 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 42.090.000 | 76.320.000 | 76.320.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.610.362.016 | 1.646.451.952 | 1.646.451.952 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 46.183.000 | 38.774.000 | 38.774.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 23.433.000 | 19.024.000 | 19.024.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 22.750.000 | 19.750.000 | 19.750.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 81.984.000 | 56.175.000 | 56.175.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 81.984.000 | 56.175.000 | 56.175.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 41.043.000 | 22.193.000 | 22.193.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 40.941.000 | 33.982.000 | 33.982.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 05 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 228.000.000 | 348.000.000 | 348.000.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 228.000.000 | 348.000.000 | 348.000.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Permakanan | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 02 | Penyediaan Sandang | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 12 | Pemberian Layanan Rujukan | 228.000.000 | 348.000.000 | 348.000.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 13 | Pemberian Layanan Rujukan | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 05 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 345.635.400 | 1.770.325.600 | 3.154.355.601 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 345.635.400 | 1.770.325.600 | 3.154.355.601 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 187.875.400 | 165.695.600 | 165.695.600 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 157.760.000 | 127.340.000 | 127.340.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 0 | 1.477.290.000 | 2.861.320.001 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 06 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 97.900.000 | 97.900.000 | 97.900.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 97.900.000 | 97.900.000 | 97.900.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.02 | 02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 97.900.000 | 97.900.000 | 97.900.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 2.891.166.920 | 2.675.520.396 | 2.771.562.698 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 08 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 1.284.136.900 | 1.220.481.410 | 1.316.525.660 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 08 | 02 | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 491.971.400 | 493.208.390 | 493.208.390 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.01 | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 91.978.500 | 93.215.490 | 93.215.490 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | 91.978.500 | 93.215.490 | 93.215.490 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.01 | 04 | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 399.992.900 | 399.992.900 | 399.992.900 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.03 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 399.992.900 | 399.992.900 | 399.992.900 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 08 | 06 | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 792.165.500 | 727.273.020 | 823.317.270 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 08 | 06 | 2.01 | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 792.165.500 | 727.273.020 | 823.317.270 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 08 | 06 | 2.01 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 738.029.500 | 682.263.140 | 778.307.390 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 08 | 06 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 54.136.000 | 45.009.880 | 45.009.880 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1.607.030.020 | 1.455.038.986 | 1.455.037.038 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 02 | | | PROGRAM PENATAAN DESA | 125.357.000 | 108.793.608 | 108.793.608 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Penataan Desa | 125.357.000 | 108.793.608 | 108.793.608 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 02 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 02 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 02 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | 125.357.000 | 108.793.608 | 108.793.608 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 04 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 1.069.258.020 | 1.066.382.128 | 1.066.380.180 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 1.069.258.020 | 1.066.382.128 | 1.066.380.180 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 840.312.820 | 835.309.428 | 835.307.480 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 134.322.800 | 140.910.300 | 140.910.300 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 43.268.000 | 38.808.000 | 38.808.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | 48.950.000 | 48.950.000 | 48.950.000 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 2.404.400 | 2.404.400 | 2.404.400 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 412.415.000 | 279.863.250 | 279.863.250 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 05 | 2.01 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 412.415.000 | 279.863.250 | 279.863.250 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 0 | 0 | 0 |
| 1.06.2.08.2.13.03.0000 | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 412.415.000 | 279.863.250 | 279.863.250 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 7.221.894.578 | 6.984.391.425 | 6.992.852.281 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 7.221.894.578 | 6.984.391.425 | 6.992.852.281 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 7.221.894.578 | 6.984.391.425 | 6.992.852.281 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.388.501.578 | 6.519.842.508 | 6.528.303.364 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 16.710.000 | 7.200.000 | 7.200.000 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.355.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8.355.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.078.890.753 | 4.216.366.566 | 4.216.366.566 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.942.379.753 | 4.082.756.566 | 4.082.756.566 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 131.160.000 | 131.160.000 | 131.160.000 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.351.000 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 739.712.225 | 686.204.620 | 675.669.860 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0 | 0 | 0 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 322.579.025 | 172.938.000 | 173.838.000 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12.912.000 | 10.812.000 | 10.812.000 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 34.676.000 | 18.700.000 | 18.700.000 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.757.200 | 17.657.200 | 17.657.200 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.750.000 | 2.741.420 | 2.741.420 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 336.038.000 | 463.356.000 | 451.921.240 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 34.850.000 | 68.851.000 | 68.851.000 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 34.850.000 | 68.851.000 | 68.851.000 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | 0 | 0 | 0 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.245.059.180 | 1.275.730.902 | 1.294.726.518 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 90.601.500 | 90.601.500 | 91.301.500 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 88.720.720 | 86.920.720 | 86.920.720 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.065.736.960 | 1.098.208.682 | 1.116.504.298 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 273.279.420 | 265.489.420 | 265.489.420 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5.000.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 18.280.000 | 12.790.000 | 12.790.000 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 249.999.420 | 249.999.420 | 249.999.420 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 471.391.700 | 305.201.575 | 305.201.575 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 471.391.700 | 305.201.575 | 305.201.575 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 92.204.100 | 14.837.000 | 14.837.000 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 197.850.000 | 184.195.675 | 184.195.675 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 07 | Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 181.337.600 | 106.168.900 | 106.168.900 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 231.313.800 | 116.678.342 | 116.678.342 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Pencatatan Sipil | 231.313.800 | 116.678.342 | 116.678.342 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 2.01 | 01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | 181.063.800 | 79.493.342 | 79.493.342 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 2.01 | 05 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan | 50.250.000 | 37.185.000 | 37.185.000 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 130.687.500 | 42.669.000 | 42.669.000 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.02 | | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 0 | 0 | 0 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.02 | 01 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 0 | 0 | 0 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 130.687.500 | 42.669.000 | 42.669.000 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 01 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Informasi Administrasi Kependudukan | | | |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 04 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 130.687.500 | 42.669.000 | 42.669.000 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.04 | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 0 | 0 | 0 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.04 | 01 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 0 | 0 | 0 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.04 | 03 | Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 0 | 0 | 0 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 0 | 0 | 0 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 05 | 2.01 | | Penyusunan Profil Kependudukan | 0 | 0 | 0 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 05 | 2.01 | 02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | 0 | 0 | 0 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 314.076.164 | 314.076.164 | 314.076.164 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 314.076.164 | 314.076.164 | 314.076.164 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 314.076.164 | 314.076.164 | 314.076.164 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 02 | | | PROGRAM PENATAAN DESA | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Penataan Desa | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 02 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 312.636.164 | 312.636.164 | 312.636.164 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 312.636.164 | 312.636.164 | 312.636.164 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 167.000.364 | 167.000.364 | 167.000.364 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 27.423.400 | 27.423.400 | 27.423.400 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 93.003.000 | 93.003.000 | 93.003.000 |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 25.209.400 | 25.209.400 | 25.209.400 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 22.098.221.434 | 25.625.796.761 | 26.116.475.961 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 22.098.221.434 | 25.625.796.761 | 26.116.475.961 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 1.564.907.930 | 1.530.727.600 | 1.618.727.600 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 482.440.800 | 602.505.800 | 668.505.800 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 89.374.600 | 188.374.600 | 254.374.600 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 846.000 | 846.000 | 846.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 680.000 | 99.680.000 | 165.680.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | 38.270.600 | 38.270.600 | 38.270.600 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4.550.000 | 4.550.000 | 4.550.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 41.148.000 | 41.148.000 | 41.148.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5.808.200 | 5.808.200 | 5.808.200 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.720.000 | 2.720.000 | 2.720.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3.088.200 | 3.088.200 | 3.088.200 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 387.258.000 | 408.323.000 | 408.323.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 384.578.000 | 405.643.000 | 405.643.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.680.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 229.992.732 | 218.878.100 | 218.878.100 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 2.01 | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | 139.860.544 | 200.538.000 | 200.538.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | 139.860.544 | 200.538.000 | 200.538.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | 90.132.188 | 18.340.100 | 18.340.100 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 2.02 | 02 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 90.132.188 | 18.340.100 | 18.340.100 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 114.161.400 | 74.209.400 | 74.209.400 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 111.761.400 | 74.209.400 | 74.209.400 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 110.961.400 | 74.209.400 | 74.209.400 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.02 | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 1.600.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.02 | 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.02 | 03 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.03 | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.03 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.03 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 117.389.000 | 110.289.000 | 110.289.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 2.01 | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 117.389.000 | 110.289.000 | 110.289.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 114.989.000 | 110.289.000 | 110.289.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 2.01 | 06 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 2.01 | 07 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 800.000 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 05 | 2.01 | | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 05 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 05 | 2.01 | 02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 05 | 2.02 | | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 05 | 2.02 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 109.115.800 | 52.867.300 | 52.867.300 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 109.115.800 | 52.867.300 | 52.867.300 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 59.292.400 | 26.152.200 | 26.152.200 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 49.823.400 | 26.715.100 | 26.715.100 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 08 | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 77.615.400 | 65.824.200 | 65.824.200 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 08 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 77.615.400 | 65.824.200 | 65.824.200 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 08 | 2.01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 76.815.400 | 65.824.200 | 65.824.200 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 08 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 09 | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 51.492.198 | 3.168.000 | 3.168.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 09 | 2.01 | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 51.492.198 | 3.168.000 | 3.168.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 09 | 2.01 | 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 51.492.198 | 3.168.000 | 3.168.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 10 | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 10 | 2.01 | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 10 | 2.01 | 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 381.100.600 | 402.985.800 | 424.985.800 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | | Pengelolaan Sampah | 381.100.600 | 402.985.800 | 424.985.800 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 01 | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 02 | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | 63.411.600 | 129.610.800 | 151.610.800 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 03 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 261.672.000 | 250.866.000 | 250.866.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 04 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 54.417.000 | 22.509.000 | 22.509.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 20.533.313.504 | 24.095.069.161 | 24.497.748.361 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.972.710.064 | 13.826.874.255 | 13.826.874.255 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 32.870.200 | 24.214.491 | 24.214.491 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 27.813.200 | 20.593.891 | 20.593.891 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.057.000 | 3.620.600 | 3.620.600 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.485.060.700 | 5.669.385.100 | 5.669.385.100 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.085.160.700 | 5.275.160.700 | 5.275.160.700 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 399.900.000 | 394.224.400 | 394.224.400 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 775.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 775.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 858.957.600 | 838.742.100 | 838.742.100 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 17.907.600 | 4.907.600 | 4.907.600 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 193.660.000 | 192.060.000 | 192.060.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 20.360.000 | 69.744.500 | 69.744.500 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 276.683.000 | 289.683.000 | 289.683.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 49.200.000 | 16.200.000 | 16.200.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 56.945.000 | 61.945.000 | 61.945.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 244.202.000 | 204.202.000 | 204.202.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 40.840.000 | 39.000.000 | 39.000.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 40.040.000 | 39.000.000 | 39.000.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.106.896.564 | 6.826.896.564 | 6.826.896.564 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60.370.700 | 40.370.700 | 40.370.700 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 86.545.416 | 96.545.416 | 96.545.416 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 16.123.064 | 16.123.064 | 16.123.064 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 6.943.857.384 | 6.673.857.384 | 6.673.857.384 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 447.310.000 | 428.636.000 | 428.636.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 346.680.000 | 328.275.000 | 328.275.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.030.000 | 2.030.000 | 2.030.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 97.600.000 | 97.331.000 | 97.331.000 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 1.685.337.655 | 3.079.381.860 | 3.488.110.260 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 801.686.655 | 1.415.748.360 | 1.762.156.760 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 692.862.655 | 1.212.863.760 | 1.521.140.160 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 108.824.000 | 202.884.600 | 241.016.600 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.09 | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 882.851.000 | 1.663.633.500 | 1.725.953.500 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.09 | 01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 | 882.051.000 | 1.663.633.500 | 1.725.953.500 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.09 | 02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 800.000 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 3.875.265.785 | 7.188.813.046 | 7.182.763.846 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 2.11 | | Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 2.11 | 01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 2.12 | | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | 3.875.265.785 | 7.188.813.046 | 7.182.763.846 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 2.12 | 02 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | 3.527.494.685 | 6.159.180.946 | 6.773.131.746 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 2.12 | 03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal | 347.771.100 | 1.029.632.100 | 409.632.100 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 2.13 | | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 0 | 0 | 0 |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 2.13 | 02 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | | | | | | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | 18.145.526.614 | 15.088.435.164 | 15.088.435.164 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 18.145.526.614 | 15.088.435.164 | 15.088.435.164 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 17.774.544.814 | 14.894.201.564 | 14.894.201.564 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.063.245.374 | 5.528.765.998 | 5.528.765.998 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.360.500 | 1.649.000 | 1.649.000 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.316.500 | 676.000 | 676.000 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.044.000 | 973.000 | 973.000 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.936.267.229 | 3.958.870.414 | 3.958.870.414 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.679.412.229 | 3.744.532.414 | 3.744.532.414 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 254.760.000 | 213.630.000 | 213.630.000 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.095.000 | 708.000 | 708.000 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 881.495.850 | 533.042.100 | 533.042.100 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.113.200 | 2.560.000 | 2.560.000 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26.520.120 | 22.311.000 | 22.311.000 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 22.396.000 | 11.354.086 | 11.354.086 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 85.057.800 | 31.663.200 | 31.663.200 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 117.044.730 | 49.073.008 | 49.073.008 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 623.364.000 | 416.080.806 | 416.080.806 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 52.875.000 | 52.710.000 | 52.710.000 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 52.875.000 | 52.710.000 | 52.710.000 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.104.576.160 | 967.576.234 | 967.576.234 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 153.170.260 | 105.485.726 | 105.485.726 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25.270.500 | 25.270.500 | 25.270.500 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 926.135.400 | 836.820.008 | 836.820.008 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 75.670.635 | 14.918.250 | 14.918.250 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 61.337.635 | 14.918.250 | 14.918.250 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.333.000 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 5.169.007.400 | 4.492.521.456 | 4.492.521.456 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 5.169.007.400 | 4.492.521.456 | 4.492.521.456 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 987.419.100 | 733.597.561 | 733.597.561 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Pelayanan Informasi Publik | 256.144.500 | 114.130.345 | 114.130.345 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 07 | Layanan Hubungan Media | 3.925.443.800 | 3.644.793.550 | 3.644.793.550 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | 5.542.292.040 | 4.872.914.110 | 4.872.914.110 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 4.193.130.540 | 3.973.311.054 | 3.973.311.054 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.01 | 02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 181.292.500 | 151.196.000 | 151.196.000 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 4.011.838.040 | 3.822.115.054 | 3.822.115.054 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.349.161.500 | 899.603.056 | 899.603.056 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 02 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 309.456.000 | 265.597.500 | 265.597.500 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | 600.134.300 | 345.084.400 | 345.084.400 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 319.227.200 | 197.861.700 | 197.861.700 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 120.344.000 | 91.059.456 | 91.059.456 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | 200.218.000 | 114.987.600 | 114.987.600 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 200.218.000 | 114.987.600 | 114.987.600 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 200.218.000 | 114.987.600 | 114.987.600 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 168.468.000 | 96.730.600 | 96.730.600 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | 0 | 0 | 0 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | 31.750.000 | 18.257.000 | 18.257.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 170.763.800 | 79.246.000 | 79.246.000 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 170.763.800 | 79.246.000 | 79.246.000 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 41.097.000 | 22.427.000 | 22.427.000 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 41.097.000 | 22.427.000 | 22.427.000 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.02 | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 129.666.800 | 56.819.000 | 56.819.000 |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.02 | 01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 129.666.800 | 56.819.000 | 56.819.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | | | | | | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 10.353.035.529 | 11.666.856.245 | 11.712.921.685 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 9.444.180.754 | 8.784.025.695 | 8.790.075.695 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 932.879.733 | 932.879.733 | 932.879.733 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 07 | 03 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 51.648.000 | 51.648.000 | 51.648.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 51.648.000 | 51.648.000 | 51.648.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 51.648.000 | 51.648.000 | 51.648.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 07 | 05 | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 881.231.733 | 881.231.733 | 881.231.733 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.01 | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 735.231.733 | 735.231.733 | 735.231.733 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 735.231.733 | 735.231.733 | 735.231.733 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 146.000.000 | 146.000.000 | 146.000.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 146.000.000 | 146.000.000 | 146.000.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 8.511.301.021 | 7.851.145.962 | 7.857.195.962 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.809.072.921 | 7.341.065.412 | 7.347.115.412 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 186.145.630 | 196.878.955 | 202.928.955 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 21.030.330 | 21.035.753 | 21.035.753 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 20.135.660 | 24.985.660 | 24.985.660 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 22.460.660 | 26.940.660 | 26.940.660 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 18.935.660 | 18.935.660 | 24.985.660 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 18.935.660 | 24.835.660 | 24.835.660 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 58.242.330 | 57.290.232 | 57.290.232 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.405.330 | 22.855.330 | 22.855.330 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.365.138.372 | 4.219.193.033 | 4.219.193.033 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.077.578.042 | 4.015.152.703 | 4.015.152.703 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 279.060.000 | 194.290.000 | 194.290.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 8.500.330 | 9.750.330 | 9.750.330 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 896.772.000 | 667.696.070 | 667.696.070 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 58.484.000 | 25.020.000 | 25.020.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 35.710.000 | 10.250.000 | 10.250.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 66.068.000 | 65.735.000 | 65.735.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 147.184.000 | 88.350.000 | 88.350.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 100.990.000 | 68.552.500 | 68.552.500 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 488.336.000 | 409.788.570 | 409.788.570 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 11.348.000 | 4.580.000 | 4.580.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | 0 | 0 | 0 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 11.348.000 | 4.580.000 | 4.580.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.032.341.709 | 1.962.477.144 | 1.962.477.144 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 502.799.442 | 435.934.877 | 435.934.877 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 75.373.211 | 75.373.211 | 75.373.211 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.454.169.056 | 1.451.169.056 | 1.451.169.056 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 317.327.210 | 290.240.210 | 290.240.210 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 138.717.210 | 130.815.210 | 130.815.210 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 91.350.000 | 74.500.000 | 74.500.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 87.260.000 | 84.925.000 | 84.925.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 03 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 65.588.000 | 25.643.000 | 25.643.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 03 | 2.01 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 65.588.000 | 25.643.000 | 25.643.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 65.588.000 | 25.643.000 | 25.643.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 04 | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 0 | 0 | 0 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 04 | 2.01 | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 04 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 0 | 0 | 0 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 05 | 2.01 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 0 | 0 | 0 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 07 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 98.425.000 | 98.425.000 | 98.425.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 2.01 | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 98.425.000 | 98.425.000 | 98.425.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 02 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | 98.425.000 | 98.425.000 | 98.425.000 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 08 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 538.215.100 | 386.012.550 | 386.012.550 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 08 | 2.01 | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | 538.215.100 | 386.012.550 | 386.012.550 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 538.215.100 | 386.012.550 | 386.012.550 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 908.854.775 | 2.882.830.550 | 2.922.845.990 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 638.865.575 | 745.929.825 | 785.945.265 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 02 | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 102.005.720 | 99.240.720 | 99.240.720 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 02 | 2.01 | | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | 102.005.720 | 99.240.720 | 99.240.720 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 02 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 102.005.720 | 99.240.720 | 99.240.720 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 03 | 2.01 | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 04 | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 486.889.855 | 612.495.105 | 653.145.105 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.01 | | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 486.889.855 | 612.495.105 | 653.145.105 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 103.987.700 | 84.490.060 | 84.490.060 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 382.902.155 | 280.455.615 | 280.455.615 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.01 | 03 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 0 | 247.549.430 | 288.199.430 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 06 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 49.970.000 | 34.194.000 | 33.559.440 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 06 | 2.01 | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | 49.970.000 | 34.194.000 | 33.559.440 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 49.970.000 | 34.194.000 | 33.559.440 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 269.989.200 | 2.136.900.725 | 2.136.900.725 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 269.989.200 | 2.136.900.725 | 2.136.900.725 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 269.989.200 | 2.136.900.725 | 2.136.900.725 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 269.989.200 | 121.528.028 | 121.528.028 |
| 2.17.3.30.3.31.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 0 | 2.015.372.697 | 2.015.372.697 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 9.991.225.308 | 9.647.574.514 | 9.647.574.514 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 9.991.225.308 | 9.647.574.514 | 9.647.574.514 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 1.231.099.533 | 1.762.142.965 | 1.762.142.965 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 03 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 249.000.000 | 249.212.000 | 249.212.000 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 249.000.000 | 249.212.000 | 249.212.000 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 249.000.000 | 249.212.000 | 249.212.000 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 04 | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 0 | 0 | 0 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.01 | | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | 0 | 0 | 0 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 05 | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 982.099.533 | 1.512.930.965 | 1.512.930.965 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.01 | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 897.739.000 | 1.385.734.833 | 1.385.734.833 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 897.739.000 | 1.385.734.833 | 1.385.734.833 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 84.360.533 | 127.196.132 | 127.196.132 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 84.360.533 | 127.196.132 | 127.196.132 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 8.760.125.775 | 7.885.431.549 | 7.885.431.549 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.492.949.975 | 6.850.237.969 | 6.850.237.969 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 31.829.570 | 14.957.570 | 14.957.570 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.542.570 | 12.542.570 | 12.542.570 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.345.000 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.345.000 | 0 | 0 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.352.000 | 0 | 0 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.345.000 | 0 | 0 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.415.000 | 2.415.000 | 2.415.000 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.485.000 | 0 | 0 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.763.281.629 | 5.257.352.049 | 5.257.352.049 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.589.891.629 | 5.087.912.049 | 5.087.912.049 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 169.440.000 | 169.440.000 | 169.440.000 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.950.000 | 0 | 0 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 19.800.000 | 19.800.000 | 19.800.000 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 19.800.000 | 19.800.000 | 19.800.000 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0 | 0 | 0 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 552.011.400 | 518.170.145 | 518.170.145 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.488.500 | 4.800.480 | 4.800.480 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.566.500 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 11.361.700 | 8.009.500 | 8.009.500 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 48.629.700 | 41.752.165 | 41.752.165 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 18.425.000 | 11.498.000 | 11.498.000 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5.400.000 | 0 | 0 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12.500.000 | 10.470.000 | 10.470.000 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 435.640.000 | 435.640.000 | 435.640.000 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 16.126.000 | 16.126.000 | 16.126.000 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | 16.126.000 | 16.126.000 | 16.126.000 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 939.908.876 | 894.698.105 | 894.698.105 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 54.119.500 | 46.929.149 | 46.929.149 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3.960.000 | 3.960.000 | 3.960.000 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 881.829.376 | 843.808.956 | 843.808.956 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 169.992.500 | 129.134.100 | 129.134.100 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 45.102.500 | 31.165.600 | 31.165.600 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 31.500.000 | 13.942.500 | 13.942.500 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 93.390.000 | 84.026.000 | 84.026.000 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 0 | 0 | 0 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 2.02 | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 2.02 | 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 03 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 280.000.900 | 234.415.380 | 234.415.380 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 03 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 280.000.900 | 234.415.380 | 234.415.380 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 03 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 280.000.900 | 234.415.380 | 234.415.380 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 04 | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 608.000.000 | 421.603.300 | 421.603.300 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 2.01 | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 608.000.000 | 421.603.300 | 421.603.300 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 424.629.000 | 385.880.500 | 385.880.500 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | 183.371.000 | 35.722.800 | 35.722.800 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Perizinan | | | |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 379.174.900 | 379.174.900 | 379.174.900 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 2.01 | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 379.174.900 | 379.174.900 | 379.174.900 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 221.821.900 | 221.821.900 | 221.821.900 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 157.353.000 | 157.353.000 | 157.353.000 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 0 | 0 | 0 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 2.18.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 18 | 06 | 2.01 | 01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 0 | 0 | 0 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 57.129.400 | 188.544.100 | 188.544.100 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 57.129.400 | 188.544.100 | 188.544.100 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 39.467.400 | 156.045.100 | 156.045.100 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 39.467.400 | 156.045.100 | 156.045.100 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 23.493.400 | 87.859.100 | 87.859.100 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 15.993.400 | 80.359.100 | 80.359.100 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 15.974.000 | 68.186.000 | 68.186.000 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 01 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 15.974.000 | 68.186.000 | 68.186.000 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 17.662.000 | 32.499.000 | 32.499.000 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 17.662.000 | 32.499.000 | 32.499.000 |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | 17.662.000 | 32.499.000 | 32.499.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.01 | 01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 17.662.000 | 32.499.000 | 32.499.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | | | | | | DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN | 17.904.467.751 | 15.906.514.119 | 15.906.514.118 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 721.449.140 | 671.168.890 | 671.168.890 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 721.449.140 | 671.168.890 | 671.168.890 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 701.086.250 | 650.806.000 | 650.806.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.01 | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 15.553.200 | 10.064.000 | 10.064.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 04 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 15.553.200 | 10.064.000 | 10.064.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 30.233.550 | 6.980.500 | 6.980.500 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.02 | 03 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 30.233.550 | 6.980.500 | 6.980.500 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.04 | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 655.299.500 | 633.761.500 | 633.761.500 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.04 | 02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 655.299.500 | 633.761.500 | 633.761.500 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 05 | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 20.362.890 | 20.362.890 | 20.362.890 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 2.01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 20.362.890 | 20.362.890 | 20.362.890 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 20.362.890 | 20.362.890 | 20.362.890 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 17.183.018.611 | 15.235.345.229 | 15.235.345.228 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 16.193.089.942 | 14.555.571.565 | 14.555.571.564 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14.575.919.050 | 12.990.523.243 | 12.990.523.242 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.000.000 | 135.396.000 | 95.396.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.000.000 | 100.396.000 | 60.396.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.483.423.300 | 8.019.643.106 | 8.019.643.106 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.206.744.000 | 7.778.593.106 | 7.778.593.106 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 271.680.000 | 240.600.000 | 240.600.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.999.300 | 450.000 | 450.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 49.900.000 | 43.800.001 | 43.800.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 6.100.000 | 1 | 0 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 43.800.000 | 43.800.000 | 43.800.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 243.151.500 | 130.847.501 | 130.847.501 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 212.927.500 | 130.847.500 | 130.847.500 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 30.224.000 | 1 | 1 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 642.444.532 | 570.568.800 | 610.568.800 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.992.000 | 2.692.000 | 2.692.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 63.069.732 | 29.546.000 | 29.546.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 19.992.000 | 12.944.000 | 12.944.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 39.820.600 | 34.778.800 | 34.778.800 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | 4.990.200 | 3.677.000 | 3.677.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24.915.000 | 12.266.000 | 12.266.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 449.665.000 | 449.665.000 | 489.665.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 266.705.000 | 266.705.000 | 266.705.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 266.705.000 | 266.705.000 | 266.705.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.815.459.718 | 3.792.272.835 | 3.792.272.835 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 156.727.540 | 140.617.401 | 140.617.401 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 43.869.938 | 43.869.938 | 43.869.938 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.614.862.240 | 3.607.785.496 | 3.607.785.496 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 68.835.000 | 31.290.000 | 31.290.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.345.000 | 13.300.000 | 13.300.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 44.490.000 | 17.990.000 | 17.990.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 1.209.051.120 | 1.221.530.122 | 1.221.530.122 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.02 | | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 947.291.120 | 912.065.402 | 912.065.402 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.02 | 01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 751.739.800 | 745.099.800 | 745.099.800 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 165.557.500 | 157.017.500 | 157.017.500 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 29.993.820 | 9.948.102 | 9.948.102 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.03 | | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 261.760.000 | 309.464.720 | 309.464.720 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.03 | 01 | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 21.000.000 | 12.736.200 | 12.736.200 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 2.03 | 02 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 240.760.000 | 296.728.520 | 296.728.520 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 313.321.000 | 231.395.200 | 231.395.200 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.02 | | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 64.314.800 | 50.745.000 | 50.745.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.02 | 01 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 4.315.200 | 0 | 0 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 59.999.600 | 50.745.000 | 50.745.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.03 | | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 21.000.000 | 0 | 0 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.03 | 02 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 21.000.000 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.04 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 228.006.200 | 180.650.200 | 180.650.200 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 29.998.200 | 21.248.200 | 21.248.200 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7.566.000 | 0 | 0 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 142.682.800 | 142.546.800 | 142.546.800 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 47.759.200 | 16.855.200 | 16.855.200 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 06 | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 94.798.772 | 112.123.000 | 112.123.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 2.01 | | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | 21.000.000 | 9.849.500 | 9.849.500 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 2.01 | 01 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 21.000.000 | 9.849.500 | 9.849.500 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 2.02 | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 42.798.772 | 21.323.500 | 21.323.500 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 2.02 | 01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 42.798.772 | 21.323.500 | 21.323.500 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 2.03 | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 31.000.000 | 80.950.000 | 80.950.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 2.03 | 02 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 31.000.000 | 80.950.000 | 80.950.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 989.928.669 | 679.773.664 | 679.773.664 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 304.542.000 | 232.986.600 | 232.986.600 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 299.992.000 | 232.986.600 | 232.986.600 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 299.992.000 | 232.986.600 | 232.986.600 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.06 | | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah | 4.550.000 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kabupaten/Kota Lain | | | |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.06 | 01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.06 | 02 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 2.750.000 | 0 | 0 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 314.951.699 | 131.477.768 | 131.477.768 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | | Pembangunan Prasarana Pertanian | 314.951.699 | 131.477.768 | 131.477.768 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 01 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 0 | 0 | 0 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 314.951.699 | 131.477.768 | 131.477.768 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 279.950.900 | 222.963.330 | 222.963.330 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.01 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 103.902.000 | 83.814.430 | 83.814.430 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.01 | 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 103.902.000 | 83.814.430 | 83.814.430 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.03 | | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 176.048.900 | 139.148.900 | 139.148.900 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.03 | 01 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | 0 | 0 | 0 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.03 | 02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 176.048.900 | 139.148.900 | 139.148.900 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 90.484.070 | 92.345.966 | 92.345.966 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 90.484.070 | 92.345.966 | 92.345.966 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 39.929.500 | 4.265.000 | 4.265.000 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 20.129.390 | 8.084.900 | 8.084.900 |
| 3.25.3.27.2.09.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 30.425.180 | 79.996.066 | 79.996.066 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | | | | | | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 9.788.362.567 | 9.322.701.421 | 9.572.701.421 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 454.565.600 | 620.695.760 | 840.695.760 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 454.565.600 | 620.695.760 | 840.695.760 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 412.215.600 | 578.345.760 | 798.345.760 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 131.604.000 | 131.604.000 | 131.604.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.01 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 131.604.000 | 131.604.000 | 131.604.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.02 | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 280.611.600 | 446.741.760 | 666.741.760 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.02 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 280.611.600 | 446.741.760 | 666.741.760 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.02 | 03 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.03 | | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 2.03 | 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | 0 | 0 | 0 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 42.350.000 | 42.350.000 | 42.350.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 | 2.01 | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 42.350.000 | 42.350.000 | 42.350.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 0 | 0 | 0 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | 42.350.000 | 42.350.000 | 42.350.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 9.333.796.967 | 8.702.005.661 | 8.732.005.661 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 9.333.796.967 | 8.702.005.661 | 8.732.005.661 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.099.117.231 | 6.485.507.339 | 6.485.507.339 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 162.833.600 | 200.549.264 | 200.549.264 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 162.833.600 | 200.549.264 | 200.549.264 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.569.696.261 | 3.766.173.838 | 3.766.173.838 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.342.876.261 | 3.581.353.838 | 3.581.353.838 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 226.820.000 | 184.820.000 | 184.820.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 540.113.000 | 662.782.785 | 662.782.785 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 200.250.000 | 221.903.000 | 221.903.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 339.863.000 | 440.879.785 | 440.879.785 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 148.642.000 | 189.283.946 | 189.283.946 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 36.264.000 | 40.143.000 | 40.143.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 22.646.000 | 30.500.000 | 30.500.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.332.000 | 33.840.000 | 33.840.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 14.400.000 | 20.310.000 | 20.310.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 40.000.000 | 59.990.946 | 59.990.946 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | 0 | 0 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.305.129.840 | 1.296.784.976 | 1.296.784.976 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 53.690.000 | 53.345.000 | 53.345.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 74.369.265 | 74.369.265 | 74.369.265 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13.131.600 | 8.834.000 | 8.834.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.163.938.975 | 1.160.236.711 | 1.160.236.711 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 372.702.530 | 369.932.530 | 369.932.530 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5.242.530 | 5.242.530 | 5.242.530 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.460.000 | 17.460.000 | 17.460.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 350.000.000 | 347.230.000 | 347.230.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 1.021.155.313 | 1.176.020.648 | 1.176.020.648 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 1.021.155.313 | 1.176.020.648 | 1.176.020.648 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.01 | 02 | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 127.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.01 | 03 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 893.655.313 | 1.048.520.648 | 1.048.520.648 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 606.924.423 | 433.877.674 | 463.877.674 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 606.924.423 | 433.877.674 | 463.877.674 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 01 | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 210.870.000 | 210.870.000 | 210.870.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 396.054.423 | 223.007.674 | 253.007.674 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 0 | 0 | 0 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 0 | 0 | 0 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 05 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 0 | 0 | 0 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 606.600.000 | 606.600.000 | 606.600.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 2.01 | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 606.600.000 | 606.600.000 | 606.600.000 |
| 3.26.2.22.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 606.600.000 | 606.600.000 | 606.600.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 56.547.211.611 | 55.066.145.613 | 55.131.105.613 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 987.509.700 | 958.085.700 | 958.085.700 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 2 | 23 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 948.741.700 | 919.317.700 | 919.317.700 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 2 | 23 | 02 | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 948.741.700 | 919.317.700 | 919.317.700 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 688.681.700 | 673.289.700 | 673.289.700 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 02 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 533.231.700 | 517.839.700 | 517.839.700 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 91.980.000 | 91.980.000 | 91.980.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 63.470.000 | 63.470.000 | 63.470.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 260.060.000 | 246.028.000 | 246.028.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 01 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 239.810.000 | 225.778.000 | 225.778.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 03 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 20.250.000 | 20.250.000 | 20.250.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 2 | 24 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 38.768.000 | 38.768.000 | 38.768.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 2 | 24 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 38.768.000 | 38.768.000 | 38.768.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | 38.768.000 | 38.768.000 | 38.768.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.01 | 01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 38.768.000 | 38.768.000 | 38.768.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 55.559.701.911 | 54.108.059.913 | 54.173.019.913 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | 55.559.701.911 | 54.108.059.913 | 54.173.019.913 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 41.690.958.671 | 40.675.834.673 | 40.675.834.673 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 17.567.066.639 | 16.166.448.839 | 16.166.448.839 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16.477.616.639 | 15.348.048.839 | 15.348.048.839 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.089.450.000 | 818.400.000 | 818.400.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 379.890.200 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 379.890.200 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 0 | 0 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 8.025.141.380 | 9.215.933.680 | 9.215.933.680 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 535.946.680 | 336.146.680 | 336.146.680 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 304.204.200 | 351.168.700 | 351.168.700 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 123.256.000 | 123.256.000 | 123.256.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1.897.776.500 | 2.532.776.300 | 2.532.776.300 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 247.070.000 | 309.970.000 | 309.970.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1.896.900.000 | 1.896.820.000 | 1.896.820.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3.019.988.000 | 3.665.796.000 | 3.665.796.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.484.856.510 | 469.036.310 | 469.036.310 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 1.484.856.510 | 469.036.310 | 469.036.310 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 9.076.657.899 | 9.789.902.101 | 9.789.902.101 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 199.499.500 | 199.499.500 | 199.499.500 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.637.169.455 | 1.637.169.455 | 1.637.169.455 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 7.239.988.944 | 7.953.233.146 | 7.953.233.146 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.554.129.848 | 1.247.585.108 | 1.247.585.108 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 527.111.260 | 527.111.260 | 527.111.260 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 161.129.740 | 139.670.000 | 139.670.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 865.888.848 | 580.803.848 | 580.803.848 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1.275.336.215 | 1.275.336.215 | 1.275.336.215 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 194.913.655 | 194.913.655 | 194.913.655 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 96.942.000 | 96.942.000 | 96.942.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 963.480.560 | 963.480.560 | 963.480.560 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 632.201.600 | 632.201.600 | 632.201.600 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 152.372.400 | 152.372.400 | 152.372.400 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 144.114.000 | 144.114.000 | 144.114.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 335.715.200 | 335.715.200 | 335.715.200 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | 487.055.700 | 487.055.700 | 487.055.700 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 157.980.000 | 157.980.000 | 157.980.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 154.250.200 | 154.250.200 | 154.250.200 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 174.825.500 | 174.825.500 | 174.825.500 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1.208.622.680 | 1.380.335.120 | 1.380.335.120 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 01 | Fasilitasi Keprotokolan | 385.750.000 | 455.750.000 | 455.750.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 201.022.000 | 270.996.000 | 270.996.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 621.850.680 | 653.589.120 | 653.589.120 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 12.042.888.300 | 11.560.888.300 | 11.625.848.300 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | | Administrasi Tata Pemerintahan | 403.313.200 | 403.313.200 | 403.313.200 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 262.609.200 | 262.609.200 | 262.609.200 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 0 | 0 | 0 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 140.704.000 | 140.704.000 | 140.704.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 10.929.250.100 | 10.396.250.100 | 10.396.250.100 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 3.756.238.700 | 4.106.238.700 | 4.106.238.700 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | 7.173.011.400 | 6.290.011.400 | 6.290.011.400 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 710.325.000 | 761.325.000 | 826.285.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 251.894.000 | 277.894.000 | 342.854.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 260.630.000 | 269.630.000 | 269.630.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 197.801.000 | 213.801.000 | 213.801.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 1.825.854.940 | 1.871.336.940 | 1.871.336.940 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 315.306.500 | 367.210.500 | 367.210.500 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 167.486.200 | 212.961.200 | 212.961.200 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 68.932.200 | 100.503.200 | 100.503.200 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | 78.888.100 | 53.746.100 | 53.746.100 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | 314.556.100 | 362.556.100 | 362.556.100 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 75.327.100 | 75.327.100 | 75.327.100 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 172.632.000 | 220.632.000 | 220.632.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 66.597.000 | 66.597.000 | 66.597.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 961.524.940 | 959.006.940 | 959.006.940 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 394.882.440 | 411.916.440 | 411.916.440 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | 226.099.000 | 206.547.000 | 206.547.000 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 340.543.500 | 340.543.500 | 340.543.500 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.04 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | 234.467.400 | 182.563.400 | 182.563.400 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 85.794.200 | 40.319.200 | 40.319.200 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 57.986.100 | 26.415.100 | 26.415.100 |
| 4.01.2.23.2.24.01.0000 | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 90.687.100 | 115.829.100 | 115.829.100 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | SEKRETARIAT DPRD | 35.391.836.670 | 37.036.655.902 | 37.190.850.702 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 35.391.836.670 | 37.036.655.902 | 37.190.850.702 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | | | | SEKRETARIAT DPRD | 35.391.836.670 | 37.036.655.902 | 37.190.850.702 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 19.848.139.210 | 19.993.051.442 | 20.126.442.242 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 108.148.800 | 85.906.400 | 85.906.400 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 89.744.600 | 82.942.100 | 82.942.100 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.000.900 | 500.000 | 500.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.919.700 | 452.400 | 452.400 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.949.900 | 140.000 | 140.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.513.700 | 1.013.500 | 1.013.500 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.955.100 | 555.100 | 555.100 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.064.900 | 303.300 | 303.300 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 14.192.740.496 | 13.934.118.720 | 13.934.118.720 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.919.544.096 | 13.699.308.720 | 13.699.308.720 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 270.600.000 | 234.600.000 | 234.600.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.596.400 | 210.000 | 210.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 97.968.000 | 308.258.500 | 308.258.500 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 308.258.500 | 308.258.500 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 97.968.000 | 0 | 0 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.168.423.250 | 1.305.909.210 | 1.385.109.210 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 70.794.000 | 88.714.100 | 88.714.100 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 141.908.950 | 185.708.950 | 264.908.950 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 83.819.400 | 98.202.560 | 98.202.560 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 203.515.900 | 226.392.600 | 226.392.600 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 214.683.000 | 120.383.000 | 120.383.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100.010.000 | 100.010.000 | 100.010.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 303.692.000 | 436.498.000 | 436.498.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | 0 | 0 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.516.760.164 | 2.561.474.312 | 2.561.474.312 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 179.630.600 | 194.091.200 | 194.091.200 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 245.499.068 | 159.499.068 | 159.499.068 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.091.630.496 | 2.207.884.044 | 2.207.884.044 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 428.048.700 | 509.334.900 | 563.525.700 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 87.591.200 | 87.591.200 | 87.591.200 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 56.550.000 | 56.550.000 | 56.550.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 283.907.500 | 365.193.700 | 419.384.500 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 929.753.000 | 929.753.000 | 929.753.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 259.160.000 | 259.160.000 | 259.160.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 670.593.000 | 670.593.000 | 670.593.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 | | Layanan Administrasi DPRD | 406.296.800 | 358.296.400 | 358.296.400 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 01 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | 98.485.400 | 50.485.000 | 50.485.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 307.811.400 | 307.811.400 | 307.811.400 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 15.543.697.460 | 17.043.604.460 | 17.064.408.460 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 4.871.256.800 | 4.284.059.400 | 4.284.059.400 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 4.284.059.500 | 4.284.059.400 | 4.284.059.400 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | 587.197.300 | 0 | 0 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 692.020.100 | 792.020.100 | 792.020.100 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Pembahasan KUA dan PPAS | 22.432.600 | 72.432.600 | 72.432.600 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 45.317.100 | 45.317.100 | 45.317.100 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Pembahasan APBD | 321.105.400 | 371.105.400 | 371.105.400 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Pembahasan APBD Perubahan | 303.165.000 | 303.165.000 | 303.165.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | 3.428.475.960 | 3.632.263.960 | 3.653.067.960 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 02 | Pendalaman Tugas DPRD | 768.661.000 | 896.661.000 | 896.661.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 1.565.534.000 | 2.118.796.000 | 2.139.600.000 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 616.806.960 | 616.806.960 | 616.806.960 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | 477.474.000 | 0 | 0 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 2.170.516.100 | 2.953.832.600 | 2.953.832.600 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | 218.303.400 | 218.303.400 | 218.303.400 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 452.899.700 | 486.559.700 | 486.559.700 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 03 | Pelaksanaan Reses | 1.499.313.000 | 2.248.969.500 | 2.248.969.500 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 | | Fasilitasi Tugas DPRD | 4.381.428.500 | 5.381.428.400 | 5.381.428.400 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 4.381.428.500 | 5.381.428.400 | 5.381.428.400 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 13.490.883.595 | 9.545.229.380 | 9.711.975.880 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 13.490.883.595 | 9.545.229.380 | 9.711.975.880 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | | | | PERENCANAAN | 12.683.846.195 | 9.533.942.780 | 9.700.689.280 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.579.443.595 | 8.575.636.873 | 8.742.383.373 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 80.755.000 | 24.155.000 | 24.155.000 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 62.905.000 | 19.745.000 | 19.745.000 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.850.000 | 4.410.000 | 4.410.000 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.594.281.250 | 4.814.495.654 | 4.814.495.654 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.523.226.250 | 4.791.785.654 | 4.791.785.654 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 71.055.000 | 22.710.000 | 22.710.000 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 335.676.000 | 64.763.000 | 64.763.000 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 125.590.000 | 0 | 0 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 210.086.000 | 64.763.000 | 64.763.000 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.588.634.900 | 1.134.750.900 | 1.301.497.400 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 17.732.000 | 14.372.000 | 14.372.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 158.976.900 | 157.616.900 | 158.976.900 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 54.389.000 | 49.178.000 | 49.178.000 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 174.413.000 | 86.956.000 | 85.596.000 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 111.540.000 | 106.960.000 | 106.960.000 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.000.000 | 420.000 | 420.000 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 882.584.000 | 533.248.000 | 699.994.500 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 186.000.000 | 186.000.000 | 186.000.000 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 789.674.500 | 456.784.500 | 456.784.500 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 45.780.000 | 0 | 0 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 743.894.500 | 456.784.500 | 456.784.500 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.113.124.970 | 2.003.390.844 | 2.003.390.844 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 134.154.858 | 126.630.900 | 126.630.900 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.968.970.112 | 1.871.759.944 | 1.871.759.944 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 77.296.975 | 77.296.975 | 77.296.975 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 48.370.475 | 48.370.475 | 48.370.475 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28.926.500 | 28.926.500 | 28.926.500 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 895.937.600 | 455.852.880 | 455.852.880 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 543.270.100 | 280.248.800 | 280.248.800 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | 4.570.000 | 675.000 | 675.000 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 308.450.200 | 113.829.400 | 113.829.400 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | 54.180.000 | 19.330.000 | 19.330.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 176.069.900 | 146.414.400 | 146.414.400 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.02 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 101.440.400 | 31.976.040 | 31.976.040 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | 101.440.400 | 31.976.040 | 31.976.040 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 251.227.100 | 143.628.040 | 143.628.040 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 251.227.100 | 143.628.040 | 143.628.040 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.208.465.000 | 502.453.027 | 502.453.027 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 459.793.600 | 227.297.343 | 227.297.343 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 133.428.000 | 83.340.682 | 83.340.682 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 57.004.800 | 21.885.000 | 21.885.000 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 6.875.000 | 0 | 0 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 128.928.000 | 61.090.105 | 61.090.105 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 107.182.800 | 43.002.550 | 43.002.550 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 26.375.000 | 17.979.006 | 17.979.006 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 274.641.400 | 93.419.674 | 93.419.674 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 52.148.000 | 30.705.013 | 30.705.013 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 49.351.600 | 20.788.661 | 20.788.661 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 129.650.000 | 17.200.000 | 17.200.000 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 16.448.000 | 12.747.200 | 12.747.200 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 12.493.800 | 6.328.800 | 6.328.800 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 14.550.000 | 5.650.000 | 5.650.000 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 474.030.000 | 181.736.010 | 181.736.010 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 107.174.000 | 45.075.027 | 45.075.027 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 49.871.600 | 16.984.600 | 16.984.600 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 114.350.000 | 20.250.000 | 20.250.000 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 16.448.000 | 12.001.283 | 12.001.283 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 155.636.400 | 80.774.600 | 80.774.600 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 30.550.000 | 6.650.500 | 6.650.500 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 807.037.400 | 11.286.600 | 11.286.600 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 807.037.400 | 11.286.600 | 11.286.600 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.03 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 807.037.400 | 11.286.600 | 11.286.600 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.03 | 07 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.03 | 10 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | 0 | 0 | 0 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.03 | 11 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 807.037.400 | 11.286.600 | 11.286.600 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 165.553.663.939 | 150.753.310.112 | 148.012.957.293 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 165.553.663.939 | 150.753.310.112 | 148.012.957.293 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | | | | KEUANGAN | 165.553.663.939 | 150.753.310.112 | 148.012.957.293 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 47.679.379.396 | 35.040.078.243 | 32.104.493.424 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.380.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 44.278.075.362 | 30.756.949.603 | 28.144.640.439 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 42.544.455.362 | 28.952.529.603 | 26.340.220.439 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.729.320.000 | 1.800.120.000 | 1.800.120.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | 0 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 0 | 0 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 682.569.600 | 616.857.830 | 729.240.830 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18.245.000 | 18.245.000 | 18.245.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 139.734.000 | 99.509.200 | 99.509.200 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 105.409.600 | 106.374.630 | 111.374.630 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6.000.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 53.900.000 | 38.500.000 | 38.500.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 359.281.000 | 351.829.000 | 459.212.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 271.700.000 | 244.644.000 | 244.644.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 271.700.000 | 244.644.000 | 244.644.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.284.012.934 | 3.281.765.810 | 2.846.107.155 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 107.253.142 | 107.253.142 | 107.253.142 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 132.062.288 | 132.062.288 | 132.062.288 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.039.197.504 | 3.034.950.380 | 2.599.291.725 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 157.921.500 | 134.761.000 | 134.761.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 91.732.500 | 75.412.500 | 75.412.500 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 51.174.000 | 49.338.500 | 49.338.500 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.015.000 | 10.010.000 | 10.010.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 115.466.872.693 | 113.175.705.919 | 113.370.937.919 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 2.292.680.000 | 2.315.180.000 | 2.510.366.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 38.600.000 | 38.600.000 | 38.600.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 44.000.000 | 44.000.000 | 44.000.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 654.030.000 | 654.030.000 | 716.570.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 719.176.000 | 719.176.000 | 653.614.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 236.794.000 | 236.794.000 | 236.794.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 174.784.000 | 197.284.000 | 336.368.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 111.750.000 | 111.750.000 | 161.020.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 31.212.000 | 31.212.000 | 31.212.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 182.334.000 | 182.334.000 | 192.188.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 293.380.000 | 289.908.000 | 289.908.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 0 | 0 | 0 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | 131.542.000 | 128.070.000 | 128.070.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 161.838.000 | 161.838.000 | 161.838.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 863.494.700 | 862.778.700 | 862.778.700 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 60.359.000 | 60.359.000 | 60.359.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 2.818.100 | 2.818.100 | 2.818.100 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 472.923.600 | 397.807.600 | 397.807.600 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 35.680.000 | 35.680.000 | 35.680.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 555.000 | 555.000 | 555.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 113.660.000 | 111.650.000 | 111.650.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 08 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2.765.000 | 2.765.000 | 2.765.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 83.821.000 | 119.824.000 | 119.824.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 90.913.000 | 131.320.000 | 131.320.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.04 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 111.167.937.993 | 108.866.959.219 | 108.866.959.219 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 507.978.774 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | 110.659.959.219 | 107.866.959.219 | 107.866.959.219 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.05 | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | 849.380.000 | 840.880.000 | 840.926.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.05 | 02 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 849.380.000 | 840.880.000 | 840.926.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 1.361.506.000 | 1.584.668.000 | 1.584.668.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1.361.506.000 | 1.584.668.000 | 1.584.668.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Standar Harga | 597.339.000 | 533.210.000 | 533.210.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 02 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 08 | Penilaian Barang Milik Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 764.167.000 | 1.051.458.000 | 1.051.458.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 1.045.905.850 | 952.857.950 | 952.857.950 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | 1.045.905.850 | 952.857.950 | 952.857.950 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | 264.168.900 | 264.168.500 | 264.168.500 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 123.506.000 | 203.506.000 | 203.506.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 252.425.000 | 186.335.000 | 186.335.000 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 218.375.950 | 213.676.450 | 213.676.450 |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 187.430.000 | 85.172.000 | 85.172.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 9.165.692.377 | 7.617.499.002 | 7.697.453.002 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 9.165.692.377 | 7.617.499.002 | 7.697.453.002 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | | | | KEPEGAWAIAN | 7.891.040.377 | 6.342.852.002 | 6.422.806.002 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.282.267.092 | 5.166.225.156 | 5.166.225.156 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.037.077.501 | 4.163.825.208 | 4.163.825.208 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.870.638.101 | 4.018.265.208 | 4.018.265.208 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 162.480.000 | 145.560.000 | 145.560.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.959.400 | 0 | 0 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 215.605.000 | 124.090.000 | 124.090.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 141.605.000 | 69.190.000 | 69.190.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 74.000.000 | 54.900.000 | 54.900.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 349.697.600 | 228.999.600 | 228.999.600 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.654.000 | 3.745.000 | 3.745.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14.232.000 | 9.695.000 | 9.695.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 87.289.600 | 58.999.000 | 58.999.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.500.000 | 6.962.400 | 6.962.400 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 0 | 0 | 0 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.100.000 | 693.000 | 693.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 220.922.000 | 148.905.200 | 148.905.200 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | 0 | 0 | 0 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 558.369.416 | 564.832.773 | 564.832.773 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60.133.000 | 56.851.259 | 56.851.259 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.720.000 | 10.320.000 | 10.320.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 485.516.416 | 497.661.514 | 497.661.514 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 121.517.575 | 84.477.575 | 84.477.575 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 31.837.575 | 20.781.575 | 20.781.575 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 32.650.000 | 12.050.000 | 12.050.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 57.030.000 | 51.646.000 | 51.646.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 1.608.773.285 | 1.176.626.846 | 1.256.580.846 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 637.307.285 | 305.845.500 | 385.799.500 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 248.999.585 | 143.795.600 | 143.795.600 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 299.999.800 | 119.931.000 | 199.885.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 88.307.900 | 42.118.900 | 42.118.900 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 | | Mutasi dan Promosi ASN | 435.636.000 | 505.615.800 | 505.615.800 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Mutasi ASN | 344.660.000 | 463.222.000 | 463.222.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 90.976.000 | 42.393.800 | 42.393.800 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 03 | Pengelolaan Promosi ASN | 0 | 0 | 0 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Kompetensi ASN | 436.984.000 | 268.353.546 | 268.353.546 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 436.984.000 | 268.353.546 | 268.353.546 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 13 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | 0 | 0 | 0 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 98.846.000 | 96.812.000 | 96.812.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 44.946.000 | 14.912.000 | 14.912.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 07 | Pembinaan Disiplin ASN | 53.900.000 | 81.900.000 | 81.900.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 | | | | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 1.274.652.000 | 1.274.647.000 | 1.274.647.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1.274.652.000 | 1.274.647.000 | 1.274.647.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 2.02 | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 1.274.652.000 | 1.274.647.000 | 1.274.647.000 |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 2.02 | 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1.274.652.000 | 1.274.647.000 | 1.274.647.000 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | | | | | | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH | 1.404.999.885 | 857.132.796 | 857.132.796 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 1.404.999.885 | 857.132.796 | 857.132.796 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | | | | PENGELOLAAN PERBATASAN | 1.404.999.885 | 857.132.796 | 857.132.796 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.404.999.885 | 857.132.796 | 857.132.796 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.048.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.275.000 | 775.000 | 775.000 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.275.000 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.875.000 | 775.000 | 775.000 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1.875.000 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.374.000 | 775.000 | 775.000 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.374.000 | 775.000 | 775.000 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 54.000.000 | 54.000.000 | 54.000.000 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 54.000.000 | 54.000.000 | 54.000.000 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 626.580.200 | 390.457.611 | 390.457.611 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 39.164.000 | 16.085.000 | 16.085.000 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 11.440.000 | 11.440.000 | 11.440.000 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 19.028.200 | 29.028.200 | 29.028.200 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 556.948.000 | 333.904.411 | 333.904.411 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 679.621.525 | 373.825.025 | 373.825.025 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 115.753.000 | 115.753.000 | 115.753.000 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | 118.222.525 | 118.222.525 | 118.222.525 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 240.710.500 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 204.935.500 | 118.849.500 | 118.849.500 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 35.750.160 | 35.750.160 | 35.750.160 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 35.750.160 | 35.750.160 | 35.750.160 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.01 | | Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.02 | | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.02 | 02 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.02 | 03 | Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.03 | | Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.03 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.0.00.0.00.04.0000 | 5 | 06 | 02 | 2.03 | 02 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan | 0 | 0 | 0 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | INSPEKTORAT DAERAH | 12.563.659.281 | 11.615.350.300 | 11.615.350.300 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | | | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 12.563.659.281 | 11.615.350.300 | 11.615.350.300 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | | | | INSPEKTORAT DAERAH | 12.563.659.281 | 11.615.350.300 | 11.615.350.300 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.549.680.281 | 10.125.249.457 | 10.125.249.457 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 54.986.800 | 24.923.100 | 24.923.100 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 52.581.800 | 22.518.100 | 22.518.100 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.405.000 | 2.405.000 | 2.405.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.924.051.490 | 7.694.409.790 | 7.694.409.790 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.779.016.290 | 7.549.374.590 | 7.549.374.590 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 141.480.000 | 141.480.000 | 141.480.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.555.200 | 3.555.200 | 3.555.200 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 378.254.600 | 243.218.402 | 243.218.402 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 0 | 0 | 0 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 21.963.600 | 67.242.586 | 67.242.586 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 356.291.000 | 175.975.816 | 175.975.816 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 621.889.600 | 525.250.494 | 525.250.494 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.205.400 | 5.459.200 | 5.459.200 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 53.247.000 | 59.123.000 | 59.123.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7.166.800 | 5.235.600 | 5.235.600 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 7.218.400 | 4.963.200 | 4.963.200 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 30.320.000 | 30.320.000 | 30.320.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 149.633.000 | 18.425.500 | 18.425.500 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 367.099.000 | 401.723.994 | 401.723.994 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.111.899.686 | 1.187.183.122 | 1.187.183.122 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.808.000 | 1.032.000 | 1.032.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 36.550.910 | 36.550.910 | 36.550.910 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.050.000 | 3.889.000 | 3.889.000 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.065.490.776 | 1.145.711.212 | 1.145.711.212 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 410.598.105 | 402.264.549 | 402.264.549 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 9.820.105 | 8.698.605 | 8.698.605 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 33.180.000 | 53.841.226 | 53.841.226 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 317.625.000 | 317.243.000 | 317.243.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 49.973.000 | 22.481.718 | 22.481.718 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 1.264.546.300 | 848.605.112 | 848.605.112 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1.144.499.300 | 789.591.712 | 789.591.712 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 57.115.400 | 19.577.500 | 19.577.500 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 132.367.000 | 72.272.230 | 72.272.230 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja | 101.110.400 | 17.014.345 | 17.014.345 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Reviu Laporan Keuangan | 168.520.400 | 132.546.237 | 132.546.237 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pengawasan Desa | 201.614.500 | 82.630.900 | 82.630.900 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Kerjasama Pengawasan Internal | 375.145.600 | 375.145.600 | 375.145.600 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 108.626.000 | 90.404.900 | 90.404.900 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 120.047.000 | 59.013.400 | 59.013.400 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 25.816.000 | 0 | 0 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 94.231.000 | 59.013.400 | 59.013.400 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 749.432.700 | 641.495.731 | 641.495.731 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 29.569.000 | 10.421.500 | 10.421.500 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 29.569.000 | 10.421.500 | 10.421.500 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | | Pendampingan dan Asistensi | 719.863.700 | 631.074.231 | 631.074.231 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 121.905.600 | 42.164.151 | 42.164.151 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 46.507.200 | 23.632.304 | 23.632.304 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 501.450.900 | 501.450.900 | 501.450.900 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 50.000.000 | 63.826.876 | 63.826.876 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | | | | | | KECAMATAN SIANTAN | 5.637.945.495 | 5.367.733.333 | 5.412.048.333 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 5.637.945.495 | 5.367.733.333 | 5.412.048.333 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | 5.637.945.495 | 5.367.733.333 | 5.412.048.333 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.160.175.945 | 3.871.936.623 | 3.916.251.623 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.895.600 | 2.795.600 | 2.795.600 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.630.600 | 1.990.600 | 1.990.600 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.265.000 | 805.000 | 805.000 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.924.350.303 | 2.677.230.426 | 2.677.230.426 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.737.451.303 | 2.495.790.426 | 2.495.790.426 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 183.840.000 | 181.440.000 | 181.440.000 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.059.000 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 31.314.200 | 31.269.005 | 31.269.005 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3.114.200 | 3.069.005 | 3.069.005 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 28.200.000 | 28.200.000 | 28.200.000 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 3.721.000 | 47.188.500 | 76.503.500 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 43.972.500 | 73.287.500 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 3.721.000 | 3.216.000 | 3.216.000 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 183.051.000 | 145.403.200 | 160.403.200 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.525.000 | 8.525.000 | 8.525.000 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 16.230.000 | 14.969.500 | 14.969.500 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32.530.000 | 28.210.800 | 28.210.800 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 20.000.000 | 17.950.000 | 17.950.000 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.400.000 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 17.250.000 | 16.962.000 | 31.962.000 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 86.116.000 | 58.785.900 | 58.785.900 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 946.553.842 | 914.534.992 | 914.534.992 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 63.198.200 | 54.287.161 | 54.287.161 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 54.474.050 | 40.036.050 | 40.036.050 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 828.881.592 | 820.211.781 | 820.211.781 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 63.290.000 | 53.514.900 | 53.514.900 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12.090.000 | 9.786.500 | 9.786.500 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.700.000 | 10.565.400 | 10.565.400 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 33.500.000 | 33.163.000 | 33.163.000 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.397.056.050 | 1.424.293.410 | 1.424.293.410 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 377.087.600 | 377.087.600 | 377.087.600 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 377.087.600 | 377.087.600 | 377.087.600 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 823.731.300 | 851.204.900 | 851.204.900 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 8.659.100 | 8.632.700 | 8.632.700 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 815.072.200 | 842.572.200 | 842.572.200 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 130.900.000 | 130.900.000 | 130.900.000 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | 130.900.000 | 130.900.000 | 130.900.000 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.05 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | 65.337.150 | 65.100.910 | 65.100.910 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.05 | 01 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 65.337.150 | 65.100.910 | 65.100.910 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 28.545.000 | 28.545.000 | 28.545.000 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 28.545.000 | 28.545.000 | 28.545.000 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 28.545.000 | 28.545.000 | 28.545.000 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 52.168.500 | 42.958.300 | 42.958.300 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 52.168.500 | 42.958.300 | 42.958.300 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 8.162.100 | 8.162.100 | 8.162.100 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 10.788.200 | 10.766.200 | 10.766.200 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 33.218.200 | 24.030.000 | 24.030.000 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | | | | | | KECAMATAN JEMAJA | 6.062.022.803 | 5.728.832.910 | 5.728.832.910 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 6.062.022.803 | 5.728.832.910 | 5.728.832.910 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | 6.062.022.803 | 5.728.832.910 | 5.728.832.910 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.373.296.803 | 5.054.461.028 | 5.054.461.028 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 33.647.300 | 19.392.900 | 19.392.900 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.526.200 | 9.526.200 | 9.526.200 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10.837.200 | 4.187.200 | 4.187.200 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 8.046.500 | 3.046.500 | 3.046.500 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.050.200 | 1.475.000 | 1.475.000 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 3.187.200 | 1.158.000 | 1.158.000 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.830.055.351 | 3.518.318.691 | 3.518.318.691 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.644.139.851 | 3.342.123.191 | 3.342.123.191 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 179.280.000 | 169.560.000 | 169.560.000 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6.635.500 | 6.635.500 | 6.635.500 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 19.061.900 | 19.047.225 | 19.047.225 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 19.061.900 | 19.047.225 | 19.047.225 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 346.016.100 | 377.116.820 | 377.116.820 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.389.000 | 5.290.000 | 5.290.000 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 18.828.700 | 21.103.520 | 21.103.520 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 54.341.000 | 54.437.900 | 54.437.900 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 21.314.400 | 21.814.000 | 21.814.000 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 59.585.000 | 51.310.000 | 51.310.000 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 184.558.000 | 223.161.400 | 223.161.400 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.113.253.352 | 1.088.605.391 | 1.088.605.391 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 86.184.070 | 84.296.821 | 84.296.821 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 40.662.594 | 39.581.994 | 39.581.994 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 986.406.688 | 964.726.576 | 964.726.576 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 31.262.800 | 31.980.001 | 31.980.001 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12.625.000 | 11.850.000 | 11.850.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.130.000 | 20.130.000 | 20.130.000 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4.507.800 | 1 | 1 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 629.486.600 | 623.047.482 | 623.047.482 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 59.715.000 | 56.715.000 | 56.715.000 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 59.715.000 | 56.715.000 | 56.715.000 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 498.971.150 | 495.569.900 | 495.569.900 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5.240.150 | 1.890.000 | 1.890.000 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 493.731.000 | 493.679.900 | 493.679.900 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.05 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | 70.800.450 | 70.762.582 | 70.762.582 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.05 | 01 | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 70.800.450 | 70.762.582 | 70.762.582 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 40.600.000 | 40.585.000 | 40.585.000 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 40.600.000 | 40.585.000 | 40.585.000 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 37.050.000 | 37.035.000 | 37.035.000 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 18.639.400 | 10.739.400 | 10.739.400 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 18.639.400 | 10.739.400 | 10.739.400 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 10.739.400 | 8.639.400 | 8.639.400 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 7.900.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | | | | | | KECAMATAN PALMATAK | 4.862.268.529 | 4.818.081.369 | 4.818.081.369 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 4.862.268.529 | 4.818.081.369 | 4.818.081.369 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | 4.862.268.529 | 4.818.081.369 | 4.818.081.369 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.464.055.529 | 4.410.245.789 | 4.410.245.789 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.921.952.905 | 2.779.861.693 | 2.779.861.693 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.848.272.905 | 2.706.181.693 | 2.706.181.693 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 73.680.000 | 73.680.000 | 73.680.000 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 25.200.000 | 25.200.000 | 25.200.000 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25.200.000 | 25.200.000 | 25.200.000 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 156.972.000 | 211.771.500 | 211.771.500 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.179.000 | 4.177.500 | 4.177.500 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 24.110.000 | 30.970.000 | 30.970.000 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1.863.000 | 1.860.000 | 1.860.000 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50.500.000 | 60.009.000 | 60.009.000 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 76.320.000 | 114.755.000 | 114.755.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.359.930.624 | 1.393.412.596 | 1.393.412.596 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 63.216.000 | 73.000.460 | 73.000.460 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 33.300.000 | 33.300.000 | 33.300.000 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.263.414.624 | 1.287.112.136 | 1.287.112.136 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 318.788.000 | 318.649.380 | 318.649.380 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 167.087.000 | 166.948.380 | 166.948.380 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 167.087.000 | 166.948.380 | 166.948.380 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 151.701.000 | 151.701.000 | 151.701.000 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | 151.701.000 | 151.701.000 | 151.701.000 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.04 | | Pemberdayaan Mukim | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.04 | 05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 68.250.000 | 78.011.200 | 78.011.200 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 68.250.000 | 78.011.200 | 78.011.200 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 68.250.000 | 78.011.200 | 78.011.200 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 11.175.000 | 11.175.000 | 11.175.000 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 11.175.000 | 11.175.000 | 11.175.000 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 11.175.000 | 11.175.000 | 11.175.000 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | | | | | | KECAMATAN SIANTAN TIMUR | 3.083.965.586 | 2.917.819.797 | 2.977.690.597 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 3.083.965.586 | 2.917.819.797 | 2.977.690.597 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | 3.083.965.586 | 2.917.819.797 | 2.977.690.597 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.765.517.586 | 2.513.315.597 | 2.513.315.597 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.150.000 | 4.648.500 | 4.648.500 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.550.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.600.000 | 3.598.500 | 3.598.500 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.717.446.472 | 1.439.645.983 | 1.439.645.983 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.626.466.472 | 1.349.645.983 | 1.349.645.983 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 87.000.000 | 87.000.000 | 87.000.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.980.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 18.600.000 | 18.600.000 | 18.600.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 18.600.000 | 18.600.000 | 18.600.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 270.709.000 | 267.609.000 | 267.609.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.588.000 | 1.088.000 | 1.088.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.074.000 | 4.074.000 | 4.074.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 126.315.000 | 125.565.000 | 125.565.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13.032.000 | 12.832.000 | 12.832.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 71.795.000 | 71.645.000 | 71.645.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 52.905.000 | 52.405.000 | 52.405.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 744.652.099 | 775.152.099 | 775.152.099 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 59.935.000 | 58.435.000 | 58.435.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15.077.971 | 15.077.971 | 15.077.971 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 669.639.128 | 701.639.128 | 701.639.128 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.960.015 | 7.660.015 | 7.660.015 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 7.960.015 | 7.660.015 | 7.660.015 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 232.568.000 | 322.374.200 | 382.245.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 232.568.000 | 322.374.200 | 382.245.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 232.568.000 | 322.374.200 | 382.245.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 55.968.000 | 55.968.000 | 55.968.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 55.968.000 | 55.968.000 | 55.968.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 55.968.000 | 55.968.000 | 55.968.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 29.912.000 | 26.162.000 | 26.162.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 29.912.000 | 26.162.000 | 26.162.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 12.662.000 | 8.912.000 | 8.912.000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 17.250.000 | 17.250.000 | 17.250.000 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | | | | | | KECAMATAN SIANTAN SELATAN | 2.810.269.329 | 2.584.732.476 | 2.584.732.476 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 2.810.269.329 | 2.584.732.476 | 2.584.732.476 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | 2.810.269.329 | 2.584.732.476 | 2.584.732.476 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.633.586.829 | 2.410.805.306 | 2.410.805.306 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.846.449.097 | 1.708.951.562 | 1.708.951.562 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.753.449.097 | 1.616.851.562 | 1.616.851.562 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 93.000.000 | 92.100.000 | 92.100.000 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 25.200.000 | 25.200.000 | 25.200.000 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25.200.000 | 25.200.000 | 25.200.000 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 29.464.000 | 9.301.400 | 9.301.400 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 29.464.000 | 9.301.400 | 9.301.400 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 150.654.000 | 129.350.600 | 129.350.600 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.861.000 | 7.267.000 | 7.267.000 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12.862.000 | 10.979.000 | 10.979.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 11.486.000 | 8.969.600 | 8.969.600 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 35.000.000 | 19.690.000 | 19.690.000 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 82.445.000 | 82.445.000 | 82.445.000 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 507.314.172 | 470.096.184 | 470.096.184 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 49.979.000 | 39.684.600 | 39.684.600 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9.030.820 | 9.030.820 | 9.030.820 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.660.000 | 3.290.000 | 3.290.000 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 438.644.352 | 418.090.764 | 418.090.764 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 74.505.560 | 67.905.560 | 67.905.560 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 63.585.560 | 56.985.560 | 56.985.560 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10.920.000 | 10.920.000 | 10.920.000 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 143.071.000 | 142.557.000 | 142.557.000 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 143.071.000 | 142.557.000 | 142.557.000 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 143.071.000 | 142.557.000 | 142.557.000 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 33.611.500 | 31.370.170 | 31.370.170 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 33.611.500 | 31.370.170 | 31.370.170 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 11.811.500 | 11.770.170 | 11.770.170 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 21.800.000 | 19.600.000 | 19.600.000 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | | | | | | KECAMATAN JEMAJA TIMUR | 3.435.770.758 | 3.270.120.908 | 3.321.502.348 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 3.435.770.758 | 3.270.120.908 | 3.321.502.348 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | 3.435.770.758 | 3.270.120.908 | 3.321.502.348 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.181.165.258 | 2.983.985.008 | 3.006.374.848 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18.714.800 | 10.885.000 | 10.885.000 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.246.000 | 3.225.000 | 3.225.000 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.459.400 | 2.760.000 | 2.760.000 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.855.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.459.400 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.855.000 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.840.000 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.160.191.576 | 1.861.921.546 | 1.861.921.546 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.055.862.176 | 1.768.921.546 | 1.768.921.546 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 99.840.000 | 93.000.000 | 93.000.000 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.489.400 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 19.800.000 | 19.800.000 | 19.800.000 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 19.800.000 | 19.800.000 | 19.800.000 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 251.609.100 | 231.480.530 | 231.480.530 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.420.000 | 3.209.000 | 3.209.000 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.132.600 | 10.064.550 | 10.064.550 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 38.128.500 | 37.318.980 | 37.318.980 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50.050.000 | 35.510.000 | 35.510.000 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 143.878.000 | 143.878.000 | 143.878.000 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 65.571.000 | 99.155.760 | 121.545.600 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 65.571.000 | 99.155.760 | 121.545.600 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 649.427.182 | 752.342.172 | 752.342.172 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 39.860.000 | 32.774.990 | 32.774.990 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9.968.430 | 9.968.430 | 9.968.430 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 599.598.752 | 709.598.752 | 709.598.752 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 15.851.600 | 8.400.000 | 8.400.000 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 15.851.600 | 8.400.000 | 8.400.000 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 254.605.500 | 286.135.900 | 315.127.500 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 159.505.000 | 147.548.000 | 147.548.000 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 159.505.000 | 147.548.000 | 147.548.000 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 95.100.500 | 138.587.900 | 167.579.500 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | 95.100.500 | 138.587.900 | 167.579.500 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | | | | | | KECAMATAN SIANTAN TENGAH | 3.175.311.043 | 3.061.400.471 | 3.061.400.471 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 3.175.311.043 | 3.061.400.471 | 3.061.400.471 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | 3.175.311.043 | 3.061.400.471 | 3.061.400.471 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.122.731.043 | 3.033.400.471 | 3.033.400.471 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 38.987.020 | 17.933.020 | 17.933.020 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.312.520 | 8.312.520 | 8.312.520 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 12.895.500 | 8.696.500 | 8.696.500 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 11.779.000 | 924.000 | 924.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.893.247.483 | 1.865.637.483 | 1.865.637.483 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.769.173.563 | 1.753.843.563 | 1.753.843.563 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 118.560.000 | 110.400.000 | 110.400.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.513.920 | 1.393.920 | 1.393.920 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 63.162.000 | 63.162.000 | 63.162.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 63.162.000 | 63.162.000 | 63.162.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 262.300.300 | 199.661.000 | 199.661.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.270.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.401.500 | 5.401.500 | 5.401.500 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 13.018.500 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 26.260.300 | 16.855.500 | 16.855.500 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.600.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 75.350.000 | 74.600.000 | 74.600.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 129.400.000 | 87.404.000 | 87.404.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 22.900.900 | 15.606.060 | 15.606.060 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 22.900.900 | 15.606.060 | 15.606.060 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 826.133.340 | 865.720.908 | 865.720.908 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 92.597.468 | 89.894.700 | 89.894.700 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.120.000 | 24.120.000 | 24.120.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 709.415.872 | 751.706.208 | 751.706.208 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 16.000.000 | 5.680.000 | 5.680.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 16.000.000 | 5.680.000 | 5.680.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 16.800.000 | 4.940.000 | 4.940.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 16.800.000 | 4.940.000 | 4.940.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 16.800.000 | 4.940.000 | 4.940.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 35.780.000 | 23.060.000 | 23.060.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 35.780.000 | 23.060.000 | 23.060.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 14.770.000 | 14.770.000 | 14.770.000 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 21.010.000 | 8.290.000 | 8.290.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | | | | | | KECAMATAN SIANTAN UTARA | 2.811.207.132 | 2.376.478.590 | 2.376.967.590 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 2.811.207.132 | 2.376.478.590 | 2.376.967.590 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | 2.811.207.132 | 2.376.478.590 | 2.376.967.590 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.654.049.238 | 2.219.820.696 | 2.219.809.696 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.938.291 | 2.745.097 | 2.745.097 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.995.097 | 895.097 | 895.097 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.943.194 | 350.000 | 350.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.759.241.002 | 1.377.886.258 | 1.377.886.258 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.683.085.002 | 1.302.206.258 | 1.302.206.258 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 73.680.000 | 73.680.000 | 73.680.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.476.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 12.160.000 | 10.800.000 | 10.800.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12.160.000 | 10.800.000 | 10.800.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 17.974.000 | 17.974.000 | 17.974.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 17.974.000 | 17.974.000 | 17.974.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 198.210.200 | 166.108.400 | 166.097.400 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.106.000 | 1.982.000 | 1.982.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.541.400 | 4.491.400 | 4.491.400 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 35.911.000 | 35.911.000 | 35.911.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.754.800 | 6.570.000 | 6.570.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 27.250.000 | 26.250.000 | 26.250.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 118.647.000 | 90.904.000 | 90.893.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 48.000.000 | 47.056.000 | 47.056.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 48.000.000 | 47.056.000 | 47.056.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 597.244.215 | 586.381.511 | 586.381.511 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 19.136.000 | 13.308.150 | 13.308.150 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.639.735 | 1.639.735 | 1.639.735 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 55.000.000 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 521.468.480 | 571.433.626 | 571.433.626 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 15.281.530 | 10.869.430 | 10.869.430 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 5.458.530 | 3.625.330 | 3.625.330 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.823.000 | 7.244.100 | 7.244.100 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 117.855.500 | 117.855.500 | 117.855.500 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 117.855.500 | 117.855.500 | 117.855.500 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 117.855.500 | 117.855.500 | 117.855.500 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 31.308.194 | 31.308.194 | 31.308.194 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 31.308.194 | 31.308.194 | 31.308.194 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 28.272.000 | 28.272.000 | 28.272.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 3.036.194 | 3.036.194 | 3.036.194 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 7.994.200 | 7.494.200 | 7.994.200 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 7.994.200 | 7.494.200 | 7.994.200 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 6.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1.994.200 | 1.994.200 | 1.994.200 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | | | | | | KECAMATAN JEMAJA BARAT | 2.852.722.295 | 2.593.882.264 | 2.593.882.264 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 2.852.722.295 | 2.593.882.264 | 2.593.882.264 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | 2.852.722.295 | 2.593.882.264 | 2.593.882.264 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.683.247.295 | 2.434.007.264 | 2.434.007.264 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 22.164.200 | 10.014.200 | 10.014.200 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.580.400 | 4.580.400 | 4.580.400 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.120.800 | 1.095.800 | 1.095.800 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.900.800 | 875.800 | 875.800 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.750.000 | 725.000 | 725.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.831.800 | 806.800 | 806.800 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.130.800 | 930.800 | 930.800 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.849.600 | 999.600 | 999.600 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.968.346.335 | 1.718.692.144 | 1.718.692.144 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.862.443.935 | 1.619.629.744 | 1.619.629.744 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 102.840.000 | 96.000.000 | 96.000.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.062.400 | 3.062.400 | 3.062.400 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 253.889.000 | 256.203.000 | 256.203.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.440.800 | 4.440.800 | 4.440.800 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6.559.000 | 6.559.000 | 6.559.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 34.235.200 | 29.089.200 | 29.089.200 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.300.000 | 7.100.000 | 7.100.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 62.500.000 | 56.060.000 | 56.060.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 136.854.000 | 152.954.000 | 152.954.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 416.597.760 | 426.865.920 | 426.865.920 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 35.284.800 | 34.679.800 | 34.679.800 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 381.312.960 | 392.186.120 | 392.186.120 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 22.250.000 | 22.232.000 | 22.232.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6.570.000 | 6.570.000 | 6.570.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 15.680.000 | 15.662.000 | 15.662.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 141.640.000 | 133.690.000 | 133.690.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 141.640.000 | 133.690.000 | 133.690.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 141.640.000 | 133.690.000 | 133.690.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 11.775.000 | 11.775.000 | 11.775.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 11.775.000 | 11.775.000 | 11.775.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 11.775.000 | 11.775.000 | 11.775.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 16.060.000 | 14.410.000 | 14.410.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 16.060.000 | 14.410.000 | 14.410.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 16.060.000 | 14.410.000 | 14.410.000 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | | | | | | KECAMATAN KUTE SIANTAN | 3.548.560.712 | 3.804.151.740 | 3.804.151.740 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | 3.548.560.712 | 3.804.151.740 | 3.804.151.740 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | 3.548.560.712 | 3.804.151.740 | 3.804.151.740 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.504.721.712 | 3.760.450.240 | 3.760.450.240 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.310.500 | 8.310.500 | 8.310.500 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 8.310.500 | 8.310.500 | 8.310.500 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.934.899.910 | 1.898.022.624 | 1.898.022.624 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.843.263.910 | 1.806.386.624 | 1.806.386.624 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 88.680.000 | 88.680.000 | 88.680.000 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.956.000 | 2.956.000 | 2.956.000 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 415.568.900 | 552.082.500 | 552.082.500 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 296.193.900 | 441.087.500 | 441.087.500 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 119.375.000 | 110.995.000 | 110.995.000 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 154.700.000 | 154.700.000 | 154.700.000 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 154.700.000 | 154.700.000 | 154.700.000 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 971.232.372 | 1.138.834.616 | 1.138.834.616 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 106.498.804 | 99.716.400 | 99.716.400 |

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode | | | | | | Uraian | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan PPAS (Rp) | Perubahan APBD (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 25.944.000 | 22.042.000 | 22.042.000 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 838.789.568 | 1.017.076.216 | 1.017.076.216 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 20.010.030 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 8.160.030 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 11.850.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 26.045.000 | 25.907.500 | 25.907.500 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 26.045.000 | 25.907.500 | 25.907.500 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 26.045.000 | 25.907.500 | 25.907.500 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 17.794.000 | 17.794.000 | 17.794.000 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 17.794.000 | 17.794.000 | 17.794.000 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 8.194.000 | 8.194.000 | 8.194.000 |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| GOLONGAN / RUANG | ESELON | | | | | NON ESELON | | | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN | JABATAN FUNGSIONAL PENDIDIKAN | JABATAN FUNGSIONAL UMUM | JABATAN PELAKSANA | |
| Golongan IV / e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Golongan IV / d | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| Golongan IV / c | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **15** |
| Golongan IV / b | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | **29** |
| Golongan IV / a | 0 | 5 | 30 | 2 | 0 | 4 | 27 | 0 | 3 | **71** |
| **JUMLAH GOLONGAN IV** | **116** | | | | | | | | | |
| Golongan III / d | 0 | 0 | 52 | 55 | 0 | 15 | 38 | 58 | 18 | **236** |
| Golongan III / c | 0 | 0 | 9 | 40 | 0 | 33 | 111 | 55 | 19 | **267** |
| Golongan III / b | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 117 | 144 | 11 | 57 | **362** |
| Golongan III / a | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 54 | 168 | 56 | 196 | **484** |
| **JUMLAH GOLONGAN III** | **1349** | | | | | | | | | |
| Golongan II / d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | 1 | 94 | **175** |
| Golongan II / c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3 | 6 | 65 | **146** |
| Golongan II / b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | **50** |
| Golongan II / a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | **21** |
| **JUMLAH GOLONGAN II** | **392** | | | | | | | | | |
| Golongan I / d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| Golongan I / c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | **2** |
| Golongan I / b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | **2** |
| Golongan I / a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **JUMLAH GOLONGAN I** | **5** | | | | | | | | | |
| Golongan VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | **8** |
| Golongan IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | **153** |
| Golongan X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | **2** |
| **JUMLAH GOLONGAN PPPK** | **163** | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | **0** | **27** | **109** | **140** | **0** | **386** | **647** | **198** | **518** | **2025** |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran X.1 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal. : 31 Oktober 2022

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

| NO | URAIAN | REF | ANGGARAN 2021 | REALISASI 2021 | (%) | REALISASI 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PENDAPATAN** | **A.4** | | | | |
| 2 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **A.4.1** | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | A.4.1.1 | 17.078.855.000,00 | 13.248.704.027,79 | 77,57 | 14.148.007.073,69 |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | A.4.1.2 | 2.183.004.300,00 | 4.731.456.914,83 | 216,74 | 3.493.020.817,48 |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | A.4.1.3 | 1.982.019.763,00 | 1.979.148.878,00 | 99,86 | 1.318.019.763,00 |
| 6 | Lain-lain PAD Yang Sah | A.4.1.4 | 16.981.815.905,00 | 13.365.742.442,34 | 78,71 | 12.675.194.592,01 |
| 7 | **Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)** | | **38.225.694.968,00** | **33.325.052.262,96** | **87,18** | **31.634.242.246,18** |
| 8 | **PENDAPATAN TRANSFER** | **A.4.2** | | | | |
| 9 | **PENDAPATAN TRANFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN** | **A.4.2.1** | | | | |
| 10 | Dana Bagi Hasil (DBH) | A.4.2.1.01 | 417.788.708.670,00 | 169.817.097.319,00 | 40,65 | 186.480.952.762,00 |
| 11 | Dana Alokasi Umum (DAU) | A.4.2.1.02 | 368.303.160.000,00 | 368.303.160.000,00 | 100,00 | 375.518.805.000,00 |
| 12 | Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik | A.4.2.1.03 | 76.236.416.000,00 | 67.820.014.609,00 | 88,96 | 48.062.745.149,00 |
| 13 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | A.4.2.1.04 | 26.322.271.000,00 | 18.395.205.686,00 | 69,88 | 25.204.602.620,00 |
| 14 | **Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)** | | **888.650.555.670,00** | **624.335.477.614,00** | **70,26** | **635.267.105.531,00** |
| 15 | **PENDAPATAN TRANFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA** | **A.4.2.2** | | | | |
| 16 | Dana Insentif Daerah | A.4.2.2.1 | 65.907.002.000,00 | 65.907.002.000,00 | 100,00 | **0,00** |
| 17 | Dana Otonomi Khusus | A.4.2.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.151.920.000,00 |
| 18 | Dana Desa | A.4.2.2.3 | 53.152.626.000,00 | 53.151.623.854,00 | 100,00 | 52.454.050.000,00 |
| 19 | **Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 18)** | | **119.059.628.000,00** | **119.058.625.854,00** | 100,00 | **77.605.970.000,00** |
| 20 | **PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH** | **A.4.2.3** | | | | |
| 21 | Pendapatan Bagi Hasil | A.4.2.3.1 | 45.390.252.354,00 | 42.160.395.659,00 | 92,88 | 39.011.149.731,00 |
| 22 | Bantuan Keuangan | A.4.2.3.2 | 18.000.000.000,00 | 13.500.000.000,00 | 75,00 | 20.500.000.000,00 |
| 23 | **Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah – (21 s/d 22)** | | **63.390.252.354,00** | **55.660.395.659,00** | **87,81** | **59.511.149.731,00** |
| 24 | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **A.4.3** | | | | |
| 25 | Pendapatan Hibah | A.4.3.1 | 13.334.713.543,00 | 13.183.312.366,22 | 98,86 | 12.770.388.126,00 |
| 26 | **Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (25)** | | **13.334.713.543,00** | **13.183.312.366,22** | **98,86** | **12.770.388.126,00** |
| 27 | **JUMLAH PENDAPATAN (7+14 +19+23+26)** | | **1.122.660.844.535,00** | **845.562.863.756,18** | **75,32** | **816.788.855.634,18** |
| 28 | | | | | | |
| 29 | **BELANJA** | **A.5** | | | | |
| 30 | **BELANJA OPERASI** | **A.5.1** | | | | |
| 31 | Belanja Pegawai | A.5.1.1 | 313.219.867.181,00 | 274.063.269.975,54 | 87,50 | 352.276.430.743,00 |
| 32 | Belanja Barang dan Jasa | A.5.1.2 | 405.311.608.635,00 | 271.300.030.814,57 | 66,94 | 190.441.915.852,35 |
| 33 | Belanja Hibah | A.5.1.5 | 20.673.177.425,00 | 14.400.218.918,00 | 69,66 | 27.391.102.575,00 |
| 34 | Belanja Bantuan Sosial | A.5.1.6 | 134.715.000,00 | 134.715.000,00 | 100,00 | 183.445.000,00 |
| 35 | **Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 34)** | | **739.339.368.241,00** | **559.898.234.708,11** | **75,73** | **570.292.894.170,35** |
| 36 | **BELANJA MODAL** | **A.5.2** | | | | |
| 37 | Belanja Modal Tanah | A.5.2.1 | 230.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 790.607.000,00 |
| 38 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | A.5.2.2 | 54.829.220.602,00 | 33.331.184.690,10 | 60,79 | 27.265.764.736,00 |
| 39 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | A.5.2.3 | 53.187.209.647,00 | 44.443.379.101,50 | 83,56 | 83.625.432.770,92 |
| 40 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | A.5.2.4 | 147.147.405.138,00 | 63.046.577.745,69 | 42,85 | 45.446.641.371,00 |
| 41 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | A.5.2.5 | 2.511.809.549,00 | 2.142.044.928,83 | 85,28 | 2.620.025.400,00 |
| 42 | **Jumlah Belanja Modal (37 s/d 41)** | | **257.905.987.936,00** | **142.963.186.466,12** | **55,43** | **159.748.471.277,92** |
| 43 | **BELANJA TAK TERDUGA** | **A.5.3** | | | | |
| 44 | Belanja Tak Terduga | A.5.3.1 | 1.000.000.000,00 | 878.745.392,00 | 87,87 | 29.074.357.387,00 |
| 45 | **Jumlah Belanja Tak Terduga (44)** | | **1.000.000.000,00** | **878.745.392,00** | **87,87** | **29.074.357.387,00** |
| 46 | **BELANJA TRANSFER** | **A.5.4** | | | | |
| 47 | Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota | A.5.4.1 | 2.250.000.000,00 | 1.260.607.506,00 | 56,03 | **0,00** |
| 48 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | A.5.4.2 | 131.761.638.315,00 | 102.470.138.110,00 | 77,77 | 110.619.265.815,00 |
| 49 | **Jumlah Belanja Transfer (47 s/d 48)** | | **134.011.638.315,00** | **103.730.745.616,00** | **77,40** | **110.619.265.815,00** |
| 50 | **JUMLAH BELANJA (35 + 42 + 45 + 49)** | | **1.132.256.994.492,00** | **807.470.912.182,23** | **71,32** | **869.734.988.650,27** |
| 51 | | | | | | |

| NO | URAIAN | REF | ANGGARAN 2021 | REALISASI 2021 | (%) | REALISASI 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | **SURPLUS / (DEFISIT) (27 - 50)** | | **(9.596.149.957,00)** | **38.091.951.573,95** | **(396,95)** | **(52.946.133.016,09)** |
| 53 | | | | | | |
| 54 | **PEMBIAYAAN** | **A.6** | | | | |
| 55 | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **A.6.1** | | | | |
| 56 | Penggunaan SiLPA | A.6.1.1 | 10.096.149.957,00 | 10.096.149.957,31 | 100,00 | 63.983.386.446,40 |
| 57 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | A.6.1.5 | 500.000.000,00 | 902.904.255,00 | 180,58 | 558.896.527,00 |
| 58 | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan (56 s/d 57)** | | **10.596.149.957,00** | **10.999.054.212,31** | **103,80** | **64.542.282.973,40** |
| 59 | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **A.6.2** | | | | |
| 60 | Pemberian Pinjaman Daerah | A.6.2.4 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 100,00 | 1.500.000.000,00 |
| 61 | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (60)** | | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **100,00** | **1.500.000.000,00** |
| 62 | **PEMBIAYAAN NETTO (58 - 61)** | **A.6.3** | **9.596.149.957,00** | **9.999.054.212,31** | **104,20** | **63.042.282.973,40** |
| 63 | | | | | | |
| 64 | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (52 + 62)** | | **0,00** | **48.091.005.786,26** | **0,00** | **10.096.149.957,31** |

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**

**ABDUL HARIS**

Lampiran X.2 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**NERACA**

**NERACA**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**Per 31 Desember 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No. | URAIAN | REF | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ASET** | **C.1.** | | |
| 2 | **ASET LANCAR** | **C.1.1.** | | |
| 3 | Kas di Kas Daerah | **C.1.1.1** | 47.631.944.465,30 | 9.198.688.493,12 |
| 4 | Kas di Bendahara Penerimaan | **C.1.1.2** | 264.261.100,00 | 1.560.000,00 |
| 5 | Kas Dana BOS | **C.1.1.3** | 80.811.221,71 | 651.494.722,53 |
| 6 | Kas Lainnya | **C.1.1.4** | 113.988.999,25 | 244.406.741,66 |
| 7 | Piutang Pendapatan Daerah | **C.1.1.5** | 18.102.578.997,32 | 128.854.219.113,27 |
| 8 | Penyisihan Piutang | | (979.489.101,22) | (965.061.821,73) |
| 9 | Piutang PBB P2 | **C.1.1.5.1** | 1.215.728.700,00 | 1.043.768.273,00 |
| 10 | Penyisihan Piutang PBB P2 | | (506.426.168,21) | (412.892.897,62) |
| 11 | Piutang PBB P2 Netto (8 - 9) | | 709.302.531,79 | 630.875.375,38 |
| 12 | Piutang Retribusi | **C.1.1.5.2** | 8.460.000,00 | 5.187.700,00 |
| 13 | Penyisihan Piutang Retribusi | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Piutang Retribusi Netto (12 - 13) | | 8.460.000,00 | 5.187.700,00 |
| 15 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | **C.1.1.5.3** | 429.553.532,00 | 368.014.462,00 |
| 16 | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | | (238.586.999,69) | 0,00 |
| 17 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto (15 - 16) | | 190.966.532,31 | 368.014.462,00 |
| 18 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | **C.1.1.5.4** | 0,00 | 115.119.310.671,00 |
| 19 | Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto (18 - 19) | | 0,00 | 115.119.310.671,00 |
| 21 | Piutang Transfer Antar Daerah | **C.1.1.5.5** | 12.324.204.874,00 | 9.577.888.512,00 |
| 22 | Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto (21 - 22) | | 12.324.204.874,00 | 9.577.888.512,00 |
| 24 | Piutang Lainnya | **C.1.1.5.6** | 4.124.631.891,32 | 3.705.111.317,00 |
| 25 | Penyisihan Piutang Lainnya | | (234.475.933,32) | (552.168.924,11) |
| 26 | Piutang Lainnya Netto (24 - 25) | | 3.890.155.958,00 | 3.152.942.392,89 |
| 27 | Persediaan | **C.1.1.6** | 29.460.146.343,34 | 27.576.708.359,00 |
| 28 | **JUMLAH ASET LANCAR (3 s/d 28)** | | **94.674.242.025,70** | **166.527.077.429,58** |
| 29 | **INVESTASI JANGKA PANJANG** | **C.1.2** | | |
| 30 | **Investasi Non Permanen** | **C.1.2.1** | | |
| 31 | Dana Bergulir | **C.1.2.1.1** | 1.917.686.098,00 | 2.127.281.696,94 |
| 32 | **Jumlah Investasi Non Permanen (31)** | | **1.917.686.098,00** | **2.127.281.696,94** |
| 33 | **Investasi Permanen** | **C.1.2.2** | | |
| 34 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | **C.1.2.2.1** | 7.823.700.000,00 | 7.823.700.000,00 |
| 35 | **Jumlah Investasi Permanen (34)** | | **7.823.700.000,00** | **7.823.700.000,00** |
| 36 | **JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (32 + 35)** | | **9.741.386.098,00** | **9.950.981.696,94** |
| 37 | **ASET TETAP** | **C.1.3** | | |
| 38 | Tanah | **C.1.3.1** | 173.601.524.658,00 | 173.660.613.658,00 |
| 39 | Peralatan dan Mesin | **C.1.3.2** | 383.628.984.631,10 | 375.293.976.515,04 |
| 40 | Gedung dan Bangunan | **C.1.3.3** | 772.073.734.567,88 | 738.387.805.838,38 |
| 41 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | **C.1.3.4** | 1.066.886.084.146,45 | 1.047.634.801.886,14 |
| 42 | Aset Tetap Lainnya | **C.1.3.5** | 14.700.612.035,16 | 14.177.949.435,00 |
| 43 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | **C.1.3.6** | 312.969.379.347,69 | 172.240.741.852,99 |
| 44 | Akumulasi Penyusutan | **C.1.3.7** | (870.236.654.494,34) | (762.449.765.168,12) |
| 45 | **JUMLAH ASET TETAP (38 s/d 44)** | | **1.853.623.664.891,94** | **1.758.946.124.017,43** |
| 46 | **ASET LAINNYA** | **C.1.5** | | |
| 47 | Tuntutan Ganti Rugi | **C.1.5.1** | 65.134.050,00 | 79.846.550,00 |
| 48 | Penyisihan Tuntutan Tagihan Jangka Panjang | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Tuntutan Ganti Rugi Netto (34 - 35) | | 65.134.050,00 | 79.846.550,00 |
| 50 | Aset Tak Berwujud | **C.1.5.3** | 46.864.204.544,00 | 46.727.936.544,00 |
| 51 | Aset Lain-lain | **C.1.5.4** | 62.461.745.762,71 | 33.233.381.333,00 |
| 52 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | **C.1.5.5** | (38.868.675.387,07) | (34.940.871.252,73) |
| 53 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | **C.1.5.6** | (57.032.845.639,94) | 0,00 |
| 54 | **JUMLAH ASET LAINNYA (47 s/d 53)** | | **13.489.563.329,70** | **45.100.293.174,27** |
| 55 | | | | |
| 56 | **JUMLAH ASET (28+36+45+54)** | | **1.971.528.856.345,34** | **1.980.524.476.318,22** |
| 57 | | | | |
| 58 | **KEWAJIBAN** | **C.2** | | |
| 59 | **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | **C.2.1** | | |
| 60 | Pendapatan Diterima Dimuka | **C.2.1.5** | 36.000.000,00 | 0,00 |

| No. | URAIAN | REF | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Utang Belanja | C.2.1.6 | 47.822.123.966,00 | 1.466.079.882,00 |
| 62 | Utang Jangka Pendek Lainnya | C.2.1.7 | 71.205.801.098,32 | 99.044.000,00 |
| 63 | **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (60 s/d 62)** | | **119.063.925.064,32** | **1.565.123.882,00** |
| 64 | | | | |
| 65 | **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | C.2.2 | | |
| 66 | Utang kepada Pemerintah Pusat | C.2.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (66)** | | **0,00** | **0,00** |
| 68 | **JUMLAH KEWAJIBAN (63 + 67)** | | **119.063.925.064,32** | **1.565.123.882,00** |
| 69 | | | | |
| 70 | **EKUITAS** | C.3 | 1.852.464.931.281,02 | 1.978.959.352.436,22 |
| 71 | **JUMLAH EKUITAS (70)** | | **1.852.464.931.281,02** | **1.978.959.352.436,22** |
| 72 | **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (68 + 71)** | | **1.971.528.856.345,34** | **1.980.524.476.318,22** |

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**

**ABDUL HARIS**

Lampiran X.3 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

## LAPORAN ARUS KAS (LAK)

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**LAPORAN ARUS KAS**
**Per 31 Desember 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No. | URAIAN | REF | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Arus Kas dari Aktivitas Operasi** | **E.1** | | |
| 2 | ***Arus Masuk Kas*** | **E.1.1** | | |
| 3 | Penerimaan Pajak Daerah | E.1.1.1 | 13.248.704.027,79 | 14.148.007.073,69 |
| 4 | Penerimaan Retribusi Daerah | E.1.1.2 | 4.731.456.914,83 | 3.493.020.817,48 |
| 5 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | E.1.1.3 | 1.979.148.878,00 | 1.318.019.763,00 |
| 6 | Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | E.1.1.4 | 13.365.742.442,34 | 12.675.194.592,01 |
| 7 | Penerimaan Dana Bagi Hasil | E.1.1.5 | 169.817.097.319,00 | 186.480.952.762,00 |
| 8 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | E.1.1.6 | 368.303.160.000,00 | 375.518.805.000,00 |
| 9 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik | E.1.1.7 | 67.820.014.609,00 | 48.062.745.149,00 |
| 10 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik | E.1.1.8 | 18.395.205.686,00 | 25.204.602.620,00 |
| 11 | Penerimaan Dana Insentif Daerah | E.1.1.9 | 65.907.002.000,00 | 25.151.920.000,00 |
| 12 | Penerimaan Dana Desa | E.1.1.10 | 53.151.623.854,00 | 52.454.050.000,00 |
| 13 | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi | E.1.1.11 | 42.160.395.659,00 | 39.011.149.731,00 |
| 14 | Penerimaan Bantuan Keuangan | E.1.1.12 | 13.500.000.000,00 | 20.500.000.000,00 |
| 15 | Penerimaan Hibah | E.1.1.13 | 13.183.312.366,22 | 12.770.388.126,00 |
| 16 | ***Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)*** | | **845.562.863.756,18** | **816.788.855.634,18** |
| 17 | ***Arus Keluar Kas*** | **E.1.2** | | |
| 18 | Pembayaran Pegawai | E.1.2.1 | 274.063.269.975,54 | 352.276.430.743,00 |
| 19 | Pembayaran Barang & Jasa | E.1.2.2 | 271.300.030.814,57 | 190.441.915.852,35 |
| 20 | Pembayaran Belanja Hibah | E.1.2.3 | 14.400.218.918,00 | 27.391.102.575,00 |
| 21 | Pembayaran Belanja Bantuan Sosial | E.1.2.4 | 134.715.000,00 | 183.445.000,00 |
| 22 | Pembayaran Tak Terduga | E.1.2.5 | 878.745.392,00 | 29.074.357.387,00 |
| 23 | Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan | **E.1.2.7.** | 103.730.745.616,00 | 110.619.265.815,00 |
| 24 | ***Jumlah Arus Kas Keluar (18 s/d 23)*** | | **664.507.725.716,11** | **709.986.517.372,35** |
| 25 | **Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi (16 - 24)** | | **181.055.138.040,07** | **106.802.338.261,83** |
| 26 | | | | |
| 27 | **Arus Kas dari Aktifitas Investasi** | **E.2.** | | |
| 28 | ***Arus Masuk Kas*** | | | |
| 29 | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ***Jumlah Arus Masuk Kas (29)*** | | **0,00** | **0,00** |
| 31 | ***Arus Keluar Kas*** | **E.2.1** | | |
| 32 | Perolehan Tanah | E.2.1.1 | 0,00 | 790.607.000,00 |
| 33 | Perolehan Peralatan dan Mesin | E.2.1.2 | 33.331.184.690,10 | 27.265.764.736,00 |
| 34 | Perolehan Gedung dan Bangunan | E.2.1.3 | 44.443.379.101,50 | 83.625.432.770,92 |
| 35 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | E.2.1.4 | 63.046.577.745,69 | 45.446.641.371,00 |
| 36 | Perolehan Aset Tetap Lainnya | E.2.1.5 | 2.142.044.928,83 | 2.620.025.400,00 |
| 37 | ***Jumlah Arus Keluar Kas (32 s/d 36)*** | | **142.963.186.466,12** | **159.748.471.277,92** |
| 38 | **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (30 - 37)** | | **(142.963.186.466,12)** | **(159.748.471.277,92)** |
| 39 | | | | |
| 40 | **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan** | **E.3.** | | |
| 41 | ***Arus Masuk Kas*** | **E.3.1** | | |
| 42 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | | 902.904.255,00 | 558.896.527,00 |
| 43 | ***Jumlah Arus Masuk Kas (42)*** | | **902.904.255,00** | **558.896.527,00** |
| 44 | ***Arus Keluar Kas*** | **E.3.2** | | |
| 45 | Pemberian Pinjaman Daerah | | 1.000.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| 46 | ***Jumlah Arus Keluar Kas (45)*** | | **1.000.000.000,00** | **1.500.000.000,00** |
| 47 | **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (43 - 46)** | | **(97.095.745,00)** | **(941.103.473,00)** |
| 48 | | | | |
| 49 | **Arus Kas dari Aktivitas Transitoris** | **E.4** | | |
| 50 | ***Arus Masuk Kas*** | **E.4.1** | | |
| 51 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 58.509.418.685,00 | 59.700.975.971,00 |
| 52 | ***Jumlah Arus Masuk Kas (51)*** | | **58.509.418.685,00** | **59.700.975.971,00** |
| 53 | ***Arus Kas Keluar*** | **E.4.2** | | |
| 54 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 58.509.418.685,00 | 59.720.391.802,00 |
| 55 | ***Jumlah Arus Keluar Kas (54)*** | | **58.509.418.685,00** | **59.720.391.802,00** |
| 56 | **Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris (52 - 55)** | | **0,00** | **(19.415.831,00)** |
| 57 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 58 | **Kenaikan/ (Penurunan) Kas (25 + 38 + 47 + 56)** | | 37.994.855.828,95 | (53.906.652.320,09) |
| 59 | **Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas dib Bendahara Penerimaan** | | 10.096.149.957,31 | 64.002.802.277,40 |
| 60 | **Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas dib Bendahara Penerimaan (58+59)** | | 48.091.005.786,26 | 10.096.149.957,31 |
| 61 | **Kas di Kas Daerah** | | 47.631.944.465,30 | 9.198.688.493,12 |
| 62 | **Kas di Bendahara Penerimaan** | | 264.261.100,00 | 1.560.000,00 |
| 63 | **Kas Dana BOS** | | 80.811.221,71 | 651.494.722,53 |
| 64 | **Kas Lainnya** | | 113.988.999,25 | 244.406.741,66 |
| 65 | **Saldo Akhir Kas (61 + 64)** | | 48.091.005.786,26 | 10.096.149.957,31 |

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**

**ABDUL HARIS**

*Audited*

## 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### 7.6. PENDAHULUAN

#### 7.6.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsilidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 (1) disusun dan disajikan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 191 (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan Umum Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 berbunyi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pasal 189 sampai dengan Pasal 93. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

#### 7.6.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau;

g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan;

n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

o. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

q. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi. dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

r. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

s. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

t. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;

u. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

w. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

x. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

y. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan. Inventarisasi. Dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi. Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

gg. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Modifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

hh. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

ii. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

jj. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah;

kk. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

ll. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021;

mm. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021;

nn. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah Kabupaten Kepulauan Anambas;

oo. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Kepulauan Anambas;

pp. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran Kabupaten Kepulauan Anambas;

qq. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir Kabupaten Kepulauan Anambas;

rr. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel Kabupaten Kepulauan Anambas;

ss. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kabupaten Kepulauan Anambas;

tt. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Kepulauan Anambas;

uu. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kepulauan Anambas;

vv. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;

ww. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7.a10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan Kabupaten Kepulauan Anambas;

xx. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kepulauan Anambas;

yy. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan

zz. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

aaa. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 99 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

bbb. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021;

ccc. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021;

### 7.6.3. Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 yang disusun berdasarkan kompilasi dari laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. yaitu sebanyak 31 SKPD terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga;
5. Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
7. Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
9. Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan;
10. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
12. Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik;
13. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Perdagangan dan Perindustrian;
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

17. Badan Keuangan Daerah;
18. Badan Penelitian. Pengembangan dan Perencanaan Daerah;
19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
22. Kecamatan Siantan;
23. Kecamatan Jemaja;
24. Kecamatan Palmatak;
25. Kecamatan Siantan Timur;
26. Kecamatan Siantan Selatan;
27. Kecamatan Jemaja Timur;
28. Kecamatan Siantan Tengah;
29. Kecamatan Siantan Utara;
30. Kecamatan Jemaja Barat; dan
31. Kecamatan Kute Siantan.

### 7.6.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah menyajikan ikhtisar sumber. alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA. belanja. transfer. dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

a. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah. dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah;
b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah;
c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain. termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman. pemberian pinjaman kepada entitas lain. dan penyertaan modal oleh pemerintah.

### 7.6.3.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

### 7.6.3.3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset. kewajiban. dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset. kewajiban. dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. baik oleh pemerintah maupun masyarakat. serta dapat diukur dalam satuan uang. termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah; dan

c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah.

### 7.6.3.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO. beban. transfer. dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

b. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelapora lain. termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; dan

d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa. tidak diharapkan sering atau rutin terjadi. dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

### 7.6.3.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi. investasi. pendanaan. dan transitoris yang menggambarkan saldo awal. penerimaan. pengeluaran. dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah selama periode tertentu. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber.

penggunaan. perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah;

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

### 7.6.3.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 7.6.3.7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Perubahan SAL. Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas. Neraca. dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas 27 Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai 28 berikut.

## 7.7. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN. EKONOMI MAKRO. KEBIJAKAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

### 7.7.1. Kebijakan Fiskal/Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuannya menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut perlu dikelola secara profesional. terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan pelaksanaan kebijakan fiskal dalam fungsi otorisasi. perencanaan. pengawasan. alokasi. distribusi. dan stabilisasi.

APBD merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut dan atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian. APBD merupakan media untuk mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode Tahunan.

Dasar penyusunan APBD tersebut didasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah atau RKPD (yakni dokumen perencanaan daerah untuk periode satu Tahun dan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif terhadap Kebijakan Umum APBD atau KUA (yakni dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan. belanja. dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu Tahun dan Prioritas dan Plafon Anggaran atau PPA (yakni program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran

yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD).

Adapun yang menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan APBD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA (yakni dokumen yang memuat pendapatan. belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran). yang juga berfungsi sebagai landasan pengendalian terhadap pelaksanaan APBD.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD tersebut maka entitas akuntansi dan entitas pelaporan diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan kepada sistem akuntansi pemerintahan daerah (yakni serangkaian prosedur yang meliputi proses pengumpulan data. pencatatan. pengikhtisaran. sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer). Sebagai dokumen formal pernyataan kebijakan fiskal yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021. Dalam pelaksanaan. APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 mengalami sekali perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021.

#### 7.7.1.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut. pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. diupayakan secara mandiri dalam jangka panjang melalui optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). yang dapat dapat ditempuh antara lain melalui:

a. Mengembangkan dan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;

b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;

c. Penerapan law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah;

d. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;

e. Peningkatan kualitas. kemudahan. ketepatan. dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah;

f. Mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan;

g. Mengupayakan memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air Minum. Perusahaan Daerah Bidang Jasa Pelayanan Pertambangan. dan lain-lain; dan

h. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### 7.7.1.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan untuk belanja daerah meliputi:

a. Belanja Daerah mengacu kepada prioritas pembangunan yang masih tertuang dalam KUA dan PPAS. Prioritas pembangunan dilaksanakan belum mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memperhatikan dokumen perencanaan terkait lainnya;

b. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;

c. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;

d. Kebijakan pengalokasian belanja daerah dirinci menurut: urusan pemerintahan daerah. fungsi. organisasi. program. kegiatan. kelompok. jenis. obyek. dan rincian obyek belanja;

e. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

f. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara;

g. Klasifikasi belanja menurut organisasi yang disesuaikan dengan susunan organisasi yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

h. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

i. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: (1) belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa (2) belanja modal;

j. Masing-masing jenis belanja tersebut terbagi atas obyek dan rincian obyek belanja sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;

k. Klasifikasi beban menurut kelompok beban terdiri dari: (1) beban operasi. beban transfer. defisit non anggaran dan beban luar biasa;

l. Efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengandung arti bahwa dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan:

    1) Tujuan. sasaran. hasil dan manfaat. serta indikator kinerja yang ingin dicapai;

    2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja. serta penetapan harga satuan yang rasional.

m. Untuk mendukung Kebijakan Nasional. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di daerah. perlu juga melakukan dukungan pendanaan terhadap:

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah (APBD) untuk menjaga tingkat konsumsi serta investasi untuk meningkatkan *demand* guna menstimulus perekonomian khususnya disektor riil. Percepatan belanja modal dan infrastruktur tidak hanya akan mendorong investasi tetapi akan memberikan *multiplier effect* ke sektor ekonomi lainnya;

2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendukung sektor industri pengolahan dengan mengutamakan tender-tender proyek Pemerintah kepada industri domestik seperti proyek tol laut pemerintah bagi komoditas perdagangan;

3) Mempercepat proses perizinan khususnya terkait analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk mendorong percepatan realisasi investasi serta dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

4) Peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta upaya membangun masyarakat madani dengan memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi. serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban. termasuk peningkatan kerukunan umat beragama;

5) Peningkatan keserasian pembangunan di daerah dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan antara pusat dan daerah. antara provinsi dan kabupaten/kota. serta antar daerah. baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan dan pengendaliannya; dan

6) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan desa melalui upaya pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan berbagai program. seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. peningkatan administrasi pemerintahan desa. dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bakti gotong royong. termasuk upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di pedesaan.

n. Meningkatkan pengawasan baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat sehingga dana yang tersedia dalam APBD dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

**7.7.1.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan dilakukan atas pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu. Kebijakan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan (*good governance)* yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut perlu dikelola secara profesional. terbuka dan bertanggung jawab. untuk sebesar-besarnya kemakmuran pegawai negeri sipil daerah khususnya dan seluruh masyarakat daerah. yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD. APBD merupakan media untuk mengkoordinasikan aktivitas pendapatan daerah. belanja daerah serta pembiayaan daerah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.

Dasar penyusunan APBD tersebut didasarkan kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahunan. yang merupakan penjabaran RPJMD Kepala Daerah selama 5 (lima) Tahun. Kebijakan Keuangan pada Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah. yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut. pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan keuangan pada belanja daerah lebih menitikberatkan pada anggaran yang bersifat efektif. efisien. dan ekonomi yang lebih memprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan pada pembiayaan daerah di penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber pada sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman dana bergulir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dengan memberikan pinjaman daerah yang bersifat dana bergulir untuk mengentas kemiskinan pada masyarakat. Kebijakan pembiayaan dilakukan atas pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

### 7.7.2. Ekonomi Makro

Produk Domestik Bruto pada Tingkat Nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tingkat Regional (Provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan. yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp14.453.581.748,00.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya). dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1. dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator ekonomi makro terhadap perkembangan suatu daerah.

**Tabel 1**
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 s.d. 2020**

**(Miliar Rupiah)**

| Lapangan Usaha | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A** | Pertanian. Kehutanan dan Perikanan | 793,98 | 845,80 | 881,69 | 884,98 | 880,95 |
| **B** | Pertambangan dan Penggalian | 12.408,06 | 12.871,52 | 14.075,07 | 14.468,34 | 11.572,29 |
| **C** | Industri Pengolahan | 1.809,37 | 1.781,00 | 20,25 | 21,71 | 23,19 |
| **D** | Pengadaan Listrik Dan Gas | 8,19 | 8,92 | 9,43 | 9,58 | 9,59 |

| Lapangan Usaha | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E** | Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,40 |
| **F** | Konstruksi | 726,06 | 814,16 | 858,64 | 961,01 | 888,10 |
| **G** | Perdagangan Besar dan Enceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 326,06 | 363,17 | 391,30 | 428,46 | 415,36 |
| **H** | Transportasi dan Pergudangan | 27,41 | 30,18 | 31,52 | 32,90 | 20,87 |
| **I** | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 13,36 | 15,17 | 16,84 | 18,79 | 15,02 |
| **J** | Informasi dan Komunikasi | 51,53 | 58,48 | 62,43 | 71,98 | 74,97 |
| **K** | Jasa Keuangan dan Asuransi | 17,42 | 19,25 | 20,31 | 21,47 | 21,72 |
| **L** | *Real Estate* | 82,21 | 90,55 | 93,91 | 100,64 | 97,30 |
| **M.N** | Jasa Perusahaan | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| **O** | Administrasi Pemerintahan. Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib | 272,97 | 290,59 | 312,73 | 338,20 | 351,05 |
| **P** | Jasa Pendidikan | 25,52 | 28,80 | 30,92 | 33,59 | 35,79 |
| **Q** | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 25,92 | 28,79 | 33,36 | 36,53 | 36,72 |
| **R.S.T.U** | Jasa Lainnya | 9,18 | 9,85 | 10,48 | 11,17 | 10,23 |
| **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** | | **16.597,58** | **17.256,62** | **16.849,29** | **17,439,77** | **14.453,58** |

**Sumber Data diolah dari Katalog BPS Kab.Kep. Anambas Dalam Angka : 1102001.210**

**Tabel 2**
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha**
**Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 s.d. 2020**

**(Miliar Rupiah)**

| Lapangan Usaha | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A** | Pertanian. Kehutanan dan Perikanan | 621,55 | 637,30 | 640,58 | 643,70 | 629,89 |
| **B** | Pertambangan dan Penggalian | 9.688,15 | 9.650,05 | 10.095,12 | 9.981,00 | 9.106,80 |
| **C** | Industri Pengolahan | 1.659,68 | 1.600,70 | 14,64 | 15,36 | 15,73 |
| **D** | Pengadaan Listrik Dan Gas | 6,07 | 6,46 | 6,40 | 6,37 | 6,51 |
| **E** | Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 |
| **F** | Konstruksi | 539,40 | 583,84 | 613,09 | 664,18 | 626,54 |
| **G** | Perdagangan Besar dan Enceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 236,29 | 246,67 | 255,99 | 273,00 | 256,05 |
| **H** | Transportasi dan Pergudangan | 18,88 | 19,74 | 20,49 | 20,88 | 13,37 |
| **I** | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 10,63 | 11,43 | 12,21 | 13,38 | 10,74 |
| **J** | Informasi dan Komunikasi | 47,57 | 50,34 | 53,28 | 59,37 | 62,69 |
| **K** | Jasa Keuangan dan Asuransi | 14,15 | 14,78 | 15,43 | 15,98 | 16,42 |
| **L** | *Real Estate* | 63,40 | 66,88 | 69,04 | 73,31 | 70,85 |
| **M.N** | Jasa Perusahaan | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| **O** | Administrasi Pemerintahan. Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib | 202,01 | 203,98 | 213,58 | 224,27 | 232,44 |
| **P** | Jasa Pendidikan | 20,00 | 20,98 | 22,05 | 22,95 | 23,73 |
| **Q** | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 20,43 | 22,04 | 23,80 | 25,52 | 25,42 |
| **R.S.T.U** | Jasa Lainnya | 6,72 | 6,96 | 7,34 | 7,73 | 6,92 |
| **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** | | **13.155,24** | **13.142,46** | **12.063,35** | **12.047,35** | **11.104,45** |

**Sumber Data diolah dari Katalog BPS Kab.Kep. Anambas Dalam Angka : 1102001.210**

### 7.7.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sehubungan diterbitkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi. Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan APBD berkaitan dengan beberapa urusan yang menjadi tanggungjawab Daerah antara lain :

1. Urusan Pemerintahan. meliputi :
   a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
   b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
   c. Urusan pemerintahan pilihan.

2. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;

3. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. meliputi :
   a. Unsur Perencanaan;
   b. Unsur Keuangan; dan
   c. Unsur Kepegawaian.

4. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan. meliputi :
   a. Inspektorat

Urusan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan sebanyak . yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi. dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan antara lain perikanan. pertanian. perkebunan. kehutanan dan pariwisata.

#### 7.7.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Jumlah program. kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan sebanyak 44 Program. 105 Kegiatan dan 261 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp655.230.760.339,00 pada 7 (tujuh) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. yaitu terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga terdiri dari 5 Program. 17 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp225.895.703.300,00;

b. Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 Program. 13 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp179.026.400.328,00 ;

c. Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terdiri dari 14 Program. 23 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp203.283.004.393,00 ;

d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari 3 Program. 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.824.113.837,00;

e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 6 Program. 11 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.304.428.154,00;

f. Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 9 Program. 18 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.536.744.893,00;

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 2 Program. 10 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan;

Tabel 3
Anggaran Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

| No | SKPD | Anggaran Belanja |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN. PEMUDA DAN OLAHRAGA | 225.895.703.300,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 179.026.400.328,00 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM. PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 203.283.004.393,00 |
| 4 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 17.824.113.837,00 |
| 5 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5.304.428.154,00 |
| 6 | DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 14.536.744.893,00 |
| 7 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 9.360.365.434,00 |
| **Jumlah** | | **655.230.760.339,00** |

### 7.7.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Jumlah program. kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan sebanyak 34 Program. 67 Kegiatan dan 181 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp102.397.189.480,00 pada 5 (lima) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. yaitu terdiri dari :

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 3 Program. 8 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.957.818.790,00;

b. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup terdiri dari terdiri dari 10 Program. 18 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 47.541.309.205,00 ;

c. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik terdiri dari 5 Program. 12 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.827.133.212,00;

d. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari 9 Program. 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.111.263.792,00;

e. Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari 7 Program. 15 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.959.664.481,00;

Tabel 4

Anggaran Urusan Pemerintah Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

| No | SKPD | Anggaran Belanja |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6.957.818.790,00 |
| 2 | DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 47.541.309.205,00 |
| 3 | DINAS KOMUNIKASI. INFORMATIKA DAN STATISTIK | 16.827.133.212,00 |
| 4 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO. PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 21.111.263.792,00 |
| 5 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP. TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 9.959.664.481,00 |
| **Jumlah** | | **102.397.189.480,00** |

### 7.7.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Jumlah program. kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan pilihan ditetapkan sebanyak 15 Program. 31 Kegiatan dan 67 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.585.368.578,00 pada 2 (dua) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. yaitu terdiri dari :

a. Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan terdiri dari 10 Program. 20 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.054.637.339,00;

b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari 5 Program. 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.530.731.239,00;

Tabel 5

Anggaran Urusan Pemerintah Pilihan

| No | SKPD | Anggaran Belanja |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | DINAS PERIKANAN. PERTANIAN DAN PANGAN | 32.054.637.339,00 |
| 2 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 15.530.731.239,00 |
| **Jumlah** | | 47.585.368.578,00 |

### 7.7.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Jumlah program. kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur pendukung urusan pemerintahan ditetapkan sebanyak 40 Program. 133 Kegiatan dan 370 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp140.449.718.895,00 pada 12 (dua belas) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. yaitu terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah terdiri dari 5 Program. 20 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp55.637.696.763,00;

b. Sekretariat DPRD terdiri dari 2 Program. 14 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.554.102.231,00;

c. Kecamatan Siantan terdiri dari 4 Program. 13 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.607.212.380,00;

d. Kecamatan Jemaja terdiri dari 4 Program. 12 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.913.928.593,00;

e. Kecamatan Palmatak terdiri dari 4 Program. 11 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.655.421.027,00;

f. Kecamatan Siantan Timur terdiri dari 3 Program. 9 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.227.008.596,00;

g. Kecamatan Siantan Selatan terdiri dari 3 Program. 10 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.056.430.693,00;

h. Kecamatan Jemaja Timur terdiri dari 3 Program. 11 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.527.070.912,00;

i. Kecamatan Siantan Tengah terdiri dari 5 Program. 15 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.188.928.137,00;

j. Kecamatan Siantan Utara terdiri dari 4 Program. 12 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.871.187.889,00;

k. Kecamatan Jemaja Barat terdiri dari 3 Program. 11 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.424.471.146,00; dan

l. Kecamatan Kute Siantan terdiri dari 5 Program. 15 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.786.260.528,00.

Tabel 6

Anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

| No | SKPD | Anggaran Belanja |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | DPRD | 0,00 |
| 2 | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | 0,00 |
| 3 | SEKRETARIAT DAERAH | 55.637.696.763,00 |
| 4 | SEKRETARIAT DPRD | 36.554.102.231,00 |
| 5 | KECAMATAN SIANTAN | 8.607.212.380,00 |
| 6 | KECAMATAN JEMAJA | 6.913.928.593,00 |
| 7 | KECAMATAN PALMATAK | 5.655.421.027,00 |
| 8 | KECAMATAN SIANTAN TIMUR | 4.227.008.596,00 |
| 9 | KECAMATAN SIANTAN SELATAN | 3.056.430.693,00 |
| 10 | KECAMATAN JEMAJA TIMUR | 3.527.070.912,00 |
| 11 | KECAMATAN SIANTAN TENGAH | 5.188.928.137,00 |
| 12 | KECAMATAN SIANTAN UTARA | 2.871.187.889,00 |
| 13 | KECAMATAN JEMAJA BARAT | 3.424.471.146,00 |
| 14 | KECAMATAN KUTE SIANTAN | 4.786.260.528,00 |
| **Jumlah** | | **14.044.971.889.500,00** |

### 7.7.3.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Jumlah program. kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur pengawasan urusan pemerintahan terdapat pada 1 (satu) SKPD yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. ditetapkan sebanyak 3 Program. 12 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.677.959.774,00.

Tabel 7

Anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah

| No | SKPD | Anggaran Belanja |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | INSPEKTORAT DAERAH | **1.167.795.977.400,00** |
| **Jumlah** | | **1.167.795.977.400,00** |

### 7.7.3.6. Unsur Perencanaan Urusan Pemerintahan

Jumlah program. kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur perencanaan urusan pemerintahan terdapat pada 1 (satu) SKPD yaitu Badan Penelitian. Pengembangan Dan Perencanaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. ditetapkan sebanyak 4 Program. 16 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.939.246.980,00.

Tabel 8

Anggaran Unsur Perencanaan Urusan Pemerintah

| No | SKPD | Anggaran Belanja |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | BADAN PENELITIAN. PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH | 10.939.246.980,00 |
| **Jumlah** | | 10.939.246.980,00 |

### 7.7.3.7. Unsur Keuangan Urusan Pemerintahan

Jumlah program. kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur keuangan urusan pemerintahan terdapat pada 1 (satu) SKPD yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. ditetapkan sebanyak 4 Program. 16 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp155.419.516.706,00.

Tabel 9

Anggaran Unsur Keuangan Urusan Pemerintah

| No | SKPD | Anggaran Belanja |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 155.419.516.706,00 |
| **Jumlah** | | 155.419.516.706,00 |

### 7.7.3.8. Unsur Kepegawaian Urusan Pemerintahan

Jumlah program. kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur kepegawaian urusan pemerintahan terdapat pada 1 (satu) SKPD yaitu Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas. ditetapkan sebanyak 3 Program. 12 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 8.253.861.740,00.

Tabel 10

Anggaran Unsur Kepegawaian Urusan Pemerintah

| No | SKPD | Anggaran Belanja |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 8.253.861.740,00 |
| **Jumlah** | | 8.253.861.740,00 |

### 7.7.3.9. Unsur Penghubung Urusan Pemerintahan

Jumlah program. kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi unsur penghubung urusan pemerintahan terdapat pada 1 (satu) SKPD yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. ditetapkan sebanyak 1 Program. 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp206.947.000,00.

Tabel 11

Anggaran Unsur Kepegawaian Urusan Pemerintah

| No | SKPD | Anggaran Belanja |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH | 206.947.000,00 |
| **Jumlah** | | 206.947.000,00 |

### 7.7.3.10. Proporsi Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Adapun proporsi anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 bila diklasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 1**

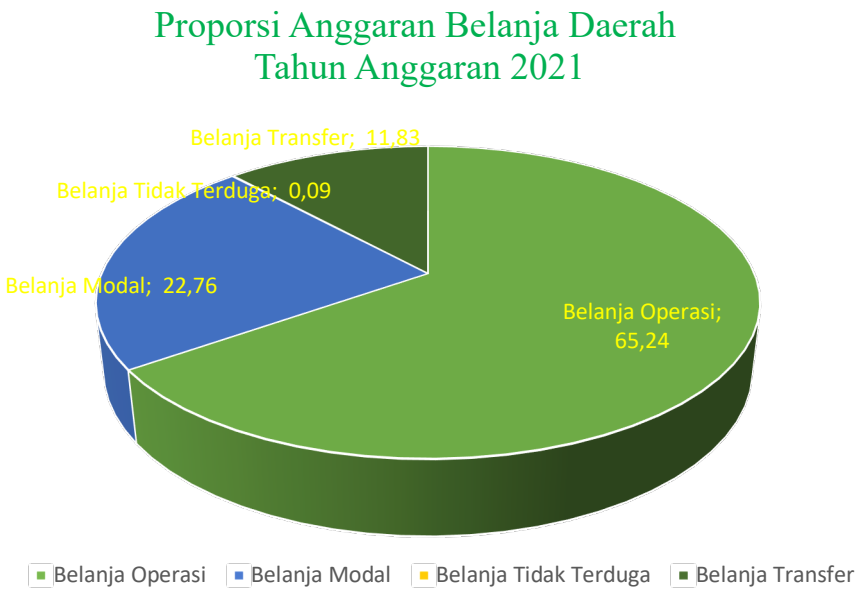

## 7.8. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

### 7.8.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pencapaian kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Tahun Anggaran 2021 dapat dikategorikan baik menurut aspek jumlah realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang melebihi pendapatan yang ditargetkan diterima di Tahun 2021. Hal tersebut terlihat dalam ikhtisar pendapatan dalam tabel berikut.

**Tabel 12**
**Ikhtisar Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2021 | REALISASI 2021 | (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **PENDAPATAN – LRA** | **1.122.660.844.535,00** | **845.562.863.756,18** | **75,32** |
| **2** | | | | |
| **3** | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA | 38.225.694.968,00 | 33.325.052.262,96 | 87,18 |
| **4** | PENDAPATAN TRANSFER – LRA | 1.071.100.436.024,00 | 799.054.499.127,00 | 74,60 |
| **5** | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LRA | 13.334.713.543,00 | 13.183.312.366,22 | 98,86 |
| **6** | | | | |
| **7** | **BELANJA** | **998.245.356.177,00** | **703.740.166.566,23** | **70,50** |
| **8** | | | | |
| **9** | BELANJA OPERASI | 739.339.368.241,00 | 559.898.234.708,11 | 75,73 |
| **10** | BELANJA MODAL | 257.905.987.936,00 | 142.963.186.466,12 | 55,43 |
| **11** | BELANJA TAK TERDUGA | 1.000.000.000,00 | 878.745.392,00 | 87,87 |
| **12** | | | | |
| **13** | **TRANSFER BANTUAN KEUANGAN** | **134.011.638.315,00** | **103.730.745.616,00** | **77,40** |
| **14** | | | | |
| **15** | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (7+13) | **1.132.256.994.492,00** | **807.470.912.182,23** | **71,32** |
| **16** | | | | |
| **17** | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **(9.596.149.957,00)** | **38.091.951.573,95** | **(396,95)** |
| **18** | | | | |
| **19** | **PEMBIAYAAN** | | | |
| **20** | | | | |
| **21** | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 10.596.149.957,00 | 10.999.054.212,31 | 103,80 |

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2021 | REALISASI 2021 | (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **22** | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 100,00 |
| **23** | | | | |
| **24** | **PEMBIAYAAN NETTO** | **9.596.149.957,00** | **9.999.054.212,31** | **104,20** |
| **25** | | | | |
| **26** | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | **0,00** | **48.091.005.786,26** | |

### 7.8.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

#### 7.8.2.1. Pendapatan

Jumlah Pendapatan yang ditargetkan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.122.660.844.535,00 (Satu Triliun seratus dua puluh dua milyar enam ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). dan terealisasikan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp845.562.863.756,18 (delapan ratus empat puluh lima milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah delapan belas sen). atau sebesar 75,32%.

Pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021. terdapat beberapa kendala dalam penerimaan pada beberapa jenis pendapatan antara lain:

a. Pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp38.225.694.968,00 dan yang terealisasi sebesar Rp33.325.052.262,96 atau sebesar 87,18% yang disebabkan menurunnya penerimaan pendapatan atas target yang telah di tetapkan pada tahun anggaran 2021.

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi Kepulauan Riau) yang ditargetkan sebesar Rp1.071.100.436.024,00 dan yang terealisasi sebesar Rp799.054.499.127,00 atau sebesar 74,60%. dikarenakan Pemerintah Daerah sudah melakukan yang terbaik dalam penyerapan anggaran yang diterima dari pusat. dan tepat waktu pelaporan ke Kementerian Keuangan RI akan taatnya Pemerintah Daerah dengan peraturan perundang-undang yang berlaku akan tetapi ada beberapa kendala lain yaitu penundaan transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi ke Pemerintah Daerah triwulan IV Tahun 2021. sehingga tidak tercapainya target pendapatan transfer.

**c.** Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah **y**ang ditargetkan sebesar Rp13.334.713.543,00 dan terealisasikan sebesar Rp13.183.312.366,22 atau sebesar 98,86%.

#### 7.8.2.2. Belanja

Belanja daerah yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.132.256.994.492,00 (satu teriliun serratus tiga puluh dua milyar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah). dan terealisasikan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp807.470.912.182,23 (delapan ratus tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah dua puluh tiga sen). atau sebesar 71,32%.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 terdapat pada kelompok yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp739.339.368.241,00 dan terealisasi sebesar Rp559.898.234.708,11 atau sebesar 75,73%;

b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp257.905.987.936,00 dan terealisasi sebesar Rp142.963.186.466,12 atau sebesar 55,43%;

c. Belanja Tak Terduga yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp878.745.392,00 atau sebesar 87,87%. untuk mendukung program Pemerintah dalam penanggulangan bencana Nasional wabah Covid-19;

d. Belanja Transfer yang dianggarkan sebesar Rp134.011.638.315,00 dan terealisasi sebesar Rp103.730.745.616,00 atau sebesar 77,40%.

#### 7.8.2.3. Surplus/Defisit

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada APBD Tahun Anggaran 2021. saat penganggaran mengalami defisit atas belanja daerah yang dibandingkan dengan pendapatan sebesar (Rp9.596.149.957,00) dan pada saat sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami surplus realisasi sebesar Rp38.091.951.573,95 atau sebesar 396,95%.

#### 7.8.2.4. Pembiayaan Daerah Netto

Pembiayaan Daerah Netto Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp9.596.149.957,00 dan terrealisasikan sebesar Rp9.999.054.212,31 atau sebesar 104,20% yang terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp10.596.149.957,00 dan terealisasi sebesar Rp10.999.054.212,31 atau sebesar 103,80% yang merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun lalu sebesar Rp10.096.149.957,31 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah atas Pokok Dana Bergulir sebesar Rp902.904.255,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 100% diperuntukan pada pembiayaan dana bergulir bagi masyarakat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### 7.8.2.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp48.091.005.786,26.

### 7.9. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

#### 7.9.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi. dan

secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan SKPD yang kemudian akan digabungkan dan/atau dikonsolidasikan di entitas pelaporan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021. berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Neraca. Laporan Operasional (LO). Laporan Arus Kas (LAK). Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### 7.9.2. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang- undangan. yang umumnya bercirikan (a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran. (b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. (c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat. dan (d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan keuangan daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2021. meliputi 31 (tiga puluh satu) SKPD yang terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah yang mencakup Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan 9 (sembilan) Bagian;
2. Sekretariat DPRD. mencakup DPRD;
3. Inspektorat;
4. 11 (sebelas) Dinas yang mencakup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu. Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian. dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
5. 1 (satu) Satuan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. 6 (enam) Badan yang mencakup Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Keuangan Daerah termasuk didalamnya SKPKD-PPKD. Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. dan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah;

7. 10 (sepuluh) Kecamatan yang mencakup Kecamatan Siantan. Kecamatan Jemaja. Kecamatan Palmatak. Kecamatan Siantan Timur. Kecamatan Siantan Selatan. Kecamatan Jemaja Timur. Kecamatan Siantan Tengah. Kecamatan Jemaja Barat. Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan.

### 7.9.3. Prosedur Konsolidasian

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya. dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya. dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

## 7.10. KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 7.10.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi. dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Di samping itu. dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

### 7.10.2. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut melanjutkan penyajian laporan keuangan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 telah berbasis akrual. Pertama. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2021 telah sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua. keterbandingan penyajian akun-akun Tahun berjalan dengan Tahun

sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada Tahun 2021 adalah merupakan implementasi akuntansi berbasis akrual.

Pengakuan *(recognition)* dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset. kewajiban. ekuitas dana. pendapatan. belanja. dan pembiayaan. sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas akuntansi yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

### 7.10.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip.dasar. konvensi. aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran. antar periode maupun antar entitas.

#### 7.10.3.1. Akuntansi Pendapatan (LRA dan LO)

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah. yang menambah ekuitas dana. merupakan hak daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah termasuk rekening kas SKPD.

a. Pendapatan-LRA diakui pada saat:

   1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

   2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD. dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;

   3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD. dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;

   4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima. dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan

   5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD. dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b. Pendapatan-LO diakui pada saat:

   1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau

   2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pendapatan-LO diakui apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya Surat Ketetapan Pendapatan Daerah (SKP-D)/Surat Ketetapan Retrisbusi Daerah

(SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Perda/Pergub/Perbup) dimana hingga akhir Tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan bersamaan dengan Pendapatan-LRA dengan kondisi sebagai berikut.

1) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai kepada Bendahara Penerimaan/BUD tanpa penetapan);
2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi; dan
3) Dokumen timbulnya hak sulit. tidak diperoleh atau tidak diterbitkan. misalnya pendapatan atas jasa giro.

### 7.10.3.2. Akuntansi Belanja Dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran termasuk dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD (DPA/DPPA-SKPD).

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Belanja dan beban dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan organisasi. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai. beban barang. beban bunga. beban subsidi. beban hibah. beban bantuan sosial. beban penyusutan aset tetap/amortisasi. beban transfer dan beban tak terduga. Pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. yang mencakup:

#### 7.10.3.2.1. Belanja/Beban Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. meliputi: (1) Belanja/Beban Pegawai. (2) Belanja/Beban Barang dan Jasa. (3) Belanja/Beban Bunga. (4) Belanja/Beban Hibah (5). Bantuan Sosial dan (6) Belanja Bantuan Keuangan.

#### 7.10.3.2.2. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja modal meliputi: (1) Belanja Tanah. (2) Belanja Peralatan dan Mesin. (3) Belanja Gedung dan Bangunan. (4) Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan. (5) Belanja Aset Tetap Lainnya. dan (6) Belanja Aset Lainnya.

#### 7.10.3.2.3. Belanja Tak Terduga/Beban Luar Biasa

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam. bencana sosial. dan

pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

**7.10.3.2.4. Transfer/Beban Transfer**

Transfer/Beban Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

a. Pengakuan belanja diakui pada saat:

   1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui penerbitan SP2D LS untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD;

   2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;

   3) Dalam hal badan layanan umum. belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

b. Pengakuan beban diakui pada saat:

   1) Saat timbulnya kewajiban;

   2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan

   3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

**7.10.3.2.5. Akuntansi Surplus/Defisit**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

**7.10.3.2.6. Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah. baik penerimaan maupun pengeluaran. yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

**7.10.3.2.6.1. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan SiLPA Tahun lalu. penerimaan pinjaman. penjualan obligasi pemerintah. hasil privatisasi perusahaan daerah. penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga. penjualan investasi permanen lainnya. dan pencairan dana cadangan. serta penggunaan SiLPA Tahun lalu. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto (sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran).

### 7.10.3.2.6.2. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga. penyertaan modal pemerintah. pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu. dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos Pendapatan Asli Daerah lainnya.

### 7.10.3.2.6.3. Akuntansi Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

### 7.10.3.2.7. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Nilai akun SiLPA yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun nilai akun SiLPA dalam Neraca memiliki nilai yang sama yakni mencakup SiLPA Tahun berjalan maupun Tahun-Tahun sebelumnya.

a. Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. baik oleh pemerintah maupun masyarakat. serta dapat diukur dalam satuan uang. termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b. Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas. dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari: (1) Kas di Kas Daerah. (2) Kas di Bendahara Penerimaan. (3) Kas di Bendahara Pengeluaran. (4) Kas di BLUD. (5) Kas Lainnya. (6) Setara Kas. (7) Investasi Jangka Pendek. (8) Piutang Pendapatan. (9) Piutang Lainnya. (10) Penyisihan Piutang. (11) Beban Dibayar Dimuka. dan (12) Persediaan.

c. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya yang terbagi atas Investasi Non Permanen dan Permanen. Akun ini dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

1) Investasi Non Permanen.

   Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan tersebut. dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau diperjualbelikan/menarik kembali.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi ini dilakukan untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

d. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap dibagi menjadi 6 (enam) klasifikasi. yaitu: (1) Tanah. (2) Peralatan dan Mesin. (3) Gedung dan Bangunan. (4)Jalan. Irigasi dan Jaringan. (5) Aset Tetap Lainnya. dan (5) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Pengukuran Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri. suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku. tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja. bahan baku. dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan. perlengkapan. tenaga listrik. sewa peralatan. dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap. yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku. barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga. hewan. ikan. dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi. yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya. dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Aset Lainnya terdiri dari Aset Tidak Berwujud (*Software*. Lisensi. Hak Cipta. Hasil Kajian. *Masterplan*) dan Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

f. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran. dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah yang sumbernya adalah dari hasil penyisihan sebagian kelebihan realisasi pendapatan digunakan sebagai Cadangan Anggaran Pembangunan. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan perundang-undangan. sehingga dana cadangan yang sudah ditetapkan peruntukannya tersebut tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Pembentukan dan penggunaan dana cadangan tersebut dilakukan dengan persetujuan dewan legislatif. Apabila terdapat lebih dari satu dana cadangan. maka dana cadangan harus diungkapkan dan dirinci menurut peruntukannya. Akun ini dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Jika terdapat hasil yang diperoleh dari dana cadangan diperlakukan sebagai penambah nilai dana cadangan tersebut.

g. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar kembali dan/atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari: (1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). (2) Utang Bunga. (3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. (4) Pendapatan Diterima Dimuka. (5) Utang Beban. (6) Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali dan/atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan dari penerbitan sekuritas pemerintah.

Pengakuan kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan. dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari antara lain: (1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*). (2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*). (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*). (4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

h. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas merupakan pos pada laporan di neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam laporan keuangan *accrual basis*. ekuitas tidak lagi rinci dan/atau dikelompokkan seperti pada saat *cash toward accrual*.

i. Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional. investasi Aset non keuangan. pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal. penerimaan. pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua penerimaan kas daerah yang dibukukan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan; sedangkan pengeluaran adalah semua pengeluaran kas daerah yang dibukukan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.

1) Klasifikasi Penyajian

Arus Kas disajikan ke dalam empat kelompok aktivitas berikut.

a) Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang ditujukan untuk aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: (a) Penerimaan Perpajakan; (b) Penerimaan Retribusi; (c) Penerimaan Hibah; (d) Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Negara/Daerah dan Investasi Lainnya; (e) Lain-lain PAD yang Sah. dan (f) Transfer Masuk. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang; (c) Bunga; (d) Subsidi; (e) Hibah; (f) Bantuan Sosial; (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan (h) Transfer Keluar.

b) Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari: (a) Penjualan Aset Tetap; (b) Penjualan Aset Lainnya. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari: (a) Perolehan Aset Tetap; (b) Perolehan Aset Lainnya.

c) Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain: (a) Penggunaan SiLPA Tahun Lalu; (b) Penerimaan Pinjaman; (c) Penerimaan Hasil Penjualan Obligasi/Surat Utang Negara; (d) Penerimaan dari Divestasi; (e) Penerimaan Kembali Pinjaman; dan (f) Pencairan Dana Cadangan. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain: (a) Penyertaan Modal Pemerintah; (b) Pembayaran Pokok Pinjaman; (c) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan (d) Pembentukan Dana Cadangan.

d) Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan. belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Kiriman Uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk Pihak Ketiga. Adapun Kiriman Uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah. Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

2) Metode Penyajian

Entitas pelaporan dapat menyajikan laporan arus kas dengan menggunakan cara:

a) Metode Langsung. metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

b) Metode Tidak Langsung. metode ini. surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional non kas. penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang. serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi aset non keuangan dan pembiayaan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mempergunakan metode langsung dalam menyusun laporkan arus kas sebagaimana yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

## 7.11. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

### 7.11.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan pada Tahun Anggaran 2021. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengadakan perubahan APBD. hal ini disebabkan adanya target penerimaan yang tidak terealisasi dengan baik. sehingga perlu adanya perubahan program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka penghematan belanja pemerintah daerah dan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 ini telah memasukkan unsur Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021.

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2020. meliputi:

A. Laporan Realisasi Anggaran;

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

C. Neraca;

D. Laporan Operasional;

E. Laporan Arus Kas;

F. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

G. Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut masing-masing jenis laporan keuangan disajikan sebagai berikut ini.

## A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### A.4 PENDAPATAN DAERAH - LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan. yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terakhir dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kode Akun Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari Akun. Kelompok. Jenis. Objek. Rincian Objek dan Sub Rincian Objek. Kelompok Pendapat Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan). dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 13**
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Pendapatan daerah | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA | 38.225.694.968,00 | 33.325.052.262,96 | 87,18 | (4.900.642.705,04) | 31.634.242.246,18 |
| 2 | Pendapatan Transfer – LRA | 1.071.100.436.024,00 | 799.054.499.127,00 | 74,60 | (272.045.936.897,00) | 772.384.225.262,00 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 13.334.713.543,00 | 13.183.312.366,22 | 98,86 | (151.506.729,12) | 12.770.388.126,00 |
| **JUMLAH** | | 1.122.660.844.535,00 | 845.562.863.756,18 | 75,32 | (277.097.980.778,82) | 816.788.855.634,18 |

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.122.660.844.535,00 terealisasi sebesar Rp845.562.863.756,18 atau 75,32%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 Rp816.788.855.634,18 yang merupakan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp31.634.242.246,18 ditambah dengan pendapatan transfer sebesar Rp772.384.225.262,00 yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp712.873.075.531,00 dan dari Pemerintah Daerah/provinsi sebesar Rp59.511.149.731,00

dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp12.770.388.126,00 sehingga pada APBD Tahun 2021 Kabupaten Kepulauan Anambas pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp28.774.008.122,00 atau sebesar 3,52%.

Masing-masing realisasi akun Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

### A.4.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 14**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Pendapatan | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio % | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Pendapatan Pajak Daerah | 17.078.855.000,00 | 13.248.704.027,79 | 77,57 | (3.830.150.972,21) | 14.148.007.073,69 |
| **2** | Pendapatan Retribusi Daerah | 2.183.004.300,00 | 4.731.456.914,83 | 216,74 | 2.548.452.614,83 | 3.493.020.817,48 |
| **3** | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.982.019.763,00 | 1.979.148.878,00 | 99,86 | (2,870,885,00) | 1.318.019.763,00 |
| **4** | Lain-lain PAD yang Sah | 16.981.815.905,00 | 13.365.742.442,34 | 78,71 | (3.616.073.462,66) | 12.675.194.592,01 |
| **JUMLAH** | | **38.225.694.968,00** | **33.325.052.262,96** | **87,18** | **(4.900.642.705,04)** | **31.634.242.246,18** |

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

#### A.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut.

**Tabel 15**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Pendapatan Daerah | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Pajak Hotel | 600.000.000,00 | 570.485.383,01 | 95,08 | (29.514.616,99) | 1.376.491.504,00 |
| **2** | Pajak Restoran | 10.251.355.000,00 | 7.949.805.588,00 | 77,55 | (2.301.549.412,00) | 9.251.640.339,00 |
| **3** | Pajak Hiburan | 150.000.000,00 | 25.927.000,00 | 17,28 | (124.073.000,00) | 46.318.010,00 |
| **4** | Pajak R Reklame | 15.000.000,00 | 16.244.000,00 | 108,29 | 1.244.000,00 | 13.661.260,00 |
| **5** | Pajak Penerangan | 4.050.000.000,00 | 3.318.417.029,00 | 81,94 | (731.582.971,00) | 2.291.017.876,00 |

| No | Pendapatan Daerah | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Jalan | | | | | |
| **6** | Pajak Air Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | Pajak Sarang Burung Walet | 100.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4,00 | (96.000.000,00) | 9.600.000,00 |
| **8** | Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan | 862.500.000,00 | 151.799.163,78 | 17,60 | (710.700.836,22) | 273.413.364,69 |
| **9** | Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan | 400.000.000,00 | 373.015.592,00 | 93,25 | (26.984.408,00) | 415.987.859,00 |
| **10** | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 650.000.000,00 | 839.010.272,00 | 129,08 | 189.010.272,00 | 469.876.861,00 |
| **11** | Pajak Rokok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | | **17.078.855.000,00** | **13.248.704.027,79** | **77,57** | **(3.830.150.972,21)** | **14.148.007.073,69** |

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.078.855.000,00 terealisasi sebesar Rp13.248.704.027,79 atau 77,57%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp14.148.007.073,69 mengalami penurunan sebesar Rp899.303.045,90 atau sebesar (6,79%). Penurunan tersebut terjadi pada Pajak Hotel. Pajak Reklame. Pajak Penerangan Jalan. Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai Tahun Anggaran 2011 sudah melaksanakan Pendaerahan PBB yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Daerah. Sebelum dimulainya pendaerahan PBB / pemungutan PBB Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki saldo piutang dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Berkas Permohonan Pelayanan PBB-P2 Nomor: BA- 55/WPJ.02/KP.07/2014 tanggal 30 Januari 2014 dan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan. Data Piutang PBBP2. dan Aset Sitaan Nomor BA-58/WPJ.02/KP.07/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang selaku Pihak Pertama dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Pihak Kedua.

Pembayaran pajak daerah ada 2 (dua) metode yaitu metode *self assessment* dan *official assessment*. dimana *self assessment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). menghitung. memperhitungkan. membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *self assessment* terdiri dari Pajak Hotel. Pajak Restoran. Pajak Hiburan. Pajak Reklame. Pajak Penerangan Jalan. Pajak Air Tanah. Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2). Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan *official assessment* Sistem Pemungutan Pajak Yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk. *Official Assessment* meliputi Pajak Reklame. Pajak BPHTB dan Pajak Bumi Dan Bangunan.

### A.4.1.1.06 Pendapatan Pajak Hotel

Pendapatan Pajak Hotel merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Hotel yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Hotel dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

**Tabel 16**
**Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos | 600.000.000,00 | 570.485.383,01 | 95,08 | (29.514.616,99) | 1.376.491.504,00 |
| 2 | Pajak Rokok | 0,00 | | | | |
| **JUMLAH** | | **600.000.000,00** | **570.485.383,01** | **95,08** | **(29.514.616,99)** | **1.376.491.504,00** |

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp570.485.383,01 atau 95,08%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.376.491.504,00 mengalami penurunan sebesar Rp806.006.120,99 atau sebesar (141,28%). Penurunan tersebut disebabkan karena adanya dampak dari *Pandemic Corona Virus* (Covid-19) sehingga jumlah kunjungan wisatawan dan intensitas jumlah tamu yang menginap berkurang.

### A.4.1.1.07 Pendapatan Pajak Restoran

Pendapatan Pajak Restoran merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Restoran yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Restoran dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

**Tabel 17**
**Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Restoran | 650.000.000,00 | 689.948.536,00 | 106,15 | 39.948.536,00 | 751.728.950,00 |
| 2 | Rumah Makan | 565.000.000,00 | 222.432.950,00 | 39,37 | (342.567.050,00) | 216.396.590,00 |
| 3 | Kantin | 236.355.000,00 | 1.585.600,00 | 0,67 | (234.769.400,00) | 1.978.500,00 |
| 4 | Kedai Kopi | | 71.558.776,00 | (100,00) | 71.558.776,00 | 97.260.036,00 |
| 5 | *Catering/ Jasa Boga* | 8.800.000.000,00 | 6.964.279.726,00 | 79,14 | (1.835.720.274,00) | 8.184.276.263,00 |
| 6 | Warung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | | **10.251.355.000,00** | **7.949.805.588,00** | **77,55** | **(2.301.549.412,00)** | **9.251.640.339,00** |

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.251.355.000,00 terealisasi sebesar Rp7.949.805.588,00 atau 77,55%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.251.640.339,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.301.834.751,00 atau sebesar (16,38%)

### A.4.1.1.08 Pendapatan Pajak Hiburan

Pendapatan Pajak Hiburan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Restoran yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Hiburan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

**Tabel 18**
**Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pajak Kontes Kecantikan. Binaraga. dan Sejenisnya | 0,00 | 299.200,00 | (100,00) | 299.200,00 | 0,00 |
| 2 | Diskotik. Karaoke. Club Malam dan Sejenisnya | 131.257.500,00 | 22.464.800,00 | 17,12 | (108.792.700,00) | 39.732.210,00 |
| 3 | Permainan Biliar. Golf. Bowling | 2.205.000,00 | 0,00 | 0,00 | (2.205.000,00) | 0,00 |
| 4 | Panti Pijat. Refleksi. Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Centre) | 16.537.500,00 | 3.163.000,00 | 19,13 | (13.374.500,00) | 6.585.800,00 |
| **JUMLAH** | | **150.000.000,00** | **25.927.000,00** | **17,28** | **(124.073.000,00)** | **46.318.010,00** |

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp25.927.000,00 atau 17,28%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp46.318.010,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.391.010,00 atau sebesar (78,65%).

### A.4.1.1.09 Pendapatan Pajak Reklame

Pendapatan Pajak Reklame merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Reklame yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Reklame dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

**Tabel 19**
**Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Reklame Papan/Bill Board/Wideotron/ Megatron | 15.000.000,00 | 16.244.000,00 | 108,29 | 1.244.000,00 | 13.661.260,00 |
| **JUMLAH** | | **15.000.000,00** | **16.244.000,00** | **108,29** | **1.244.000,00** | **13.661.260,00** |

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp16.244.000,00 atau 108,29%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.661.260,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.582.740,00 atau sebesar 15,90%.

### A.4.1.1.10 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Penerangan Jalan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

**Tabel 20**
**Anggaran dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih /(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 1.890.000.000,00 | 192.892.428,00 | 10,21 | (1.697.107.572,00) | 221.579.272,00 |
| 2 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 2.160.000.000,00 | 3.125.524.601,00 | 144,70 | 965.524.601,00 | 2.069.438.604,00 |
| **JUMLAH** | | **4.050.000.000,00** | **3.318.417.029,00** | **81,94** | **(731.582.971,00)** | **2.291.017.876,00** |

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.050.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.318.417.029,00 atau 81,94%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.291.017.876,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.027.399.153,00 atau sebesar 30,96%. Hal ini disebabkan oleh penyaluran transfer PPJ Non PLN dapat direalisasikan tepat pada waktunya.

### A.4.1.1.12 Pendapatan Pajak Air Tanah

Pendapatan Pajak Air Tanah merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Air Tanah yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Air Tanah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

**Tabel 21**
**Anggaran dan Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pajak Air Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan dan tidak ada pembanding pada tahun sebelumnya.

### A.4.1.1.13 Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet

Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Sarang Burung Walet yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Sarang Burung Walet dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

**Tabel 22**
**Anggaran dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Pajak Sarang Burung Walet | 100.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4,00 | (96.000.000,00) | 9.600.000,00 |
| **JUMLAH** | | **100.000.000,00** | **4.000.000,00** | **4,00** | **(96.000.000,00)** | **9.600.000,00** |

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.000.000,00 atau 4,00%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.600.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.600.000,00 atau sebesar 58,34%.

### A.4.1.1.14 Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

**Tabel 23**
**Anggaran dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Pasir dan Krikil | 862.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | (862.500.000,00) | 236.458.186,13 |
| **2** | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 0,00 | 151.799.163,78 | 0,00 | 151.799.163,78 | 0,00 |
| **3** | Tanah Liat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.955.178,56 |
| **JUMLAH** | | **862.500.000,00** | **151.799.163,78** | **17,60** | **(710,700,836,22)** | **273.413.364,69** |

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp862.500.000,00 terealisasi sebesar Rp151.799.163,78 atau 17,60%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp273.413.364,69 mengalami penurunan sebesar Rp121.614.200,91 atau sebesar 44,48%.

### A.4.1.1.15 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Tanah dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

**Tabel 24**
**Anggaran dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan**
**Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan | 400.000.000,00 | 373.015.592,00 | 93,25 | (26.984.408,00) | 415.987.859,00 |
| **JUMLAH** | | **400.000.000,00** | **373.015.592,00** | **93,25** | **(26.984.408,00)** | **415.987.859,00** |

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp373.015.592,00 atau 93,25%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp415.987.859,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.972.267,00 atau 10,33% hal ini disebabkan adanya penambahan ketetapan PBBP2 setelah cetak masal yang merupakan Wajib Pajak Baru dan adanya mutasi PBBP2.

### A.4.1.1.16 Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran dan realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut.

**Tabel 25**
**Anggaran dan Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih /(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 650.000.000,00 | 839.010.272,00 | 129,08 | 189.010.272,00 | 469.876.861,00 |
| **JUMLAH** | | **650.000.000,00** | **839.010.272,00** | **129,08** | **189.010.272,00** | **469.876.861,00** |

Dengan melihat tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp839.010.272,00 atau 129,08%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp469.876.861,00 mengalami peningkatan sebesar Rp369.133.411,00 atau sebesar 78,56% disebabkan karena sudah ada kesadaran masyarakat Anambas dalam melakukan transaksi dengan membayar kewajiban ke Daerah.

### A.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Minum. Retribusi Daerah dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 26**
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 1.830.000.000,00 | 4.372.059.200,00 | 238,91 | 2.542.059.200,00 | 3.109.147.211,00 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 70.000.000,00 | 74.336.000,00 | 106,19 | 4.336.000,00 | 75.045.000,00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pasar | 0,00 | 249.895.360,00 | 0,00 | 249.895.360,00 | 254.653.442,00 |
| 4 | Retribusi Jasa Kepelabuhan | 19.400.000,00 | 14.196.000,00 | 73,18 | (5.204.000,00) | 41.387.000,00 |
| 5 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 23.000.000,00 | 20.970.354,83 | 91,18 | (2.029.645,17) | 12.763.164,48 |
| 6 | Retribusi Izin Trayek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 7 | Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan | 240.604.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | | **2.183.004.300,00** | **4.731.456.914,83** | **216,74** | **2.548.452.614,83** | **3.493.020.817,48** |

Data tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.183.004.300,00 terealisasi sebesar Rp4.731.456.914,83 atau sebesar 216,74%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.493.020.817,48 mengalami peningkatan sebesar Rp1.238.436.097,35 atau sebesar

35,46%. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

### A.4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Retribusi Jasa Umum dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 27**
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 1.830.000.000,00 | 4.372.059.200,00 | 238,91 | 2.542.059.200,00 | 3.109.147.211,00 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 70.000.000,00 | 74.336.000,00 | 106,19 | 4.336.000,00 | 75.045.000,00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pasar | 0,00 | 249.895.360,00 | (100,00) | 249.895.360,00 | 254.653.442,00 |
| **JUMLAH** | | **1.900.000.000,00** | **4.696.290.560,00** | **247,17** | **2.796.290.560,00** | **3.438.845.653,00** |

Dari data tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi jasa umum Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.900.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.696.290.560,00 atau 247,17%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.438.845.653,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.257.444.907,00 atau sebesar 36,57%.

### A.4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dengan pemakaian Aset Daerah. Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kepulauan Anambas hanya terdapat satu retribusi yaitu sebagai berikut.

**Tabel 28**
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan | 240.604.300,00 | 0,00 | 0,00 | (240.604.300,00) | 0,00 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 19.400.000,00 | 14.196.000,00 | 73,18 | (5.204.000,00) | 41.387.000,00 |
| **JUMLAH** | | **260.004.300,00** | **14.196.000,00** | **5,46** | **(245.808.300,00)** | **41.387.000,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp260.004.300,00 terealisasi sebesar Rp14.196.000,00 atau sebesar 5,46%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp41.387.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.191.000,00 atau sebesar 65,70%.

### A.4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 29**
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih /(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Retribusi Izin Pelayanan Mendirikan Bangunan | 23.000.000,00 | 20.970.354,83 | 91,18 | (2.029.645,17) | 12.763.164,48 |
| 2 | Retribusi Izin Trayek Kepada Badan | | | | | 25.000,00 |
| **JUMLAH** | | **23.000.000,00** | **20.970.354,83** | **91,18** | **(2.029.645,17)** | **12.788.164,48** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp23.000.000,00 terealisasi sebesar Rp20.970.354,83 atau 91,18%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.788.164,48 mengalami peningkatan sebesar Rp8.182.190,35 atau sebesar 63,99%.

### A.4.1.2.01.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Puskesmas sebagai unit penghasil.

Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 30**
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dan Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas–LRA | 0,00 | 193.081.900,00 | 0,00 | 193.081.900,00 | 167.629.711,00 |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah–LRA | 1.830.000.000,00 | 4.178.977.300,00 | 228,36 | 2.348.977.300,00 | 2.941.517.500,00 |
| **JUMLAH** | | **1.830.000.000,00** | **4.372.059.200,00** | **238,91** | **2.542.059.200,00** | **3.109.147.211,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.830.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.372.059.200,00 atau 238,91%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.109.147.211,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.262.911.989,00 atau sebesar 40,62%.

### A.4.1.2.01.04 Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil.

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 31**
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 70.000.000,00 | 74.336.000,00 | 106,19 | 4.336.000,00 | 75.045.000,00 |
| **JUMLAH** | | **70.000.000,00** | **74.336.000,00** | **106,19** | **4.336.000,00** | **75.045.000,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp70.000.000,00 terealisasi sebesar Rp74.336.000,00 atau 106,19%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp75.045.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp709.000,00 atau sebesar 0,96%.

### A.4.1.2.01.05 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil.

Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Pasar dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 32**
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Retribusi Los | 0,00 | 50.287.840,00 | 0,00 | 50.287.840,00 | 0,00 |
| 2 | Retribusi Kios | 0,00 | 199.607.520,00 | 0,00 | 199.607.520,00 | 254.653.442,00 |
| **JUMLAH** | | **0,00** | **249.895.360,00** | **0,00** | **249.895.360,00** | **254.653.442,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp249.895.360,00 Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp254.653.442,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.758.082,00 atau sebesar 1,87%.

### A.4.1.2.02.02 Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Jasa Kepelabuhan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Minum. Retribusi Jasa Kepelabuhan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 33**
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan | 240.604.300,00 | 0,00 | 0,00 | (240.604.300,00) | 0,00 |
| **JUMLAH** | | **240.604.300,00** | **0,00** | **0,00** | **(240.604.300,00)** | **0,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp240.604.300,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00. Hal ini dianalisa salah pada saat penganggaran dan penempatan realisasi sebagaimana diungkapkan diatas pada retribusi pelayanan pasar-kios. yang semula tidak dianggarkan tetapi berjalannya waktu terdapat realisasi sampai denga 31 Desember 2021.

### A.4.1.2.02.08 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pendapatan Retribusi Jasa Kepelabuhan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Jasa Kepelabuhan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Minum. Retribusi Jasa Kepelabuhan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 34**
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Kepelabuhan Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 19.400.000,00 | 14.196.000,00 | 73,18 | (5.204.000,00) | 41.387.000,00 |
| **JUMLAH** | | **19.400.000,00** | **14.196.000,00** | **73,18** | **(5.204.000,00)** | **41.387.000,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Kepelabuhan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.400.000,00 terealisasi sebesar Rp14.196.000,00 atau 73,18%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp41.387.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.191.000,00 atau sebesar 65,70%.

### A.4.1.2.03.01 Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit penghasil.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 35**
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | 23.000.000,00 | 20.970.354,83 | 91,18 | (2.029.645,17) | 12.763.164,48 |
| | **JUMLAH** | **23.000.000,00** | **20.970.354,83** | **91,18** | **(2.029.645,17)** | **12.763.164,48** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp23.000.000,00 terealisasi sebesar Rp20.970.354,83 atau 91,18%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.763.164,48 mengalami peningkatan sebesar Rp8.207.190,35 atau sebesar 64,31%.

### A.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. pendapatannya diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berupa Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Bank Riau Kepri. Realisasi Tahun Anggaran 2021 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 36**

**Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 1.982.019.763,00 | 1.979.148.878,00 | 99,86 | (2.870.885,00) | 1.318.019.763,00 |
| | **JUMLAH** | **1.982.019.763,00** | **1.979.148.878,00** | **99,86** | **(2.870.885,00)** | **1.318.019.763,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Bank Riau Kepri sebesar Rp1.982.019.763,00 terealisasi sebesar Rp1.979.148.878,00 atau sebesar 99,86%. Merupakan pembagian laba hasil rapat umum pemegang saham tahun 2020. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.318.019.763,00 mengalami peningkatan sebesar Rp661.129.115,00 atau sebesar 50,16%.

### A.4.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2021 merupakan Pendapatan dari 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas. Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 37**
**Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Hasil Sewa BMD | 0,00 | 140.589.000,00 | 0,00 | 140.589.000,00 | 0,00 |
| 2 | Hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Penerimaan Jasa Giro | 1.815.985.000,00 | 971.957.980,94 | 53,52 | (844.027.019,06) | 1.750.136.112,00 |
| 4 | Hasil Dari Pengelolaan dana Bergulir | 36.000.000,00 | 44.703.711,25 | 124,18 | 8.703.711,25 | 33.585.255,00 |
| 5 | Penerimaan Bunga Deposito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.871.841,00 |
| 6 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 9.964.580.905,00 | 0,00 | 0,00 | (9.964.580.905,00) | 0,00 |
| 7 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 15.750.000,00 | 1.052.031.236,19 | 6.679,57 | 1.036.281.236,19 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 282.000.000,00 | 215.428.025,00 | 76,40 | (66.571.975,00) | 188.274.952,00 |
| **9** | Pendapatan Denda Retribusi | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (15.000.000,00) | 33.788.111,00 |
| **10** | Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan | 1.067.500.000,00 | 33.527.728,00 | 3,14 | (1.033.972.272,00) | 0,00 |
| **11** | Pendapatan Dari Pengembalian | 935.000.000,00 | 7.868.263.531,96 | 841.53 | 6.933.263.531,96 | 7.295.256.018,01 |
| **12** | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 2.850.000.000,00 | 2.803.678.125,00 | 98,37 | (46.321.875,00) | 2.664.957.303,00 |
| **13** | Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325.000,00 |
| **14** | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA | 0,00 | 235.563.104,00 | 0,00 | 235.563.104,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH** | **16.981.815.905,00** | **13.365.742.442,34** | **78,71** | **(3.616.073.462,66)** | **12.675.194.592,01** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp16.981.815.905,00 terealisasi sebesar Rp13.365.742.442,74 atau 78,71%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.675.194.592,01 mengalami peningkatan sebesar Rp690.547.850,33 atau sebesar 5,45%.

### A.4.1.4.03 Hasil Pemanfaatan Sewa BMD Yang Tidak Dipisahkan

Hasil pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah (BMD) yang merupakan hasil pemanfaatan yang tidak dipisahkan dapat dirinci pada table sebagai berikut:

**Tabel 38**
**Anggaran dan Realisasi Pemanfaatan Sewa BMD Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Sewa BMD | 0,00 | 140.589.000,00 | 0,00 | 140.589.000,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH** | **0,00** | **140.589.000,00** | **0,00** | **140.589.000,00** | **0,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pemanfaatan Sewa BMD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp140.589.000,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp140.589.000,00 kenaikan ini sesuai realisasi penerimaan pada kas daerah.

### A.4.1.4.05 Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari jasa atas penempatan dana pada perbankan. penerimaan jasa giro dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 39**
**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Jasa Giro Pada Kas Daerah | 1.815.985.000,00 | 971.957.980,94 | 53.52 | (844.027.019,06) | 1.716.309.878,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | Jasa Giro Bendahara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.826.234,00 |
| | **JUMLAH** | **1.815.985.000,00** | **971.957.980,94** | **53.52** | **(844.027.019,06)** | **1.750.136.112,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.815.985.000,00 terealisasi sebesar Rp971.957.980,94 atau 53,52%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.750.136.112,00 mengalami penurunan sebesar Rp778.178.131,06 atau sebesar 44,47% sesuai dengan jasa giro pada kas daerah yang diperoleh.

### A.4.1.4.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan Hasil Dari Pengembalian Dana Bergulir merupakan bunga dari pengguliran pembiayaan dalam rangka membantu perekonomian masyarakat untuk mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 40**
**Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 36.000.000,00 | 44.703.711,25 | 124,18 | 8.703.711,25 | 33.585.255,00 |
| | **JUMLAH** | **36.000.000,00** | **44.703.711,25** | **124,18** | **8.703.711,25** | **33.585.255,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp36.000.000,00 terealisasi sebesar Rp44.703.711,25 atau 124,18%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp33.585.255,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.118.456,25 atau sebesar 33,11%.

### A.4.1.4.07 Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga merupakan pendapatan bunga deposito sebagai manajemen kas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dengan ketentuan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. tugas daerah dan kualitas pelayanan publik. Pendapatan Bunga Deposito dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 41**
**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bunga Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Bunga Deposito pada Bank Riau Kepri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.871.841,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **JUMLAH** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **707.871.841,00** |

Data tabel di atas menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak mendepositokan dana pada Bank Riau Kepri Capem Tarempa.

### A.4.1.4.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi sember Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 42**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 15.750.000,00 | 1.052.031.236,19 | 6.679,56 | 1.036.281.236,19 | 0,00 |
| | **JUMLAH** | **15.750.000,00** | **1.052.031.236,19** | **6.679,56** | 1.036.281.236,19 | **0,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.750.000,00 terealisasi sebesar Rp1.052.031.236,19 atau 6.679,56, tidak ada realisasi pada tahun sebelumnya.

### A.4.1.4.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan keterlambatan atas pembayaran pajak oleh Wajib Pajak wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Denda Pajak dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 43**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda PajakTahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih / Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | Pendapatan Denda Pajak Hotel | 282.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (282.000.000,00) | 0,00 |
| **2.** | Pendapatan Denda Pajak Restoran | 0,00 | 188.274.952,00 | (100,00) | 188.274.952,00 | 188.274.952,00 |
| **3.** | Pendapatan Denda Pajak Reklame | 0,00 | 197.416,00 | (100,00) | 197.416,00 | 0,00 |
| **4.** | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 0,00 | 26.955.657,00 | 0,00 | 26.955.657,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH** | **282.000.000,00** | **215.428.025,00** | **76,39** | **(66.571.975,00)** | **188.274.952,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp282.000.000,00 terealisasi sebesar Rp215.428.025,00 atau 76,39%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp188.274.952,00 mengalami mengalami peningkatan sebesar Rp27.153.073,00 atau sebesar 14,43%.

### A.4.1.4.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah merupakan pengembalian/ penyetoran atas keterlambatan penyetoran atas retribusi yang dikenakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 44**
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Denda Retribusi Pelayan Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.788.111,00 |
| 2 | Denda Retribusi Jasa Umum | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (15.000.000,00) | 0,00 |
| | **JUMLAH** | **15.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **(15.000.000,00)** | **33.788.111,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.000.000,00 tidak terealisasi. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp33.788.111,00 tidak mengalami perubahan.

### A.4.1.4.14 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan merupakan eksekusi atas pelaksanaan pekerjaan/proyek yang tidak selesai sesuai dengan perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 45**
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pengadaan Barang/Jasa | 1.067.500.000,00 | 33.527.728,00 | 3,14 | (1.033.972.272,00) | 0,00 |
| | **JUMLAH** | **1.067.500.000,00** | **33.527.728,00** | **3,14** | **(1.033.972.272,00)** | **0,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.067.500.000,00 terealisasi sebesar Rp33.527.728,00 atau sebesar 3,14%. tidak ada realisasi pada tahun sebelumnya.

### A.4.1.4.15 Pendapatan Dari Pengembalian

Pendapatan Dari Pengembalian merupakan pengembalian atas pembayaran gaji dan tunjangan. kelebihan pembayaran perjalanan dinas. uang muka. raskin otonom. UYHD Tahun lalu. belanja barang dan jasa. belanja tidak langsung. kesalahan pembayaran/perhitungan dan pengembalian PT. Taspen yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan dari pengembalian yang diterima pada Tahun 2021 merupakan Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan dan Kematian (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan. dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 46**
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pengembalian Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 815.000.000,00 | 2.994.375,00 | 0,37 | (812.005.625,00) | 3.083.499,00 |
| 2 | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas | 100.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3,00 | (97.000.000,00) | 28.927.308,00 |
| 3 | Pendapatan Dari Pengembalian BTL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.055.288,00 |
| 4 | Pendapatan Dari Pengembalian Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.235.852,00 |
| 5 | Pendapatan Dari Pengembalian Kesalahan Pembayaran/Perhitungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.000,00 |
| 6 | Pendapatan Dari Pengembalian Dari PT. TASPEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.473.297,00 |
| 7 | Pendapatan Dari Pengembalian Kerugian Ke Kas Daerah (TP-TGR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.221.047,72 |
| 8 | Pendapatan dari Pengembalian Lainnya di Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.925.726,00 |
| 9 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 20.000.000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan | 0,00 | 7.862.269.156,96 | (100,00) | 7.862.269.156,96 | 0,00 |
| **JUMLAH** | | **935.000.000,00** | **7.868.263.531,96** | **841,53** | **6.933.263.531,96** | **7.295.256.017,72** |

Data tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Pengembalian Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp935.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.868.263.531,96 atau 841,53%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.295.256.017,72 mengalami kenaikan sebesar Rp573.007.514,24 atau sebesar 7,86% Kenaikan tersebut diperoleh dari Pendapatan Dari Pengembalian Barang dan Jasa. Pendapatan dan pengembalian dari PT.TASPEN. pendapatan dari pengembalian lainnya tahun sebelumnya dan Pendapatan Dari Pengembalian atas Kerugian Daerah.

### A.4.1.4.18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Dana Kapitasi pada FKTP merupakan pendapatan yang tidak melalui Kas Umum Daerah tetapi pendapatannya langsung ke Bendahara Penerimaan masing-masing puskesmas. dan Bendahara Umum Daerah hanya melakukan pengesahan Surat Pengesahan

Pertanggungjawaban Belanja (SP2B) yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 47**
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/( Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Puskesmas Tarempa | | 726.195.425,00 | | | 723.930.050,00 |
| **2** | Puskesmas Palmatak | | 863.481.700,00 | | | 844.206.753,00 |
| **3** | Puskesmas Siantan Timur | | 241,388,200.00 | | | 248.508.400,00 |
| **4** | Puskesmas Siantan Selatan | | 218.436.200,00 | | | 220.760.900,00 |
| **5** | Puskesmas Jemaja Timur | | 150,600,200.00 | | | 149.661.400,00 |
| **6** | Puskesmas Letung | | 376.062.200,00 | | | 293.092.900,00 |
| **7** | Puskesmas Siantan Tengah | | 227,514,200.00 | | | 184.796.900,00 |
| **8** | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 2.850.000.000,00 | 0,00 | 98,37 | (46.321.875,00) | |
| | **JUMLAH** | **2.850.000.000,00** | **2.803.678.125,00** | **98.37** | **(46.321.875,00)** | **2.664.957.303,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.850.000.000,00 dianggarkan pada 1 (satu) akun Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai akun yang tersedia pada SIPD Kemendagri dan terealisasi sebesar Rp2.803.678.125,00 atau 98,37%. dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.664.957.303,00 mengalami peningkatan sebesar Rp138.720.822,00 atau sebesar 5,21%.

### A.4.1.4.23 Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya - LRA

Realisasi lain-lain PAD yang sah lainnya yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp235.563.104,00. dengan rician sebagai berikut :

**Tabel 48**
**Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya | 0,00 | 235.563.104,00 | 0,00 | 235.563.104,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH** | 0,00 | **235.563.104,00** | **0,00** | **235.563.104,00** | **0,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp235.563.104,00 merupakan terdiri dari kelebihan transfer Dana Klaim INCBG'S RSUD Palmatak dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp233.805.000,00. Sisa kelebihan Pengembalian Uang Persediaan (UP) yang disetorkan oleh Bendahara Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2021 sebesar Rp855.000,00 dan Denda PBB2 sebesar Rp903.104,00.

## A.4.2 Pendapatan Transfer

### A.4.2.1 Pendapatan Transfer - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 49**
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) | 888.650.555.670,00 | 624.335.477.614,00 | 70,26 | (264.315.078.056,00) | 635.267.105.531,00 |
| **2** | Dana Insentif Daerah (DID) | 65.907.002.000,00 | 65.907.002.000,00 | 100,00 | 0,00 | |
| **3** | Dana Desa | 53.152.626.000,00 | 53.151.623.854,00 | 100,00 | (1.002.146,00) | 77.605.970.000,00 |
| **4** | Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kepulauan Riau) | 45.390.252.354,00 | 42.160.395.659,00 | 92,88 | (3.229.856.695,00) | 39.011.149.731,00 |
| **5** | Bantuan Keuangan | 18.000.000.000,00 | 13.500.000.000,00 | 75,00 | (4.500.000.000,00) | 20.500.000.000,00 |
| | **JUMLAH** | **1.071.100.436.024,00** | **799.054.499.127,00** | **74,60** | **(272.045.936.897,00)** | **772.384.225.262,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.071.100.436.024,00 terealisasi sebesar Rp799.054.499.127,00 atau 74,60% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp772.384.225.262,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.670.273.865,00 atau sebesar 3,45%.

### A.4.2.1.01 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Anggaran dan Realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 2021 dan 2020 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 50**
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**
**Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Bagi Hasil Pajak- LRA | 63.370.480.438,00 | 81.416.459.925,00 | 40,65 | (247.971.611.351,00) | 72.785.957.092,00 |
| **2** | Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (SDA)- LRA | 354.418.228.232,00 | 88.400.637.394,00 | 0,00 | 0,00 | 113.694.995.670,00 |
| **3** | Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA | 368.303.160.000,00 | 368.303.160.000,00 | 100,00 | 0,00 | 375.518.805.000,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA | 76.236.416.000,00 | 67.820.014.609,00 | 88,96 | (8.416.401.391,00) | 48.062.745.149,00 |
| 5 | Dana Alokasi Khusus (DAK ) Non Fisik-LRA | 26.322.271.000,00 | 18.395.205.686,00 | 69,89 | (7.927.065.314,00) | 25.204.602.620,00 |
| | **JUMLAH** | **888.650.555.670,00** | **624.335.477.614,00** | **70,26** | **(264.315.078.056,00)** | **635.267.105.531,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp888.650.555.670,00 terealisasi sebesar Rp624.335.477.614,00 atau 70,26%. dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp635.267.105.531,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.931.627.917,00 atau sebesar 1,75%.

### A.4.2.1.01.01 Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA

Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Non Pajak merupakan bagian dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan ke Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2021. Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 51**
**Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DBH Pajak Bumi Dan Bangunan | 42.275.656.588,00 | 62.436.497.825,00 | 147,69 | 20.160.841.237,00 | 35.459.259.415,00 |
| 2 | DBH PPh Pasal | 20.966.426.150,00 | 18.338.424.400,00 | 87,47 | (2.628.001.750,00) | 0,00 |
| 3 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 128.397.700,00 | 641.537.700,00 | 499,65 | 513.140.000,00 | 18.220.959.049,00 |
| 4 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 1.745.531,00 | 17.591.026,00 | 1.008 | 15.845.495,00 | 29.001.716,00 |
| 5 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 350.900.709.676,00 | 4.587.933.800,00 | 1,31 | (346.312.775.876,00) | 48.493.414.016,00 |
| 6 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 171.266.400,00 | 80.207.996.600,00 | 46.832 | 80.036.730.200,00 | 60.652.861.332,00 |
| 7 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.695.534.467,00 |
| 8 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 1.834.496.050,00 | 1.834.496.050,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 52.681.000,00 | 78.119.768,00 | 148,29 | 25.438.768,00 | 0,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **10** | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) | 12.129.575,00 | 0,00 | (100,00) | (12.129.575,00) | 35.907.850,00 |
| **11** | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.445.200.000,00 | 1.674.500.150,00 | 115,87 | 229.300.150,00 | 788.276.289,00 |
| **12** | Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan – LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.071.423.104,00 |
| **13** | Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan – LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.315.524,00 |
| | **JUMLAH** | **417.788.708.670,00** | **169.817.097.319,00** | **40,65** | **(247.971.611.351,00)** | **186.480.952.762,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp417.788.708.670,00 terealisasi sebesar Rp169.817.097.319,00 atau 40,65%. dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp186.480.952.762,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.663.855.443,00 atau sebesar 8,94%.

### A.4.2.1.01.02 Dana Transfer Umum - Alokasi Umum (DAU) - LRA

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2021. dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 52**
**Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-DAU Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Dana Alokasi Umum | 368,303,160,000,00 | 368.303.160.000,00 | 100,00 | 0,00 | 375.518.805.000,00 |
| **JUMLAH** | | **368,303,160,000,00** | **368.303.160.000,00** | **100,00** | **0,00** | **375.518.805.000,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp368.303.160.000,00 terealisasi sebesar Rp368.303.160.000,00 atau 100%. dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp375.518.805.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.215.645.000,00 atau sebesar 1,96%.

### A.4.2.1.01.03 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2021. dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 53**
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 dan 2019**

(Dalam Rupiah)

| No | Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.381.088.000,00 |
| 2 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 670.091.000,00 | 640.316.153,00 | 95,56 | (29.774.847,00) | 0.00 |
| 3 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 9.972.460.000,00 | 9.182.851.626,00 | 92,08 | (789.608.374,00) | 0,00 |
| 4 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 5.322.974.000,00 | 4.856.623.517,00 | 91,24 | (466.350.483,00) | 0,00 |
| 5 | Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kesehatan | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 11.553.038.160,00 |
| 6 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar | 2.390.000.000,00 | 1.024.689.800,00 | 42,87 | (1.365.310.200,0 | 0,00 |
| 7 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan | 5.083.992.000,00 | 6.129.740.900,00 | 120,57 | 1.045.748.900,00 | 0,00 |
| 8 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian | 3.316.831.000,00 | 241.637.420,00 | 7,29 | (3.075.193.580,0 | 0,00 |
| 9 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB | 1.448.451.000,00 | 366.961.210,00 | 25,33 | (1.081.489.790,0 | 0,00 |
| 10 | DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM | 10.861.063.000,00 | 10.435.536.055,00 | 96,09 | (425.526.945,00) | 0,00 |
| 11 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | 1.245.000.000,00 | 1.244.909.700,00 | 100,00 | (90.300,00) | 0,00 |
| 12 | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan | 2.713.000.000,00 | 2.515.703.649,00 | 92,73 | (197.296.351,00) | 2.812.985.000,00 |
| 13 | DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan | 2.387.727.000,00 | 2.086.047.956,00 | 87,37 | (301.679.044,00) | 0,00 |
| 14 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan | 15.467.592.000,00 | 9.548.298.474,00 | 61,73 | (5.919.293.526,0 | 0,00 |
| 15 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan | 3.759.425.000,00 | 3.716.135.000,00 | 98,85 | (43.290.000,00) | 0,00 |
| 16 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan | 4.800.307.000,00 | 4.284.631.282,00 | 89,26 | (515.675.718,00) | 0.00 |
| 18 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan | 1.916.620.000,00 | 1.341.634.000,00 | 70,00 | (574.986.000,00) | 3.157.450.000,00 |
| 19 | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan | 4.880.883.000,00 | 4.768.929.000,00 | 97,71 | (111.954.000,00) | 0,00 |
| 20 | DAK Fisik-Bidang Transportasi | 0,00 | 5.435.368.867,00 | 100,00 | 5.435.368.867,00 | 1.037.442.393,00 |

| No | Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Perdesaan- Afirmasi | | | | | |
| **21** | Dana Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 12.830.096.000,00 |
| **22** | DAK Afirmasi Bidang Sanitasi | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4.194.779.000,00 |
| **23** | DAK Afirmasi Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.910.000.000,00 |
| **24** | DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 185.866.596,00 |
| **JUMLAH** | | **76.236.416.000,00** | **67.820.014.609,00** | **88,96** | **(8.416.401.391,0** | **48.062.745.149,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp76.236.416.000,00 terealisasi sebesar Rp67.820.014.609,00 atau 88,96%. dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp48.062.745.149,00 mengalami peningkatan sebesar Rp19.757.269.460,00 atau sebesar 41,11%. Akun-akun yang terdapat diatas disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

### A.4.2.1.01.04 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2021. dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 54**
**Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | DAK Non Fisik-TPG PNSD | 9.568.764.000,00 | 9.568.764.000,00 | 100,00 | 0,00 | 7.987.551.000,00 |
| **2** | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 267.000.000,00 | 267.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 285.750.000,00 |
| **3** | DAK Non Fisik-TKG PNSD | 1.798.507.000,00 | 1.798.507.000,00 | 100,00 | 0,00 | 93.607.000,00 |
| **4** | DAK Non Fisik-BOP PAUD | 1.021.800.000,00 | 982.500.000,00 | 96,15 | (39.300.000,00) | 976.800.000,00 |
| **5** | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 159.600.000,00 | 118.200.000,00 | 74,06 | (41.400.000,00) | 78.900.000,00 |
| **6** | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 7.393.483.000,00 | 2.951.513.447,00 | 39,92 | (4.441.969.553,00) | 13.463.874.000,00 |
| **7** | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | 485.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | (485.334.000,00) | 0,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8** | DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas | 521.435.000,00 | 0,00 | 0,00 | (521.435.000,00) | 0,00 |
| **9** | DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan | 442.805.000,00 | 0,00 | 0,00 | (442.805.000,00) | 0,00 |
| **10** | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 1.916.533.000,00 | 23.766.439,00 | 1,24 | (1.892.766.561,00) | 1.213.616.700,00 |
| **11** | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 1.163.352.000,00 | 1.163.160.000,00 | 99,98 | (192.000,00) | 503.499.720,00 |
| **12** | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan | 862.676.000,00 | 800.812.800,00 | 92,83 | (61.863.200,00) | 601.004.200,00 |
| **13** | DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS | 720.982.000,00 | 0,00 | 0,00 | (720.982.000,00) | 0,00 |
| **14** | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 0,00 | 370.982.000,00 | (100,00) | 370.982.000,00 | 0,00 |
| **14** | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian | 0,00 | 350.000.000,00 | (100,00) | 350.000.000,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH** | **26.322.271.000,00** | **18.395.205.686,00** | **69,89** | **(7.927.065.314,00)** | **25.204.602.620,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp26.322.271.000,00 terealisasi sebesar Rp18.395.205.686,00 atau 69,89%. dibandingkan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp25.204.602.620,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.809.396.934,00 atau sebesar 27,02%.

### A.4.2.1.02 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dari Dana Perimbangan. Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2021. dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 55**
**Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Dana Insentif Daerah (DID) | 65.907.002.000,00 | 65.907.002.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH** | **65.907.002.000,00** | **65.907.002.000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp65.907.002.000,00 terealisasi sebesar Rp65.907.002.000,00 atau 100%.

### A.4.2.1.05 Dana Desa

Dana Desa merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dari Dana Perimbangan. Dana Desa Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2021. dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 56**
**Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dana Otonomi Khusus-LRA | | | | | 25.151.920.000,00 |
| **2** | Dana Desa | 53.152.62kl6.000,00 | 53.151.623.854,00 | 100,00 | (1.002.146,00) | 52.454.050.000,00 |
| **JUMLAH** | | **53.152.626.000,00** | **53.151.623.854,00** | **100,00** | **(1.002.146,00)** | **72.785.957.092,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp53.152.626.000,00 terealisasi sebesar Rp53.151.623.854,00 atau 100%. Jika dibandingkan realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp52.454.050.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 697.573.854,00 atau sebesar 1,33%.

**Tabel 57**
**Anggaran dan Realisasi Dana Desa Per Desa Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No. | Nama Desa | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Desa Tarempa Barat | 1.786.950.000,00 | 1.786.950.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.479.137.000,00 |
| 2 | Desa Tarempa Selatan | 1.065.478.000,00 | 1.065.478.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.009.304.000,00 |
| 3 | Desa Tarempa Timur | 1.511.294.000,00 | 1.511.294.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.184.308.000,00 |
| 4 | Desa Pesisir Timur | 888.298.000,00 | 888.298.000,00 | 100,00 | 0,00 | 920.986.000,00 |
| 5 | Desa Sri Tanjung | 1.146.733.000,00 | 1.146.733.000,00 | 100,00 | 0,00 | 912.216.000,00 |
| 6 | Desa Tarempa Barat Daya | 949.878.000,00 | 949.878.000,00 | 100,00 | 0,00 | 915.938.000,00 |
| 7 | Desa Mampok | 925.080.000,00 | 925.080.000,00 | 100,00 | 0,00 | 943.737.000,00 |
| 8 | Desa Rewak | 866.360.000,00 | 866.360.000,00 | 100,00 | 0,00 | 890.458.000,00 |
| 9 | Desa Air Biru | 1.026.121.000,00 | 1.026.121.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.157.291.000,00 |
| 10 | Desa Batu Berapit | 906.906.000,00 | 906.906.000,00 | 100,00 | 0,00 | 936.757.000,00 |
| 11 | Desa Landak | 793.952.000,00 | 793.952.000,00 | 100,00 | 0,00 | 827.731.000,00 |
| 12 | Desa Tebang | 1.349.932.000,00 | 1.349.932.000,00 | 100,00 | 0,00 | 973.562.000,00 |
| 13 | Desa Ladan | 1.624.031.000,00 | 1.624.031.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.282.999.000,00 |
| 14 | Desa Piabung | 1.255.676.000,00 | 1.255.676.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.198.864.000,00 |
| 15 | Desa Langir | 899.386.000,00 | 899.386.000,00 | 100,00 | 0,00 | 927.701.000,00 |
| 16 | Desa Candi | 968.501.000,00 | 968.501.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.032.484.000,00 |
| 17 | Desa Putik | 1.595.606.000,00 | 1.595.606.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.546.761.000,00 |
| 18 | Desa Belibak | 801.655.000,00 | 801.655.000,00 | 100,00 | 0,00 | 840.251.000,00 |
| 19 | Desa Nyamuk | 1.126.358.000,00 | 1.126.358.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.113.922.000,00 |
| 20 | Desa Batu Belah | 1.201.374.000,00 | 1.201.374.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.150.974.000,00 |
| 21 | Desa Munjan | 1.070.877.000,00 | 1.070.877.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.061.378.000,00 |
| 22 | Desa Serat | 855.652.000,00 | 855.138.325,00 | 99,94 | (513,675) | 863.974.000,00 |
| 23 | Desa Air Putih | 1.092.693.000,00 | 1.092.693.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.035.683.000,00 |
| 24 | Desa Temburun | 1.047.394.000,00 | 1.047.394.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.172.194.000,00 |

| No. | Nama Desa | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | Desa Kiabu | 1.031.001.000,00 | 1.031.001.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.008.149.000,00 |
| 26 | Desa Telaga | 932.584.000,00 | 932.584.000,00 | 100,00 | 0,00 | 954.031.000,00 |
| 27 | Desa Mengkait | 1.102.515.000,00 | 1.102.515.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.249.887.000,00 |
| 28 | Desa Tiangau | 862.003.000,00 | 862.003.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.027.535.000,00 |
| 29 | Desa Telaga Kecil | 770.291.000,00 | 770.291.000,00 | 100,00 | 0,00 | 836.423.000,00 |
| 30 | Desa Lingai | 1.199.578.000,00 | 1.199.578.000,00 | 100,00 | 0,00 | 909.576.000,00 |
| 31 | Desa Air Bini | 1.055.653.000,00 | 1.055.653.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.016.828.000,00 |
| 32 | Desa Kuala Maras | 1.374.415.000,00 | 1.374.415.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.288.159.000,00 |
| 33 | Desa Ulu Maras | 1.292.868.000,00 | 1.292.868.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.424.890.000,00 |
| 34 | Desa Bukit Padi | 896.837.000,00 | 896.837.000,00 | 100,00 | 0,00 | 893.623.000,00 |
| 35 | Desa Genting Pulur | 1.149.226.000 ,00 | 1.149.226.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.076.011.000,00 |
| 36 | Desa Air Asuk | 781.836.000,00 | 781.836.000,00 | 100,00 | 0,00 | 843.545.000,00 |
| 37 | Desa Air Sena | 817.445.000,00 | 817.445.000,00 | 100,00 | 0,00 | 861.750.000,00 |
| 38 | Desa Teluk Siantan | 875.249.000,00 | 874.762.065,00 | 99,94 | (486,935) | 927.973.000,00 |
| 39 | Desa Lidi | 733.539.000,00 | 733.539.000,00 | 100,00 | 0,00 | 777.580.000,00 |
| 40 | Desa Liuk | 734.245.000,00 | 734.245.000,00 | 100,00 | 0,00 | 930.307.000,00 |
| 41 | Desa Teluk Sunting | 786.057.000,00 | 786.056.000,00 | 100,00 | (1,000) | 830.326.000,00 |
| 42 | Desa Impol | 780.223.000,00 | 780.223.000,00 | 100,00 | 0,00 | 808.228.000,00 |
| 43 | Desa Keramut | 926.571.000,00 | 926.571.000,00 | 100,00 | 0,00 | 938.684.000,00 |
| 44 | Desa Sunggak | 837.802.000,00 | 837.802.000,00 | 100,00 | 0,00 | 861.784.000,00 |
| 45 | Desa Mubur | 1.114.987.000,00 | 1.114.987.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.118.394.000,00 |
| 46 | Desa Piasan | 984.382.000,00 | 984.382.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.034.390.000,00 |
| 47 | Desa Bayat | 1.082.492.000,00 | 1.082.492.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.038.545.000,00 |
| 48 | Desa Payalaman | 981.312.000,00 | 981.312.000,00 | 100,00 | 0,00 | 948.424.000,00 |
| 49 | Desa Teluk Bayur | 839.085.000,00 | 839.085.000,00 | 100,00 | 0,00 | 875.462.000,00 |
| 50 | Desa Matak | 763.562.000,00 | 763.562.000,00 | 100,00 | 0,00 | 815.173.000,00 |
| 51 | Desa Batu Ampar | 816.592.000,00 | 816.592.000,00 | 100,00 | 0,00 | 859.134.000,00 |
| 52 | Desa Payamaram | 874.091.000,00 | 874.090.464,00 | 100,00 | (536,00) | 920.629.000,00 |
| | **JUMLAH** | **53.152.626.000,00** | **53.151.623.854,00** | **100,00** | **(1.002,146)** | **52.454.050.000,00** |

### A.4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk pembangunan di Kepulauan Anambas. berdasarkan dari Keputusan Gubernur Kepulauan Riau. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dan 2020 dapat di rinci sebagai berikut.

**Tabel 58**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio %) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *1* | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 45.390.252.354,00 | 42.160.395.659,00 | 92,89 | (3.229.856.695,00) | 39.011.149.731,00 |
| *2* | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 18.000.000.000,00 | 13.500.000.000,00 | 75.00 | (4.500.000.000,00) | 20.500.000.000,00 |
| | ***JUMLAH*** | **63.390.252.354,00** | **55.660.395.659,00** | **87,81** | **(7.729.856.695,00)** | **59.511.149.731,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Transfer antar Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp63.390.252.354,00 terealisasi sebesar Rp55.660.395.659,00 atau 87,81%. Jika dibandingkan realisasi pada Tahun 2020 sebesar Rp59.511.149.731,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.850.754.072,00 atau sebesar 6,47%. Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan ini dapat dirinci lebih lanjut pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 59**
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak**
**Dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *1* | Pajak Kendaraan Bermotor | 10.168.837.276,00 | 9.483.711.694,00 | 93,26 | (685.125.582,00) | 7.718.752.189,00 |
| *2* | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 5.821.676.317,00 | 4.940.962.031,00 | 84,87 | (880.714.286,00) | 5.890.200.494,00 |
| *3* | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 21.081.070.888,00 | 19.820.331.530,00 | 94,02 | (1.260.739.358,00) | 16.458.037.388,00 |
| *4* | Pajak Air Permukaan | 45.329.656,00 | 34.385.418,00 | 75,86 | (10.944.238,00) | 29.050.349,00 |
| *5* | Pajak Rokok | 8.273.338.217,00 | 7.881.004.986,00 | 95,26 | (392.333.231,00) | 8.915.109.311,00 |
| | ***JUMLAH*** | **45.390.252.354,00** | **42.160.395.659,00** | **92,88** | **(3.229.856.695,00)** | **39.011.149.731,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp45.390.252.354,00 terealisasi sebesar Rp42.160.395.659,00 atau 92,88%. Jika dibandingkan realisasi pada Pendapat Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 sebesar Rp39.011.149.731,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.229.856.695,00 atau sebesar 8,28%.

**Tabel 60**
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi**
**Kepulauan Riau Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *1* | Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | 18.000.000.000,00 | 13.500.000.000,00 | 75,00 | (4.500.000.000,00) | 20.500.000.000,00 |
| | ***JUMLAH*** | **18.000.000.000,00** | **13.500.000.000,00** | **75,00** | **(4.500.000.000,00)** | **20.500.000.000,00** |

Data tabel di atas menunjukkan target anggaran Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp13.500.000.000,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp20.500.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.000.000.000,00 atau sebesar 34,15%

### A.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

### A.4.3.3.01.01 Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Realisasi Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.00. Berikut rincian realisasi Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS).

**Tabel 61**
**Anggaran dan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *1.* | Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 13.334.713.543,00 | 13.183.312.366,22 | 98,86 | (151.401.176,78) | 12.770.388.126,00 |
| | ***JUMLAH*** | **13.334.713.543,00** | **13.183.312.366,22** | **98,86** | **(151.401.176,78)** | **12.770.388.126,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.334.713.543,00 terealisasi sebesar Rp13.183.312.366,22 atau sebesar 98,86% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.770.388.126,00 mengalami peningkatan sebesar Rp412.924.240,22 atau sebesar 3,24%.

## A.5 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2021 yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.132.256.994.492,00 dan terealisasi Rp807.470.912.182,23 atau sebesar 71,32%. Hal ini disebabkan banyak pekerjaan fisik yang telah selesai s.d. 31 Desember 2021 tetapi belum bisa diakui dikarenakan kas yang tersedia di Rekening Kas Umum Daerah tidak mencukupi untuk melakukan pelunasan. hal ini dikarenakan terlambatnya pengiriman dari pemerintah ke daerah. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terakhir dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kode Akun Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari Akun. Kelompok. Jenis. Objek. Rincian Objek dan Sub Rincian Objek. Kelompok Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi. Belanja Modal. Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 62**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Belanja Operasi | 739.339.368.241,00 | 559.898.234.708,11 | 75,73 | (179.441.133.532,89) | 628.458.109.985,35 |
| 2 | Belanja Modal | 257.905.987.936,00 | 142.963.186.466,12 | 55,43 | (114.942.801.469,88) | 159.748.471.277,92 |
| 3 | Belanja Tak Terduga | 1.000.000.000,00 | 878.745.392,00 | 87,87 | (121.254.608,00) | 29.074.357.387,00 |
| 4 | Belanja Transfer | 134.011.638.315,00 | 103.730.745.616,00 | 77,40 | (30.280.892.699,00) | 0,00 |
| **JUMLAH** | | **1.132.256.994.492,00** | **807.470.912.182,23** | **71,32** | **(324.786.082.309,77)** | **817.280.938.650,27** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.132.256.994.492,00 terealisasi sebesar Rp807.470.912.182,23 atau 71,32%. dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp817.280.938.650,27 mengalami penurunan sebesar Rp9.810.026.468,04 atau sebesar 1,20%. Dikarenakan pekerjaan sudah selesai dilaksanakan Per 31 Desember 2021. dan tidak dapat dibayarkan. karena kas yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan pelunasan tersebut.

### A.5.1 Belanja Operasi

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 63**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Belanja Pegawai | 313.219.867.181,00 | 274.063.269.975,54 | 87,50 | (39.156.597.205,46) | 352.276.430.743,00 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 405.311.608.635,00 | 271.300.030.814,57 | 66,94 | (134.011.577.820,43) | 190.441.915.852,35 |
| 3 | Belanja Hibah | 20.673.177.425,00 | 14.400.218.918,00 | 69,66 | (6.272.958.507,00) | 27.391.102.575,00 |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial | 134.715.000,00 | 134.715.000,00 | 100,00 | 0,00 | 183.445.000,00 |
| 5 | Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.165.215.815,00 |
| **JUMLAH** | | **739.339.368.241,00** | **559.898.234.708,11** | **75,73** | **(179.441.133.532,89)** | **628.458.109.985,35** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp739.339.368.241,00 terealisasi sebesar Rp559.898.234.713,11 atau 75,73%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp628.458.109.985,35 mengalami penurunan sebesar Rp68.559.875.277,24 atau sebesar 10,91%. Sedangkan untuk Pos Belanja Bantuan Keuangan akan diungkapkan tersendiri yang tak terpisahkan dari Kelompok Belanja.

#### A.5.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri. pejabat negara dan pensiunan serta pegawai

honorer lingkup pemerintahan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah. Tambahan Penghasilan. Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan Pimpinan & Anggota DPRD. Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Honorarium PNS/Non PNS. Uang Lembur dan Uang Duka Wafat/Tewas. Anggaran dan realisasi belanja ini Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 64**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasi (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 116.682.266.048,00 | 107.345.172.512,00 | 92,00 | (9.337.093.536,00) | 113.052.336.145,00 |
| **2** | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 156.887.841.679,00 | 133.048.605.141,00 | 84,80 | (23.839.236.538,00) | 129.468.465.597,00 |
| **3** | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 26.317.057.327,00 | 22.614.561.685,54 | 85,93 | (3.702.495.641,46) | 0,00 |
| **4** | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 10.657.357.912,00 | 10.403.294.851,00 | 97,62 | (254.063.061,00) | 0,00 |
| **5** | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 2.167.938.655,00 | 161.329.046,00 | 7,44 | (2.006.609.609,00) | 0,00 |
| **6** | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 507.405.560,00 | 490.306.740,00 | 96,63 | (17.098.820,00) | 4.520.789.618,00 |
| **7** | Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.935.300,00 |
| **8** | Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.143.750,00 |
| **9** | Honorarium PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.134.618.005,00 |
| **10** | Honorarium Non PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.794.073.124,00 |
| **11** | Honorarium Pengelola Dana BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.440.000,00 |
| **12** | Uang Duka Wafat/Tewas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.629.204,00 |
| **JUMLAH** | | **313.219.867.181,00** | **274.063.269.975,54** | **87,50** | **(39.156.597.205,46)** | **352.276.430.743,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp313.219.867.181,00 terealisasi sebesar Rp274.063.269.975,54 atau 87,50%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp352.276.430.743,00 mengalami penurunan sebesar Rp78.213.160.767,46 atau sebesar 22,21%. Penurunan ini dikarenakan beberapa akun-akun rincian objek belanja yang di sajikan di atas sudah tidak relevan. dan akan disajikan serta diungkapkan realisasi tahun sebelumnya tersediri pada tabel selanjutnya.

Berikut disajikan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD Tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut :

**Tabel 65**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | DPRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.444.819,00 |
| **2** | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155.811.242,00 |
| **3** | Sekretariat Daerah | 19.442.328.734,00 | 14.146.686.364,00 | 72,76 | (5.295.642.370,00) | 20.606.334.060,00 |
| **4** | Sekretariat DPRD | 13.904.999.865,00 | 13.243.098.359,00 | 95,24 | (661.901.506,00) | 13.958.420.681,00 |
| **5** | Inspektorat | 7.155.246.500,00 | 7.007.965.028,00 | 97,94 | (147.281.472,00) | 7.417.748.268,00 |
| **6** | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 111.319.574.514,00 | 91.957.886.120,00 | 82,61 | (19.361.688.394,00) | 122.458.191.674,00 |
| **7** | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 56.552.645.591,00 | 53.604.431.068,54 | 94,79 | (2.948.214.522,46) | 54.753.298.340,00 |
| **8** | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 8.616.343.184,00 | 7.083.224.780,00 | 82,21 | (1.533.118.404,00) | 9.369.112.229,00 |
| **9** | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa | 5.999.445.800,00 | 5.320.769.544,00 | 88,69 | (678.676.256,00) | 7.445.428.053,00 |
| **10** | Dinas Penanaman Modal PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 4.804.929.241,00 | 4.634.721.649,00 | 96,46 | (170.207.592,00) | 6.337.477.675,00 |
| **11** | Dinas Perikanan. P ertanian dan Pangan | 9.783.411.331,00 | 7.562.322.253,00 | 77,30 | (2.221.089.078,00) | 11.343.994.061,00 |
| **12** | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 6.590.912.827,00 | 6.059.837.454,00 | 91,94 | (531.075.373,00) | 12.129.985.125,00 |
| **13** | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 3.949.604.694,00 | 3.922.368.982,00 | 99,31 | (27.235.712,00) | 4.639.535.860,00 |
| **14** | Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 3.616.624.806,00 | 3.525.892.670,00 | 97,49 | (90.732.136,00) | 4.305.137.990,00 |
| **15** | Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian | 3.839.790.570,00 | 3.771.446.747,00 | 98,22 | (68.343.823,00) | 4.830.154.130,00 |
| **16** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 4.528.536.417,00 | 3.661.406.029,00 | 80,85 | (867.130.388,00) | 4.620.653.584,00 |
| **17** | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 5.204.454.409,00 | 5.063.672.707,00 | 97,29 | (140.781.702,00) | 11.283.090.247,00 |
| **18** | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4.242.280.066,00 | 3.780.063.629,00 | 89,10 | (462.216.437,00) | 4.309.130.415,00 |
| **19** | Badan Keuangan Daerah | 10.136.398.005,00 | 9.319.123.115,00 | 91,94 | (817.274.890,00) | 12.360.619.003,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 5.439.795.666,00 | 5.138.243.016,00 | 94,46 | (301.552.650,00) | 6.751.838.456,00 |
| **21** | Badan Kesatuan Bangsa. Politik | 2.662.496.684,00 | 2.524.563.010,00 | 94,82 | (137.933.674,00) | 3.991.034.080,00 |
| **22** | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3.873.248.608,00 | 3.064.336.345,00 | 79,12 | (808.912.263,00) | 822.529.957,00 |
| **23** | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 10.080.000,00 | 6.720.000,00 | 66,67 | (3.360.000,00) | 0,00 |
| **24** | Kecamatan Jemaja | 3.587.700.464,00 | 3.429.171.804,00 | 95,58 | (158.528.660,00) | 4.701.022.203,00 |
| **25** | Kecamatan Jemaja Timur | 2.099.154.186,00 | 1.956.256.835,00 | 93,19 | (142.897.351,00) | 2.729.340.229,00 |
| **26** | Kecamatan Palmatak | 2.820.993.152,00 | 2.804.164.882,00 | 99,40 | (16.828.270,00) | 4.090.111.302,00 |
| **27** | Kecamatan Siantan | 2.797.024.92200 | 2.725.612.800,00 | 97,45 | (71.412.122,00) | 4.081.436.017,00 |
| **28** | Kecamatan Siantan Selatan | 1.444.645.403,00 | 1.422.155.891,00 | 98,44 | (22.489.512,00) | 1.768.626.452,00 |
| **29** | Kecamatan Siantan Tengah | 1.875.673.099,00 | 1.768.742.389,00 | 94,30 | (106.930.710,00) | 2.324.490.818,00 |
| **30** | Kecamatan Siantan Timur | 1.684.933.963,00 | 1.348.994.457,00 | 80,06 | (335.939.506,00) | 1.882.556.201,00 |
| **31** | Kecamatan Siantan Utara | 1.602.492.340,00 | 784.275.194,00 | 48,94 | (818.217.146,00) | 1.350.834.573,00 |
| **32** | Kecamatan Jemaja Barat | 1.929.327.800,00 | 1.815.457.109,00 | 94,10 | (113.870.691,00) | 1.819.277.134,00 |
| **33** | Kecamatan Kute Siantan | 1.704.774.340,00 | 1.609.659.745,00 | 94,42 | (95.114.595,00) | 468.765.865,00 |
| **JUMLAH** | | **313.219.867.181,00** | **274.063.269.975,54** | **87,50** | **(39.156.597.205,46)** | **352.276.430.743,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai Per SKPD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp313.219.867.181,00 terealisasi sebesar Rp274.063.269.975,54 atau 87,50%. Belanja Pimpinan DPRD dan Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah digabungkan dengan belanja pegawai di perangkat daerah itu sendiri. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp352.276.430.743,00 mengalami penurunan sebesar Rp78.213.160.767,46 atau sebesar 22,21%. Penurunan ini dikarenakan beberapa akun-akun rincian objek belanja yang di sajikan di atas sudah tidak relevan. dan akan disajikan serta diungkapkan realisasi tahun sebelumnya tersediri pada tabel selanjutnya.

### A.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN diperuntukkan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk 1 (satu) tahun anggaran yang berakhir per 31 Desember 2021. Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 66**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Belanja Gaji Pokok | 81.874.576.819,00 | 76.836.880.315,00 | 93,85 | (5.037.696.504,00) | 75.879.568.500,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ASN | | | | | |
| **2** | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 8.766.081.099,00 | 7.182.057.274,00 | 81,93 | (1.584.023.825,00) | 7.174.195.831,00 |
| **3** | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 5.006.840.198,00 | 4.263.018.300,00 | 85,14 | (743.821.898,00) | 5.318.540.250,00 |
| **4** | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 3.515.898.447,00 | 3.238.923.000,00 | 92,12 | (276.975.447,00) | 3.049.707.000,00 |
| **5** | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 2.025.782.125,00 | 1.828.630.000,00 | 90,27 | (197.152.125,00) | 1.750.290.000,00 |
| **6** | Belanja Tunjangan Beras ASN | 5.435.451.935,00 | 5.082.494.312,00 | 93,51 | (352.957.623,00) | 4.362.363.540,00 |
| **7** | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 80.731.950,00 | 46.776.004,00 | 57,94 | (33.955.946,00) | 51.361.951,00 |
| **8** | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 2.950.352,00 | 1.285.521,00 | 43,57 | (1.664.831,00) | 1.228.646,00 |
| **9** | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 9.328.953.123,00 | 8.236.746.649,00 | 88,29 | (1.092.206.474,00) | 7.906.063.968,00 |
| **10** | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 165.000.000,00 | 157.089.942,00 | 95,21 | (7.910.058,00) | 0,00 |
| **11** | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 480.000.000,00 | 471.271.195,00 | 98,18 | (8.728.805,00) | 0,00 |
| **12** | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | Belanja Uang Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.524.500,00 |
| **14** | Belanja Tunjangan Badan Musyawarah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.702.500,00 |
| **15** | Belanja Tunjangan Komisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.628.525,00 |
| **16** | Belanja Tunjangan Badan Anggaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.341.950,00 |
| **17** | Belanja Tunjangan Badan Kehormatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.359.200,00 |
| **18** | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | Belanja Tunjangan Perumahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.989.200.000,00 |
| **20** | Uang Duka Wafat/Tewas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.211.284,00 |
| **21** | Belanja Uang Jasa Pengabdian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | Belanja Tunjangan Operasional Pimpinan DPRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.600.000,00 |
| **23** | Belanja Tunjangan Badan Legislasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.048.500,00 |
| **24** | Tunjangan Transportasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.029.400.000,00 |
| **25** | Tunjangan Reses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.000.000,00 |
| | **JUMLAH** | **116.682.266.048,00** | **107.345.172.512,00** | **92,00** | **(9.337.093.536,00)** | **113.052.336.145,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp116.682.266.048,00 terealisasi sebesar

Rp107.345.172.512,00 atau 92%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 terkait dengan akun rincian objek belanja yang disampaikan diatas sebesar Rp113.052.336.145,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.707.163.633,00 atau sebesar 5,05%.

### A.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. anggaran dan realisasi belanja tambahan penghasilan ASN yang berakhir per 31 Desember 2021. serta realisasi Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 67**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2021 dan 2020**
**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 82.107.777.788,00 | 78.385.557.255,00 | 95,47 | (3.722.220.533,00) | 76.734.042.280,00 |
| 2 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN | 2.297.368.750,00 | 2.131.499.551,00 | 92,78 | (165.869.199,00) | 1.604.708.500,00 |
| 3 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 6.762.181.304,00 | 6.592.920.375,00 | 97,50 | (169.260.929,00) | 0,00 |
| 4 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 3.799.500.000,00 | 3.387.418.860,00 | 89,15 | (412.081.140,00) | 0,00 |
| 5 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 61.921.013.837,00 | 42.551.209.100,00 | 68,72 | (19.369.804.737,00) | 42.565.680.564,00 |
| 6 | Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah Bersumber Dari APBN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.500.000,00 |
| 7 | Belanja Tambahan Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Bersumber Dari APBN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.949.694.053,00 |
| 8 | Belanja Tambahan Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah Bersumber Dari APBN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.840.200,00 |
| | **JUMLAH** | **156.887.841.679,00** | **133.048.605.141,00** | **84,80** | **(23.839.236.538,00)** | **129.468.465.597,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp156.887.841.679,00 terealisasi sebesar Rp133.048.605.141,00 atau 84,80%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 terkait dengan akun rincian objek belanja yang disampaikan diatas sebesar Rp129.468.465.597,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.580.139.544,00 atau sebesar 2,77%.

### A.5.1.1.03 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. anggaran dan realisasi belanja yang berakhir per 31 Desember 2021. serta realisasi Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 68**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**
**Tahun 2021 dan 2020**
**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/(Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 645.437.440,00 | 472.670.276,00 | 73,23 | (172.767.164,00) | 524.935.300,00 |
| **2** | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 194.410.474,00 | 50.677.854,00 | 26,07 | (143.732.620,00) | 177.143.750,00 |
| **3** | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 9.568.764.000,00 | 8.917.143.120,00 | 93,19 | (651.620.880,00) | 0,00 |
| **4** | Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD | 1.798.507.000,00 | 1.783.231.200,00 | 99,15 | (15.275.800,00) | 0,00 |
| **5** | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | 345.000.000,00 | 321.000.000,00 | 93,04 | (24.000.000,00) | 0,00 |
| **6** | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 2.119.063.565,00 | 1.222.547.197,54 | 57,69 | (896.516.367,46) | 0,00 |
| **7** | Belanja Honorarium | 11.444.874.848,00 | 9.651.992.038,00 | 84,33 | (1.792.882.810,00) | 0,00 |
| **8** | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | 201.000.000,00 | 195.300.000,00 | 97,16 | (5.700.000,00) | 0,00 |
| **JUMLAH** | | **26.317.057.327,00** | **22.614.561.685,54** | **85,93** | **(3.702.495.641,46)** | **702.079.050,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp26.317.057.327,00 terealisasi sebesar Rp22.614.561.685,54 atau 85,93%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 terkait dengan akun rincian objek belanja yang disampaikan diatas sebesar Rp702.029.050,00 mengalami peningkatan sebesar Rp21.912.482.635,54 atau sebesar 3.121%. Peningkatan realisasi belanja ini dikarenakan perbedaan penyajian nomenklatur pengungkapan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang sebelumnya merupakan Belanja Insentif Daerah.

### A.5.1.1.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD. anggaran dan realisasi belanja yang berakhir per 31 Desember 2021. serta realisasi Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 69**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Belanja Uang Representasi DPRD | 451.290.000,00 | 414.330.000,00 | 91,81 | (36.960.000,00) | 0,00 |
| **2** | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 90.258.000,00 | 71.885.100,00 | 79,64 | (18.372.900,00) | 0,00 |
| **3** | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 58.311.712,00 | 54.459.840,00 | 93,39 | (3.851.872,00) | 0,00 |
| **4** | Belanja Uang Paket DPRD | 38.682.000,00 | 38.209.500,00 | 98,78 | (472.500,00) | 0,00 |
| **5** | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 678.170.500,00 | 647.519.250,00 | 95,48 | (30.651.250,00) | 0,00 |
| **6** | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 74.358.900,00 | 69.745.725,00 | 93,80 | (4.613.175,00) | 0,00 |
| **7** | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 24.481.800,00 | 0,00 | 0,00 | (24.481.800,00) | 0,00 |
| **8** | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 2.520.000.000,00 | 2.488.500.000,00 | 98,75 | (31.500.000,00) | 0,00 |
| **9** | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 630.000.000,00 | 619.500.000,00 | 98,33 | (10.500.000,00) | 0,00 |
| **10** | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 1.230.000,00 | 765.814,00 | 62,26 | (464.186,00) | 0,00 |
| **11** | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 3.043.575.000,00 | 2.991.029.622,00 | 98,27 | (52.545.378,00) | 0,00 |
| **12** | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 3.042.000.000,00 | 3.004.200.000,00 | 98,76 | (37.800.000,00) | 0,00 |
| **13** | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 5.000.000,00 | 3.150.000,00 | 63,00 | (1.850.000,00) | 0,00 |
| **14** | Belanja Tunjangan Badan Musyawarah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | Belanja Tunjangan Komisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | Belanja Tunjangan Badan Anggaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | Belanja Tunjangan Badan Kehormatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **18** | Belanja Tunjangan Perumahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | Uang Duka Wafat/Tewas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | Belanja Tunjangan Badan Legislasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH** | **10.657.357.912,00** | **10.403.294.851,00** | **97,62** | **(254.063.061,00)** | **0,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.657.357.912,00 terealisasi sebesar Rp10.403.294.851,00 atau 97,62%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 terkait dengan akun rincian objek belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp0,00 mengalami peningkatan sebesar Rp10.403.294.851,00. Peningkatan realisasi belanja ini

dikarenakan perbedaan nomenklatur pengungkapan Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD di tahun sebelumnya.

### A.5.1.1.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH. anggaran dan realisasi belanja yang berakhir per 31 Desember 2021. serta realisasi Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 70**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 66.400.000,00 | 54.600.000,00 | 82,23 | (11.800.000,00) | 0,00 |
| **2** | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 5.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | (5.150.000,00) | 0,00 |
| **3** | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 99.500.000,00 | 98.280.000,00 | 98,77 | (1.220.000,00) | 0,00 |
| **4** | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 5.214.375,00 | 2.027.760,00 | 38,89 | (3.186.615,00) | 0,00 |
| **5** | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 10.000.000,00 | 1.177.446,00 | 11,77 | (8.822.554,00) | 0,00 |
| **6** | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 100.000,00 | 2.240,00 | 2,24 | (97.760,00) | 0,00 |
| **7** | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 8.100.000,00 | 5.241.600,00 | 64,71 | (2.858.400,00) | 0,00 |
| **8** | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 112.320,00 | 0,00 | 0,00 | (112.320,00) | 0,00 |
| **9** | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 336.960,00 | 0,00 | 0,00 | (336.960,00) | 0,00 |
| **10** | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak | 1.973.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.973.025.000,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH** | **2.167.938.655,00** | **161.329.046,00** | **7,44** | **(2.006.609.609,00** | **0,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.167.938.655,00 terealisasi sebesar Rp161.329.046,00 atau 7,44%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 terkait dengan akun rincian objek belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH yang disajikan diatas sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp161.329.046,00. Peningkatan realisasi belanja ini dikarenakan perbedaan penyajian nomenklatur pengungkapan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH di tahun sebelumnya.

### A.5.1.1.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. anggaran dan realisasi belanja yang berakhir per 31 Desember 2021. serta realisasi Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 71**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2021 dan 2020**
**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 201.600.000,00 | 201.600.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 305.805.560,00 | 288.706.740,00 | 94,41 | (17.098.820,00) | 289.289.618,00 |
| **3** | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.509.500.000,00 |
| **4** | Tunjangan Remunerasi KDH/WKDH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.000.000,00 |
| **JUMLAH** | | **507.405.560,00** | **490.306.740,00** | **96,63** | **(17.098.820,00)** | **4.520.789.618,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran dan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp507.405.560,00 terealisasi sebesar Rp490.306.740,00 atau 96,63%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 terkait dengan akun rincian objek belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH disajikan diatas sebesar Rp4.520.789.618,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.030.482.878,00 atau sebesar 89,16%. Penurunan yang signifikan ini disebabkan karena pada realisasi Tahun 2020 terdapat realisasi pada akun Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Remunerasi KDH/WKDH yang tidak dianggarkan lagi di tahun anggaran 2021.

### A.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian barang da/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial. Akun Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang. Belanja Jasa. Belanja Pemeliharaan. Belanja Perjalanan Dinas. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. dan Belanja Barang dan Jasa BOS. Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 72**
**Anggaran dan Realisasi Jenis Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020**
**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Belanja Barang Pakai Habis | 97.054.431.166,00 | 47.294.333.519,00 | 48,73 | (49.760.097.647,00) | 9.620.409.901,00 |
| 2 | Belanja Barang Tak Habis Pakai/Material | 43.282.000,00 | 33.220.000,00 | 76,75 | (10.062.000,00) | 13.275.160.601,00 |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 153.918.452.632,00 | 136.307.446.897,46 | 88,56 | (17.611.005.734,54) | 31.392.882.499,00 |
| 4 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 20.636.277.978,00 | 16.869.157.335,00 | 81,75 | (3.767.120.643,00) | 11.635.517.072,00 |
| 5 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 5.496.829.225,00 | 2.798.401.800,00 | 50,91 | (2.698.427.425,00) | 0,00 |
| 6 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 9.429.127.514,00 | 7.399.345.085,00 | 78,47 | (2.029.782.429,00) | 0,00 |
| 7 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 248.928.000,00 | 210.591.500,00 | 84,60 | (38.336.500,00) | 0,00 |
| 8 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 35.703.289.879,00 | 10.352.494.700,00 | 29,00 | (25.350.795.179,00) | 0,00 |
| 9 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 1.212.380.800,00 | 369.875.000,00 | 30,51 | (842.505.800,00) | 0,00 |
| 10 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 310.000.000,00 | 270.000.000,00 | 87,10 | (40.000.000,00) | 0,00 |
| 11 | Belanja Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 2.096.280.000,00 | 1.080.640.000,00 | 51,55 | (1.015.640.000,00) | 0,00 |
| 12 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5.051.379.650,00 | 3.227.005.724,00 | 63,88 | (1.824.373.926,00) | 0,00 |
| 13 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 3.146.498.099,00 | 1.503.545.152,00 | 47,78 | (1.642.952.947,00) | 0,00 |
| 14 | Belanja Pemeliharaan Jalan. Jaringan. dan Irigasi | 1.218.383.458,00 | 541.222.000,00 | 44,42 | (677.161.458,00) | 0,00 |
| 15 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 14.219.600,00 | 13.818.200,00 | 97,18 | (401.400,00) | 0,00 |
| 16 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 57.835.661.243,00 | 31.319.044.570,00 | 54,15 | (26.516.616.673,00) | 0,00 |
| 17 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 2.617.223.000,00 | 2.418.447.000,00 | 82,72 | (198.776.000,00) | 0,00 |
| 18 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 1.431.000.000,00 | 930.052.480,00 | 64,99 | (500.947.520,00) | 0,00 |
| 19 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 7.847.964.391,00 | 8.361.389.852,11 | 106,5 | 513.425.466,11 | 0,00 |
| 20 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.092.862.512,00 |
| 21 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409.859.127,00 |
| 22 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/ Parkir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.064.583.170,00 |
| 23 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.315.500,00 |
| 24 | Belanja Sewa Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400.000,00 |
| 25 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.600.000,00 |
| 26 | Belanja Makanan dan Minuman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.073.987.829,00 |
| 27 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.146.500,00 |
| 28 | Belanja Pakaian Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291.567.236,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.336.169.398,00 |
| 30 | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.738.431.212,00 |
| 31 | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.845.162.937,92 |
| 32 | Belanja Jasa Konsultasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504.017.200,00 |
| 33 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.925.966.914,39 |
| 34 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000.000,00 |
| 35 | Belanja Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.722.500,00 |
| 36 | Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.260.000,00 |
| 37 | Belanja Bantuan Operasional Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.065.466.743,04 |
| 38 | Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.498.948.000,00 |
| 39 | Belanja Pelayanan Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.729.000,00 |
| 40 | Belanja Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.750.000,00 |
| | **JUMLAH** | **405.311.608.635,00** | **271.300.030.814,57** | **66,94** | **(134.011.577.820,43)** | **190.441.915.852,35** |

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp405.311.608.635,00 terealisasi sebesar Rp271.300.030.814,57atau 66,94%. Untuk akun nomenklatur telah disesuaikan dengan peraturan yang belaku saat ini. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp190.441.915.852,35 mengalami peningkatan sebesar Rp80.858.114.962,22 atau sebesar 42,46%.

**Tabel 73**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | SKPD | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sekretariat Daerah | 33.870.821.229,00 | 23.878.362.151,00 | 70,50 | (9.992.459.078,00) | 21.129.664.285,00 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 20.715.835.716,00 | 16.936.338.038,00 | 81.76 | (3.779.497.678,00) | 15.326.130.452,92 |
| 3 | Inspektorat | 4.491.353.274,00 | 2.569.989.524,00 | 57,22 | (1.921.363.750,00) | 1.814.985.298,00 |
| 4 | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 76.147.199.734,00 | 61.175.265.672,11 | 80,34 | (14.971.934.061,89) | 35.709.282.081,43 |
| 5 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 96.666.890.719,00 | 61.078.495.685,46 | 63,18 | (35.588.395.033,54) | 47.179.275.891,00 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 38.686.325.736,00 | 12.022.468.351,00 | 31,08 | (26.663.857.385,00) | 17.569.214.198,00 |
| 7 | Dinas Sosial Pemberdayaan | 6.267.402.780,00 | 4.199.890.488,00 | 67,01 | (2.067.512.292,00) | 2.145.701.725,00 |

| No | SKPD | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa | | | | | |
| **8** | Dinas Penanaman Modal PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 5.006.311.042,00 | 3.653.372.826,00 | 72,98 | (1.352.938.216,00) | 1.691.768.958,00 |
| **9** | Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 17.860.688.430,00 | 8.665.325.521,00 | 48,52 | (9.195.362.909,00) | 7.810.626.945,00 |
| **10** | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 20.910.477.727,00 | 13.240.994.106,00 | 63,32 | (7.669.483.621,00) | 4.470.668.164,00 |
| **11** | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 2.850.503.096,00 | 2.791.960.683,00 | 97,95 | (58.542.413,00) | 1.123.727.302,00 |
| **12** | Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 10.067.422.066,00 | 7.988.259.197,00 | 79,35 | (2.079.162.869,00) | 8.968.652.574,00 |
| **13** | Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian | 4.625.759.866,00 | 3.395.059.735,00 | 73,39 | (1.230.700.131,00) | 1.497.244.272,00 |
| **14** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 7.870.511.206,00 | 3.798.508.816,00 | 48,26 | (4.072.002.390,00) | 5.173.674.765,00 |
| **15** | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 10.915.338.428,00 | 10.602.432.712,00 | 97,13 | (312.905.716,00) | 2.084.705.854,00 |
| **16** | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3.255.459.674,00 | 2.262.913.105,00 | 69,51 | (992.546.569,00) | 1.420.867.312,00 |
| **17** | Badan Keuangan Daerah | 9.638.693.186,00 | 6.897.759.561,00 | 71,56 | (2.740.933.625,00) | 3.876.858.800,00 |
| **18** | Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 5.204.550.314,00 | 4.241.643.294,00 | 81,50 | (962.907.020,00) | 2.634.058.170,00 |
| **19** | Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Penaggulangan Bencana Daerah | 2.024.803.752,00 | 1.527.490.791,00 | 75,44 | (497.312.961,00) | 1.245.843.583,00 |
| **20** | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5.032.992.826,00 | 3.743.430.797,00 | 74,38 | (1.289.562.029,00) | 1.161.539.528,00 |
| **21** | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 196.867.000,00 | 99.688.126,00 | 50,64 | (97.178.874,00) | 0,00 |
| **22** | Kecamatan Jemaja | 2.897.751.156,00 | 2.445.500.269,00 | 84,39 | (452.250.887,00) | 963.331.874,00 |
| **23** | Kecamatan Jemaja Timur | 1.315.205.726,00 | 1.034.557.862,00 | 78,66 | (280.647.864,00) | 342.110.700,00 |
| **24** | Kecamatan Palmatak | 2.582.069.875,00 | 2.294.552.068,00 | 88,86 | (287.517.807,00) | 820.048.482,00 |
| **25** | Kecamatan Siantan | 5.373.384.458,00 | 3.425.089.142,00 | 63,74 | (1.948.295.316,00) | 897.017.308,00 |
| **26** | Kecamatan Siantan Selatan | 1.225.862.290,00 | 1.198.456.066,00 | 97,76 | (27.406.224,00) | 483.985.892,00 |
| **27** | Kecamatan Siantan Tengah | 2.539.102.288,00 | 1.382.985.381,00 | 54,47 | (1.156.116.907,00) | 960.268.500,00 |
| **28** | Kecamatan Siantan Timur | 2.488.448.633,00 | 1.304.043.108,00 | 52,40 | (1.184.405.525,00) | 642.672.122,00 |
| **29** | Kecamatan Siantan Utara | 1.147.148.549,00 | 788.982.405,00 | 68,78 | (358.166.144,00) | 381.109.200,00 |
| **30** | Kecamatan Jemaja Barat | 1.212.348.111,00 | 1.070.474.061,00 | 88,30 | (141.874.050,00) | 470.131.916,00 |
| **31** | Kecamatan Kute Siantan | 2.224.079.748,00 | 1.585.741.273,00 | 71,30 | (638.338.475,00) | 446.749.700,00 |
| **JUMLAH** | | **405.311.608.635,00** | **271.300.030.814,57** | **66,94** | **(134.011.577.820,43)** | **190.441.915.852,35** |

### A.5.1.5 Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya. badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Belanja Hibah dapat dianggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, guna menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program. kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Anggaran dan realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 pada Belanja Hibah dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 74**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Belanja Hibah Kepada Organisasi Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858.250.000,00 |
| **2** | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 24.148.968.000,00 |
| **3** | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 3.251.100.000,00 | 2.354.940.604,00 | 72,44 | (896.159.396,00) | 0,00 |
| **4** | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 716.948.317,00 | 196.864.900,00 | 27,46 | (520.083.417,00) | 0,00 |
| **5** | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 1.120.000.000,00 | 730.000.000,00 | 65,18 | (390.000.000,00) | 0,00 |
| **6** | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 2.210.998.000,00 | 1.137.800.000,0 | | (1.073.198.000,00) | 0,00 |
| **8** | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 7.636.275.619,00 | 4.800.464.429,00 | | (2.835.811.190,00) | 0,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **9** | Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 929.061.267,00 | 876.061.267,00 | | (53.000.000,00) | 0,00 |
| **10** | Belanja Hibah Barang kepada Koperasi | 3.989.000.000,00 | 3.831.960.000,00 | | (157.040.000,00) | 0,00 |
| **11** | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta | 347.666.504,00 | 0,00 | 0,00 | 347.666.504,00 | 0,00 |
| **13** | Belanja Hibah Parawisata, Kelompok dan Anggota Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986.756.857,00 |
| **14** | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 397.127.718,00 | 397.127.718,00 | 0,00 | 0,00 | 397.127.718,00 |
| **JUMLAH** | | **20.673.177.425,00** | **14.400.218.918,00** | **69,66** | **(6.272.958.507,00)** | **27.391.102.575,00** |

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp20.673.177.425,00 terealisasi sebesar Rp14.400.218.918,00 atau 69,66%. Realisasi Tahun Anggaran 2021 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp27.391.102.575,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.990.883.657,00 atau sebesar 47,43%. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sehingga Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan tersebut.

Terdapat beberapa-berapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Belanja Hibah dan/atau Bantuan Sosial antara lain; Sekretariat Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Keuangan Daerah.

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah di masing-masing Perangkat Daerah yang disebut diatas dapat diungkapkan sebagai berikut :

**Tabel 75**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Per SKPD Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| No | SKPD | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat | 1.585.000.000,00 | 816,800,000,00 | 51,53 | (768.200.000,00) |

| No | SKPD | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2** | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 4.423.529.587,00 | 2.805.258.979,00 | 63,42 | (1.618.270.608,00) |
| **3** | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 5.121.925.220,00 | 2.007.061.267,00 | 39,19 | (3.114.863.953,00) |
| **4** | Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 600.000.000,00 | 579.040.604,00 | 96,51 | (20.959.396,00) |
| **5** | Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 3.761.624.900,00 | 3.592.970.350,00 | 95,52 | (168.654.550,00) |
| **6** | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 3.989.000.000,00 | 3.831.960.000,00 | 96,07 | (157.040.000,00) |
| **8** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 150.000.000,00 | 115.000.000,00 | 76,67 | (35.000.000,00) |
| **9** | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 349.970.000,00 | 75.000.000,00 | 21,43 | (274.970.000,00) |
| **10** | Badan Keuangan Daerah | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **11** | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 617.127.718,00 | 502.127.718,00 | 81,37 | (115.000.000,00) |
| **JUMLAH** | | **20.673.177.425,00** | **14.400.218.918,00** | **69,66** | **(6.272.958.507,00)** |

Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat hanya terdapat pada 1 (satu) perangkat daerah yaitu pada Badan Keuangan Daerah, merupakan hibah uang kepada Polisi Resort Kepulauan Anambas di Tarempa, anggaran dan realisasi hibah uang tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut :

**Tabel 76**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | SKPD | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1* | Badan Keuangan Daerah | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | ***JUMLAH*** | **75.000.000,00** | **75.000.000,00** | **100,00** | **0,00** |

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat (Polres Kepulauan Anambas) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp75.000.000,00 terealisasi sebesar Rp75.000.000,00 atau sebesar 100,00%.

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2021 terdapat pada 5 (lima) Perangkat Daerah antara lain Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Anggaran dan realisasi hibah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

**Tabel 77**

**Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | SKPD | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1* | Sekretariat Daerah | 370.000.000,00 | 185.000.000,00 | 50,00 | (185.000.000,00) |
| *2* | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 1.981.100.000,00 | 1.400.900.000,00 | 70,71 | (580.200.000,00) |
| *3* | Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 600.000.000,00 | 579.040.604,00 | 96,51 | (20.959.396,00) |
| *4* | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 150.000.000,00 | 115.000.000,00 | 76,67 | (35.000.000,00) |
| *5* | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 150.000.000,00 | 75.000.000,00 | 50,00 | (75.000.000,00) |
| | ***JUMLAH*** | **3.251.100.000,00** | **2.354.940.604,00** | **72,44** | **(896.159.396,00)** |

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.251.100.000,00 terealisasi sebesar Rp2.354.940.604,00 atau sebesar 72,44%.

**Tabel 78**

**Daftar Penerima**
**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**
**Pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *1* | Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kab. Kep Anambas | Tarempa - Kep. Anambas | 110.000.000,00 |
| *2* | Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Kep. Anambas | Tarempa - Kep. Anambas | 75.000.000,00 |
| | | ***JUMLAH*** | **185.000.000,00** |

**Tabel 79**

**Daftar Penerima**
**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**
**Pada Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *1* | TK Negeri 1 Siantan Timur | Kec. Siantan Timur | 18.000.000,00 |
| *2* | TK Negeri 1 Kute Siantan | Kec. Kute Siantan | 36.000.000,00 |
| *3* | TK Negeri 2 Palmatak | Kec. Palmatak | 28.800.000,00 |
| *4* | TK Negeri Pembina | Kec. Siantan | 69.300.000,00 |
| *5* | TK Negeri 1 Siantan Selatan | Kec. Siantan Selatan | 9.300.000,00 |
| *6* | TK Negeri 1 Palmatak | Kec. Palmatak | 38.700.000,00 |
| *7* | TK Negeri 1 Jemaja Timur | Kec. Jemaja Timur | 13.500.000,00 |
| *8* | TK Negeri 1 Jemaja | Kec. Jemaja | 31.500.000,00 |
| *9* | TK Negeri 3 Palmatak | Kec. Palmatak | 25.200.000,00 |
| *10* | PAUD Pertiwi Lavender | Kep. Anambas | 9.000.000,00 |
| *11* | PAUD Insan Cendekia | Kep. Anambas | 17.700.000,00 |

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| 12 | PAUD Raudhatul Khadijah | Kep. Anambas | 19.200.000,00 |
| 13 | PAUD Permata Bunda | Kep. Anambas | 21.600.000,00 |
| 14 | PAUD Pintar | Kep. Anambas | 13.800.000,00 |
| 15 | PAUD Buah Hati Bunda | Kep. Anambas | 30.000.000,00 |
| 16 | PAUD Kasih Ibu | Kep. Anambas | 18.000.000,00 |
| 17 | PAUD Harapan Bunda | Kep. Anambas | 6.000.000,00 |
| 18 | PAUD Tunas Bangsa | Kep. Anambas | 9.600.000,00 |
| 19 | PAUD Baiturrahman | Kep. Anambas | 18.000.000,00 |
| 20 | PAUD Pelangi | Kep. Anambas | 9.000.000,00 |
| 21 | TK Anugrah | Kep. Anambas | 16.200.000,00 |
| 22 | TK PELANGI | Kep. Anambas | 9.600.000,00 |
| 23 | TK HARAPAN BUNDA | Kep. Anambas | 6.000.000,00 |
| 24 | TK RASA SAYANG | Kep. Anambas | 15.000.000,00 |
| 25 | TK PERTIWI | Kep. Anambas | 11.700.000,00 |
| 26 | TK WIJAYA KUSUMA | Kep. Anambas | 7.800.000,00 |
| 27 | TK KUSUMA BANGSA | Kep. Anambas | 12.300.000,00 |
| 28 | TK AN NUR BAYAT | Kep. Anambas | 9.600.000,00 |
| 29 | KB ANUGRAH | Kep. Anambas | 10.800.000,00 |
| 30 | TPA KURNIA | Kep. Anambas | 7.200.000,00 |
| 31 | TPA AL-MUHAJIRIN | Kep. Anambas | 6.300.000,00 |
| 32 | KB KURNIA | Kep. Anambas | 6.000.000,00 |
| 33 | PKBM ANAMBAS CERDAS | Kep. Anambas | 20.700.000,00 |
| 34 | KB RASA SAYANG | Kep. Anambas | 7.200.000,00 |
| 35 | PKBM GEMA DHUHA | Kep. Anambas | 69.300.000,00 |
| 36 | PKBM SURI TAULADAN | Kep. Anambas | 45.000.000,00 |
| 37 | PKBM AL KIROMAH | Kep. Anambas | 24.300.000,00 |
| 38 | KB DARUL AWLAD | Kep. Anambas | 18.000.000,00 |
| 39 | KB AL HIKMAH | Kep. Anambas | 16.800.000,00 |
| 40 | KB AL MUTTAQIN | Kep. Anambas | 16.200.000,00 |
| 41 | KB AL-MUHAJIRIN | Kep. Anambas | 3.600.000,00 |
| 42 | PAUD KASIH IBU | Kep. Anambas | 46.800.000,00 |
| 43 | PAUD CINTA ANANDA | Kep. Anambas | 11.400.000,00 |
| 44 | PAUD ANOA | Kep. Anambas | 9.900.000,00 |
| 45 | PAUD MUTIARA HATI | Kep. Anambas | 18.600.000,00 |
| 46 | PAUD HARAPAN BUNDA | Kep. Anambas | 6.300.000,00 |
| 47 | TK AL JABAR NUR | Kep. Anambas | 16.800.000,00 |
| 48 | TK SRI RAMBUT | Kep. Anambas | 16.500.000,00 |
| 49 | TK NEGERI 1 SIANTAN TENGAH | Kep. Anambas | 17.400.000,00 |
| 50 | TK KARUNIA | Kep. Anambas | 11.700.000,00 |
| 51 | TK ISLAM TERPADU INSAN UTAMA | Kep. Anambas | 21.300.000,00 |
| 52 | PAUD NURUL IMAN | Kep. Anambas | 9.300.000,00 |
| 53 | PAUD AMANDA | Kep. Anambas | 7.800.000,00 |
| 54 | PAUD BINTANG KECIL | Kep. Anambas | 7.800.000,00 |

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *55* | PAUD NURUL HUDA | Kep. Anambas | 11.700.000,00 |
| *56* | TK AL-QURAN | Kep. Anambas | 70.200.000,00 |
| *57* | TK LESTARI | Kep. Anambas | 3.000.000,00 |
| *58* | TK KURNIA | Kep. Anambas | 11.400.000,00 |
| *59* | TK AL-MUHAJIRIN | Kep. Anambas | 6.000.000,00 |
| *60* | PAUD MUTIARA | Kep. Anambas | 9.000.000,00 |
| *61* | PAUD KASIH SAYANG | Kep. Anambas | 5.700.000,00 |
| *62* | PAUD KASIH BUNDA | Kep. Anambas | 13.800.000,00 |
| *63* | TK AIR SENA | Kep. Anambas | 11.700.000,00 |
| *64* | KWARCAB PRAMUKA | Kep. Anambas | 125.000.000,00 |
| *65* | KONI | Kep. Anambas | 150.000.000,00 |
| | | ***JUMLAH*** | 1.400.900.000,00 |

**Tabel 80**

**Daftar Penerima**
**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**
**Pada Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**
**Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *1* | Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kab. Kep. Anambs | Tarempa - Kep. Anambas | 579.040.604,00 |
| | | ***JUMLAH*** | **579.040.604,00** |

**Tabel 81**

**Daftar Penerima**
**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**
**Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *1* | Lembaga Adat Melayu (LAM) Kab. Kep. Anambas | Tarempa - Kep. Anambas | 115.000.000,00 |
| | | ***JUMLAH*** | **115.000.000,00** |

**Tabel 82**
**Daftar Penerima**
**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**
**Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *1* | Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kab. Kep. Anambas | Tarempa - Kep. Anambas | 75.000.000,00 |
| | | ***JUMLAH*** | **75.000.000,00** |

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2021 terdapat pada 2 (dua) Perangkat Daerah antara lain Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Anggaran dan realisasi hibah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut

**Tabel 83**
**Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | SKPD | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1* | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 516.978.317,00 | 196.864.900,00 | 38,08 | (320.113.417,00) |
| *2* | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 199.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | (199.970.000,00) |
| | ***JUMLAH*** | **716.948.317,00** | **196.864.900,00** | **27,46** | **(520.083.417,00)** |

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp716.948.317,00 terealisasi sebesar Rp196.864.900,00 atau sebesar 27,46%.

**Tabel 84**
**Daftar Penerima**
**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pada Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *1* | MIS Tiangau Kecamatan Siantan Selatan | Kec. Siantan Selatan | 196.864.900,00 |
| | | ***JUMLAH*** | **196.864.900,00** |

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun Anggaran 2021 terdapat pada 2 (dua) Perangkat Daerah antara lain Sekretariat Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. anggaran dan realisasi hibah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

**Tabel 85**
**Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | SKPD | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1* | Sekretariat Daerah | 900.000.000,00 | 625.000.000,00 | 0,69 | (275.000.000,00) |
| *2* | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 220.000.000,00 | 105.000.000,00 | 0,48 | (115.000.000,00) |
| | ***JUMLAH*** | **1.120.000.000,00** | **730.000.000,00** | **65,18** | **(390.000.000,00)** |

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.120.000.000,00 terealisasi sebesar Rp730.000.000,00 atau sebesar 65,18%.

**Tabel 86**
**Daftar Penerima**
**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *1* | Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Kep. Anambas | Tarempa - Kep. Anambas | 625.000.000,00 |
| | ***JUMLAH*** | | **625.000.000,00** |

**Tabel 87**
**Daftar Penerima**
**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *1* | Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Anambas | Kepulauan Anambas | 105.000.000,00 |
| | ***JUMLAH*** | | **105.000.000,00** |

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 terdapat pada 2 (dua) Perangkat Daerah antara lain Sekretariat Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Anggaran dan realisasi hibah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

**Tabel 88**
**Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | SKPD | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1* | Sekretariat Daerah | 315.000.000,00 | 6.800.000,00 | 2,16 | (308.200.000,00) |
| *2* | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1.895.998.000,00 | 1.131.000.000,00 | 59,65 | (764.998.000,00) |
| | ***JUMLAH*** | **2.210.998.000,00** | **1.137.800.000,00** | **51,46** | **(1.073.198.000,00)** |

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.210.998.000,00 terealisasi sebesar Rp1.137.800.000,00 atau sebesar 51,46%.

**Tabel 89**
**Daftar Penerima**
**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *1* | Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Nurul Huda Desa Telaga | Desa Telaga<br>Kec. Siantan Selatan | 6.800.000,00 |
| | | ***JUMLAH*** | **6.800.000,00** |

**Tabel 90**
**Daftar Penerima**
**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
**Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *1* | Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Pesisir Timur | Desa Pesisir Timur<br>Kec. Siantan | 1.131.000.000,00 |
| | | ***JUMLAH*** | **1.131.000.000,00** |

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 terdapat pada 3 (tiga) Perangkat Daerah antara lain Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan. Anggaran dan realisasi hibah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

**Tabel 91**
**Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial KemasyarakatanTahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | SKPD | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1* | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 1.577.784.766,00 | 1.207.494.079,00 | 76,53 | (370.290.687,00) |
| *2* | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2.296.865.953,00 | 0,00 | 0,00 | (2.296.865.953,00) |
| *3* | Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 3.761.624.900,00 | 3.592.970.350,00 | 95,52 | (168.654.550,00) |
| | ***JUMLAH*** | **7.636.275.619,00** | **4.800.464.429,00** | **62,86** | **(2.835.811.190,00)** |

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.636.275.619,00 terealisasi sebesar Rp4.800.464.429,00 atau sebesar 62,86%.

**Tabel 92**
**Daftar Penerima**
**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pada Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *1* | Desa Genting Pulur | Kec. Jemaja Timur | 198.878.600,00 |
| *2* | Desa Air Asuk | Kec. Siantan Tengah | 623.645.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *3* | Desa Batu Ampar | Kec. Palmatak | 384.970.479,00 |
| | | ***JUMLAH*** | **1.207.494.079,00** |

**Tabel 93**
**Daftar Penerima**
**Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**
**Pada Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | **Nama Penerima** | **Alamat** | **Nominal** |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *1* | Kelompok Tani Sehati Kec. Siatan Selatan | Desa Tiangau Kec. Siantan Selatan | 712.478.700,00 |
| *2* | Kelompok Tani Rekam Mandiri Kec. Siantan | Desa Rekam Kec. Siantan | 470.239.000,00 |
| *3* | Gapokan IPN | Desa Ladan | 21.039.205,00 |
| *4* | KUB Asam Jawa Mandiri | Desa Tebang | 21.039.205,00 |
| *5* | KUB Kakap Laut | Desa Tebang | 21.039.205,00 |
| *6* | KUB Kakap | Desa Tebang | 21.039.205,00 |
| *7* | KUB Kakap II | Desa Tebang | 21.039.205,00 |
| *8* | KUB Sembilang | Desa Tebang | 21.039.205,00 |
| *9* | KUB Ketipas | Desa Putik | 21.039.205,00 |
| *10* | KUB Tenggiri | Desa Putik | 21.039.205,00 |
| *11* | KUB Kemang | Desa Putik | 21.039.205,00 |
| *12* | KUB Kerapu | Desa Putik | 21.039.205,00 |
| *13* | KUB Tongkol Simbok | Desa Putik | 21.039.205,00 |
| *14* | KUB Kuda Laut | Desa Belibak | 21.039.205,00 |
| *15* | KUB Kerisi Pesisir | Desa Belibak | 21.039.205,00 |
| *16* | KUB Todok | Desa Candi | 21.039.205,00 |
| *17* | KUB Bawal 5 | Desa Tarempa Barat | 21.039.205,00 |
| *18* | KUB Selar | Desa Tarempa Barat | 21.039.205,00 |
| *19* | KUB Selayang | Desa Tarempa Barat | 21.039.205,00 |
| *20* | KUB Kemujon | Desa Tarempa Barat | 21.039.205,00 |
| *21* | KUB Todak | Desa Tarempa Barat | 21.039.205,00 |
| *22* | KUB Selar | Desa Tarempa Barat | 21.039.205,00 |
| *23* | KUB Baronang | Desa Sri Tanjung | 21.039.205,00 |
| *24* | KUB Tenggiri | Desa Sri Tanjung | 21.039.205,00 |
| *25* | KUB Kerisi Bali | Desa Sri Tanjung | 21.039.205,00 |
| *26* | KUB Tenggiri | Desa Pesisir Timur | 21.039.205,00 |
| *27* | KUB Kerapu Dalus | Desa Pesisir Timur | 21.039.205,00 |
| *28* | KUB Tenggiri | Desa Pesisir Timur | 21.039.205,00 |
| *29* | KUB Kakap Merah | Desa Putik | 21.039.205,00 |
| *30* | KUB Tanjung Kemudi | Desa Tarempa Timur | 21.039.205,00 |
| *31* | KUB Batu Berunai | Desa Tarempa Timur | 21.039.205,00 |
| *32* | KUB Belanak | Desa Tarempa Timur | 21.039.205,00 |
| *33* | KUB Tongkol Simbok | Desa Putik | 231.690.200,00 |
| *34* | KUB Kakap | Desa Tebang | 231.690.200,00 |
| *35* | KUB Camat Laut | Desa Sri Tanjung | 231.690.200,00 |

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *36* | KUB Tanjung Kemudi | Desa Tarempa Timur | 231.690.200,00 |
| *37* | KUB Lumba-Lumba | Desa Keramut | 231.690.200,00 |
| *38* | KUB Tongkol Simbok | Desa Putik | 85.080.600,00 |
| *39* | KUB Kakap | Desa Tebang | 85.080.600,00 |
| *40* | KUB Camat Laut | Desa Sri Tanjung | 85.080.600,00 |
| *41* | KUB Tanjung Kemudi | Desa Tarempa Timur | 85.080.600,00 |
| *42* | KUB Lumba-Lumba | Desa Keramut | 85.080.600,00 |
| *43* | KUB Tenggiri | Desa Sri Tanjung | 6.731.810,34 |
| *44* | KUB Simbang Laut | Desa Sri Tanjung | 6.731.810,34 |
| *45* | KUB Kerapu | Desa Sri Tanjung | 6.731.810,34 |
| *46* | KUB Elang Laut | Desa Sri Tanjung | 6.731.810,34 |
| *47* | KUB Anggoli | Desa Sri Tanjung | 6.731.810,34 |
| *48* | KUB Selar | Desa Tarempa Barat | 6.731.810,34 |
| *49* | KUB Bawal 5 | Desa Tarempa Barat | 6.731.810,34 |
| *50* | KUB Kemujon | Desa Tarempa Barat | 6.731.810,34 |
| *51* | KUB Belanak | Desa Tarempa Timur | 6.731.810,34 |
| *52* | KUB Batu Berunai | Desa Tarempa Timur | 6.731.810,34 |
| *53* | KUB Kakap Merah | Desa Tarempa Timur | 6.731.810,34 |
| *54* | KUB Bintang Utara | Desa Tarempa Timur | 6.731.810,34 |
| *55* | KUB Kerisi Bali | Desa Pesisir Timur | 6.731.810,34 |
| *56* | KUB Kerapu Dalus | Desa Pesisir Timur | 6.731.810,34 |
| *57* | KUB Tenggiri | Desa Pesisir Timur | 6.731.810,34 |
| *58* | Gapokkan Ipn | Desa Ladan | 6.731.810,34 |
| *59* | KUB Todak | Desa Candi | 6.731.810,34 |
| *60* | KUB Kakap II | Desa Tebang | 6.731.810,34 |
| *61* | KUB Sembilang | Desa Tebang | 6.731.810,34 |
| *62* | KUB Asam Jawa Mandiri | Desa Tebang | 6.731.810,34 |
| *63* | KUB Kakap Laut | Desa Tebang | 6.731.810,34 |
| *64* | KUB Kakap | Desa Tebang | 6.731.810,34 |
| *65* | KUB Kuda Laut | Desa Belibak | 6.731.810,34 |
| *66* | KUB Kerapu | Desa Putik | 6.731.810,34 |
| *67* | KUB Sonok | Desa Putik | 6.731.810,34 |
| *68* | KUB Kakap Merah | Desa Putik | 6.731.810,34 |
| *69* | KUB Ketipas | Desa Putik | 6.731.810,34 |
| *70* | KUB Tongkol Simbok | Desa Putik | 6.731.810,34 |
| *71* | KUB Tenggiri | Desa Putik | 6.731.810,34 |
| | | ***JUMLAH*** | **3.592.970.349,86** |

Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 terdapat pada 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Anggaran dan realisasi hibah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

**Tabel 94**

**Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | SKPD | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1* | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 929.061.267,00 | 876.061.267,00 | 94,30 | (53.000.000,00) |
| | ***JUMLAH*** | **929.061.267,00** | **876.061.267,00** | **94,30** | **(53.000.000,00)** |

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp929.061.267,00 terealisasi sebesar Rp876.061.267,00 atau sebesar 94,30%.

**Tabel 95**

**Daftar Penerima**

**Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *1* | Kepala Dusun Palah | Dusun Palah Desa Mubur Kec. Palmatak | 68.705.000,00 |
| *2* | Pengurus Masjid Alfajri Desa Temburun | Desa Temburun Kec. Siantan Timur | 78.815.000,00 |
| *3* | Ketua Yayasan Gereja Santa Maria Bintang Laut | Kelurahan Tarempa Kec. Siantan | 192.551.000,00 |
| *4* | Pengurus Masjid Desa Candi | Desa Candi Kec.Palmatak | 189.000.000,00 |
| *5* | Kacabjari Ranai | Kelurahan Tarempa Kec. Siantan | 47.190.000,00 |
| *6* | Pengurus Masjid Al-Khautsar Letung | Kelurahan Letung Kec. Jemaja | 299.800.267,00 |
| | | ***JUMLAH*** | **876.061.267,00** |

Belanja Hibah Barang kepada Koperasi Tahun Anggaran 2021 terdapat pada 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Anggaran dan realisasi hibah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

**Tabel 96**

**Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Koperasi Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | SKPD | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio %) | Lebih/ (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1* | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 3.989.000.000,00 | 3.831.960.000,00 | 96,06 | (157.040.000,00) |
| | ***JUMLAH*** | **3.989.000.000,00** | **3.831.960.000,00** | **96,06** | **(157.040.000,00)** |

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Hibah Barang kepada Koperasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.989.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.831.960.000,00 atau sebesar 96,06%.

**Tabel 97**

**Daftar Penerima**
**Belanja Belanja Hibah Barang kepada Koperasi Pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup**
**Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *1* | Pemerintah Desa Ladan (BUMDes Gerbang Mandiri) | Desa Ladan<br>Kec. Palmatak | 309.100.000,00 |
| *2* | Pemerintah Desa Kuala Maras (BUMDes Kuala Sejahtera) | Desa Kuala Maras<br>Kec. Jemaja Timur | 309.100.000,00 |
| *3* | Pemerintah Desa Ulu Maras (BUMDes Maju Bersama) | Desa Ulu Maras<br>Kec. Jemaja Timur | 607.200.000,00 |
| *4* | Pemerintah Desa Bukit Padi (BUMDes Permata) | Desa Bukit Padi<br>Kec. Jemaja | 309.100.000,00 |
| *5* | Pemerintah Desa Batu Berapit (BUMDes Tunas Remaja Bertuah) | Desa Batu Berapit<br>Kec. Jemaja | 607.200.000,00 |
| *6* | Pemerintah Desa Landak (BUMDes Landak Bestari) | Desa Landak<br>Kec. Jemaja | 1.690.260.000,00 |
| | | ***JUMLAH*** | **3.831.960.000,00** |

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Tahun Anggaran 2021 terdapat pada 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga. Anggaran dan realisasi hibah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

**Tabel 98**

**Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | SKPD | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1* | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 347.666.504,00 | 0,00 | 0,00 | (347.666.504,00) |
| | ***JUMLAH*** | **347.666.504,00** | **0,00** | **0,00** | **(347.666.504,00)** |

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp347.666.504,00 tidak terealisasi s.d 31 Desember 2021.

Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2021 terdapat pada 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Anggaran dan realisasi hibah tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

**Tabel 99**

**Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | SKPD | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1* | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 397.127.718,00 | 397.127.718,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***JUMLAH*** | **397.127.718,00** | **397.127.718,00** | **100,00** | **0,00** |

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp397.127.718,00 terealisasi sebesar Rp397.127.718,00 atau sebesar 100,00%

**Tabel 100**

**Daftar Penerima**
**Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
**Tahun Anggaran 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *1* | Partai Amanat Nasional (PAN) | Tarempa - Kep. Anambas | 50.929.671,00 |
| *2* | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | Tarempa - Kep. Anambas | 51.262.752,00 |
| *3* | Partai Demokrat | Tarempa - Kep. Anambas | 32.768.826,00 |
| *4* | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | Tarempa - Kep. Anambas | 28.010.526,00 |
| *5* | Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) | Tarempa - Kep. Anambas | 22.030.929,00 |
| *6* | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | Tarempa - Kep. Anambas | 25.250.712,00 |
| *7* | Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) | Tarempa - Kep. Anambas | 17.732.598,00 |
| *8* | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | Tarempa - Kep. Anambas | 74.705.310,00 |
| *9* | Partai Bulan Bintang (PBB) | Tarempa - Kep. Anambas | 43.173.642,00 |
| *10* | Partai Golongan Karya (GOLKAR) | Tarempa - Kep. Anambas | 51.262.752,00 |
| | | ***JUMLAH*** | **397.127.718,00** |

## A.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan sosial berupa uang kepada individu. Keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pada APBD Tahun Anggaran 2021 hanya terdapat 1 (satu) Perangkat Daerah yang menganggarkan Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada keluarga yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatas dapat diungkapkan sebagai berikut :

**Tabel 101**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.500.000,00 |
| **2** | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga | 134.715.000,00 | 134.715.000,00 | 100,00 | 0,00 | 24.945.000,00 |
| **JUMLAH** | | **134.715.000,00** | **134.715.000,00** | **100,00** | **0,00** | **183.445.000,00** |

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp134.715.000,00 terealisasi sebesar Rp134.715.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp183.445.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp48.730.000,00 atau sebesar 26,57%.

**Tabel 102**

**Anggaran Dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per SKPD Tahun Anggaran 2021**

(Dalam Rupiah)

| *No* | SKPD | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1* | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 134.715.000,00 | 134.715.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | ***JUMLAH*** | **134.715.000,00** | **134.715.000,00** | **100,00** | **0,00** |

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Keluarga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp134.715.000,00 terealisasi sebesar Rp134.715.000,00 atau sebesar 100.00%.

**Tabel 103**
**Daftar Penerima**
**Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
**Tahun Anggaran 2021**

(Dalam Rupiah)

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *1* | HASNAH | Desa Tarempa Barat | 5.000.000,00 |
| *2* | JAMIAH | Desa Temburun | 10.000.000,00 |
| *3* | MUSIN | Desa Lidi | 4.700.000,00 |
| *4* | ZULKAED | Desa Impol | 4.465.000,00 |
| *5* | TARMIZI | Desa Putik | 10.000.000,00 |
| *6* | MARTA DINATA | Desa Tarempa Barat | 8.050.000,00 |
| *7* | SARDAN | Desa Tarempa Barat | 12.950.000,00 |
| *8* | RIAHAAN | Desa Tarempa Selatan | 3.500.000,00 |
| *9* | BARTOLOMEUS ATE | Desa Sri Tanjung | 12.000.000,00 |
| *10* | MUSA SALEH | Desa Langir | 4.700.000,00 |
| *11* | YUDI ACHMAD | Desa Payalaman | 10.000.000,00 |
| *12* | ISMAIL | Desa Lidi | 5.000.000,00 |
| *13* | ABDULLAH | Desa Ladan | 2.500.000,00 |
| *14* | ABDUL MALIK | Desa Kuala Maras | 2.500.000,00 |
| *15* | JONI BASRI | Pasir Lecuh | 4.900.000,00 |

| *No* | Nama Penerima | Alamat | Nominal |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *16* | MANAN | Desa Dusun | 5.000.000,00 |
| *17* | FIRMAN EDI | Desa Air Asuk | 4.500.000,00 |
| *18* | SAPARUDIN | Desa Lingai | 10.600.000,00 |
| *19* | NOPRIZAL | Desa Tarempa Barat | 6.850.000,00 |
| *20* | SYAHUTI | Desa Bayat | 7.500.000,00 |
| | | ***JUMLAH*** | **134.715.000,00** |

## A.5.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah. Peralatan dan Mesin. Gedung dan Bangunan. Jalan. Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya. Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 104**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Belanja Modal Tanah | 230.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | (230.343.000,00) | 790.607.000,00 |
| **2** | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 54.829.220.602,00 | 33.331.184.690,10 | 60,79 | (21.498.035.911,90) | 27.265.764.736,00 |
| **3** | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 53.187.209.647,00 | 44.443.379.101,50 | 83,56 | (8.743.830.545,50) | 83.625.432.770,92 |
| **4** | Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan | 147.147.405.138,00 | 63.046.577.745,69 | 42,85 | (84.100.827.392,31) | 45.446.641.371,00 |
| **5** | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.511.809.549,00 | 2.142.044.928,83 | 85,28 | (369.764.620,17) | 2.620.025.400,00 |
| **JUMLAH** | | **257.905.987.936,00** | **142.963.186.466,12** | **55,43** | **(114.942.801.469,88)** | **159.748.471.277,92** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp257.905.987.936,00 terealisasi sebesar Rp142.963.186.466,12 atau 55,43%. Realisasi Tahun Anggaran 2021 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp159.748.471.277,92 mengalami penurunan sebesar Rp16.785.284.811,80 atau sebesar 10,51%. dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2021 banyak belanja modal yang telah selesai pada akhir tahun tidak bisa dilakukan pembayaran karena tidak kecukupan kas yang disebabkan terlambatnya dana transfer dari pemerintah ke daerah. sehingga waktu yang diberikan kepada perangkat daerah untuk melengkapi dokumen pencairan tidak terkejar dengan waktu yang ada.

Belanja Modal yang tidak bisa dibayarkan per 31 Desember 2021 dilakukan verifikasi oleh APIP untuk diakui sebagai utang jangka pendek lainnya dan dianggarkan kembali pada program dan kegiatan serta rincian objek yang sama pada tahun berikutnya.

### A.5.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran dalam rangka perolehan aset tetap tanah. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 pada Belanja Modal Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 105**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.692.000,00 |
| 2 | Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.915.000,00 |
| 3 | Belanja Modal Tanah Persil | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (150.000.000,00) | 0,00 |
| 4 | Belanja Modal Lapangan | 80.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | (80.343.000,00) | 0,00 |
| **JUMLAH** | | **230.343.000,00** | **0,00** | **0,00** | **(230.343.000,00)** | **790.607.000,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp230.343.000,00 s.d 31 Desember 2021 tidak ada terealisasi.

### A.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap berupa peralatan dan mesin. Anggaran dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 106**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sekretariat Daerah | 447.838.300,00 | 363.088.850,00 | 81,08 | (84.749.450,00) | 2.308.143.310,00 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 1.933.266.650,00 | 813.296.000,00 | 42,07 | (1.119.970.650,00) | 372.680.000,00 |
| 3 | Inspektorat | 31.360.000,00 | 23.740.000,00 | 75,70 | (7.620.000,00) | 570.051.398,00 |
| 4 | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 11.575.424.894,00 | 7.786.133.586,10 | 67,26 | (3.789.291.307,90) | 8.155.265.114,00 |
| 5 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 22.716.890.498,00 | 12.417.805.429,00 | 54,66 | (10.299.085.069,00) | 9.833.614.524,00 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 943.663.538,00 | 315.402.200,00 | 33,42 | (628.261.338,00) | 640.785.300,00 |
| 7 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa | 311.966.700,00 | 285.940.400,00 | 91,66 | (26.026.300,00) | 159.324.000,00 |
| 8 | Dinas Penanaman Modal PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 148.424.198,00 | 91.011.300,00 | 61,32 | (57.412.898,00) | 75.699.800,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **9** | Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 364.889.400,00 | 277.117.500,00 | 75,95 | (87.771.900.00) | 118.579.800,00 |
| **10** | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 5.129.940.899,00 | 3.284.941.250,00 | 64,03 | (1.844.999.649,00) | 59.092.000,00 |
| **11** | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 157.711.000,00 | 155.261.000,00 | 98,45 | (2.450.000,00) | 309.533.350,00 |
| **12** | Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 1.548.234.600,00 | 1.010.155.500,00 | 65,25 | (538.079.100,00) | 990.495.500,00 |
| **13** | Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian | 2.391.068.460,00 | 1.934.551.845,00 | 80,91 | (456.516.615,00) | 119.294.600,00 |
| **14** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 237.516.500,00 | 37.675.000,00 | 15,86 | (199.841.500,00) | 143.660.000,00 |
| **15** | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 1.704.321.000,00 | 1.391.491.640,00 | 81,64 | (312.829.360,00) | 542.034.900,00 |
| **16** | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 406.152.000.00 | 301.527.000,00 | 74,24 | (104.625.000,00) | 679.661.390,00 |
| **17** | Badan Keuangan Daerah | 512.787.200,00 | 452.703.000,00 | 88,28 | (60.084.200,00) | 491.348.000,00 |
| **18** | Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 294.901.000,00 | 290.056.800,00 | 98,36 | (4.844.200,00) | 138.798.000,00 |
| **19** | Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Penaggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.970.000,00 |
| **20** | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 319.409.000,00 | 293.857.300,00 | 92,00 | (25.551.700,00) | 4.400.000,00 |
| **21** | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | Kecamatan Jemaja | 279.707.340,00 | 279.485.800,00 | 99,92 | (221.540,00) | 166.140.000,00 |
| **23** | Kecamatan Jemaja Timur | 121.811.000,00 | 0,00 | 0,00 | (121.811.000,00) | 0,00 |
| **24** | Kecamatan Palmatak | 252.358.000,00 | 203.148.000,00 | 80,50 | (49.210.000,00) | 0,00 |
| **25** | Kecamatan Siantan | 436.803.000,00 | 70.400.000,00 | 16,12 | (366.403.000,00) | 341.286.000,00 |
| **26** | Kecamatan Siantan Selatan | 394.173.000,00 | 317.761.000,00 | 80,61 | (76.412.000,00) | 179.015.650,00 |
| **27** | Kecamatan Siantan Tengah | 774.152.750,00 | 132.522.100,00 | 17,12 | (641.630.650,00) | 164.450.000,00 |
| **28** | Kecamatan Siantan Timur | 113.506.000,00 | 112.365.000,00 | 98,99 | (1.141.000,00) | 95.136.000,00 |
| **29** | Kecamatan Siantan Utara | 121.547.000,00 | 116.108.300,00 | 95,53 | (5.438.700,00) | 82.662.900,00 |
| **30** | Kecamatan Jemaja Barat | 301.990.235,00 | 223.651.890,00 | 74,06 | (78.338.345,00) | 249.348.000,00 |
| **31** | Kecamatan Kute Siantan | 857.406.440,00 | 349.987.000,00 | 40,82 | (507.419.440,00) | 237.295.200,00 |
| **JUMLAH** | | **54.829.220.602,00** | **33.331.184.690,10** | **60,79** | **(21.498.035.911,90)** | **27.265.764.736,00** |

Data tabel di atas menggambarkan bahwa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 54.829.220.602,00 terealisasi sebesar Rp33.331.184.690,10 atau 60,79%. Realisasi Tahun Anggaran 2021 jika dibandingkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp27.265.764.736,00 mengalami peningkatan sebesar Rp6.065.419.955,10 atau sebesar 22,25%.

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin pada sub rincian objek belanja yang terdapat di setiap SKPD pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 107**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Belanja Modal Alat Pengangkat | 20.065.100,00 | 0,00 | 0,00 | (20.065.100,00) | 0,00 |
| 2 | Belanja Modal Mesin Proses | 694.424.000,00 | 464.972.194,00 | 66,96 | 229.451.806,00) | 0,00 |
| 3 | Belanja Modal Mesin Proses Apung | 62.100.000.00 | 61.875.000,00 | 99,64 | (225.000,00) | 0,00 |
| 4 | Belanja Modal Electric Generating Set | 27.172.200,00 | 27.172.200,00 | 100,0 | (148.864.850,00) | 0,00 |
| 5 | Belanja Modal Pompa | 265.684.850,00 | 116.820.000,00 | 43,97 | | 0,00 |
| 6 | Belanja Modal Mesin Bor | 2.420.000,00 | 2.310.000,00 | 95,45 | (110.000,00) | 0,00 |
| 7 | Belanja Modal Peralatan Selam | 192.500.000,00 | 0,00 | | (192.500.000,00) | 0,00 |
| 8 | Belanja Modal Alat Bantu Lainnya | 0,00 | 20.648.650,00 | | 20.648.650,00 | 0,00 |
| 9 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 1.430.962.400,00 | 1.223.846.996,00 | 85,53 | (207.115.404,00) | 0,00 |
| 10 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 370.160.000,00 | 114.000.000,00 | 30,80 | (256.160.000,00) | 0,00 |
| 11 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | 1.111.850.000,00 | 1.104.070.000,00 | 99,30 | (7.780.000,00) | 0,00 |
| 12 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 275.220.000,00 | 262.900.000,00 | 95,52 | (12.320.000,00) | 0,00 |
| 13 | Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang | 16.584.000,00 | 13.490.000,00 | 81,34 | (3.094.000,00) | 0,00 |
| 14 | Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang | 100.000.000,00 | 99.440.000,00 | 99,44 | (560.000,00) | 0,00 |
| 15 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya | 167.580.000,00 | 167.552.000,00 | 99,98 | (28.000,00) | 0,00 |
| 16 | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | 195.360.000,00 | 195.299.500,00 | 99,97 | (60.500,00) | 0,00 |
| 17 | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya | 4.379.239.957,00 | 1.304.879.400,00 | 29,80 | (3.074.360.557,00) | 0,00 |
| 18 | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus | 110.000.000,00 | 109.780.000,00 | 99,80 | (220.000,00) | 0,00 |
| 19 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu | 2.500.000,00 | 0,00 | | (2.500.000,00) | 0,00 |
| 20 | Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu | 13.650.000,00 | 6.985.000,00 | 51,17 | (6.665.000,00) | 0,00 |
| 21 | Belanja Modal Alat Ukur Lainnya | 26.638.480,00 | 4.627.000,00 | 17,37 | (22.011.480,00) | 0,00 |
| 22 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Belanja Modal Alat Produksi Perikanan | 12.056.000,00 | 0,00 | 0,00 | (12.056.000,00) | 0,00 |
| 24 | Belanja Modal Alat-Alat Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah | 860.000,00 | 200.000,00 | 23,26 | (660.000,00) | 0,00 |
| 26 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 25.837.500,00 | 22.770.000,00 | 88,13 | (3.067.500,00) | 0,00 |
| 27 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 1.530.023.300,00 | 846.441.403,00 | 55,32 | (683.581.897,00) | 0,00 |
| 28 | Belanja Modal Mebel | 1.922.486.900,00 | 979.734.700,00 | 50,96 | (942.752.200,00) | 0,00 |
| 29 | Belanja Modal Alat Pembersih | 35.466.300,00 | 28.979.000,00 | 81,71 | (6.487.300,00) | 0,00 |
| 30 | Belanja Modal Alat Pendingin | 480.858.400,00 | 344.455.757,00 | 71,63 | (136.402.643,00) | 0,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | Belanja Modal Alat Dapur | 43.054.000,00 | 29.815.857,00 | 69,25 | (13.238.143,00) | 0,00 |
| 32 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 4.248.226.223,00 | 3.129.778.147,00 | 73,68 | (1.118.448.076,00) | 0,00 |
| 33 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | 686.750.000,00 | 686.300.100,00 | 99,93 | (449.900,00) | 0,00 |
| 34 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | 794.825.319,00 | 556.258.471,00 | 69,98 | (238.566.848,00) | 0,00 |
| 35 | Belanja Modal Meja Rapat Pejabat | 135.000.000,00 | 54.835.000,00 | 40,62 | (80.165.000,00) | 0,00 |
| 36 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | 254.669.692,00 | 164.981.200,00 | 64,78 | (89.688.492,00) | 0,00 |
| 37 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | 201.035.000,00 | 22.440.000,00 | 11,16 | (178.595.000,00) | 0,00 |
| 38 | Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat | 5.163.400,00 | 5.160.100,00 | 99,94 | (3.300,00) | 0,00 |
| 39 | Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat | 145.500.000,00 | 129.899.000,00 | 89,28 | (15.601.000,00) | 0,00 |
| 40 | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | 1.165.144.488,00 | 390.896.000,00 | 33,55 | (774.248.488,00) | 0,00 |
| 41 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 118.005.000,00 | 112.423.025,00 | 95,27 | (5.581.975,00) | 0,00 |
| 42 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 120.320.000,00 | 24.747.800,00 | 20,57 | (95.572.200,00) | 0,00 |
| 43 | Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah | 160.960.000,00 | 37.670.600,00 | 23,40 | (123.289.400,00) | 0,00 |
| 44 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | 166.506.950,00 | 0,00 | 0,00 | (166.506.950,00) | 0,00 |
| 45 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telepon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF | 122.707.200,00 | 30.624.000,00 | 24,96 | (92.083.200,00) | 0,00 |
| 48 | Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional | 2.000.000,00 | 1.999.800,00 | 99,99 | (200,00) | 0,00 |
| 49 | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya | 182.000.000,00 | 181.997.200,00 | 100,0 | (2.800,00) | 0,00 |
| 50 | Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima VHF | 132.000.000,00 | 0,00 | | (132.000.000,00) | 0,00 |
| 51 | Belanja Modal Sumber Tenaga | 206.399.500,00 | 24.970.000,00 | 12,10 | (181.429.500,00) | 0,00 |
| 52 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 2.914.832.245,00 | 2.240.613.698,00 | 76,87 | (674.218.547,00) | 0,00 |
| 53 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | 197.006.234,00 | 36.360.700,00 | 18,46 | (160.645.534,00) | 0,00 |
| 54 | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 320.617.740,00 | 36.104.000,00 | 11,26 | (284.513.740,00) | 0,00 |
| 55 | Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary | 0,00 | 8.008.000,00 | | 8.008.000,00 | 0,00 |
| 56 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya | 1.241.803.321,00 | 502.332.400,00 | 40,45 | (739.470.921.00) | 0,00 |
| 57 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | 10.045.277.421,00 | 6.357.022.171,00 | 63,28 | (3.688.255.250,00) | 0,00 |
| 58 | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum | 149.600.000,00 | 144.540.000,00 | 96,62 | (5.060.000,00) | 0,00 |
| 59 | Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan | 27.711.750,00 | 27.595.000,00 | 99,58 | (116.750,00) | 0,00 |
| 60 | Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia | 99.000.000,00 | 0,00 | | (99.000.000,00) | 0,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 61 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika | 94.792.500,00 | 0,00 | | (94.792.500,00) | 0,00 |
| 62 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian | 196.900.000,00 | 196.416.000,00 | 99,75 | (484.000,00) | 0,00 |
| 63 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga | 37.950.000,00 | 0,00 | | (37.950.000,00) | 0,00 |
| 64 | Belanja Modal System/Power Supply | 99.825.000,00 | | | (99.825.000,00) | 0,00 |
| 65 | Belanja Modal Personal Computer | 5.137.948.900,00 | 1.966.834.730,00 | 38,28 | (3.171.114.170,00) | 0,00 |
| 66 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 163.500.000,00 | 151.525.000,00 | 92,68 | (11.975.000,00) | 0,00 |
| 67 | Belanja Modal Peralatan Mainframe | 13.200.000,00 | 24.191.200,00 | 183,2 | 10.991.200,00 | 0,00 |
| 68 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 485.454.600,00 | 317.735.100,00 | 65,45 | (167.719.500,00) | 0,00 |
| 69 | Belanja Modal Peralatan Jaringan | 266.565.000,00 | 227.920.000,00 | 85,50 | (38.645.000,00) | 0,00 |
| 70 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 1.244.763.900,00 | 529.633.500,00 | 42,55 | (715.130.400,00) | 0,00 |
| 71 | Belanja Modal Sumur Lainnya | 110.061.988,00 | 10.335.155,00 | 9,39 | (99.726.833,00) | 0,00 |
| 72 | Belanja Modal Baju Pengaman | 150.000.000,00 | 149.993.250,00 | 100,0 | (6.750,00) | 0,00 |
| 73 | Belanja Modal Masker | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Belanja Modal Topi Kerja | 100.390.000,00 | 99.656.000.00 | 99,27 | (734.000,00) | 0,00 |
| 75 | Belanja Modal Sepatu Lapangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya | 922.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | (922.800.000,00) | 0,00 |
| 77 | Belanja Modal Alat Penolong | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Belanja Modal Rambu Bersuar | 1.025.223.994,00 | 772.100.000,00 | 75.31 | (253.123.994,00) | 0,00 |
| 80 | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar | 2.338.878.205,00 | 1.230.537.000,00 | 52,61 | (1.108.341.205,00) | 0,00 |
| 81 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 199.174.800,00 | 199.174.000,00 | 100,0 | (800,00) | 0,00 |
| 82 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya | 360.512.500,00 | 183.963.500,00 | 51,03 | (176.549.000,00) | 0,00 |
| 83 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 4.512.464.345,00 | 4.799.549.186,10 | 106,3 | 287.084.841,10 | 0,00 |
| 84 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.601.300,00 |
| 85 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.132.000,00 |
| 86 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.625.000,00 |
| 88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200.000,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 89 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.858.500,00 |
| 90 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.687.300,00 |
| 91 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.355.000,00 |
| 92 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.860.237.812,00 |
| 93 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.203.296.400,00 |
| 94 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.096.677.453,00 |
| 95 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.548.700,00 |
| 96 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871.384.540,00 |
| 97 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.846.000,00 |
| 98 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.511.787,00 |
| 100 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.505.644,00 |
| 101 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-unit Laboratorium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.438.150,00 |
| 102 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 103 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.910.000,00 |
| 106 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.243.150,00 |
| 107 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.706.000,00 |
| **JUMLAH** | | **54.829.220.602,00** | **33.331.184.690,10** | **60,79** | **(21.498.035.911,90)** | **27.265.764.736,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp54.829.220.602,00 terealisasi sebesar Rp33.331.184.690,10 atau 60,79%. Anggaran dan realisasi diatas merupakan akun sub rincian objek belanja yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. kemudian untuk tahun kedepan dapat disesuaikan. Anggaran dan realisasi belanja jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp27.265.764.736,00 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 6.065.419.954,10 atau sebesar 22,25%.

### A.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran yang untuk mendapatkan aset tetap. Anggaran dan realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 108**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sekretariat Daerah | 250.308.500,00 | 49.907.000,00 | 19,94 | (200.401.500,00) | 99.803.000,00 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inspektorat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 20.221.582.522,00 | 17.626.678.896,00 | 87,17 | (2.594.903.626,00) | 23.262.454.076,92 |
| 5 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.549.973.520,00 | 1.044.144.803,00 | 40,95 | (1.505.828.717,00) | 31.683.599.164,00 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 16.088.857.702,00 | 16.289.666.575,50 | 101,25 | 200.808.873,50 | 16.193.581.434,00 |
| 7 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dinas Penanaman Modal PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 284.023.278,00 | 191.100.000,00 | 67,29 | (92.923.278,00) | 129.772.500,00 |
| 10 | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 387.654.862,00 | | 0,00 | (387.654.862,00) | 10.501.077.300,00 |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.356.000,00 |
| 12 | Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 1.594.851.740,00 | 667.828.200,00 | 41,88 | (927.023.540,00) | 35.750.000,00 |
| 13 | Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian | 9.164.310.130,00 | 6.382.403.756,00 | 69,65 | (2.781.906.374,00) | 730.779.296,00 |
| 14 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 2.620.999.616,00 | 2.168.178.571,00 | 82,73 | (452.821.045,00) | 621.690.000,00 |
| 15 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Badan Keuangan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **18** | Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | Badan Kesatuan Bangsa. Politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | Kecamatan Jemaja | 24.647.777,00 | 23.471.300,00 | 95,23 | (1.176.477,00) | 70.000.000,00 |
| **23** | Kecamatan Jemaja Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.803.000,00 |
| **24** | Kecamatan Palmatak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | Kecamatan Siantan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.570.000,00 |
| **26** | Kecamatan Siantan Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27** | Kecamatan Siantan Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28** | Kecamatan Siantan Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | Kecamatan Siantan Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | Kecamatan Jemaja Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | Kecamatan Kute Siantan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | | **53.187.209.647,00** | **44.443.379.101,50** | **83,56** | **(8.743.830.545,50)** | **83.625.432.770,92** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp53.187.209.647,00 terealisasi sebesar Rp44.443.379.101,50 atau 83,56%. Anggaran dan realisasi belanja jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp83.625.432.770,92berarti mengalami penurunan sebesar Rp39.182.053.669,42 atau sebesar 46,85%.

**Tabel 109**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/Kurang | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 796.186.808,00 | 1.390.393.626,50 | 174,64 | 594.206.818,50 | 0,00 |
| **2** | Belanja Modal Bangunan Gudang | 5.404.080.640,00 | 4.304.904.391,00 | 79,66 | (1.099.176.249,0 | 0,00 |
| **3** | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 2.549.973.520,00 | 1.044.144.803,00 | 40,95 | (1.505.828.717,0 | 0,00 |
| **4** | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 176.905.300,00 | 0,00 | 0.00 | (176.905.300,00) | 0,00 |
| **5** | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 19.865.329.781,00 | 17.288.057.350,00 | 87,03 | (2.577.272.431,0 | 0,00 |
| **6** | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 331.300.112,00 | 329.609.162,00 | 99,49 | (1.690.950,00) | 0,00 |
| **7** | Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga | 82.612.888,00 | 0,00 | 0,00 | (82.612.888,00) | 0,00 |
| **8** | Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9** | Belanja Modal Bangunan Terbuka | 198.772.585,00 | 0,00 | 0,00 | (198.772.585,00) | 0,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/Kurang | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 89.983.278,00 | 0,00 | 0,00 | (89.983.278,00) | 0,00 |
| 11 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 18.984.026.134,00 | 17.299.903.898,00 | 91,13 | (1.684.122.236,0 | 0,00 |
| 12 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum | 2.311.134.595,00 | 1.968.494.956,00 | 85,18 | (342.639.639,00) | 0,00 |
| 13 | Belanja Modal Bangunan Parkir | 394.579.270,00 | 223.154.915,00 | 56,56 | (171.424.355,00) | 0,00 |
| 14 | Belanja Modal Taman | 332.927.243,00 | 0,00 | 0,00 | (332.927.243,00) | 0,00 |
| 15 | Belanja Modal Rumah Negara Golongan III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya | 49.984.000,00 | 49.907.000,00 | 99,85 | (77.000,00) | 0,00 |
| 17 | Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi | 1.154.917.673,00 | 544.809.000,00 | 47,18 | (610.108.673,00) | 0,00 |
| 18 | Belanja Modal Pagar | 464.495.820,00 | 0,00 | 0,00 | (464.495.820,00) | 0,00 |
| 19 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.842.105.770,92 |
| 20 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.327.125.000,00 |
| 21 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-rambu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.505.000,00 |
| 24 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168.597.000,00 |
| 25 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.375.000,00 |
| 26 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.725.000,00 |
| **JUMLAH** | | **53.187.209.647,00** | **44.443.379.101,50** | **83,56** | **(8.743.830.545,5** | **83.625.432.770,92** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp53.187.209.647,00 terealisasi sebesar Rp44.443.379.101,50 atau 83,56%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp83.625.432.770,92 mengalami penurunan sebesar Rp39.182.053.669,42 atau sebesar 46,85%.

### A.5.2.4 Belanja Modal Jalan. Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan. Jaringan dan Irigasi merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan Aset Tetap Modal Jalan. Jaringan dan Irigasi. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan. Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 110**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Jaringan dan Irigasi Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 390.000.000,00 | 389.600.000,00 | 99,90 | (400.000,00) | 0,00 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 133.745.546.013,00 | 55.852.892.842,38 | 41,76 | (77.892.653.170,62) | 44.690.161.371,00 |
| 3 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa | 1.357.929.613,00 | 1.354.962.900,31 | 99,79 | (2.966.712,69) | 0,00 |
| 4 | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 10.531.322.890,00 | 4.444.790.694,00 | 42,21 | (6.086.532.196,00) | 473.798.000,00 |
| 5 | Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian | 998.484.766,00 | 880.209.453,00 | 88,16 | (118.275.313,00) | 0,00 |
| 6 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900.000,00 |
| 7 | Kecamatan Jemaja | 124.121.856,00 | 124.121.856,00 | 100,00 | 0,00 | 133.000.000,00 |
| 8 | Kecamatan Siantan | | | | | 139.782.000,00 |
| **JUMLAH** | | **147.147.405.138,00** | **63.046.577.745,69** | **42,85** | **(84.100.827.392,31)** | **45.446.641.371,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan. Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp147.147.405.138,00 terealisasi sebesar Rp63.046.577.745,69 atau 42,85%. Anggaran dan realisasi belanja jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.446.641.371,00 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp17.599.916.374,69 atau sebesar 38,73%.

**Tabel 111**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Jaringan dan Irigasi Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/Kurang | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Belanja Modal Jalan Kabupaten | 101.966.845.995,00 | 46.089.599.586,38 | 45,14 | (55.877.246.408,62) | 0,00 |
| 2 | Belanja Modal Jalan Desa | 1.778.438.621,00 | 1.426.220.827,00 | 80,20 | (352.217.794,00) | 0,00 |
| 3 | Belanja Modal Jalan Khusus | 197.582.330,00 | 0,00 | 0,00 | (197.582.330,00) | 0,00 |
| 4 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten | 2.750.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (2.750.000.000,00) | 0,00 |
| 5 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa | 14.468.053.033,00 | 562.975.589,00 | 3,89 | (13.905.077.444,00) | 0,00 |
| 6 | Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal | 10.531.322.890,00 | 4.444.790.694,00 | 42,21 | (6.086.532.196,00) | 0,00 |
| 7 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi | 4.790.838.844,00 | 4.596.454.000,00 | 95,94 | (194.384.844,00) | 0,00 |
| 8 | Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut | 539.230.112,00 | 0,00 | 0,00 | (539.230.112,00) | 0,00 |
| 9 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan | 1.491.439.057,00 | 543.012.892,00 | 36,41 | (948.426.165,00) | 0,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/Kurang | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Penanggulangan Bencana Alam | | | | | |
| **10** | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya | 998.484.766,00 | 880.209.453,00 | 88,15 | (118.275.313,00) | 0,00 |
| **11** | Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (50.000.000,00) | 0,00 |
| **12** | Belanja Modal Jalan Lainnya | 0,00 | 52.863.929,31 | 100,00 | 52.863.929,31 | 0,00 |
| **13** | Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik | 92.914.957,00 | 0,00 | 0,00 | (92.914.957,00) | 0,00 |
| **14** | Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya | 390.000.000,00 | 389.600.000,00 | 99.90 | (400.000,00) | 0,00 |
| **15** | Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah | 7.102.254.533,00 | 4.060.850.775,00 | 57,18 | (3.041.403.758,00) | 0,00 |
| **16** | Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.835.799.425,00 |
| **17** | Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.826.198.000,00 |
| **18** | Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900.000,00 |
| **19** | Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000.000,00 |
| **20** | Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.448.500,00 |
| **21** | Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.113.000,00 |
| **22** | Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000.000,00 |
| **23** | Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.620.000,00 |
| **24** | Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Laut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.858.220,00 |
| **25** | Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.798.000,00 |
| **26** | Belanja Modal Jalan. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902.906.226,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/Kurang | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah | | | | | |
| **JUMLAH** | | **147.147.405.138,00** | **63.046.577.745,69** | **42,85** | **(84.100.827.392,31)** | **45.446.641.371,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Jalan. Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2021 menurut sub rincian objek belanja sebesar Rp147.147.405.138,00 terealisasi sebesar Rp63.046.577.745,69 atau 42,85%. dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.446.641.371,00 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp17.599.916.374,69 atau sebesar 38,73%.

### A.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap berupa Aset Tetap Lainnya. Anggaran dan realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 112**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Sekretariat Daerah | 41.400.000,00 | 41.400.000,00 | 100,0 | 0,00 | 737.287.600,00 |
| **2** | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 2.208.392.049,00 | 1.952.463.428,83 | 88,42 | (255.928.620,17) | 1.213.589.800,00 |
| **3** | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 2.000.000,00 | 1.991.000,00 | 99,55 | (9.000,00) | 272.745.000,00 |
| **4** | Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian | 91.850.000,00 | 91.718.000,00 | 99,86 | (132.000,00) | 298.382.000,00 |
| **5** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 123.167.500,00 | 9.922.500,00 | 8,06 | (113.245.000,00) | 98.021.000,00 |
| **6** | Badan Keuangan Daerah | 45.000.000,00 | 44.550.000,00 | 99,00 | (450.000,00) | 0,00 |
| **JUMLAH** | | **2.511.809.549,00** | **2.142.044.928,83** | **85,28** | **(369.764.620,17)** | **2.620.025.400,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.511.809.549,00 terealisasi sebesar Rp2.142.044.928,83 atau 85,28%. Anggaran dan realisasi belanja jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.446.641.371,00 berarti mengalami penurunan sebesar Rp477.980.471,17 atau sebesar 18,25%.

**Tabel 113**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Sub Rincian Objek Belanja Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/Kurang | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Belanja Modal Buku Umum | 408.508.250,00 | 373.000.000,00 | 91,31 | (35.508.250,00) | 0,00 |
| 2 | Belanja Modal Buku Ilmu Sosial | 177.500.000,00 | 111.200.000,00 | 62,65 | (66.300.000,00) | 0,00 |
| 3 | Belanja Modal Buku Arsitektur. Kesenian. dan Olahraga | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Belanja Modal Serial | 29.400.000,00 | 29.400.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Belanja Modal Buku Laporan | 9.922.500,00 | 9.922.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Belanja Modal Alat Musik | 523.930.000,00 | 291.225.000,00 | 55,59 | (232.705.000,00) | 0,00 |
| 7 | Belanja Modal Alat Peraga Kesenian | 570.080.500,00 | 568.981.600,00 | 99,81 | (1.098.900,00) | 0,00 |
| 8 | Belanja Modal Tanaman | 2.000.000,00 | 1.991.000,00 | 99,55 | (9.000,00) | 0,00 |
| 9 | Belanja Modal Software | 136.850.000,00 | 136.268.000,00 | 99,58 | (582.000,00) | 0,00 |
| 10 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 626.618.299,00 | 593.056.828,83 | 94,65 | (33.561.470,17) | 0,00 |
| 11 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154.298.400,00 |
| 12 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.360.800,00 |
| 13 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.931.200,00 |
| 14 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.435.000,00 |
| **JUMLAH** | | **2.511.809.549,00** | **2.142.044.928,83** | **85,28** | **(369.764.620,17)** | **2.620.025.400,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.511.809.549,00 terealisasi sebesar Rp2.142.044.928,83 atau 85,28%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.620.025.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp477.980.471,17 atau sebesar 18,25%.

### A.5.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang tidak terdapat dalam program. kegiatan dan sub kegiatan. antara lain bencana alam dan lain sebagainya. Akun ini menggambarkan Belanja Tidak Terduga untuk periode Tahun Anggaran 2021 dapat di rinci pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 114**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/Kurang | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *1* | Belanja Tak Terduga | 1.000.000.000,00 | 878.745.392,00 | 87,87 | (121.254.608,00) | 29.074.357.387,00 |
| | ***JUMLAH*** | **1.000.000.000,00** | **878.745.392,00** | **87,87** | **(121.254.608,00)** | **29.074.357.387,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp878.745.392,00 atau 87,87%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar

Rp29.074.357.387,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.195.611.995,00 atau sebesar 96,98%. Penurunan ini dikarenakan pada tahun anggaran 2021 pemerintah konsentrasi penuh dalam penanganan wabah Covid-19 saja. dan pengembalian sisa hibah Kementerian Pariwisata yang tidak terserap sampai dengan 31 Desember 2020 dan masih terdapat sisa hibah di Rekening Kas Umum Daerah.

**Tabel 115**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| *No* | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ Kurang | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *1* | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 2.003.602.434,00 |
| *2* | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.833.830.700,00 |
| *3* | Kodim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.920.000,00 |
| *4* | Polres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.617.095.000,00 |
| *5* | Lanal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.220.000,00 |
| *6* | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0,00 | 499.830.000,00 | 0,00 | 499.830.000,00 | 12.226.798.464,00 |
| *7* | Dinas Koperasi Usaha Menengah dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.450.000,00 |
| *8* | Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.793.000,00 |
| *9* | Badan Keuangan Daerah | 0,00 | 363.915.392,00 | 0,00 | 363.915.392,00 | |
| *10* | PPKD | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | (1.000.000.000,00) | 53.647.789,00 |
| | ***JUMLAH*** | **1.000.000.000,00** | **878.745.392,00** | **87,87** | (121.254.608,00) | **29,074.357.387,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 dianggarkan pada DPA/DPPA SKPKD-PPKD. sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp878.745.392,00 atau 87,87%. yang diperuntukan dan/atau direalisasikan oleh SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dinas Kesehatan PPKB untuk penanggulangan wabah Covid-19. serta direalisasikan oleh Badan Keuangan Daerah sebagai pengembalian Hibah Kementerian Pariwisata s.d. berakhirnya periode tahun anggaran 2020. hibah tersebut tidak terrealisasikan 100% dan masih terdapat saldo di Rekening Kas Umum Daerah. sehingga Tahun Anggaran 2021 dilakukan pengembalian dengan menggunakan akun belanja tidak terduga. Anggaran yang telah direalisasikan saat ini. jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp29.074.357.387,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.195.611.995,00 atau sebesar 96,98%. Penurunan ini dikarenakan pada tahun anggaran 2021 pemerintah konsentrasi penuh dalam penanganan wabah Covid-19 yang melanda Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini.

## A.5.4 Belanja Transfer

### A.5.4.1 Belanja Transfer Bagi Hasil

Belanja Transfer Bagi Hasil adalah penyaluran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai kompensasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bagi Hasil Retribusi

Daerah pada Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 dapat diungkapkan sebagai berikut.

**Tabel 116**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ Kurang | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 1.843.739.570,00 | 1.038.042.837,00 | 56,30 | (805.696.733,00) | 1.965.240.037,00 |
| **2** | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 406.260.430,00 | 222.564.669,00 | 54,78 | (183.695.761,00) | 0,00 |
| **JUMLAH** | | **2.250.000.000,00** | **1.260.607.506,00** | **56,03** | **(989.392.494,00)** | **1.965.240.037,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.260.607.506,00 atau 56,03%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar 1.965.240.037,00 yang merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa sehingga mengalami penurunan sebesar Rp704.632.531,00 atau sebesar 35,85%. Hal ini disebabkan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi dianggarkan kecil dari tahun sebelumnya sehingga jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yang signifikan bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi ini disalurkan ke Pemerintahan Desa berdasarkan pencapaian target pajak daerah dan retribusi daerah yang di kompensasikan ke Pemerintah Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

**Tabel 117**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Per Desa Pada Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ Kurang | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Desa Tarempa Barat | 106.373.004,00 | 60.549.253,00 | 56,92 | (45.823.751,00) | 92.910.419,00 |
| 2 | Desa Tarempa Selatan | 95.235.934,00 | 54.209.851,66 | 56,92 | (41.026.082,34) | 83.182.855,00 |
| 3 | Desa Tarempa Timur | 91.321.045,00 | 51.981.432,00 | 56,92 | (39.339.613,00) | 79.763.438,00 |
| 4 | Desa Pesisir Timur | 50.679.460,00 | 28.847.577,00 | 56,92 | (21.831.883,00) | 44.265.459,00 |
| 5 | Desa Sri Tanjung | 54.734.543,00 | 31.155.797,00 | 56,92 | (23.578.746,00) | 47.807.331,00 |
| 6 | Desa Tarempa Barat Daya | 64.067.729,00 | 36.468.399,00 | 56,92 | (27.599.330,00) | 55.959.304,00 |
| 7 | Desa Mampok | 29.610.616,00 | 8.424.516,00 | 56,92 | (21.186.100,00) | 25.863.092,00 |
| 8 | Desa Rewak | 37.930.273,00 | 10.791.542,00 | 56,92 | (27.138.731,00) | 33.129.812,00 |
| 9 | Desa Air Biru | 29.127.203,00 | 16.579.681,00 | 56,92 | (12.547.522,00) | 25.440.860,00 |
| 10 | Desa Batu Berapit | 45.087.361,00 | 25.664.463,00 | 56,92 | (19.422.898,00) | 39.381.098,00 |
| 11 | Desa Landak | 46.907.273,00 | 26.700.387,00 | 56,92 | (20.206.886,00) | 40.970.682,00 |
| 12 | Desa Tebang | 90.266.931,00 | 51.381.413,00 | 56,92 | (38.885.518,00) | 78.842.733,00 |
| 13 | Desa Ladan | 79.723.375,00 | 45.379.848,00 | 56,92 | (34.343.527,00) | 69.633.572,00 |
| 14 | Desa Piabung | 43.587.912,00 | 24.810.953,00 | 56,92 | (18.776.959,00) | 38.071.419,00 |

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ Kurang | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Desa Langir | 37.542.540,00 | 21.369.828,00 | 56,92 | (16.172.712,00) | 32.791.190,00 |
| 16 | Desa Candi | 38.179.742,00 | 21.732.534,00 | 56,92 | (16.447.208,00) | 33.347.708,00 |
| 17 | Desa Putik | 28.148.156,00 | 16.022.391,00 | 56,92 | (12.125.765,00) | 24.585.722,00 |
| 18 | Desa Belibak | 35.560.510,00 | 20.241.624,00 | 56,92 | (15.318.886,00) | 31.059.967,00 |
| 19 | Desa Nyamuk | 39.239.443,00 | 22.335.760,00 | 56,92 | (16.903.683,00) | 34.273.293,00 |
| 20 | Desa Batu Belah | 32.964.872,00 | 18.764.144,00 | 56,92 | (14.200.728,00) | 28.792.833,00 |
| 21 | Desa Munjan | 28.172.995,00 | 16.036.530,00 | 56,92 | (12.136.465,00) | 24.607.416,00 |
| 22 | Desa Serat | 37.878.199,00 | 21.560.890,00 | 56.92 | (16.317.309,00) | 33.084.328,00 |
| 23 | Desa Air Putih | 31.781.160,00 | 18.090.356,00 | 56,92 | (13.690.804,00) | 27.758.932,00 |
| 24 | Desa Temburun | 38.737.420,00 | 22.049.973,00 | 56,92 | (16.687.447,00) | 33.834.805,00 |
| 25 | Desa Kiabu | 48.491.061,00 | 27.601.905,00 | 56,92 | (20.889.156,00) | 42.354.025,00 |
| 26 | Desa Telaga | 37.821.114,00 | 21.528.396,55 | 56,92 | (16.292.717,45) | 33.034.468,00 |
| 27 | Desa Mengkait | 38.342.069,00 | 20.924.933,00 | 56,92 | (17.417.136,00) | 33.489.491,00 |
| 28 | Desa Tiangau | 27.957.755,00 | 15.914.012,00 | 56,92 | (12.043.743,00) | 24.419.418,00 |
| 29 | Desa Telaga Kecil | 48.941.081,00 | 27.858.064,00 | 56,92 | (21.083.017,00) | 42.747.090,00 |
| 30 | Desa Lingai | 27.279.270,00 | 15.527.806,00 | 56,92 | (11.751.464,00) | 23.826.802,00 |
| 31 | Desa Air Bini | 31.699.745,00 | 18.044.013,00 | 56,92 | (13.655.732,00) | 27.687.820,00 |
| 32 | Desa Kuala Maras | 45.814.861,00 | 26.078.568,00 | 56,92 | (19.736.293,00) | 40.016.525,00 |
| 33 | Desa Ulu Maras | 34.154.053,00 | 19.441.046,00 | 56,92 | (14.713.007,00) | 29.831.515,00 |
| 34 | Desa Bukit Padi | 50.426.574,00 | 28.703.631,00 | 56,92 | (21.722.943,00) | 44.044.579,00 |
| 35 | Desa Genting Pulur | 27.496.911,00 | 15.651.691,00 | 56,92 | (11.845.220,00) | 24.016.898,00 |
| 36 | Desa Air Asuk | 27.137.987,00 | 15.447.385,00 | 56,92 | (11.690.602,00) | 23.703.399,00 |
| 37 | Desa Air Sena | 40.304.161,00 | 22.941.788,00 | 56,92 | (17.362.373,00) | 35.203.260,00 |
| 38 | Desa Teluk Siantan | 39.844.155,00 | 22.679.944,00 | 56,92 | (17.164.211,00) | 34.801.473,00 |
| 39 | Desa Lidi | 33.011.773,00 | 18.790.840,00 | 56,92 | (14.220.933,00) | 28.833.798,00 |
| 40 | Desa Liuk | 25.961.538,00 | 14.777.732,00 | 56,92 | (11.183.806,00) | 22.675.842,00 |
| 41 | Desa Teluk Sunting | 31.505.590,00 | 17.933.497,00 | 56,92 | (13.572.093,00) | 27.518.238,00 |
| 42 | Desa Impol | 33.001.326,00 | 18.784.894,00 | 56,92 | (14.216.432,00) | 28.824.674,00 |
| 43 | Desa Keramut | 31.149.609,00 | 17.730.867,00 | 56,92 | (13.418.742,00) | 27.207.310,00 |
| 44 | Desa Sunggak | 38.690.455,00 | 22.023.239,00 | 56,92 | (16.667.216,00) | 33.793.785,00 |
| 45 | Desa Mubur | 34.284.838,00 | 19.515.490,79 | 56,92 | (14.769.347,21) | 29.946.173,00 |
| 46 | Desa Piasan | 54.529.093,00 | 31.038.851,00 | 56,92 | (23.490.242,00) | 47.627.883,00 |
| 47 | Desa Bayat | 38.116.466,00 | 21.696.516,00 | 56,92 | (16.419.950,00) | 33.292.440,00 |
| 48 | Desa Payalaman | 26.084.914,00 | 14.847.960,00 | 56,92 | (11.236.954,00) | 22.783.603,00 |
| 49 | Desa Teluk Bayur | 25.961.538,00 | 14.777.732,00 | 56,92 | (11.183.806,00) | 22.675.842,00 |
| 50 | Desa Matak | 76.185.079,00 | 43.365.793,00 | 56,92 | (32.819.286,00) | 66.543.083,00 |
| 51 | Desa Batu Ampar | 36.870.195,00 | 20.987.104,00 | 56,92 | (15.883.091,00) | 32.203.853,00 |
| 52 | Desa Payamaram | 26.079.093,00 | 14.844.665,00 | 56,92 | (11.234.428,00) | 22.778.520,00 |
| **JUMLAH** | | **2.250.000.000,00** | **1.260.607.506,00** | **56,03** | **(989.392.494,00)** | **1.965.240.037,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.260.607.506,00 atau 56,03%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.965.240.037,00. Sehingga mengalami penurunan sebesar

Rp704.632.531,00 atau sebesar 35,85% hal ini disebabkan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi dianggarkan kecil dari tahun sebelumnya sehingga jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yang signifikan. bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi ini disalurkan ke Pemerintahan Desa berdasarkan pencapaian target pajak daerah dan retribusi daerah yang di kompensasikan ke Pemerintah Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

### A.5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan adalah Penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ke Pemerintah Desa. selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ini bersumber dari Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021 sebesar Rp49.318.514.256,00 dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Desa sebesar Rp53.151.623.854,00 Nilai tersebut bersumber dari Realisasi Pencairan Dana Desa (DD) Non Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2021 sebesar Rp42.625.223.854,00 dan Dana Desa (DD) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2021 sebesar Rp10.526.400.000,00. Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 pada Transfer Bantuan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 118**
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ Kurang | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Belanja Bantuan Keuangan | 131.761.638.315,00 | 102,470.138.110,00 | 77,77 | (29.291.500.205,00 | 110.619.265.815,00 |
| | **JUMLAH** | **131.761.638.315,00** | **102.470.138.110,00** | **77,77** | **(29.291.500.205,00** | **110.619.265.815,00** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp131.761.638.315,00 terealisasi sebesar Rp102.470.138.110,00 atau 77,77%. Perbandingan realisasi Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp8.149.127.705,00 atau sebesar (7,96%). Perbedaan saldo realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2020 dikarenakan perbedaan nomenklatur yang semula merupakan belanja operasi menjadi belanja transfer.

## A.6 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah. baik penerimaan maupun pengeluaran. yang perlu dibayar atau akan diterima kembali di mana dalam penganggaran pemerintah dimaksud untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan berasal antara lain dari penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya dan penerimaan kembali piutang kepada Perusahaan Negara. sedangkan pengeluaran pembiayaan berasal antara lain dari penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah kepada Kelompok Masyarakat. dapat dijelaskan sebagai berikut.

### A.6.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) Tahun lalu. adapun anggaran/realisasi Tahun Anggaran 2021 dan realisasi 2020 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 119**
**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *1* | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 10.096.149.957,00 | 10.096.149.957,31 | 100,00 | 0,31 | 63.983.386.446,40 |
| *2* | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 500.000.000,00 | 902.904.255,00 | 180,58 | 402.904.255,00 | 0,00 |
| *3* | Penerimaan Kembali Piutang Kepada Perusahaan Negara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.896.527,00 |
| | ***JUMLAH*** | **10.596.149.957,00** | **10.999.054.212,31** | **103,80** | **402.904.255,31** | **64.542.282.973,40** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.596.149.957,00. Terealisasi sebesar Rp10.999.054.212,31 atau 103,80% merupakan penerimanaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp64.542.282.973,40 mengalami penurunan sebesar Rp53.543.228.761,09 atau 82,96%.

## A.6.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran yang penggunaannya antara lain untuk penyertaan modal daerah. pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo. serta pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 dan 2020 anggaran dan realisasi dapat dirinci pada table sebagai berikut:

**Tabel 120**
**Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *1* | Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 |
| | ***JUMLAH*** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **100,00** | **0,00** | **1.500.000.000,00** |

Data tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100% yang merupakan pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat yang berada pada SKPD Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00 berarti mengalami penurunan sebesar Rp500.000.000,00 atau sebesar 50,00%.

### Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan perhitungan penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dengan tabel berikut.

**Tabel 121**
**Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| *No* | Pembiayaan | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *1* | Penerimaan Pembiayaan | 10.596.149.957,00 | 10.999.054.212,31 | 103,80 | 402.904.255,31 | 64.542.282.973,40 |
| *2* | Pengeluaran Pembiayaan | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 |
| | ***JUMLAH*** | **9.596.149.957,00** | **9.999.054.212,31** | **104,20** | **402.904.255,31** | **63.042.282.973,40** |

Data tabel di atas menunjukkan anggaran Pembiayaan netto Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.596.149.957,00 terealisasi sebesar Rp9.999.054.212,31 atau 104,20%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp63.042.282.973,40 mengalami penurunan sebesar Rp53.043.228.761,09 atau sebesar 530,49%.

## SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN APBD (SiLPA/SiKPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA). yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 122**
**Anggaran dan Realisasi Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA) Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| *No* | SiLPA/SiKPA | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Rasio (%) | Lebih/ (Kurang) | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *1* | Pendapatan Daerah | 1.122.660.844.535,00 | 845.562.863.756,18 | 75,32 | (277.097.980.778,82) | 816.788.855.634,18 |
| *2* | Belanja Daerah | 998.245.356.177,00 | 703.740.166.566,23 | 70,50 | (294.505.189.610,77) | 817.280.938.650,27 |
| *3* | Belanja Transfer | 134.011.638.315,00 | 103.730.745.616,00 | 77,41 | (30.280.892.699,00) | 52.454.050.000,00 |
| *4* | Surplus/Defisit (1-2-3) | (9.596.149.957,00) | 38.091.951.573,95 | (396,95) | 47.688.101.530,95 | (52.946.133.016,09) |
| *5* | Penerimaan Pembiayaan | 10.596.149.957,00 | 10.999.054.212,31 | 103,81 | 402.904.255,31 | 64.542.282.973,40 |
| *6.* | Pengeluaran Pembiayaan | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 |
| *7.* | **Pembiayaan Netto (5-6)** | 9.596.149.957,00 | 9.999.054.212,31 | 104,20 | 402.904.255,31 | 63.042.282.973,40 |
| | ***SILPA/SIKPA (4+7)*** | **0,00** | **48.091.005.786,26** | | **48.091.005.786,26** | **10.096.149.957,31** |

## B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. penjelasan atas pos-pos perubahan saldo anggaran lebih yaitu sebagai berikut.

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA Tahun-Tahun Anggaran sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2021 sebesar

Rp10.096.149.957,31 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp53.887.236.489,09 bila dibandingkan saldo anggaran lebih awal Tahun 2020 yaitu sebesar Rp63.983.386.446,40

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp10.096.149.957,31 bila dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar sebesar Rp63.983.386.446,40 Sehingga terjadi kenaikan sebesar sebesar Rp53.887.236.489,09. Hal ini dikarenakan target pendapatan yang tercapai dan optimalnya realisasi belanja Tahun 2020. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. mengalami sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp48.091.005.786,26 dibandingkan Tahun sebelumnya yang masih terdapat Silpa sebesar Rp10.096.149.957,31 Penggunaan SAL Tahun Anggaran sebelumnya sebagai pembiayaan digunakan langsung untuk membiayai operasional Pemerintah Daerah.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja. serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp48.091.005.786,26 atau mengalami peningkatan sebesar Rp37.994.855.828,95 bila dibandingkan Tahun Anggaran 2020 yang mengalami Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp10.096.149.957,31.

**Tabel 123**
**Realisasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| *NO* | URAIAN | REALISASI 2021 | REALISASI 2020 |
|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 |
| *1* | **PENDAPATAN – LRA** | 845.562.863.756,18 | 816.788.855.634,18 |
| *2* | **BELANJA** | 703.740.166.566,23 | 817.280.938.650,27 |
| *3* | **TRANSFER** | 103.730.745.616,00 | 52.454.050.000,00 |
| *4* | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **38.091.951.573,95** | **(52.946.133.016,09)** |
| *5* | **PEMBIAYAAN** | | **63.042.282.973,40** |
| *6* | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | 10.999.054.212,31 | 64.542.282.973,40 |
| *7* | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | 1.000.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| *8* | **PEMBIAYAAN NETTO** | **9.999.054.212,31** | **63.042.282.973,40** |
| *9* | **SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/SIKPA)** | **48.091.005.786,26** | **10.096.149.957,31** |

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 tidak terdapat kesalahan koreksi pembukuan pada tahun sebelumnya

## C. NERACA

### C.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh. baik oleh pemerintah maupun

masyarakat. serta dapat diukur dalam satuan uang. termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

### C.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan. dipakai. atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar sebagaimana dimaksud di atas meliputi: (1) Kas dan Setara Kas. (2) Investasi Jangka Pendek. (3) Piutang dan (4) Persediaan. Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp156.948.157.917,58 dengan penjelasan sebagai berikut.

**Tabel 124**
**Aset Lancar Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kas Di Kas Daerah | 47.631.944.465,30 | 9.198.688.493,12 | 517,81 |
| Kas Di Bendahara Penerimaan | 264.261.100,00 | 1.560.000,00 | 16,940 |
| Kas Dana BOS | 80.811.221,71 | 651.494.722,53 | 12,40 |
| Kas Lainnya | 113.988.999,25 | 244.406.741,66 | 46,64 |
| Piutang Pajak Daerah | 1.215.728.700,00 | 1.043.768.273,00 | 116,47 |
| Piutang Retribusi Daerah | 8.460.000,00 | 5.187.700,00 | 163,08 |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 429.553.532,00 | 368.014.462,00 | 116,72 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 0,00 | 115.119.310.671,00 | (100,00) |
| Piutang Transfer Antar Daerah | 12.324.204.874,00 | 9.577.888.512,00 | 128,67 |
| Piutang Lainnya | 4.124.631.891,32 | 3.705.111.317,00 | 111,32 |
| Penyisihan Piutang | -979.489.101,22 | -965.061.821,73 | 101,49 |
| Persediaan | 29.460.146.343,34 | 27.576.708.359,00 | 106,83 |
| **JUMLAH ASET LANCAR** | **94.674.242.025,70** | **166.527.077.429,58** | 56,85 |

### C.1.1.1 Kas Di Kas Daerah

Kas Di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Jumlah Kas Di Kas Daerah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp45.853.575.582,89.

**Tabel 125**
**Kas Di Kas Daerah Per 31 Desember 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **Kas Di Kas Daerah** | |
| **1. Bank Riau Kepri Capem Tarempa No. Rek. 170 – 02 – 00001** | 0,00 |
| **2. Bank Riau Kepri Capem Tarempa No. Rek. 170 – 02 – 00002** | 45.853.575.582,89 |

| | |
|---|---|
| **3. Saldo Akhir Kas FKTP Puskesmas Dana JKN Kapitasi** | 1.778.368.882,41 |
| **Jumlah** | **47.631.944.465,30** |

### C.1.1.1.1 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan saldo akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.778.368.882,41.

Reklasifikasi Pencatatan Saldo Akhir Kas FKTP Puskesmas Dana JKN Kapitasi merupakan saldo akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.778.368.882,41 terdiri dari:

**Tabel 126**
**Kas Di Bendahara FKTP Puskesmas - Dana JKN Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Puskesmas | Saldo Awal | Koreksi Saldo Awal | Pendapatan | Belanja/Beban | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Puskesmas Tarempa** | 873.694.477,00 | 0,00 | 726.195.425,00 | 629.292.629,00 | 970.597.273,00 |
| **Puskesmas Palmatak** | 104.858.194,00 | 0,00 | 863.481.700,00 | 728.853.947,00 | 239.485.947,00 |
| **Puskesmas Letung** | 145.974.170,00 | 0,00 | 376.062.200,00 | 362.253.874,00 | 159.782.496,00 |
| **Puskesmas Siantan Selatan** | 86.423.885,00 | 0,00 | 218.436.200,00 | 193.660.260,00 | 111.199.825,00 |
| **Puskesmas Siantan Tengah** | 68.324.872,94 | 0,00 | 227.514.200,00 | 199.109.303,00 | 96.729.769,94 |
| **Puskesmas Siantan Timur** | 48.556.242,00 | 0,00 | 241.388.200,00 | 208.294.150,00 | 81.650.292,00 |
| **Puskesmas Jemaja Timur** | 88.378.939,47 | 0,00 | 150.600.200,00 | 120.055.860,00 | 118.923.279,47 |
| **JUMLAH** | **1.416.210.780,41** | **0,00** | **2.803.678.125,00** | **2.441.520.023,00** | **1.778.368.882,41** |

### C.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas. baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai. yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Jumlah Kas Di Bendahara Penerimaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp264.261.100,00.

**Tabel 127**
**Kas Di Bendahara Penerimaan Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| SKPD/Unit Kerja | Saldo Awal | Saldo Akhir 2021 | | Setor ke Kasda | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Retribusi | Non Kapitasi (INA CBG'S) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RSUD Palmatak (Jasa Raharja dan Kas Lainnya - Dana Non Kapitasi INA-CBG's) | 1.325.000,00 | 1.048.000,00 | 233.805.000,00 | 1.325.000,00 | 234.853.000,00 |
| Puskesmas Letung ( Kas Lainnya - Dana Non Kapitasi INA-CBG's) | 0,00 | 0,00 | 7.774.200,00 | 0,00 | 7.774.200,00 |
| Puskesmas Jemaja Timur ( Kas Lainnya - Dana Non Kapitasi INA-CBG's) | 0,00 | 0,00 | 16.142.600,00 | 0,00 | 16.142.600,00 |
| Puskesmas Siantan Tengah ( Kas Lainnya - Dana Non Kapitasi INA-CBG's) | 235.000,00 | 0,00 | 2.694.200,00 | 235.000,00 | 2.694.200,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Siantan Timur ( Kas Lainnya - Dana Non Kapitasi INA-CBG's) | 0,00 | 0,00 | 2.797.100,00 | 0,00 | 2.797.100,00 |
| **JUMLAH** | **1.560.000,00** | **1.048.000,00** | **263.213.100,00** | **1.560.000,00** | **264.261.100,00** |

Reklasifikasi Pencatatan Saldo Akhir Kas FKTP Puskesmas Dana JKN Kapitasi merupakan saldo akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp264.261.100,00.

### C.1.1.3 Kas Di Bendahara BOS

Kas Di Bendahara BOS merupakan Kas Di Bendahara BOS pada saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara BOS yang sumbernya berasal dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Sekolah Dasar (SD). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). sumbernya dari Pemerintah Pusat yang di transfer oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp80.811.221,71 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 128**
**Kas Di Bendahara BOS Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Tingkatan Sekolah | Saldo Awal | Pendapatan | Belanja/Beban Tahun 2020 | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sekolah Dasar | 466.535.386,11 | 8.843.733.258,33 | 9.239.847.975,74 | 70.420.668,70 |
| Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | 184.959.336,42 | 4.339.579.107,89 | 4.514.147.891,30 | 10.390.553,01 |
| **JUMLAH** | **651.494.722,53** | **13.183.312.366,22** | **13.753.995.867,04** | **80.811.221,71** |

Berdasarkan tabel di atas Saldo akhir Kas di Bendahara Bos sebesar Rp80.811.221,71 yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp70.420.668,70 dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar Rp10.390.553,01.

Rincian Kas di Bendahara BOS pada tingkatan Sekolah Dasar per 31 Desember 2021 sebesar Rp70.420.668,70 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 129**
**Kas Di Bendahara BOS pada Sekolah Dasar (SD) Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *Nama Sekolah* | Nomor Rekening | Saldo Kas pada Bank | Saldo Kas pada Tunai | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *SDN 001 LETUNG* | 7136744668 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 002 KERAMUT* | 7136745012 | 1.352,02 | 0,00 | 1.352,02 |
| *SDN 003 REWAK* | 7136745306 | 723.920,69 | 0,00 | 723.920,69 |
| *SDN 004 MAMPOK* | 7136745659 | 323,96 | 900,00 | 1.223,96 |
| *SDN 005 LETUNG* | 7136745818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 006 IMPOL* | 7136746167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 007 LEMBAH REWAK* | 7136746515 | 136,30 | 0,00 | 136,30 |
| *SDN 008 LETUNG* | 7136746876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 009 PULAU DARAK* | 7136747047 | 1.832.736,44 | 917,900,00 | 2.750.636,44 |
| *SDN 010 SUNGGAK* | 7136747481 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 011 AIR BIRU* | 7136748038 | 0,00 | 1.140,11 | 1.140,11 |
| *SDN 012 LANDAK* | 7136750668 | 48.266,22 | 0,00 | 48.266,22 |

| *Nama Sekolah* | Nomor Rekening | Saldo Kas pada Bank | Saldo Kas pada Tunai | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *SDN 001 KUALA MARAS* | 7136749166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 002 ULU MARAS* | 7136750784 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 003 BUKIT PADI* | 7136751012 | 414.000,00 | 0,00 | 414.000,00 |
| *SDN 004 GENTING PULUR* | 7136751209 | 65.056,13 | 0,00 | 65.056,13 |
| *SDN 001 TELAGA* | 7136774632 | 59.692,34 | 3.100,00 | 62.792,34 |
| *SDN 002 KIABU* | 7136774713 | 181.814,99 | 0,00 | 181.814,99 |
| *SDN 003 MENGKAIT* | 7136774818 | 10.406,94 | 5.800,00 | 16.206,94 |
| *SDN 004 GENTING* | 7136775377 | 19.361,94 | 614.276,12 | 633.638,06 |
| *SDN 005 LINGAI* | 7136775485 | 0,00 | 7.610.000,00 | 7.610.000,00 |
| *SDN 006 TELAGA KECIL* | 7136775598 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 007 LINGAI BESAR* | 7136775752 | 0,00 | 698.750,00 | 698.750,00 |
| *SDN 008 HARUNG HIJAU* | 7136775833 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 001 AIR ASUK* | 7136777895 | 443,79 | 12.100,00 | 12.543,79 |
| *SDN 002 AIR NANGAK* | 7136777968 | 22.486,64 | 0,00 | 22.486,64 |
| *SDN 003 AIR SENA* | 7136778069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 004 TELUK SUNTING* | 7136778131 | 416,49 | 0,00 | 416,49 |
| *SDN 005 LIDI* | 7136778228 | 0,00 | 10.406,94 | 10.406,94 |
| *SDN 006 LIUK* | 7136778301 | 209,63 | 0,00 | 209,63 |
| *SDN 007 MUNTAI* | 7136778368 | 0,00 | 1.903.500,00 | 1.903.500,00 |
| *SDN 001 NYAMUK* | 7136775906 | 46.214,69 | 7.500.800,00 | 7.547.014,69 |
| *SDN 002 MUNJAN* | 7136776201 | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| *SDN 003 AIR PUTIH* | 7136776287 | 777,43 | 0,00 | 777,43 |
| *SDN 004 SERAT* | 7136776438 | 51.199,15 | 0,00 | 51.199,15 |
| *SDN 005 TEMBURUN* | 7136776643 | 2.244,91 | 0,00 | 2.244,91 |
| *SDN 006 BATU BELAH* | 7136776767 | 0,00 | 6.348.936,87 | 6.348.936,87 |
| *SDN 007 ETANG* | 7136776805 | 4.408,09 | 0,00 | 4.408,09 |
| *SDN 008 PENEBUNG* | 7136777577 | 731,69 | 0,00 | 731,69 |
| *SDN 009 NOKOK* | 7136777763 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 010 LUAP* | 7136777844 | 74.734,85 | 0,00 | 74.734,85 |
| *SDN 001 LADAN* | 7136756944 | 567,44 | 0,00 | 567,44 |
| *SDN 002 PIASAN* | 7136757088 | 0,71 | 22.514,00 | 22.514,71 |
| *SDN 003 PUTIK* | 7136757231 | 164.565,56 | 0,00 | 164.565,56 |
| *SDN 004 BAYAT* | 7136757339 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 005 PAYALAMAN* | 7136760003 | 0,00 | 5.112.210,00 | 5.112.210,00 |
| *SDN 006 PIABUNG* | 7136760167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 007 MATAK* | 7136760313 | 0,00 | 772.870,60 | 772.870,60 |
| *SDN 008 LANGIR* | 7136760507 | 276,05 | 576.000,00 | 576.276,05 |
| *SDN 009 PALAH* | 7136770041 | 68.757,14 | 0,00 | 68.757,14 |
| *SDN 010 PIAN PASIR* | 7136770278 | 157,06 | 0,00 | 157,06 |
| *SDN 011 CANDI* | 7136770394 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 012 TEBANG* | 7136770513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 013 BELIBAK* | 7136770912 | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| *SDN 014 BATU AMPAR* | 7136771207 | 53.987,06 | 1.686.012,94 | 1.740.000,00 |
| *SDN 015 TELUK DURIAN* | 7136773636 | 646,74 | 0,00 | 646,74 |
| *SDN 016 MUBUR KECIL* | 7136774543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 001 TAREMPA* | 7136751381 | 30.203.782,67 | 0,00 | 30.203.782,67 |

| *Nama Sekolah* | Nomor Rekening | Saldo Kas pada Bank | Saldo Kas pada Tunai | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *SDN 002 TAREMPA* | 7136751543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 003 TAREMPA* | 7136751659 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 004 TAMBUN* | 7136752906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 005 ANTANG* | 7136752159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SDN 006 TANJUNG* | 7136755611 | 0,00 | 1.690.000,00 | 1.690.000,00 |
| *SDN 007 SEDAK* | 7136755859 | 74.723,55 | 694.000,00 | 768.723,55 |
| *SDN 008 DUSUN* | 7136756162 | 84.951,81 | 5.800,00 | 90.751,81 |
| *SDN 009 REKAM* | 7136756391 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***JUMLAH*** | | **34.213.351,12** | **36.207.317,58** | **70.420.668,70** |

Rincian Kas di Bendahara BOS pada tingkatan Sekolah Menegah Pertama per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.390.553,01 dapat dirinci sebagai berikut

**Tabel 130**
**Kas Di Bendahara BOS pada Sekolah Menegah Pertama (SLTP) Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *Nama Sekolah* | Nomor Rekening | Saldo Kas pada Bank | Saldo Kas pada Tunai | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *SMPN 1 JEMAJA* | 7136778457 | 520,66 | 0,00 | 520,66 |
| *SMPN 2 SUNGGAK* | 7136778522 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SMPN 3 LEMBAH REWAK* | 7136778689 | 991,34 | 0,00 | 991,34 |
| *SMPN 1 JEMAJA TIMUR* | 7136778794 | 614,85 | 0,00 | 614,85 |
| *SMPN 1 KIABU* | 7136779553 | 108.497,27 | 2.900,00 | 111.397,27 |
| *SMPN 2 MENGKAIT* | 7136779607 | 22.548,58 | 38.000,00 | 60.548,58 |
| *SMPN 3 TELAGA* | 7136779642 | 115.581,05 | 2.900,00 | 118.481,05 |
| *SMPN 4 GENTING* | 7136779715 | 743,06 | 3.900,00 | 4.643,06 |
| *SMPN 5 HARUNG HIJAU* | 7136779782 | 670,22 | 0,00 | 670,22 |
| *SMPN 6 SATAP LINGAI* | 7136779812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SMPN 1 AIR NANGAK* | 7136779928 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SMPN 2 AIR ASUK* | 7136779952 | 0,00 | 4.139.209,00 | 4.139.209,00 |
| *SMPN 1 SIANTAN TIMUR* | 7136779855 | 277.685,13 | 0,00 | 277.685,13 |
| *SMPN 2 BATU BELAH* | 7136779863 | 568,01 | 0,00 | 568,01 |
| *SMPN 3 MUNJAN* | 7136779887 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SMPN 1 PALMATAK* | 7136779375 | 11,78 | 14.300,00 | 14.312 |
| *SMPN 3 SATAP PIABUNG* | 7136779437 | 977,98 | 783.000,00 | 783.977,98 |
| *SMPN 4 SATAP PUTIK* | 7136779464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SMPN 5 BAYAT* | 7136779518 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SMPN 1 SIANTAN* | 7136778859 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *SMPN 2 SIANTAN* | 7136778948 | 4.814.916,36 | 0,00 | 4.814.916,36 |
| *SMPN 3 SEDAK* | 7136779057 | 62.017,72 | 0,00 | 62.017,72 |
| *SMPN 4 DUSUN* | 7136779154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***JUMLAH*** | | **5.406.344,01** | **4.984.209,00** | **10.390.553,01** |

### C.1.1.4 Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan Penerimaan Pokok dan Bunga Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Daerah Tahun 2021 oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Perdagangan dan Perindustrian melalui UPT Dana Bergulir. saldo akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp113.988.999,25 dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp244.406.741,66. Kas lainnya terdiri dari Penerimaan Pokok Rp113.633.285,00 dan Penerimaan Bunga Rp355.714,25.

### C.1.1.5 Piutang Pendapatan Daerah

Piutang Pendapatan adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang diatur didalam perundang-undangan di bidang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan berakhirnya periode akhir pelaporan akuntansi atas hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar. Jumlah Piutang Pendaptan Daerah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp18.102.578.997,32 setelah dilakukan Penyisihan Piutang sebesar Rp979.489.101,22 sehingga Piutang Pendapatan Netto sebesar Rp17.123.089.896,21 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 131**
**Mutasi Piutang Pendapatan dan Penyisihan Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Piutang PBB P2 (Pokok) | 1.043.768.273,00 | 547.470.248,00 | 375.509.821,00 | 1.215.728.700,00 |
| **2** | Penyisihan Pajak PBBP2 | (412.892.897,62) | (93.533.270,59) | 0,00 | (506.426.168,21) |
| **3** | **Piutang Pajak Netto (1-2)** | **630.875.375,38** | **453.936.977,41** | **375.509.821,00** | **709.302.531,79** |
| **4** | Piutang PBB P2 (Denda) | 368.014.462,00 | 61.539.070,00 | 0,00 | 429.553.532,00 |
| **5** | Penyisihan Pajak PBBP2 | (93.387.676,00) | 0,00 | 0,00 | (238.586.999,69) |
| **6** | **Piutang Pajak Netto (Denda) (1-2)** | **274.626.786,00** | **61.539.070,00** | **0,00** | **190.966.532,31** |
| **7** | **Piutang Retribusi** | **5.187.700,00** | **0,00** | **5.187.700,00** | **8.460.000,00** |
| **8** | **Piutang Transfer Pemerintah Pusat** | **115.119.310.671,00** | **0,00** | **115.119.310.671,00** | **0,00** |
| **9** | **Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya** | **9.577.888.512,00** | **12.324.204.874,00** | **9.577.888.512,00** | **12.324.204.874,00** |
| **10** | Piutang Lainnya | 3.715.585.076,00 | 409.046.815,32 | 0,00 | 4.124.631.891,32 |
| **11** | Penyisihan Piutang Lainnya | (194.628.221,11) | (39.847.712,21) | 0,00 | (234.475.933,32) |
| **12** | Piutang Lainnya Netto (10-11) | 3.520.956.854,89 | 369.199.103,11 | 0,00 | 3.890.155.958,00 |
| **13** | **Jumlah Piutang Sebelum Penyisihan (1+4+7+8+9+10)** | **129.829.754.694,00** | **13.342.261.007,32** | **125.077.896.704,00** | **18.102.578.997,32** |
| **14** | **Jumlah Piutang Setelah Penyisihan (3+6+7+8+9+12)** | **129.128.845.899,27** | **13.208.880.024,52** | **125.077.896.704,00** | **17.123.089.896,10** |

#### C.1.1.5.1 Piutang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan

Jumlah Piutang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.215.728.700,00 dengan penyisihan piutang sebesar Rp506.426.168,21 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 132**
**Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Pajak PBB P2 Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Umur Piutang | | | | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lancar (Rp) | Kurang Lancar | Diragukan | Macet | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Piutang PBB P2 | 272.162.422,00 | 364.456.026,00 | 220.980.997,00 | 358.129.255,00 | 1.215.728.700,00 |
| **2** | Penyisihan | 1.360.812,11 | 36.445.602,60 | 110.490.498,50 | 358.129.255,00 | 506.426.168,21 |
| **Nilai Yang Dapat Direalisasikan** | | **270.801.609,89** | **328.010.423,40** | **110.490.498,50** | **0.00** | **709.302.531,79** |

### C.1.1.5.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.460.000,00 merupakan Piutang yang belum dibayarkan BPJS Kesehatan kepada Fktp. dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp5.187.700,00 yang merupakan Piutang Retribusi atas Sewa Kios dan Los dan telah disetorkan ke Kas Daerah. Mutasi tambah dan kurang Piutang dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 133**
**Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Piutang Retribusi | 5.187.700,00 | 8.460.000,00 | 5.187.700,00 | 8.460.000,00 |
| **Jumlah** | **5.187.700,00** | **8.460.000,00** | **5.187.700,00** | **8.460.000,00** |

### C.1.1.5.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021 sebesar Rp429.553.532,00 merupakan Piutang Denda PBBP2 yang belum dibayarkan Tahun 2021, dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp368.014.462,00.

**Tabel 134**
**Piutang Lain-lain PAD yang SAH Tahun 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31-Des-20 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31-Des-21 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 368.014.462,00 | 61.539.070,00 | 0,00 | 429.553.532,00 |
| Penyisihan | (264.153.027,00) | 0,00 | (25.566.027,41) | (238.586.999,69) |
| **Jumlah** | **103.861.435,00** | **61.539.070,00** | **(25.566.027,41)** | **190.966.532,31** |

### C.1.1.5.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 merupakan Pengakuan piutang atas Pendapatan Transfer tahun 2021 sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH TA 2021 sebesar Rp115.119.310.671,00 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor

125/PMK.07/2021 dan perubahan kedua PMK Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH TA 2021 sebesar Rp86.750.638.469,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp115.119.310.671,00. Berdasarakan Lembar konfirmasi Transfer (LKT) dan PMK 129 Tahun 2021 bahwa tunda salur Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2021 sudah dinyatakan telah dilunasi seluruhnya sesuai dengan beberapakali perubahan PMK terhadap Tunda Salur. Sampai pada saat penyusunan LKPD Audited Kabupaten Kepulauan Anambas belum menerima Konfirmasi dari Kementerian Keuangan terkait Tunda Salur di Tahun 2022. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

**Tabel 135**
**Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH PPh 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH PPh 25/29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH PBB Bagi Rata) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH PBB Perkebunan) | 49.342.655,00 | 0,00 | 49.342.655,00 | 0,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH PBB Minyak dan Gas Bumi) | 111.193.346.793,00 | 0,00 | 111.193.346.793,00 | 0,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH PBB Sektor Lainnya) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH PBB Kehutanan) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH Minyak dan Gas Bumi) | 3.873.460.777,00 | 0,00 | 3.873.460.777,00 | 0,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat (SDA Perikanan) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat (DBH Biaya Pemungutan Sektor Lainnya) | 3.160.446,00 | 0,00 | 3.160.446,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **115.119.310.671,00** | **0,00** | **115.119.310.671,00** | **0,00** |

### C.1.1.5.5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2021 merupakan Pengakuan piutang atas Pendapatan Transfer tahun 2021 sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor Nomor 221 Tahun 2022 tentang Perhitungan Tunda Salur Bagi Hasil PKB. BBNKB. PBBKB. Pajak Air Permukaan sebesar Rp12.324.204.874,00. dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9.577.888.512,00. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut.

**Tabel 136**
**Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (PKB) | 2.533.660.329,00 | 2.814.255.173,00 | 2.533.660.329,00 | 2.814.255.173,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (BBNKB) | 1.418.104.888,00 | 1.486.109.813,00 | 1.418.104.888,00 | 1.486.109.813,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (Pajak Air Permukaan) | 11.179.873,00 | 9.674.819,00 | 11.179.873,00 | 9.674.819,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (PBBKB) | 5.614.943.422,00 | 8.014.165.069,00 | 5.614.943.422,00 | 8.014.165.069,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Provinsi DBH (Pajak Rokok) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **9.577.888.512,00** | **12.324.204.874,00** | **9.577.888.512,00** | **12.324.204.874,00** |

### C.1.1.5.6 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.124.631.891,32 dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp3.705.111.317,00 Piutang Lainnya Tahun 2021 terdiri dari :

1. Uang Muka Pengadaan Aset Tetap Tahun 2020 sebesar Rp3.890.155.958,00;
2. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah Terhadap Bendahara sebesar Rp234.475.933.32.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan Piutang Pendapatan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp234.475.933,32 dan Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp234.475.933,32 karena merupakan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2013. Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang telah melebihi batas tanggal jatuh tempo yang diatur paling lambat 24 bulan dari tanggal penandatangan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang TGR PT. Natuna Insani berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tanggal 15 Oktober 2014 sebesar Rp96.878.570.47;
2. Piutang TGR PT. Andesta/R. Taufan Perkasa berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tanggal 11 November 2014 sebesar Rp117.597.362.85;
3. Piutang TGR Partai Bulan Bintang berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000.00.

### C.1.1.6 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan *(supplies)* yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp29.460.146.343.34 terdiri dari:

**Tabel 137**

**Persediaan Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Barang Pakai Habis | 14.873.252.647,27 | 489.068.975,00 |
| Bahan/material | 213.136.400,00 | 4.645.173.982,00 |
| Obat-obatan | 13.954.772.396,07 | 19.084.070.913,00 |
| Bahan Cetak | 408.050.000,00 | 1.380.057.039,00 |
| Barang Tak Pakai Habis | 10.934.900,00 | 1.978.337.450,00 |
| **Jumlah Akhir Persediaan Per 31 Desember 2021** | **29.460.146.343,34** | **27.576.708.359,00** |

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dam keuangan daerah. Tahun anggaran 2021 pemerintah kabupaten kapuluan anambas memiliki 2 (dua) akun untuk menjadikan persediaan s.d. akhir tahun yaitu belanja barang pakai habis dan belanja barang tak pakai habis pakai. Barang pakai habis dan barang tak pakai habis pakai pada akhir priode 31 Desember 2020 sebesar Rp27.576.708.359,00 terdapat penambahan pada tahun berjalan sebesar Rp31.282.375.403,34 dan/atau pengurangan reklas yang dibenarkan sebesar Rp29.398.937.419,00 sehingga sampai akhir priode akuntansi persediaan dimasing-masing perangkat daerah sebesar Rp29.460.146.343,34.

Rincian persediaan per Organisasi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 138**
**Jumlah Persediaan SKPD Per 31 Desember 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| SKPD | Saldo Awal Per 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sekretariat Daerah | 71.357.750,00 | 511.609.000,00 | 470.508.750,00 | 112.458.000,00 |
| Sekretariat DPRD | 153.442.100,00 | 89.080.100,00 | 241.004.000,00 | 1.518.200,00 |
| Inspektorat | 1.465.000,00 | 71.655.500,00 | 70.565.500,00 | 2.555.000,00 |
| Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 2.016.505.539,00 | 1.784.391.055,00 | 2.290.877.839,00 | 1.510.018.755,00 |
| Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 23.633.330.148,00 | 14.106.358.960,34 | 23.633.330.148,00 | 14.106.358.960,34 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1.327.189.267,00 | 11.972.824.721,00 | 55.385.000,00 | 13.244.628.988,00 |
| Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 616.000,00 | 87.333.000,00 | 87.050.300,00 | 898.700,00 |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 25.081.262,00 | 49.666.600,00 | 58.582.944,00 | 16.164.918,00 |
| Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 4.138.100,00 | 138.438.300,00 | 114.173.900,00 | 28.402.500,00 |
| Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 36.149.924,00 | 241.148.450,00 | 234.469.253,00 | 42.829.121,00 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 58.515.575,00 | 337.270.950,00 | 358.692.900,00 | 37.093.625,00 |
| Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 1.035.100,00 | 76.019.350,00 | 75.945.100,00 | 1.109.350,00 |

| SKPD | Saldo Awal Per 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 1.568.000,00 | 188.457.000,00 | 148.096.000,00 | 41.929.000,00 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 334.000,00 | 69.085.000,00 | 68.876.000,00 | 543.000,00 |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 2.425.457,00 | 93.798.657,00 | 94.269.634,00 | 1.954.480,00 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.534.500,00 | 44.695.750,00 | 44.981.750,00 | 1.248.500,00 |
| Badan Keuangan Daerah | 95.315.477,00 | 295.505.700,00 | 264.682.202,00 | 126.138.975,00 |
| Badan Penelitian. Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 876.260,00 | 77.808.550,00 | 77.699.805,00 | 985.005,00 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 369.000,00 | 30.190.600,00 | 25.342.600,00 | 5.217.000,00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 131.938.750,00 | 264.656.490,00 | 232.529.050,00 | 164.066.190,00 |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja | 1.976.000,00 | 102.612.400,00 | 103.044.000,00 | 1.544.400,00 |
| Kecamatan Jemaja Timur | 423.000,00 | 35.546.500,00 | 35.730.000,00 | 239.500,00 |
| Kecamatan Palmatak | 1.056.000,00 | 68.692.600,00 | 69.149.100,00 | 599.500,00 |
| Kecamatan Siantan | 795.850,00 | 30.407.450,00 | 29.720.300,00 | 1.483.000,00 |
| Kecamatan Siantan Selatan | 1.587.700,00 | 105.477.410,00 | 104.982.610,00 | 2.082.500,00 |
| Kecamatan Siantan Tengah | 450.000,00 | 19.973.700,00 | 16.780.700,00 | 3.643.000,00 |
| Kecamatan Siantan Timur | 3.460.000,00 | 127.282.500,00 | 128.059.024,00 | 2.683.476,00 |
| Kecamatan Siantan Utara | 2.008.600,00 | 8.097.000,00 | 9.805.600,00 | 300.000,00 |
| Kecamatan Jemaja Barat | 364.000,00 | 112.783.710,00 | 112.865.010,00 | 282.700,00 |
| Kecamatan Kute Siantan | 1.400.000,00 | 141.508.400,00 | 141.738.400,00 | 1.170.000,00 |
| **JUMLAH** | **27.576.708.359,00** | **31.282.375.403,34** | **29.398.937.419,00** | **29.460.146.343,34** |

Berikut Rincian persediaan Obat-Obatan Per UPT/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 139**
**Rincian persediaan Obat-Obatan Per UPT/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

**(Dalam Rupiah)**

| No. | DINKES PPKB dan UPT | Nilai Persediaan Obat dan BMHP yang Baik | Total Persediaan Obat-Obatan |
|---|---|---|---|
| **1** | DINAS KESEHATAN - PPKB | 0,00 | 0,00 |
| **2** | BALAI FARMASI & ALAT KESEHATAN | 6.214.401.724,61 | 6.214.401.724,61 |
| **3** | RSUD TAREMPA | 1.818.302.316,94 | 1.818.302.316,94 |
| **4** | RSUD PALMATAK | 3.172.666.310,01 | 3.172.666.310,01 |
| **5** | RSUD JEMAJA | 1.135.344.205,41 | 1.135.344.205,41 |
| **6** | PUSKESMAS TAREMPA | 181.934.473,47 | 181.934.473,47 |
| **7** | PUSKESMAS PALMATAK | 281.174.776,48 | 281.174.776,48 |
| **8** | PUSKESMAS LETUNG | 431.408.965,70 | 431.408.965,70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **9** | PUSKESMAS SIANTAN SELATAN | 151.380.255,89 | 151.380.255,89 |
| **10** | PUSKESMAS SIANTAN TENGAH | 178.183.543,45 | 178.183.543,45 |
| **11** | PUSKESMAS SIANTAN TIMUR | 104.705.548,77 | 104.705.548,77 |
| **12** | PUSKESMAS JEMAJA TIMUR | 215.035.215,40 | 215.035.215,40 |
| **13** | PUSKESMAS JEMAJA BARAT | 42.250.306,54 | 42.250.306,54 |
| **14** | PUSKESMAS KUTE SIANTAN | 27.984.753,40 | 27.984.753,40 |
| **Total** | | **13.954.772.396,07** | **13.954.772.396,07** |

### C.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya. yaitu investasi non permanen dan investasi permanen. Jumlah investasi jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.741.386.098,00 yang terdiri dari Investasi non permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berupa pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat dalam bentuk dana bergulir yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 1.917.686.098,00 dan investasi jangka panjang permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Riau Kepri sebesar Rp7.823.700.000,00 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 140**
**Investasi Jangka Panjang Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **INVESTASI JANGKA PANJANG** | | |
| **Investasi Non Permanen** | | |
| **Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)** | 12.724.022.059,00 | 12.693.228.431,00 |
| **Dana Bergulir Tak Tertagih** | (10.806.335.961,00) | (10.565.946.734,06) |
| **Jumlah Investasi Non Permanen** | **1.917.686.098,00** | **2.127.281.696,94** |
| **Investasi Permanen** | | |
| **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah** | 7.823.700.000,00 | 7.823.700.000,00 |
| **Koreksi Nilai Laba Tahun 2021** | 0,00 | 0.00 |
| **Pengurangan Nilai Investasi Tahun 2020** | 0,00 | 0.00 |
| **Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah s/d Tahun 2020 (Bank Riau)** | 7.823.700.000,00 | 7.823.700.000,00 |
| **Pengurangan Nilai Investasi Tahun 2020** | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah Investasi Permanen** | **7.823.700.000,00** | **7.823.700.000,00** |
| **JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG** | **9.741.386.098,00** | **9.950.981.696,94** |

### C.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diberikan adalah Investasi Non Permanen Lainnya yaitu dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang disalurkan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Perdagangan dan Perindustrian. dan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan.

Dasar penilaian Investasi Non Permanen Lainnya (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu dengan mengurangi nilai dana bergulir tercatat dengan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih. Jatuh tempo dana bergulir berkisar antara 1 sampai dengan 5 Tahun. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.917.686.098,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 141**
**Dana Bergulir Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| **1.** | **Dana Bergulir Per 31 Desember 2020** | 12.693.228.431,00 |
| **2.** | **Pengguliran Dana Bergulir Tahun 2021** | 1.000.000.000,00 |
| **3.** | **Pengembalian Pokok Dana Bergulir s/d Tahun 2021** | (892.304.255,00) |
| **4.** | **Koreksi Atas Pengembalian Pokok Tahun 2021** | 0,00 |
| **5.** | **Koreksi Kurang karena Kesalahan Pencatatan Pengembalian Untuk Dana Bergulir Tahun 2020** | (76.902.117,00) |
| **6.** | **Dana Bergulir Per 31 Desember 2020 Sebelum Penyisihan (1+2+3+4+5)** | **12.724.022.059,00** |
| **7.** | **Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2021** | (10.806.335.961,00) |
| **8.** | **NRV Dana Bergulir Per 31 Desember 2021 Netto (5 – 6)** | **1.917.686.098,00** |

Dari saldo diatas. diketahui NRV per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.917.686.098,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 142**
**NRV Dana Bergulir Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Kategori | Umur Dana | Kualitas | Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (%) | Saldo Pokok Dana Bergulir per 31 Desember 2021 | Penyisihan Saldo Pokok Dana Bergulir Tidak Tertagih per 31 Desember 2021 | NRV Dana Bergulir per 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tertagih** | 0 Tahun s/d < 1 Tahun | Lancar | 0,1% | 2.060.658.358,00 | 206.065.834,00 | 1.854.592.524,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Memungkinkan Dapat Ditagih** | 1 Tahun s/d < 3 Tahun | Kurang Lancar | 50% | 94.908.224,00 | 47.454.112,00 | 47.454.112,00 |
| **Diragukan Dapat Ditagih** | 3 Tahun s/d < 4 Tahun | Ragu-ragu | 75% | 62.557.846,00 | 46.918.384,00 | 15.639.462,00 |
| **Tidak dapat Ditagih** | 4 Tahun ≤ | Macet | 100% | 10.505.897.631,00 | 10.505.897.631,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | | | | **12.724.022.059,00** | **10.806.335.961,00** | **1.917.686.098,00** |

### C.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen adalah Investasi Jangka Panjang Permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.823.700.000,00 terdiri dari penyertaan modal pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 143**
**Penyertaan Modal Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *Uraian* | Saldo Awal | Penambaha | Pengurangan | Saldo Akhir 31 Des 2021 |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *PT. Bank Riau Kepri* | 7.823.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.823.700.000,00 |
| *Perusda Anambas Sejahtera* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***JUMLAH (1+2)*** | **7.823.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.823.700.000,00** |

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.823.700.000,00 pada PT. Bank Riau Kepri. Sedangkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada Perusahaan Anambas Sejahtera Per 31 Desember 2021 belum mendapatkan dividen/ bagi hasil dari investasi yang disertakan. yang disajikan dalam laporan rugi/laba sebesar (Rp16.337.832.656,00) adalah nilai kerugian sampai dengan Tahun 2021 pada Laporan Posisi Keuangan di Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera.

**PT Bank Riau Kepri**

Penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 0.71%. Metode penilaian investasi PT Bank Riau Kepri adalah metode biaya. tidak ada penambahan/pengurangan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ke PT. Bank Riau Kepri selama Tahun 2020. Dari Total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di PT. Bank Riau Kepri telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Riau Kepri, dimana jumlah penyertaan Modal telah dibatasi sebesar Rp7.500.000.000,00. Maka apabila terdapat penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri sesuai dengan ketentuan maka perlu Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Riau Kepri yang dituangkan dalam Akte Notaris Feri Mondro. SH. M.Kn. Nomor 03. tanggal 03 Maret 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri berasal dari

konversi atas Dividen Saham menjadi tambahan setoran modal Pemerintah Daerah berupa dividen saham sebesar Rp323.713.768,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang dapat dikonversi dalam bentuk lembar saham sebesar Rp323.700.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp13.768,00 (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dicatat pada rekening Pos-pos Kredit Dalam Penyelesaian Lain-Lainnya dan akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam bentuk saham apabila telah mencukupi nilai untuk perolehan 1 (satu) lembar saham.

## Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera

Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera berdiri tanggal 7 Februari 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2012. Perusahaan ini beroperasi pada tanggal 27 Juli 2013 sejak dilantiknya Direksi Perusahaan Daerah. Perusahaan bergerak di bidang Pengelolaan Pasar dan Pertokoan, Air Minum (Air Baku), Listrik, Apotik, Pengangkutan Laut dan Darat, Penyaluran Bahan Bakar Cair, Kontraktor dan Leveransir, Perhotelan, Pariwisata, Pertanian dan Lain-Lain. Berdasarkan Laporan Auditor independen terakhir Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DR.H.E.R. Suhardjadinata & Rekan untuk periode audit terakhir per 31 Desember 2017. Nilai kerugian selama Tahun 2020 sebesar Rp(16.337.832.656,00) dan saldo Ekuitas dan kewajiban adalah sebesar (10.337.832.656,00) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 144**
**Posisi Keuangan Perusda Anambas Sejahtera per 31 Desember 2021 (Dalam Rupiah)**

**(Dalam Rupiah)**

| | Uraian | 31 Desember 2021 | Audit Independen 2017 |
|---|---|---|---|
| **1.** | Aset Lancar | 0,00 | 144.467.308,00 |
| **2.** | Aset Tidak Lancar | 0,00 | 78.849.479,00 |
| **3.** | **Jumlah Aset (1+2)** | 0,00 | **223.316.787,00** |
| **4.** | Kewajiban Lancar | 10.337.832.656,00 | 7.074.920.945,00 |
| **5.** | Kewajiban Tidak Lancar (4+5) | 0,00 | 4.562.500.000,00 |
| **6.** | **Jumlah Kewajiban** | 10.337.832.656,00 | **11.637.420.945,00** |
| **7.** | Modal Setor | 6.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00 |
| **8.** | Saldo Laba/(Rugi) Akumulasi (3-6-7) | (16.337.832.656,00) | (17.414.104.158,00) |
| **9.** | **Jumlah Ekuitas (1 - 6)** | **(10.337.832.656,00)** | **(11.414.104.158,00)** |
| **10.** | **Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas (6+9)** | **(10.337.832.656,00)** | **223.316.787,00** |
| **11.** | Penjualan | 0,00 | 349.700.000,00 |
| **12.** | Beban Pokok Penjualan | 0,00 | 1.398.000,00 |
| **13.** | **Laba (Rugi) Kotor** | **0,00** | **348.302.000,00** |
| **14.** | Beban Penjualan | 0,00 | 0,00 |
| **15.** | Beban Administrasi dan Umum | 0,00 | 385.973.101,00 |
| **16.** | **Jumlah Beban Usaha** | **0,00** | **385.973.101,00** |
| **17.** | **Laba (Rugi) Usaha** | **0,00** | **(37.671.101,00)** |
| **18.** | Pendapatan Lain-Lain | 0,00 | 15.440,00 |
| **19.** | Beban Lain-Lain | 0,00 | (1.617.483,00) |
| **20.** | **Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain** | **0,00** | **(1.602.043,00)** |
| **21.** | **Laba Rugi Sebelum Pajak Penghasilan** | **0,00** | **(39.273.144,00)** |
| **22.** | Pajak Tangguhan | 0,00 | 0,00 |
| **23.** | **Laba (Rugi) Periode Berjalan** | **0,00** | **(39.273.144,00)** |
| **24.** | **Pendapatan (Rugi) Komprehensif Lain** | **0,00** | **0,00** |

| | Uraian | 31 Desember 2021 | Audit Independen 2017 |
|---|---|---|---|
| **25.** | **Jumlah Laba (Rugi) Periode Berjalan** | **0,00** | **(39.273.144,00)** |

Sampai dengan 31 Desember 2021. dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 dari Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera telah menyampaikan dokumen laporan keuangan perusda untuk dijadikan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

### C.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari: (1) Tanah. (2) Peralatan dan Mesin. (3) Gedung dan Bangunan. (4) Jalan. Irigasi dan Jaringan. (5) Aset Tetap Lainnya. dan (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp1.853.623.664.891,94 dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.758.946.124.017,43 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 145**
**Mutasi Aset Tetap Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | 31 Desember 2021 | 31Desember 2020 | Kenaikan/ Penurunan | Rasio (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ASET TETAP** | | | | |
| **Tanah** | 173.601.524.658,00 | 173.660.613.658,00 | (59.089.000,00) | 99,97 |
| **Peralatan Dan Mesin** | 383.628.984.631,10 | 375.293.976.515,04 | 8.335.008.115,96 | 102,22 |
| **Gedung Dan Bangunan** | 772.073.734.567,88 | 738.387.805.838,38 | 33.685.928.729,50 | 104,56 |
| **Jalan. Irigasi dan Jaringan** | 1.066.886.084.146,45 | 1.047.634.801.886,14 | 19.251.282.260,31 | 101,84 |
| **Aset Tetap Lainnya** | 14.700.612.035,16 | 14.177.949.435,00 | 522.662.600,16 | 103,69 |
| **Konstruksi Dalam Pengerjaan** | 312.969.379.347,69 | 172.240.741.852,99 | 140.728.637.494,70 | 181,70 |
| **Akumulasi Penyusutan** | (870.236.654.494,34) | (762.449.765.168,12) | (107.786.889.326,22) | 114,14 |
| **JUMLAH ASET TETAP** | **1.853.623.664.891,94** | **1.758.946.124.017,43** | **94.677.540.874,41** | 105,38 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Aset Tetap per 31 Desember 2021 setelah dihitung penyusutan sebesar Rp1.853.623.664.891,94 Aset Tetap Tanah. Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan. Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirinci sebagai berikut:

#### C.1.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk didalamnya tanah yang digunakan untuk bangunan. jalan. irigasi dan jaringan. Pada Tahun 2021 terdapat mutasi aset tetap tanah dan jumlah aset tetap tanah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp173.601.524.658,00 dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp173.660.613.658,00.

**Tabel 146**
**Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31-Des-20 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31-Des-21 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tanah Perkebunan | 6.912.063.750,00 | 14.764.000,00 | 0,00 | 6.926.827.750,00 |
| Tanah Kebun Campur | 850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000.000,00 |
| Tanah Hutan | 20.488.198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.488.198.000,00 |
| Tanah Danau/Rawa | 94.582.500,00 | 0,00 | 0,00 | 94.582.500,00 |
| Tanah Untuk Bangunan Gedung | 126.182.348.544,00 | 0,00 | 73.853.000,00 | 126.108.495.544,00 |
| Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 9.331.250.094,00 | 0,00 | 0,00 | 9.331.250.094,00 |
| Tanah Untuk Bangunan Jalan | 9.802.170.770,00 | 0,00 | 0,00 | 9.802.170.770,00 |
| **JUMLAH** | **173.660.613.658,00** | **14.764.000,00** | **73.853.000,00** | **173.601.524.658,00** |

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah per SKPD Tahun 2021. dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 147**
**Mutasi Aset Tetap Tanah Per SKPD Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo Per 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sekretariat Daerah | 77.689.894.535,00 | 0,00 | 0,00 | 77.689.894.535,00 |
| Sekretariat DPRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inspektorat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 69.404.915.500,00 | 0,00 | 0,00 | 69.404.915.500,00 |
| Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.752.322.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752.322.250,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 16.954.575.970,00 | 0,00 | 0,00 | 16.954.575.970,00 |
| Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 344.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344.250.000,00 |
| Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 495.370.750,00 | 0,00 | 0,00 | 495.370.750,00 |
| Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 760.308.323,00 | 14.764.000,00 | | 775.072.323,00 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 135.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.499.000,00 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 729.415.080,00 | 0,00 | 73.853.000,00 | 655.562.080,00 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 716.283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 716.283.000,00 |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Uraian | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo Per 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Keuangan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Penelitian. Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja | 630.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.890.000,00 |
| Kecamatan Jemaja Timur | 1.288.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288.065.000,00 |
| Kecamatan Palmatak | 237.750.750,00 | 0,00 | 0,00 | 237.750.750,00 |
| Kecamatan Siantan | 1.206.605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.206.605.000,00 |
| Kecamatan Siantan Selatan | 33.356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.356.000,00 |
| Kecamatan Siantan Tengah | 86.982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.982.000,00 |
| Kecamatan Siantan Timur | 194.130.500,00 | 0,00 | 0,00 | 194.130.500,00 |
| Kecamatan Siantan Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Kute Siantan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | **173.660.613.658,00** | **14.764.000,00** | **73.853.000,00** | **173.601.524.658,00** |

Berdasarkan Tabel diatas terdapat Mutasi Tambah Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.764.000,00 dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp73.853.000,00. dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 148**
**Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap-Tanah 2021**

**(dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo Per 31 Desember 2021 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **Saldo Per 31 Desember 2020** | **173.660.613.658,00** |
| Mutasi Tambah: | |
| Penambahan Aset Tetap Tanah hasil penaksiran atas penerimaan hibah tanah terminal pelabuhan Sri Tumpang Raya/Roro (pikuk) pada Dinas Perhubungan | 14.764.000,00 |
| Total Mutasi Tambah | 14.764.000,00 |
| Mutasi Kurang: | |
| Pengurangan Atas Reklasifikasi KIB A ke KIB C Berupa Bangunan Gedung Pasar Inpres pada DKUMPP | 73.853.000,00 |
| Total Mutasi Kurang | 73.853.000,00 |
| **Saldo Per 31 Desember 2021** | **173.601.524.658,00** |

## C.1.3.2 Peralatan dan mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain alat bantu. alat berat. alat angkutan darat bermotor. alat angkutan tidak bermotor. alat apung bermotor. . alat bengkel dan alat ukur. alat pertanian. alat kantor dan rumah tangga. alat studio. alat komunikasi. dan pemancar. alat pengolahan. alat kedokteran dan kesehatan. alat laboratorium. alat praga sekolah. alat persenjataan. alat laboratorium kimia nuklir/elektronika. komputer. alat eksplorasi. alat pemboran. alat produksi. pengolahan. dan pemurnian. alat bantu eksplorasi. alat keselamatan kerja. alat peraga. dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Jumlah aset tetap peralatan dan mesin yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp383.628.984.631,10 dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp375.293.976.515,04 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 149**
**Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31-Des-20 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31-Des-21 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Alat Besar Darat | 1.504.240.000,00 | 464.972.194,00 | 0,00 | 1.969.212.194,00 |
| Alat Besar Apung | 247.500.000,00 | 61.875.000,00 | 0,00 | 309.375.000,00 |
| Alat Bantu | 4.353.099.545,00 | 146.302.200,00 | 0,00 | 4.499.401.745,00 |
| Alat Angkutan Darat Bermotor | 48.693.829.535,00 | 2.810.416.996,00 | 0,00 | 51.504.246.531,00 |
| Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 140.484.400,00 | 280.482.000,00 | 0,00 | 420.966.400,00 |
| Alat Angkutan Apung Bermotor | 25.324.087.235,45 | 1.500.178.900,00 | 1.850.461.250,00 | 24.973.804.885,45 |
| Alat Angkutan Apung Tak Bermotor | 935.935.600,00 | 109.780.000,00 | 0,00 | 1.045.715.600,00 |
| Alat Bengkel Bermesin | 1.113.949.900,00 | 6.985.000,00 | 0,00 | 1.120.934.900,00 |
| Alat Bengkel Tak Bermesin | 282.661.956,00 | 0,00 | 0,00 | 282.661.956,00 |
| Alat Ukur | 3.232.952.660,00 | 4.627.000,00 | 0,00 | 3.237.579.660,00 |
| Alat Pengolahan | 2.368.746.093,00 | 10.335.155,00 | 10.335.155,00 | 2.368.746.093,00 |
| Alat Kantor | 25.739.627.691,00 | 7.882.510.689,00 | 22.577.501.191,71 | 11.044.637.188,29 |
| Alat Rumah Tangga | 51.674.551.365,07 | 15.988.337.911,00 | 14.083.327.427,33 | 53.579.561.848,74 |
| Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 4.461.212.315,55 | 1.192.323.471,00 | 0,00 | 5.653.535.786,55 |
| Alat Studio | 7.383.905.054,50 | 174.841.425,00 | 0,00 | 7.558.746.479,50 |
| Alat Komunikasi | 4.443.789.448,68 | 214.621.000,00 | 0,00 | 4.658.410.448,68 |
| Peralatan Pemancar | 4.200.423.053,00 | 24.970.000,00 | 0,00 | 4.225.393.053,00 |
| Alat Kedokteran | 66.627.145.457,54 | 2.781.325.098,00 | 0,00 | 69.408.470.555,54 |
| Alat Kesehatan Umum | 83.600.000,00 | 6.583.480.821,00 | 0,00 | 6.667.080.821,00 |
| Unit Alat Laboratorium | 18.255.784.859,00 | 172.135.000,00 | 27.595.000,00 | 18.400.324.859,00 |
| Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 146.805.400,00 | 0,00 | 0,00 | 146.805.400,00 |
| Alat Peraga Praktek Sekolah | 16.104.419.267,00 | 196.416.000,00 | 0,00 | 16.300.835.267,00 |
| Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 127.135.500,00 | 0,00 | 0,00 | 127.135.500,00 |

| Uraian | Saldo 31-Des-20 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31-Des-21 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan | 428.487.453,00 | 0,00 | 0,00 | 428.487.453,00 |
| Radiation Aplication And Non Destruktif Testing Laboratory Lainnya | 217.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.600.000,00 |
| Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 2.370.837.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370.837.400,00 |
| Peralatan Laboratorium Hydrodinamica | 657.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 657.001.000,00 |
| Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi | 3.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125.000,00 |
| Senjata Api | 69.154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.154.000,00 |
| Persenjataan Non Senjata Api | 270.865.788,00 | 0,00 | 0,00 | 270.865.788,00 |
| Alat Khusus Kepolisian | 443.861.150,00 | 0,00 | 0,00 | 443.861.150,00 |
| Komputer Unit | 40.562.646.679,00 | 2.199.319.730,00 | 0,00 | 42.761.966.409,00 |
| Peralatan Komputer | 17.713.549.163,50 | 986.949.800,00 | 0,00 | 18.700.498.963,50 |
| Alat Ekspolrasi Topografi | 8.979.472,00 | 0,00 | 0,00 | 8.979.472,00 |
| Alat Pengeboran Mesin | 1.947.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947.000,00 |
| Alat Pelindung | 235.543.150,00 | 249.649.250,00 | 0,00 | 485.192.400,00 |
| Alat Sar | 2.609.526.472,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 2.620.526.472,10 |
| Alat Kerja Penerbangan | 45.738.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.738.000,00 |
| Unit Peralatan Proses/Produksi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 13.439.390.973,52 | 2.819.030.000,00 | 572.350.000,00 | 15.686.070.973,52 |
| Peralatan Olah Raga | 8.769.837.478,23 | 683.555.000,00 | 99.841.500,00 | 9.353.550.978,23 |
| **JUMLAH** | **375.293.976.515,04** | **47.556.419.640,00** | **39.221.411.524,04** | **383.628.984.631,10** |

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2021. dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 150**
**Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin Per SKPD Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sekretariat Daerah | 64.940.230.578,00 | 2.576.638.950,00 | 2.229.112.100,00 | 65.287.757.428,00 |
| Sekretariat DPRD | 10.393.893.475,00 | 1.206.693.950,00 | 397.522.950,00 | 11.203.064.475,00 |
| Inspektorat | 2.105.958.573,00 | 23.740.000,00 | 132.867.100,00 | 1.996.831.473,00 |
| Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 62.458.853.980,59 | 9.291.011.786,00 | 2.720.780.960,33 | 69.029.084.806,26 |
| Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 108.433.044.570,00 | 18.947.732.029,00 | 13.781.302.482,23 | 113.599.474.116,77 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 9.933.481.572,00 | 396.692.200,00 | 128.231.000,00 | 10.201.942.772,00 |

| Uraian | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 4.307.325.779,00 | 285.940.400,00 | 2.276.363.415,00 | 2.316.902.764,00 |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 3.384.936.980,00 | 107.137.300,00 | 1.144.644.170,00 | 2.347.430.110,00 |
| Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 11.046.298.537,00 | 277.117.500,00 | 22.030.250,00 | 11.301.385.787,00 |
| Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 34.968.168.939,45 | 4.575.570.250,00 | 6.650.590.318,48 | 32.893.148.870,97 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3.676.469.070,00 | 155.261.000,00 | 1.677.001.370,00 | 2.154.728.700,00 |
| Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 9.910.040.428,00 | 1.053.605.500,00 | 4.848.984.650,00 | 6.114.661.278,00 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 6.049.567.848,00 | 1.934.551.845,00 | 18.442.155,00 | 7.965.677.538,00 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 5.619.803.152,00 | 425.955.500,00 | 1.459.591.309,00 | 4.586.167.343,00 |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 11.560.076.876,00 | 1.701.521.140,00 | 436.391.450,00 | 12.825.206.566,00 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2.589.037.692,00 | 301.527.000,00 | 341.913.444,00 | 2.548.651.248,00 |
| Badan Keuangan Daerah | 5.875.322.206,00 | 826.052.000,00 | 0,00 | 6.701.374.206,00 |
| Badan Penelitian. Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 4.323.931.376,00 | 290.056.800,00 | 3.146.000,00 | 4.610.842.176,00 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1.089.541.918,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089.541.918,00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 531.799.100,00 | 922.449.300,00 | 35.420.000,00 | 1.418.828.400,00 |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja | 1.921.412.835,00 | 279.485.800,00 | 14.495.800,00 | 2.186.402.835,00 |
| Kecamatan Jemaja Timur | 1.095.054.000,00 | 121.545.600,00 | 121.545.600,00 | 1.095.054.000,00 |
| Kecamatan Palmatak | 1.358.003.556,00 | 252.582.000,00 | 4.840.000,00 | 1.605.745.556,00 |
| Kecamatan Siantan | 2.748.517.251,00 | 94.845.000,00 | 16.005.000,00 | 2.827.357.251,00 |
| Kecamatan Siantan Selatan | 1.182.060.281,00 | 317.761.000,00 | 891.000,00 | 1.498.930.281,00 |
| Kecamatan Siantan Tengah | 1.928.579.791,00 | 167.623.600,00 | 35.101.500,00 | 2.061.101.891,00 |
| Kecamatan Siantan Timur | 1.165.419.451,00 | 112.365.000,00 | 437.513.500,00 | 840.270.951,00 |
| Kecamatan Siantan Utara | 142.606.000,00 | 116.108.300,00 | 21.809.500,00 | 236.904.800,00 |
| Kecamatan Jemaja Barat | 317.245.500,00 | 223.651.890,00 | 3.492.500,00 | 537.404.890,00 |
| Kecamatan Kute Siantan | 237.295.200,00 | 571.197.000,10 | 261.382.000,00 | 547.110.200,10 |
| **JUMLAH** | **375.293.976.515,04** | **47.556.419.640,10** | **39.221.411.524,04** | **383.628.984.631,10** |

Berdasarkan Tabel diatas terdapat Mutasi Tambah Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.556.419.640,10 dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp39.221.411.524,04 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 151**
**Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan Dan Mesin 2021**

**(dalam Rupiah)**

| **Uraian** | **Saldo Per 31 Desember 2021** |
|---|---|
| **1** | 2 |
| Saldo Per 31 Desember 2020 | 375.293.976.515,04 |
| Mutasi Tambah: | |
| Penambahan Aset dari Belanja Modal Tahun 2021 | 28.280.927.992,00 |

| Uraian | Saldo Per 31 Desember 2021 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Penambahan Aset dari Belanja Modal Covid-19 | 0,00 |
| Penambahan Aset Dana Kapitasi Pada Dinas Kesehatan dan PPKB | 237.403.650,00 |
| Penambahan Aset dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 4.799.549.186,00 |
| Penambahan Aset Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan atas Perubahan Kodefikasi berdasarkan Permendagri 108 Tahun 2019 | 571.679.000,00 |
| Penambahan Aset Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya atas Perubahan Kodefikasi berdasarkan Permendagri 108 Tahun 2019 | 499.591.500,00 |
| Penambahan dari Kib B dari Bagian Pemerintahan Umum yang pencatatan di Bagian Pemerintahan | 2.213.550.100,00 |
| Penambahan Aset Tunda Bayar TA 2021 | 10.241.840.350,00 |
| Penambahan Aset Hibah dari BNPB Berupa Mobil dan Tenda Pada BPBD | 603.600.000,00 |
| Penambahan Aset dari selain Belanja Modal berupa Tenda senilai Rp49.434.000 (Kec. Palmatak) dan Thermometer Stand Senilai Rp.2.145.000 (BKD) | 51.579.000,00 |
| Penambahan Aset dari Denda Keterlambatan dari CV. Dewi Karya Pada DKUMPP | 11.158.862,00 |
| Reklasifikasi Belanja Barang Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi ke Belanja Modal Berupa Rambu-Rambu Pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 45.540.000,10 |
| Total Mutasi Tambah | 47.556.419.640,10 |
| Mutasi Kurang: | |
| Pengurangan dari Kib B dari Bagian Pemerintahan Umum yang pencatatan di Bagian Pemerintahan | 2.213.550.100,00 |
| Pengurangan Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke KIB C (Gedung dan Bangunan) | 572.350.000,00 |
| Pengurangan Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke KIB D (Jalan. Irigasi dan Jaringan) | 37.930.155,00 |
| Pengurangan Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke KIB F (Konstruksi dalam Pengerjaan) | 11.546.719.750,00 |
| Reklasisfikasi ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) | 22.214.412.341,71 |
| Reklasisfikasi ke Beban Persediaan | 1.199.741.376,33 |
| Pengurangan Aset di Bawah Nilai Rp.1.000.000.00 (Ekstrakomptabel) | 1.436.707.801,00 |
| Total Mutasi Kurang | 39.221.411.524,04 |
| Saldo Per 31 Desember 2021 | **383.628.984.631,10** |

### C.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monument. bangunan menara. rambu-rambu dan tugu titik kontrol/pasti. Jumlah aset tetap gedung dan bangunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp772.073.734.567,88 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 Rp738.387.805.838,38.

**Tabel 152**
**Mutasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31-Des-20 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31-Des-21 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja | 599.150.750.239,39 | 63.363.925.696,50 | 31.858.065.592,00 | 630.656.610.343,89 |
| Bangunan Tempat Pertokoan/Koperasi/Pasar | 15.548.751.756,00 | 73.853.000,00 | 0,00 | 15.622.604.756,00 |
| Bangunan Gedung Tempat Ibadah | 31.232.963.697,00 | 0,00 | 0,00 | 31.232.963.697,00 |
| Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 42.837.997.302,01 | 0,00 | 0,00 | 42.837.997.302,01 |
| Bangunan Bersejarah/ Monumen dan Tugu | 2.941.240.155,00 | 644.623.000,00 | 49.907.000,00 | 3.535.956.155,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bangunan Rambu-Rambu Transportasi | 4.495.120.315,98 | 0,00 | 571.679.000,00 | 3.923.441.315,98 |
| Bangunan Rambu Lalu Lintas Udara | 856.347.000,00 | 0,00 | 0,00 | 856.347.000,00 |
| Bangunan Bandara Pelabuhan | 10.583.116.300,00 | 0,00 | 0,00 | 10.583.116.300,00 |
| Bangunan Gedung Laboratorium | 760.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 760.000.000,00 |
| Bangunan Tempat Pendidikan | 1.022.230.641,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.230.641,00 |
| Bangunan Tempat Olahraga | 24.103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.103.000,00 |
| Bangunan Tempat Kesehatan | 27.757.460.136,00 | 0,00 | 0,00 | 27.757.460.136,00 |
| Bangunan Tempat Kerja Lainnya | 1.177.725.296,00 | 2.083.178.625,00 | 0,00 | 3.260.903.921,00 |
| **JUMLAH** | **738.387.805.838,38** | **66.165.580.321,50** | **32.479.651.592,00** | **772.073.734.567,88** |

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021. dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 153**
**Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Sekretariat Daerah | 25.058.834.565,00 | 99.814.000,00 | 0,00 | 25.158.648.565,00 |
| Sekretariat DPRD | 5.133.756.317,00 | 0,00 | 49.907.000,00 | 5.083.849.317,00 |
| Inspektorat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 255.790.932.126,92 | 20.608.875.096,00 | 3.437.849.705,00 | 272.961.957.517,92 |
| Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 132.073.757.009,00 | 1.692.974.803,00 | 2.067.480.000,00 | 131.699.251.812,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 140.368.407.359,99 | 32.211.317.295,50 | 15.571.351.595,00 | 157.008.373.060,49 |
| Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 419.986.000,00 | 0,00 | 0,00 | 419.986.000,00 |
| Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 8.011.165.692,00 | 280.860.000,00 | 89.760.000,00 | 8.202.265.692,00 |
| Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 86.564.364.071,47 | 1.009.407.500,00 | 827.825.562,00 | 86.745.946.009,47 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 382.836.000,00 | 0,00 | 0,00 | 382.836.000,00 |
| Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 5.744.967.731,00 | 1.506.174.000,00 | 1.506.174.000,00 | 5.744.967.731,00 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 45.451.447.635,00 | 6.472.712.756,00 | 6.052.794.594,00 | 45.871.365.797,00 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 13.802.386.106,00 | 2.259.973.571,00 | 2.503.160.136,00 | 13.559.199.541,00 |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Keuangan Daerah | 1.157.748.000,00 | 0,00 | 373.349.000,00 | 784.399.000,00 |

| Uraian | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Badan Penelitian. Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja | 1.196.973.700,00 | 23.471.300,00 | 0,00 | 1.220.445.000,00 |
| Kecamatan Jemaja Timur | 2.599.495.845,00 | 0,00 | 0,00 | 2.599.495.845,00 |
| Kecamatan Palmatak | 5.093.323.549,00 | 0,00 | 0,00 | 5.093.323.549,00 |
| Kecamatan Siantan | 4.617.794.502,00 | 0,00 | 0,00 | 4.617.794.502,00 |
| Kecamatan Siantan Selatan | 1.076.391.222,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076.391.222,00 |
| Kecamatan Siantan Tengah | 1.449.850.033,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449.850.033,00 |
| Kecamatan Siantan Timur | 2.393.388.374,00 | 0,00 | 0,00 | 2.393.388.374,00 |
| Kecamatan Siantan Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Kute Siantan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | **738.387.805.838,38** | **66.165.580.321,50** | **32.479.651.592,00** | **772.073.734.567,88** |

Berdasarkan Tabel diatas terdapat Mutasi Tambah Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp66.165.580.321,50 dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar 32.479.651.592,00 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 154**
**Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan Dan Mesin 2021**

**(dalam Rupiah)**

| **Uraian** | **Saldo Per 31 Desember 2021** |
|---|---|
| **1** | 2 |
| Saldo Per 31 Desember 2020 | 738.387.805.838,38 |
| Mutasi Tambah: | |
| Penambahan Aset dari Belanja Modal Tahun 2021 | 43.514.626.221,00 |
| Penambahan Aset Reklasifikasi dari Tanah | 73.853.000,00 |
| Penambahan Aset Reklasifikasi dari KDP yang telah selesai pengerjaan Berupa Line Kliring Pembangunan Gedung kantor OPD Pada Dinas PUPRPRKP | 15.360.913.695,00 |
| Penambahan Aset Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin Berupa Rehab Koridor Pelabuhan Pemda. Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Kec. Siantan dan Penerangan Jalan Umum Tiang Bermotif Jalan Desa Pesisir Timur (Tahun 2021) Pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 572.350.000,00 |
| Penambahan dari Kib C dari Bagian Pemerintahan Umum yang pencatatan di Bagian Pemerintahan | 49.907.000,00 |
| Penambahan Aset dari Denda Keterlambatan 2021 (Land Clearing Kantor OPD) Pada Dinas PUPRPRKP | 928.752.880,50 |
| Reklasifikasi Belanja Barang Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi ke Belanja Modal Pada DISDIKPORA. DPUPRPRKP. DKUMPP. dan DISPARBUD | 2.083.178.625,00 |
| Penambahan Aset dari Hutang TA 2021 | 3.581.998.900,00 |
| **Total Mutasi Tambah** | **66.165.580.321,50** |
| Mutasi Kurang | |
| Pengurangan Aset Reklasifikasi Ke Peralatan dan Mesin atas Perubahan Kodefikasi Berdasarkan Permendagri 108 Tahun 2019 | 571.679.000,00 |

| | |
|---|---|
| Pengurangan Aset Reklasifikasi Ke Jalan. Irigasi dan Jaringan Berupa Jalan Menuju Pustaka SMPN 4 Harung Hijau Rp149.384.700. Batu Miring Rp1.060.763.600 dan Mandi Cuci Kakus Rp.820.496.205 | 2.030.644.505,00 |
| Pengurangan Aset Reklasifikasi Ke KDP Berupa Tunda Bayar (Disdikpora Rp1.407.205.200. Dinkes PPKB Rp648.830.000. PUPRPRKP Rp15.571.351.595. Dishub Rp387.420.000 Diskominfo Rp838.345.800 serta DP3 Rp89.760.000) dan Belanja Modal belum selesai (Diskominfo Rp667.828.200 (NOC dan Menara) dan Disperindag Rp6.052.794.594 (Gedung SIKM) | 25.663.535.389,00 |
| Pengurangan Aset KIB C (Gedung dan Bangunan) dari Bagian Pemerintahan Umum ke Bagian Umum | 49.907.000,00 |
| Pengurangan Aset KIB C ke Aset Lain-lain/RB | 4.163.885.698,00 |
| Pengurangan Uang Muka Belum Bayar | 0,00 |
| **Total Mutasi Kurang** | **32.479.651.592,00** |
| **Saldo Per 31 Desember 2021** | **772.073.734.567,88** |

### C.1.3.4 Jalan. Irigasi. dan Jaringan

Jalan Irigasi dan Jaringan mencakup jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan Irigasi dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi Jalan dan Jembatan. Bangunan Air. Instalasi. dan Jaringan. Akun ini tidak mencakup Tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan Irigasi dan Jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun Tanah. Jumlah Aset Tetap Jalan. Irigasi. dan Jaringan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.066.886.084.146,45 dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.047.634.801.886,14.

**Tabel 155**
**Mutasi Aset Tetap Jalan. Irigasi. Dan Jaringan Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| **Uraian** | **Saldo 31 Desember 2020** | **Penambahan** | **Pengurangan** | **Saldo** 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | **5** |
| Jalan | 676.384.715.011,09 | 65.188.929.539,69 | 64.191.370.842,38 | 677.382.273.708,40 |
| Jembatan | 40.260.689.675,97 | 5.007.766.283,00 | 0,00 | 45.268.455.958,97 |
| Bangunan Air Irigasi | 46.081.093.206,00 | 4.596.454.000,00 | 0,00 | 50.677.547.206,00 |
| Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum | 30.248.747.441,00 | 6.318.344.935,00 | 0,00 | 36.567.092.376,00 |
| Bangunan Air Bersih | 198.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000.000,00 |
| Bangunan Air Kotor | 3.510.073.450,00 | 785.919.000,00 | 0,00 | 4.295.992.450,00 |
| Penerangan Jalan. Taman dan Hutan Kota | 6.416.134.460,00 | 0,00 | 0,00 | 6.416.134.460,00 |
| Pelabuhan Dermaga | 19.479.836.869,08 | 0,00 | 0,00 | 19.479.836.869,08 |
| Jaringan Irigasi/Waduk /Bendungan | 24.687.165.181,00 | 0,00 | 0,00 | 24.687.165.181,00 |
| Bangunan Pengamanan Sungai/Penanggulangan Bencana Alam | 6.305.959.500,00 | 1.545.239.345,00 | 0,00 | 7.851.198.845,00 |
| Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 2.767.067.086,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767.067.086,00 |

| Uraian | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | **5** |
| Jaringan Gas Telepon | 57.929.386.275,00 | 0,00 | 0,00 | 57.929.386.275,00 |
| Jaringan Listrik | 13.932.666.093,00 | 0,00 | 0,00 | 13.932.666.093,00 |
| Instalasi Air Kotor/Air Bersih | 4.291.749.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.291.749.500,00 |
| Instalasi Listrik dan Telephon | 81.623.378.249,00 | 0,00 | 0,00 | 81.623.378.249,00 |
| Instalasi Pengolahan | 33.518.139.889,00 | 0,00 | 0,00 | 33.518.139.889,00 |
| **JUMLAH** | **1.047.634.801.886,14** | **83.442.653.102,69** | **64.191.370.842,38** | **1.066.886.084.146,45** |

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021. dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 156**

**Mutasi Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan Per SKPD Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31-Des-20 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31-Des-21 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sekretariat Daerah | 20.583.510.900,00 | 0,00 | 0,00 | 20.583.510.900,00 |
| Sekretariat DPRD | 174.139.800,00 | 0,00 | 0,00 | 174.139.800,00 |
| Inspektorat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 1.093.082.467,00 | 2.454.558.505,00 | 0,00 | 3.547.640.972,00 |
| Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 6.603.275.279,00 | 389.600.000,00 | 0,00 | 6.992.875.279,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 940.588.165.113,06 | 70.603.305.061,38 | 57.003.267.305,38 | 954.188.202.869,06 |
| Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 4.695.000,00 | 1.454.541.900,31 | 4.695.000,00 | 1.454.541.900,31 |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 132.202.500,00 | 0,00 | 0,00 | 132.202.500,00 |
| Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 7.705.890.823,00 | 0,00 | 0,00 | 7.705.890.823,00 |
| Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 57.870.340.296,08 | 7.403.964.172,00 | 6.731.597.538,00 | 58.542.706.930,08 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 2.097.537.005,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097.537.005,00 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 85.585.500,00 | 1.012.561.608,00 | 0,00 | 1.098.147.108,00 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 3.523.171.183,00 | 0,00 | 447.025.999,00 | 3.076.145.184,00 |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 19.755.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.755.500,00 |

| Uraian | Saldo 31-Des-20 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31-Des-21 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Keuangan Daerah | 330.896.720,00 | 0,00 | 0,00 | 330.896.720,00 |
| Badan Penelitian. Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 41.478.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.478.000,00 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja | 2.962.461.000,00 | 124.121.856,00 | 0,00 | 3.086.582.856,00 |
| Kecamatan Jemaja Timur | 2.001.079.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001.079.500,00 |
| Kecamatan Palmatak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan | 1.812.750.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812.750.300,00 |
| Kecamatan Siantan Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan Timur | 4.785.000,00 | 0,00 | 4.785.000,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Kute Siantan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **1.047.634.801.886,14** | **83.442.653.102,69** | **64.191.370.842,38** | **1.066.886.084.146,45** |

Tabel diatas terdapat mutasi tambah Aset Tetap - Jalan Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp83.442.653.102,69 dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp64.191.370.842,38 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 157**
**Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan Tahun 2021**

**(dalam Rupiah)**

| **Uraian** | **Saldo Per 31 Desember 2021** |
|---|---|
| **1** | 2 |
| Saldo Per 31 Desember 2020 | 1.047.634.801.886,14 |
| **Mutasi Tambah** | |
| Penambahan dari Belanja Modal Tahun 2021 | 62.934.458.252,00 |
| Penambahan Aset Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin berupa Jamban (Disdikpora) | 27.595.000,00 |
| Penambahan Aset Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin beupa Sumur Gali (DKUMPP) | 10.335.155,00 |
| Penambahan Aset Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan Berupa Jalan. Batu Miring dan MCK (Disdikpora) | 2.030.644.505,00 |
| Penambahan Aset dari Tunda Bayar TA 2021 (DPUPRPRKP) | 14.461.667.719,00 |
| Penambahan Aset dari Tunda Bayar TA 2021 | 2.888.780.478,00 |
| Penambahan atas denda keterlambatan pekerjaan-Pembangunan Jalan Genting Air Bini (DPUPRPRKP) | 59.255.564,38 |
| Penambahan atas denda keterlambatan pekerjaan-Pembangunan Jalan Kampung Baru Atas (Dinsos) | 52.863.929,31 |

| | |
|---|---|
| Reklasifikasi Belanja Barang Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi ke Belanja Modal Pada DISDIKPORA. DPUPRPRKP. DKUMPP. dan DINSOS | 977.052.500,00 |
| Total Mutasi Tambah | 83.442.653.102,69 |
| Mutasi Kurang | |
| Pengurangan Aset Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan (DPUPRPRKP) | 57.003.267.305,00 |
| Pengurangan Aset Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan (DISHUBLH) | 4.127.990.288,38 |
| Pengurangan Aset Tetap JIJ ke RB (Aset Lain-lain) - (Dinsos. Dishublh. Disparbud. dan Kec. Siantan Timur | 3.060.113.249,00 |
| **Total Mutasi Kurang** | **64.191.370.842,38** |
| **Saldo Per 31 Desember 2021** | **1.066.886.084.146,45** |

### C.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas. yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Jumlah aset tetap lainnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.700.612.035,16 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp14.177.949.435,00.

**Tabel 158**
**Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Buku dan Perpustakaan | 9.741.940.108,00 | 1.203.054.328,83 | 1.042.997.828,83 | 9.901.996.608,00 |
| Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | 3.544.335.700,00 | 860.206.600,00 | 0,00 | 4.404.542.300,00 |
| Hewan/Ternak dan Tumbuhan | 10.000.000,00 | 1.991.000,00 | 0,00 | 11.991.000,00 |
| Peralatan Olahraga | 682.126.927,00 | 41.400.000,16 | 540.991.500,00 | 182.535.427,16 |
| Aset Tetap Renovasi | 199.546.700,00 | 0,00 | 0,00 | 199.546.700,00 |
| Aset Tak Berwujud | 0,00 | 136.268.000,00 | 136.268.000,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | **14.177.949.435,00** | **2.242.919.928,99** | **1.720.257.328,83** | **14.700.612.035,16** |

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya pada SKPD Tahun Anggaran 2021. dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 159**
**Mutasi Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sekretariat Daerah | 2.124.638.200,00 | 82.800.000,00 | 41.400.000,00 | 2.166.038.200,00 |
| Sekretariat DPRD | 503.361.181,00 | 0,00 | 0,00 | 503.361.181,00 |
| Inspektorat | 49.755.172,00 | 0,00 | 0,00 | 49.755.172,00 |
| Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 8.508.161.546,00 | 2.011.938.428,83 | 993.902.828,83 | 9.526.197.146,00 |

| Uraian | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.515.000,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 34.862.200,00 | 0,00 | 0,00 | 34.862.200,00 |
| Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 10.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.750.000,00 |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 |
| Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 43.118.600,00 | 0,00 | 0,00 | 43.118.600,00 |
| Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 931.229.900,00 | 1.991.000,00 | 1.991.000,00 | 931.229.900,00 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3.498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.498.000,00 |
| Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 36.159.500,00 | 0,00 | 0,00 | 36.159.500,00 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 323.864.700,00 | 91.718.000,00 | 91.718.000,00 | 323.864.700,00 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 522.250.500,00 | 9.922.500,00 | 522.250.500,00 | 9.922.500,00 |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 499.543.800,00 | 0,00 | 0,00 | 499.543.800,00 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 24.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.915.000,00 |
| Badan Keuangan Daerah | 500.000,00 | 44.550.000,16 | 44.550.000,00 | 500.000,16 |
| Badan Penelitian. Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 168.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.050.000,00 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Palmatak | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 |
| Kecamatan Siantan | 331.748.000,00 | 0,00 | 24.445.000,00 | 307.303.000,00 |
| Kecamatan Siantan Selatan | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| Kecamatan Siantan Tengah | 31.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.180.000,00 |
| Kecamatan Siantan Timur | 11.248.136,00 | 0,00 | 0,00 | 11.248.136,00 |
| Kecamatan Siantan Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Kute Siantan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah** | **14.177.949.435,00** | **2.242.919.928,99** | **1.720.257.328,83** | **14.700.612.035,16** |

Berdasarkan Tabel diatas terdapat Mutasi Tambah Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.242.919.928,99 dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.720.257.328,83 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 160**

**Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya Tahun 2021**

**(dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo Per 31 Desember 2021 |
|---|---|
| 1 | **2** |

| | |
|---|---|
| Saldo Per 31 Desember 2020 | **14.177.949.435,00** |
| **Mutasi Tambah:** | |
| Penambahan Atas Belanja Modal Tahun 2021 | 1.548.988.100,00 |
| Penambahan Reklasifikasi KIB E dari Bagian Pemerintah Umum ke Bagian Umum | 41.400.000,00 |
| Penambahan Aset BOS pada Disdikpora | 593.056.828,99 |
| Penambahan Aset dari Tunda Bayar Belanja Modal Tahun 2021 | 59.475.000,00 |
| Total Mutasi Tambah | **2.242.919.928,99** |
| **Mutasi Kurang:** | |
| Pengurangan Aset Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin | 499.591.500,00 |
| Pengurangan Aset Reklasifikasi ke Beban Persediaan | 651.222.828,83 |
| Pengurangan Reklasifikasi KIB E dari Bagian Pemerintah Umum ke Bagian Umum | 41.400.000,00 |
| Pengurangan Reklasifikasi KIB E ke ATB | 136.268.000,00 |
| Pengurangan Reklasifikasi KIB E ke Aset Lain-lain (RB) | 332.300.000,00 |
| Pengurangan Reklasifikasi KDP | 59.475.000,00 |
| **Total Mutasi Kurang** | **1.720.257.328,83** |
| **Saldo Per 31 Desember 2021** | **14.700.612.035,16** |

### C.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Jumlah aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp312.969.379.347,69 dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp172.240.741.852,99.

**Tabel 161**
**Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31-Des-20 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31-Des-21 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sekretariat Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sekretariat DPRD | 0,00 | 393.397.950,00 | 0,00 | 393.397.950,00 |
| Inspektorat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 2.314.978.000,00 | 4.593.866.400,00 | 0,00 | 6.908.844.400,00 |
| Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 242.159.000,00 | 8.618.331.000,00 | 9.100.000,00 | 8.851.390.000,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 166.753.234.075,99 | 120.056.480.123,38 | 16.057.680.379,46 | 270.752.033.819,91 |
| Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 0,00 | 16.126.000,00 | 0,00 | 16.126.000,00 |

| Uraian | Saldo 31-Des-20 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31-Des-21 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 576.385.000,00 | 89.760.000,00 | 0,00 | 666.145.000,00 |
| Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 1.771.555.000,00 | 12.788.104.854,11 | 0,00 | 14.559.659.854,11 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 35.750.000,00 | 1.549.624.000,00 | 0,00 | 1.585.374.000,00 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 471.110.777,00 | 8.549.134.290,67 | 542.585.344,00 | 8.477.659.723,67 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 75.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.570.000,00 |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0,00 | 310.029.500,00 | 0,00 | 310.029.500,00 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Keuangan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Penelitian. Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 24.992.000,00 | 0,00 | 24.992.000,00 |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja Timur | 0,00 | 121.545.600,00 | 0,00 | 121.545.600,00 |
| Kecamatan Palmatak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan Tengah | 0,00 | 35.101.500,00 | 29.700.000,00 | 5.401.500,00 |
| Kecamatan Siantan Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Kute Siantan | 0,00 | 221.210.000,00 | 0,00 | 221.210.000,00 |
| **Jumlah** | **172.240.741.852,99** | **157.367.703.218,16** | **16.639.065.723,46** | **312.969.379.347,69** |

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp312.969.379.347,69 terdapat pada Lima Belas Perangkat Daerah dapat diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 162**
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga Tahun 2021**
**(Dalam Rupiah)**

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst) | 2013 | 448.000.000,00 | Kec. Siantan | 2022 | Reklas dari Dinas PU |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst) | 2013 | 1.082.130.000,00 | Kec. Siantan | 2022 | Reklas dari Dinas PU |
| 3 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2017 | 41.635.000,00 | Kec. Siantan | 2022 | |
| 4 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 2017 | 31.923.000,00 | Kec. Palmatak | 2022 | |
| 5 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 2017 | 40.943.000,00 | Kec. Jemaja Timur | 2022 | |
| 6 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 2017 | 39.909.000,00 | Kec. Jemaja | 2022 | |
| 7 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 2017 | 9.934.000,00 | Kec. Siantan | 2022 | |
| 8 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 2017 | 26.874.000,00 | Kec. Palmatak | 2022 | |
| 9 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 2017 | 24.894.000,00 | Kec. Siantan Selatan | 2022 | |
| 10 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 2017 | 11.859.000,00 | Kec. Siantan Tengah | 2022 | |
| 11 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 2017 | 20.879.000,00 | Kec. Siantan Timur | 2022 | |
| 12 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 2017 | 36.884.000,00 | Kec. Jemaja | 2022 | |
| 13 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 2017 | 37.874.000,00 | Kec. Siantan | 2022 | |
| 14 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 2017 | 7.954.000,00 | Kec. Jemaja Timur | 2022 | |
| 15 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2017 | 38.864.000,00 | Kec. Siantan Tengah | 2022 | |
| 16 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2017 | 37.874.000,00 | Kec. Siantan | 2022 | |
| 17 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2017 | 49.864.000,00 | Kec. Jemaja Timur | 2022 | |
| 18 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2017 | 41.779.000,00 | Kec. Siantan Selatan | 2022 | |
| 19 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2017 | 16.941.000,00 | Kec. Siantan Tengah | 2022 | |
| 20 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2017 | 20.356.000,00 | Kec. Siantan Timur | 2022 | |
| 21 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2018 | 3.905.000,00 | Tarempa Kec. Siantan | 2022 | |
| 22 | Gedung Olah Raga Tetutup Permanen | 2018 | 7.909.000,00 | Kec. Siantan Tengah | 2022 | Dusun Muntai Desa Teluk Siantan Kec. Tengah |
| 23 | Gedung Olah Raga Tetutup Permanen | 2018 | 12.859.000,00 | Kec. Kute Siantan dan Siantan Utara | 2022 | Lapangan Bulu Tangkis Desa Langir. Batu Miring Lapangan Futsal Desa Piasan Kec. Palmatak |
| 24 | Rumah Negara Golongan III Lain-lain | 2018 | 30.305.000,00 | Kecamatan Jemaja | 2022 | |
| 25 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2019 | 81.800.000,00 | Kec. Siantan | 2022 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PGRI (DED) |
| 26 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2019 | 21.659.000,00 | Kec. Palmatak | 2022 | SMP 4 Putik Kec. Palmatak |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2019 | 6.897.000,00 | Kec. Siantan Selatan | 2022 | TK Negeri Siantan Selatan Kec. Siantan Selatan |
| 28 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2019 | 13.420.000,00 | Kec. Jemaja Timur | 2022 | |
| 29 | Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen | 2019 | 15.884.000,00 | Kec. Jemaja Barat | 2022 | SDN 011 Air Biru Kec. Jemaja |
| 30 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2020 | 15.988.000,00 | Kec. Kute Siantan | 2022 | SDN 015 Teluk Durian |
| 31 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2020 | 36.982.000,00 | Kec. Siantan | 2022 | SMPN 4 Dusun Kec. Siantan |
| 32 | Rumah Negara Golongan III Type A Permanen | 2021 | 41.811.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 33 | Rumah Negara Golongan III Type A Permanen | 2021 | 27.819.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 34 | Rumah Negara Golongan III Type A Permanen | 2021 | 12.243.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 35 | Rumah Negara Golongan III Type A Permanen | 2021 | 18.524.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 36 | Rumah Negara Golongan III Type A Permanen | 2021 | 13.871.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 37 | Rumah Negara Golongan III Type A Permanen | 2021 | 59.180.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 38 | Rumah Negara Golongan III Type A Permanen | 2021 | 23.199.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 39 | Rumah Negara Golongan III Type A Permanen | 2021 | 34.804.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 40 | Rumah Negara Golongan III Type A Permanen | 2021 | 9.262.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 41 | Teralis | 2021 | 127.999.300,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 42 | Tempat Tidur Besi | 2021 | 172.557.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 43 | Meja Sekolah | 2021 | 75.229.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 44 | Meja Sekolah | 2021 | 198.495.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 45 | Meja Kerja Pejabat lain-lain | 2021 | 43.835.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 46 | Meja Kerja Pejabat lain-lain | 2021 | 30.937.500,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 47 | Kursi Kerja Pejabat lainnya | 2021 | 37.785.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Lemari Arsip Pejabat lainnya | 2021 | 194.594.400,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 49 | Lemari Arsip Pejabat lainnya | 2021 | 140.085.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 50 | Peralatan Olahraga lainnya (dst) | 2021 | 157.685.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 51 | Peralatan Olahraga lainnya (dst) | 2021 | 37.950.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 52 | Peralatan Olahraga lainnya (dst) | 2021 | 2.530.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 53 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 12.749.000,00 | SMPN 1 AIR NANGAK | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 54 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 25.927.000,00 | SMPN 1 JEMAJA TIMUR | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 55 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 25.487.000,00 | SD 014 BATU AMPAR | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 56 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 27.357.000,00 | SMPN 4 GENTING | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 57 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 25.960.000,00 | SMPN 1 JEMAJA TIMUR | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 58 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 25.520.000,00 | SDN 001 LADAN | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 59 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 27.351.500,00 | SMPN 4 ARUNG HIJAU KEC SIANTAN SELATAN | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 60 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 25.498.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 61 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 25.476.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 62 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 25.487.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 63 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 23.204.500,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 64 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 23.210.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 65 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 25.492.500,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 66 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 25.976.500,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 67 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 26.664.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 68 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 23.133.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 56.650.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 70 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 23.144.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 71 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 23.105.500,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 72 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 25.503.500,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 73 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 26.653.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 74 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 26.576.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 75 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 56.650.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 76 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 23.248.500,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 77 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 56.595.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 78 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 82.214.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 79 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 26.625.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 80 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 25.498.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 81 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 3.234.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 82 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 56.287.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 83 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 16.434.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 84 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 21.120.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 85 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 21.989.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 86 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 20.823.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 87 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 21.868.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 88 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 20.812.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 89 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 16.005.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 12.991.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 91 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 13.244.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 92 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 12.914.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 93 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 12.749.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 94 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 9.273.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 95 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 39.017.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 96 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 11.429.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 97 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 20.779.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 98 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 16.258.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 99 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 13.629.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 100 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2021 | 13.849.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 101 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2021 | 26.642.000,00 | SMPN 3 Munjan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 102 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2021 | 27.357.000,00 | SMP 2 Mengkait | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 103 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2021 | 25.542.000,00 | SMP N 1 Desa Landan Kecamatan Palmatak | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 104 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2021 | 27.379.000,00 | SMPN 04 Genting Desa Air Bini Kec. Siantan Selatan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 105 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2021 | 27.390.000,00 | SMPN 2 Satap Mengkait | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 106 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2021 | 25.492.500,00 | SDN 001 Air Asuk Kec. Siantan Tengah | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 107 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2021 | 27.307.500,00 | SDN 001 Desa Telaga | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 108 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2021 | 27.362.500,00 | SDN 004 Genting Desa Air Bini | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 109 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2021 | 26.592.500,00 | SDN 010 Desa Sunggak Kec. Jemaja Barat | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2021 | 25.492.500,00 | SDN 001 Desa Ladan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 111 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2021 | 25.481.500,00 | SD 004 Teluk Sunting kec. Siantan Tengah | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 112 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2021 | 34.804.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 113 | Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst) | 2021 | 76.642.500,00 | Kecamatan Siantan Utara | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 114 | Bangunan Lantai Jemur Permanen | 2021 | 194.228.700,00 | SMPN 05 ARUNG HIJAU TIANGAU | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 115 | Bangunan Lantai Jemur Permanen | 2021 | 198.938.000,00 | SMPN DUSUN | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 116 | Bangunan Lantai Jemur Lain-lain (dst) | 2021 | 118.320.500,00 | SMP 4 GENTING KEC.SIANTAN SELATAN | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 117 | Pagar Permanen | 2021 | 118.700.800,00 | SDN 07 DUSUN MUNTAI DESA TELUK SIANTAN | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 118 | Pagar Permanen | 2021 | 184.078.100,00 | SDN 005 LINGAI LENGKE | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 119 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 2021 | 198.816.900,00 | SDN ARUNG HIJAU | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 120 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 2021 | 198.971.500,00 | SMPN 5 BATU BELAH | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 121 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 2021 | 195.150.700,00 | PAUD GENTING PULUR | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 122 | Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) | 2021 | 23.177.000,00 | SMPN 1 Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 123 | Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) | 2021 | 18.469.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 124 | Buku Umum Lain-lain | 2021 | 59.475.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| | **J U M L A H** | | **6.908.844.400,00** | | | |

**Tabel 163**
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen | 2018 | 11.902.000,00 | Desa Air Sena. Kecamatan Siantan Tengah | 2022 | |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bangunan Gedung Instalasi lain-lain | 2019 | 29.810.000,00 | Puskesmas Siantan Timur. Siantan Selatan. Siantan Tengah. Letung dan Palmatak | 2022 | |
| 3 | Bangunan Gedung Instalasi lain-lain | 2019 | 92.785.000,00 | Jl. Padang Melang Desa Batu Berapit. Kec. Jemaja | 2022 | |
| 4 | Bangunan Gedung Instalasi lain-lain | 2019 | 93.775.000,00 | Payalaman RT.002 RW.01 Desa Payalaman. Kec. Siantan Utara | 2022 | |
| 5 | Pagar Permanen | 2020 | 13.887.000,00 | Desa Pesisir Timur. Kec. Siantan | 2022 | |
| 6 | Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek | 2021 | 5.720.000,00 | Jl. Padang Melang Desa Batu Berapit. Kec. Jemaja | 2022 | |
| 7 | Speed Boat / Motor Tempel | 2021 | 1.295.779.400,00 | Tarempa | 2022 | Puskesmas Keliling |
| 8 | Alat Kesehatan Umum lainnya | 2021 | 127.978.000,00 | Tarempa | 2022 | Pembayaran Belanja Pengadaan Advence Elektro Cardio Grafh pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayana No. 419 |
| 9 | Alat Kesehatan Umum lainnya | 2021 | 3.044.718.600,00 | Tarempa | 2022 | Pembayaran Termin 100% Belanja Pengadaan Kapal Puskesmas Keliling Pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenengan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan No. 423/SPM-LS/1.02.1.1 |
| 10 | Alat Kesehatan Umum lainnya | 2021 | 479.050.000,00 | Tarempa | 2022 | Pembayaran Belanja Set Alat Perlindungan Diri (APD) pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Obat. Vaksin No. 424/SPM-LS/1.02.1.1 (Tunda Bayar Tahun 2021) |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Alat Kesehatan Umum lainnya | 2021 | 44.527.000,00 | Tarempa | 2022 | Pembayaran Belanja Alat Kesehatan Penanganan Covid-19 (Pulse Oximeter) pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah No. 554/SPM-LS/1.02.1 |
| 12 | Alat Kesehatan Umum lainnya | 2021 | 6.203.000,00 | Tarempa | 2022 | Pembayaran Belanja Bidan Kit Puskesmas Palmatak 1 (Paket) pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan No. 56 |
| 13 | Alat Kesehatan Umum lainnya | 2021 | 3.897.000,00 | Tarempa | 2022 | Pembayaran Belanja Bidan Kit Puskesmas Letung 1 (Paket) pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan No. 566/ |
| 14 | Alat Kesehatan Umum lainnya | 2021 | 4.596.000,00 | Tarempa | 2022 | Pembayaran Belanja Bidan Kit Puskesmas Jemaja Timur 1 (Paket) pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pela No. 567 |
| 15 | Alat Kesehatan Umum lainnya | 2021 | 4.596.000,00 | Tarempa | 2022 | Pembayaran Belanja Bidan Kit Puskesmas Siantan Selatan 1 (Paket) pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pela No. |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Alat Kesehatan Umum lainnya | 2021 | 6.203.000,00 | Tarempa | 2022 | Pembayaran Belanja Bidan Kit Puskesmas Siantan Tengah 1 (Paket) pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pe No. 569 |
| 17 | Alat Kesehatan Umum lainnya | 2021 | 3.176.000,00 | Tarempa | 2022 | Pembayaran Belanja Bidan Kit Puskesmas Siantan Timur 1 (Paket) pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pe No. 570/ |
| 18 | Alat Kesehatan Umum lainnya | 2021 | 150.282.000,00 | Tarempa | 2022 | Pembayaran Belanja APD Non Set/ Coveral pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenanagan Daerah Kabupaten/ Kota dan Sub Kegiatan Pengadaan Obat. Vaksin |
| 19 | Oxigenmeter | 2021 | 2.654.700.000,00 | Tarempa | 2022 | Pembayaran Belanja Pengadaan Oxigen Central pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan No. 409/SPM |
| 20 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 2021 | 39.710.000,00 | Kecamatan Jemaja Barat | 2022 | |
| 21 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 2021 | 32.835.000,00 | Kecamatan Siantan Utara | 2022 | |
| 22 | Bangunan Puskesmas Pembantu | 2021 | 5.720.000,00 | RT.03/RW.02. Desa Belibak. Kecamatan Palmatak | 2022 | |
| 23 | Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya | 2021 | 648.830.000,00 | Payalaman | 2022 | Pembangunan Gedung Oksigen Sentral RSUD |
| 24 | Pagar Permanen | 2021 | 44.990.000,00 | Jln. Soekarno-Hatta No.16 RT.IV RW.II Desa Tarempa Selatan. Kec. Siantan | 2022 | |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Pagar Permanen | 2021 | 5.720.000,00 | PIABUNG. RT 003 / RW 002 DESA PIABUNG. KEC. PALMATAK | 2022 | |
| | **J U M L A H** | | **8.851.390.000,00** | | | |

**Tabel 164**
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2013 | 4.991.193.900,00 | Jalan Pasir Peti | 2022 | |
| 2 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2013 | 785.879.000,00 | Jalan Pasir Peti | 2022 | |
| 3 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2014 | 30.793.636.000,00 | Water Front City Kota Tarempa (Tahap I dan II) | 2022 | |
| 4 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2014 | 3.754.808.450,00 | Jalan Pasir Peti | 2022 | |
| 5 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2014 | 49.320.000,00 | Jalan Pasir Peti | 2022 | |
| 6 | Jalan Kabupaten Lokal | 2014 | 269.225.000,00 | | 2022 | |
| 7 | Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil | 2014 | 28.633.000,00 | | 2022 | |
| 8 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2015 | 13.008.025.970,00 | Jalan Pasir Peti | 2022 | |
| 9 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2016 | 5.334.265.720,00 | Jalan Pasir Peti | 2022 | |
| 10 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2017 | 21.660.489.010,00 | Jalan Pasir Peti | 2022 | |
| 11 | Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen | 2017 | 48.785.000,00 | LAPANGAN SULAIMAN ABDULLAH | 2022 | |
| 12 | tugu lainnya (dst) | 2017 | 48.730.000,00 | KEC. SIANTAN | 2022 | |
| 13 | Jalan Kabupaten Lokal | 2017 | 49.225.000,00 | JALAN PADANG MELANG KECAMATAN JEMAJA | 2022 | |
| 14 | Jalan Kabupaten Lokal | 2017 | 190.135.000,00 | KECAMATAN PALMATAK | 2022 | |
| 15 | Jalan Kabupaten Lokal | 2017 | 89.265.000,00 | KECAMATAN SIANTAN | 2022 | |
| 16 | Jalan Kabupaten Lokal | 2017 | 188.485.000,00 | KECAMATAN JEMAJA | 2022 | |
| 17 | Jalan Kabupaten Lokal | 2017 | 279.070.000,00 | KECAMATAN SIANTAN TIMUR | 2022 | |
| 18 | Jalan Kabupaten Lokal | 2017 | 270.105.000,00 | KECAMATAN JEMAJA TIMUR | 2022 | |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jalan Kabupaten Lokal | 2017 | 284.625.000,00 | KECAMATAN SIANTAN SELATAN | 2022 | |
| 20 | Jalan Kabupaten Lokal | 2017 | 239.085.000,00 | KECAMATAN PALMATAK | 2022 | |
| 21 | Jalan Kabupaten Lokal | 2017 | 266.805.000,00 | KECAMATAN SIANTAN TENGAH | 2022 | |
| 22 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri | 2017 | 169.345.000,00 | KECAMATAN JEMAJA DAN KECAMATAN JEMAJA TIMUR | 2022 | |
| 23 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri | 2017 | 302.005.000,00 | KECAMATAN PALMATAK | 2022 | |
| 24 | Jembatan Pada Jalan Desa | 2017 | 49.225.000,00 | DESA BATU AMPAR | 2022 | |
| 25 | Jembatan Pada Jalan Desa | 2017 | 125.125.000,00 | TAREMPA KECAMATAN SIANTAN | 2022 | |
| 26 | Jembatan Pada Jalan Desa | 2017 | 137.885.000,00 | DESA PIABUNG | 2022 | |
| 27 | Jembatan Pada Jalan Desa | 2017 | 286.935.000,00 | KECAMATAN SIANTAN | 2022 | |
| 28 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2018 | 3.776.676.780,00 | JALAN PASIR PETI DESA PESISIR TIMUR | 2022 | |
| 29 | Bangunan Rumah Sakit Umum | 2018 | 8.191.100.000,00 | JALAN SELAYANG PANDANG KEL. TAREMPA | 2022 | |
| 30 | Jalan Kabupaten Arteri | 2018 | 48.565.000,00 | TPA Siantan Kec. Siantan | 2022 | |
| 31 | Jalan Kabupaten Lokal | 2018 | 17.343.203.980,00 | Kec. Palmatak | 2022 | |
| 32 | Jalan Kabupaten Lokal | 2018 | 5.461.767.910,00 | Kec. Siantan Selatan | 2022 | |
| 33 | Jalan Kabupaten Lokal | 2018 | 97.075.000,00 | Kec. Jemaja Timur | 2022 | |
| 34 | Jalan Kabupaten Lokal | 2018 | 449.625.000,00 | Jalan Sri Tanjung - Luwe Desa Tarempa Barat Daya Kec. Siantan | 2022 | |
| 35 | Jalan Kabupaten Lokal | 2018 | 48.565.000,00 | Teluk Pring Kec. Palmatak | 2022 | |
| 36 | Jalan Kabupaten Lokal | 2018 | 98.010.000,00 | Kec. Jemaja | 2022 | |
| 37 | Bangunan Pengambilan Bebas | 2018 | 97.515.000,00 | Bendung Dapit Kecamatan Jemaja Timur | 2022 | |
| 38 | Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain | 2018 | 11.935.000,00 | Kelurahan Letung Kec. Jemaja | 2022 | |
| 39 | Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain | 2018 | 22.110.000,00 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 2022 | |
| 40 | Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain | 2018 | 36.080.000,00 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 2022 | |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain | 2018 | 99.000.000,00 | Kecamatan Jemaja | 2022 | |
| 42 | Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain | 2018 | 98.890.000,00 | Kec. Jemaja Timur | 2022 | |
| 43 | Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain | 2018 | 98.890.000,00 | Kec. Jemaja | 2022 | |
| 44 | Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain | 2018 | 99.000.000,00 | Kec. Jemaja | 2022 | |
| 45 | Bangunan Waduk | 2018 | 96.085.000,00 | Gunung Lintang Kecamatan Siantan | 2022 | |
| 46 | Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air) | 2018 | 10.340.000,00 | Jl. Abdul Rahman | 2022 | |
| 47 | Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya | 2019 | 250.000.000,00 | Tanjung Angkak Kecamatan Siantan | 2022 | |
| 48 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2019 | 29.890.000,00 | Pasir Peti Kecamatan Siantan | 2022 | |
| 49 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2019 | 116.766.379,00 | Pasir Peti Kecamatan Siantan | 2022 | |
| 50 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 2019 | 434.914.000,00 | Tarempa Selatan Kecamatan Siantan | 2022 | |
| 51 | Jalan Kabupaten Lokal | 2019 | 8.340.134.690,00 | Jl. Selayang Panjang Kecamatan Siantan | 2022 | |
| 52 | Jalan Kabupaten Lokal | 2019 | 99.495.000,00 | Desa Ulu MarasKecamatan Jemaja Timur | 2022 | |
| 53 | Jalan Kabupaten Lokal | 2019 | 99.495.000,00 | Kec. Siantan Timur | 2022 | |
| 54 | Jalan Kabupaten Lokal | 2019 | 99.770.000,00 | Desa Tarempa Timur | 2022 | |
| 55 | Jalan Kabupaten Lokal | 2019 | 98.601.000,00 | Kec. Palmatak | 2022 | |
| 56 | Jalan Kabupaten Lokal | 2019 | 98.601.000,00 | Kecamatan Jemaja Timur | 2022 | |
| 57 | Jalan Kabupaten Lokal | 2019 | 99.044.000,00 | Kecamatan Jemaja | 2022 | |
| 58 | Jalan Kabupaten Lokal | 2019 | 99.601.010,00 | Kecamatan Jemaja | 2022 | |
| 59 | Jalan Kabupaten Lokal | 2019 | 98.601.000,00 | Kecamatan Jemaja | 2022 | |
| 60 | Jalan Kabupaten Lokal | 2019 | 99.044.000,00 | Rewak - Sedanau | 2022 | |
| 61 | Jalan Khusus Lain-lain | 2019 | 449.095.500,00 | Pasir Peti Kecamatan Siantan | 2022 | |
| 62 | Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain | 2019 | 99.000.000,00 | Kecamatan Jemaja Timur | 2022 | |
| 63 | Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain | 2019 | 99.110.000,00 | Desa Bukit Padi Kec. Jemaja Timur | 2022 | |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Bangunan Waduk Lain-lain | 2019 | 73.870.000,00 | Desa Payalaman | 2022 | |
| 65 | Bangunan Waduk | 2019 | 192.995.000,00 | Batu Tabir Kecamatan Siantan | 2022 | |
| 66 | Saluran Drainage | 2019 | 266.750.000,00 | Kecamatan Siantan | 2022 | |
| 67 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 2019 | 13.750.000,00 | Desa Landak Kecamatan Jemaja | 2022 | |
| 68 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 2019 | 790.597.210,00 | Desa Mengkait Dusun I dan Dusun II Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan | 2022 | |
| 69 | Bangunan Pemecah Gelombang | 2019 | 98.010.000,00 | Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur | 2022 | |
| 70 | Bangunan Pemecah Gelombang | 2019 | 97.625.000,00 | Kecamatan Jemaja | 2022 | |
| 71 | Sumur Resapan | 2019 | 381.257.710,00 | Kecamatan Siantan | 2022 | |
| 72 | Sumur Resapan | 2019 | 97.790.000,00 | Kelurahan Letung Kec. Jemaja | 2022 | |
| 73 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2020 | 7.781.670.570,00 | Pasir Peti | 2022 | |
| 74 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal | 2020 | 26.363.011.300,00 | Tarempa | 2022 | |
| 75 | Tanah Danau/Situ/Embung | 2021 | 80.343.000,00 | Gunung Lintang | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 76 | Pompa Air | 2021 | 72.050.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 77 | Pompa Air | 2021 | 9.240.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 78 | Bak Air | 2021 | 42.900.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 79 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2021 | 99.220.000,00 | Kec. Palmatak | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 80 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2021 | 97.462.200,00 | Jl. Imam Bonjol Tarempa | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 81 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2021 | 99.350.240,00 | Kecamatan Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 82 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2021 | 99.776.160,00 | Kecamatan Siantan Timur | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 83 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2021 | 99.330.000,00 | Kecamatan Siantan Selatan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 84 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2021 | 99.220.000,00 | Kecamatan Kute Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 85 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2021 | 82.914.700,00 | Kecamatan Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 86 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2021 | 35.846.800,00 | Kec. Siantan Utara | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 87 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2021 | 96.266.500,00 | Kecamatan Jemaja Timur | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 88 | Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst) | 2021 | 98.450.000,00 | Tarempa | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 89 | Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen | 2021 | 23.155.000,00 | Jalan Imam Bonjol Kelurahan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tarempa Kec. Siantan | | |
| 90 | Bangunan Tempat Tinggal Lainnya | 2021 | 59.508.900,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 91 | Bangunan Tempat Tinggal Lainnya | 2021 | 98.945.000,00 | Kecamatan Kute siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 92 | Bangunan Tempat Tinggal Lainnya | 2021 | 205.480.000,00 | di Kecamatan Kute Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 93 | Bangunan Tempat Tinggal Lainnya | 2021 | 98.565.500,00 | Kecamatan Siantan Selatan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 94 | Bangunan Tempat Tinggal Lainnya | 2021 | 237.765.000,00 | Kecamatan palamatak | 2022 | |
| 95 | Bangunan Tempat Tinggal Lainnya | 2021 | 82.340.500,00 | Kecamatan Siantan Utara | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 96 | Bangunan Tempat Tinggal Lainnya | 2021 | 99.275.000,00 | jemaja. jemaja timur dan jemaja Barat | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 97 | Bangunan Tempat Tinggal Lainnya | 2021 | 230.890.000,00 | Kecamatan Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 98 | Bangunan Tempat Tinggal Lainnya | 2021 | 228.494.200,00 | siantan timur | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 99 | Bangunan Tempat Tinggal Lainnya | 2021 | 176.735.000,00 | Kecamatan jemaja | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 100 | Bangunan Tempat Tinggal Lainnya | 2021 | 97.347.800,00 | Kecamatan Siantan Tengah | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 101 | tugu lainnya (dst) | 2021 | 52.479.000,00 | Desa Batu Belah dan desa temburun Kec. Siantan Timur | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 102 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 8.003.722.800,00 | Genting Air Bini Kec. Siantan Selatan | 2022 | |
| 103 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 33.217.780.250,00 | Kec. Siantan | 2022 | |
| 104 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 734.629.890,00 | Jl. Ahmad Yani Laut Kec. Siantan | 2022 | |
| 105 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 720.211.160,00 | Jl. SP. Air Padang (Leluk Rit) - Sp. Simpang SMP 1 (Tg.Angkak) | 2022 | |
| 106 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 8.145.411.860,00 | Tarempa | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 107 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 1.244.694.700,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 108 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 97.405.000,00 | jalan kampung baru kelurahan pelantar beton nyodong - Payalaman Desa Batu Ampar | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 109 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 197.030.000,00 | Jl. Pasir Peti | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 110 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 1.248.584.660,00 | Tarempa | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 111 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 2.880.844.630,00 | Tarempa | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 112 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 1.580.855.900,00 | Jl. A. Yani LAut | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 113 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 1.090.968.300,00 | Jl. Genting - Air Bini | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 3.268.077.000,00 | Jl. Impol - Jl. Sunggak | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 115 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 6.403.341.950,00 | Pulau Bajau Kec. Siantan Timur | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 116 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 2.666.000.000,00 | Jl. Mampok - Air Biru | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 117 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 2.672.000.000,00 | Jl. Genting Dusun - Teluk Kaut - Air Sungkit - Atap | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 118 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 3.553.124.000,00 | Jl. Matak - Nuan - Teluk Durian | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 119 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 2.639.099.360,00 | Jl. Rewak - Sedanau | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 120 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 5.787.371.040,00 | Jl. Payalaman - RS. Lapangan - Pelabuhan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 121 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 200.653.200,00 | Tarempa | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 122 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 22.954.800,00 | Jalan Imam Bonjol RT 01 RW 01 Kelurahan tarempa | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 123 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 277.695.000,00 | Jalan Matak-Nuan Teluk Durian | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 124 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 283.855.000,00 | Jalan Lingkar Pulau Bajau | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 125 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 232.650.000,00 | Peninting Payalaman | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 126 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 269.900.400,00 | Jalan simpang letung-kuala maras | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 127 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 62.905.000,00 | Mampok - Air Biru Kec Jemaja | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 128 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 269.900.400,00 | alan Sp. Air Padang (Teluk Rit)- SP Simpang SMP ( Tg. Angak) | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 129 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 269.900.400,00 | Jalan Simpang Letung-Landak | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 130 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 202.426.840,00 | Jl. Ahmad Yani Laut Kecamatan Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 131 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 218.864.800,00 | Payalaman-Rumah Sakit Lapangan - Pelabuhan Payalaman | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 132 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 92.950.000,00 | Jl. Raja Hamidah Kelurahan Tarempa | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 133 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 99.856.240,00 | Kec Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 134 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 170.340.400,00 | Jl Impol-Sunggak Kec. Jemaja Barat | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 135 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 263.934.000,00 | Jl. Rewak-Sedanau Kec. Jemaja | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 136 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 171.946.500,00 | Jl. Piabung Kec. Palmatak | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 96.277.500,00 | Jalan Kecamatan Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 138 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 95.073.000,00 | Jl. Gudang Tengah - Lokasi TPU | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 139 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 96.041.000,00 | Jalan PASIR Peti-Konjo | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 140 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 94.831.000,00 | jalan SP -Air padang-antang | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 141 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 95.386.500,00 | Jalan Balau Kuning- Bak Air Antang | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 142 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 97.680.000,00 | Jalan SP SMA 1 Letung- Padang Melang | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 143 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 52.850.000,00 | jalan kampung baru Kelurahan Tarempa | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 144 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 23.210.000,00 | jalan Pasir - Konjo | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 145 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 95.562.500,00 | Jalan Ibrahim Sattah Kec. Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 146 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 95.562.500,00 | Jalan Laut Sri Tanjung | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 147 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 58.300.000,00 |  | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 148 | Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 94.996.000,00 | alan Gudang tengah -arung Hijau | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 149 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 2021 | 49.907.000,00 | Jalan lingkungan se Kabupaten Kepulauan Anambas | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 150 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 2021 | 57.088.900,00 | Desa Batu Belah Kec. Siantan Timur | 2022 |  |
| 151 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 2021 | 98.230.000,00 |  | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 152 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 2021 | 97.680.000,00 | Pasir Peti | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 153 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 2021 | 1.701.779.090,00 | jalan letung-kuala maras | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 154 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 2021 | 1.189.353.530,00 | simpang letung-landak | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 155 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 2021 | 2.590.358.000,00 | Jl. Piabung Kec. Palmatak | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 156 | Jalan Desa | 2021 | 49.478.000,00 | Jalan Menuju Keramat Gunung kuatang | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 157 | Jalan Desa | 2021 | 47.298.900,00 | Mabai RT.03.Rw.01 Lingai siantan Selatan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 158 | Jalan Desa | 2021 | 57.088.900,00 | Desa Batu Belah | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 159 | Jalan Desa | 2021 | 121.100.000,00 | genting dusun-teluk kaut-air sungkit Atap | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 160 | Jalan Desa Lain-lain | 2021 | 198.325.000,00 | Gg. Sidik RT.001/001 Desa Piabung | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Jalan Desa Lain-lain | 2021 | 22.899.800,00 | Gang Anggrek RT02/RW 01 Antang Tengah | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 162 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 96.305.000,00 | Loka Letung | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 163 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 24.920.500,00 | Gg. Musliadi RT 02 RW 01 Air Sena Kec. Siantan Tengah | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 164 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 835.389.500,00 | Kampung Baru - Air Asuk. Genting - Penebung. Air Asuk - Lidi | 2022 | |
| 165 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal | 2021 | 835.389.500,00 | kampung baru-air asuk-genting-penebung-lidi | 2022 | |
| 166 | Jembatan Pada Jalan Desa | 2021 | 98.406.000,00 | jembatan gantung sekubit payalaman | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 167 | Jembatan Fly Over | 2021 | 718.238.400,00 | | 2022 | |
| 168 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 2021 | 95.920.000,00 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 169 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 2021 | 55.220.000,00 | Kecamatan Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 170 | Bangunan Got Miring | 2021 | 98.943.060,00 | Jl. Soekarno Hatta Gg. Petai RT 011/004 Rintis Hulu | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 171 | Bangunan Got Miring | 2021 | 153.811.570,00 | RT.012/RW.04 Dekat Rumah Jaen-Rintis Desa Tarempa Selatan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 172 | Bangunan Got Miring | 2021 | 199.451.490,00 | Lapangan Sepak Bola RT 012/004 Rintis | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 173 | Bangunan Got Miring | 2021 | 164.701.690,00 | RT.012RW.04 Desa Rintis Kec. Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 174 | Bangunan Got Miring | 2021 | 98.827.000,00 | Kantor Dinas Pekerjan Umum PRPRKP | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 175 | Saluran Drainage | 2021 | 139.774.320,00 | RT 002/001 Desa Batu Berapit | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 176 | Saluran Drainage | 2021 | 26.267.300,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 177 | Saluran Drainage | 2021 | 177.714.000,00 | Jl. Ibrahim Sattah air Padang Kec. Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 178 | Saluran Drainage | 2021 | 23.550.000,00 | | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 179 | Saluran Drainage | 2021 | 36.286.000,00 | Kecamatan Jemaja | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 180 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 2021 | 98.175.000,00 | Se Kabupaten Kepulauan Anambas | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 181 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 2021 | 21.725.000,00 | Kecamatan Siantan Selatan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 2021 | 97.350.000,00 | Kec. Siantan Selatan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 183 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 2021 | 22.000.000,00 | Kecamatan Jemaja | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 184 | Bangunan Pemecah Gelombang | 2021 | 78.100.000,00 | Desa Landak | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 185 | Bangunan Pemecah Gelombang | 2021 | 96.745.000,00 | Desa Air Biru | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 186 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2021 | 84.824.300,00 | Kecamatan Siantan Tengah | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 187 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2021 | 57.225.000,00 | SPAM di Kawasan Siantan Timur | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 188 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2021 | 56.100.000,00 | SPAM Siantan Timur | 2022 | |
| 189 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2021 | 49.808.000,00 | SPAM di Kecamatan Siantan Tengah | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 190 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2021 | 44.055.000,00 | SPAM di Kecamatan Palmatak | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 191 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2021 | 27.390.000,00 | SPAM di Kecamatan Kute Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 192 | Bangunan penampung sampah | 2021 | 44.594.000,00 | Desa Candi Kec. Palmatak | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| | **J U M L A H** | | **270.752.033.819,00** | | | |

**Tabel 165**
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup**
**Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rambu-rambu Lalin Darat lainnya | 2007 | 14.883.000,00 | Kecamatan Palmatak | 2022 | |
| 2 | Rambu-rambu Lalin Darat lainnya | 2007 | 29.700.000,00 | Desa Air Bini dan Desa Kiabu Kecamatan Siantan Selatan | 2022 | |
| 3 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen | 2017 | 34.540.000,00 | Desa Genting Kecamatan Siantan Selatan | 2022 | |
| 4 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen | 2017 | 49.060.000,00 | Pelabuhan Pariwisata Manda Riau | 2022 | |
| 5 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen | 2017 | 49.500.000,00 | Pulau Penjalin | 2022 | |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen | 2017 | 44.220.000,00 | Desa Telaga Kecil, Kecamatan Siantan Selatan | 2022 | |
| 7 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen | 2017 | 48.565.000,00 | Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan | 2022 | |
| 8 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen | 2017 | 49.544.000,00 | Pelabuhan Pemda Letung | 2022 | |
| 9 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 2017 | 48.950.000,00 | Kecamatan Siantan Selatan | 2022 | |
| 10 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 2017 | 29.800.000,00 | Desa Air Bini dan Desa Arung Hijau Kecamatan Siantan Selatan | 2022 | |
| 11 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 2017 | 14.810.000,00 | Umum Desa Munjan, Kecamatan Siantan Timur | 2022 | |
| 12 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 2017 | 14.850.000,00 | Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan | 2022 | |
| 13 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 2017 | 29.920.000,00 | Desa Air Asuk Kecamatan Siantan Tengah | 2022 | |
| 14 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen | 2018 | 9.910.000,00 | RT.05/RW.03 Desa Kiabu Kec. Siantan Selatan | 2022 | |
| 15 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2019 | 79.799.000,00 | Tarempa | 2022 | |
| 16 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2019 | 99.700.000,00 | Kelurahan Letung di Kecamatan Jemaja | 2022 | |
| 17 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2019 | 99.000.000,00 | Kecamatan Jemaja | 2022 | |
| 18 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2019 | 99.800.000,00 | Pelabuhan Pemda Letung di Kecamatan Jemaja | 2022 | |
| 19 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2019 | 99.528.000,00 | Matak Kecil | 2022 | |
| 20 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2019 | 79.766.000,00 | Desa Bayat Kecamatan Siantan Utara | 2022 | |
| 21 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2019 | 29.826.000,00 | Desa Temburun | 2022 | |
| 22 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2019 | 64.064.000,00 | Sri Tanjung Kecamatan Siantan | 2022 | |
| 23 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2019 | 59.620.000,00 | Desa Ladan | 2022 | |
| 24 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) | 2020 | 13.860.000,00 | Kec. Siantan | 2022 | |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2020 | 10.653.000,00 | Air Bandung Desa Bayat Kec. Siantan Utara | 2022 | |
| 26 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2020 | 88.671.000,00 | Desa Air Asuk Kec. Siantan Tengah | 2022 | |
| 27 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2020 | 99.715.000,00 | Desa Serat Kec. Siantan Timur | 2022 | |
| 28 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2020 | 49.868.000,00 | Desa Teluk Mabai Desa Pesisir Timur Kec. Siantan | 2022 | |
| 29 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2020 | 24.800.000,00 | Kantor Camat Siantan Timur | 2022 | |
| 30 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2020 | 45.226.000,00 | Dusun Muntai Desa Teluk Siantan | 2022 | |
| 31 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2020 | 99.715.000,00 | Kec. Siantan | 2022 | |
| 32 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2020 | 79.882.000,00 | Pulau Darak Kec. Jemaja | 2022 | |
| 33 | Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 2020 | 79.810.000,00 | Tarempa | 2022 | |
| 34 | alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst) | 2021 | 165.000.000,00 | Tarempa | 2022 | |
| 35 | alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst) | 2021 | 55.000.000,00 | Tarempa | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 36 | Gerobak Dorong | 2021 | 2.750.000,00 | Tarempa | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 37 | Gergaji Chain Saw | 2021 | 2.497.000,00 | Tarempa | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 38 | Mesin Pemotong Rumput | 2021 | 2.629.000,00 | Tarempa | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 39 | Solar Cell | 2021 | 199.700.000,00 | Kec. Kute Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 40 | Alat Selam | 2021 | 192.060.000,00 | Tarempa | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 41 | rambu bersuar lainnya (dst) | 2021 | 178.930.000,00 | Kecamatan Jemaja | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 42 | rambu bersuar lainnya (dst) | 2021 | 52.189.000,00 | Gang Elang Desa Munjan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 43 | Rambu Jalan | 2021 | 7.250.000,00 | Kec. Siantan Selatan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 44 | Rambu Jalan | 2021 | 30.415.000,00 | Anambas | 2022 | |
| 45 | Rambu Jalan | 2021 | 14.850.000,00 | Kecamatan Siantan | 2022 | |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Rambu Jalan | 2021 | 19.717.500,00 | Kec. Jemaja | 2022 | |
| 47 | Rambu Jalan | 2021 | 196.133.000,00 | Kec. Palmatak dan Kec. Kute Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 48 | Rambu Jalan | 2021 | 198.201.000,00 | Kec. Siantan, Siantan Selatan dan Siantan Timur | 2022 | |
| 49 | Rambu Cermin | 2021 | 4.450.000,00 | Kec. Jemaja | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 50 | Rambu Cermin | 2021 | 19.140.000,00 | Kec. Palmatak dan Kec. Kute Siantan | 2022 | |
| 51 | Rambu Cermin | 2021 | 14.740.000,00 | Kec. Siantan | 2022 | |
| 52 | Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun | 2021 | 15.900.000,00 | Anambas | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 53 | Guardrail | 2021 | 10.935.000,00 | Kec. Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 54 | Guardrail | 2021 | 19.745.000,00 | Jl.Raden Saleh RT.03 Gang Durian Kelurahan Tarempa | 2022 | |
| 55 | Guardrail | 2021 | 193.560.000,00 | Desa Air Bini | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 56 | Guardrail | 2021 | 193.860.000,00 | Desa Batu Ampar | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 57 | Guardrail | 2021 | 39.270.000,00 | Kec.Siantan tengah | 2022 | |
| 58 | Guardrail | 2021 | 34.345.500,00 | Kec. Jemaja | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 59 | Guardrail | 2021 | 20.350.000,00 | Desa Batu Ampar Kecamatan Kute Siantan | 2022 | |
| 60 | Guardrail | 2021 | 21.939.000,00 | Anambas | 2022 | |
| 61 | Guardrail | 2021 | 39.105.000,00 | Kec.Siantan | 2022 | |
| 62 | Guardrail | 2021 | 19.635.000,00 | Desa Air Bini | 2022 | |
| 63 | Guardrail | 2021 | 49.665.000,00 | Jl. Sudirman Dusun Selambak | 2022 | |
| 64 | Rambu-rambu Lalin Darat lainnya | 2021 | 21.373.000,00 | desa air biru kec.jemaja | 2022 | |
| 65 | Rambu-rambu Lalin Darat lainnya | 2021 | 21.758.000,00 | air asuk kec.siantan tengah | 2022 | |
| 66 | Rambu-rambu Lalin Darat lainnya | 2021 | 35.926.000,00 | Batu Ampar-Payalaman-Matak-Teluk Bayur Kec.Kute Siantan | 2022 | |
| 67 | Rambu-rambu Lalin Darat lainnya | 2021 | 21.340.000,00 | Desa Temburun,Kec.Siantan Timur | 2022 | |
| 68 | Rambu-rambu Lalin Darat lainnya | 2021 | 22.110.000,00 | RT.Kel.Letung Kec.Jemaja | 2022 | |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen | 2021 | 1.618.331.766,11 | Kecamatan Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 70 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen | 2021 | 49.890.000,00 | RT.003/RW.002 Dusun 2 (DARMAWI) Desa Munjan | 2022 | |
| 71 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen | 2021 | 88.864.000,00 | RT.002 RW.001 Desa Munjan Kec.Siantan Timur | 2022 | |
| 72 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen | 2021 | 99.396.000,00 | RT.02/RW.02 Dusun2 (Herman) Desa Munjan | 2022 | |
| 73 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen | 2021 | 99.143.000,00 | Desa Bayat Kec.Siantan Utara | 2022 | |
| 74 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen | 2021 | 99.495.000,00 | RT.03 RW.02 Desa Bayat Kec.Siantan Utara | 2022 | |
| 75 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Darurat | 2021 | 19.745.000,00 | RT.03 Desa Bayat Kec.Siantan Utara | 2022 | |
| 76 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Darurat | 2021 | 14.663.000,00 | Desa Keramut Kec.jemaja barat | 2022 | |
| 77 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Darurat | 2021 | 50.303.000,00 | Desa Batu Ampar | 2022 | |
| 78 | Bangunan Tempat Parkir | 2021 | 45.650.000,00 | Anambas | 2022 | |
| 79 | Bangunan Tempat Parkir | 2021 | 48.466.000,00 | Air Nangak | 2022 | |
| 80 | Bangunan Parkir lainnya (dst) | 2021 | 49.511.000,00 | Desa Candi Kec.Palmatak | 2022 | |
| 81 | Taman lainnya | 2021 | 21.175.000,00 | SMP 2 Siantan | 2022 | |
| 82 | Taman lainnya | 2021 | 24.975.000,00 | SMP Arung Hijau | 2022 | |
| 83 | Taman lainnya | 2021 | 21.169.000,00 | SMP 1 Siantan | 2022 | |
| 84 | Taman lainnya | 2021 | 23.710.000,00 | Lembah Rewak | 2022 | |
| 85 | Taman lainnya | 2021 | 23.237.000,00 | SMPN 2 Piabung | 2022 | |
| 86 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 2021 | 20.870.000,00 | Desa Genting Timur | 2022 | |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 2021 | 19.980.000,00 | Desa Batu Ampar | 2022 | |
| 88 | Bangunan Dermaga | 2021 | 1.239.209.810,00 | Kec.Siantan | 2022 | |
| 89 | Bangunan Dermaga | 2021 | 2.109.233.480,00 | Desa Telaga Kecil Kec Siantan Selatan | 2022 | |
| 90 | Bangunan Dermaga | 2021 | 199.530.000,00 | Air Bandung Desa Bayat Kec. Siantan Utara | 2022 | |
| 91 | Bangunan Dermaga | 2021 | 198.933.000,00 | Desa Munjan Kec. Siantan Timur | 2022 | |
| 92 | Bangunan Dermaga | 2021 | 181.226.000,00 | Desa Munjan Kecamatan Siantan Timur | 2022 | |
| 93 | Bangunan Dermaga | 2021 | 199.858.000,00 | Teluk Rong RT 05 RW 02 Desa Serat | 2022 | |
| 94 | Bangunan Dermaga | 2021 | 14.619.000,00 | Anambas | 2022 | |
| 95 | Bangunan Dermaga | 2021 | 11.330.000,00 | Desa Munjan Kec.Siantan Timur | 2022 | |
| 96 | Bangunan Dermaga | 2021 | 12.745.000,00 | Desa Piabung | 2022 | |
| 97 | Bangunan Dermaga | 2021 | 50.237.000,00 | Desa Payamaran | 2022 | |
| 98 | Bangunan Dermaga | 2021 | 15.059.000,00 | RT.06 RW.03 Desa Putik Kec.Palmatak | 2022 | |
| 99 | Bangunan Dermaga | 2021 | 51.141.000,00 | Desa Batu Berapit Kec.Jemaja | 2022 | |
| 100 | Bangunan Dermaga | 2021 | 44.709.000,00 | Desa Munjan Kec.Siantan Timur | 2022 | |
| 101 | Bangunan Dermaga | 2021 | 41.998.000,00 | Desa Munjan Kec.Siantan Timur | 2022 | |
| 102 | Bangunan Dermaga | 2021 | 49.142.000,00 | Desa Munjan Kec.Siantan Timur | 2022 | |
| 103 | Bangunan Dermaga | 2021 | 49.313.000,00 | Desa Teluk Bayur Kec.Kute Siantan | 2022 | |
| 104 | Bangunan Dermaga | 2021 | 49.720.000,00 | Kec.Jemaja Barat | 2022 | |
| 105 | Bangunan Dermaga | 2021 | 48.004.000,00 | Dusun II Desa Munjan Kec.Siantan Timur | 2022 | |
| 106 | Bangunan Dermaga | 2021 | 98.393.000,00 | RT.06 Nyamuk | 2022 | |
| 107 | Bangunan Dermaga | 2021 | 99.412.000,00 | Mayang Sari RT.04 Desa Bayat Kec.Siantan Utara | 2022 | |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Bangunan Dermaga | 2021 | 90.409.000,00 | Desa Bayat | 2022 | |
| 109 | Bangunan Dermaga | 2021 | 90.420.000,00 | Dusun Sedak Kec.Siantan | 2022 | |
| 110 | Bangunan Dermaga | 2021 | 99.863.000,00 | Desa Keramut Kec.Jemaja Barat | 2022 | |
| 111 | Bangunan Dermaga | 2021 | 99.418.000,00 | Desa Payalaman | 2022 | |
| 112 | Bangunan Dermaga | 2021 | 99.907.000,00 | desa candi kec.palmatak | 2022 | |
| 113 | Bangunan Dermaga | 2021 | 34.610.000,00 | Dusun III Desa Munjan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 114 | Bangunan Dermaga | 2021 | 35.525.000,00 | Desa Munjan | 2022 | |
| 115 | Bangunan Dermaga | 2021 | 8.300.000,00 | Desa Temburun | 2022 | |
| 116 | Bangunan Dermaga | 2021 | 28.750.000,00 | Desa Candi | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 117 | Bangunan Dermaga | 2021 | 32.650.000,00 | Desa Putik Kec. Palmatak | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 118 | Bangunan Dermaga | 2021 | 18.155.000,00 | Kec. Kute Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 119 | Bangunan Dermaga | 2021 | 35.260.000,00 | Sri Tanjung | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 120 | Bangunan Dermaga | 2021 | 29.120.000,00 | Desa Pesisir Timur Kec. Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 121 | Bangunan Dermaga | 2021 | 5.386.000,00 | Desa Munjan Kec. Siantan Timur | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 122 | Bangunan Dermaga | 2021 | 33.480.000,00 | Desa Munjan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 123 | Bangunan Dermaga | 2021 | 35.260.000,00 | Desa Teluk Siantan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 124 | Bangunan Dermaga | 2021 | 33.750.000,00 | Desa Munjan Kec, Siantan Timur | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 125 | Bangunan Dermaga | 2021 | 34.400.000,00 | Kec, Siantan Timur | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 126 | Bangunan Dermaga | 2021 | 1.760.000,00 | Gang Eleng | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 127 | Bangunan Dermaga | 2021 | 7.330.000,00 | Desa Serat | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 128 | Bangunan Dermaga | 2021 | 7.160.000,00 | Desa Munjan Kec. Siantan Timur | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 129 | Bangunan Dermaga | 2021 | 40.400.000,00 | Kec. Jemaja | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Bangunan Dermaga | 2021 | 33.490.000,00 | Desa Air Biru Kec. Jemaja | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 131 | Bangunan Dermaga | 2021 | 28.450.000,00 | Desa Batu Berapit Kec. Jemaja | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 132 | Bangunan Dermaga | 2021 | 30.340.000,00 | Desa Air Bini Kec. Siantan Selatan | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 133 | Bangunan Dermaga | 2021 | 28.145.000,00 | Desa Impol Kec. Jemaja Barat | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 134 | Bangunan Dermaga | 2021 | 99.500.000,00 | Desa Air Bini Genting Kec. Siantan Selatan | 2022 | |
| 135 | Bangunan Dermaga | 2021 | 55.137.000,00 | Desa Air Asuk | 2022 | |
| 136 | Bangunan Dermaga | 2021 | 99.950.000,00 | Telaga Kecil Kec. Siantan Selatan | 2022 | |
| 137 | Bangunan Dermaga | 2021 | 99.896.000,00 | Desa Batu Ampar | 2022 | |
| 138 | Bangunan Dermaga | 2021 | 10.483.000,00 | Desa Air Sena Kec. Siantan Tengah | 2022 | |
| 139 | Bangunan Dermaga | 2021 | 195.170.800,00 | Kec. Siantan | 2022 | |
| 140 | Bangunan Dermaga | 2021 | 99.891.000,00 | Desa Munjan Kec. Siantan | 2022 | |
| 141 | Bangunan Dermaga | 2021 | 60.390.000,00 | Desa Ladan | 2022 | |
| 142 | Bangunan Dermaga | 2021 | 98.131.000,00 | Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan | 2022 | |
| 143 | Bangunan Dermaga | 2021 | 99.852.000,00 | Desa Candi Kec. Palmtak | 2022 | |
| 144 | Bangunan Dermaga | 2021 | 25.597.000,00 | Desa Bayat Kec. Siantan Utara | 2022 | |
| 145 | Bangunan Dermaga | 2021 | 99.401.000,00 | Kecamatan Siantan Utara | 2022 | |
| 146 | Bangunan Dermaga | 2021 | 99.880.000,00 | RT.04 RW.02 Desa Langir Kec. Palmatak | 2022 | |
| 147 | Bangunan Dermaga | 2021 | 99.407.000,00 | Dusun II Desa Munjan (Harun) | 2022 | |
| 148 | Bangunan Dermaga | 2021 | 99.975.000,00 | Desa Munjan Kec. Siantan Timur | 2022 | |
| 149 | Bangunan Dermaga | 2021 | 99.440.000,00 | Desa Tarempa Timur | 2022 | |
| 150 | Bangunan Dermaga | 2021 | 79.343.000,00 | Desa Munjan | 2022 | |
| 151 | Bangunan Dermaga | 2021 | 99.935.000,00 | Tanjung Mulia Desa Air Sena | 2022 | |
| 152 | Bangunan Dermaga | 2021 | 80.844.000,00 | Desa Peyakmaram | 2022 | |
| 153 | Bangunan Dermaga | 2021 | 99.440.000,00 | Desa Nyamuk Kec. Siantan Timur | 2022 | |
| 154 | Bangunan Dermaga | 2021 | 98.406.000,00 | Dusun 1 Desa Munjan | 2022 | |
| 155 | Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) | 2021 | 19.316.000,00 | Desa Nyamuk | 2022 | |
| 156 | Buku Umum Lain-lain | 2021 | 99.858.000,00 | - | 2022 | |
| 157 | Maket & Foto Dokumen Lain-lain | 2021 | 8.750.000,00 | Taman Hijau di SD 001 | 2022 | |

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Maket & Foto Dokumen Lain-lain | 2021 | 50.160.000,00 | Anambas | 2022 | |
| 159 | Maket & Foto Dokumen Lain-lain | 2021 | 50.160.000,00 | Anambas | 2022 | |
| 160 | Maket & Foto Dokumen Lain-lain | 2021 | 99.396.000,00 | Pulau Jemaja | 2022 | |
| 161 | Maket & Foto Dokumen Lain-lain | 2021 | 99.946.000,00 | Pulau Matak | 2022 | |
| 162 | Maket & Foto Dokumen Lain-lain | 2021 | 99.858.000,00 | Anambas | 2022 | |
| **J U M L A H** | | | **14.559.659.856,11** | | | |

**Tabel 166**
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Koperasi . Usaha Mikro. Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021**
**(Dalam Rupiah)**

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 2017 | 98.230.000,00 | Pasar Inpress | 2022 | |
| 2 | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 2018 | 372.880.777,00 | Jl. Hang Tuah Tarempa | 2022 | |
| 3 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) | 2021 | 12.551.000,00 | Jl. Batu Tambun Kec. Siantan | 2022 | |
| 4 | Bangunan Tempat Parkir | 2021 | 11.616.000,00 | Tanjung Desa Tarempa Barat | 2022 | |
| 5 | Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya | 2021 | 5.967.009.250,00 | Desa Piabung Kec. Palmatak | 2022 | |
| 6 | Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya | 2021 | 2.015.372.697,00 | Desa Piabung Kec. Palmatak | 2022 | Tunda Bayar 2021 |
| **J U M L A H** | | | **8.477.659.724,00** | | | |

**Tabel 167**
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021**
**(Dalam Rupiah)**

| No | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Ketarangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Personal Computer | 2021 | 24.992.000,00 | Tarempa | 2022 | Personal Komputer Rakitan |
| **Jumlah** | | | 24.992.000,00 | | | |

**Tabel 168**
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 2021**
**(Dalam Rupiah)**

| No | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Selesai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | LCD *Projector/Infocus* | 2021 | 9.328.000,00 | Tarempa | 2022 | PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR (PR0YEKTOR) No. 125/SPM-LS/1.05.1.1 (Tunda Bayar 2021) |
| **2** | Alat Kantor Lainnya | 2021 | 6.160.000,00 | Tarempa | 2022 | PENYEDIAAN PERALATAN dan Perlengkapan KANTOR No. 129/SPM-LS/1.05.1.1 (Tunda Bayar 2021) |
| **3** | Meja Rapat | 2021 | 49.940.000,00 | Tarempa | 2022 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah No. 130/SPM-LS/1.05.1.1 (Tunda Bayar 2021) |
| **4** | Sound System | 2021 | 38.445.000,00 | Tarempa | 2022 | PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR (SOUND SYSTEM) No. 126/SPM-LS/1.05.1.1 (Tunda Bayar 2021) |
| **5** | Sound System | 2021 | 18.755.000,00 | Tarempa | 2022 | PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR (SOUND SYSTEM) No. 127/SPM-LS/1.05.1.1 (Tunda Bayar 2021) |
| **6** | Sound System | 2021 | 8.690.000,00 | Tarempa | 2022 | PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR (SOUND SYSTEM) No. 128/SPM-LS/1.05.1.1 (Tunda Bayar 2021) |
| **7** | Meja Kerja Pejabat lain-lain | 2021 | 22.770.000,00 | Tarempa | 2022 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah No. 131/SPM-LS/1.05.1.1 (Tunda Bayar 2021) |
| **8** | Lemari Arsip Pejabat lainnya | 2021 | 155.941.500,00 | Tarempa | 2022 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah No. 132/SPM-LS/1.05.1.1 (Tunda Bayar 2021) |
| **Jumlah** | | | **310.029.500,00** | | | |

**Tabel 169**

**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp. Transmigrasi Dan Tenaga Kerja**

**(Dalam Rupiah)**

| **No** | **Jenis Aset Tetap** | **Tahun Pengadaan** | **Nilai** | **Lokasi** | **Target** Selesai | **Keterangan** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | Kursi Kerja Pejabat lainnya | 2021 | 4.031.500,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Kursi |
| **2** | Kursi Kerja Pejabat lainnya | 2021 | 4.031.500,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Kursi |
| **3** | Kursi Kerja Pejabat lainnya | 2021 | 4.031.500,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Kursi |
| **4** | Kursi Kerja Pejabat lainnya | 2021 | 4.031.500,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Kursi |
| **Jumlah** | | | **16.126.000,00** | | | |

**Tabel 170**

**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Komunikasi. Informatika Dan Statistik**

**(Dalam Rupiah)**

| **No.** | **Jenis Aset Tetap** | **Tahun Pengadaan** | **Nilai** | **Lokasi** | **Target Penyelesaian** | **Keterangan** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen | 2020 | 35.750.000,00 | Tarempa | 2022 | |
| 2 | Camera Digital | 2021 | 43.450.000,00 | Tarempa | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 3 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 2021 | 123.019.200,00 | Tarempa | 2022 | |
| 4 | Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst) | 2021 | 544.809.000,00 | Tarempa | 2022 | |
| 5 | Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst) | 2021 | 544.809.000,00 | Tarempa | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| 6 | Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst) | 2021 | 293.536.800,00 | Tarempa | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| **J U M L A H** | | | **1.585.374.000,00** | | | |

**Tabel 171**
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perikanan. Pertanian Dan Pangan**

**(Dalam Rupiah)**

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangunan Gedung Pabrik Permanen | 2015 | 26.950.000,00 | Desa Keramut. Kec. Jemaja Barat | 2022 | |
| 2 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 2017 | 340.000.000,00 | Desa Air Putih Kec. Siantan Timur | 2022 | |
| 3 | Bangunan Rumah Sakit Hewan | 2017 | 28.105.000,00 | Desa Bukit Padi Kec. Jemaja Timur | 2022 | |
| 4 | Bangunan Rumah Sakit Hewan | 2017 | 28.105.000,00 | Kec. Palmatak | 2022 | |
| 5 | Jalan Desa Lain-lain | 2017 | 29.645.000,00 | Kec. Siantan | 2022 | |
| 6 | Jalan Desa Lain-lain | 2017 | 29.370.000,00 | Kec. Siantan | 2022 | |
| 7 | Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya | 2018 | 9.950.000,00 | Kec. Palmatak | 2022 | |
| 8 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 2019 | 24.667.500,00 | Kec. Siantan | 2022 | |
| 9 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | 2019 | 29.700.000,00 | Kec. SIantan | 2022 | |
| 10 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 2020 | 29.892.500,00 | | 2022 | |
| 11 | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen | 2021 | 89.760.000,00 | - | 2022 | Tunda Bayar Tahun 2021 |
| **J U M L A H** | | | **666.145.000,00** | | | |

**Tabel 172**
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Sekretariat DPRD**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Selesai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 2 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 3 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 4 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 5 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 6 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 7 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 8 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 9 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 10 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 11 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |

| No | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Selesai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 13 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 14 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 15 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 16 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 17 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 18 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 19 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 20 | Lemari Kayu | 2021 | 9.900.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 21 | A.C. Split | 2021 | 9.240.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 22 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 2021 | 23.342.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 23 | Alat Studio Lainnya | 2021 | 9.889.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 24 | Lap Top | 2021 | 20.020.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 25 | Lap Top | 2021 | 20.020.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 26 | Lap Top | 2021 | 20.020.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 27 | Note Book | 2021 | 29.590.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 28 | Note Book | 2021 | 29.590.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 29 | Note Book | 2021 | 29.590.000,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| 30 | Personal Komputer lainnya | 2021 | 4.096.950,00 | Tarempa | 2022 | Hutang 2021 |
| **JUMLAH** | | | **393.397.950,00** | | | |

**Tabel 173**
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Kecamatan Jemaja Timur**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Selesai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A.C. Split | 2021 | 4.389.000,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Alat Pendingin |
| 2 | A.C. Split | 2021 | 4.389.000,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Alat Pendingin |
| 3 | A.C. Split | 2021 | 4.389.000,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Alat Pendingin |
| 4 | P.C Unit | 2021 | 11.495.000,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Personal Computer |
| 5 | P.C Unit | 2021 | 11.495.000,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Personal Computer |
| 6 | P.C Unit | 2021 | 11.495.000,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Personal Computer |
| 7 | Lap Top | 2021 | 13.993.650,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Personal Computer |
| 8 | Lap Top | 2021 | 13.993.650,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Personal Computer |

| No | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Selesai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Lap Top | 2021 | 13.993.650,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Personal Computer |
| 10 | Lap Top | 2021 | 13.993.650,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Personal Computer |
| 11 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2021 | 2.986.500,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) |
| 12 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2021 | 2.986.500,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) |
| 13 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2021 | 2.986.500,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) |
| 14 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2021 | 2.986.500,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) |
| 15 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2021 | 2.986.500,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) |
| 16 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2021 | 2.986.500,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) |
| **JUMLAH** | | | **121.545.600,00** | | | |

**Tabel 174**
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Kecamatan Siantan Tengah**

**(Dalam Rupiah)**

| **No** | **Jenis Aset Tetap** | **Tahun Pengadaan** | **Nilai** | **Lokasi** | **Tahun Selesai** | **Keterangan** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 2021 | 5.401.500,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Alat Rumah tangga lainnya (Home Use)Tangga Aluminium pada kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor No. 090/SPM/LS/4.01.11.01 (Tunda Bayar 2021) |
| **Total** | | | **5.401.500,00** | | | |

**Tabel 175**
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Kecamatan Kute Siantan**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Selesai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Alat Dapur lainnya | 2021 | 6.600.000,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal alat Dapur No. 129/SPP-SPM-LS/4.01.14.1 (Tunda Bayar 2021) |
| 2 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 2021 | 5.115.000,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal alat rumah tangga lainnya No. 124/SPP-SPM-LS/4.01.14.1 (Tunda Bayar 2021) |
| 3 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 2021 | 180.125.000,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use) Panggung Rengging No. 127/SPP-SPM-LS/4.01.14.1 Tunda Bayar 2021) |
| 4 | Meja Kerja Pejabat lain-lain | 2021 | 29.370.000,00 | Tarempa | 2022 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat No. 108/SPP-SPM-LS/4.01.14.1 (Tunda Bayar 2021) |
| JUMLAH | | | **221.210.000,00** | | | |

**Tabel 176**
**Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

**(Dalam Rupiah)**

| No. | Jenis Aset Tetap | Tahun Pengadaan | Nilai | Lokasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen | 2020 | 10.340.000,00 | DESA TELUK DENUNG PESISIR TIMUR RT.001/RW.001 KEC. SIANTAN | 2022 | |
| **2** | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen | 2020 | 35.145.000,00 | JL. PASIR MERAH SP | 2022 | |
| **3** | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen | 2020 | 10.340.000,00 | DESA AIR BIRU. KEC. JEMAJA | 2022 | |
| **4** | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen | 2020 | 9.845.000,00 | DESA BATU AMPAR. KEC. PALMATAK | 2022 | |
| **5** | Jembatan Penyeberangan Kendaraan | 2020 | 9.900.000,00 | TANJUNG MOMONG | 2022 | |
| | **J U M L A H** | | **75.570.000,00** | | | |

## C.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakukan basis akrual dalam SAP. Metode Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan metode garis lurus yang dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap bulan selama masa manfaat. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp870.236.654.494.34 dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp762.449.765.168.12.

**Tabel 177**
**Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31-Des-20 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31-Des-21 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Akumulasi Penyusutan | (762.449.765.168,12) | (130.630.987.956,34) | (22.844.098.630,12) | (870.236.654.494,34) |
| **Jumlah** | **(762.449.765.168,12)** | **(130.630.987.956,34)** | **(22.844.098.630,12)** | **(870.236.654.494,34)** |

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2021 sebesar Rp870.236.654.494,34 dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp762.449.765.168,12.

**Tabel 178**
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31-Des-20 | Koreksi Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2020 | Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2020 | Penyusutan Tahun 2021 | Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4 = (2-3)* | *5* | *6=(4+5)* |
| Peralatan Dan Mesin | (266.800.440.340,82) | (22.844.098.630,12) | (243.956.341.710,70) | (36.312.051.961,50) | (280.268.393.672,20) |
| Gedung dan Bangunan | (31.972.787.466,00) | | (31.972.787.466,00) | (15.006.086.989,00) | (46.978.874.455,00) |
| Jalan. Irigasi dan Jaringan | (463.676.537.361,30) | | (463.676.537.361,30) | (79.312.849.005,84) | (542.989.386.367,14) |
| **Jumlah** | **(762.449.765.168,12)** | **(22.844.098.630,12)** | **(739.605.666.538,00)** | **(130.630.987.956,34)** | **(870.236.654.494,34)** |

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2021 sebesar Rp870.236.654.494,34 dan Tahun 2020 sebesar Rp762.449.765.168,12 pada masing-masing SKPD dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 179**

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| SKPD | Saldo 31-Des-20 | Koreksi Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2020 | Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2020 | Penyusutan Tahun 2021 | Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sekretariat Daerah | (96.467.845.058,00) | (26.267.663.239,00) | (70.200.181.819,00) | (7.830.995.813,00) | (78.031.177.632,00) |
| Sekretariat DPRD | (9.697.800.469,00) | 56.662.036,00 | (9.754.462.505,00) | (549.677.971,00) | (10.304.140.476,00) |
| Inspektorat | (1.504.755.103,00) | (103.222.175,00) | (1.401.532.928,00) | (199.440.993,00) | (1.600.973.921,00) |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | (69.203.921.609,12) | (495.521.525,12) | (68.708.400.084,00) | (11.125.090.891,00) | (79.833.490.975,00) |
| Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | (63.858.875.278,00) | (3.549.095.207,00) | (60.309.780.071,00) | (17.720.387.658,50) | (78.030.167.729,50) |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | (398.529.756.033,00) | 24.936.650.945,00 | (423.466.406.978,00) | (77.561.061.858,84) | (501.027.468.836,84) |
| Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | (7.198.828.830,00) | (5.491.282.980,00) | (1.707.545.850,00) | (162.775.191,00) | (1.870.321.041,00) |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | (3.263.497.569,00) | (1.054.115.582,00) | (2.209.381.987,00) | (114.681.705,00) | (2.324.063.692,00) |
| Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | (12.847.836.410,00) | 448.533.605,00 | (13.296.370.015,00) | (1.072.338.602,00) | (14.368.708.617,00) |
| Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | (38.615.421.188,00) | (4.354.212.536,00) | (34.261.208.652,00) | (6.190.718.758,00) | (40.451.927.410,00) |

| SKPD | Saldo 31-Des-20 | Koreksi Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2020 | Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2020 | Penyusutan Tahun 2021 | Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | (2.975.280.250,00) | (1.585.893.680,00) | (1.389.386.570,00) | (286.168.003,00) | (1.675.554.573,00) |
| Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | (8.899.986.883,00) | (4.681.458.262,00) | (4.218.528.621,00) | (1.082.104.296,00) | (5.300.632.917,00) |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | (5.466.137.598,00) | 2.316.136.366,00 | (7.782.273.964,00) | (1.679.468.529,00) | (9.461.742.493,00) |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | (7.575.273.166,00) | (1.968.370.698,00) | (5.606.902.468,00) | (818.083.083,00) | (6.424.985.551,00) |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | (9.332.737.697,00) | 91.114.911,00 | (9.423.852.608,00) | (805.801.547,00) | (10.229.654.155,00) |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | (2.616.359.374,00) | (1.323.339.183,00) | (1.293.020.191,00) | (362.837.826,00) | (1.655.858.017,00) |
| Badan Keuangan Daerah | (4.426.817.153,00) | 308.616.719,00 | (4.735.433.872,00) | (682.868.185,00) | (5.418.302.057,00) |
| Badan Penelitian. Pengembangan dan Perencanaan Daerah | (3.586.727.967,00) | 102.218.532,00 | (3.688.946.499,00) | (304.903.937,00) | (3.993.850.436,00) |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | (854.235.856,00) | 14.852.498,00 | (869.088.354,00) | (119.418.451,00) | (988.506.805,00) |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | (372.033.318,00) | (13.750,00) | (372.019.568,00) | (147.237.314,00) | (519.256.882,00) |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah | - | - | - | - | - |
| Kecamatan Jemaja | (3.154.596.964,00) | 24.958.339,00 | (3.179.555.303,00) | (278.083.808,00) | (3.457.639.111,00) |
| Kecamatan Jemaja Timur | (2.557.413.126,00) | 16.778.565,00 | (2.574.191.691,00) | (120.146.887,00) | (2.694.338.578,00) |
| Kecamatan Palmatak | (2.505.558.401,00) | 14.942.267,00 | (2.520.500.668,00) | (210.856.184,00) | (2.731.356.852,00) |
| Kecamatan Siantan | (2.960.899.410,00) | 26.829.376,00 | (2.987.728.786,00) | (494.166.147,00) | (3.481.894.933,00) |
| Kecamatan Siantan Selatan | (1.161.633.236,00) | (22.477.808,00) | (1.139.155.428,00) | (136.938.796,00) | (1.276.094.224,00) |
| Kecamatan Siantan Tengah | (1.589.903.848,00) | 16.559.804,00 | (1.606.463.652,00) | (211.587.274,00) | (1.818.050.926,00) |
| Kecamatan Siantan Timur | (1.102.783.663,00) | (319.926.142,00) | (782.857.521,00) | (111.603.989,00) | (894.461.510,00) |
| Kecamatan Siantan Utara | (29.538.705,00) | 645.688,00 | (30.184.393,00) | (43.886.188,00) | (74.070.581,00) |
| Kecamatan Jemaja Barat | (55.823.942,00) | (83.416,00) | (55.740.526,00) | (114.462.653,00) | (170.203.179,00) |
| Kecamatan Kute Siantan | (37.487.064,00) | (2.922.098,00) | (34.564.966,00) | (93.195.418,00) | (127.760.384,00) |
| **Jumlah** | **(762.449.765.168,12)** | **(22.844.098.630,12)** | **(739.605.666.538,00)** | **(130.630.987.956,34)** | **(870.236.654.494,34)** |

Nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp870.236.654.494,34 dan Tahun 2020 sebesar Rp762.449.765.168,12 tersebut tidak termasuk aset yang berasal dari belanja modal yang nilainya lebih kecil dari Rp1.436.707.801,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 180**
**Daftar Nilai Barang Di Bawah Rp1.000.000.00 (Ekstrakomtabel) Per SKPD**

**(Dalam Rupiah)**

| SKPD | Ekstrakomtabel Aset Tetap s.d. 2020 | Koreksi Saldo Awal s.d 2020 | Ekstrakomtabel Aset Tetap Tahun 2020 | Total Ekstrakomtabel Tahun 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sekretariat Daerah | 1.105.225.762,00 | (65.279.200,00) | 15.562.000,00 | 1.186.066.962,00 |
| Sekretariat DPRD | 350.090.400,00 | 0,00 | 4.125.000,00 | 354.215.400,00 |
| Inspektorat | 108.632.000,00 | 0,00 | 23.740.000,00 | 132.372.000,00 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 3.250.923.930,00 | 448.873.013,00 | 766.669.334,00 | 3.568.720.251,00 |
| Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 540.385.962,00 | (437.174.898,26) | 159.050.767,00 | 1.136.611.627,26 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 135.959.495,00 | 0,00 | 46.941.000,00 | 182.900.495,00 |
| Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 187.283.200,00 | 83.237.000,00 | 0,00 | 104.046.200,00 |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 119.174.000,00 | (1.772.000,00) | 200.000,00 | 121.146.000,00 |
| Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 400.901.855,00 | (34.686.000,00) | 22.030.250,00 | 457.618.105,00 |
| Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 107.620.000,00 | (2.891.000,00) | 147.500.000,00 | 258.011.000,00 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 186.880.300,00 | 0,00 | 4.598.000,00 | 191.478.300,00 |
| Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 79.023.000,00 | (3.327.500,00) | 3.877.500,00 | 86.228.000,00 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 122.902.400,00 | (17.752.318,00) | 8.107.000,00 | 148.761.718,00 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 63.094.000,00 | (958.100,00) | 0,00 | 64.052.100,00 |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 396.872.500,00 | (28.700.000,00) | 126.361.950,00 | 551.934.450,00 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 49.372.223,00 | 0,00 | 19.371.000,00 | 68.743.223,00 |
| Badan Keuangan Daerah | 38.311.500,00 | (20.597.500,00) | 0,00 | 58.909.000,00 |
| Badan Penelitian. Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 97.292.200,00 | 0,00 | 3.146.000,00 | 100.438.200,00 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 100.512.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100.512.500,00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 10.428.000,00 | 10.428.000,00 |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja | 50.576.316,00 | (47.158.684,00) | 0,00 | 97.735.000,00 |
| Kecamatan Jemaja Timur | 107.194.000,00 | (75.302.500,00) | 0,00 | 182.496.500,00 |
| Kecamatan Palmatak | 141.355.000,00 | (76.926.000,00) | 4.840.000,00 | 223.121.000,00 |
| Kecamatan Siantan | 209.423.400,00 | (65.882.000,00) | 16.005.000,00 | 291.310.400,00 |
| Kecamatan Siantan Selatan | 97.485.000,00 | (71.950.000,00) | 891.000,00 | 170.326.000,00 |
| Kecamatan Siantan Tengah | 80.148.000,00 | (5.874.000,00) | 0.00 | 86.022.000,00 |
| Kecamatan Siantan Timur | 83.694.000,00 | (31.820.800,00) | 3.960.000,00 | 119.474.800,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kecamatan Siantan Utara | 1.600.000,00 | 0,00 | 21.809.500,00 | 23.409.500,00 |
| Kecamatan Jemaja Barat | 0,00 | 0,00 | 3.492.500,00 | 3.492.500,00 |
| Kecamatan Kute Siantan | 00.00 | 0,00 | 24.002.000,00 | 24.002.000,00 |
| **Jumlah** | **8.211.932.943,00** | **(455.942.487,26)** | **1.436.707.801,00** | **10.104.583.231,26** |

### C.1.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar. investasi jangka panjang. aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari: (1) Tagihan Jangka Panjang. (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga. (3) Aset Tak Berwujud (4) Aset Lain-lain. Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp13.489.563.329,89 dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.100.293.173,67.

**Tabel 181**
**Rincian Aset Lainnya Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | 31-Des-21 | 31-Des-20 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **ASET LAINNYA** | | |
| **1. Tuntutan Ganti Rugi** | **65.134.050.00** | **79.846.550.00** |
| **2. Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi** | 00.00 | 00.00 |
| **3. Tuntutan Ganti Rugi Netto (1+2)** | **65.134.050,00** | **79.846.550.00** |
| 4. Aset Tak Berwujud | 46.864.204.544,00 | 46.727.936.544.00 |
| 5. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud | (38.868.675.387,07) | (34.940.871.252,73) |
| 6. Aset Tak Berwujud Netto (4+5) | 7.995.529.156,93 | 11.787.065.291,27 |
| 7. Aset Lain-lain | 62.461.745.762,71 | 33.233.381.333.00 |
| 8. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | (57.032.845.639,94) | 0.00 |
| 9. Aset Lain-lain Netto (7+8) | 5.428.900.122,77 | 33.233.381.333.00 |
| **Jumlah Aset Lainnya (3+6+9)** | **13.489.563.329,70** | **45.100.293.174,27** |

### C.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang - Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Jangka Panjang merupakan Reklasifikasi dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp65.134.050,00. Piutang Tuntutan Ganti Rugi atas nama RP sebesar Rp65.134.050,00 berdasarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak bulan Maret 2019.

### C.1.4.2 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer. lisensi dan *franchise*. hak cipta (*copyright*). hak paten. dan hak lainnya. dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo akhir per 31 Desember 2021. Aset Tak Berwujud sebesar Rp46.864.204.544,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp46.727.936.544,00 pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 182**
**Penambahan dan Pengurangan Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| SKPD | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sekretariat Daerah | 1.964.714.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964.714.000,00 |
| Sekretariat DPRD | 39.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600.000,00 |
| Inspektorat | 186.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.500.000,00 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 1.877.260.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.877.260.400,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 25.228.907.600,00 | 0,00 | 0,00 | 25.228.907.600,00 |
| Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 77.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.640.000,00 |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 247.828.000,00 | 0,00 | 0,00 | 247.828.000,00 |
| Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 1.567.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567.380.000,00 |
| Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 2.094.508.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094.508.500,00 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 17.669.400,00 | 0,00 | 0,00 | 17.669.400,00 |
| Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 69.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.410.000,00 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 240.115.144,00 | 91.718.000,00 | 0,00 | 331.833.144,00 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 7.147.404.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.147.404.500,00 |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 531.685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 531.685.000,00 |
| Badan Keuangan Daerah | 993.215.000,00 | 44.550.000,00 | 0,00 | 1.037.765.000,00 |
| Badan Penelitian. Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 4.444.099.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.444.099.000,00 |
| **JUMLAH** | **46.727.936.544,00** | **136.268.000,00** | **0,00** | **46.864.204.544,00** |

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.868.675.387,07 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 183**
**Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| SKPD | Amortisasi Aset Tak Berwujud 31 Desember 2020 | Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2021 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Sekretariat Daerah | (1.595.825.883,00) | (94.184.200) | (1.690.010.083,00) |
| Sekretariat DPRD | (39.600.000,00) | 0,00 | (39.600.000,00) |
| Inspektorat | (186.500.000,00) | 0,00 | (186.500.000,00) |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | (1.694.002.920,00) | (110.242.947) | (1.804.245.867,00) |
| Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | (17.478.944.217,00) | (2.522.890.760,00) | (20.001.834.977,00) |
| Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | (77.640.000,00) | 0,00 | (77.640.000,00) |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | (167.232.333,00) | (24.782.800,00) | (192.015.133,00) |
| Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | (884.478.165,07) | (180.571.333,00) | (1.065.049.498,07) |
| Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | (1.694.874.204,00) | (208.504.850,00) | (1.903.379.054,00) |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | (9.423.680,00) | (3.533.880,00) | (12.957.560,00) |
| Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | (78.485.000,00) | 9.075.000,00 | (69.410.000,00) |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | (164.111.150,00) | (42.487.114,00) | (206.598.264,00) |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | (5.577.246.617,00) | (279.632.250,00) | (5.856.878.867,00) |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | (531.685.000,00) | 0,00 | (531.685.000,00) |
| Badan Keuangan Daerah | (714.994.583,00) | (71.777.500,00) | (786.772.083,00) |
| Badan Penelitian. Pengembangan dan Perencanaan Daerah | (4.045.827.500,00) | (398.271.500,00) | (4.444.099.000,00) |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Palmatak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SKPD | Amortisasi Aset Tak Berwujud 31 Desember 2020 | Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2021 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Kecamatan Kute Siantan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | **(34.940.871.253,07)** | **(3.927.804.134,00)** | **(38.868.675.387,07)** |

Nilai buku aset tak berwujud Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.995.529.156,93 pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 184**
**Nilai Buku Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| SKPD | Aset Tak Berwujud 31-Des-20 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud | Saldo Akhir /Nilai Buku Tahun 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Sekretariat Daerah | 1.964.714.000,00 | (1.690.010.083,00) | 274.703.917,00 |
| Sekretariat DPRD | 39.600.000,00 | (39.600.000,00) | 0,00 |
| Inspektorat | 186.500.000,00 | (186.500.000,00) | 0,00 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 1.877.260.400,00 | (1.804.245.867,00) | 73.014.533,00 |
| Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 25.228.907.600,00 | (20.001.834.977,00) | 5.227.072.623,00 |
| Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 77.640.000,00 | (77.640.000,00) | 0,00 |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 247.828.000,00 | (192.015.133,00) | 55.812.867,00 |
| Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 1.567.380.000,00 | (1.065.049.498,07) | 502.330.500,93 |
| Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 2.094.508.500,00 | (1.903.379.054,00) | 191.129.446,00 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 17.669.400,00 | (12.957.560,00) | 4.711.840,00 |
| Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 69.410.000,00 | (69.410.000,00) | 0,00 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 331.833.144,00 | (206.598.264,00) | 125.234.880,00 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 7.147.404.500,00 | (5.856.878.867,00) | 1.290.525.633,00 |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 531.685.000,00 | (531.685.000,00) | 0,00 |
| Badan Keuangan Daerah | 1.037.765.000,00 | (786.772.083,00) | 250.992.917,00 |
| Badan Penelitian. Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 4.444.099.000,00 | (4.444.099.000,00) | 0,00 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SKPD | Aset Tak Berwujud 31-Des-20 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud | Saldo Akhir /Nilai Buku Tahun 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Palmatak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Siantan Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Kute Siantan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | **46.864.204.544,00** | **(38.868.675.387,07)** | **7.995.529.156,93** |

### C.1.4.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset dalam kondisi rusak berat berdasarkan usulan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang. Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif karena rusak berat pemakaian. Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp62.461.745.762,71 dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp33.233.381.333,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 185**
**Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain per SKPD Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| SKPD | Saldo 31-Des-20 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sekretariat Daerah | 6.296.351.124,00 | 0,00 | 0,00 | 6.296.351.124,00 |
| Sekretariat DPRD | 261.434.000,00 | 0,00 | 0,00 | 261.434.000,00 |
| Inspektorat | 220.532.000,00 | 109.127.100,00 | 0,00 | 329.659.100,00 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | 2.232.983.418,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232.983.418,00 |
| Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.113.680.000,00 | 7.206.095.715,23 | 0,00 | 8.319.775.715,23 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 3.806.559.920,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806.559.920,00 |
| Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 568.074.050,00 | 2.279.734.015,00 | 0,00 | 2.847.808.065,00 |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 169.547.000,00 | 1.128.318.170,00 | 0,00 | 1.297.865.170,00 |
| Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 1.172.511.316,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172.511.316,00 |

| SKPD | Saldo 31-Des-20 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 5.864.691.000,00 | 7.268.747.380,48 | 0,00 | 13.133.438.380,48 |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 98.450.000,00 | 1.672.403.370,00 | 0,00 | 1.770.853.370,00 |
| Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 500.922.000,00 | 4.801.657.150,00 | 0,00 | 5.302.579.150,00 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian | 1.441.153.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.153.700,00 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 296.294.000,00 | 4.543.747.444,00 | 0,00 | 4.840.041.444,00 |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 665.194.500,00 | 0,00 | 0,00 | 665.194.500,00 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.281.615.814,00 | 322.542.444,00 | 0,00 | 1.604.158.258,00 |
| Badan Keuangan Daerah | 1.263.055.389,00 | 0,00 | 542.346.859,00 | 720.708.530,00 |
| Badan Penelitian. Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 936.628.000,00 | 0,00 | 0,00 | 936.628.000,00 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 973.474.002,00 | 0,00 | 0,00 | 973.474.002,00 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja | 1.139.413.599,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.413.599,00 |
| Kecamatan Jemaja Timur | 256.318.500,00 | 0,00 | 0,00 | 256.318.500,00 |
| Kecamatan Palmatak | 844.072.801,00 | 0,00 | 0,00 | 844.072.801,00 |
| Kecamatan Siantan | 674.586.000,00 | 0,00 | 0,00 | 674.586.000,00 |
| Kecamatan Siantan Selatan | 530.554.300,00 | 0,00 | 0,00 | 530.554.300,00 |
| Kecamatan Siantan Tengah | 185.599.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.599.000,00 |
| Kecamatan Siantan Timur | 439.685.900,00 | 438.338.500,00 | 0,00 | 878.024.400,00 |
| Kecamatan Siantan Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Jemaja Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kecamatan Kute Siantan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | **33.233.381.333,00** | **29.770.711.288,71** | **542.346.859,00** | **62.461.745.762,71** |

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2021 sebesar Rp57.032.845.639,94 dan koreksi akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain tahun sebelumnya sebesar Rp Rp56.790.910.176,61 pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 186**
**Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per SKPD Tahun 2021**

| OPD | Koreksi Saldo Awal dibawah Tahun 2021 | Penyusutan Semsester 1 dan 2 Tahun 2021 | Saldo Akhir Per 31 Des 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | (2.232.983.418,00) | 0,00 | (2.232.983.418,00) |
| Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB | (7.032.701.069,67) | (56.215.126,51) | (7.088.916.196,18) |
| Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB (Puskesmas) | (16.719.747,92) | (2.438.654,17) | (19.158.402,08) |
| Dinas PUPRPRKP | (3.806.559.920,00) | 0,00 | (3.806.559.920,00) |

| OPD | Koreksi Saldo Awal dibawah Tahun 2021 | Penyusutan Semsester 1 dan 2 Tahun 2021 | Saldo Akhir Per 31 Des 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Kantor Satuan Pamong Praja | (665.194.500,00) | 0,00 | (665.194.500,00) |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | (973.474.002,00) | 0,00 | (973.474.002,00) |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa | (2.838.493.779,00) | (1.441.783,00) | (2.839.935.562,00) |
| Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | (1.756.927.233,00) | (9.942.518,00) | (1.766.869.751,00) |
| Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | (10.651.973.354,00) | (98.399.147,00) | (10.750.372.501,00) |
| Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika | (5.302.579.150,00) | 0,00 | (5.302.579.150,00) |
| Dinas Koperasi Usaha Mikro. Perdagangan dan Perindustrian | (1.441.153.700,00) | 0,00 | (1.441.153.700,00) |
| Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | (1.288.282.751,00) | (3.357.322,79) | (1.291.640.073,79) |
| Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | (1.172.511.316,00) | 0,00 | (1.172.511.316,00) |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | (2.444.287.417,52) | (67.189.756,87) | (2.511.477.174,39) |
| Setda Bagian Pemerintahan Umum | (209.675.000,00) | 0,00 | (209.675.000,00) |
| Setda Bagian Hukum | (43.780.000,00) | 0,00 | (43.780.000,00) |
| Setda Bagian Bina Ekonomi Infrastruktur | (24.580.000,00) | 0,00 | (24.580.000,00) |
| Setda Bagian Administrasi Pembangunan. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | (161.194.000,00) | 0,00 | (161.194.000,00) |
| Setda Bagian Umum | (5.376.097.124,00) | 0,00 | (5.376.097.124,00) |
| Setda Bagian Humas dan Protokol | (281.452.000,00) | 0,00 | (281.452.000,00) |
| Setda Pengelola | (199.573.000,00) | 0,00 | (199.573.000,00) |
| Sekretariat DPRD | (261.434.000,00) | 0,00 | (261.434.000,00) |
| Kecamatan Siantan | (674.586.000,00) | 0,00 | (674.586.000,00) |
| Kecamatan Jemaja | (1.139.413.599,00) | 0,00 | (1.139.413.599,00) |
| Kecamatan Palmatak | (844.072.801,00) | 0,00 | (844.072.801,00) |
| Kecamatan Siantan Timur | (875.412.587,50) | (239.250,00) | (875.651.837,50) |
| Kecamatan Siantan Selatan | (530.554.300,00) | 0,00 | (530.554.300,00) |
| Kecamatan Jemaja Timur | (256.318.500,00) | 0,00 | (256.318.500,00) |
| Kecamatan Siantan Tengah | (185.599.000,00) | 0,00 | (185.599.000,00) |
| Inspektorat Daerah | (329.659.100,00) | 0,00 | (329.659.100,00) |
| Badan Penelitian Pengembangan dan Pembangunan Daerah | (936.628.000,00) | 0,00 | (936.628.000,00) |
| Badan Keuangan Daerah | (1.263.055.389,00) | 0,00 | (1.263.055.389,00) |

| OPD | Koreksi Saldo Awal dibawah Tahun 2021 | Penyusutan Semsester 1 dan 2 Tahun 2021 | Saldo Akhir Per 31 Des 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia | (1.573.984.418,00) | (2.711.905,00) | (1.576.696.323,00) |
| **Total** | **(56.790.910.176,61)** | **(241.935.463,34)** | **(57.032.845.639,94)** |

## C.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Jumlah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp119.063.925.064,32.

## C.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), Utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya. Kewajiban jangka pendek yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp Rp119.063.925.064,32 terdiri dari:

1. Pendapatan diterima dimuka Sebesar Rp36.000.000,00;
2. Utang Belanja Tahun 2021 Sebesar Rp47.822.123.966,00;
3. Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2021 Sebesar Rp71.205.801.098,32.

Kewajiban Jangka Pendek dapat dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 187**
**Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2021**

(Dalam Rupiah)

| *Uraian* | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 |
| *KEWAJIBAN JANGKA PENDEK* | | |
| *Pendapatan diterima dimuka* | 36.000.000,00 | 0,00 |
| *Utang Belanja* | 47.822.123.966,00 | 1.466.079.882,00 |
| *Utang Jangka Pendek Lainnya* | 71.205.801.098,32 | 99.044.000,00 |
| ***Jumlah Kewajiban Jangka Pendek*** | **119.063.925.064,32** | **1.565.123.882,00** |

## C.2.1.5 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.000.000,00 merupakan Pendapatan yang diterima dari hasil perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan PT. Telkom Indonesia. Tbk selama 25 Tahun terhitung sejak Tahun 2021 dengan perjanjian sewa Rp1.500.000,00 setiap Tahunnya dan telah dibayarkan ke Kasda pada Tahun 2021 sebesar Rp37.500.000,00. Mutasi Penambahan dan Pengurangan Pendapatan diterima dimuka dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 188**
**Mutasi Pendapatan diterima dimuka Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *Uraian* | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Pendapatan diterima dimuka* | 0,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 36.000.000,00 |
| ***Jumlah*** | **0,00** | **36.000.000,00** | **0,00** | **36.000.000,00** |

## C.2.1.6 Utang Belanja

Utang Belanja berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang belum dibayar sampai dengan akhir periode anggaran. Akun ini pada umumnya muncul di satuan kerja perangkat daerah. yang melakukan kegiatan perolehan barang/jasa. Jumlah utang beban yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp47.822.123.966,00 yang terdiri dari Utang Beban atas Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 pekerjaan telah selesai dilaksanakan namun belum dilakukan pencairan dikarenakan proses pengajuan pencairan pada OPD.

**Tabel 189**
**Mutasi Utang Belanja Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Utang Belanja | 1.466.079.882,00 | 47.769.123.966,00 | 1.413.079.882,00 | 47.822.123.966,00 |
| **Jumlah** | **1.466.079.882,00** | **47.769.123.966,00** | **1.413.079.882,00** | **47.822.123.966,00** |

Mutasi penambahan dan pengurangan pada Utang Belanja Tahun Anggaran 2021. sehingga saldo utang belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.822.123.966,00 pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

**Tabel 190**
**Mutasi Tambah Utang Belanja per SKPD Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| **DINAS KESEHATAN. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | Belanja Paket/Pengiriman - Pengiriman Obat. Vaksin dan BMHP (DAK Non Fisik) | 5.000.000,00 |
| | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - Belanja Pengiriman Obat. Vaksin dan BMHP (DAK Non Fisik) | 26.000.000,00 |
| | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas | 28.007.500,00 |
| | Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan - Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis Anak | 19.999.980,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan - Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis Penyakit Dalam | 19.999.980,00 |
| | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas | 38.102.500,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Belanja Pemeliharaan RSUD Jemaja | 197.544.578,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Belanja Pemeliharaan Ruang Rawat Inap Lantai II RSUD Tarempa | 198.081.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan Poli Umum dan Administrasi RSUD Jemaja | 360.635.000,00 |
| | Belanja Obat - Obatan - Pengadaan Obat Spesialistik (1 Paket) Kegiatan Penyediaan Faskes untuk UKM dan UKP | 2.349.034.344,00 |
| | Belanja Obat - Obatan - Pengadaan Reagen Swab | 403.562.000,00 |
| | Belanja Jasa Tenaga Ahli - Penyusunan Dokumen Rencana Setrategis | 200.200.000,00 |
| | Belanja Obat - Obatan - Obat - Obatan Lainnya - Belanja Masker N95 | 71.214.000,00 |
| | Belanja Obat - Obatan - Obat - Obatan Lainnya - Belanja Masker 3 Ply | 110.000.000,00 |
| | Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan - Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis Obgyn | 50.000.000,00 |
| | Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan - Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis-1 | 33.000.000,00 |
| | Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan - Sewa Rumah Dinas Dokter Spesialis Penyakit Dalam | 33.000.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Masker N95 Puskesmas Palmatak | 27.344.240,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Masker N95 Puskesmas Siantan Selatan | 23.870.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Masker N95 Puskesmas Kute Siantan | 23.870.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Masker N95 Puskesmas Siantan Tengah | 23.870.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Masker N95 Puskesmas Siantan Timur | 23.870.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Masker N95 Puskesmas Siantan | 23.870.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Masker N95 Puskesmas Jemaja | 23.870.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Masker N95 Puskesmas Jemaja Timur | 23.870.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Masker N95 Puskesmas Jemaja Barat | 23.870.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Handscoon Steril Puskesmas Jemaja Barat | 15.840.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Non Set Puskesmas Jemaja Barat | 27.456.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Set Puskesmas Jemaja Barat | 26.400.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Handscoon Steril Puskesmas Jemaja Timur | 15.840.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Non Set Puskesmas Jemaja Timur | 27.456.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Set Puskesmas Jemaja Timur | 26.400.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Handscoon Steril Puskesmas Jemaja | 15.840.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Non Set Puskesmas Jemaja | 27.456.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Set Puskesmas Jemaja Timur | 26.400.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Handscoon Steril Puskesmas Siantan Utara | 15.840.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Non Set Puskesmas Siantan Utara | 27.456.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Set Puskesmas Siantan Utara | 26.400.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan Pakai Habis Penanganan Covid-19 (APD Set) | 26.400.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Non Set Puskesmas Siantan Timur | 27.456.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Handscoon Steril Puskesmas Siantan Timur | 14.080.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Handscoon Steril Puskesmas Siantan Tengah | 14.080.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Non Set Puskesmas Siantan Tengah | 27.456.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Set Puskesmas Siantan Tengah | 26.400.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Handscoon Puskesmas Kute Siantan | 15.840.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Non Set Puskesmas Kute Siantan | 27.456.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Set Puskesmas Kute Siantan | 26.400.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Set Puskesmas Siantan Selatan | 26.400.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Non Set Puskesmas Siantan Selatan | 27.456.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Handscoon Steril Puskesmas Siantan Selatan | 14.080.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Handscoon Steril Puskesmas Palmatak | 15.840.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Non Set UPT Puskesmas Palamatak | 27.456.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Set Puskesmas Palamak | 26.400.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Handscoon Steril Puskesmas Siantan | 15.840.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Non Set Puskesmas Siantan | 27.456.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Set Puskesmas Siantan | 26.400.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Set RSUD Jemaja | 44.000.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Handscoon Steril RSUD Jemaja | 44.115.500,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Set Puskesmas RSUD Palmatak | 44.000.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Handscoon Steril RSUD Palmatak | 44.115.500,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 APD Set RSUD Tarempa | 44.000.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Handscoon Steril RSUD Tarempa | 44.115.500,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Masker N95 Puskesmas Siantan | 27.344.240,00 |
| | Belanja Natura dan Pakan Natura - Belanja Makan Minum Petugas Vaksinasi Covid-19 September 2021 Puskesmas Siantan Timur | 3.300.000,00 |
| | Belanja Natura dan Pakan Natura - Belanja Makan Minum Petugas Vaksinasi Covid-19 September 2021 Puskesmas Jemaja Timur | 3.234.000,00 |
| | Belanja Natura dan Pakan Natura - Belanja Makan Minum Petugas Vaksinasi Covid-19 Agustus - Oktober 2021 | 15.840.000,00 |
| | Belanja Natura dan Pakan Natura - Belanja Makan Minum Petugas Vaksinasi Covid-19 September dan Oktober 2021 Puskesmas Tarempa | 14.850.000,00 |
| | Belanja Natura dan Pakan Natura - Belanja Makan Minum Petugas Vaksinasi Covid-19 Januari - Maret 2021 | 25.344.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer (PC) 5 Buah | 2.750.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor. Kerta dan Cover UPT Puskesmas Siantan Timur | 6.725.400,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor | 4.400.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor UPT Puskesmas Letung | 7.150.000,00 |
| | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah UPT Puskesmas Siantan Timur | 3.000.000,00 |
| | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah UPT Puskesmas Palmatak | 5.400.000,00 |
| | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah UPT Puskesmas Letung | 1.650.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor UPT Puskesmas Siantan Timur September 2021 | 517.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor UPT Puskesmas Siantan Timur Juli - Oktober 2021 | 2.260.500,00 |
| | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Belanja Bahan Bakar Minyak dan Tabung Gas Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6.952.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik Kegiatan UPT RSUD Palmatak | 5.500.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tuli Kantor. Cover UPT RSUD Palmatak | 8.996.900,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor UPT RSUD Palmatak | 24.469.500,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | 1.996.500,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer | 1.920.000,00 |
| | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Kegiatan Administrasi Umum UPT Puskesmas Jemaja Timur | 6.192.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot kantor UPT Puskesmas Jemaja Timur | 1.865.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik UPT Puskesmas Jemaja Timur | 2.600.000,00 |
| | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Belanja Bahan Bakar Minyak dan Tabung Gas UPT Puskesmas Jemaja Timur | 5.558.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor UPT Puskesmas Jemaja | 40.844.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga. Komputer. dan Peralatan Komputer | 11.280.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor. Kerta dan Cover | 9.051.000,00 |
| | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Belanja Bahan Bakar Minyak Bulan Juli - Desember 2021 | 290.855.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor. Kerta dan Cover UPT Puskesmas Siantan Selatan | 9.743.800,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor UPT Puskesmas Siantan Selatan | 11.000.000,00 |
| | Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya. Pemeliharaan Alat Angkutan Darat UPT Puskesmas Siantan Selatan | 7.228.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Pemeliharaan Komputer - Administrasi Umum Perangkat Daerah UPT Puskesmas Siantan Selatan | 5.489.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | 5.996.100,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Kegiatan Kantor | 16.246.450,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Kegiatan Kantor UPT Puskesmas Siantan Selatan | 10.043.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Kegiatan Kantor UPT Puskesmas Palmatak | 8.497.500,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Kegiatan Kantor UPT Puskesmas Jemaja Timur | 5.050.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat UPT Puskesmas Jemaja Timur | 2.860.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik | 3.275.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor Lainnya | 90.000.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor UPT RSUD Tarempa | 5.417.500,00 |
| | Belanja Tagihan Air - UPT RSUD Tarempa | 640.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor. Kerta dan Cover RSUD Tarempa | 23.373.900,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Pemeliharaan Alat Pendingin UPT RSUD Tarempa | 7.546.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - UPT RSUD Tarempa | 12.072.500,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Masker N95 (RSUD Palmatak) | 102.525.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Masker N95 (RSUD Jemaja) | 102.525.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Masker N95 (RSUD Tarempa) | 102.525.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja APD Non Set (RSUD Jemaja) | 137.275.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja APD Non Set (RSUD Tarempa) | 137.275.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja APD Non Set (RSUD Palmatak) | 137.275.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis pakai Covid-19 (Handscoon Biasa) | 83.951.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Rapid Antigen Covid-19 | 354.375.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Penanganan Covid-19 Masker Bedah Puskesmas Siantan | 30.413.403,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Habis Pakai Obat - Obatan Lainnya (Alkohol 70%) Puskesmas Siantan | 33.901.450,00 |
| | Belanja Sewa Bangunan Kesehatan - Ruang Karantina Pasien Covid-19 Wilayah I | 168.578.410,00 |
| | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Sewa Transportasi Roda 4 (Angkut Tabung Oxigen) | 1.000.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Bahan Komputer dan Perlengkapan Dinas Bendera Merah Putih UPT Puskesmas Siantan Selatan | 5.478.000,00 |
| | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Sewa Transportasi Laut (Angkut Tabung Oxigen dari Pelabuhan Pelantar 2 ke Kapal) | 1.000.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Jasa Pengawasan Gedung Oxigen Central RSUD Palmatak | 50.127.000,00 |
| | Belanja Natura dan Pakan Natura - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah UPT Puskesmas Siantan Selatan | 2.211.000,00 |
| | Belanja Bahan - Isi Tabung Gas - Kegiatan pada UPT Puskesmas Palmatak | 500.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat UPT Puskesmas Jemaja Timur | 16.940.000,00 |
| | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Belanja Bahan Bakar Minyak Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 9.043.500,00 |
| | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah UPT Puskesmas Palmatak | 1.500.000,00 |
| | Belanja Natura dan Pakan Natura - Belana Natura dan Pakan Natura Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12.082.950,00 |
| | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Belanja Jasa Bongkar Muat (Lokasi ke Pelabuhan) | 7.350.000,00 |
| | Belanja Obat - Obatan - Pengadaan Obat - Obatan Kegiatan Penyediaan Faskes untuk UKM dan UKP | 49.500.000,00 |
| | Belanja Obat - Obatan - Pengadaan Obat Reagensia dan Perlengkapan Laboraturium (1 Paket) | 51.049.680,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor. Kerta dan Cover. Bahan Komputer. Benda Pos dan Cetak | 18.832.950,00 |
| | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah - Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 750.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin | 7.137.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Cetak Spanduk | 1.050.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Komputer Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3.124.000,00 |
| | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 19.552.500,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Cetak Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.681.750,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor | 10.213.500,00 |
| | Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI (Jamkesda) Bulan Oktober 2021 | 904.295.500,00 |
| | Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI (Jamkesda) Bulan September 2021 | 904.448.000,00 |
| | Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI (Jamkesda) Bulan November 2021 | 899.960.500,00 |
| | Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid - Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 | 117.678.583,00 |
| | Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator - Bulan Novembver 2021 | 123.000.000,00 |
| | Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator - Bulan Desember 2021 | 122.250.000,00 |
| | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan - Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit Se - Kabupaten Kepulauan Anambas | 26.000.000,00 |
| | Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid - Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 UPT RSUD Tarempa Bulan September 2021 | 53.750.017,00 |
| | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Jaspel) Dana Non Kapitasi UPT RSUD Jemaja Bulan Oktober - November 2021 | 13.293.250,00 |
| | Pengakuan Utang Beban Klaim Pasien Covid-19 untuk RSUD Palmatak dan RSUD Jemaja | 986.676.000,00 |
| | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Jaspel) Ina CBG'S (50% dari Pendapatan BPJS) Dana Non Kapitasi 2021 | 621.159.128,00 |
| | Honorarium PPKB Desa dan Kelurahan | 193.000.000,00 |
| | Honorarium Petugas Pemulasaran dan Pemakaman pasien Covid-19 | 297.600.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan JKN Kapitasi bulan November s/d Desember 2021 dan Jasa Pelayanan Non-Kapitasi bulan Desember 2021 | 93.409.116,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung RSUD Jemaja | 19.619.600,00 |
| **Jumlah** | | **13.129.918.199.00** |
| **DINAS PEKERJAAN UMUM PRPRKP** | Belanja Jasa Konsultasi Lainnya - Belanja Terminj 100% Kajian Lingkungan Pembangunan Jembatan (Swakelola) | 1.077.357.600,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Terminj 100% Lanjutan Pembangunan Mesjid Air Bini | 569.885.599,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% DED Air baku Sumber Air Nangak Desa Teluk Siantan | 295.735.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Kertas HVS Alat Tulis Kantor Bulan Oktober - Desember 2021 | 20.955.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Belanja Terminj 100% Pengadaan Material Tahap II Pemeliharaan Jalan Se - Kabupaten (Swakelola) | 185.680.000,00 |
| | Belanja Sewa - Belanja Terminj 76% Sewa Excavator. Loader. Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Penanganan Bencana Longsor di Kabupaten Anambas | 224.750.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Belanja Pemeliharaan Batu Miring Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 98.827.000,00 |
| | Belanja Pakaian Olahraga - Belanja Termin 100% Pengadaan Pakaian Olahraga | 168.830.200,00 |
| | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) - Belanja Pengadaan pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 169.994.550,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Pembangunan Jalan SP II Kecamatan Siantan | 200.653.200,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (Swakelola) | 69.487.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% DED Pembangunan Mesjid Darul Iman Desa Pesisir Timur | 97.806.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Konsultasi Perencanaan SPAM Siantan Tengah | 84.824.300,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Pemeliharaan Jaringan - Jaringan Air Minum - Belanja Terminj 100% Pemeliharaan Jaringan SPAM Desa Piabung | 99.171.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Konsultasi Perencanaan SPAM Siantan Timur | 57.225.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Konsultasi Perencanaan SPAM Siantan Selatan | 56.100.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Konsultasi Perencanaan SPAM Siantan | 49.808.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Konsultasi Perencanaan SPAM Palmatak | 44.055.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Konsultasi Perencanaan SPAM Kute Siantan | 27.390.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Belanja Termin 100% Rehabilitasi Rumah Dinas Jalan Imam Bonjol Kelurahan Tarempa Siantan | 23.155.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor di Palmatak | 99.220.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% DED Gedung Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas | 97.462.200,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor di Siantan Tengah | 99.350.240,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor di Siantan Timur | 99.776.160,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% DED Pembangunan Mesjid Arung Hijau Desa Tiangau | 96.541.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% DED Pembangunan Mesjid Kiabu Siantan Selatan | 99.322.300,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mesjid Desa Candi | 46.392.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% DED Pembangunan Mesjid Desa Lingai | 95.645.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Tempat Whudu Surau Al Mukhlisin Kampung Baru Siantan | 23.210.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor di Siantan Selatan | 99.330.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor di Kute Siantan | 99.220.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Lanjutan Mesjid Air Bini | 93.830.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan Siantan | 82.914.700,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor di Siantan Utara | 35.846.800,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% DED Pembangunan Mesjid Paris Panjang Desa Telaga | 95.865.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% DED Pembangunan Mesjid Teluk Klimpan Desa Telaga | 96.266.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pembangunan Mushola Sekubik Desa Payalaman | 94.710.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor di Jemaja Timur | 36.286.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pembangunan Sistem Drainase di Kecamatan Jemaja | 15.180.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pembangunan Sistem Drainase di Kecamatan Siantan | 35.117.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Se - Kab. Kep. Anambas | 98.175.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pembangunan Bangunan Perkuat Tebing Siantan Selatan | 21.725.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% DED Pemecah Ombak Desa Landak | 78.100.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% DED Pembangunan Perkuat Tebing Desa Telaga Siantan Selatan | 97.350.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pemecah Ombak Desa Air Biru | 96.745.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pembangunan Pekuat Tebing di Jemaja | 22.000.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Perencanaan Tanggul Sungai Se - Kabupaten Kepulauan Anambas | 95.920.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pembangunan Tanggul Sungai di Kecamatan Siantan | 55.220.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan - Belanja Terminj 100% Jasa Konsultasi Penguatan Database dan Survey Kondisi Jaringan Irigasi Aplikasi E-Paksi DI | 58.795.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Lanjutan Pembangunan Gang Anggrek RT.02 RW.01 Antang | 22.899.800,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kute Siantan | 98.945.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Pengembang Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kute Siantan | 205.480.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Semenisasi jalan Imam Bonjol RT.01 RW.01 Kelurahan Tarempa | 22.954.800,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Siantan Selatan | 98.565.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Palmatak | 237.765.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Perencanaan Jalan Menuju Keramat Gunung Kuatang | 49.478.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Siantan Utara | 82.340.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Jemaja. Jemaja Timur dan Jemaja Barat | 99.275.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Siantan | 230.890.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Pembangunan Jalan Matak - Nuan - Teluk Durian (Tahap I) | 277.695.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Lanjutan Pembukaan dan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bajau Siantan Timur (Tahap IV) | 283.855.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% FisibilityStudy (FS) Pembangunan Jalan Peninting - Payalaman | 232.650.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% DED Jalan Pelantar Loka Letung | 96.305.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Jemaja | 176.735.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pembangunan Pelantar Beton Gang Musliadi RT.02 RW. 01 Desa Air Sena Siantan Tengah | 24.920.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Siantan Tengah | 97.347.800,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% DED Gang Mabai RT.03 RW.01 Desa Lingai Siantan Selatan | 47.298.900,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang Letung - Kuala Maras | 269.900.400,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Pembangunan Jalan Genting Dusun - Teluk Kaut - Air Sungkit Atap (Tahap 2) | 121.100.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Lanjutan Peningkatan Jalan Mapok Air Biru | 62.905.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Peningkatan Pembangunan Jalan SP Air padang (Teluk Rit) - SP Simpang SMP N 1 (Tanjung Angkak) - Jalan SP2 | 269.900.400,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang Letung - Landak | 269.900.400,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Rekonstruksi Jalan Ahmad Yani Laut Siantan | 202.426.840,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Peningkatan Jalan Payalaman - Rumah Sakit Lapangan - Pelabuhan Payalaman | 218.864.800,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Pembangunan Jalan Raja Hamidah Keluarah Tarempa | 92.950.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Siantan Timur | 228.494.200,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Lainnya - Belanja Terminj 100% Pelaporan RPPLH Pembangunan Jalan SP II Kecamatan Siantan | 99.856.240,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Lanjutan Pembukaan dan Peningkatan Jalan Impol - Sunggak (Tahap 2) | 170.340.400,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Pembangunan Jalan Rewak - Sedanau | 263.934.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Pembangunan Jembatan Piabung Kecamatan Palmatak | 171.946.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Lanjutan Revitalisasi Mesjid Nurul Ihsan Desa Tarempa Barat | 98.783.300,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Pembangunan Mesjid Al-Fajri Desa Temburun | 94.039.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mesjid Antang Tarempa Timur | 46.920.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% DED Gedung Serba Guna Polres Kabupaten Kepulauan Anambas | 97.405.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% DED Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mesjid Piabung | 46.920.500,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Terminj 100% Pembangunan Mesjid Al-Fajri Desa Temburun | 565.841.115,00 |
| | Belenja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan - Jalan Kabupaten - Pengadaan Material Tahap III Pemeliharaan Jalan Polre (Swakelola) | 145.442.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Perencanaan Drainase Jalan Raja Haji Fisabilillah RT.001 RW.004 Tarempa Timur | 23.045.000,00 |
| | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan - Pengadaan Penampungan Air | 42.900.000,00 |
| | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan - Pengadaan Pipa RT.001 RW.006 Kelurahan Letung | 42.174.000,00 |
| | Belenja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan - Jalan Kabupaten - Upah Pekerja Pemeliharaan Peningkatan Jalan Polres (Swakelola) | 78.502.779,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Upah Pekerja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Bekerja (Swakelola) | 63.840.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pembangunan Menara Mesjid Desa Batu Ampar | 99.165.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Perencanaan Reservasi Jalan Kecamatan Siantan | 96.277.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% DED Pembangunan Jalan Gudang Tengah - Lokasi TPU | 95.073.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% DED Pembangunan Jalan Gudang Tengah - Arung Hijau | 94.996.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% DED Pembangunan Jalan Pasir Peti - Konjo | 96.041.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% DED Pembangunan Jalan SP Air Padang - Antang (Pelabuhan Perikanan) | 94.831.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% DED Pembangunan Jalan Balau Kuning - Bak Air Antang | 95.386.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% DED Pembangunan Jalan SP SMA 1 Letung - Padang Melang | 97.680.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% DED Pembangunan Jembatan Gantung Sekubit - Payalaman | 98.406.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mesjid Gudang Tengah | 99.495.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% DED Revitalisasi Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa | 97.130.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang - Belanja Terminj 100% DED Penataan Komplek Mesjid Agung Kabupaten Kepulauan Anambas | 99.605.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% DED Lanjutan Jalan Kamung Baru Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan | 52.850.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan - Belanja Terminj 100% Jasa Konsultasi Penguatan Database dan Survey Kondisi Jaringan Irigasi Aplikasi E-Paksi DI Matan | 58.300.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Lainnya - Belanja Terminj 100% Konsultasi Lingkungan Pelaporan DPLH Irigasi | 99.360.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Pompa - Belanja Terminj 100% Pemeliharaan Mesin Pompa Air UPTD SPAM | 49.500.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Box Culvert Jalan Pasir Peti - Konjo | 23.210.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% DED Pembangunan Gorong - Gorong Jalan Ibrahim Sattah Kecamatan Siantan | 95.562.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Belanja Termin 100% Perencanaan Panggung Serbaguna Kampung Melayu Desa tarempa Barat | 23.210.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Belanja Termin 100% Konsultansi Pembangunan Gedung Tempat Pengelilaan Sampah (TPS) Desa Candi | 44.594.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Belanja Terminj 100% DED Jalan Laut Sri Tanjung | 95.562.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Belanja Termin 100% Perencanaan Pembangunan Surau Kampung Melayu Desa Tarempa Barat | 50.259.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Belanja Termin 100% Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Tempat Pengelolaan 3R Desa Tarempa Timur | 44.594.000,00 |
| | Review Perencanaan Pembangunan Jembatan Penghubung Kampung Baru - Air Asuk. Genting - Penebung. Air Asuk - Lidi | 835.389.500,00 |
| | Belanja Honorarium Kelompok Kerja Penyusunan Data Backlog Perumahan bulan Agustus - Oktober Tahun 2021 | 90.000.000,00 |
| **Jumlah** | | **14.687.417.023.00** |
| **DINAS PENDIDIKAN. PEMUDA DAN OLAHRAGA** | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya (4 Paket) DAK 2022 | 41.811.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan PembangunanRuang Laboraturium Komputer beserta Perabotnya (3 Paket) DAK 2022 | 27.819.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan PembangunanArea Bermain beserta Ape Luar Ruang (2 Paket) DAK 2022 | 7.854.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan PembangunanRuang UKS beserta Perabotnya (3 Paket) DAK 2022 | 12.243.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan PembangunanRuang Perpustakaan beserta Perabotnya (2 Paket) DAK 2022 | 18.524.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan PembangunanRuang UKS (3 Paket) DAK 2022 | 13.871.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan PembangunanRuang UKS beserta Perabotnya (3 Paket) DAK 2022 | 59.180.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan PembangunanRumah Dinas Guru beserta Perabotnya (2 Paket) DAK 2022 | 23.199.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan PembangunanRuang Guru beserta Perabotnya (3 Paket) DAK 2022 | 34.804.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan PembangunanRuang Guru dan Kepala Sekolah (1 Paket) DAK 2022 | 9.262.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Pengadaan Sepatu Lapangan Dinas Pendidikan | 62.060.000,00 |
| | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba.Sukarela dan Sosial - Belanja Kostum Bola Kaki.Bola Voli.Bola Takraw Jemaja Timur | 126.599.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga - Pengadaan Pembuatan Tempat Tidur yang Memadai untuk Para Santri Pesantren Air Tanah | 98.901.000,00 |
| | Belanja Pakaian Olahraga - Belanja PengadaanPakaian Olahraga SD Negeri 002 Desa Kuala Maras Jemaja Timur SMP Negeri 1 Siantan | 53.273.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Peralatan Olahraga Desa Bukit Padi Jemaja Timur | 49.032.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Peralatan Olahraga Desa Ulu Maras Jemaja Timur | 39.325.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Belanja Pemasangan Paving Blok Mts Al Ma'arif Jemaja | 25.905.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Pembangunan Pagar SMPN 1 Jemaja Timur | 25.960.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Sepatu SMP Negeri 1 Siantan | 13.035.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Meubelair MIS Ababil Jannah Desa Payalaman Kute Siantan | 112.172.500,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Pemasangan Paving Blok SMPN 1 Jemaja Timur | 25.927.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Pakaian Pramuka Murid SMP Se Kab. Kepulauan Anambas | 185.103.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Bahan Baju Dinas Guru PAUD Se-Anambas | 186.813.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan pakaian Melayu Siswa SD Se-Anambas | 195.109.200,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Sepatu Siswa SD Se-Anambas | 196.284.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Pakaian Olahraga Murid PAUD SD Se-Anambas | 198.000.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Pakaian Khusus TK Se-Anambas | 196.116.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Pakaian Seragam Murid - murid PAUD Se-Anambas | 193.116.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Buku Mewarnai PAUD Se-Anambas | 191.922.500,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Baju Batik Murid SD Se-Anambas | 195.888.000,00 |
| | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) - Belanja Pengadaan Seragam Lapangan Pramuka SD Se-Anambas | 197.505.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Lanjutan Pembangunan Pagar PAUD Lembah Rewak Desa Rewak Jemaja | 145.416.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Pembangunan Batu Miring TK Anugrah Desa Candi Palmatak | 149.629.300,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 014 Batu Ampar | 25.487.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Pembangunan Batu Miring PAUD Genting Pulur Jemaja Timur | 25.943.500,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Pemasangan Paving Blok dan Pembangunan Pagar SMPN 4 Genting | 27.357.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas TPQ Desa Payalaman Kute Siantan | 25.503.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Batu Miring SMPN 4 Arung Hijau Siantan Selatan | 27.351.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Rumah Dinas Guru SDN 001 Ladan | 25.520.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Pembangunan Batu Miring SMPN Bayat Siantan Utara | 25.498.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Renovasi Atap dan Plafon SDN Batu Ampar Kute Siantan | 25.476.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Pembangunan Batu Miring SMPN 1 Palmatak | 25.487.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Rehabilitasi SDN 007 Sedak Siantan | 23.204.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Pemasangan Paving Blok dan Keramik Pondok Pesantren Khaira Ummah | 23.193.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan Rehab Sekolah SDN 003 Tarempa | 23.210.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan Rehab Sekolah SDN 005 Cadi | 25.492.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Pengawasan Pemasangan Paving Blok MIS Tiangau Siantan Selatan | 27.335.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Pembangunan Pagar SDN Landak | 25.976.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan Rehab Sekolah SDN Munjan | 26.664.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Pembangunan Pagar dan Batu Miring Pondok Pesantren Modern Khaira Ummah | 23.221.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Pembangunan Batu Miring SDN 005 Antang | 23.133.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Jasa Pengawasan Kecamatan Jemaja Timur | 25.976.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Jasa Pengawasan Kecamatan Siantan Selatan | 59.180.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Jasa Pengawasan Pemasangan Paving Blok SMPN Dusun | 23.199.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Insan Utama Siantan | 99.440.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan Rehab Rumah Dinas Guru Jemaja Timur | 56.650.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Landscape SD tahfiz Qur'an Insan Utama Siantan | 23.166.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Jasa Pengawasan Kecamatan Siantan Selatan | 27.346.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Pembangunan Batu Miring PAUD Al-Hikmah Tebang | 25.514.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Penimbunan MIS Ababil Jannah Desa Payalaman | 25.520.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Pembangunan batu Miring dan Penimbunan PAUD/TK Tunas Bangsa | 25.481.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Rehabilitasi Sekolah SDN 008 Dusun | 23.144.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Pemasangan Paving Blok SDN 007 Sedak | 23.144.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Pembangunan Batu Miring SDN 008 Dusun Desa Pesisir Timur | 23.105.500,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Pagar SDN Tebang Palmatak | 25.503.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektur - Perencanaan Pembangunan Pagar SDN Keramut | 26.653.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Pakaian Adat Daerah (Baju Kurung Melayu) MTs Al Ma'arif Jemaja | 14.850.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Baju Olahraga Guru SD Siantan - Sepatu | 82.053.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Bahan Cetak | 1.191.520,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Kertas dan Cover | 1.496.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Alat Tulis Kantor | 1.738.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Pengawasan Pembangunan Batu Miring SMPN Batu Belah | 26.576.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan Rehab Rumah Dinas Guru Palmatak | 56.650.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan Pembangunan Gedung PAUD Desa Payamaram Kute Siantan | 25.476.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan Rehabilitasi Rumah Guru SDN 003 Tarempa | 23.248.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan Rehab Rumah Dinas Guru Jemaja | 56.595.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan Rehab Rumah Dinas Guru Siantan Selatan | 82.214.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan Rehabilitasi Sekolah SDN 010 Luap Siantan Timur | 26.625.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan Pembangunan Batu Miring dan Penimbunan TK Negeri 3 Putik | 25.498.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung Dinas Pendidikan Tajung Momong Siantan | 23.155.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Alat Olahraga SD Se-Kabupaten Kepulauan Anambas | 194.931.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Pakaian Olahraga - Belanja PengadaanAlat Prasarana Olahraga Persatuan Pemuda Kelana Bahari Desa Air Biru | 18.012.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Pengadaan Alat Prasarana Olahraga Persatuan Pemuda Kelana Bahari Desa Air Biru | 18.260.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Olahraga Desa Kuala Maras Jemaja Timur | 92.455.000,00 |
| | Belanja Pakaian Olahraga - Belanja Pengadaan Pakaian Pemuda dan Alat Olahraga Genting Dusun Desa Batu Berapit | 50.352.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Pengadaan Pakaian Pemuda dan Alat Olahraga Genting Dusun Desa Batu Berapit | 48.455.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Perencanaan Pembangunan Lapangan Gasing Desa Tebang | 23.237.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Pengawasan Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SMPN 1 Jemaja Timur | 3.234.000,00 |
| | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba - Belanja Pengadaan Kursi Belajar Siswa Sekolah Dasar MIN Tarempa | 191.840.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Rehabilitasi Ruang Kelas Kerusakan Minimal SDN 012 Landak / SDN 011 Air Biru dan SDN 001 Letung (DAK) | 56.287.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Rehabilitasi Ruang Kelas Kerusakan Minimal SMPN 1 Air Nangak | 12.749.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Rehabilitasi Ruang Kelas Kerusakan Minimal SMPN 3 Telaga Siantan Selatan | 16.434.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta Perabotnya SDN 010 Luap (DAK) | 21.120.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta Perabotnya SDN 001 Telaga | 21.923.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta Perabotnya SDN 007 Lembah Rewak | 20.823.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Pembangunan Rumah Dinas Guru beserta Perabotnya SDN 005 Letung Jemaja | 21.868.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Rehabilitasi Ruang Tata Usaha Tingkat Kerusakan Minumal Sedang beserta Perabot SMPN 1 Jemtim | 20.812.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Rehabilitasi Ruang Kelas Kerusakan Minimal SMPN 2 Sunggak Jemaja Barat | 16.005.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Rehabilitasi Ruang Kelas Kerusakan Sedang beserta Perabotnya TK Negeri Jemaja | 11.187.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Rehabilitasi Ruang Guru beserta Perabotnya SDN 012 Landak Jemaja | 12.991.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Rehabilitasi Ruang Guru beserta Perabotnya SMPN 2 Sunggak Jemaja Barat | 13.244.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Rehabilitasi Ruang Kelas Kerusakan Minimal SMPN 1 Jemaja Timur | 12.914.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Rehabilitasi Ruang Kelas Kerusakan Minimal SMPN 1 Air Nangak Siantan Tengah | 12.749.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Rehabilitasi Ruang Kelas Kerusakan Minimal SDN 008 Dusun Siantan | 9.273.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Rehabilitasi Ruang Kelas Kerusakan Minimal SDN 012 landak. SDN 011 Air Biru dan SDN 001 Letung (DAK) | 39.017.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Perencanaan Pembangunan Ruang UKS beserta Perabotnya SDN 001 Ladan Palmatak | 11.429.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Perencanaan Pembangunan Ruang Guru beserta Perabotnya SDN 005 Letung Jemaja | 20.779.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Pembangunan Ruang Guru beserta Perabotnya SDN 009 Rekam Siantan | 16.258.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Rehabilitasi Ruang Guru Kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya SMPN 3 Telaga Siantan Selatan | 13.629.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Tambahan Tunjangan Penghasilan Profesi Guru PNS Daerah Bersumber dari APBN (TPG Guru Desember 2021) | 772.156.840,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Sepatu Siswa dan Siswi TK PAUD Se - Kabupaten Anambas | 195.360.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa - Pembangunan Ruang Guru Kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya SDN 009 Rekam Siantan | 13.849.000,00 |
| **Jumlah** | | **6.530.734.860.00** |
| **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) - Pakaian Kerja Lapangan (Jaket Lapangan) | 25.025.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Thermogun Infrared | 10.000.000,00 |
| | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - Belanja Pengadaan PDH | 64.350.000,00 |
| | Belanja Pakaian Olahraga - Belanja PengadaanPakaian Olahraga | 65.065.000,00 |
| | Belanja Jasa Iklan/Reklame. Film dan Pemotretan - Belanja Pembuatan Video Dokumenter BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas | 23.650.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Beroda Dua | 7.540.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Minuman Berperisa | 22.500.000,00 |
| | Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas - Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | 3.630.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Belanja Makan Minum | 9.702.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Belanja Makan Minum | 13.340.250,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Belanja Makan Minum | 7.276.500,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Belanja Makan Minum | 4.677.750,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 6.138.000,00 |
| **Jumlah** | | **262.894.500.00** |
| **DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP** | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pembangunan Taman di Desa Pesisir Timur | 50.160.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Tambatan Perahu Gang Nur Arifin RT.04 RW.02 Desa Langir | 99.880.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintan Darat Tidak Bersuar - Belanja Terminj 100% Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Kec. Jemaja dan Jemaja Timur | 95.330.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Tambatan Perahu Gang Karman RT.02 RW.02 Desa Munjan | 99.891.000,00 |
| | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar - Belanja Terminj 100% Pemasangan Batu Miring Tempat Parkir Pelabuhan Desa Candi Palmatak | 49.511.000,00 |
| | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar - Belanja Terminj 100% Pembangunan Tambatan Perahu Teluk Red Desa Tarempa Timur Siantan | 99.440.000,00 |
| | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar - Belanja Terminj 100% Perencanaan Dermaga Rakyat Dusun Teluk Rung Desa Munjan Siantan Timur | 79.343.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu Tanjung Mulia Desa Air Sena | 99.935.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pembangunan Tangga dan Semenisasi Pelabuhan Puskesmas Pembantu Desa Munjan | 99.975.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu dan Batu Miring RT.03 RW.02 Dusun II Desa Munjan | 99.407.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu dan Batu Miring RT.03 Rw.01 Dusun 1 Desa Munjan | 98.406.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Pian Pasir | 99.401.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Dermaga Rakyat Desa Mengkait | 98.131.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan - Belanja Terminj 100% Penyusunan Study Kelayakan Pengelolaan Persampahan di Pulau Matak | 99.946.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan - Belanja Terminj 100% Penyusunan Study Kelayakan Pengelolaan Persampahan di Pulau Jemaja | 99.396.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Tambatan Perahu Dam RT.10 Nyamuk Siantan Timur | 99.440.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Terminj 100% Persediaan untuk Dijual/Diserahkan (Tempat Sampah) | 44.550.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pembangunan T Dermaga Desa Air Asuk Siantan Tengah | 55.137.000,00 |
| | Belanja Jasa Tenaga Laboraturium - Belanja Terminj 100% Belaja Jasa Tenaga Laboraturium | 13.244.000,00 |
| | Belanja Bahan - Bahan Lainnya - Belanja Terminj 100% Belanja Pengadaan Tiang Passive Sampler | 6.820.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Lainya - Belanja Terminj 100% Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | 99.858.000,00 |
| | Belanja Jasa Tenaga Laboraturium - Belanja Terminj 100% Belaja Jasa Tenaga Laboraturium | 10.890.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Tambatan Perahu RT.02 RW.04 Desa Air Bini Genting Siantan Selatan | 99.500.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pembangunan RT.03 RW.02 Desa Candi Palmatak | 99.852.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Tambatan Perahu Dusun Air Bandung Desa Bayat Siantan Utara | 25.597.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Taman Hijau SMPN 2 Piabung | 23.237.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pembangunan Sambungan Tambatan Perahu Desa Batu Ampar | 99.896.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Desa Ladan | 60.390.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Lanjutan Tambatan Perahu Gang Tengken Desa Air Sena | 10.483.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Jl. Sudirman Dusun Selambak Sintim | 49.665.000,00 |
| | Belanja Pakaian Olahraga - Belanja Terminj 100% Pengadaan baju Olahraga Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 49.384.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan (Delineator) Kecamatan Jemaja | 19.717.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail) Desa Batu Ampar | 20.350.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan di Kecamatan Siantan Selatan | 14.740.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) Desa Air Bini | 19.635.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan di Palmatak dan Kute Siantan | 19.140.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa Genting Pulur | 20.870.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa Batu Ampar | 19.980.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pengadaan dan Pemasangan Rambu - rambu Jalan Siantan. Sinsel dan Sintim | 14.850.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Revitalisasi Pelabuhan Telaga Kecil Siantan Selatan | 99.950.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Terminj 100% Pembangunan Gedung Logistik Kecamatan Siantan | 195.170.800,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Pembangunan Pelabuhan Sekubik Desa Payakmaram Kute Siantan | 80.844.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Jas Hujan | 19.600.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Belanja Terminj 100% Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Marka dan Rambu Wilayah Zona Selamat Sekolah Jemaja dan Jemaja Timur | 30.415.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor Penumpang (Kendaraan Beroda Enam/Truck) | 21.065.000,00 |
| | Pekerjaan Perencanaan Pembangunan tambatan perahu dan batu miring RT 002/003 Dusun III Desa Munjan | 34.610.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Batu Miring Tambatan Perahu Lapangan Bola Desa Munjan | 35.525.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Temburun | 8.300.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) Sub.Keg Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 15.900.000,00 |
| | Jurusan (RPPJ) Sub.Keg Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rp 15.900.000.00 56.265.000.00 Rp - Rp 5 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penimbun Pelabuhan Desa Candi | 28.750.000,00 |
| | 6 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu RT.06 RW.03 Desa Putik Kec. Palmatak | 32.650.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Tambatan Perahu Desa Umbar Desa Payaklaman Kec. Kute Siantan | 18.155.000,00 |
| | Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Sri Tanjung | 35.260.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Labak RT.01 RW.01 Teluk Denung Desa Pesisir Timur Kec. | 29.120.000,00 |
| | Pekerjaan Pengawasan tambatan perahu RT.006 RW.002 Desa Munjan Kec. Siantan Timur Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan | 5.386.000,00 |
| | Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu RT.01/RW.03 (gang Zul) Desa Munjan | 33.480.000,00 |
| | Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Fasilitas Sandar Kapal Penyeberangan Desa Teluk Siantan | 35.260.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Tambatan Perahu RT.03 RW.02 Desa Munjan Kec. Siantan Timur | 33.750.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Labak RT.01 RW.01 Teluk Denung Desa Nyamuk Kec. Siantan | 34.400.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Tambatan Perahu Gang Eleng | 1.760.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Tambatan Perahu Nelayan Dusun Telok Rong RT.05 RW 02 Desa Serat | 7.330.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu Gang Saat Desa Munjan Kec. Siantan Timur | 7.160.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur- Jasa Arsitektur Lainnya (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Taman Hijau di SD 001 | 8.750.000,00 |
| | Pekerjaan Perencanaan Pelabuhan Apung Berhala Kec. Jemaja | 40.400.000,00 |
| | 0 Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Semenisasi Pelantar Beton Pelabuhan Nelayan Desa Air Biru Kec. Jemaja | 33.490.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pelabuhan Air Sungkit Desa Batu Berapit Kec. Jemaja | 28.450.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Desa Air Bini Kec. Siantan | 30.340.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Dermaga Desa Impol Kec.Jemaja Barat | 28.145.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan di Kecamatan Jemaja | 4.450.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) di Kec. Siantan | 10.935.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) di Kec. Jemaja | 34.345.500,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Marka dan Rambu Wilayah Zona Selamat Sekolah di Kec. Siantan | 7.250.000,00 |
| **Jumlah** | | **3.435.774.300.00** |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **DINAS KOMUNIKASI. INFORMATIKA DAN STATISTIK** | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 76.835.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Belanja Jasa Pengawasan Gedung Network Operation Centre (NOC) | 34.094.500,00 |
| | Belanja Jasa Tenaga Ahli - Belanja Jaas Tenaga Ahli Pertama Statistik | 7.000.000,00 |
| **Jumlah** | | **117.929.500.00** |
| **DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO. PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN** | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Hand Sealer | 41.745.000,00 |
| | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) - Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 17.325.000,00 |
| **Jumlah** | | **59.070.000.00** |
| **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP. TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA** | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Baju Kerja Lapangan Safety 66 Steel Buruh Jemaja | 99.316.800,00 |
| | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 165.000.000,00 |
| **Jumlah** | | **264.316.800.00** |
| **DINAS PERIKANAN. PERTANIAN DAN PANGAN** | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan KJA Kelompok Laut Bertuah Desa Genting Pulur | 27.280.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Fish Finder Desa Lingai Siantan Selatan | 190.498.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Jaring Keramba untuk Kelompok Nelayan Pembudidaya Ikan Desa Piabung | 121.000.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - DED Pembuatan Kandang Penggemukan Sapi dan Pagar Hijau Makan Ternak | 19.981.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - DED Pembangunan Pagar Balai Benih Pertanian Terpadu Jemaja Timur | 19.992.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Jas Hujan Kecamatan Jemaja dan Jemaja Barat | 145.557.500,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Tali Jangkar Nelayan Kecamatan Jemaja Barat | 101.475.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Bagan Nelayan Dusun Pemutus Desa Munjan | 199.320.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Life Jacket Nelayan Kecamatan Jemaja dan Jemaja Barat | 198.217.800,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - DED Pengadaan Armada Penangkapan Ikan 5 GT Bahan Fiber Glass | 14.949.000,00 |
| **Jumlah** | | **1.038.270.300.00** |
| **DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN** | Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (RIPPARKAB) | 127.500.000,00 |
| | Belanja Jasa Tenaga Ahli - Pembayaran Jasa Penyusunan naskah/Dokume Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas | 131.604.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - DED Penataan Kawasan Wisata Tanjung Karang Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur | 92.910.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - DED Penataan Kawasan Wisata Batu Tebang Musuh Desa Tebang Kecamatan Palmatak | 90.200.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - DED Penataan Kawasan Wisata Dusun Sekubik Desa Payakmaram Kecamatan Kute Siantan | 90.640.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - DED Pembangunan Jalan Wisata dari Letung ke Gunung Datuk Kecamatan Jemaja | 89.450.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - DED Penataan Kawasan Wisata Mangrove Keramat Siantan Desa Air Nangak Kecamatan Siantan Tengah | 92.490.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Pembangunan Gazebo di Kuburan Cina Kelurahan Letung Kecamatan Jemaja | 15.400.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Pembangunan Gazebo Tempat Wisata Desa Belibak Kecamatan Palmatak | 15.180.000,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - DED Penataan Kawasan Wisata Desa Landak Kecamatan Jemaja | 92.860.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Sepatu Lapangan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 52.800.000,00 |
| | Belanja Pakaian Dnas Lapangan (PDL) - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL) | 63.250.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Alat Musik Kesenian Tambur Desa Mapok Kecamatan Jemaja | 42.350.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Bahan Cetak Kegiatan publikasii Wisata Anambas | 94.820.000,00 |
| | Pembayaran Belanja Tenaga Administrasi dan Jaminan Kesehatan (Gaji PTT) untuk Bulan Desember 2021 | 65.242.751,00 |
| | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - DED Penataan Kawasan Wisata Mangrove Desa Genting Pulur Kecamatan Jemaja Timur | 92.780.000,00 |
| **Jumlah** | | **1.249.476.751.00** |
| **SEKRETARIAT DAERAH** | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Bahan Cetak Bliho dan Cetak Spanduk | 38.247.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - Belanja Makanan dan Minuman Tamu | 3.080.000,00 |
| | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | 82.691.500,00 |
| | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | 4.797.000,00 |
| | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | 6.570.000,00 |
| **Jumlah** | | **135.385.500.00** |
| **SEKRETARIAT DPRD** | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Tempat Kerja | 135.477.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Pengadaan Souvenir/Cendra Mata | 75.383.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Terminj 4 (seratus persen) Pengadaan Alat untuk Perabot Kantor | 14.383.160,00 |
| | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - Belanja Pengadaan PDH Pimpinan dan Anggota DPRD | 44.440.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Terminj 4 (seratus persen) Kertas dan Cover | 14.460.600,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Terminj 4 (seratus persen) Pengadaan Alat Listrik | 17.920.100,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Pengadaan Perlengkapan Dinas (Sepatu Lapangan) | 12.320.000,00 |
| | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja - Belanja Pengadaan Pakaian Pelatihan Kerja | 21.340.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Pengadaan Perlengkapan Dinas | 23.908.500,00 |
| | Belanja Natura dan Pakan Natura - Belanja Terminj 4 (seratus persen) Pengadaan Pakan Natura | 22.876.700,00 |
| | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) - Belanja Pengadaan PSL Pimpinan dan Anggota DPRD | 88.000.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) - Belanja Pengadaan PSH Pimpinan dan Anggota DPRD | 61.600.000,00 |
| | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) - Belanja Pengadaan PSR Pimpinan dan Anggota DPRD | 65.120.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 15.631.000,00 |
| **Jumlah** | | **612.860.060.00** |
| **KECAMATAN SIANTAN** | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Tenda Paguyuban Pasundan Kabupaten Kepulauan Anambas | 98.340.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Sajadah Mesjid Raudatul Jannah Tanjung Lambai. Surau Darul Iman Teluk Rit dan Pesantren Khaira Ummah | 197.287.200,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Tenda Desa tarempa Selatan Kecamatan Siantan | 32.560.000,00 |
| | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja - Belanja Pengadaan Pakaian Lapangan Aparatur Kelurahan Tarempa | 73.287.500,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Tenda Karang Taruna Kartika Kelurahan Tarempa | 81.400.000,00 |
| **Jumlah** | | **482.874.700.00** |
| **KECAMATAN JEMAJA** | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 1.440.000,00 |
| | Belanja Pakaian Olahraga - Belanja PengadaanPakaian Olahraga Kelurahan Letung | 19.061.900,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Bahan Cetak (Jilid dan Fotocopy) | 1.158.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 18.700.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Bahan Cetak (Fotocopy) | 1.814.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Kertas dan Cover. Bahan Komputer | 5.525.000,00 |
| | Belanja Tagihan Listrik Kantor Camat Bulan September - Desember 2021 | 7.693.644,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pemberdayaan Desa | 4.500.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Belanja Makan Minum Kegiatan PHBI | 3.675.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat | 3.550.000,00 |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pemberdayaan Mcasyarakat Kelurahan Letung | 21.200.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Barang Pakai Habis Kelurahan Letung | 7.131.000,00 |
| | Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas | 400.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Alat Tulis Kantor | 5.267.900,00 |
| | Belanja Tagihan Listrik Kantor Camat | 1.080.600,00 |
| **Jumlah** | | **102.197.044.00** |
| **KECAMATAN PALMATAK** | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Perlengkapan Babul Akhirat | 54.692.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Perlengkapan Pengantin Majelis Taklim Nurul Hidayah Desa Tebang Kacamatan Palmatak | 48.081.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Alat Pelamin Tim Penggerak PKK Desa Candi Kacamatan Palmatak | 48.928.000,00 |
| **Jumlah** | | **151.701.000.00** |
| **KECAMATAN SIANTAN TIMUR** | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Sajadah Mesjid Al-Barokah Desa Temburun | 164.560.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja Pengadaan Alat Bermain Taman Ramah Anak Alun-alun Desa Nyamuk | 149.677.000,00 |
| **Jumlah** | | **314.237.000.00** |
| **KECAMATAN JEMAJA TIMUR** | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja PengadaanSound Sistem | 72.479.000,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja PengadaanSound Sistem Speaker Portable | 64.916.500,00 |
| | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat- Belanja PengadaanKeyboard | 30.184.000,00 |
| **Jumlah** | | **167.579.500.00** |
| **SIANTAN TENGAH** | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - Belanja Pengadaan PDH | 33.462.000,00 |
| **Jumlah** | | **33.462.000.00** |
| **KECAMATAN SIANTAN UTARA** | Pembayaran Belanja Pakaian Batik Tradisional - Belanja Pengadaan Pakaian Batik | 17.974.000,00 |
| **Jumlah** | | **17.974.000,00** |
| **KECAMATAN KUTE SIANTAN** | Belanja Pakaian Olahraga - Belanja PengadaanPakaian Olahraga | 13.513.500,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Pengadaan Umbul - umbul Bandir Event | 23.100.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Bahan Cetak | 26.785.000,00 |
| | Belanja Natura dan Pakan Natura - Belanja Pengadaan Pakan Natura | 3.850.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Souvenir/Cendra Mata | 2.310.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Pengadaan Bendera Merah Putih | 16.225.000,00 |
| | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 11.247.500,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Bahan Cetak | 660.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Persediaan Dokumen Administrasi Tender | 1.188.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Pengadaan Kertas dan Cover | 1.000.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Persediaan Dokumen Administrasi Tender | 1.617.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Persediaan Dokumen Administrasi Tender | 5.940.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Persediaan Dokumen Administrasi Tender | 1.782.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Persediaan Dokumen Administrasi Tender | 2.376.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Persediaan Dokumen Administrasi Tender | 5.940.000,00 |
| | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) - Belanja Pengadaan pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pramuka | 27.912.500,00 |
| | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Paskibra | 28.710.000,00 |
| **Jumlah** | | **174.156.500,00** |
| **BADAN KEUANGAN DAERAH** | Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi atau Kabupaten - Belanja Penyaluran Alokasi dana Desa (ADD) Tahun 2021 | 4.531.819.429,00 |
| **Jumlah** | | **4.531.819.429,00** |
| **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | Belanja Pakaian Adat Daerah - Belanja Pengadaan Pakaian Adat Daerah | 49.940.000,00 |
| | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - Belanja Pengadaan Pakaian Dinas | 19.250.000,00 |
| | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial | 199.885.000,00 |
| **Jumlah** | | **269.075.000,00** |
| **Total Utang Belanja TA 2021** | **47.769.123.966,00** | |

Dari tabel diatas diketahui saldo Mutasi Tambah Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.769.123.966,00.

### C.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang Belanja Modal Tahun Anggaran berkenaan. Selain bagian lancar utang jangka panjang. utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*). utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). utang bunga dan uang muka. Utang jangka pendek lainnya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp71.205.801.098,32.

**Tabel 191**
**Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *Uraian* | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Utang Jangka Pendek Lainnya*** | 99.044.000,00 | 71.106.757.098,32 | 0,00 | 71.205.801.098,32 |
| ***Jumlah*** | **99.044.000,00** | **71.106.757.098,32** | **0,00** | **71.205.801.098,32** |

Dari tabel diatas diketahui saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp71.205.801.098,32. Berikut rincian saldo utang jangka pendek lainnya tersebut.

**Tabel 192**
**Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya pada SKPD Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **DINAS KESEHATAN. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya - Belanja APD Non Set/Coveral | 150.282.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya - Belanja Pengadaan Oxigen Central | 2.654.700.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya - Belanja Pengadaan Advence Elektro Cardio Grafh | 127.978.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya - Pengadaan Kapal Puskesmaas Keliling | 3.035.618.600,00 |
| | Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya - Belanja APD | 479.050.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya - Belanja Pengadaan Pulse Oximeter Penanganan Covid-19 | 44.527.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Belanja Bidan Kit Puskesmas Palmatak (1 Paket) | 6.203.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Belanja Bidan Kit Puskesmas Letung (1 Paket) | 3.897.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Belanja Bidan Kit Puskesmas Jemaja Timur (1 Paket) | 4.596.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Belanja Bidan Kit Puskesmas Siantan Selatan (1 Paket) | 4.596.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Belanja Bidan Kit Puskesmas Siantan Tengeh (1 Paket) | 6.203.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Belanja Bidan Kit Puskesmas Siantan Timur (1 Paket) | 3.176.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Keperawatan KIT Puskesmas Siantan Selatan | 1.309.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Belanja Bidan Kit Puskesmas Siantan Selatan (1 Paket) | 2.471.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Belanja Bidan Kit Puskesmas Letung (1 Paket) | 2.515.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Belanja Bidan Kit Puskesmas Siantan Timur (1 Paket) | 2.471.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Set Umum Puskesmas Palmatak (1 Paket) | 1.890.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Keperawatan KIT Puskesmas Palmatak | 1.309.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Belanja Bidan Kit Puskesmas Siantan Timur (1 Paket) | 716.000,00 |
| | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat - Belanja Kursi Rapat Rapat UPT Puskesmas Palmatak | 91.575.000,00 |
| | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya - Belanja Modal Pengadaan Laptop UPT Puskesmas Palmatak | 52.800.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Belanja Bidan Kit Puskesmas Palmatak | 3.389.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Belanja Bidan Kit Puskesmas Jemaja Timur | 1.877.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Keperawatan KIT Alat Tes Darah Puskesmas Siantan Timur (1 Paket) | 1.085.959,00 |
| | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Lansia KIT Alat Tes Darah Puskesmas Jemaja Timur (1 Paket) | 1.085.959,00 |
| | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Keperawatan KIT Alat Tes Darah Puskesmas Siantan Selatan (1 Paket) | 1.085.959,00 |
| | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Lansia KIT Alat Tes Darah Puskesmas Siantan Tengah (1 Paket) | 1.085.959,00 |
| | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Keperawatan KIT Alat Tes Darah Puskesmas Siantan Selatan (1 Paket) | 1.085.959,00 |
| | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Keperawatan KIT Alat Tes Darah Puskesmas Siantan Tengah (1 Paket) | 1.085.959,00 |
| | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Lansia KIT Alat Tes Darah Puskesmas Letung (1 Paket) | 1.085.959,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Lansia KIT Alat Tes Darah Puskesmas Palmatak (1 Paket) | 1.085.959,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Keperawatan KIT Alat Tes Darah Puskesmas Jemaja Timur (1 Paket) | 1.085.959,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Belanja UKS Kit Speculum Vagina (Cocor Bebek) Puskesmas Jemaja Timur | 864.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Keperawatan KIT Pinset Anatomis Puskesmas Siantan Timur (1 Paket) | 347.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Belanja UKS Kit Speculum Vagina (Cocor Bebek) Puskesmas Siantan Tengah | 864.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Keperawatan KIT Puskesmas Siantan Tengah (1 Paket) | 1.309.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan UKS Kit Puskesmas Siantan Selatan (1 Paket) | 2.702.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Set Umum Puskesmas Siantan Selatan (1 Paket) | 1.890.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Keperawatan KIT Puskesmas Jemaja Timur (1 Paket) | 436.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Keperawatan KIT Puskesmas Letung (1 Paket) | 716.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Keperawatan KIT Puskesmas Letung (1 Paket) | 873.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan UKS Kit Puskesmas Jemaja Timur (1 Paket) | 2.702.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - Belanja Bidan Kit Puskesmas Siantan Selatan | 941.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Keperawatan KIT Puskesmas Siantan Tengah (1 Paket) | 716.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Set Umum Puskesmas Siantan Selatan (1 Paket) | 734.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan UKS Kit Puskesmas Siantan Timur (1 Paket) | 127.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Keperawatan KIT Puskesmas Jemaja Timur (1 paket) | 716.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan UKS Kit Puskesmas Siantan Tengah (1 Paket) | 2.652.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Set Umum Puskesmas Palmatak (1 Paket) | 1.156.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Keperawatan KIT Puskesmas Siantan Selatan (1 Paket) | 247.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan UKS Kit Puskesmas Siantan Tengah (1 Paket) | 127.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Set Umum Puskesmas Letung (1 Paket) | 734.000,00 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Set Umum Puskesmas Jemaja Timur (1 Paket) | 1.890.000,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Pembangunan Gedung Oxigen Central RSUD Palmatak | 648.830.000 |
| | Belanja modal Alat Kedokteran Lainnya - Belanja Pengadaan Keperawatan KIT Puskesmas Siantan Timur | 369.000,00 |
| **Jumlah** | | **7.364.864.231.00** |
| **DINAS PEKERJAAN UMUM PRPRKP** | Belanja Modal Pompa - Belanja Terminj 100% Pengadaan Mesin Pompa Air Operasional SPAM | 72.050.000,00 |
| | Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Terminj 100% Pembangunan Jalan SP II Kecamatan Siantan | 7.127.109.699,69 |
| | Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut - Belanja Terminj 100% Pembangunan Drainase RT.002/001 Desa Batu Berapit | 139.774.342,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Belanja Terminj 100% Pembangunan Batu Miring Jl. Soekarno Hatta Gang Petai RT.11 RW.004 Rintis Hulu | 98.943.059,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Belanja Terminj 100% Pemasangan Batu Miring Sungai RT.012/04 Dekat Rumah Jaen Rintis | 153.811.572,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Belanja Terminj 100% Pembangunan Batu Miring Sungai Lapangan Sepak Bola RT.012/004 Rintis | 199.451.489,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam - Belanja Terminj 100% Pemasangan Batu Miring Aliran Sungai Rintis RT.012/04 | 164.701.694,00 |
| | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa - Belanja Terminj 100% Pembangunan Jalan Lingkungan Letung | 1.244.694.700,00 |
| | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa - Belanja Terminj 100% Pengawasan Jalan Lingkungan Se Kabupaten Kepulauan Anambas | 49.907.000,00 |
| | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa - Belanja Terminj 100% Pembangunan Gang Sidik RT.01 Rw.01 Desa Piabung | 198.325.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa - Belanja Terminj 100% DED Lanjutan Pelantar Beton Nyodong - Payalaman Desa Batu Ampar | 97.405.000,00 |
| | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa - Belanja Terminj 100% DED Jalan Lingkar Desa Batu Belah | 57.088.900,00 |
| | Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Terminj 100% Pembangunan Box Culvert Jala Pasir Peti - Konjo | 197.030.000,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Terbuka - Belaja Terminj 100% DED Sarana Prasarana dan Utilitas Rumah Khusus | 59.508.900,00 |
| | Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Terminj 100% Pembangunan Jalan Raja Hamidah Kelurahan Tarempa | 1.248.584.656,85 |
| | Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya - Pengadaan Barang Pemeliharaan Drainase Perkotaan (Swakelola) | 26.267.300,00 |
| | Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut - Belanja Terminj 100% Pembangunan Drainase Simpang Jl. H. Muhammad Siantan Air Padang | 177.714.000,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya - Pemeliharaan Drainase Perkotaan (Swakelola) | 23.550.000,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum - Belanja Terminj 100% Pembangunan Gapura Kampung Bahari Nusantara Desa Batu Belah dan Desa Temburun | 52.479.000,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Terbuka - Belaja Terminj 100% DED Astaqa Mesjid Agung Kabupaten Kepulauan Anambas | 98.450.000,00 |
| | Belanja Modal Jalan Khusus - Belanja Terminj 100% DED Jalan Lingkungan dan Dinding Penahan Tanah Polres Kabupaten Kepulauan Anambas | 98.230.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Belanja Modal Penampung Air | 9.240.000,00 |
| | Belanja Modal Jalan Khusus - Belanja Terminj 100% DED Jalan Komplek Perkantoran Pasir Peti | 97.680.000,00 |
| | Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Terminj 100% Peningkatan Jalan Simpang Letung - Kaula Maras | 1.701.779.093,00 |
| | Belanja Modal Jalan Kabupaten - Belanja Terminj 100% Peningkatan Jalan Simpang Letung - Landak | 1.189.353.529,00 |
| | Peningkatan Pembangunan Jalan SP Air Padang (Tl Rit) - SP Simpang SMP 1 (Tg Angkak) - Jalan SP2 | 2.880.844.634,00 |
| | Rekonstruksi Jalan Ahmad Yani Laut Kecamatan Siantan | 1.580.855.897,00 |
| | Peningkatan Jalan Genting - Air Bini Kecamatan Siantan Selatan (DAK Reguler) | 1.090.968.297,00 |
| | Lanjutan Pembangunan Mesjid Antang Desa Tarempa Timur | 294.865.014,00 |
| | Lanjutan Ravitaslisasi Mesjid Nurul Ikhsan Daesa Tarempa Barat Kec Siantan | 716.201.061,00 |
| | Lanjutan Pembukaan dan Peningkatan Jalan Impol Sunggak (Tahap 2) | 3.268.077.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Lanjutan Pembukaan dan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bajau Kacamatan Siantan Timur (Tahap IV) | 6.403.341.945,00 |
| | Lanjutan Peningkatan Jalan Mampok -Air Biru | 2.666.000.000,00 |
| | Pembangunan Jalan Genting Dusun -Teluk Kaut -Air Sungkit - Atap (Tahap 2) | 2.672.000.000,00 |
| | Pembangunan Jalan Matak - Nuan -Teluk Durian (Tahap I) | 3.553.124.000,00 |
| | Pembangunan Jalan Rewak - Sedanau | 2.639.099.358,00 |
| | Peningkatan Jalan Payalaman - Rumah Sakit Lapangan -Pelabuhan Payalaman | 5.787.371.036,00 |
| | Peningkatan Jambatan Piabung Kec Palmatak | 2.590.358.000,00 |
| | Penambahan Belanja Pembebasan Lahan Embung Gunung Lintang | 80.343.000,00 |
| **Jumlah** | | **50.806.578.176,54** |
| **DINAS PENDIDIKAN. PEMUDA DAN OLAHRAGA** | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat - Belanja Modal Pengadaan Lemari Sekolah Dasar Negeri Palmatak | 140.085.000,00 |
| | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat - Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat | 194.594.400,00 |
| | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Belanja Modal Pengadaan Teralis SMPN Desa Batu Belah Siantan Timur | 127.999.300,00 |
| | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat - Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi untuk Anak - anak Guru TK Negeri Desa Kuala Maras Jemaja Timur - Meja Kerja | 43.835.000,00 |
| | Belanja Modal Mebel - Belanja Modal PengadaanMeja Kursi untuk Anak - anak Guru TK Negeri Desa Kuala Maras Jemaja Timur | 75.229.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Study - Belanja Pengadaan Perlengkapan Alat - alat Olahraga Bela Diri Siswa SMPN se Kab. Kep. Anambas | 37.950.000,00 |
| | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya - Belanja Pengadaan Perlengkapan Alat - alat Olahraga Bela Diri Siswa SMPN se-Kab. Kep. Anambas | 157.685.000,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Lanjutan Pemasangan Paving Blok SMPN 5 Arung Hijau Desa Tiangau | 194.228.700,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Lanjutan Pembangunan Pagar SD 07 Dusun Muntai Desa Teluk Siantan | 118.700.800,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pembangunan Batu Miring dan Penimbunan SDN Arung Hijau | 198.816.900,00 |
| | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat - Belanja Pengadaan Meubelair SDN 004 Batu Tambun Siantan | 37.785.000,00 |
| | Belanja Modal Mebel - Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur Ruang UKS | 172.557.000,00 |
| | Belanja Modal Mebel - Belanja Modal Pengadaan Meubelair SDN 004 Batu Tambun (Meja Kerja) | 30.937.500,00 |
| | Belanja Modal Buku Ilmu Sosial - Belanja Pengadaan Buku Perpustakaan | 59.475.000,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pemasangan Paving Blok SMPN Dusun | 198.938.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Belanja Modal Penimbunan SMPN 4 Genting Siantan Selatan | 118.320.500,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Belanja Modal Pembangunan Batu Miring SMPN 5 Batu Belah Siantan Timur | 198.971.500,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Belanja Modal Pembangunan Batu Miring PAUD Genting Pulur | 195.150.700,00 |
| | Belanja Modal Mebel - Belanja Modal Kusri Belajar PAUD dan Meja Belajar PAUD | 198.495.000,00 |
| | Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya - Belanja Pengadaan Peralatan olahraga Lainnya | 2.530.000,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Belanja Modal Pembangunan Pagar SDN 005 Lingai Lengke Siantan Selatan | 184.078.100,00 |
| **Jumlah** | | **2.686.362.400,00** |
| **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN** | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Belanja Modal Pengadaan Proyektor dan Layar Proyektor | 9.328.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Belanja Modal Sound Sistem Rapat | 38.445.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Belanja Modal Speaker Aktif | 18.755.000,00 |
| | Belanja Modal Peralatan Personal Komputer - Belanja Pengadaan Printer | 8.690.000,00 |
| | Belanja Modal Peralatan Personal Komputer - Belanja Pengadaan Scanner | 6.160.000,00 |
| | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat - Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat | 49.940.000,00 |
| | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat - Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat | 22.770.000,00 |
| | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat - Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat | 155.941.500,00 |
| **Jumlah** | | **310.029.500,00** |
| **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | Belanja Modal Personal Komputer - Belanja Pengadaan PC | 24.992.000,00 |
| **Jumlah** | | **24.992.000,00** |
| **DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP** | Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal - Belanja Terminj 100% Tambatan Perahu Nelayan Dusun Teluk Rong RT.05 RW.02 Desa Serat | 199.858.000,00 |
| | Belanja Modal Pagar - Belanja Terminj 100% Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman (Guardrail) Desa Air Bini | 193.560.000,00 |
| | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar - Belanja Terminj 100% Pengadaan dan Pemasangan Patok Tikungan di Kecamatan Jemaja | 178.930.000,00 |
| | Belanja Modal Rambu Bersuar - Belanja Terminj 100% Lanjutan Pembangunan Batu Miring dan Semenisasi Gang Eleng Desa Munjan Siantan Timur | 52.189.000,00 |
| | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - Belanja Pengadaan Bermotor Beroda Tiga (Modifikasi 150CC) | 165.000.000,00 |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - Belanja Pengadaan Bermotor Beroda Tiga (Modifikasi 150CC) | 55.000.000,00 |
| | Belanja Modal Peralatan Selam - Belanja Terminj 100% Belanja Pengadaan Peralatan Selam | 192.060.000,00 |
| | Belanja Modal Mesin Proses - Belanja Termin 100% Pengadaan Mesin Pemotong Rumput | 2.629.000,00 |
| | Belanja modal Perkakas Bengkel Kayu - Belanja Terminj 100% Pengadaan Mesin Chain Saw Rumput | 2.497.000,00 |
| | Belanja Modal Rambu Bersuar - Belanja Terminj 100% Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan di Kecamatan Palmatak dan Kute Siantan | 196.133.000,00 |
| | Belanja Modal Rambu Bersuar - Belanja Terminj 100% Pemasangan Rambu Jalan di Kecamatan Siantan. Siantan Selatan. dan Siantan Timur | 198.201.000,00 |
| | Belanja Modal Pagar - Belanja Terminj 100% Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman (Guardrail) Desa Batu Ampar | 193.860.000,00 |
| | Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal - Belanja Terminj 100% Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu RT.06 RW.02 Munjan | 181.226.000,00 |
| | Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal - Belanja Terminj 100% Tambatan Perahu Dusun Air Bandung Desa Bayat | 199.530.000,00 |
| | Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal - Belanja Terminj 100% Revitalisasi Dermaga Rakyat Desa Telaga Kecil Siantan Selatan | 2.109.233.478,00 |
| | Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal - Belanja Terminj 100% Tambatan Perahu Gang Eleng Desa Munjan Siantan Timur | 198.933.000,00 |
| | Bekanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang - Belanja Terminj 100% Pengadaan Gerobak Sorong | 2.750.000,00 |
| | Belanja Modal Rambu Bersuar - Belanja Terminj 100% Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya Desa Aatu Ampar | 199.700.000,00 |
| | Pembangunan pelabuhan gudang logistik kecamatan siantan | 1.618.331.766,11 |
| **Jumlah** | | **6.139.621.244,11** |
| **DINAS KOMUNIKASI. INFORMATIKA DAN STATISTIK** | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Belanja Terminj 100% Bangunan Gedung Kantor Network Operation Centre (NOC) | 293.536.800,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi - Belanja Terminj 100% Bangunan Menara Telekomunikasi | 544.809.000,00 |
| | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film - Belanja Pengadaan Kamera Mirrorless | 43.450.000,00 |
| **Jumlah** | | **881.795.800,00** |
| **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP. TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA** | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat - Belanja Pengadaan Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 16.126.000,00 |
| **Jumlah** | | **16.126.000,00** |

| SKPD | Nama Pekerjaan | Nilai Utang Beban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO. PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN** | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 2.015.372.696,67 |
| **Jumlah** | | **2.015.372.696,67** |
| **DINAS PERIKANAN. PERTANIAN DAN PANGAN** | Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - DED Pembangunan Pelantar Tempat Pendaratan Ikan | 89.760.000,00 |
| **Jumlah** | | **89.760.000,00** |
| **SEKRETARIAT DPRD** | Belanja Modal Peralatan Personal Komputer - Belanja Pengadaan Personal Komputer | 88.770.000,00 |
| | Belanja Modal Lemari dan Arsip - Belanja Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat | 198.000.000,00 |
| | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya - Belanja Pengadaan Kabel Kamera | 4.096.950,00 |
| | Belanja modal Alat Pendingin - Belanja Pengadaan AC | 9.240.000,00 |
| | Belanja Modal Personal Komputer - Belanja Pengadaan Personal Komputer | 40.040.000,00 |
| | Belanja Modal Peralatan Personal Komputer - Belanja Pengadaan Laptop | 20.020.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Belanja Modal Pengadaan Figura | 23.342.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Studio lainnya - Belanja Pengadaan Peralatan Studio | 9.889.000,00 |
| **Jumlah** | | **393.397.950,00** |
| **KECAMATAN JEMAJA TIMUR** | Belanja modal Alat Pendingin - Belanja Pengadaan AC | 13.167.000 |
| | Belanja Modal Personal Komputer - Belanja Pengadaan Laptop | 55.974.600,00 |
| | Belanja Modal Peralatan Personal Komputer - Belanja Pengadaan Printer | 17.919.000,00 |
| | Belanja Modal Personal Komputer - Belanja Pengadaan PC All In One | 34.485.000,00 |
| **Jumlah** | | **121.545.600,00** |
| **SIANTAN TENGAH** | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Belanja Modal Pengadaan Gorden | 29.700.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium | 5.401.500,00 |
| **Jumlah** | | **35.101.500,00** |
| **KECAMATAN KUTE SIANTAN** | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat - Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat | 29.370.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium | 5.115.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Belanja Modal Pengadaan Panggung Rengging | 180.125.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Dapur | 6.600.000,00 |
| **Jumlah** | | **221.210.000,00** |
| **Total Utang Jangka Pendek Lainnya** | | **71.106.757.098,32** |

Berdasarkan tabel diatas masih terdapat utang jangka pendek lainnya pada Tahun 2021 yang belum dilakukan pelunasan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Anambas. maka pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan penganggaran kembali dan melakukan pelunasan atas utang jangka pendek lainnya dan apabila ada kewajiban Pihak Ketiga terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. maka akan dilakukan pemotongan dari SP2D Pelunasan atas Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun Anggaran 2021.

### C.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pada Tahun Anggaran 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak memiliki kewajiban jangka panjang yang akan dibayar pada masa mendatang.

## C.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.852.464.931.281,02 dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp1.978.959.352.436,22.

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Saldo Ekuitas dan Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.971.528.856.345,34 dibandingkan Ekuitas dan Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.980.524.476.318,22 mengalami Penurunan sebesar Rp8.995.619.972,88 atau sebesar 0,45%. hal ini disebabkan adanya Penambahan Kewajiban Jangka Pendek pada Tahun Anggaran 2021.

**Tabel 193**
**Ekuitas Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Ekuitas** | 1.852.464.931.281,02 | 1.978.959.352.436,22 |
| Jumlah Ekuitas | **1.852.464.931.281,02** | **1.978.959.352.436,22** |

# D. LAPORAN OPERASIONAL

## D.7 Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan Daerah - LO digunakan untuk mencatat penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah. dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Akun Pendapatan Daerah - LO diklasifikasikan menurut kelompok yaitu Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO. Pendapatan Transfer - LO. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO. serta Surplus Non Operasional - LO.

**Tabel 194**

**Realisasi Pendapatan Daerah-LO Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO | 33.639.457.344,96 | 31.762.826.786,49 | 1.876.630.558,47 | 5,91 |
| **2** | Pendapatan Transfer-LO | 758.227.080.147,00 | 810.875.640.376,00 | (52.648.560.229,00) | (6,49) |
| **3** | Pendapatan Lain-Lain Yang Sah-LO | 13.183.312.366,22 | 14.919.027.126,00 | (1.735.714.759,78) | (11,63) |
| | **JUMLAH** | **805.049.849.858,18** | **857.557.494.288,49** | **(52.507.644.430,31)** | **(6,12)** |

Realisasi Pendapatan Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp805.049.849.858,18 mengalami penurunan sebesar 52.507.644.430,31 atau 6,12% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp857.557.494.288,49. Masing-masing akun-akun yang terdapat pada Pendapatan Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

## D.7.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Akun PAD ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp33.652.220.509,44 dibandingkan dengan Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp31.762.826.786,49 mengalami kenaikan sebesar Rp1.889.393.722,95 atau mengalami peningkatan sebesar 5,95% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 195**
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Pendapatan Asli Daerah | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Pendapatan Pajak Daerah- LO | 13.420.664.454,79 | 14.281.880.533,69 | -861.216.078,90 | (6,03) |
| **2** | Pendapatan Retribusi Daerah-LO | 4.734.729.214,83 | 3.498.208.517,48 | 1.236.520.697,35 | 35,35 |
| **3** | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO | 1.979.148.878,00 | 1.318.019.763,00 | 661.129.115,00 | 50,16 |
| **4** | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO | 13.504.914.797,34 | 12.664.717.972,32 | 840.196.825,02 | 6,63 |
| | **JUMLAH** | **33.639.457.344,96** | **31.762.826.786,49** | **1.876.630.558,47** | **5,91** |

### D.7.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual. pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2021. sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2021 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2021. Pembayaran atas piutang Tahun

sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp13.420.664.454,79 dibandingkan dengan Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp14.281.880.533,69 mengalami penurunan sebesar Rp861.216.078,90 atau sebesar (6,03%) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 196**
**Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Pendapatan Pajak Daerah | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pajak Hotel – LO | 570.485.383,01 | 1.376.491.504,00 | (806.006.120,99) | (58,56) |
| 2 | Pajak Restoran – LO | 689.948.536,00 | 751.728.950,00 | (61.780.414,00) | (8,22) |
| 3 | Rumah Makan – LO | 222.432.950,00 | 216.396.590,00 | 6.036.360,00 | 2,79 |
| 4 | Kantin – LO | 1.585.600,00 | 1.978.500,00 | (392.900,00) | (19,86) |
| 5 | Pajak Warung – LO | 71.558.776,00 | 0,00 | 71.558.776,00 | 0,00 |
| 6 | Katering – LO | 6.964.279.726,00 | 8.184.276.263,00 | (1.219.996.537,00) | (14,91) |
| 7 | Pajak Kontes Kecantikan. Binaraga – LO | 299.200,00 | 0,00 | 299.200,00 | 100,00 |
| 8 | Kedai Kopi – LO | 0,00 | 97.260.036,00 | (97.260.036,00) | (100,00) |
| 9 | Pajak Diskotik. Karaoke. Club Malam. dan Sejenisnya – LO | 22.464.800,00 | 39.732.210,00 | (17.267.410,00) | (43,46) |
| 10 | Permainan Bilyar. Golf dan Bowling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Pacuan Kuda. Kendaraan Bermotor. Permainan Ketangkasan - LO | 0,00 | 5.679.600,00 | (5.679.600,00) | (100,00) |
| 12 | Pajak Panti Pijat. Refleksi. Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Centre)-LO | 3.163.000,00 | 906.200,00 | 2.256.800,00 | 249,04 |
| 13 | Tontonan Film/Bioskop - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Pajak Reklame – LO | 16.244.000,00 | 13.661.260,00 | 2.582.740,00 | 15,89 |
| 15 | Pajak Reklame Kain - LO | | 0.00 | | |
| 16 | Pajak Penerangan Jalan PLN – LO | 3.125.524.601,00 | 2.069.438.604,00 | 1.056.085.997,00 | 33,78 |
| 17 | Pajak Penerangan Jalan Non PLN – LO | 192.892.428,00 | 221.579.272,00 | (28.686.844,00) | (14,87) |
| 18 | Pajak Air Tanah – LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Pajak Sarang Burung Walet | 4.000.000,00 | 9.600.000,00 | (5.600.000,00) | (58,33) |
| 20 | Granit/Andesit - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Pasir dan kerikil - LO | 0,00 | 236.458.186,13 | (236.458.186,13) | (100,00) |
| 22 | Tanah Liat - LO | 0,00 | 36.955.178,56 | (36.955.178,56) | (100,00) |
| 23 | Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan – LO | 151.799.163,78 | 0,00 | 151.799.163,78 | 100,00 |
| 24 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan – LO | 544.976.019,00 | 549.861.319,00 | (4.885.300,00) | (0,90) |
| 25 | BPHTB-Pemindahan Hak-LO | 419.233.897,00 | 0,00 | 419.233.897,00 | 100,00 |

| No | Pendapatan Pajak Daerah | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO | 419.776.375,00 | 0,00 | 419.776.375,00 | 100,00 |
| 27 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO | 0,00 | 469.876.861,00 | (469.876.861,00) | (100,00) |
| **JUMLAH** | | **13.420.664.454,79** | **14.281.880.533,69** | **(861.216.078,90)** | **(6,03)** |

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah pada LO dengan Pendapatan Asli Daerah pada LRA sebagai berikut.

**Tabel 197**
**Perbedaan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | LO | LRA | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | Pendapatan Pajak Daerah | 13.420.664.454,79 | 13.248.704.027,79 | 171.960.427,00 |
| | ***Jumlah*** | **13.420.664.454,79** | **13.248.704.027,79** | **171.960.427,00** |

Berdasarkan tabel diatas terdapat Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dengan Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun 2021 adalah sebesar Rp171.960.427,00 yang merupakan Penambahan Piutang PBB-P2 Tahun 2021. sebesar Rp547.470.248,00 dan Pengurangan Piutang Pajak PBB-P2 sebesar Rp375.509.821,00

### D.7.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dipungut dan dikelola oleh 5 (lima) SKPD penghasil yaitu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman. Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian. dan Dinas Penanaman Modal PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp4.734.729.214,83 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.236.520.697,35 atau sebesar 35,35% dibandingkan dengan Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp3.498.208.517,48 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 198**
**Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Pendapatan Retribusi Daerah | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas – LO | 201.541.900,00 | 167.629.711,00 | 33.912.189,00 | 20,23 |
| **2** | Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah - LO | 4.178.977.300,00 | 2.941.517.500,00 | 1.237.459.800,00 | 42,07 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | Penyediaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum - LO | 74.336.000,00 | 75.045.000,00 | (709.000,00) | (0,94) |
| **4** | Retribusi Los – LO | 50.287.840,00 | 0,00 | 50.287.840,00 | 100,00 |
| **5** | Retribusi Kios - LO | 194.419.820,00 | 259.841.142,00 | (65.421.322,00) | (25,18) |
| **6** | Pelayanan Jasa Pelabuhan - LO | 14.196.000,00 | 41.387.000,00 | (27.191.000,00) | (65,70) |
| **7** | Pemberian Izin Mendirikan Bangunan – LO | 20.970.354,83 | 12.763.164,48 | 8.207.190,35 | 64,30 |
| **8** | Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO | 0,00 | 25.000,00 | (25.000,00) | (100,00) |
| **JUMLAH** | | **4.734.729.214,83** | **3.498.208.517,48** | **1.236.520.697,35** | **35,35** |

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah pada LO dengan Pendapatan Asli Daerah pada LRA sebagai berikut.

**Tabel 199**
**Perbedaan Realisasi Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | LO | LRA | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | Pendapatan Retribusi Daerah | 4.734.729.214,83 | 4.731.456.914,83 | 3.272.300,00 |
| | ***Jumlah*** | **4.734.729.214,83** | **4.731.456.914,83** | **3.272.300,00** |

Berdasarkan tabel diatas terdapat Selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.272.300,00 yang merupakan pengakuan Utang BPJS sebesar Rp8.460.000,00 dan Pelunasan Piutang Retribusi Tahun 2020 yang diterima Tahun 2021 sebesar (Rp5.187.700,00).

### D.7.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini adalah Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Bank Riau Kepri. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2021 yang merupakan hasil pembagian deviden Tahun 2020 sebesar Rp1.979.148.878,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.318.019.763,00 mengalami kenaikan sebesar Rp661.129.115,00 atau sebesar 50,16%. tidak terdapat perbedaan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada LRA. berikut rinciannya.

**Tabel 200**
**Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Kenaikan /Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| *1* | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri - LO | 1.979.148.878,00 | 1.318.019.763,00 | 661.129.115,00 | 50,16 |
| | ***JUMLAH*** | **1.979.148.878,00** | **1.318.019.763,00** | **661.129.115,00** | **50,16** |

Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO dengan Pendapatan Asli Daerah - LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 201**
**Perbedaan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | LO | LRA | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1.979.148.878,00 | 1.979.148.878,00 | 0,00 |
| | ***Jumlah*** | **1.979.148.878,00** | **1.979.148.878,00** | **0,00** |

Berdasarkan tabel diatas tidak terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA Tahun 2021.

### D.7.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Lain-lain PAD Yang Sah-LO. merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp13.504.914.797,34 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.664.717.972,32 mengalami peningkatan sebesar Rp840.196.825,02 atau sebesar 6,63%. Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 202**
**Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Kenaikan /Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Sewa BMD-LO | 104.589.000,00 | 0,00 | 104.589.000,00 | 100,00 |
| **2** | Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | Jasa Giro Daerah - LO | 971.957.980,94 | 1.716.309.878,00 | (744.351.897.06) | (43.37) |
| **4** | Jasa Giro Kas Bendahara - LO | 0,00 | 33.826.234,00 | (33.826.234,00) | (100,00) |
| **5** | Pendapatan Bunga Deposito - LO | 0,00 | 707.871.841,00 | (707.871.841,00) | (100,00) |
| | Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO | 1.052.031.236,19 | 0,00 | 1.052.031.236,19 | 100,00 |
| **6** | Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO | 188.274.952,00 | 188.274.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO | 197.416,00 | 0,00 | 197.416,00 | 100,00 |
| **7** | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO | 88.494.727,00 | 36.853.456,00 | 51.641.271,00 | 140,13 |
| **8** | Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO | 0,00 | 33.788.111,00 | (33.788.111,00) | (100,00) |
| | Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LO | 33.527.728,00 | 0,00 | 33.527.728,00 | 100,00 |
| **9** | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan – LO | 2.994.375,00 | 3.083.499,00 | (89.124,00) | (2,89) |
| **10** | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas – LO | 3.000.000,00 | 28.927.308,00 | (25.927.308,00) | (89,63) |
| **11** | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK-LO | 7.862.269.156,96 | 0,00 | 7.862.269.156,96 | 100,00 |
| **12** | Pendapatan dari Pengembalian Barang dan Jasa – LO | 0,00 | 618.235.852,00 | (618.235.852,00) | (100,00) |
| **13** | Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tidak Langsung (BTL) – LO | 0.00 | 63.055.288,00 | (63.055.288,00) | (100,00) |
| **14** | Pendapatan dari Pengembalian Kesalahan Pembayaran Atau Perhitungan – LO | 0,00 | 334.000,00 | (334.000,00) | (100,00) |

| No | Uraian | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Kenaikan /Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **15** | Pendapatan dari Pengembalian Kesalahan Pembayaran PT. Taspen – LO | 0,00 | 24.473.297,00 | (24.473.297,00) | (100,00) |
| **16** | Pendapatan dan Pengembalian Kerugian Ke Kas Daerah (TP/TGR) | 0,00 | 5.800.221.047,72 | (5.800.221.047,72) | (100,00) |
| **17** | Pendapatan dari Pengembalian Lainnya di Tahun Sebelumnya | 0,00 | 709.595.650,60 | (709.595.650,60) | (100,00) |
| **18** | Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO | 235.563.104,00 | 0,00 | 235.563.104,00 | 100,00 |
| **19** | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat – LO | 158.336.996,25 | 33.585.255,00 | (124,751,741,25) | |
| **20** | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO | 2.803.678.125,00 | 0,00 | 2.803.678.125,00 | 100,00 |
| **21** | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tarempa – LO | 0,00 | 723.930.050,00 | (723.930.050,00) | (100,00) |
| **22** | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Palmatak – LO | 0,00 | 844.206.753,00 | (844.206.753,00) | (100,00) |
| **23** | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Siantan Timur – LO | 0,00 | 248.508.400,00 | (248.508.400,00) | (100,00) |
| **24** | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Siantan Selatan – LO | 0,00 | 220.760.900,00 | (220.760.900,00) | (100,00) |
| **25** | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Jemaja Timur – LO | 0,00 | 149.661.400,00 | (149.661.400,00) | (100,00) |
| **26** | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Letung - LO | 0,00 | 293.092.900,00 | (293.092.900,00) | (100,00) |
| **27** | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Siantan Tengah – LO | 0,00 | 184.796.900,00 | (184.796.900,00) | (100,00) |
| **28** | Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKRTL RS. Lapangan – LO | 0,00 | 1.325.00,00 | (1.325.00,00) | (100,00) |
| **JUMLAH** | | **13.504.914.797,34** | **12.664.717.972,32** | **840.196.825,02** | **6,63** |

Penjelasan Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada LO dengan Pendapatan Asli Daerah pada LRA sebagai berikut.

**Tabel 203**
**Perbedaan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah LO dan LRA Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | LO | LRA | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | Lain-Lain PAD Yang Sah | 13.504.914.797,34 | 13.365.742.442,34 | 139.172.355,00 |
| | ***Jumlah*** | **13.504.914.797,34** | **13.365.742.442,34** | **139.172.355,00** |

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Lain-lain PAD Yang Sah - LRA dengan Lain-lain PAD Yang Sah-LO Pada Tahun 2021 sebesar Rp139.172.355,00 yang terdiri dari antara lain sebesar Rp113.633.285,00 yang merupakan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yaitu Penerimaan Pokok dan Bunga Dana Bergulir kepada Masyarakat yang tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) s.d. 31 Desember 2021 dan Penambahan Pencatatan Piutang Pendapatan Denda PBBP2 - LO Sebesar Rp61.539.070,00. Serta Pengurangan Penyesuaian Pendapatan Yang Di Terima di Muka atas Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan PT. Telkom untuk Lahan Hand Hole sebesar Rp36.000.000,00.

## D.7.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku SKPKD-PPKD. Adapun realisasi Pendapatan Transfer - LO untuk periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp807.579.853.011,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.295.787.365,00 atau sebesar (0,41%) dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yang terealisasi sebesar Rp810.875.640.376,00. Berikut dapat kami ungkapkan Pendapatan Transfer-LO dari 2 (dua) sumber. yaitu dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 204**
**Realisasi Pendapatan Transfer (Pemerintah Pusat) – LO Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan-LO) | 624.335.477.614,00 | 727.958.745.679,00 | (103.623.268.065,00) | (14,23) |
| **2** | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Insentif Daerah (DID)-LO) | 65.907.002.000,00 | 25.151.920.000,00 | 40.755.082.000,00) | 162,04 |
| **JUMLAH** | | **690.242.479.614,00** | **753.110.665.679,00** | **(62.868.186.065,00)** | **(8,35)** |

**Tabel 205**
**Realisasi Pendapatan Transfer (Pemerintah Provinsi Kepri – LO Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Transfer Pemerintah Provinsi (Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kepri) | 54.484.600.533,00 | 37.264.974.697,00 | 17.219.625.836,00 | 46,21 |
| **2** | Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya (Bantuan Keuangan dari Provinsi Kepri | 13.500.000.000,00 | 20.500.000.000,00 | (7.000.000.000,00) | (34,15) |
| **JUMLAH** | | **67.984.600.533,00** | **57.764.974.697,00** | **10.219.625.836,00** | **(17,70)** |

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer-LO dengan Pendapatan Transfer - LRA sebagai berikut.

**Tabel 206**
**Perbedaan Realisasi Pendapatan Transfer LO dan LRA Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | LO | LRA | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Pendapatan Transfer | 758.227.080.147,00 | 799.054.499.127,00 | (40.827.418.980,00) |
| Jumlah | | **758.227.080.147,00** | **799.054.499.127,00** | **(40.827.418.980,00)** |

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Transfer - LRA dengan Pendapatan Transfer - LO Pada Tahun 2021 sebesar Rp40.827.418.980,00 terdiri dari :

1. Terdapat Pengurangan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas SK Gubernur Prov Kepri Nomor 221 Tahun 2022 tentang Perhitungan Tunda Salur Bagi Hasil PKB. BBNKB. PBBKB. Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok sebesar Rp12.324.204.874,00;
2. Terdapat Pendapatan Dana Desa tidak dicatat dan diakui sebagai Pendapatan - LO sedangkan pada Pendapatan – LRA diakui sebagai Pendapatan sebesar

Rp53.151.623.854,00 ketentuan tersebut mengacu pada Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### D.7.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Realiasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sampai dengan 31 Desember 2021 secara total terealisasi sebesar Rp690.242.479.614,00 mengalami penurunan sebesar Rp62.868.186.065,00 atau sebesar 8,35%. bila dibandingkan pada Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp753.110.665.679,00 yaitu (Dana Perimbangan-LO sebesar Rp727.958.745.679,00 ditambah dengan Dana Otonomi Khusus-LO sebesar Rp25.151.920.000,00) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 207**
**Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan – LO | 0,00 | 133.920.409.192,00 | (133.920.409.192,00) | (100,00) |
| 2 | Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan | 0,00 | 58.309.110,00 | (58.309.110,00) | (100,00) |
| 3 | Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan | 62.436.497.825,00 | 35.459.259.415,00 | 26.977.238.410,00 | 76,08 |
| 4 | Bagi Hasil Dari PPh Psl 25 dan Psl 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Psl 21 – LO | 0,00 | 15.716.519.956,00 | (15.716.519.956,00) | (100,00) |
| 5 | Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21-LO | 18.338.424.400,00 | 0,00 | 18.338.424.400,00 | 100,00 |
| 6 | Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO | 641.537.700,00 | 0,00 | 641.537.700,00 | 100,00 |
| 7 | Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan – LO | 1.674.500.150,00 | 617.648.386,00 | 1.056.851.764,00 | 171,11 |
| 8 | Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi – LO | 4.587.933.800,00 | 28.995.563.472,00 | (24.407.629.672,00) | (84,18) |
| 9 | Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi – LO | 80.207.996.600,00 | 60.652.861.332,00 | 19.555.135.268,00 | 32,24 |
| 10 | Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum – LO | 1.834.496.050,00 | 3.695.534.467,00 | (1.861.038.417,00) | (50,36) |
| 11 | Bagi Hasil Dari Cukai Tembakau – LO | 17.591.026,00 | 29.001.716,00 | (11.410.690,00) | (39,34) |
| 12 | Bagi Hasil Dari Kehutanan – LO | 78.119.768,00 | 35.907.850,00 | 42.211.918,00 | 117,56 |
| 13 | Dana Alokasi Umum (DAU) – LO | 368.303.160.000,00 | 375.518.805.000,00 | (7.215.645.000,00) | (1,92) |
| 14 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO | 9.548.298.474,00 | 0,00 | 9.548.298.474,00 | 100,00 |
| 15 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO | 3.716.135.000,00 | 0,00 | 3.716.135.000,00 | 100,00 |
| 16 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO | 4.284.631.282,00 | 0,00 | 4.284.631.282,00 | 100,00 |
| 17 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO | 1.341.634.000,00 | 3.157.450.000,00 | (1.815.816.000,00) | (57,51) |
| 18 | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO | 4.768.929.000,00 | 0,00 | 4.768.929.000,00 | 100,00 |
| 19 | DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi-LO | 9.059.219.857,00 | 0,00 | 9.059.219.857,00 | 100,00 |
| 20 | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO | 2.515.703.649,00 | 2.812.985.000,00 | (297.281.351,00) | (10,57) |
| 21 | DAK Afirmasi Bidang sanitasi – LO | 0 | 4.194.779.000,00 | (4.194.779.000,00) | (100,00) |
| 22 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO | 640.316.153,00 | 0,00 | 640.316.153,00 | 100,00 |
| 23 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO | 9.182.851.626,00 | 0,00 | 9.182.851.626,00 | 100,00 |
| 24 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO | 4.856.623.517,00 | 0,00 | 4.856.623.517,00 | 100,00 |

| No | Uraian | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | DAK Reguler Bidang Kesehatan – LO | 0,00 | 11.553.038.160,00 | (11.553.038.160,00) | (100,00) |
| **26** | DAK Afirmasi Bidang Kesehatan – LO | 0,00 | 12.830.096.000,00 | (12.830.096.000,00) | (100,00) |
| **27** | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO | 1.024.689.800,00 | 0,00 | 1.024.689.800,00 | 100 |
| **28** | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO | 2.505.889.910,00 | 0,00 | 2.505.889.910,00 | 100 |
| **29** | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO | 241.637.420,00 | 0,00 | 241.637.420,00 | 100 |
| **30** | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO | 366.961.210,00 | 0,00 | 366.961.210,00 | 100 |
| **31** | DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO | 10.435.536.055,00 | 0,00 | 10.435.536.055,00 | 100 |
| **32** | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO | 1.244.909.700,00 | 0,00 | 1.244.909.700,00 | 100 |
| **33** | DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO | 2.086.047.956,00 | 0,00 | 2.086.047.956,00 | 100 |
| **34** | DAK Afirmasi Bidang Pendidikan – LO | 0,00 | 1.910.000.000,00 | (1.910.000.000,00) | (100.00) |
| **35** | DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB – LO | 0,00 | 185.866.596,00 | (185.866.596,00) | (100.00) |
| **36** | DAK Reguler Bidang Pendidikan – LO | 0,00 | 10.381.088.000,00 | (10.381.088.000,00) | (100.00) |
| **37** | DAK Afirmasi Bidang Transportasi– LO | 0,00 | 1.037.442.393,00 | (1.037.442.393,00) | (100.00) |
| **38** | DAK – Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD – LO | 9.568.764.000,00 | 7.987.551.000,00 | 1.581.213.000,00 | 19,80 |
| **39** | DAK – Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD – LO | 267.000.000,00 | 285.750.000,00 | (18.750.000,00) | (6,56) |
| **40** | DAK - Dana Tunjangan Khusus Guru – LO | 1.798.507.000,00 | 93.607.000,00 | 1.704.900.000,00 | 1.821,34 |
| **41** | DAK - Dana Bantuan Operasional Kesehatan – LO | 2.951.513.447,00 | 13.463.874.000,00 | (10.512.360.553,00) | (78,08) |
| **42** | DAK - Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana – LO | 23.766.439,00 | 1.213.616.700,00 | (1.189.850.261,00) | (98,04) |
| **43** | DAK - Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD | 982.500.000,00 | 976.800.000,00 | 5.700.000,00 | 0,58 |
| **44** | DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO | 1.884.142.000,00 | 503.499.720,00 | 1.380.642.280,00 | 274,21 |
| **45** | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO | 118.200.000,00 | 78.900.000,00 | 39.300.000,00 | 49,81 |
| **46** | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan-LO | 800.812.800,00 | 601.004.200,00 | 199.808.600,00 | 33,25 |
| **47** | Bagi Hasil dari Pajak Bumi Bangunan Sektor Perhutanan – LO | 0,00 | -8.421.986,00 | 8.421.986,00 | (100,00) |
| **48** | Dana Otonomi Khusus (DID) – LO | 65.907.002.000,00 | 25.151.920.000,00 | 40.755.082.000,00 | 162,04 |
| | **JUMLAH** | **690.242.479.614,00** | **753.110.665.679,00** | **(62.868.186.065,00)** | **(8,35)** |

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya– LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LRA TA 2021 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 208**
**Perbedaan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dan LRA Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | LO | LRA | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | Pendapat Transfer Pemerintah Pusat | 690.242.479.614,00 | 743.394.103.468,00 | (53.151.623.854,00) |
| | ***Jumlah*** | **690.242.479.614,00** | **743.394.103.468,00** | **(53.151.623.854,00)** |

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA Tahun 2021. sebesar Rp53.151.623.854,00 merupakan Pendapatan Tranfer Dana Desa yang tidak diakui sebagai Pendapatan – LO. untuk Pendapatan Dana Desa hanya diakui di Pendapatan – LRA hal tersebut sesuai dengan pedoman ketentuan Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan.

### D.7.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - LO

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO merupakan dana DBH dari Provinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar Rp67.984.600.533,00 yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp54.484.600.533,00 dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp13.500.000.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainya pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp57.764.974.697,00 yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp37.264.974.697,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp20.500.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp10.219.625.836,00 atau sebesar 17,69%.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - LO (Provinsi Kepulauan Riau) Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut

**Tabel 209**
**Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah (Provinsi Kepri) Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor – LO | 12.297.966.867,00 | 8.130.933.706,00 | 4.167.033.161,00 | 51,25 |
| 2 | Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO | 6.427.071.844,00 | 4.278.383.471,00 | 2.148.688.373,00 | 50,23 |
| 3 | Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO | 27.834.496.599,00 | 16.672.987.775,00 | 11.161.508.824,00 | 66,95 |
| 4 | Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan – LO | 44.060.237,00 | 31.751.302,00 | 12.308.935,00 | 38,77 |
| 5 | Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok-LO | 7.881.004.986,00 | 8.150.918.443,00 | (269.913.457,00) | (3,32) |
| 6 | Bantuan Keuangan | 13.500.000.000,00 | 20.500.000.000,00 | (7.000.000.000,00) | (34,15) |
| | JUMLAH | **67.984.600.533,00** | **57.764.974.697,00** | **10.219.625.836,00** | **17,70** |

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya– LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya–LRA TA 2020 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 210**
**Perbedaan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dan LRA Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | LO | LRA | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | Pendapat Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 67.984.600.533,00 | 55.660.395.659,00 | 12.324.204.874,00 |
| | ***Jumlah*** | **67.984.600.533,00** | **55.660.395.659,00** | **12.324.204.874,00** |

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA Tahun 2021 sebesar Rp12.324.204.874,00 yang merupakan terdapat Kekurangan

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas SK Gubernur Prov Kepri Nomor 221 Tahun 2022 tentang Perhitungan Tunda Salur Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB dan Pajak Air Permukaan.

### D.7.3 Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Pendapatan Lain-lain Yang Sah - LO adalah sebesar Rp13.183.312.366,22 sedangkan Pendapatan Lain-lain Yang Sah - LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp14.919.027.126,00. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp1.735.714.759,78 atau sebesar (11,63%). Pendapatan ini merupakan Pendapatan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Adapun rincian Pendapatan Lain-lain Yang Sah - LO Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 211**
**Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO | 13.183.312.366,22 | 14.919.027.126,00 | (1.735.714.759,78) | (11,63) |
| | **JUMLAH** | **13.183.312.366,22** | **14.919.027.126,00** | **(1.735.714.759,78)** | **(11,63)** |

**Tabel 212**
**Perbedaan Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO dan LRA Tahun 2021**

(Dalam Rupiah)

| *No* | Uraian | LO | LRA | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO | 13.183.312.366,22 | 13.183.312.366,22 | 0,00 |
| | ***Jumlah*** | **13.183.312.366,22** | **13.183.312.366,22** | **0,00** |

Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2021 tidak terdapat selisih antara Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO dan LRA.

### D.8 Beban Operasi - LO

Beban Daerah adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. dan/atau kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Daerah digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian premium (diskonto) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar - benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 Tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Tahun Anggaran 2021 yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp791.142.653.776,21 sedangkan realisasi beban tahun sebelumnya sebesar Rp753.630.515.155,37 sehingga beban peningkatan sebesar Rp37.512.138.620,84 atau

sebesar 4,98%. Realisasi beban-beban tersebut pada Tahun Anggaran 2021 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 213**
**Beban Operasi SKPKD Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Jenis Beban Operasi | Saldo 2021 | Saldo 2020 |
|---|---|---|---|
| | | (Rp) | (Rp) |
| *1* | Beban Pegawai | 274.835.426.815,54 | 352.276.430.743,00 |
| *2* | Beban Persediaan | 95.858.315.335,77 | 64.676.864.174,16 |
| *3* | Beban Jasa | 176.977.995.746,46 | 84.623.385.393,00 |
| *4* | Beban Pemeliharaan | 6.921.047.433,00 | 4.845.162.937,92 |
| *5* | Beban Perjalanan Dinas | 31.319.044.570,00 | 38.738.431.212,00 |
| *6* | Beban Hibah | 15.003.616.918,00 | 27.391.102.575,00 |
| *7* | Beban Bantuan Sosial | 134.715.000,00 | 183.445.000,00 |
| *8* | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 134.757.527.888,01 | 122.824.055.741,73 |
| *9* | Beban Penyisihan Piutang | 224.022.878,43 | (93.578.436,44) |
| *10* | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 1.260.607.506,00 | 0,00 |
| *11* | Beban Transfer Bantuan Keuangan | 53.850.333.685,00 | 58.165.215.815,00 |
| ***Jumlah*** | | **791.142.653.776,21** | **753.630.515.155,37** |

### D.8.1.1 Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai-LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp274.835.426.815,54 sedangkan Beban Pegawai-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp352.276.430.743,00 Terdapat penurunan beban pegawai sebesar Rp77.441.003.927.46 atau sebesar 21,98%. Rincian Beban Pegawai-LO Per SKPD Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 214**
**Realisasi Beban Pegawai Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

**(dalam Rupiah)**

| No | SKPD | Saldo 31 Desember 2021 | Saldo 31 Desember 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.00 |
| 1 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 0,00 | 2.155.811.242,00 | (2.155.811.242,00) | (100,00) |
| 2 | DPRD | 0,00 | 1.170.444.819,00 | (1.170.444.819,00) | (100,00) |
| 3 | Sekretariat Daerah | 14.146.686.364,00 | 20.606.334.060,00 | (6.459.647.696,00) | (31,35) |
| 4 | Sekretariat DPRD | 13.243.098.359,00 | 13.958.420.681,00 | (715.322.322,00) | (5,12) |
| 5 | Inspektorat | 7.007.965.028,00 | 7.417.748.268,00 | (409.783.240,00) | (5,52) |
| 6 | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 92.730.042.960,00 | 122.458.191.674,00 | (29.728.148.714,00) | (24,28) |
| 7 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 53.604.431.068,54 | 54.753.298.340,00 | (1.148.867.271,46) | (2,10) |
| 8 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 7.083.224.780,00 | 9.369.112.229,00 | (2.285.887.449,00) | (24,40) |
| 9 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa | 5.320.769.544,00 | 7.445.428.053,00 | (2.124.658.509,00) | (28,54) |

| No | SKPD | Saldo 31 Desember 2021 | Saldo 31 Desember 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dinas Penanaman Modal PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 4.634.721.649,00 | 6.337.477.675,00 | (1.702.756.026,00) | (26,87) |
| 11 | Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 7.562.322.253,00 | 11.343.994.061,00 | (3.781.671.808,00) | (33,34) |
| 12 | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 6.059.837.454,00 | 12.129.985.125,00 | (6.070.147.671,00) | (50,04) |
| 13 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 3.922.368.982,00 | 4.639.535.860,00 | (717.166.878,00) | (15,46) |
| 14 | Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 3.525.892.670,00 | 4.305.137.990,00 | (779.245.320,00) | (18,10) |
| 15 | Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian | 3.771.446.747,00 | 4.830.154.130,00 | (1.058.707.383,00) | (21,92) |
| 16 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 3.661.406.029,00 | 4.620.653.584,00 | (959.247.555,00) | (20,76) |
| 17 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 5.063.672.707,00 | 11.283.090.247,00 | (6.219.417.540,00) | (55,12) |
| 18 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3.780.063.629,00 | 4.309.130.415,00 | (529.066.786,00) | (12,28) |
| 19 | Badan Keuangan Daerah | 9.319.123.115,00 | 12.360.619.003,00 | (3.041.495.888,00) | (24,61) |
| 20 | Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 5.138.243.016,00 | 6.751.838.456,00 | (1.613.595.440,00) | (23,90) |
| 21 | Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Penaggulangan Bencana Daerah | 2.524.563.010,00 | 3.991.034.080,00 | (1.466.471.070,00) | (36,74) |
| 22 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3.064.336.345,00 | 822.529.957,00 | 2.241.806.388,00 | 272,55 |
| 23 | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 6.720.000,00 | 0,00 | 6.720.000,00 | 100,00 |
| 24 | Kecamatan Jemaja | 3.429.171.804,00 | 4.701.022.203,00 | (1.271.850.399,00) | (27,05) |
| 25 | Kecamatan Jemaja Timur | 1.956.256.835,00 | 2.729.340.229,00 | (773.083.394,00) | (28,32) |
| 26 | Kecamatan Palmatak | 2.804.164.882,00 | 4.090.111.302,00 | (1.285.946.420,00) | (31,44) |
| 27 | Kecamatan Siantan | 2.725.612.800,00 | 4.081.436.017,00 | (1.355.823.217,00) | (33,22) |
| 28 | Kecamatan Siantan Selatan | 1.422.155.891,00 | 1.768.626.452,00 | (346.470.561,00) | (19,59) |
| 29 | Kecamatan Siantan Tengah | 1.768.742.389,00 | 2.324.490.818,00 | (555.748.429,00) | (23,91) |
| 30 | Kecamatan Siantan Timur | 1.348.994.457,00 | 1.882.556.201,00 | (533.561.744,00) | (28,34) |
| 31 | Kecamatan Siantan Utara | 784.275.194,00 | 1.350.834.573,00 | (566.559.379,00) | (41,94) |
| 32 | Kecamatan Jemaja Barat | 1.815.457.109,00 | 1.819.277.134,00 | (3.820.025,00) | (0,21) |
| 33 | Kecamatan Kute Siantan | 1.609.659.745,00 | 468.765.865,00 | 1.140.893.880,00 | 243,38 |
| **JUMLAH** | | **274.835.426.815,54** | **352.276.430.743,00** | **(77.441.003.927,46)** | **(21,98)** |

**Tabel 215**
**Perbedaan Realisasi Beban Pegawai LO dan Belanja Pegawai LRA Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | LO | LRA | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | Beban/Belanja Pegawai | 274.835.426.815,54 | 274.063.269.975,54 | 772.156.840,00 |
| ***Jumlah*** | | **274.835.426.815,54** | **274.063.269.975,54** | **772.156.840,00** |

Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2021 terdapat selisih antara Beban Pegawai – LO dengan Belanja Pegawai – LRA sebesar Rp772.156.840,00 dikarenakan adanya penambahan Utang di Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga yaitu Tambahan Tunjangan Penghasilan Profesi Guru PNS Daerah Bersumber dari APBN (TPG Guru Desember 2021) T.A. 2021.

### D.8.1.2.1 Beban Persediaan - LO

Mengacu dengan peraturan terbaru. bahwasanya akun beban persedian-lo pada tahun anggaran sebelumnya untuk mengakomodir barang habis pakai dan barang material lainnya. tapi pada saat ini akun tersebut tidak dipergunakan lagi sehingga menjadi akun beban barang dan jasa untuk mengakomodir seluruh barang yang habis pakai dan barang tidak habis pakai serta beban jasa-jasa yang dikeluarkan oleh SKPD yang dijadikan beban pada 1 (satu) tahun laporan.

Beban Barang yang habis pakai dan/atau barang tidak habis pakai dicatat sebesar pemakaian barang persediaan tersebut (*use of goods Inventory*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian beban barang dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO). Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Beban Persediaan-LO adalah sebesar Rp95.858.315.335,77. Sedangkan Beban Persediaan-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp64.676.864.174,16 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp31.181.451.161,61atau sebesar 48,21%.

**Tabel 216**
**Realisasi Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No. | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/Penuruan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Beban Persediaan Persediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 123.244.900,00 | 0,00 | 123.244.900,00 | 100,00 |
| 2 | Beban Persediaan Bahan-Bahan Kimia | 177.881.000,00 | 199.294.600,00 | (21.413.600,00) | (10,74) |
| 3 | Beban Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 4.323.605.447,00 | 2.906.845.545,00 | 1.416.759.902,00 | 48,74 |
| 4 | Beban Persediaan Bahan-Bahan Baku | 78.415.000,00 | 0,00 | 78.415.000,00 | 100,00 |
| 5 | Beban Persediaan Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 94.793.000,00 | 314.475,00 | 94.478.525,00 | 30.043 |
| 6 | Beban Persediaan Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 80.333.000,00 | 0,00 | 80.333.000,00 | 100,00 |
| 7 | Beban Persediaan Bahan-Isi Tabung Gas | 128.977.000,00 | 60.209.000,00 | 68.768.000,00 | 114,22 |
| 8 | Beban Persediaan Bahan-Bahan Lainnya | 3.316.091.201,50 | 898.802.335,00 | 2.417.288.866,50 | 268,95 |
| 9 | Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 161.501.900,00 | 0,00 | 161.501.900,00 | 100,00 |
| 10 | Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar | 24.714.000,00 | 0,00 | 24.714.000,00 | 100,00 |
| 11 | Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 100,00 |
| 12 | Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 45.548.100,00 | 0,00 | 45.548.100,00 | 100,00 |
| 13 | Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 27.910.355.119,73 | 9.549.732.249,00 | 18.360.622.870,73 | 192,26 |
| 14 | Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.628.880.049,00 | 0,00 | 2.628.880.049,00 | 100,00 |
| 15 | Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.331.511.328,00 | (27.159.000,00) | 3.358.670.328,00 | (12.367) |

| No. | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/Penuruan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **16** | Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 480.637.000,00 | 454.840.500,00 | 25.796.500,00 | 5,67 |
| **17** | Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender | 56.444.000,00 | 0,00 | 56.444.000,00 | 100,00 |
| **18** | Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 587.858.834,00 | 0,00 | 587.858.834,00 | 100,00 |
| **19** | Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | 964.646.530,00 | 1.146.025.950,00 | (181.379.420,00) | (15,83) |
| **20** | Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik | 562.252.888,00 | 652.637.131,00 | (90.384.243,00) | (13,85) |
| **21** | Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas | 1.081.134.020,00 | 34.565.300,00 | 1.046.568.720,00 | 3.028 |
| **22** | Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 437.785.140,00 | 0,00 | 437.785.140,00 | 100,00 |
| **23** | Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 3.040.232.875,00 | 16.374.550,00 | 3.023.858.325,00 | 18.467 |
| **24** | Beban Persediaan Obat-Obatan | 2.586.293.570,05 | 9.592.075.321,73 | (7.005.781.751,68) | (73,04) |
| **25** | Beban Persediaan Obat-Obatan Lainnya | 9.639.038.422,49 | 1.276.485.680,00 | 8.362.552.742,49 | 655,12 |
| **26** | Beban Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 16.469.600.804,00 | 17.111.850.894,00 | (642.250.090,00) | (3,75) |
| **27** | Beban Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 1.510.684.075,00 | 14.341.226.920,39 | (12.830.542.845,39) | (89,47) |
| **28** | Beban Persediaan Natura dan Pakan-Natura | 2.846.182.717,00 | 1.527.312.846,00 | 1.318.869.871,00 | 86,35 |
| **29** | Beban Persediaan Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | Beban Persediaan Makanan dan Minuman Rapat | 2.474.895.626,00 | 0,00 | 2.474.895.626,00 | 100,00 |
| **31** | Beban Persediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1.445.263.190,00 | 0,00 | 1.445.263.190,00 | 100,00 |
| **32** | Beban Persediaan Penambah Daya Tahan Tubuh | 63.272.500,00 | 0,00 | 63.272.500,00 | 100,00 |
| **33** | Beban Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial | 66.973.500,00 | 0,00 | 66.973.500,00 | 100,00 |
| **34** | Beban Persediaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 2.631.694.399,00 | 0,00 | 2.631.694.399,00 | 100,00 |
| **35** | Beban Persediaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH | 117.673.400,00 | 0,00 | 117.673.400,00 | 100,00 |
| **36** | Beban Persediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD | 58.419.900,00 | 0,00 | 58.419.900,00 | 100,00 |
| **37** | Beban Persediaan Pakaian Sipil Harian (PSH) | 63.496.400,00 | 0,00 | 63.496.400,00 | 100,00 |
| **38** | Beban Persediaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 92.446.200,00 | 0,00 | 92.446.200,00 | 100,00 |

| No. | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/Penuruan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **39** | Beban Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH) | 1.177.446.550,00 | 0,00 | 1.177.446.550,00 | 100,00 |
| **40** | Beban Persediaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 1.173.765.230,00 | 0,00 | 1.173.765.230,00 | 100,00 |
| **41** | Beban Persediaan Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 66.719.400,00 | 0,00 | 66.719.400,00 | 100,00 |
| **42** | Beban Persediaan Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 67.606.000,00 | 0,00 | 67.606.000,00 | 100,00 |
| **43** | Beban Persediaan Pakaian Pelatihan Kerja | 462.919.880,00 | 0,00 | 462.919.880,00 | 100,00 |
| **44** | Beban Persediaan Pakaian KORPRI | 15.114.000,00 | 0,00 | 15.114.000,00 | 100,00 |
| **45** | Beban Persediaan Pakaian Adat Daerah | 1.394.842.740,00 | 0,00 | 1.394.842.740,00 | 100,00 |
| **46** | Beban Persediaan Pakaian Batik Tradisional | 346.995.000,00 | 0,00 | 346.995.000,00 | 100,00 |
| **47** | Beban Persediaan Pakaian Olahraga | 1.412.509.500,00 | 0,00 | 1.412.509.500,00 | 100,00 |
| **48** | Beban Persediaan Komponen-Komponen Lainnya | 33.220.000,00 | (2.724.336.276,00) | 2.757.556.276,00 | (101,22) |
| **49** | Beban Persediaan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber | 0,00 | (748.140.590,00) | 748.140.590,00 | (100,00) |
| **50** | Beban Persediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah | 0,00 | 1.314.544.000,00 | (1.314.544.000,00) | (100,00) |
| **51** | Beban Persediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD | 0,00 | 289.800.000,00 | (289.800.000,00) | (100,00) |
| **52** | Beban Honorarium Pengelola Dana BOS | 0,00 | 6.803.562.743,04 | (6.803.562.743,04) | (100,00) |
| **JUMLAH** | | **95.858.315.335,77** | **64.676.864.174,16** | **31.181.451.161,61** | **48,21** |

Realisasi Beban Persediaan pada Tahun 2021 sebesar Rp95.858.315.335,77dapat dirinci pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut;

**Tabel 217**
**Realisasi Beban Persediaan Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No. | SKPD | Saldo | Saldo | Kenaikan/Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31-Des-21 | 31-Des-20 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Sekretariat Daerah | 5.765.010.606,00 | 4.485.780.510,00 | 1.279.230.096,00 | 28,52 |
| **2** | Sekretariat DPRD | 2.658.100.088,00 | 609.143.930,00 | 2.048.956.158,00 | 336,37 |
| **3** | Inspektorat | 266.224.210,00 | 190.049.200,00 | 76.175.010,00 | 40,08 |
| **4** | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 17.887.004.701,11 | 25.826.947.937,43 | (7.939.943.236,32) | (30,74) |
| **5** | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 39.119.149.758,66 | 8.472.008.378,73 | 30.647.141.379,93 | 361,75 |
| **6** | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 6.833.392.395,00 | 11.660.691.869,00 | (4.827.299.474,00) | (41,40) |
| **7** | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa | 494.066.010,00 | 1.565.312.365,00 | (1.071.246.355,00) | (68,44) |
| **8** | Dinas Penanaman Modal PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 521.426.470,00 | 74.994.610,00 | 446.431.860,00 | 595,29 |

| No. | SKPD | Saldo 31-Des-21 | Saldo 31-Des-20 | Kenaikan/Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **9** | Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 4.706.061.465,00 | 5.881.562.515,00 | (1.175.501.050,00) | (19,99) |
| **10** | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 2.238.034.203,00 | 653.977.831,00 | 1.584.056.372,00 | 242,22 |
| **11** | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 544.749.710,00 | 485.168.445,00 | 59.581.265,00 | 12,28 |
| **12** | Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 256.375.730,00 | 151.108.100,00 | 105.267.630,00 | 69,66 |
| **13** | Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian | 880.706.735,00 | 432.692.000,00 | 448.014.735,00 | 103,54 |
| **14** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 1.240.461.500,00 | 1.450.021.728,00 | (209.560.228,00) | (14,45) |
| **15** | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 1.584.192.852,00 | 195.405.143,00 | 1.388.787.709,00 | 710,72 |
| **16** | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 502.814.841,00 | 95.166.550,00 | 407.648.291,00 | 428,35 |
| **17** | Badan Keuangan Daerah | 980.935.392,00 | 303.424.369,00 | 677.511.023,00 | 223,29 |
| **18** | Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 607.111.195,00 | 194.338.700,00 | 412.772.495,00 | 212,40 |
| **19** | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 203.834.900,00 | 77.660.600,00 | 126.174.300,00 | 162,47 |
| **20** | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 907.106.545,00 | 15.956.250,00 | 891.150.295,00 | 5584,96 |
| **21** | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 13.699.500,00 | 0,00 | 13.699.500,00 | 100,00 |
| **22** | Kecamatan Jemaja | 839.649.500,00 | 176.770.000,00 | 662.879.500,00 | 375,00 |
| **23** | Kecamatan Jemaja Timur | 478.191.400,00 | 69.925.000,00 | 408.266.400,00 | 583,86 |
| **24** | Kecamatan Palmatak | 905.572.300,00 | 366.984.321,00 | 538.587.979,00 | 146,76 |
| **25** | Kecamatan Siantan | 2.204.471.730,00 | 364.328.210,00 | 1.840.143.520,00 | 505,08 |
| **26** | Kecamatan Siantan Selatan | 577.468.230,00 | 94.096.100,00 | 483.372.130,00 | 513,70 |
| **27** | Kecamatan Siantan Tengah | 513.953.800,00 | 425.290.500,00 | 88.663.300,00 | 20,85 |
| **28** | Kecamatan Siantan Timur | 827.057.224,00 | 92.534.092,00 | 734.523.132,00 | 793,79 |
| **29** | Kecamatan Siantan Utara | 225.151.200,00 | 120.163.600,00 | 104.987.600,00 | 87,37 |
| **30** | Kecamatan Jemaja Barat | 468.713.045,00 | 64.929.120,00 | 403.783.925,00 | 621,88 |
| **31** | Kecamatan Kute Siantan | 607.628.100,00 | 80.432.200,00 | 527.195.900,00 | 655,45 |
| **JUMLAH** | | **95.858.315.335,77** | **64.676.864.174,16** | **31.181.451.161,61** | **48,21** |

Perbandingan Perbedaan Realisasi Beban Persediaan-LO dengan Belanja Barang (Persediaan)-LRA yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebagai berikut :

**Tabel 218**
**Perbedaan Realisasi Beban Persediaan-LO dan Belanja Barang (Persediaan)-LRA Tahun 2021**

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Persediaan | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Beban/Belanja Persediaan** | **95.858.315.335,77** | **47.327.553.519,00** | **48.530.761.816,77** |

Berdasarkan Tabel diatas pada Tahun 2021 terdapat selisih antara Beban Persediaan-LO dengan Belanja Barang (Persediaan)-LRA sebesar Rp48.530.761.816,77 terdiri dari:

**Tabel 219**
**Rincian Penjelasan Selisih Realisasi Beban Persediaan-LO dan Belanja Barang (Persediaan)-LRA Tahun 2021**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | BELANJA LRA | PENAMBAHAN | | | | PENGURANGAN | | | BEBAN LO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UTANG 2021 | PENGGUNAAN SALDO AWAL PERSEDIAAN 2021 | REKLASIFIKASI DARI OPEASIONAL LAINNYA | JURNAL PENUTUP PER 31 DESEMBER 2021 | PERSEDIAAN AKHIR 2021 | HIBAH KE PEMERINTAH LAINNYA / INSTANSI LAINNYA | REKLASIFIKASI KE OPEASIONAL LAINNYA | |
| **BELANJA / BEBAN PERSEDIAAN** | | | | | | | | | |
| **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | | | | | |
| Beban Persediaan Persediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 111.997.400,00 | 11.247.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.244.900,00 |
| Beban Persediaan Bahan-Bahan Kimia | 177.881.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.881.000,00 |
| Beban Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3.842.406.444,00 | 481.199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.323.605.444,00 |
| Beban Persediaan Bahan-Bahan Baku | 78.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.415.000,00 |
| Beban Persediaan Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 94.793.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.793.000,00 |
| Beban Persediaan Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 80.333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.333.000,00 |
| Beban Persediaan Bahan-Isi Tabung Gas | 126.877.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.977.000,00 |
| Beban Persediaan Bahan-Bahan Lainnya | 0,00 | 6.820.000,00 | (5.051.278.647,61) | 8.361.389.852,11 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.316.091.204,50 |
| Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 161.501.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.501.900,00 |
| Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar | 24.714.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.714.000,00 |
| Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 |
| Beban Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 39.420.100,00 | 6.128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.548.100,00 |
| Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.871.573.492,00 | 1.738.000,00 | 26.616.187.697,73 | 0,00 | 7.087.900,00 | 586.231.970,00 | 0,00 | 0,00 | 27.910.355.119,73 |
| Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.554.567.649,00 | 76.016.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.000,00 | 2.628.880.049,00 |
| Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3.126.779.858,00 | 204.731.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.331.511.328,00 |
| Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 480.637.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.637.000,00 |
| Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender | 37.601.000,00 | 18.843.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.444.000,00 |
| Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer | 579.874.834,00 | 7.984.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.858.834,00 |

| URAIAN | BELANJA LRA | PENAMBAHAN | | | | PENGURANGAN | | | BEBAN LO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UTANG 2021 | PENGGUNAAN SALDO AWAL PERSEDIAAN 2021 | REKLASIFIKASI DARI OPEASIONAL LAINNYA | JURNAL PENUTUP PER 31 DESEMBER 2021 | PERSEDIAAN AKHIR 2021 | HIBAH KE PEMERINTAH LAINNYA / INSTANSI LAINNYA | REKLASIFIKASI KE OPEASIONAL LAINNYA | |
| Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor | 918.423.370,00 | 46.223.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.646.530,00 |
| Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik | 524.965.188,00 | 37.287.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.252.888,00 |
| Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas | 886.430.520,00 | 194.703.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081.134.020,00 |
| Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 360.092.140,00 | 77.693.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.785.140,00 |
| Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 608.245.042,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431.987.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040.232.875,00 |
| Beban Persediaan Obat-Obatan-Obat | 4.824.665.853,00 | 0,00 | 0,00 | (2.238.372.282,95) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586.293.570,05 |
| Beban Persediaan Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 987.294.607,00 | 0,00 | 11.219.931.860,00 | (2.568.188.044,51) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.639.038.422,49 |
| Beban Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 10.134.033.790,00 | 6.335.567.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.469.600.804,00 |
| Beban Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 400.717.000,00 | 1.109.967.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.684.075,00 |
| Beban Persediaan Natura dan Pakan-Natura | 2.742.594.067,00 | 103.588.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846.182.717,00 |
| Beban Persediaan Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Persediaan Makanan dan Minuman Rapat | 2.383.936.626,00 | 90.959.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.474.895.626,00 |
| Beban Persediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1.442.183.190,00 | 3.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.263.190,00 |
| Beban Persediaan Penambah Daya Tahan Tubuh | 63.272.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.272.500,00 |
| Beban Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial | 66.973.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.973.500,00 |
| Beban Persediaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 2.593.022.899,00 | 38.671.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.631.694.399,00 |
| Beban Persediaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH | 117.673.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.673.400,00 |
| Beban Persediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD | 58.419.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.419.900,00 |
| Beban Persediaan Pakaian Sipil Harian (PSH) | 1.896.400,00 | 61.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.496.400,00 |
| Beban Persediaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 4.446.200,00 | 88.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.446.200,00 |
| Beban Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH) | 1.015.944.550,00 | 161.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177.446.550,00 |

| URAIAN | BELANJA LRA | PENAMBAHAN | | | | PENGURANGAN | | | BEBAN LO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UTANG 2021 | PENGGUNAAN SALDO AWAL PERSEDIAAN 2021 | REKLASIFIKASI DARI OPEASIONAL LAINNYA | JURNAL PENUTUP PER 31 DESEMBER 2021 | PERSEDIAAN AKHIR 2021 | HIBAH KE PEMERINTAH LAINNYA / INSTANSI LAINNYA | REKLASIFIKASI KE OPEASIONAL LAINNYA | |
| Beban Persediaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 643.053.180,00 | 530.712.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173.765.230,00 |
| Beban Persediaan Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 1.599.400,00 | 65.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.719.400,00 |
| Beban Persediaan Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 38.896.000,00 | 28.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.606.000,00 |
| Beban Persediaan Pakaian Pelatihan Kerja | 368.292.380,00 | 94.627.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.919.880,00 |
| Beban Persediaan Pakaian KORPRI | 15.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.114.000,00 |
| Beban Persediaan Pakaian Adat Daerah | 1.344.902.740,00 | 49.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394.842.740,00 |
| Beban Persediaan Pakaian Batik Tradisional | 329.021.000,00 | 17.974.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.995.000,00 |
| Beban Persediaan Pakaian Olahraga | 1.024.451.400,00 | 437.492.100,00 | 0,00 | 0,00 | (49.434.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412.509.500,00 |
| **Belanja Barang Tak Habis Pakai** | | | | | | | | | |
| Belanja Barang Tak Habis Pakai | 33.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.220.000,00 |
| **Belanja Barang Dan Jasa BOS** | | | | | | | | | |
| Belanja Barang Dan Jasa BOS | 8.361.389.852,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL BELANJA / BEBAN PERSEDIAAN | **55.688.943.371,11** | **10.390.225.619,00** | **32.784.840.910,12** | **5.986.817.357,65** | **(42.346.100,00)** | **587.071.970,00** | **0,00** | **1.704.000,00** | **95.858.315.335,77** |

### D.8.1.2.2 Beban Jasa - LO

Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Beban Jasa-LO adalah sebesar Rp176.977.995.746,46 sedangkan Beban Jasa-LO Tahun 2020 sebesar Rp84.623.385.393,00 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp92.354.610.353,46 atau sebesar 109,136%.

**Tabel 220**
**Realisasi Beban Jasa-LO Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No. | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Beban Jasa Kantor | 135.886.360.857,46 | 31.405.249.899,00 | 104.481.110.958,46 | 332,69 |
| **2** | Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 19.577.861.335,00 | 11.635.517.072,00 | 7.942.344.263,00 | 68,26 |
| **3** | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 0,00 | 4.092.862.512,00 | (4.092.862.512,00) | (100,00) |
| **4** | Beban Cetak Dan Penggandaan | 0,00 | 4.391.999.577,00 | (4.391.999.577,00) | (100,00) |
| **5** | Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 3.060.701.800,00 | 2.726.715.500,00 | 333.986.300,00 | 12,25 |
| **6** | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 7.703.923.475,00 | 6.064.583.170,00 | 1.639.340.305,00 | 27,03 |
| **7** | Beban Sewa Aset Tetap Lainnya | 210.591.500,00 | 61.600.000,00 | 148.991.500,00 | 241,87 |
| **8** | Beban Makanan Dan Minuman | 0,00 | 9.073.987.829,00 | (9.073.987.829,00) | (100,00) |
| **9** | Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya | 0,00 | 449.146.500,00 | (449.146.500,00) | (100,00) |
| **10** | Beban Pakaian Kerja | 0,00 | 1.291.567.236,00 | (1.291.567.236,00) | (100,00) |
| **11** | Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu | 0,00 | 3.336.169.398,00 | (3.336.169.398,00) | (100,00) |
| **12** | Beban Jasa Konsultansi Konstruksi | 4.988.105.299,00 | 3.504.017.200,00 | 1.484.088.099,00 | 42,35 |
| **13** | Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 686.312.000,00 | 0,00 | 686.312.000,00 | 100,00 |
| **14** | Beban Beasiswa Pendidikan PNS | 270.000.000,00 | 420.000.000,00 | (150.000.000,00) | (35,71) |
| **15** | Beban Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 1.245.640.000,00 | 337.472.500,00 | 908.167.500,00 | 269,11 |
| **16** | Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 2.418.447.000,00 | 545.260.000,00 | 1.873.187.000,00 | 343,54 |
| **17** | Beban Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 930.052.480,00 | 0,00 | 930.052.480,00 | 100,00 |
| **18** | Beban Honorarium Pengelolaan Dana BOS | 0,00 | (342.440.000,00) | 342.440.000,00 | (100,00) |
| **19** | Beban Beasiswa Pendidikan Non PNS | 0,00 | 5.498.948.000,00 | (5.498.948.000,00) | (100,00) |
| **20** | Beban Pelayanan Kesehatan | 0,00 | 130.729.000,00 | (130.729.000,00) | (100,00) |
| **JUMLAH** | | **176.977.995.746,46** | **84.623.385.393,00** | **92.354.610.353,46** | **109,14** |

Perbandingan Realisasi Beban Jasa-LO Tahun 2021 dengan Realisasi Beban Jasa-LO Tahun 2020. dapat dirinci ke masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 221**
**Realisasi Beban Jasa Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No. | SKPD | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sekretariat Daerah | 11.976.674.763,00 | 11.041.299.253,00 | 935.375.510,00 | 8,47 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 5.218.476.214,00 | 5.325.134.480,00 | (106.658.266,00) | (2,00) |
| 3 | Inspektorat | 1.725.302.070,00 | 610.148.405,00 | 1.115.153.665,00 | 182,77 |
| 4 | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 43.652.764.224,00 | 11.522.859.343,00 | 32.129.904.881,00 | 278,84 |
| 5 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 47.025.094.260,46 | 26.661.558.304,00 | 20.363.535.956,46 | 76,38 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 6.760.215.027,00 | 3.162.721.553,00 | 3.597.493.474,00 | 113,75 |
| 7 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa | 2.583.518.950,00 | 1.077.198.268,00 | 1.506.320.682,00 | 139,84 |
| 8 | Dinas Penanaman Modal PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 2.688.315.208,00 | 1.019.478.127,00 | 1.668.837.081,00 | 163,7 |
| 9 | Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 4.264.547.270,00 | 997.594.163,00 | 3.266.953.107,00 | 327,48 |
| 10 | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 8.040.559.838,00 | 2.254.320.070,00 | 5.786.239.768,00 | 256,67 |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 1.667.085.934,00 | 389.622.225,00 | 1.277.463.709,00 | 327,87 |
| 12 | Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 7.210.732.366,00 | 7.442.790.364,00 | (232.057.998,00) | (3,12) |
| 13 | Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian | 1.496.508.647,00 | 396.521.459,00 | 1.099.987.188,00 | 277,41 |
| 14 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 2.877.763.357,00 | 2.857.483.310,00 | 20.280.047,00 | 0,71 |
| 15 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 8.436.627.342,00 | 1.090.479.655,00 | 7.346.147.687,00 | 673,66 |
| 16 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.528.964.583,00 | 928.136.130,00 | 600.828.453,00 | 64,73 |
| 17 | Badan Keuangan Daerah | 4.196.812.354,00 | 1.872.593.250,00 | 2.324.219.104,00 | 124,12 |
| 18 | Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 3.117.478.185,00 | 1.711.851.577,00 | 1.405.626.608,00 | 82,11 |
| 19 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 1.040.576.841,00 | 573.467.165,00 | 467.109.676,00 | 81,45 |
| 20 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.627.246.398,00 | 587.807.000,00 | 2.039.439.398,00 | 346,96 |
| 21 | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100 |
| 22 | Kecamatan Jemaja | 1.423.974.213,00 | 516.619.000,00 | 907.355.213,00 | 175,63 |
| 23 | Kecamatan Jemaja Timur | 574.816.511,00 | 162.770.000,00 | 412.046.511,00 | 253,15 |
| 24 | Kecamatan Palmatak | 1.319.302.973,00 | 348.501.070,00 | 970.801.903,00 | 278,56 |
| 25 | Kecamatan Siantan | 1.583.074.162,00 | 473.460.550,00 | 1.109.613.612,00 | 234,36 |
| 26 | Kecamatan Siantan Selatan | 465.392.647,00 | 239.508.792,00 | 225.883.855,00 | 94,31 |
| 27 | Kecamatan Siantan Tengah | 786.465.081,00 | 347.480.000,00 | 438.985.081,00 | 126,33 |
| 28 | Kecamatan Siantan Timur | 661.320.734,00 | 389.714.030,00 | 271.606.704,00 | 69,69 |
| 29 | Kecamatan Siantan Utara | 517.215.107,00 | 160.158.700,00 | 357.056.407,00 | 222,94 |
| 30 | Kecamatan Jemaja Barat | 383.559.816,00 | 215.504.650,00 | 168.055.166,00 | 77,98 |

| No. | SKPD | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **31** | Kecamatan Kute Siantan | 1.127.210.671,00 | 246.604.500,00 | 880.606.171,00 | 357,09 |
| **JUMLAH** | | **176.977.995.746,46** | **84.623.385.393,00** | **92.354.610.353,46** | **109,14** |

**Tabel 222**
**Perbedaan Realisasi Beban Jasa-LO dan Belanja Jasa-LRA Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Beban/Belanja Jasa | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Beban/Belanja Jasa** | **176.977.995.746,46** | **179.006.451.797,00** | **(2.028.456.050,54)** |

Berdasarkan Tabel diatas pada Tahun 2021 diketahui terdapat selisih antara Beban Jasa-LO dengan Belanja Jasa-LRA yang merupakan penyesuaian belanja pada tahun berjalan.

**Tabel 223**
**Rincian Penjelasan Selisih Realisasi Beban Jasa-LO dan Belanja Jasa-LRA Tahun 2021**

| URAIAN | BELANJA LRA | PENAMBAHAN | | | | | PENGURANGAN | | | BEBAN LO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UTANG 2021 | PENGGUNAAN SALDO AWAL PERSEDIAAN 2021 | REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP | REKLASIFIKASI DARI OPEASIONAL LAINNYA | JURNAL PENUTUP PER 31 DESEMBER 2021 | REKLASIFIKASI BELANJA BARANG DAN JASA ke BELANJA MODAL | KAPITALISASI KE ASET TETAP | REKLASIFIKASIKE OPEASIONAL LAINNYA | |
| **BELANJA / BEBAN JASA** | | | | | | | | | | |
| Belanja Jasa Kantor | 136.307.446.897,46 | 1.223.294.495,00 | 890.186.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734.380.535,00 | 0,00 | 800.186.473,00 | 135.886.360.857,46 |
| Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 16.869.157.335,00 | 2.708.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.577.861.335,00 |
| Belanja Sewa Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 2.798.401.800,00 | 262.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060.701.800,00 |
| Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 7.399.345.085,00 | 304.578.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.703.923.475,00 |
| Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 210.591.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.591.500,00 |
| Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 10.352.494.700,00 | 2.950.173.500,00 | 0,00 | (99.579.000,00) | (393.500.000,00) | 0,00 | 3.970.609.000,00 | 1.251.579.401,00 | 2.599.295.500,00 | 4.988.105.299,00 |
| Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 369.875.000,00 | 199.342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686.312.000,00 |
| Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 270.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000.000,00 |
| Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 1.080.640.000,00 | 165.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.640.000,00 |
| Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak | 2.418.447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418.447.000,00 |

| URAIAN | BELANJA LRA | PENAMBAHAN | | | | | PENGURANGAN | | | BEBAN LO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UTANG 2021 | PENGGUNAAN SALDO AWAL PERSEDIAAN 2021 | REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP | REKLASIFIKASI DARI OPEASIONAL LAINNYA | JURNAL PENUTUP PER 31 DESEMBER 2021 | REKLASIFIKASI BELANJA BARANG DAN JASA ke BELANJA MODAL | KAPITALISASI KE ASET TETAP | REKLASIFIKASIKE OPEASIONAL LAINNYA | |
| **Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | | | | | | |
| **Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | 930.052.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.052.480,00 |
| **TOTAL BELANJA / BEBAN JASA** | **179.006.451.797,46** | **7.813.392.385,00** | **890.186.473,00** | **(99.579.000,00)** | **(393.500.000,00)** | **117.095.000,00** | **5.704.989.535,00** | **1.251.579.401,00** | **3.399.481.973,00** | **176.977.995.746,46** |

### D.8.1.2.3 Beban Pemeliharaan - LO

Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Beban Pemeliharaan-LO adalah sebesar Rp6.921.047.433,00 sedangkan Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2020 sebesar Rp4.845.162.937,92 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp2.075.884.495,08 atau sebesar 42,84%.

**Tabel 224**
**Realisasi Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/Penuruan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 3.590.409.724,00 | 863.428.070,00 | 2.726.981.654,00 | 315,83 |
| 2 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2.266.801.730,00 | 2.013.547.326,92 | 253.254.403,08 | 12,58 |
| 3 | Beban Pemeliharaan Jalan. Jaringan. dan Irigasi | 1.050.017.779,00 | 482.024.741,00 | 567.993.038,00 | 117,83 |
| 4 | Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 13.818.200,00 | 1.486.162.800,00 | (1.472.344.600,00) | (99,07) |
| | **JUMLAH** | **6.921.047.433,00** | **4.845.162.937,92** | **2.075.884.495,08** | **42,84** |

Perbandingan Realisasi Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2021 dengan Realisasi Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2020. dapat dirinci ke masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 225**
**Realisasi Beban Pemeliharaan Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No. | SKPD | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sekretariat Daerah | 1.452.279.200,00 | 1.047.205.999,00 | 405.073.201,00 | 38,68 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 171.769.000,00 | 237.888.202,92 | (66.119.202,92) | (27,79) |
| 3 | Inspektorat | 5.375.000,00 | 0,00 | 5.375.000,00 | 100,00 |
| 4 | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 201.887.682,00 | 103.861.200,00 | 98.026.482,00 | 94,38 |
| 5 | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.014.239.348,00 | 709.088.360,00 | 1.305.150.988,00 | 184,06 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.372.833.779,00 | 827.070.591,00 | 545.763.188,00 | 65,99 |
| 7 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa | 72.082.500,00 | 0,00 | 72.082.500,00 | 100,00 |
| 8 | Dinas Penanaman Modal PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 64.213.100,00 | 92.155.000,00 | (27.941.900,00) | (30,32) |
| 9 | Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 48.395.700,00 | 97.000.000,00 | (48.604.300,00) | (50,11) |
| 10 | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 573.136.400,00 | 707.492.400,00 | (134.356.000,00) | (18,99) |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 30.721.750,00 | 12.655.000,00 | 18.066.750,00 | 142,76 |
| 12 | Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 103.959.500,00 | 218.581.000,00 | (114.621.500,00) | (52,44) |

| No. | SKPD | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **13** | Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian | 147.895.000,00 | 175.926.000,00 | (28.031.000,00) | (15,93) |
| **14** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 16.530.000,00 | 135.017.916,00 | (118.487.916,00) | (87,76) |
| **15** | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 96.206.400,00 | 34.980.000,00 | 61.226.400,00 | 175,03 |
| **16** | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 20.975.000,00 | 13.310.000,00 | 7.665.000,00 | 57,59 |
| **17** | Badan Keuangan Daerah | 97.031.500,00 | 171.246.900,00 | (74.215.400,00) | (43,34) |
| **18** | Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 27.625.000,00 | 0,00 | 27.625.000,00 | 100,00 |
| **19** | Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Penaggulangan Bencana Daerah | 37.954.000,00 | 0,00 | 37.954.000,00 | 100,00 |
| **20** | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 39.975.000,00 | 0,00 | 39.975.000,00 | 100,00 |
| **21** | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | Kecamatan Jemaja | 31.810.000,00 | 32.500.000,00 | (690.000,00) | (2,12) |
| **23** | Kecamatan Jemaja Timur | 17.460.000,00 | 0,00 | 17.460.000,00 | 100,00 |
| **24** | Kecamatan Palmatak | 36.778.500,00 | 25.118.500,00 | 11.660.000,00 | 46,42 |
| **25** | Kecamatan Siantan | 65.527.300,00 | 108.206.869,00 | (42.679.569,00) | (39,44) |
| **26** | Kecamatan Siantan Selatan | 70.337.600,00 | 18.940.000,00 | 51.397.600,00 | 271,37 |
| **27** | Kecamatan Siantan Tengah | 41.639.000,00 | 49.920.000,00 | (8.281.000,00) | (16,59) |
| **28** | Kecamatan Siantan Timur | 50.683.674,00 | 17.000.000,00 | 33.683.674,00 | 198,14 |
| **29** | Kecamatan Siantan Utara | 2.030.000,00 | 0,00 | 2.030.000,00 | 100,00 |
| **30** | Kecamatan Jemaja Barat | 6.286.500,00 | 9.999.000,00 | (3.712.500,00) | (37,13) |
| **31** | Kecamatan Kute Siantan | 3.410.000,00 | 0,00 | 3.410.000,00 | 100,00 |
| | **JUMLAH** | **6.921.047.433,00** | **4.845.162.937,92** | **2.075.884.495,08** | **42,84** |

**Tabel 226**
**Perbedaan Realisasi Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA Tahun 2021**

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Beban/Belanja Pemeliharaan | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Beban/Belanja Pemeliharaan** | **6.921.047.433,00** | **5.285.591.076,00** | **1.635.456.357,00** |

Berdasarkan Tabel diatas pada Tahun 2021 diketahui terdapat selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp1.635.456.357,00.

**Tabel 227**
**Rincian Penjelasan Selisih Realisasi Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA Tahun 2021**

| Uraian | Belanja LRA | Penambahan Utang | Beban Lo |
|---|---|---|---|
| BELANJA / BEBAN PEMELIHARAAN | | | |
| Belanja Pemeliharaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 3.227.005.724,00 | 363.404.000,00 | 3.590.409.724,00 |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1.503.545.152,00 | 763.256.578,00 | 2.266.801.730,00 |
| Belanja Pemeliharaan Jalan. Jaringan. dan Irigasi | 541.222.000,00 | 508.795.779,00 | 1.050.017.779,00 |
| Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 13.818.200,00 | 0,00 | 13.818.200,00 |

| Uraian | Belanja LRA | Penambahan Utang | Beban Lo |
|---|---|---|---|
| BELANJA / BEBAN PEMELIHARAAN | | | |
| TOTAL BELANJA / BEBAN PEMELIHARAAN | **5.285.591.076,00** | **1.635.456.357,00** | **6.921.047.433,00** |

### D.8.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas - LO

Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Beban Perjalanan Dinas-LO adalah sebesar Rp31.319.044.570,00 sedangkan Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2020 sebesar Rp38.738.431.212,00 sehingga mengalami penurunan sebesar 7.419.386.642,00 atau sebesar 19,15%.

**Tabel 228**
**Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No. | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 21.813.156.170,00 | 21.105.351.744,00 | 707.804.426,00 | 3,35 |
| 2 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 9.505.888.400,00 | 17.497.179.468,00 | (7.991.291.068,00) | (45,67) |
| 3 | Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri | 0,00 | 135.900.000,00 | (135.900.000,00) | (100,00) |
| | **JUMLAH** | **31.319.044.570,00** | **38.738.431.212,00** | **(7.419.386.642,00)** | **(19,15)** |

Perbandingan Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2021 dengan Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2020. dapat dirinci ke masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 229**
**Realisasi Beban Pejalanan Dinas Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No. | SKPD | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Sekretariat Daerah | 4.778.682.832,00 | 4.546.693.823,00 | 231.989.009,00 | 5,10 |
| **2** | Sekretariat DPRD | 9.652.776.696,00 | 9.154.818.490,00 | 497.958.206,00 | 5,44 |
| **3** | Inspektorat | 571.998.244,00 | 1.014.643.393,00 | (442.645.149,00) | (43,63) |
| **4** | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 2.857.487.124,00 | 2.517.070.925,00 | 340.416.199,00 | 13,52 |
| **5** | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.855.240.976,00 | 7.431.695.612,00 | (5.576.454.636,00) | (75,04) |
| **6** | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1.693.893.834,00 | 2.395.693.185,00 | (701.799.351,00) | (29,29) |
| **7** | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa | 951.685.728,00 | 780.333.292,00 | 171.352.436,00 | 21,96 |
| **8** | Dinas Penanaman Modal PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 652.651.192,00 | 493.589.192,00 | 159.062.000,00 | 32,23 |
| **9** | Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 660.326.986,00 | 915.091.642,00 | (254.764.656,00) | (27,84) |
| **10** | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 706.422.218,00 | 841.235.194,00 | (134.812.976,00) | (16,03) |

| No. | SKPD | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 570.825.239,00 | 469.074.597,00 | 101.750.642,00 | 21,69 |
| **12** | Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 535.046.851,00 | 1.156.345.810,00 | (621.298.959,00) | (53,73) |
| **13** | Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian | 269.218.353,00 | 500.640.613,00 | (231.422.260,00) | (46,23) |
| **14** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 821.226.710,00 | 731.358.954,00 | 89.867.756,00 | 12,29 |
| **15** | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 485.877.095,00 | 762.005.199,00 | (276.128.104,00) | (36,24) |
| **16** | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 279.634.681,00 | 386.861.632,00 | (107.226.951,00) | (27,72) |
| **17** | Badan Keuangan Daerah | 1.592.156.817,00 | 1.506.526.300,00 | 85.630.517,00 | 5,68 |
| **18** | Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 489.320.169,00 | 727.591.793,00 | (238.271.624,00) | (32,75) |
| **19** | Badan Kesatuan Bangsa. Dan Politik | 240.277.050,00 | 595.360.818,00 | (355.083.768,00) | (59,64) |
| **20** | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 399.869.914,00 | 425.837.528,00 | (25.967.614,00) | (6,10) |
| **21** | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 85.588.626,00 | 0,00 | 85.588.626,00 | 100,00 |
| **22** | Kecamatan Jemaja | 267.191.000,00 | 236.462.874,00 | 30.728.126,00 | 12,99 |
| **23** | Kecamatan Jemaja Timur | 131.852.951,00 | 109.384.700,00 | 22.468.251,00 | 20,54 |
| **24** | Kecamatan Palmatak | 135.621.795,00 | 129.122.021,00 | 6.499.774,00 | 5,03 |
| **25** | Kecamatan Siantan | 54.203.500,00 | 103.281.479,00 | (49.077.979,00) | (47,52) |
| **26** | Kecamatan Siantan Selatan | 84.762.789,00 | 131.857.300,00 | (47.094.511,00) | (35,72) |
| **27** | Kecamatan Siantan Tengah | 100.896.500,00 | 137.250.000,00 | (36.353.500,00) | (26,49) |
| **28** | Kecamatan Siantan Timur | 79.995.000,00 | 141.381.000,00 | (61.386.000,00) | (43,42) |
| **29** | Kecamatan Siantan Utara | 64.268.698,00 | 98.969.300,00 | (34.700.602,00) | (35,06) |
| **30** | Kecamatan Jemaja Barat | 211.996.000,00 | 179.941.546,00 | 32.054.454,00 | 17,81 |
| **31** | Kecamatan Kute Siantan | 38.049.002,00 | 118.313.000,00 | (80.263.998,00) | (67,84) |
| **JUMLAH** | | **31.319.044.570,00** | **38.738.431.212,00** | **(7.419.386.642,00)** | **(19,15)** |

**Tabel 230**
**Perbedaan Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| Uraian | Beban/Belanja Perjalanan Dinas | | Selisih |
|---|---|---|---|
| | LO | LRA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Beban/Belanja Perjalanan Dinas** | **31.319.044.570,00** | **31.319.044.570,00** | **0,00** |

Berdasarkan Tabel diatas pada Tahun 2021 diketahui tidak terdapat selisih antara Beban Perjalanan Dinas – LO dengan Belanja Perjalanan Dinas – LRA.

**Tabel 231**
**Rincian Penjelasan Selisih Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Tahun 2021**

| Uraian | Belanja LRA | Penambahan | Pengurangan | Beban LO |
|---|---|---|---|---|
| **Belanja / Beban Perjalanan Dinas** | | | | |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 31.319.044.570,00 | 0,00 | 0,00 | 31.319.044.570,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL BELANJA / BEBAN PERJALANAN DINAS | 31.319.044.570,00 | 0,00 | 0,00 | 31.319.044.570,00 |

### D.8.1.5 Beban Hibah - LO

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terakhir dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran beban hibah pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beban Hibah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.

Beban Hibah-LO merupakan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Akun Beban Hibah Tahun Anggaran 2021 merupakan hibah kepada Badan/Lembaga/Instansi Vertikal/Organisasi Swasta. Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Beban Hibah-LO adalah sebesar Rp15.003.616.918,00 sedangkan Beban Hibah-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp27.391.102.575,00 atau penurunan sebesar Rp12.387.485.657,00 atau sebesar 45,22%. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 232**
**Beban Hibah Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Lebih/(Kurang) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 100,00 |
| **2** | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 2.354.940.604,00 | 0,00 | 2.354.940.604,00 | 100,00 |
| **3** | Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 715.188.900,00 | 0,00 | 715.188.900,00 | 100,00 |
| **4** | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 730.000.000,00 | 0,00 | 730.000.000,00 | 100,00 |
| **5** | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 1.137.800.000,00 | 0,00 | 1.137.800.000,00 | 100,00 |
| **6** | Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 4.885.538.429,00 | 0,00 | 4.885.538.429,00 | 100,00 |

| No | Uraian | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Lebih/(Kurang) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **7** | Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 876.061.267,00 | 0,00 | 876.061.267,00 | 100,00 |
| **8** | Beban Hibah Barang kepada Koperasi | 3.831.960.000,00 | 0,00 | 3.831.960.000,00 | 100,00 |
| **9** | Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 397.127.718,00 | 397.127.718,00 | 0,00 | |
| **10** | Beban Hibah Kepada Pemerintah | 0,00 | 24.148.968.000,00 | (24.148.968.000,00) | (100,00) |
| **11** | Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan | 0,00 | 1.858.250.000,00 | (1.858.250.000,00) | (100,00) |
| **12** | Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota | 0,00 | 986.756.857,00 | (986.756.857,00) | (100,00) |
| **JUMLAH** | | **15.003.616.918,00** | **27.391.102.575,00** | **(12.387.485.657,00)** | **(45,22)** |

Penjelasan Perbedaan Beban Hibah - LO dengan Belanja Hibah - LRA Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 233**
**Perbedaan Realisasi Beban Hibah LO dan Belanja Hibah LRA Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | LO | LRA | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | Beban/Belanja Hibah | 15.003.616.918,00 | 14.400.218.918,00 | 603.398.000,00 |
| | ***Jumlah*** | **15.003.616.918,00** | **14.400.218.918,00** | **603.398.000,00** |

Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2021 terdapat selisih antara Beban Hibah – LO dengan Belanja Hibah – LRA. yaitu sebesar Rp603.398.000,00 merupakan selisih dari beban hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba.sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp518.324.000,00 dan Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp85.074.000,00. Hal ini terjadi dikarenakan LRA hanya mencatat sebesar Realisasi berdasarkan SP2D yg sudah diRealisasiakan sedangkan pada LO mencatat Sebesar Realisasi SP2D dan ditambah dengan adanya Pengakuan Utang Tunda Bayar. Rincian Penambahan Utang dapat dijelaskan berikut ini. yaitu adanya penambahan Utang pada SKPD Disdikpora dengan SPM Nomor 641 sebesar Rp126.599.00,00 dan SPM Nomor 752 Sebesar Rp191.840.000,00 dengan Total penambahan Utang Rp318.439.000,00. Adanya Penambahan Utang pada BKPSDM dengan Nomor SPM 086 Sebesar Rp199.885.000,00 dan terakhir terdapat pada OPD DPUPRPRKP dengan Nomor SPM 335 Sebesar Rp42.900.000,00 dan SPM Nomor 336 Sebesar Rp42.174.000,00 dengan Total Penambahan Utang sebesar Rp85.074.000,00. Sehingga total Penambahan Utang Sebesar 603.398.000,00.

**Tabel 234**
**Beban Hibah Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | SKPD | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Lebih/(Kurang) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Sekretariat Daerah | 816.800.000,00 | 0,00 | 816.800.000,00 | 0,00 |
| **2** | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 3.123.697.979,00 | 0,00 | 3.123.697.979,00 | 0,00 |
| **3** | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2.092.135.267,00 | 0,00 | 2.092.135.267,00 | 0,00 |
| **4** | Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 579.040.604,00 | 0,00 | 579.040.604,00 | 0,00 |
| **5** | Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 3.592.970.350,00 | 0,00 | 3.592.970.350,00 | 0,00 |
| **6** | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 3.831.960.000,00 | 0,00 | 3.831.960.000,00 | 0,00 |
| **7** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 115.000.000,00 | 0,00 | 115.000.000,00 | 0,00 |
| **8** | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 274.885.000,00 | 0,00 | 274.885.000,00 | 0,00 |
| **9** | Badan Keuangan Daerah | 75.000.000,00 | 27.391.102.575,00 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| **10** | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 502.127.718,00 | 0,00 | 502.127.718,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | | **15.003.616.918,00** | **27.391.102.575,00** | **15.003.616.918,00** | **0,00** |

**Tabel 235**
**Beban Hibah Uang dan Barang Kepada Pemerintah Pusat Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | SKPD | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Lebih/(Kurang) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Badan Keuangan Daerah | 75.000.000,00 | 27.391.102.575,00 | (27.316.102.575,00) | (99,73) |
| **JUMLAH** | | **75.000.000,00** | **27.391.102.575,00** | **(27.316.102.575,00)** | **(99,73)** |

**Tabel 236**
**Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Uang Kepada Pemerintah Pusat Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | SKPD | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Lebih/(Kurang) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Dinas Pendidikan. Pemuda Dan Olahraga | 1.400.900.000,00 | 0,00 | 1.400.900.000,00 | 0,00 |
| **2** | Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 579.040.604,00 | 0,00 | 579.040.604,00 | 0,00 |
| **3** | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan | 115.000.000,00 | 0,00 | 115.000.000,00 | 0,00 |
| **4** | Sekretariat Daerah | 185.000.000,00 | 0,00 | 185.000.000,00 | 0,00 |
| **5** | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| | | **2.354.940.604,00** | **0,00** | **2.354.940.604,00** | **0,00** |

**Tabel 237**
**Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Uang Kepada Pemerintah Pusat**
**Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | SKPD | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Lebih/(Kurang) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Dinas Pendidikan. Pemuda Dan Olahraga | 515.303.900,00 | 0,00 | 515.303.900,00 | 0,00 |
| **2** | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 199.885.000,00 | 0,00 | 199.885.000,00 | 0,00 |
| | | **715.188.900,00** | **0,00** | **715.188.900,00** | **0,00** |

**Tabel 238**
**Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | SKPD | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Lebih/(Kurang) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 105.000.000,00 | 0,00 | 105.000.000,00 | 0,00 |
| **2** | Sekretariat Daerah | 625.000.000,00 | 0,00 | 625.000.000,00 | 0,00 |
| | | **730.000.000,00** | **0,00** | **730.000.000,00** | **0,00** |

**Tabel 239**
**Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**
**Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | SKPD | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Lebih/(Kurang) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1.131.000.000,00 | 0,00 | 1.131.000.000,00 | 0,00 |
| **2** | Sekretariat Daerah | 6.800.000,00 | 0,00 | 6.800.000,00 | 0,00 |
| | | **1.137.800.000,00** | **0,00** | **1.137.800.000,00** | **0,00** |

**Tabel 240**
**Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**
**Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | SKPD | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Lebih/(Kurang) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Dinas Pendidikan. Pemuda Dan Olahraga | 1.207.494.079,00 | 0,00 | 1.207.494.079,00 | 0,00 |
| **2** | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 85.074.000,00 | 0,00 | 85.074.000,00 | 0,00 |
| **3** | Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 3.592.970.350,00 | 0,00 | 3.592.970.350,00 | 0,00 |
| | | **4.885.538.429,00** | **0,00** | **4.885.538.429,00** | **0,00** |

**Tabel 241**
**Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**
**Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | SKPD | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Lebih/(Kurang) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 876.061.267,00 | 0,00 | 876.061.267,00 | 0,00 |
| | | **876.061.267,00** | **0,00** | **876.061.267,00** | **0,00** |

**Tabel 242**
**Beban Hibah Barang kepada Koperasi**
**Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | SKPD | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Lebih/(Kurang) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup | 3.831.960.000,00 | 0,00 | 3.831.960.000,00 | 0,00 |
| | | **3.831.960.000,00** | **0,00** | **3.831.960.000,00** | **0,00** |

**Tabel 243**
**Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**
**Per SKPD Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | SKPD | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 | Lebih/(Kurang) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 397.127.718,00 | 0,00 | 397.127.718,00 | 0,00 |
| | | **397.127.718,00** | **0,00** | **397.127.718,00** | **0,00** |

### D.8.1.6 Beban Bantuan Sosial - LO

Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan sosial. beban bantuan sosial yang direncanakan dan/atau tidak direncanakan. Beban Bantuan Sosial-LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp134.715.000,00 sedangkan Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp183.445.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp48.730.000,00 atau sebesar 26,56% dengan rincian sebagai berikut;

**Tabel 244**
**Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga | 134.715.000,00 | | 134.715.000,00 | 0,00 |
| **2** | Beban Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan | | 24.945.000,00 | (24.945.000,00) | (100,00) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat – LO | | 158.500.000,00 | (158.500.000,00) | (100,00) |
| | **JUMLAH** | **134.715.000,00** | **183.445.000,00** | **(48.730.000,00)** | **(26,56)** |

Penjelasan Perbedaan Beban Bantuan Sosial - LO dengan Belanja Bantuan Sosial - LRA Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 245**
**Perbedaan Realisasi Beban Bantuan Sosial LO dan Belanja Bantuan Sosial LRA Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | LO | LRA | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | Beban/Belanja Bantuan Sosial | 134.715.000,00 | 134.715.000,00 | 0,00 |
| | ***Jumlah*** | **134.715.000,00** | **134.715.000,00** | **0,00** |

Berdasarkan tabel diatas Pada Tahun 2021 tidak terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial – LO dengan Belanja Bantuan Sosial – LRA.

### D.8.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO merupakan beban Penyusutan alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap.

Untuk Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp134.757.527.888,01. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 246**
**Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Beban Penyusutan Tahun 2021 | Beban Amortisasi Tahun 2021 | Akumulasi Beban Penyusutan Dan Amortisasi 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga | 11.125.090.891,00 | 110.242.947,00 | 11.235.333.838,00 |
| **2** | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 17.779.041.439,50 | 0,00 | 17.779.041.439,50 |
| **3** | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 77.561.061.858,84 | 2.522.890.760,00 | 80.083.952.618,84 |
| **4** | Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah | 304.903.937,00 | 398.271.500,00 | 703.175.437,00 |
| **5** | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 6.289.117.905,00 | 208.504.850,00 | 6.497.622.755,00 |
| **6** | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 296.110.521,00 | 3.533.880,00 | 299.644.401,00 |
| **7** | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Desa | 164.216.974,00 | 0,00 | 164.216.974,00 |
| **8** | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 147.237.314,00 | 0,00 | 147.237.314,00 |
| **9** | Dinas Penanaman Modal PTSP. Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 118.039.027,00 | 24.782.800,00 | 142.821.827,00 |
| **10** | Badan Kesatuan Bangsa. Politik | 119.418.451,00 | 0,00 | 119.418.451,00 |
| **11** | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 805.801.547,00 | 0,00 | 805.801.547,00 |
| **12** | Sekretariat Daerah | 7.830.995.813,00 | 94.184.200,00 | 7.925.180.013,00 |
| **13** | Sekretariat DPRD | 549.677.971,00 | 0,00 | 549.677.971,00 |
| **14** | Badan Keuangan Daerah | 682.868.185,00 | 71.777.500,00 | 754.645.685,00 |

| No | Uraian | Beban Penyusutan Tahun 2021 | Beban Amortisasi Tahun 2021 | Akumulasi Beban Penyusutan Dan Amortisasi 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **15** | Inspektorat | 199.440.993,00 | 0,00 | 199.440.993,00 |
| **16** | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 365.549.731,00 | 0,00 | 365.549.731,00 |
| **17** | Kantor Kecamatan Siantan | 494.166.147,00 | 0,00 | 494.166.147,00 |
| **18** | Kantor Kecamatan Jemaja | 278.083.808,00 | 0,00 | 278.083.808,00 |
| **19** | Kantor Kecamatan Palmatak | 210.856.184,00 | 0,00 | 210.856.184,00 |
| **20** | Kantor Kecamatan Siantan Timur | 111.843.239,00 | 0,00 | 111.843.239,00 |
| **21** | Kantor Kecamatan Siantan Selatan | 136.938.796,00 | 0,00 | 136.938.796,00 |
| **22** | Kantor Kecamatan Jemaja Timur | 120.146.887,00 | 0,00 | 120.146.887,00 |
| **23** | Kantor Kecamatan Siantan Tengah | 211.587.274,00 | 0,00 | 211.587.274,00 |
| **24** | Dinas Komunikasi. Informatika dan Statistik | 1.082.104.296,00 | (9.075.000,00) | 1.073.029.296,00 |
| **25** | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 885.272.840,00 | 261.098.250,00 | 1.146.371.090,00 |
| **26** | Dinas Perikanan. Pertanian dan Pangan | 1.072.338.602,00 | 155.905.666,67 | 1.228.244.268,67 |
| **27** | Dinas Koperasi. UKM. Perdagangan dan Perindustrian | 1.679.468.529,00 | 42.487.114,00 | 1.721.955.643,00 |
| **28** | Kantor Kecamatan Siantan Utara | 43.886.188,00 | 0,00 | 43.886.188,00 |
| **29** | Kantor Kecamatan Jemaja Barat | 114.462.654,00 | 0,00 | 114.462.654,00 |
| **30** | Kantor Kecamatan Kute Siantan | 93.195.418,00 | 0,00 | 93.195.418,00 |
| **JUMLAH** | | **130.872.923.420,34** | **3.884.604.467,67** | **134.757.527.888,01** |

Tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 sebesar Rp134.757.527.888,01 terdiri dari Beban Penyusutan sebesar Rp130.872.923.420,34 dan Amortisasi sebesar 3.884.604.467,67. Tidak terdapat perbedaan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dengan penyusutan dan amortisasi tahun 2021 pada neraca.

### D.8.1.7.1 Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam priode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan peralatan dan mesin

**Tabel 247**
**Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin | 38.308.531.431,50 | 30.614.977.254,00 | 7.693.554.177,50 | 25,13 |
| **JUMLAH** | | **38.308.531.431,50** | **30.614.977.254,00** | **7.693.554.177,50** | **25,13** |

### D.8.1.7.2 Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan

Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan Gedung dan bangunan.

**Tabel 248**
**Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan | 14.958.107.371,00 | 10.826.174.325,00 | 4.131.933.046,00 | 38,17 |
| **JUMLAH** | | **14.958.107.371,00** | **10.826.174.325,00** | **4.131.933.046,00** | **38,17** |

### D.8.1.7.3 Beban Penyusutan Jalan. Jaringan dan Irigasi

Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan Gedung dan bangunan.

**Tabel 249**
**Beban Penyusutan Jalan. Jaringan Dan Irigasi Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Beban Penyusutan Jalan. Jaringan dan Irigasi | 77.364.349.154,84 | 76.888.658.495,00 | 475.690.659,84 | 0,62 |
| **JUMLAH** | | **77.364.349.154,84** | **76.888.658.495,00** | **475.690.659,84** | **0,62** |

### D.8.1.7.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa beban penyusutan Aset tetap lainnya.

**Tabel 250**
**Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### D.8.1.7.5 Beban Penyusutan Aset Lainnya

Digunakan untuk mencatat beban penyusutan aset lainnya. antara lain beban penyusutan kemitraan dengan fihak ketiga/kerjasama pemanfaatan.

**Tabel 251**
**Beban Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Beban Penyusutan Aset Lainnya | 241.935.463,00 | 0,00 | 241.935.463,00 | 100,00 |
| **JUMLAH** | | **241.935.463,00** | **0,00** | **241.935.463,00** | **100,00** |

## D.8.2.6 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Digunakan untuk mencatat beban amortisasi aset tidak berwujud antara lain lisensi dan/atau frenchise.

**Tabel 252**
**Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 3.884.604.467,67 | 4.494.245.667,73 | (609.641.200,06) | (13,56) |
| **JUMLAH** | | **3.884.604.467,67** | **4.494.245.667,73** | **(609.641.200,06)** | **(13,56)** |

## D.8.1.8 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang - LO untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp224.022.878,43 sedangkan Beban Penyisihan Piutang - LO Tahun 2020 adalah sebesar (Rp93.578.436,44) sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp317.601.314,87 atau sebesar (339,40%). dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 253**
**Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| No | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Beban Penyisihan Piutang | 224.022.878,43 | (93.578.436,44) | 317.601.314,87 | (339,40) |
| **JUMLAH** | | **224.022.878,43** | **(93.578.436,44)** | **317.601.314,87** | **(339,40)** |

**Tabel 254**
**Mutasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021**

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Saldo 31 Desember 2020 | Penambahan | Pengurangan | Akumulasi Saldo 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Penyisihan Piutang | (93.578.436,44) | 317.601.314,87 | 0,00 | 224.022.878,43 |
| **Jumlah** | **(93.578.436,44)** | **317.601.314,87** | **0,00** | **224.022.878,43** |

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Beban Penyisihan Piutang-LO adalah sebesar Rp224.022.878,43 Rincian Beban Penyisihan Piutang-LO Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 255**
**Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Beban Penyisihan Piutang s.d 31 Desember 2021 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **1** | Beban Penyisihan Piutang PBBP2 | 137.492.049,17 |
| **2** | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 209.595.598,94 |
| **3** | Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara | (123.064.769,68) |
| **JUMLAH** | | **224.022.878,43** |

### D.8.3.1 Beban Bagi Hasil

Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan.

**Tabel 256**
**Beban Bagi Hasil Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Beban Bagi Hasil | 1.260.607.506,00 | 0,00 | 1.260.607.506,00 | 100,00 |
| | **JUMLAH** | **1.260.607.506,00** | **0,00** | **1.260.607.506,00** | **100,00** |

Beban Bagi Hasil yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp1.260.607.506,00 dapat diuraikan dari Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.038.042.837,00 dan Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa sebesar Rp222.564.669,00.

### D.8.3.2 Beban Bantuan Keuangan

Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban bantuan keuangan umum antar daerah provinsi. Beban Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 257**
**Beban Bantuan Keuangan Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | Beban Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | 53.850.333.685,00 | 58.165.215.815,00 | (4.314.882.130,00) | (7,42) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **JUMLAH** | **53.850.333.685,00** | **58.165.215.815,00** | **(4.314.882.130,00)** | **(7,42)** |

Beban Bantuan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp53.850.333.685,00 dapat diuraikan dari Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa sebesar Rp49.318.514.256,00 (ADD) dan Penambahan Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Provinsi atau Kabupaten - Belanja Penyaluran Alokasi dana Desa (ADD) Tahun 2021 sebesar Rp4.531.819.429,00.

## Surplus/Defisit dari Operasi - LO

Surplus/Defisit dari Operasi-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Surplus/Defisit dari Operasi-LO adalah sebesar Rp13.907.196.081,97sedangkan Surplus/Defisit dari Operasi-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp103.926.979.133,12. Atau mengalami penurunan sebesar Rp90.019.783.051,15 atau sebesar 86,62.

Rincian Surplus/Defisit dari Operasi-LO Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 258**
**Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1* | Pendapatan – LO | 805.049.849.858,18 | 857.557.494.288,49 | (52.507.644.430,31) | (6,12) |
| *2* | Beban – LO | 791.142.653.776,21 | 753.630.515.155,37 | 37.512.138.620,84 | 4,98 |
| | ***JUMLAH*** | **13.907.196.081,97** | **103.926.979.133,12** | **(90.019.783.051,15)** | **(86,62)** |

## Kegiatan Non Operasional-LO

Kegiatan Non Operasional-LO Tahun 2021 merupakan Surplus dari kegiatan non operasional lainya berupa Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp0,00 sedangkan Realisasi Tahun 2020 sebesar Rp281.041.875,00 dengan dirinci sebagai berikut.

**Tabel 259**
**Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *2* | Surplus dari Kegiatan Non Operasional -LO | 0,00 | 307.921.875.00 | (307.921.875,00) | (100,00) |
| *3* | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO | 00.00 | 26.880.000,00 | (26.880.000,00) | (100,00) |
| | ***JUMLAH (2)-(3)*** | **0,00** | **281.041.875,00** | **281.041.875,00** | **(100,00)** |

### Pos Luar Biasa-LO

Pos Luar Biasa-LO pada Tahun 2021 sebesar Rp878.745.392,00 merupakan beban luar biasa merupakan Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa atas Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga.

**Tabel 260**
**Pos Luar Biasa - LO Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| *No* | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1* | Beban Luar Biasa | 878.745.392,00 | 29.074.357.387,00 | (28.195.611.995,00) | (96,98) |
| | ***JUMLAH*** | **878.745.392,00** | **29.074.357.387,00** | **(28.195.611.995,00)** | **(96,98)** |

### Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada LO untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp13.028.450.689,97 sedangkan pada Laporan Operasional untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Surplus/Defisit sebesar Rp75.133.663.621,12 mengalami penurunan sebesar Rp62.105.212.931,03 atau sebesar 82,66%. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 261**
**Surplus/Defisit - LO Tahun 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

| *No* | Uraian | Tahun 2021 | Tahun 2020 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1* | Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa | 13.907.196.081,97 | 104.208.021.008,12 | (90.300.824.926,15) | (86,65) |
| *2* | Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa | (878.745.392,00) | (29.074.357.387,00) | 28.195.611.995,00 | (96,98) |
| | ***JUMLAH*** | **13.028.450.689,97** | **75.133.663.621,12** | **(62.105.212.931,15)** | **(82,66)** |

## E. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi. aktivitas investasi. aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama Tahun Anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah. dimana sampai dengan akhir Tahun Anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 dan 2020 terdiri atas:

**Tabel 262**
**Realisasi Arus Kas Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | **2** | **3** | **4** |
| **A** | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 180.003.106.803,88 | 106.802.338.261,83 |
| **B** | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | (141.911.155.229,93) | (161.248.471.277,92) |
| **C** | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | (97.095.745,00) | 558.896.527,00 |
| **D** | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | 0,00 | (19,415,831,00) |
| **Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas** | | **37.994.855.828,95** | **(53.906.652.320,09)** |

Berdasarkan realisasi Arus Kas Bersih Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp37.994.855.828,95 mengalami peningkatan bersih kas sebesar Rp91.901.508.149,04 atau sebesar 170,48%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 yang mengalami defisit sebesar Rp53.906.652.320,09 dengan rincian sebagai berikut.

## E.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas. yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 263**
**Realisasi Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | **2** | **3** | **4** |
| **1** | Arus Kas Masuk | 845.562.863.756,18 | 816.788.855.634,18 |
| **2** | Arus Kas Keluar | 664.507.725.716,11 | 709.986.517.372,35 |
| **Jumlah (1 – 2)** | | **181.055.138.040,07** | **106.802.338.261,83** |

Berdasarkan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp181.055.138.040,07 mengalami peningkatan sebesar Rp74.252.799.778,24 atau sebesar 69,52%. dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp Rp106.802.338.261,83. Realisasi arus kas aktivitas operasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

### E.1.1 Arus Kas Masuk

Realisasi Arus Kas Masuk sejumlah Rp845.562.863.756,18 merupakan Arus Kas Masuk atas Aktivitas Operasi yang berasal dari:

#### E.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah - LRA

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp13.248.704.027,79 mengalami penurunan sebesar Rp899.303.045,90 atau sebesar 6.36%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp14.148.007.073,69;

**E.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah - LRA**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp4.731.456.914,83 mengalami peningkatan sebesar Rp1.238.436.097,35 atau sebesar 35,45%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.493.020.817,48;

**E.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 yang berasal deviden Bank Riau Kepri sebesar Rp1.979.148.878,00 mengalami peningkatan sebesar Rp661.129.115,00 atau sebesar 50,16%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.318.019.763,00;

**E.1.1.4 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp13.365.742.442,34 mengalami penurunan sebesar Rp690.547.850,33 atau sebesar 5,45%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.675.194.592,01;

**E.1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak - LRA**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp169.817.097.319,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.663.855.443,00 atau sebesar 8,94%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp186.480.952.762,00.

**E.1.1.6 Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp368.303.160.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.215.645.000,00 atau sebesar 1,92%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp375.518.805.000,00;

**E.1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp67.820.014.609,00 mengalami peningkatan sebesar Rp19.757.269.460,00 atau sebesar 41,11%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp48.062.745.149,00;

**E.1.1.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp18.395.205.686,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.809.396.934,00 atau sebesar 27,02%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.204.602.620,00;

**E.1.1.9 Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp65.907.002.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp40.755.082.000,00 atau sebesar 162,04%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.151.920.000,00;

**E.1.1.10 Penerimaan Dana Desa**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp53.151.623.854,00 mengalami peningkatan sebesar Rp697.573.854,00 atau sebesar 1.33%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp52.454.050.000,00;

**E.1.1.11 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp42.160.395.659,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.149.245.928,00 atau sebesar 8,07%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp39.011.149.731,00;

**E.1.1.12 Penerimaan Bantuan Keuangan**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp13.500.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.000.000.000,00 atau sebesar 34,15%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.500.000.000,00;

**E.1.1.13 Penerimaan Hibah**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hibah (Penerimaan Hibah Dana BOS) Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp13.183.312.366,22 mengalami peningkatan sebesar Rp412.924.240,22 atau sebesar 3,23%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.770.388.126,00;

**E.1.2 Arus Kas Keluar**

Realisasi arus Kas Keluar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp181.055.138.040,07 merupakan saldo Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

**E.1.2.1 Pembayaran Pegawai**

Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Pegawai Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp274.063.269.975,54 mengalami penurunan sebesar Rp78.213.160.767,46 atau sebesar 22,20%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp352.276.430.743,00;

**E.1.2.2 Pembayaran Barang dan Jasa**

Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Barang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp271.300.030.814,57 mengalami peningkatan sebesar Rp80.858.114.962,22 atau sebesar 42,46 %. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp190.441.915.852,35;

### E.1.2.3 Pembayaran Hibah

Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Hibah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp14.400.218.918,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.990.883.657,00 atau sebesar 47,43%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp27.391.102.575,00;

### E.1.2.4 Pembayaran Bantuan Sosial

Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp134.715.000.00 mengalami penurunan sebesar Rp48.730.000,00 atau sebesar 26,56%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp183.445.000,00;

### E.1.2.5 Pembayaran Tak Terduga

Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Tak Terduga di Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp878.745.392,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.195.611.995,00 atau sebesar 96,98%. dibandingkan realisasi di Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp29.074.357.387,00;

### E.1.2.6 Pembayaran Bantuan Keuangan

Realisasi Arus Kas Keluar dari Pembayaran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp103.730.745.616,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.888.520.199,00 atau sebesar 6,23%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp110.619.265.815,00;

### E.1.2.7. Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintahan Desa

Realisasi Arus Kas Keluar dari Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp53.151.623.854,00 mengalami kenaikan sebesar Rp697.573.854,00 atau sebesar 1,33%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp52.454.050.000,00;

## E.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

### E.2.1 Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Realisasi meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar adalah sebagai berikut.

**Tabel 264**
**Realisasi Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | Arus Kas Masuk | 0,00 | 0,00 |
| **2** | Arus Kas Keluar | 142.963.186.466,12 | 159.748.471.277,92 |
| **Jumlah (1 – 2)** | | **(142.963.186.466,12)** | **(159.748.471.277,92)** |

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp142.963.186.466,12 karena tidak adanya Arus kas masuk dari Aktivitas Investasi. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi digunakan untuk belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin. belanja modal gedung dan bangunan. belanja modal jalan. irigasi dan jaringan. belanja modal aset tetap lainnya dan perolehan aset lainnya yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

**E.2.1.1 Perolehan Tanah**

Realisasi Arus Kas Keluar dalam rangka perolehan tanah pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp790.607.000,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp790.607.000,00;

**E.2.1.2 Perolehan Peralatan dan Mesin**

Realisasi Arus Kas Keluar dalam rangka perolehan Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp33.331.184.690,10 mengalami peningkatan sebesar Rp6.065.419.954,10 atau sebesar 22,25% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp27.265.764.736,00;

**E.2.1.3 Perolehan Bangunan dan Gedung**

Realisasi Arus Kas Keluar dalam rangka Perolehan Bangunan dan Gedung pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp44.443.379.101,50 mengalami penurunan sebesar Rp39.182.053.669,42 atau sebesar 46,85%. dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp83.625.432.770,92;

**E.2.1.4 Perolehan Jalan. Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Arus Kas Keluar dalam rangka Perolehan Jalan. Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp63.046.577.745,69 mengalami peningkatan sebesar Rp17.599.936.374,69 atau sebesar 38,73% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.446.641.371,00;

**E.2.1.5 Perolehan Aset Tetap Lainnya**

Realisasi Arus Kas Keluar dalam rangka Perolehan aset tetap lainnya pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.142.044.928,83 mengalami penurunan sebesar Rp477.980.471,17 atau sebesar 18,24% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.620.025.400,00.

**E.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar. sebagai berikut.

**Tabel 265**
**Realisasi Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | Arus Kas Masuk | 902,904,255,00 | 558.896.527,00 |
| **2** | Arus Kas Keluar | 1,000,000,000,00 | 0,00 |
| **Jumlah (1 – 2)** | | **(97,095,745,00)** | **558.896.527,00** |

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2021 adalah surplus sebesar (Rp97.095.745,00) yang merupakan nilai realisasi pengembalian pokok dana bergulir pada Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat melalui UPT Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Perdagangan dan Perindustrian (penyaluran dana bergulir) pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00.

### E.3.1 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan merupakan realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pada pokok dana bergulir di Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp902.904.255,00 mengalami peningkatan sebesar Rp344.007.728,00 atau sebesar 61,55% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp558.896.527,00.

### E.3.2 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan merupakan realisasi penyaluran pemberian pinjaman daerah berupa dana bergulir pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

## E.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris realisasinya meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 266**
**Realisasi Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 dan 2020**

**(Dalam Rupiah)**

| No | Uraian | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | Arus Kas Masuk | 58.509.418.685,00 | 59.700.975.971,00 |
| **2** | Arus Kas Keluar | 58.509.418.685,00 | 59.720.391.802,00 |
| **Jumlah (1 – 2)** | | **0,00** | **(19.415.831,00)** |

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 merupakan selisih antara arus kas masuk dari penerimaan yang berasal dari pungutan dan/atau potongan pajak dengan arus kas keluar pembayaran atas pungutan dan/atau potongan pajak Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Kas Negara dan tidak dapat selisih karena Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyetor selurunya atas potongan pajak Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Kas Negara . yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

### E.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris merupakan penerimaan yang berasal dari pungutan dan/atau Potongan Pajak Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp58.509.418.685,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.191.557.286,00 atau sebesar 2,00% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp59.700.975.971,00.

### E.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari aktivitas transitoris merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas pungutan dan/atau potongan pajak Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) kepada kas negara. Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp58.509.418.685,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.210.973.117,00 atau sebesar 2,03% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp59.720.391.802,00.

**Saldo Akhir Kas**

Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.096.149.957,31 merupakan Saldo akhir Kas di BUD. Realisasi saldo awal di BUD dan Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp37.994.855.828,95 atau sebesar 59,36% dibandingkan dengan realisasi saldo awal di BUD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp64.002.802.277,40.

Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.091.005.786,26. Terdiri dari Kas di Kas Daerah Sebesar Rp47.631.944.465,30. Kas di Bendahara Penerimaan Sebesar Rp264.261.100,00. Kas di Dana BOS sebesar Rp80.811.221,71 dan Kas Lainnya Sebesar Rp113.988.999,25.

## F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada Tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo awal ekuitas Tahun 2021 sebesar Rp1.978.959.352.436,22 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2020. sesuai dengan Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (*audited*) Tahun Anggaran 2020;
2. Surplus/defisit - LO sebesar Rp13.028.450.689,97 merupakan surplus atas kegiatan operasional Tahun 2021 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas per 31 Desember 2021;
3. Selain adanya penambahan ekuitas dari surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Daerah Tahun 2021. terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi perubahan nilai pada beberapa pos laporan Tahun sebelumnya sebesar Rp139.522.871.845,17 dengan penjelasan sebagai berikut.

    a. Koreksi Tambah Atas Perubahan Nilai Aset Tetap sebesar Rp2.923.211.100,00 yang terdiri dari penambahan dan pengurangan ekuitas sebagai berikut.

1) Mutasi Tambah atas perubahan nilai Aset Tetap - Tanah Sebesar Rp14.764.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a) Pada Dinas Perhubungan Sebesar Rp14.764.000,00
2) Mutasi Tambah atas perubahan nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Sebesar Rp2.857.950.100,00 dengan riancian sebagai berikut:
   a) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp603.000.000,00;
   b) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.254.950.100,00.
3) Mutasi Tambah atas perubahan nilai Aset Tetap – Gedung dan Bangunan pada Dinas Sekretariat Daerah sebesar Rp49.907.000,00.
4) Mutasi Kurang atas Perubahan Nilai Aset Tetap – Peralatan Mesin Sebesar Rp3.691.657.901,00 yang terdiri dari:
   a) Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp766.669.334,00
   b) Pada Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp159.050.767,00
   c) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sebesar Rp46.941.000,00
   d) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp126.361.950,00
   e) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp10.428.000.00
   f) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp4.598.000.00
   g) Pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp147.500.000.00
   h) Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebesar Rp3.877.500,00
   i) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp8.107.000,00
   j) Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp117.388.000,00
   k) Dinas Kelautan dan Perikanan (DP3) sebesar Rp22.030.250,00
   l) Sekretariat Derah sebesar Rp2.270.512.100,00
   m) Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp4.125.000,00
   n) Pada Kecamatan Siantan sebesar Rp 16.005.000,00
   o) Pada Kecamatan Palmatak sebesar Rp4.840.000,00
   p) Pada Kecamatan Siantan Timur sebesar Rp3.960.000,00
   q) Pada Kecamatan Siantan Selatan sebesar Rp891.000,00
   r) Pada Kecamatan Siantan Utara sebesar Rp21.809.500,00
   s) Pada Kecamatan Jemaja Barat sebesar Rp3.492.500,00
   t) Pada Kecamatan Kute Siantan sebesar Rp24.002.000,00
   u) Pada Inspektorat sebesar Rp23.740.000,00
   v) Pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah sebesar Rp3.146.000,00
   w) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp19.371.000,00
   x) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp15.562.000,00

5) Mutasi Kurang atas Perubahan Nilai Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Sebesar Rp1.071.841.535,00 yang terdiri dari:

a) Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindutrian sebesar Rp1.021.934.535,00
b) Pada Sekretariat Derah sebesar Rp49.907.000,00

b. Koreksi Kurang Atas Perubahan Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp133.450.631.011,12

c. Penambahan Koreksi Nilai Persediaan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp11.219.931.860,00

d. Penambahan Koreksi Nilai Persediaan pada Dinas PUPR sebesar Rp12.244.628.988,00.

Saldo akhir Ekuitas Tahun 2021 sebesar Rp1.852.464.931.281,02 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2021. nilai saldo akhir Ekuitas Tahun 2021 ini telah sesuai dengan nilai Ekuitas yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2021.

## G. PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS. UNTUK ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN YANG MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

Bermula di Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berusaha sepenuhnya mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021. Pada Tahun Anggaran 2021 seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penganggaran menggunakan Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri.

Seiringan berjalanannya penggunaan Aplikasi SIPD Kemendagri masih terdapat kekurangan dalam penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban. dikarenakan jaringan serta sumber daya manusia yang masih baru terhadap aplikasi tersebut sehingga Kabupaten Kepulauan Anambas masih menggunakan secara beriiringan Aplikasi dari Tim Pengembangan Simda BPKP dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi. Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi. Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Serta besar harapan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dapat memperoleh capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian dan pengungkapan neraca pada pos-pos aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021. antara lain terdapat pengelompokan piutang pendapatan. piutang lainnya. penyisihan piutang dan beban dibayar dimuka. Pada pos aset tetap dicatat akumulasi penyusutan aset tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selama 1 (satu) tahun akuntansi pelaporan yang berakhir pada 31 Desember 2021 terdapat beberapa hal yang dapat Kami ungkapkan antara lain pada Tanggal 31 Desember 2021 telah diterbitkan SP2D Nomor 407/SP2D-LS/1.02.1.1 oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas SPM Nomor 407/SPM-LS/1.02.1.1 dari SKPD Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp16.363.620.00. Nilai tersebut tidak keluar dan/atau mengurangi Saldo dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Nomor Rekening 170.0000.01. Dan terdapat kekurangan Postingan dari Pihak Bank atas 2 (dua) SP2D antara lain SP2D Nomor 109/SP2D-LS/2.09.1.1 sebesar Rp63.000.00 dan SP2D Nomor 053/SP2D-LS/2.10.1.1 sebesar Rp1.000.000,00.

Sedangkan pada pos kewajiban dalam penerapan akuntansi basis akrual terdapat pengungkapan pengakuan utang beban yang tidak terbayar yang berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan. dan dibayar pada Tahun Anggaran berikutnya pada program dan kegiatan serta rekening obyek belanja yang sama dan akan dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya pada APBD Perubahan.

Untuk pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2021 yang berbasis *accrual* direklasifikasikan menjadi ekuitas.

## G.1 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan - LRA/ Pendapatan LAK

### G.1.1 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah - LRA / Pendapatan Asli Daerah LAK

**Tabel 267**
**Rincian Selisih Antara Pendapatan Asli Daerah LRA dengan LAK Tahun 2021**

(Dalam Rupiah)

| *No* | Uraian | LRA | LAK | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *1* | Penerimaan Pajak Daerah | 13.248.704.027,79 | 13.248.704.027,79 | 0,00 |
| *2* | Penerimaan Retribusi Daerah | 4.731.456.914,83 | 4.731.456.914,83 | 0,00 |
| *3* | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1.979.148.878,00 | 1.979.148.878,00 | 0,00 |
| *4* | Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah | 13.365.742.442,34 | 13.365.742.442,34 | 0,00 |
| | ***Jumlah*** | **33.325.052.262,96** | **33.325.052.262,96** | 0,00 |

Sampai dengan Per 31 Desember 2021 tidak terdapat selisih antara Pendapatan Asli Daerah - LRA dengan Pendapatan Asli Daerah – LAK.

## G.1.2 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Transfer - LRA / Pendapatan Transfer - LAK

**Tabel 268**

**Rincian Selisih Antara Pendapatan Transfer LRA dengan LAK Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | LRA | LAK | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *1* | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 624.335.477.614,00 | 624.335.477.614,00 | 0,00 |
| *2* | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya | 119.058.625.854,00 | 119.058.625.854,00 | 0,00 |
| *3* | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 42.160.395.659,00 | 42.160.395.659,00 | 0,00 |
| *4* | Bantuan Keuangan | 13.500.000.000,00 | 13.500.000.000,00 | 0,00 |
| | ***Jumlah*** | **799.054.499.127,00** | **799.054.499.127,00** | **0,00** |

Sampai dengan Per 31 Desember 2021 tidak terdapat selisih antara Pendapatan Transfer - LRA dengan Pendapatan Transfer – LAK.

## G.1.3 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA / Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LAK

**Tabel 269**

**Rincian Selisih Antara Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA dengan LAK Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | LRA | LAK | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *1* | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 13.183.312.366,22 | 13.183.312.366,22 | 0,00 |
| | ***Jumlah*** | **13.183.312.366,22** | **13.183.312.366,22** | **0,00** |

Sampai dengan Per 31 Desember 2021 tidak terdapat selisih antara Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA dengan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LAK.

## G.2.1 Pengungkapan Perbedaan Belanja Operasi - LRA/ Belanja Operasi - LAK

**Tabel 270**

**Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Operasi - LRA dengan LAK Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | LRA | LAK | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *1* | Belanja Pegawai | 274.063.269.975,54 | 274.063.269.975,54 | 0,00 |
| *2* | Belanja Barang dan Jasa | 271.300.030.814,57 | 271.300.030.814,57 | 0,00 |
| *3* | Belanja Hibah | 14.400.218.918,00 | 14.400.218.918,00 | 0,00 |
| *4* | Belanja Bantuan Sosial | 134.715.000,00 | 134,715,000.00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Jumlah*** | **559.898.234.708,11** | **559.898.234.708,11** | **0,00** |

Sampai dengan Per 31 Desember 2021 tidak terdapat selisih antara Belanja Operasi - LRA dengan Belanja Operasi - LAK.

## G.2.2 Pengungkapan Perbedaan Belanja Tidak Terduga - LRA/ Belanja Tidak Terduga - LAK

**Tabel 271**

**Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Tidak Terduga - LRA dengan LAK Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | LRA | LAK | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *1* | Belanja Tidak Terduga | 878.745.392,00 | 878.745.392,00 | 0,00 |
| | ***Jumlah*** | **878.745.392,00** | **878.745.392,00** | **0,00** |

Sampai dengan Per 31 Desember 2021 tidak terdapat selisih antara Belanja Tidak Terduga - LRA dengan Belanja Tidak Terduga - LAK.

## G.2.3 Pengungkapan Perbedaan Belanja Transfer - LRA dengan Belanja Transfer - LAK

Pengungkapan Belanja Transfer – LRA yaitu akun belanja bagi hasil dan akun belanja bantuan keuangan dengan Transfer Bantuan Keuangan Keuangan - LAK dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 272**

**Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Transfer - LRA dengan LAK Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | LRA | LAK | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *1* | Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan | 103.730.745.616,00 | 103.730.745.616,00 | 0,00 |
| | ***Jumlah*** | **103.730.745.616,00** | **103.730.745.616,00** | **0,00** |

Sampai dengan Per 31 Desember 2021 tidak terdapat selisih antara Belanja Transfer - LRA dengan Belanja Transfer - LAK

## G.3 Pengungkapan Perbedaan antara Belanja Modal - LRA dengan Belanja Modal - LAK

**Tabel 273**

**Rincian Selisih Antara Perbedaan Belanja Modal - LRA dengan LAK Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | LRA | LAK | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *1* | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *2* | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 33.331.184.690,10 | 33.331.184.690,10 | 0,00 |
| *3* | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 44.443.379.101,50 | 44.443.379.101,50 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *4* | Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi | 63.046.577.745,69 | 63.046.577.745,69 | 0,00 |
| *5* | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.142.044.928,83 | 2.142.044.928,83 | 0,00 |
| | ***Jumlah*** | **142.963.186.466,12** | **142.963.186.466,12** | **0,00** |

Sampai dengan Per 31 Desember 2021 tidak terdapat selisih antara Belanja Belanja Moda - LRA dengan Belanja Modal - LAK.

### G.4.1 Pengungkapan Perbedaan antara Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - LRA dengan Aktivitas Pendanaan - LAK

**Tabel 274**

**Rincian Selisih Antara Perbedaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - LRA dengan LAK Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | LRA | LAK | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *1* | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 902.904.255,00 | 902.904.255,00 | 0,00 |
| | ***Jumlah*** | **902.904.255,00** | **902.904.255,00** | **0,00** |

Sampai dengan Per 31 Desember 2021 tidak terdapat selisih antara Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir kepada Kelompok Masyarakat) - LRA dengan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada Aktivitas Pendanaan - LAK.

### G.4.2 Pengungkapan Perbedaan antara Pemberian Pinjaman Daerah - LRA dengan Aktivitas Pendanaan - LAK

**Tabel 275**

**Rincian Selisih Antara Perbedaan Pemberian Pinjaman Daerah - LRA dengan LAK Tahun 2021**

**(Dalam Rupiah)**

| *No* | Uraian | LRA | LAK | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *1* | Pemberian Pinjaman Daerah | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |
| | ***Jumlah*** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **0,00** |

Sampai dengan Per 31 Desember 2021 tidak terdapat selisih antara Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir kepada Kelompok Masyarakat) - LRA dengan Pemberian Pinjaman Daerah pada Aktivitas Pendanaan - LAK.

## H. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan yang dapat disampaikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021, yang secara langsung mempengaruhi pengguna laporan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut.

Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berangkat dari peraturan yang legal dan formal, serta semangat masyarakat untuk melakukan perubahan akan keberadaan sistem pemerintahan di daerah, maka muncul berbagai gagasan, keinginan, pendapat dan tuntutan di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya. Tuntutan yang datang dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas itu adalah untuk mengatur sendiri

pemerintahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai otonomi daerah. yang terus di gaungkan di masing-masing daerah. Salah satunya daerah kepulauan yang turut menggaungkan pemekaran perubahan untuk mengelola pemerintahan sendiri yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas agar daerahnya dibentuk menjadi kabupaten pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah tersebut yang sebelumnya di bawah wilayah hukum pemerintahan Kabupaten Natuna.

Kabupaten Kepulauan Anambas yang terletak di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sebelum mengalami perubahan status menjadi kabupaten yang merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari tiga pulau besar tempat kedudukan kecamatan yaitu Pulau Siantan untuk Kecamatan Siantan dan Kecamatan Siantan Selatan, Pulau Jemaja untuk Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Jemaja yaitu Kecamatan Jemaja Barat dan Pulau Matak untuk Kecamatan Palmatak dan Kecamatan yang dimekarkan menjadi Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siatan. Sehingga Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 10 (sepuluh) Kecamatan antara lain; Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Kute Siantan.

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas melalui pemekaran daerah ini merupakan suatu bentuk protes masyarakat Kepulauan Anambas kepada Pemerintah atas ketidakmerataan pembangunan dan minimnya fasilitas publik di Daerah yang kaya sumber daya alam dan migas tersebut. Beranjak dari hal tersebut muncul suatu keinginan untuk membentuk kabupaten baru dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri secara mandiri sesuai dengan potensi yang ada, sehingga tidak terikat lagi dengan Kabupaten Natuna. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau. yang ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2008 melalui proses pemekaran wilayah. Proses pemekaran menjadikan Kepulauan Anambas sebagai sebuah kabupaten melalui perjalanan yang cukup panjang, dimulai ketika Kepulauan Riau dibentuk menjadi sebuah Propinsi pada Tahun 2002. Dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas terjadi dinamika politik dan proses tarik ulur kepentingan antara elit-elit politik lokal daerah Anambas dengan kabupaten induk sehingga perjalanan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas sempat terhenti karena terkendala beberapa hal. Mulai dari penolakan kabupaten induk, tertunda pembahasan pembentukan dikarenakan kelengkapan persyaratan administrasi, sampai pada sengketa penetapan letak ibukota kabupaten dan akhirnya daerah yang mempunyai potensi ekonomi kandungan laut dan migas ini ditetapkan menjadi kabupaten. Pemekaran Kepulauan Anambas menjadi kabupaten dimaksud untuk mendekatkan rentang kendali dan memperpendek jalur birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mengingat kondisi Kepulauan Anambas yang cukup jauh dari Kabupaten Natuna yaitu sekitar 15 jam perjalanan kapal laut dan lebih dekat dengan Ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Di samping sarana transportasi yang terbatas yang dikelilingi oleh lautan yang luas, dimana pada musim-musim tertentu sulit ditempuh dengan menggunakan kapal laut dan belum tersedianya transportasi udara sampai saat ini untuk menuju ibukota Kabupaten Natuna dalam rangka mengakses pelayanan publik. Dukungan untuk keinginan menyelenggarakan pemerintahan sendiri merupakan hal usaha masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan.

Aspirasi pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, kaum intelektual, ulama, para pengusaha dan wakil rakyat serta masyarakat awam melalui Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) yang merupakan wadah perjuangan masyarakat anambas dalam pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas. Akhirnya

setelah lebih dari lima Tahun cita-cita untuk memiliki, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan potensi, kemampuan yang didasarkan pada kearifan lokal terwujud sudah dengan ditetapkannya Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 24 Juli 2008. Terdiri dari 7 Kecamatan yaitu: Siantan, SiantanTimur, Siantan Tengah, Siantan Selatan, Palmatak, Jemaja dan Jemaja Timur, dua kelurahan dan 34 desa (termasuk di dalamnya dua desa persiapan). Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Sri Tanjung, Desa Tarempa Barat Daya, Desa Lidi, Desa Liuk, Desa Teluk Sunting, Desa Serat, Desa Air Putih, Desa Temburun, Desa Air Bini, Desa Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar, Desa Payamaram, Desa Piasan, Desa Belibak, Desa Berapit dan Desa Landak maka saat ini jumlah Desa pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 52 Desa.

Saat ini Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Bapak Abdul Haris. S.H. sebagai Bupati Kepulauan Anambas dan Bapak Wan Zuhendra sebagai Wakil Bupati untuk Periode ke II Masa Bhakti 2021-2024. Pada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat, maka bertambah 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat. Pada Tahun 2019 dilakukan pemekaran lagi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Kute Siantan sehingga Jumlah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 10 (sepuluh) Kecamatan.

Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. terletak antara 2º10’0”-3º40’0” LU s/d 105º15’0”-106º45’0” BT berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2008. Sebagai kabupaten yang terletak di wilayah terdepan Indonesia. Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga lainnya yaitu Laut Natuna Utara /Vietnam di sebelah Utara, Kepulauan Tambelan di sebelah Selatan, Laut Natuna Utara /Malaysia di sebelah Barat, Laut Natuna di sebelah Timur.

Sebagai wilayah Kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan Laut Natuna Utara. Dari total luas Kabupaten Kepulauan Anambas ± 46.664.15 km² hanya 607.72 km² (1,3%) yang merupakan daratan, selebihnya ± 46.056.43 km² (98,7%) merupakan lautan. Secara administratif Kabupaten Kepulauan Anambas terbagi dalam sepuluh kecamatan, dua kelurahan dan 52 (lima puluh dua) desa meliputi:

- Kecamatan Siantan dengan ibu kota Tarempa, terdiri atas Kelurahan Tarempa, Desa Tarempa Barat, Desa Tarempa Timur, Desa Tarempa Selatan, Desa Pesisir Timur, Desa Barat Daya dan Desa Sri Tanjung;
- Kecamatan Siantan Selatan dengan ibu kota Air Bini, terdiri dari Desa Tiangau, Desa Mengkait, Desa Lingai, Desa Kiabu, Desa Telaga, Desa Telaga Kecil dan Desa Air Bini;
- Kecamatan Siantan Timur dengan ibu kota Nyamuk, terdiri atas Desa Nyamuk, Desa Batu Belah, Desa Munjan, Desa Temburun, Desa Serat dan Desa Air Putih;
- Kecamatan Siantan Tengah dengan ibu kota Air Asuk, terdiri atas Desa Teluk Siantan, Desa Air Asuk, Desa Air Sena, Desa Lidi, Desa Teluk Sunting dan Desa Liuk;
- Kecamatan Palmatak dengan ibu kota Tebang Ladan, terdiri dari Desa Piabung, Desa Tebang, Desa Ladan, Desa Langir, Desa Putik, Desa Candi dan Desa Belibak;

- Kecamatan Jemaja dengan ibu kota Letung, terdiri dari satu Kelurahan, Desa Rewak, Desa Mampok, Desa Air Biru, Desa Batu Berapit dan Desa Landak dan;
- Kecamatan Jemaja Timur dengan ibu kota Ulu Maras, terdiri dari Desa Ulu Maras, Desa Kuala Maras, Desa Genting Pulur dan Desa Bukit Padi.
- Kecamatan Jemaja Barat ibu kota Impol terdiri dari Desa Impol, Desa Sunggak dan Desa Keramut;
- Kecamatan Siantan Utara ibu kota Mubur terdiri dari Desa Mubur, Desa Bayat dan Desa Piasan;
- Kecamatan Kute Siantan ibu kota Payalaman terdiri dari Desa Payalaman, Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar dan Desa Payamaram.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Sri Tanjung, Desa Tarempa Barat Daya, Desa Lidi, Desa Liuk, Desa Teluk Sunting, Desa Serat, Desa Air Putih, Desa Temburun, Desa Air Bini, Desa Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar, Desa Payamaram, Desa Piasan, Desa Belibak, Desa Berapit dan Desa Landak maka saat ini jumlah Desa pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 52 Desa.

Ditinjau jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten, maka kecamatan terjauh adalah Jemaja dengan jarak ± 38.70 mil, disusul dengan Jemaja Timur dengan jarak ± 37.37 mil. Di ukur dari Ibukota Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang maka jarak terjauh adalah Kecamatan Palmatak (± 208.41 mil) dan Siantan Tengah (± 205.16 mil). Untuk melakukan pergerakan antar wilayah kecamatan saat ini melalui transportasi laut. untuk melakukan perjalanan ke provinsi dan kabupaten lain dapat dilakukan melalui transportasi laut dan udara. Sebagai kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga, jarak Tarempa ke negara tetangga terdekat yaitu Singapura adalah ± 202.29 mil, ke Johor (Malaysia) ± 205.97 mil dan Kuching (Malaysia) ± 318.91 mil, sedangkan jarak Tarempa ke ibu kota Jakarta ± 640.72 mil.

## I. Aplikasi Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah

Aplikasi pendukung dalam menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 antara lain:

### I.1 Aplikasi Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Tahun 2021 merupakan Tahun dimulainya penganggaran dengan menggungakan Aplikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam sisi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Peratanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah. Dikarenakan pada Tahun 2021 merupakan tahun dimulainya penggunaan Aplikasi SIPD tetapi masih terdapat kekurangan yang terjadi dilapangan yaitu Kabupaten/Kota sebagai pengguna dikarenakan server aplikasi tersebut terpusat di Kementerian Dalam Negeri sehingga sangat ketergantungan dengan jaringan yang ada, sehingga Kabupaten Kepulauan Anambas dalam sisi Perencanaan dan Penganggaran menggunakan Aplikasi SIPD Kemendagri beriringan dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tetap menggunakan Aplikasi dari Tim Pengembangan Simda BPKP yang penggunaan lokal di Kabupaten Kepulauan Anambas bersamaan server di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.

## I.2 Aplikasi SIMDA Keuangan

Aplikasi SIMDA Keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai Tahun Anggaran 2011 sampai dengan sekarang. Aplikasi SIMDA Keuangan yang digunakan telah mengakomodir dalam bentuk pengganggaran, penatausahaan akuntansi, pelaporan dan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada periode anggaran.

Aplikasi SIMDA Keuangan dipergunakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai client dengan cara online menuju ke database server yang ada diruangan server, terkecuali SKPD yang berada di luar Ibu Kota Kabupaten antara lain Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur dan Kecamatan Siantan Selatan dengan melakukan export dan import data dari client ke server atau sebaliknya. Export dan import yang dilakukan dalam bentuk pelaporan dan penatausahaan keuangan.

Tim Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan selalu melakukan pengembangan-pengembangan dengan cara *update* data yang mempermudah pengguna aplikasi dalam mendukung terwujudnya akuntansi berbasis akrual.

## I.3 Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah

Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai akhir Tahun Anggaran 2011 sampai sekarang. Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan telah mengakomodir dalam bentuk kebijakan penyusutan dan umur aset tetap, kebijakan akuntansi dan pelaporan aset tetap.

Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) dipergunakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai client dengan cara online menuju ke database server yang ada di ruangan server, terkecuali SKPD yang berada di luar Ibu Kota Kabupaten antara lain Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur dan Kecamatan Siantan Selatan dengan melakukan *expot* dan *import* data dari *client* ke server atau sebaliknya. Tim Pengembangan Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) melakukan pengembangan-pengembangan dengan cara update data yang mempermudah pengguna aplikasi dalam mendukung pencatatan dan pelaporan aset tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

## I.4 Aplikasi SIMGAJI TASPEN

Aplikasi SIMGAJI TASPEN yang dikeluarkan oleh PT TASPEN. Tbk. dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai Agustus 2015 sampai sekarang. Aplikasi SIMGAJI Taspen yang digunakan telah mengakomodir dalam bentuk pelaporan ke Kementerian Keuangan terkait dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pelaporan Iuran Wajib Pegawai (IWP), Pemotongan PPh 21, Asuransi Kesehatan dan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri.

Aplikasi SIMGAJI TASPEN dipergunakan secara terpusat di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam penginputan dan pencetakkan daftar gaji seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan pangkat dan golongan yang ada dimasing-masing organisasi/SKPD. Penginputan data perubahan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dilakukan setiap awal bulan berjalan dan pencetakan daftar gaji bulan berjalan dilakukan setiap tanggal 25 bulan berjalan, daftar gaji yang telah dicetak dapat diambil oleh bendahara pengeluaran SKPD di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan pengajuan pembayaran gaji PNSD diawal bulan dengan batas pengajuan pada tanggal 5 bulan berjalan, sehingga mempermudah staf gaji untuk melakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga.

## I.5 Aplikasi *Income Point*

Aplikasi Income Point dikeluarkan oleh konsultan dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dari Tahun 2011 sampai dengan saat ini. Aplikasi Income Point digunakan untuk pencatatan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah.

## I.6 Aplikasi Anambas *Single Information System*

Aplikasi Anambas *Single Information System* dirancang oleh Aparatur Sipil Negara pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas bertujuan untuk Memenuhi tantangan perkembangan teknologi dalam pengelolaan keuangan yang berbasis aplikasi. Aplikasi yang terintegrasi dari proses perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan, mendukung Implementasi Transaksi Non Tunai dan SP2D *Online* yang terintegrasi ke Aplikasi *Payment system* pada perbankan (Bank Riau Kepri) yang bermanfaat untuk memastikan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri, pengendalian internal pengelolaan kas meningkat, informasi posisi kas secara real time dan proses tutup buku lebih cepat dan handal serta kedisiplinan pengelolaan keuangan meningkat.

## I.7 Aplikasi Monitoring Transaksi

Aplikasi Monitoring Transaksi dari Bank Riau Kepri digunakan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melakukan monitoring Keluar dan Masuk Dana pada Kas Daerah maupun pada rekening Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

## I.8 Peristiwa-Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 belum diterima seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 221 Tahun 2022 tentang Perhitungan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, sebesar Rp12.324.204.874,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 276**
**Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021**

(Dalam Rupiah)

| *No.* | DBH Provinsi T.A. 2021 | Alokasi Pergub No.221 | Realisasi RKUD | Yang Akan Di Salur |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *1* | PKB | 9.764.306.538,00 | 6.950.051.365,00 | 2.814.255.173,00 |
| *2* | BBN – KB | 5.008.966.956,00 | 3.522.857.143,00 | 1.486.109.813,00 |
| *3* | PBB – KB | 22.219.553.177,00 | 14.205.388.108,00 | 8.014.165.069,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pajak Air Permukaan | 32.880.364,00 | 23.205.545,00 | 9.674.819,00 |
| | ***JUMLAH*** | 37.025.707.035,00 | 24.701.502.161,00 | 12.324.204.874,00 |

## I.9 PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi dasar dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Akhir kata, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 dapat memenuhi kewajiban kami dalam melaporkan dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para *stakeholders* dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS.**

**ABDUL HARIS**

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| No. | Uraian Rincian Piutang | Tahun Pengakuan Piutang | Saldo Awal Piutang | Penambahan Piutang | Pengurangan Piutang | Saldo Akhir Piutang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 + 5 - 6 |
| 1 | Piutang PBBP2 (Pokok) | 2022 | Rp 1.215.728.700,00 | Rp - | Rp - | Rp 1.215.728.700,00 |
| 2 | Piutang Retribusi | 2022 | Rp 8.460.000,00 | Rp - | Rp - | Rp 8.460.000,00 |
| 3 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 2022 | Rp - | Rp 125.347.854.321,00 | Rp - | Rp 125.347.854.321,00 |
| 4 | Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 2022 | Rp 12.324.204.874,00 | Rp - | Rp - | Rp 12.324.204.874,00 |
| 5 | Piutang PBBP2 (Denda) | 2022 | Rp 429.553.532,00 | Rp - | Rp - | Rp 429.553.532,00 |
| 6 | Piutang Lainnya | 2022 | Rp 4.124.631.891,32 | Rp - | Rp - | Rp 4.124.631.891,32 |
| **Jumlah** | | | Rp 18.102.578.997,32 | Rp 125.347.854.321,00 | Rp - | Rp 143.450.433.318,32 |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

## DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

**TAHUN ANGGARAN 2022**

| No. | Tahun Penyertaan Modal | Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga | Dasar Hukum Penyertaan | Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | Jumlah Penyertaan Modal Daerah | Jumlah Modal yang telah disertakan s.d Awal Tahun | Penyertaan Modal Tahun Ini | Jumlah Modal yang telah disertakan s.d Akhir Tahun Ini | Sisa Modal yang belum disertakan | Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini | Jumlah Modal (Investasi) yang diterima kembali Tahun Ini | Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan s.d Tahun Ini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=6-9 | 11 | 12 | 13=9-12 |
| 1 | 2012 | PT. BPD Bank Riau Kepri | Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2012 | Investasi Jangka Panjang | Rp 7.500.000.000,00 | Rp 7.500.000.000,00 | Rp 323.700.000,00 | Rp 7.823.700.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - |
| 2 | 2013 | Perusahaan Daerah Anambas Sejahtera | Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2012 | Investasi Jangka Panjang | Rp 6.000.000.000,00 | Rp 6.000.000.000,00 | Rp - | Rp 6.000.000.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - |
| **J u m l a h** | | | | | Rp 13.500.000.000,00 | Rp 13.500.000.000,00 | Rp 323.700.000,00 | Rp 13.823.700.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 03 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**DAFTAR REKAPTULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| No. | Jenis Aset Tetap Daerah | Saldo Akhir 2021 | Perkiraan Penambahan Tahun 2022 | Perkiraan Pengurangan Tahun 2022 | Perkiraan Saldo Akhir 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |
| 1 | Tanah | Rp 173.601.524.658,00 | Rp 48.205.800,00 | Rp - | Rp 173.649.730.458,00 |
| 2 | Peralatan Dan Mesin | Rp 383.628.984.631,10 | Rp 30.996.483.488,00 | Rp - | Rp 414.625.468.119,10 |
| 3 | Gedung Dan Bangunan | Rp 772.073.734.567,88 | Rp 35.396.879.457,00 | Rp - | Rp 807.470.614.024,88 |
| 4 | Jalan, Irigasi Dan Jaringan | Rp 1.066.886.084.146,45 | Rp 55.011.673.749,00 | Rp - | Rp 1.121.897.757.895,45 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | Rp 14.700.612.035,16 | Rp 1.102.208.799,00 | Rp - | Rp 15.802.820.834,16 |
| 6 | Kontruksi Dalam Pekerjaan | Rp 312.969.379.347,69 | Rp - | Rp - | Rp 312.969.379.347,69 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan | Rp (870.236.654.494,34) | Rp - | Rp - | Rp (870.236.654.494,34) |
| **J u m l a h** | | **Rp 1.853.623.664.891,94** | **Rp 122.555.451.293,00** | **Rp -** | **Rp 1.976.179.116.184,94** |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**DAFTAR REKAPTULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| No. | Jenis Aset Lainnya | Saldo Akhir 2021 | Perkiraan Penambahan Tahun 2022 | Perkiraan Pengurangan Tahun 2022 | Perkiraan Saldo Akhir 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4-5 |
| 1 | Tuntutan Ganti Rugi | Rp 65.134.050,00 | Rp - | Rp - | Rp 65.134.050,00 |
| 2 | Aset Tak Berwujud | Rp 46.864.204.544,00 | Rp - | Rp - | Rp 46.864.204.544,00 |
| 3 | Aset Lain-Lain | Rp 62.461.745.762,71 | Rp - | Rp - | Rp 62.461.745.762,71 |
| **J u m l a h** | | **Rp 109.391.084.356,71** | **Rp -** | **Rp -** | **Rp 109.391.084.356,71** |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

# DAFTAR DANA CADANGAN

**TAHUN ANGGARAN 2021**

| No. | Tujuan Pembentukan Dana Cadangan | Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan | Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan | Saldo Awal | Transfer dari Kas Daerah | Transfer ke Kas Daerah | Saldo Akhir | Sisa Dana yang Belum Dicadangkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7+8 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | |

N I H I L

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**DAFTAR PINJAMAN DAERAH**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| No. | Sumber Pinjaman Daerah | Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi | Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi | Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas) | Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) | Persentase Bunga Pinjaman % | Tujuan Penggunaan Pinjaman | Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun Ini | | Jumlah Sisa Pembayaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Pokok Pinjaman Daerah (Rp) | Bunga (Rp) | Pokok Pinjaman Daerah (Rp) | Bunga (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | **N I H I L** | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | |

Bupati Kepulauan Anambas

ABDUL HARIS